
2021

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT



ENHANCING CONNECTIVITY THROUGH SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

DISCLAIMER

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil kegiatan operasional, proyeksi usaha yang ditampilkan dalam bab analisis dan pembahasan manajemen, rencana, strategi, kebijakan serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis.

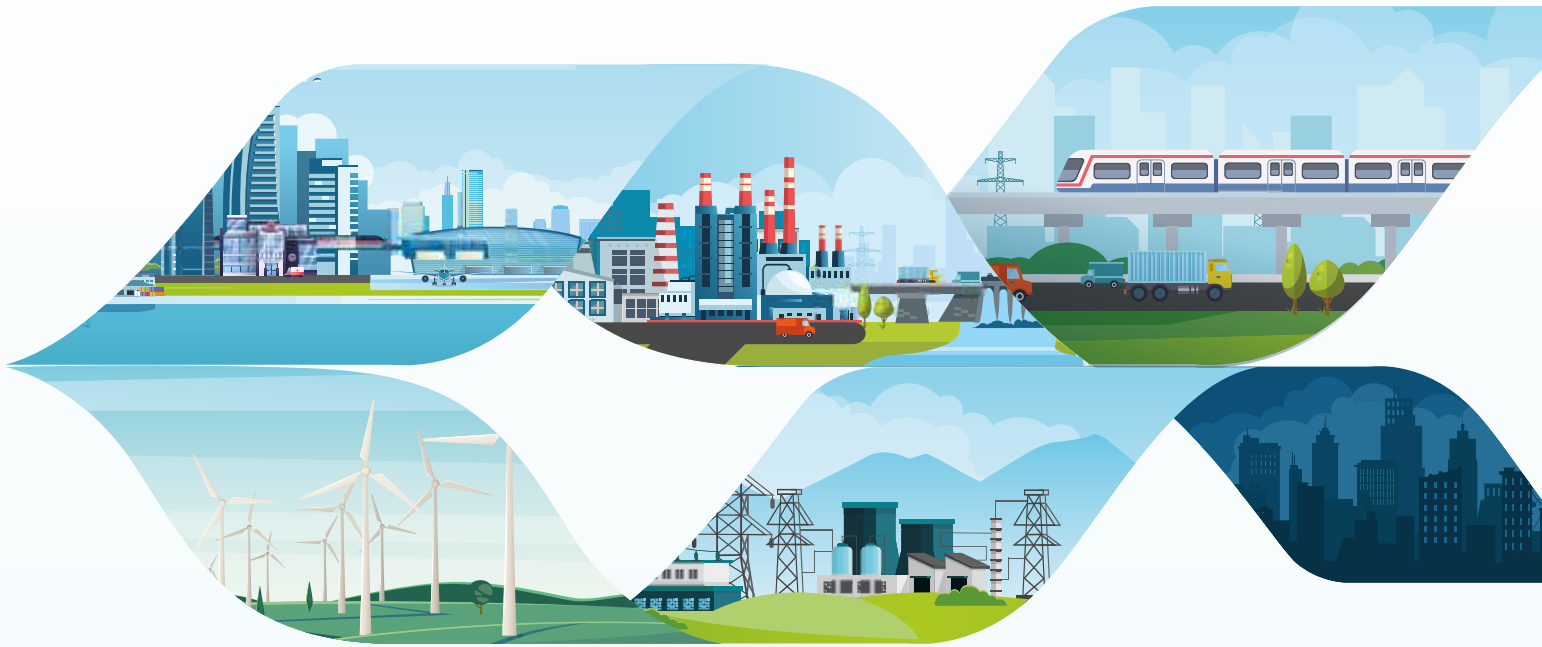
Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perseroan serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin adanya hasil tertentu yang pasti tercapai berdasarkan informasi yang disajikan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT Indonesia Infrastructure Finance yang menjalankan bisnis di bidang pengembangan dan pembiayaan proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Ada kalanya kata "IIF" dan "Perusahaan" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Indonesia Infrastructure Finance secara umum.

This Annual Report contains statements on financial conditions, operational results, projections on business presented in the management discussion and analysis chapter, plans, strategies, policies, as well as objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws and regulations, excluding historical matters.

Such statements are subject to prospective risks, uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results. Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events related to the Company and the business environment where the Company conducts its business. The Company offers no guarantee that all information presented herein will bring about specific results as expected.

This Annual Report also contains the word "Company", hereinafter referred to as PT Indonesia Infrastructure Finance, as the company that operates business in the development and financing of commercially viable infrastructure projects. The word "IIF" and "the Company" are occasionally used to simplify and refer to PT Indonesia Infrastructure Finance in general.



➤ **ENHANCING CONNECTIVITY** THROUGH SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Di tengah situasi pandemi yang berkepanjangan, IIF tetap memberikan kontribusi ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Dengan menciptakan aspek-aspek yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingannya, IIF telah berhasil menghadirkan produk-produk inovatif, membangun pendekatan kreatif untuk implementasi keuangan berkelanjutan serta memperluas portofolio pembiayaan baru di sektor layanan kesehatan, pusat data, dan transportasi massal.

Semua pencapaian dan kepercayaan yang kami raih menandai kesungguhan IIF dalam meningkatkan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan merata di berbagai wilayah Indonesia, serta turut berperan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Despite the ongoing pandemic, IIF continues to provide economic, social and environmental contributions in accelerating the development of national infrastructure. Creating sustainable aspects for its stakeholders, IIF has successfully delivered innovative products, established creative approaches for sustainable finance implementation as well as expanded to new financing portfolio sectors in health care, data center and mass transportation.

This, as well as many other achievements during the year, underlines IIF's continuous commitment to improving connectivity through quality, sustainable and equitable infrastructure developments throughout the country, as well as contributing to inclusive national economic growth.

DAFTAR ISI

Table of Contents

01

IKHTISAR KINERJA

Performance Highlights

Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights	8
Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Highlights Charts	10
Ikhtisar Saham Share Highlights	10
Ikhtisar Obligasi dan Efek Lainnya Overview of Bonds and Other Securities	11
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	11
Peristiwa Penting Event Highlights	12

Laporan kepada Pemangku Kepentingan

Reports to Stakeholders

Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners	16
Laporan Direksi Report of the Board of Directors	22

Profil Perusahaan

Company Profile

Informasi Perseroan Company Information	32
Sekilas Perusahaan Company at a Glance	33
Jejak Langkah Milestones	34
Logo Perusahaan Company Logo	37
Visi dan Misi Vision and Mission	38
5 Pilar Strategi Bisnis Utama 5 Main Business Strategy Pillars	39
Bidang Usaha Line of Business	40
Sektor Pembiayaan Infrastruktur Infrastructure Financing Sector	42
Portofolio IIF 2021 IIF's Portfolio in 2021	44
Wilayah Operasional Areas of Operation	48
Struktur Organisasi Organization Structure	50
Profil Direksi The Board of Directors Profile	51
Profil Komite Eksekutif Executive Committee Profile	56

02

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Profil Dewan Komisaris The Board of Commissioners Profile	57
Demografi Karyawan Employee Demography	68
Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Competency Development	70
Biaya Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021 Training and Employee Competency Development Expenses in 2021	71
Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	72
Informasi Pemegang Saham Utama Main Shareholders Information	73
Daftar Entitas Anak & Struktur Grup Perusahaan List of Subsidiaries & Company Group Structure	75
Kronologi Pencatatan Saham Share Listing Chronology	75
Kronologi Pencatatan Obligasi Bond Listing Chronology	75
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Listing	77
Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Name and Address of Supporting Institutions and/or Professions	78
Informasi pada Situs Web Perusahaan Information on the Company's Website	79
Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Eksekutif, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Training/Education for the Board of Commissioners, Directors, Executive Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit	80
Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri Membership in Association in the Industry	87
Perubahan Komposisi Direksi Changes in the Composition of the Board of Directors	87
Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Changes in the Composition of the Board of Commissioners	87
Tinjauan Pendukung Bisnis	
Overview on Business Support	
Sumber Daya Manusia Human Resources	90
Teknologi Informasi Information Technology	97
Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa System and Procedures for the Procurement of Goods and Services	101

03

TINJAUAN UNIT PENDUKUNG BISNIS

Overview on Business Support

Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis

Tinjauan Ekonomi Review of the Economy	108
Tinjauan Industri Pembiayaan Infrastruktur Infrastructure Financing Industry Overview	110
Tinjauan Bisnis Business Review	111
Tinjauan Keuangan Financial Review	121
Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility	128
Struktur Modal Capital Structure	129
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Expenditure	130
Investasi Barang Modal Tahun 2021 Capital Expenditure in 2021	130
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Facts and Material Information and Subsequent to Financial Statement Date	130
Prospek Usaha Business Prospect	130
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	133
Kebijakan Dividen Dividend Policy	133
Program Kepemilikan Saham Karyawan atau Manajemen (ESOP/MSOP) Employee or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)	134
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Use of Public Offering Proceeds	134
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Afiliasi Material Information on Transaction That Contains Conflict of Interest and/or Affiliated Transaction	135
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition and Debt/Capital Restructuring	135
Pengaruh Perubahan Regulasi Pemerintah terhadap Perseroan The Impact of Changes of Government Regulation the Company	135

04

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion & Analysis

Perubahan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2021 Changes In Financial Accounting Standards 2021	136
Ketaatan Sebagai Wajib Pajak Compliance as a Taxpayer	137
Informasi Kelangsungan Usaha Information On Business Sustainability	137

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan Legal Basis of Corporate Governance Implementation	140
Prinsip-Prinsip GCG dan Penerapannya GCG Principles and Its Implementation	143
Struktur dan Mekanisme GCG GCG Structure and Mechanism	144
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	145
Direksi Board of Directors	147
Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2021 Report of the Implementation of the BoD Duties in 2021	154
Program Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2021 Board of Directors' Competence Development Program in 2021	154
Sesi Induksi bagi Direktur Baru tahun 2021 Induction Session of New Director in 2021	155
Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya Assessment of the Committees under the BoD and the Basis of Assessment	155
Penilaian Direksi Terkait Penilaian atas Kinerja UAI dan Kinerja Direktorat Manajemen Risiko Tahun 2021 BoD Assessment on the Assessment of the Performance of the Internal Audit Unit (UAI) and the Risk Management Directorate in 2021	155
Dewan Komisaris Board of Commissioners	156
Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Tahun 2021 BoC Competence Development Program for 2021	162
Sesi Induksi bagi Komisaris Baru Induction Session of New Commissioners	163
Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya Assessment of Performance of the Committees under BoC and the Basis of Assessment	163
Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris BoD-BoC Joint Meetings	163

05

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Komisaris Independen Independent Commissioner	164
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Diversity of Composition of the BoC and BoD	165
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of the BoC and BoD	168
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BoC and BoD Remuneration	170
Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali Disclosure of Affiliation Relationship of BoC, BoD and the Controlling Shareholders	171
Organ Pendukung Dewan Komisaris BoC Supporting Organs	172
Organ Pendukung Direksi BoD Supporting Organs	190
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	207
Unit Audit Internal Internal Audit Unit	208
Akuntan Publik Public Accountant	213
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	215
Manajemen Risiko Risk Management	217
Perkara Penting Tahun 2021 Important Legal Cases in 2021	227
Sanksi Administratif Administrative Sanction	227
Akses Informasi dan Data Perseroan Access to Company Information and Data	227
Kode Etik dan Budaya Perseroan Company Ethic and Corporate Culture	229
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen Employee and/or Management Share Ownership Program	233
Kebijakan Pengungkapan Informasi Lainnya Policy on Disclosure of Other Information	233
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System	234
Praktik <i>Bad Governance</i> Bad Governance Practice	236
Kebijakan Anti-Korupsi Anti Corruption	237

06

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab

Sosial & Lingkungan

Corporate Social Responsibility

Komitmen Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Commitment to the Implementation of Corporate Social Responsibility	250
Dasar Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Basis for the Implementation of the Corporate Social Responsibility Program	251
Praktik Standar Keberlanjutan bagi Proyek Infrastruktur Standard Sustainability Practices for Infrastructure Projects	251
Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan baik yang Merupakan Kewajiban maupun yang Melebihi Kewajiban serta Program yang Melebihi Tanggung Jawab Minimal Scope of Corporate Social Responsibility as Liability or One that Exceeds Liability and Programs that Exceeds Minimum Responsibilities	252
Anggaran TJSL Tahun 2021 2021 CSR Budget	253
Kaleidoskop Kegiatan TJSL Tahun 2021 CSR Activities In 2021	253
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Hak Asasi Manusia Corporate Social Responsibility Related to Human Rights	254
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Operasi yang Adil Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations	257
Pembahasan Lengkap Mengenai Kebijakan dan Kegiatan TJSL Tahun 2021 A More Detailed Discussion of CSR Policies and Activities in 2021	259

Pernyataan Tanggung

Jawab Laporan Tahunan

2021 oleh Dewan

Komisaris dan Direksi

Statements of Accountability of 2021 Annual Report by the Board of Commissioners and Board of Directors

Laporan Keuangan

Financial Report

DAFTAR SINGKATAN

List of Abbreviations

Singkatan Abbreviation	Nama Lengkap	Full Name
ADB	Asian Development Bank	Asian Development Bank
ALCO	Komite Aset dan Liabilitas	Asset and Liability Committee
BBM	Bahan Bakar Minyak	Petroleum
BEI	Bursa Efek Indonesia	Indonesia Stock Exchange
BOC-IC	Komite Investasi Dewan Komisaris	Board of Commissioners Investment Committee
BOD-IC	Komite Investasi Direksi	Board of Directors Investment Committee
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	State Owned Enterprise
DEG	Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH	Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
HRC	Komite Sumber Daya Manusia	Human Resources Committee
IDX	Bursa Efek Indonesia	Indonesia Stock Exchange
IFC	International Finance Corporation	International Finance Corporation
ITSC	Komite Pengarah Teknologi Informasi	Information Technology Steering Committee
JPY	Yen Jepang	Japanese Yen
KPBU	Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha	Public Private Partnership
LNG	Gas Alam Cair	Liquefied Natural Gas
MMSCFD	Juta kaki kubik standar per hari	Million standard cubic feet per day
MW	Megawatt	Megawatt
NRC	Komite Nominasi dan Remunerasi	Nomination and Remuneration Committee
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	Financial Services Authority

Singkatan Abbreviation	Nama Lengkap	Full Name
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum	Regional Drinking Water Company
PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air	Hydroelectric Power Plant
PLTP	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Geothermal Power Plant
PMK	Peraturan Menteri Keuangan	Regulation of the Finance Minister
POJK	Peraturan OJK	OJK Regulation
PPP	Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha	Public Private Partnership
PTLS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Solar Power Plant
RDPT	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	Limited Participation Mutual Fund
RMC	Komite Manajemen Risiko	Risk Management Committee
ROC	Komite Pemantau Risiko	Risk Oversight Committee
SEMS	Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan	Social and Environmental Management System
SEOJK	Surat Edaran OJK	OJK Circular
SMBC	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
SMI	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
SMV	<i>Special Mission Vehicle</i>	Special Mission Vehicle
SOE	Badan Usaha Milik Negara	State Owned Enterprise
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum	Drinking Water Supply System
USD	Dolar Amerika Serikat	United States Dollar

01

IKHTISAR KINERJA

Performance Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights	8
Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Highlights Charts	10
Ikhtisar Saham Share Highlights	10
Ikhtisar Obligasi dan Efek Lainnya Overview of Bonds and Other Securities	11
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	11
Peristiwa Penting Event Highlights	12





IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Key Financial Highlights

Ringkasan Laporan Keuangan dan Rasio Summary of Financial Statements and Ratios

Dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In million Rupiah, unless stated otherwise

Uraian	2021	2020	2019	Descriptions
Laporan Posisi Keuangan				
Statement of Financial Position				
Kas dan Setara Kas	1.352.431	2.057.059	2.429.067	Cash and Cash Equivalents
Efek-efek	2.128.893	2.470.048	2.732.936	Securities
Investasi Saham	201.902	396.720	389.636	Equity Investments
Pinjaman Diberikan	10.483.148	9.441.375	6.406.211	Loans
Cadangan Kerugian Penilaian Nilai atas Pinjaman Diberikan	(279.785)	(243.889)	(173.549)	Allowance for Impairment Losses on Loans
Aset Pajak Tangguhan	70.405	83.270	86.735	Deferred Tax Assets
Lain-lain	594.133	479.789	440.024	Others
Total Aset	14.551.127	14.684.372	12.311.060	Total Assets
Beban Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	64.673	72.409	46.713	Accrued Expenses and Other Liabilities
Pinjaman Diterima	3.748.292	5.378.793	4.713.745	Fund Borrowings
Pinjaman Subordinasi	4.383.902	4.157.322	3.142.918	Subordinated Loans
Surat Utang yang Diterbitkan	4.029.707	2.735.233	2.183.064	Debt Securities Issued
Lain-lain	103.045	160.355	72.061	Others
Total Liabilitas	12.329.619	12.504.112	10.158.501	Total Liabilities
Modal Saham	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Capital Stock
Tambahan Modal Disetor	29.800	29.800	29.800	Additional Paid-in Capital
Pendapatan Komprehensif Lain - neto	24.208	45.389	5.336	Other Comprehensive Income - net
Kerugian Kumulatif atas Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Arus Kas - neto	(41.181)	(93.760)	-	Cumulative Loss on Derivative Instrument for Cash Flow Hedges - net
(Kerugian)/Keuntungan Kumulatif atas Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Nilai Wajar - neto	(18.135)	25.647	-	Cumulative (Loss)/Gain on Derivative Instrument for Fair Value Hedges - net
Saldo Laba	226.816	173.184	147.175	Retained Earnings
Total Ekuitas	2.221.508	2.180.260	2.152.559	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	14.551.127	14.684.372	12.311.060	Total Liabilities and Equity

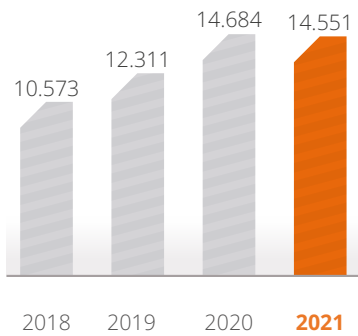
Dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In million Rupiah, unless stated otherwise

Uraian	2021	2020	2019	Descriptions
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income				
Pendapatan	951.095	911.520	837.802	Revenues
Beban	(873.323)	(840.279)	(805.398)	Expenses
Laba Sebelum Pajak	77.772	71.241	32.404	Profit Before Tax Expenses
Beban Pajak	(24.745)	(28.731)	(16.428)	Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan	53.027	42.510	15.976	Profit for the Year
(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain	(11.779)	(16.893)	1.343	Other Comprehensive (Loss)/Income
Total Laba Komprehensif	41.248	25.617	17.319	Total Comprehensive Income
Laba per Saham Dasar (dalam ribuan Rupiah)	26	21	8	Earnings per Share Basic (in thousands of Rupiah)
Laporan Arus Kas				
Statement of Cash Flows				
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(847.901)	(2.821.753)	(454.075)	Net Cash Used in Operating Activities
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi	337.333	322.320	436.475	Net Cash Provided by Investing Activities
Arus Kas Neto yang (Digunakan Untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(212.619)	2.148.841	1.851.753	Net Cash (Used in)/Provided by Financing Activities
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	2.057.102	2.429.067	582.361	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	1.352.435	2.057.102	2.429.067	Cash and Cash Equivalents at End of the Year
Rasio Keuangan				
Financial Ratios				
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset	0,52%	0,56%	0,30%	Return on Assets
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas	2,46%	2,01%	0,75%	Return on Equity
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan	1,93%	2,40%	1,82%	Net Income Margin
Rasio Lancar	2,36x	1,42x	1,41x	Current Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	5,55x	5,74x	4,72x	Liabilities to Equity Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Aset	0,85x	0,85x	0,83x	Liabilities to Assets Ratio

GRAFIK IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

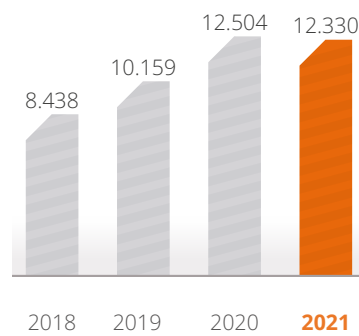
Financial Highlights Charts

Total Aset
Total Assets



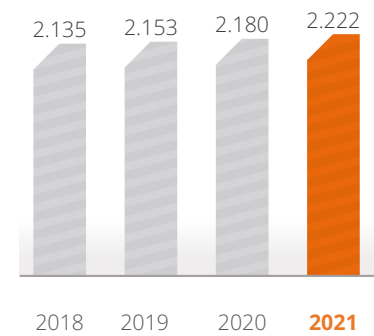
Dalam miliar Rupiah
In Rp billions

Total Liabilitas
Total Liabilities



Dalam miliar Rupiah
In Rp billions

Total Ekuitas
Total Equity



Dalam miliar Rupiah
In Rp billions

Pendapatan Usaha
Revenue



Dalam miliar Rupiah
In Rp billions

Total Komitmen Kumulatif Bruto
Total Gross Cumulative Commitment



Dalam miliar Rupiah
In Rp billions

Total Aset Investasi
Total Investment Assets



Dalam miliar Rupiah
In Rp billions

IKHTISAR SAHAM

Shares Highlights

Sampai dengan Laporan Tahunan 2021 ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan penawaran umum perdana saham pada bursa efek manapun sehingga tidak ada pengungkapan mengenai kinerja saham dalam laporan ini.

As of the publication of this 2021 Annual Report, the Company has not made any initial public offering of shares on any stock exchange, therefore no disclosure of such share performance is available in this report.

IKHTISAR OBLIGASI DAN EFEK LAINNYA

Overview of Bonds and Other Securities

Sejak pertama kali didirikan sampai dengan saat ini, Perseroan telah menerbitkan sejumlah obligasi dan efek lainnya. Uraian lengkap mengenai kronologis penerbitan obligasi dan efek lainnya diulas pada Bab Profil Perusahaan, halaman 75-77, dalam laporan tahunan ini.

Since its establishment, the Company has issued a number of bonds and other securities. A more detailed description of the chronology of the issuance of bonds and other securities is discussed on page 75-77, in the Company Profile Chapter of this annual report.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications



**Nama Penghargaan/
Award Name:**
"Gold Rank and A
Commendation for First Year
Participation in the Asian
Sustainability Reporting
Rating Award 2021"

Penyelenggara/Organizer:
National Center for
Sustainability Reporting

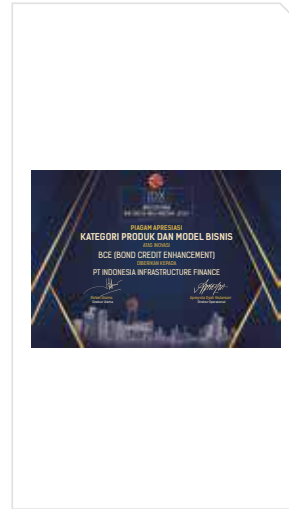
**Tanggal Perolehan/
Date of Obtainment:**
18 November 2021



**Nama Penghargaan/
Award Name:**
"The Most Inspiring CEO for
Sustainable Development
in Bisnis Indonesia Awards
2021"

Penyelenggara/Organizer:
Bisnis Indonesia

**Tanggal Perolehan/
Date of Obtainment:**
15 September 2021



**Nama Penghargaan/
Award Name:**
"Piagam Apresiasi Kategori
Produk dan Model Bisnis"

Penyelenggara/Organizer:
IDX Channel Anugerah
Inovasi Indonesia 2021

**Tanggal Perolehan/
Date of Obtainment:**
Agustus 1 August 2021



**Nama Penghargaan/
Award Name:**
"The Asset Triple A
Infrastructure Awards 2021"

Penyelenggara/Organizer:
Asset Publishing and
Research Ltd. ("The Asset")

**Tanggal Perolehan/
Date of Obtainment:**
Juli 1 July 2021

PERISTIWA PENTING

Event Highlights

01

Januari
January

Penerbitan surat utang senior *sustainability* tanpa jaminan dengan tenor 5 tahun senilai USD150 juta yang tercatat di Singapore Stock Exchange (SGX). Obligasi tersebut memiliki peringkat BBB (stabil) dari Fitch Rating, setara dengan peringkat negara Republik Indonesia.

The issuance of USD150 million 5-year senior unsecured sustainability bond (the "Notes") listed on the Singapore Stock Exchange (SGX). The notes are rated BBB (stable) by Fitch Rating, on par with the Republic of Indonesia sovereign rating.

02

Februari
February

- Menyelenggarakan "IIF Virtual Race 2021: Dynamic Ride and Run".
- Menyelenggarakan seri webinar ke-3: Peran serta IIF dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.
- Organized the "IIF Virtual Race 2021: Dynamic Ride and Run" event.
- Held the 3rd webinar series: IIF's participation in sustainable infrastructure development in Indonesia.

03

Maret
March

1. Konsultasi publik secara virtual mengenai dokumen Sistem Pengelolaan Sosial Lingkungan ("SEMS") tahun 2019.
2. Menandatangani perjanjian untuk memberikan jasa konsultan uji tuntas finansial proyek air minum di Aceh dan Riau.

1. Virtual public consultation on the updated Social and Environmental Management System ("SEMS") document 2019.
2. Signed an agreement to provide financial due diligence advisory for water project in Aceh and Riau.

04

April
April

1. Memberikan fasilitas pinjaman senior dan inovasi produk pinjaman non-tunai *trade finance* untuk konstruksi dan operasional proyek pengilangan kondensat skala kecil pertama.
2. Menandatangani perjanjian untuk memberikan jasa penilaian dampak ekonomi Jalan Tol Trans Sumatera.

1. Provided senior term loan and trade finance non-cash facility loan for the construction and operation of mini-scale condensate refinery project.
2. Signed an agreement to provide economic impact assessment for Trans Sumatera Toll Road.

05

Mei
May

- Memberikan fasilitas pinjaman senior melalui inovasi skema pembiayaan *contract leveraging* kepada perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa minyak bumi dan gas lepas pantai.
- Menyelenggarakan "Vaksin Gotong Royong" untuk percepatan program vaksinasi bersama dengan PT SMI kepada seluruh karyawan, keluarga dan individu lain yang memiliki kontak erat.
- Memberikan fasilitas pinjaman senior dalam pembiayaan proyek *data center* pertama yang berlokasi di Kawasan Industri Cikarang – Jababeka.

- Provided senior term loan facility through innovative contract leveraging scheme to an offshore oil and gas service company.
- Organized the "Vaksin Gotong Royong" in collaboration with PT SMI for accelerating vaccination program to obtain herd immunity for employees, their families and other affiliated individuals.
- Provided senior term loan facility to participate in first-ever data center project funding in Cikarang – Jababeka Industrial Estate.

06

Juni
June

- Memberikan fasilitas pinjaman sindikasi untuk pembangunan dan pengembangan proyek Jalur Kereta Api di Makassar – Parepare sepanjang 142 km dalam skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha ("KPBU").
- Memberikan fasilitas pinjaman senior untuk pembiayaan proyek telekomunikasi di Indonesia.
- Menyelenggarakan seri webinar ke-4: Instrumen Keuangan Inovatif untuk Pembiayaan Infrastruktur.

- Provided syndicated loan facilities for the construction and development of Makassar – Parepare railway line of 142 km which is delivered under the Public-Private Partnership ("PPP") scheme.
- Provided senior term loan facility for telecommunication project financing in Indonesia.
- Held the 4th webinar series: Innovative Financial Instrument for Infrastructure Financing.

07

Juli
July

- Mendapat penghargaan tingkat internasional: *The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 for Renewable Energy of the Year in Wind and Hydro*.
- Bertindak sebagai *Mandated Lead Arranger* untuk fasilitas sindikasi *Senior Term Loan* atas proyek Sistem Penyediaan Air Minum Tirta Siak Pekanbaru yang dilaksanakan dengan skema KPBU.
- Memberikan fasilitas pinjaman senior untuk Grup Perusahaan yang menyediakan solusi dan layanan telekomunikasi terintegrasi yang mencakup infrastruktur menara, sistem antena terdistribusi dalam gedung untuk jaringan seluler serta layanan *internet broadband*.
- Memberikan fasilitas *Non-cash Loan* untuk kontraktor EPC proyek migas.
- Penyaluran donasi kurban untuk tiga wilayah proyek Perseroan yang berlokasi di Jawa dan Sulawesi.

- Received an international award: The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 for Renewable Energy of the Year in Wind and Hydro.
- Acted as the Mandated Lead Arranger for the syndicated senior term loan facility for the Tirta Siak Pekanbaru Drinking Water Supply System project which is delivered under the PPP scheme.
- Provided senior term loan facility for a Group Company that provides integrated telecommunication solutions and services that covers tower infrastructure, in-building distributed antenna systems for cellular networks, and fiberized broadband internet services.
- Provided Non-Cash Loan for EPC contractor for oil and gas projects.
- Qurban donations to 3 the Company's project areas in Java and Sulawesi.

08

Agustus
August

- Menerima penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2021 pada kategori "Inovasi Produk dan Model Bisnis", atas inovasi BCE (*Bond Credit Enhancement*).
- Menandatangani perjanjian untuk memberikan jasa transaksi finansial *Project Development Facility* (PDF) KPBU di sektor persampahan.
- Obtained "IDX Channel Anugerah Innovation Indonesia 2021" event in the "Product Innovation and Business Model" category, specifically for BCE (*Bond Credit Enhancement*) innovation.
- Signed an agreement to provide *Project Development Facility* (PDF) transaction financial advisory for PPP Project in waste management sector.

09

September
September

- Penandatanganan *Memorandum of Understanding* ("MoU") dengan Universitas Indonesia terkait kerja sama *Corporate Social Responsibility* ("CSR").
- Presiden Direktur IIF, Reynaldi Hermansyah mendapat penganugerahan *The Most Inspiring CEO for Sustainable Development* dalam ajang *Bisnis Indonesia Awards 2021*.
- Signed a *Memorandum of Understanding* ("MoU") with the University of Indonesia for the deepening corporation in *Corporate Social Responsibility* ("CSR").
- IIF's President Director, Reynaldi Hermansyah was awarded as *The Most Inspiring CEO for Sustainable Development* on the *Bisnis Indonesia Awards 2021*.

10

Oktober
October

- Memberikan fasilitas pinjaman senior untuk pembangunan dan pengembangan proyek pertama di sektor infrastruktur sosial, bidang kesehatan.
- Penandatanganan MoU dengan PT Jasa Sarana, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada *event West Java Investment Summit 2021* dalam kerja sama terkait investasi dan pembiayaan proyek infrastruktur strategis di wilayah Jawa Barat.
- Provided senior loan facility for the construction and development of the first financing in social infrastructure sector, the healthcare sector.
- Signed an MoU with PT Jasa Sarana, a regional-owned company of West Java Province at the *West Java Investment Summit 2021* to cooperate in investment and financing of strategic infrastructure projects in the West Java region.

11

November
November

- Mendapat peringkat Emas pada ajang 17th Asia Sustainability Reporting Rating 2021 atas Laporan Keberlanjutan 2020 Perseroan.
- Bertindak sebagai *Mandated Lead Arranger* untuk fasilitas sindikasi *Senior Term Loan* untuk pembangunan *Floating Production Unit* (FPU) di Selat Madura.
- Terpilih sebagai pemenang pengadaan jasa konsultan keuangan untuk proyek di sektor pengolahan sampah di DKI Jakarta.
- Memberikan fasilitas pinjaman berjangka senior untuk membiayai pembangunan 20 MW *Hyperscale Data Center* yang berlokasi di Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- Awarded Gold Rank at the 17th Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021 for its 2020 Sustainability Report.
- Acted as the Mandated Lead Arranger for the syndicated senior term loan facility for the construction of a *Floating Production Unit* (FPU) in Madura Strait.
- Appointed as transaction financial advisory to a waste management project in DKI Jakarta.
- Provided Senior Term Loan facility to finance the development of 20 MW *Hyperscale Data Center* located in Bekasi, West Java Province.

12

Desember
December

- Memberikan fasilitas pinjaman modal kerja bergulir kepada *joint borrower* untuk pembiayaan proyek terkait dengan jasa pendukung sektor telekomunikasi.
- Menyalurkan fasilitas pinjaman modal kerja dan fasilitas pinjaman senior kepada sektor telekomunikasi untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal dan kepada sektor ketenagalistrikan untuk pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan.
- Menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka senior untuk pembangunan *Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro* (PLTMH) di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan di Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara.
- Memberikan fasilitas pinjaman modal kerja untuk BUMN dengan kegiatan usaha utama sebagai Kontraktor EPC (*Engineering, Procurement, and Construction*) untuk proyek infrastruktur seperti transportasi (jalan/tol/jembatan) dan SPAM.
- Ditunjuk sebagai konsultan PDF untuk penyiapan proyek KPBU perumahan rakyat di Bandung.
- Provided revolving working capital loan facility to joint borrowers for project financing in telecommunication service sector.
- Provided general working capital loan facility and senior loan facility to telecommunication sector for developing telecommunication infrastructure in the foremost, outermost and disadvantaged locations and to electricity sector for developing renewable energy power plant.
- Signed an agreement to provide senior term loan facility for the development of *Mini Hydro Power Plant Project* in Poso Regency, Central Sulawesi and in South Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi.
- Provided working capital loan facility for SOE company with business activities focuses on *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) for infrastructure project such as transportation infrastructure (road/toll road/bridge) and drinking water.
- Appointed as PDF transaction financial advisor to a PPP public housing project in Bandung.

02

LAPORAN KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

Reports to Stakeholders

Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners	16
Laporan Direksi Report of the Board of Directors	22





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report of the Board of Commissioners



Darmin Nasution

Presiden Komisaris & Komisaris Independen

President Commissioner & Independent Commissioner

“

Pemegang saham yang terhormat, Distinguished shareholders,

Kami mengapresiasi segenap upaya tanpa henti dan kolaborasi yang solid antara Direksi dan karyawan IIF, yang sudah bahu membahu bekerja sama dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis yang positif.

We applaud the relentless effort and solid collaboration of the Board of Directors and IIF employees, who cooperated in sustaining a positive business trajectory.

Perkenankanlah saya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, kami dapat menjalankan peran pengawasan secara optimal terhadap pengelolaan Perseroan di tahun 2021.

Dipenuhi dengan serangkaian pencapaian di tahun 2021, kami anggota Dewan Komisaris, dengan senang hati pada kesempatan ini untuk menyampaikan bagaimana IIF telah mengatasi berbagai tantangan dan mencatatkan kinerja yang memuaskan.

Tahun 2021 masih menjadi tahun yang berat bagi masyarakat global. Meskipun penyebaran COVID-19 tampak menurun, justru muncul dua varian virus baru, yaitu Delta, lalu disusul dengan varian Omicron yang tersebar di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Kedua varian virus baru ini lebih menular dibandingkan virus COVID-19 yang muncul pertama kali. Kemunculan dua varian baru ini menimbulkan ketidakpastian tentang kapan pandemi berakhir dan menghambat percepatan pemulihan ekonomi global dan nasional.

Memasuki tahun kedua pandemi, Pemerintah kembali melanjutkan stimulus fiskal-moneter dan sinergi kebijakan lainnya yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Ditopang oleh komitmen dan dukungan Pemerintah dalam mengatasi pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 berhasil *rebound* dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemungkinan pemulihan ekonomi.

Allow me to praise God the Almighty for the Grace He extended to us that we were able to fully exercise our supervisory role over the Company's management in 2021.

Brimming with a series of monumental achievements in 2021, we the members of the BoC, are glad to take the opportunity to convey how IIF has overcome multitudes of challenges and recorded an excellent performance.

The year 2021 was another challenging year for the global community. Although the spread of COVID-19 is visibly descending, two new variants of the virus, Delta and the later emerging Omicron, were spread out in different parts of the world including Indonesia. Those two new variants appeared more contagious than the original COVID-19 virus. The emergence of these two new variants raised the uncertainties of the ending to this pandemic, and evidently halted acceleration of global and national economic recoveries.

In this second year of the pandemic, the Government extended its fiscal-monetary stimulus and policy synergies that had been released to boost national economic recovery. Supported by the Government's commitment and support in overcoming the pandemic, Indonesia's economic growth in 2021 managed to rebound in comparison to the year prior. This indicates a possibility of a recovering economy.

Indikator positif pemulihan ekonomi nasional mencakup perbaikan nyata yang ditunjukkan pada beberapa indikator ekonomi utama, seperti *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, dan Penjualan Ritel. Hal ini menandakan bahwa kegiatan ekonomi berhasil mendorong permintaan dan pengeluaran rumah tangga, didukung oleh kebangkitan sektor industri yang sedang dalam masa transisi menuju fase yang seringkali disebut sebagai “normal baru”.

Di masa yang penuh tantangan ini, pembangunan infrastruktur masih terus menjadi salah satu fokus utama prioritas pemerintah. Mengingat IIF adalah lembaga swasta yang diamanatkan untuk mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur serta untuk mempromosikan penerapan praktik terbaik Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) internasional, visi ini merupakan keuntungan tersendiri bagi Perseroan.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah bekerja dengan sangat baik dalam menghadapi lanskap ekonomi yang dinamis dan iklim bisnis yang kurang kondusif, hal tersebut mencerminkan pemahaman yang kuat dan pengalaman yang luas dari semua anggota Direksi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Seluruh inisiatif yang dilakukan Direksi sepanjang tahun ini berorientasi pada organisasi demi tercapainya tujuan, maksud, dan kepentingan Perseroan. Kami mengapresiasi segenap upaya tanpa henti dan kolaborasi yang solid antara Direksi dan karyawan IIF, yang sudah bahu membahu bekerja sama dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis yang positif.

Dewan Komisaris juga menilai manajemen telah menyalurkan pembiayaan infrastruktur secara bijaksana, hati-hati, dan terdiversifikasi guna mencegah adanya penurunan kualitas kredit sambil secara proaktif mengambil langkah-langkah perbaikan untuk klien yang telah masuk dalam kategori *Special Asset Management* (SAM). Meskipun Dewan Komisaris mengakui perlunya meraih kesepakatan pembiayaan baru untuk menggapai pertumbuhan yang kuat, dengan tidak mengabaikan penegakan nilai-nilai Sosial & Lingkungan (“S&E”) sebagai elemen penting dari skema pembiayaan IIF.

Dalam konteks pengelolaan karyawan, kami mengapresiasi segala upaya yang sudah dilakukan Direksi untuk mendukung terlaksananya program pengembangan kapasitas dan kompetensi karyawan Perseroan, yang pada tahun ini sebagian besar digelar secara virtual mengingat situasi pandemi yang berkepanjangan. Perseroan terus berupaya agar setiap karyawan tetap bekerja secara produktif dengan memanfaatkan berbagai perangkat teknologi yang ada. Kesungguhan seluruh karyawan IIF dalam menyikapi cara kerja baru di tengah situasi pandemi tercermin dari pencapaian kinerja Perseroan tahun 2021.

Positive indicators of the national economic recovery includes noticeable improvement in some key economic components e.g. Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI), Consumer Confidence Index, and Retail Sales. This signals that economic activities have propelled household demand and spending, buoyed by the revival of many industries in transitioning to what many have phrases as the “new normal”.

In these challenging times, the country's lagging infrastructure development continued to be one of main focus of the government's priority. As a private institution mandated to fill in the gap of infrastructure financing needs as well as to promote a sound Environment, Social and Governance (ESG) international practices, these visions have worked in the Company's favor.

Supervision on Strategy Implementation

It is our view that the Board of Directors has done exceptionally well in dealing with the dynamic economic landscape and the unfavorable business climate that ensued, which demonstrated a strong understanding and vast experience of its members in their respective areas of expertise.

All the initiatives that the Board of Directors took this year were organization-oriented and intended to achieve the Company's goals, purposes, and interests. We applaud the relentless effort and solid collaboration of the Board of Directors and IIF employees, who cooperated in sustaining a positive business trajectory.

We have witnessed how the management provided infrastructure financing in a wise, prudent, and diversified manner to prevent credit quality deterioration while proactively taking measures for the ones who had already fallen under *Special Asset Management* (SAM) category. The Board acknowledged the need to close new financing deals for stronger growth, while not neglecting the enforcement of the Social & Environmental (“S&E”) values as a mandatory element of IIF financing schemes.

Employee management wise, we applaud the efforts executed by the Board of Directors to support the Company's employee capacity and competency development programs, which this year were mostly held virtually as the pandemic persisted. The Company has worked to keep employees' productivity and has encouraged broader use of technology-savvy tools. The wisdom showed by our employees in responding to the new way of working during the pandemic was reflected in the Company's performance for fiscal year of 2021.

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Perumusan Strategi oleh Direksi

Keterlibatan Dewan Komisaris dalam proses perumusan strategi yakni pada pemberian masukan dan/atau rekomendasi yang bertujuan untuk memperluas pandangan Direksi dalam proses perumusan strategi Perseroan. Seluruh strategi yang telah disiapkan dan dilaksanakan Direksi di tahun 2021 telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Penilaian terhadap Kinerja Direksi Tahun 2021

Eksekusi strategi bisnis yang tepat oleh Direksi terbukti membuahkan hasil yang sangat baik. IIF berhasil mencatatkan kinerja yang menggembirakan pada tahun 2021 sebagaimana tercermin dari perolehan laba bersih sebesar Rp53,03 miliar pada akhir 2021, tumbuh 24,7% dari tahun sebelumnya sebesar Rp42,51 miliar. Sementara *Non-Performing Loan* (NPL) bersih tahun 2021 yang tercatat sebesar 0,36%, relatif stabil dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,38%. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan tetap menjaga pertumbuhan dan mempertahankan kualitas kredit dari potensi pemburukan atas keseluruhan portofolio.

Selain menorehkan pencapaian kinerja yang mengesankan, kami juga mengapresiasi kinerja Direksi atas beberapa penghargaan yang berhasil diraih Perseroan, yakni The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 for Renewable Energy of the Year in Wind and Hydro oleh The Asset dan Gold Rank pada the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021. Penghargaan ini semakin mempertegas bahwa Perseroan berada di jalur yang benar dalam menjalankan perannya sebagai katalis dan agen perubahan untuk pembangunan berkelanjutan.

Pandangan terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") dalam setiap aspek operasional bisnis Perseroan dinilai berhasil, serta terus memperhatikan implementasi 8 (delapan) prinsip S&E IIF dalam menyalurkan pembiayaan infrastruktur kepada para klien.

Dengan bangga kami menyaksikan bahwa seluruh elemen Perseroan bersinergi membangun landasan yang kokoh untuk membentuk organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, kami memastikan bahwa pengelolaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan *best practice* yang berlaku secara internasional serta memperhatikan harapan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan IIF.

Supervision on Strategy Formulation by the Board of Directors

The Board of Commissioners' involvement is to provide advices and/or recommendations which aims to give insights into the Company's strategy formulation process. BoC and BoD had come to terms on the proposed business strategies for fiscal 2021, to which we had also given our consent for the execution.

Assessment of the Performance of the Board of Directors in 2021

The disciplined execution of the right business strategy by the Board of Directors paid off eloquently. IIF managed to deliver an encouraging performance in 2021 as reflected in the net profit of Rp53.03 billion at the end of 2021, which rose by 24.7% from the previous year's balance of Rp42.51 billion. While Non-Performing Loan (NPL) in 2021 was recorded at 0.36%, relatively stable with the net NPL in 2020 at 0.38%. This shows that the Company continues to keep growth trajectory and maintain credit quality from potential deterioration of the portfolio.

In addition to these remarkable achievements, we also thank the Board of Directors for the prestigious awards received by the Company this year. IIF was awarded The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 for Renewable Energy of the Year in Wind and Hydro by the Asset and Gold Rank at the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021. This recognition further proves that the Company is on the right track living its role as a catalyst and an agent of change for sustainable development.

Implementation of Good Corporate Governance

Implementation of Good Corporate Governance ("GCG") in every aspect of the Company's business operation is deemed successful, which continued to be implemented with strict adherence to the IIF's eight (8) S&E principles when distributing infrastructure financing to our clients.

It is with great pride to witness that all elements of the Company worked in synergy to build a solid foundation for a more transparent and more accountable organization. Overall, we assure that the Company is managed according to the international best practices, and in a way that takes into consideration the expectations of both IIF's Shareholders and Stakeholders.

Pandangan terhadap Prospek Usaha yang Disusun oleh Direksi dan Dasar Pertimbangannya

Pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan berlanjut pada tahun mendatang meskipun kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi global masih tetap ada. Optimisme tersebut didorong oleh keberhasilan peluncuran vaksin COVID-19 yang dinilai menjadi salah satu solusi dalam mengatasi krisis kesehatan saat ini. Hal ini mendorong sentimen positif yang ditunjukkan oleh para pelaku bisnis nasional dan internasional terhadap ketahanan Indonesia dalam mengarungi masa-masa yang penuh tantangan ini.

Terhadap pandangan positif ini, Dewan Komisaris juga menaruh optimisme yang sama. Dewan Komisaris berkeyakinan dengan adanya mandat yang diberikan oleh Pemegang Saham untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional, IIF dapat meningkatkan kontribusinya dan terus memajukan bisnis di masa depan. Untuk itu, kami memastikan bahwa semua rencana bisnis IIF tahun 2022 telah disusun secara cermat dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan potensi risiko yang ada.

Kami sepenuhnya mendukung pelaksanaan rencana bisnis, namun kami tetap akan memastikan bahwa Direksi selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam mengelola bisnis mengingat masih tingginya ketidakpastian yang akan menyelimuti dan membayangi perekonomian di tahun-tahun mendatang.

Secara khusus, Dewan Komisaris menghimbau agar Direksi turut memantau dampak konflik Ukraina - Rusia yang tengah terjadi pada awal tahun 2022. Konflik ini diyakini Bank Dunia akan menahan laju pemulihan ekonomi global karena berimbas langsung pada kenaikan harga komoditas yang tidak terkendali sehingga berdampak pada inflasi yang tinggi.

Keterlibatan Aktif Dewan Komisaris di dalam WBS

Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap implementasi kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) untuk memastikan bahwa seluruh laporan pengaduan yang masuk telah diproses sesuai prosedur internal yang berlaku.

Dewan Komisaris dan organ pendukungnya berkomitmen untuk mendukung operasionalisasi WBS dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaannya. Hal ini merupakan komitmen dalam menghadirkan sistem kerja yang transparan dan adil bagi semua karyawan.

Frekuensi dan Tata Cara Pemberian Saran kepada Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki mekanisme dan hubungan kerja yang efektif, serta arus komunikasi yang terjalin dipastikan terpelihara dengan baik. Fungsi pengawasan langsung Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan rapat gabungan, rapat komite ataupun melalui pertemuan informal lainnya di luar rapat.

Selama tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan 9 kali rapat gabungan yang digelar secara virtual. Pada kesempatan tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan masukan, arahan, dan menjalankan fungsi untuk memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan strategi dan kebijakan.

Business Prospects Prepared by the Board of Directors

Indonesia expects to see a steady economic recovery in the upcoming year albeit a possible slowdown in global growth. The optimism comes from the successful rollout of COVID-19 vaccines that is one of the solutions in overcoming the current health crisis. This prompts the positive sentiment shown by both domestic and international business communities towards Indonesia's resiliency in navigating through such challenging times.

On this positive outlook, we have nothing but the same optimism. We are convinced that with the mandate given by the Shareholders to accelerate the country's infrastructure development, IIF will be able to broaden its contribution and keep advancing the business in the future. We hereby ensure that IIF 2022 business plan has been prepared after all external factors and potential risks are rigorously weighed.

While we support the business plan execution, we will ensure the Board of Directors to uphold prudent principles in managing the business given a cloud of uncertainty will always prevail and threaten economy in the years to come.

In particular, the Board of Commissioners urges the Board of Directors to also monitor the impact of the Ukraine - Russia conflict that occurred in early 2022. The World Bank believes that the conflict will hold back the pace of global economic recovery since it will possess a direct impact on uncontrolled increases in commodity prices, resulting in high inflation.

Active Involvement of the Board of Commissioners in WBS

The Board of Commissioners actively supervises the implementation of the Whistleblowing System (WBS) policies to ensure that all complaints received are processed in accordance to the existing internal procedures.

The Board of Commissioners and its supporting organs are committed to support the operations of the WBS and evaluate the system's effectiveness periodically. This is as a part of our commitment to creating a transparent and fair work system for all employees.

Frequency and Method of Advising the Board of Directors

The Board of Commissioners and the Board of Directors have an effective working relationship and a mechanism that ensures effective communication between the two. The Board of Commissioners supervises the Board of Directors through joint meetings, committee meetings and other informal discussions.

In 2021, the Company convened 9 joint virtual meetings. At each of the meetings, the Board of Commissioners gave recommendation, direction, and carried out its advisory function of the Board of Directors regarding the implementation of strategies and policies.

Penilaian terhadap Kinerja Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif, Dewan Komisaris dibantu oleh sejumlah komite pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC), Komite Pemantau Risiko (ROC), dan Komite Investasi Dewan Komisaris (BoC-IC).

Komite-komite tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan sangat baik. Seluruh komite telah berkontribusi optimal dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, termasuk dalam proses perumusan dan pemberian rekomendasi yang tepat kepada Direksi.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang 2021, tidak terdapat perubahan pada komposisi Dewan Komisaris Perseroan.

Penutup

Mengakhiri laporan pengawasan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungannya yang tiada henti. Dukungan inilah yang memotivasi kami dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada sehingga dapat memberikan hasil yang substansial.

Apresiasi yang tinggi juga kami berikan kepada Direksi dan seluruh karyawan atas loyalitas dan dedikasinya. Semua hasil pencapaian tahun ini memungkinkan Perseroan untuk terus melangkah maju meskipun masih dalam tekanan pandemi.

Kami yakin dengan mempertahankan sinergi yang kuat dengan semua pemangku kepentingan, Perseroan dapat meraih pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa depan dan dapat mewujudkan visinya menjadi katalis terdepan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Assessment of the Performance of the Committees Under the BoC

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by supporting committees, namely the Audit Committee (AC), the Nomination and Remuneration Committee (NRC), the Risk Oversight Committee (ROC), and the Board of Commissioners' Investment Committee (BoC-IC).

The committees have delivered and performed their role and functions. They have contributed optimally to helping the Board of Commissioners implement its duties, including in the process of formulating and providing appropriate recommendations to the Board of Directors.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2021, there were no changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

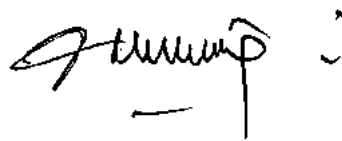
Closing

To conclude this supervisory report, please allow us to thank the shareholders and all other stakeholders for their trust and relentless support. This support has motivated us to navigate numerous challenges while delivering substantial results.

We would also like to applaud the Board of Directors and all employees for their loyalty and dedication. This year's accomplishment, has enabled the Company to keep moving forward under the pandemic pressure.

We believe by sustaining relationship and strong synergy with all of our stakeholders, the Company can achieve sustainable business growth in the future to come and satisfy its vision to become the leading catalyst for financing infrastructure development in Indonesia.

Atas nama Dewan Komisaris,
On behalf of the Board of Commissioners,



Darmin Nasution

Presiden Komisaris & Komisaris Independen
President Commissioner & Independent Commissioner

LAPORAN DIREKSI

Report of the Board of Directors



Reynaldi Hermansjah

Presiden Direktur & Chief Executive Officer dan Plt. Direktur Keuangan*
President Director & Chief Executive Officer and Interim Chief Financial Officer*

* Mulai menjabat per 1 November 2021
Begin serving as of 1 November 2021



Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Perseroan berhasil mencatat kinerja positif di tahun 2021 dan meraih kesepakatan pembiayaan proyek rel kereta api Makassar – Parepare di Sulawesi – portofolio pionir IIF di sektor kereta api dan transportasi massal.

The Company managed to record a positive performance in 2021 and succeeded in sealing the deal to finance the Makassar – Parepare railway project in Sulawesi - IIF's pioneer portfolio in the rail and mass transportation sector.

Dengan penuh rasa syukur, saya atas nama Direksi IIF menyampaikan perjalanan yang telah kami lalui sepanjang tahun 2021. Tahun lalu merupakan tahun pemulihan dari dampak pandemi global COVID-19. Semua negara berjuang untuk bangkit dari keterpurukan, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan, para pemangku kebijakan terus berupaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui optimalisasi kebijakan fiskal dan moneter.

Di penghujung semester pertama 2021, Indonesia dihadapkan pada lonjakan kasus infeksi COVID-19 yang sangat tinggi akibat gelombang varian Delta. Hal ini mendorong Pemerintah untuk kembali menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada bulan Juli-Agustus 2021, dengan aturan yang lebih ketat. Kendati demikian, kondisi perekonomian nasional tahun 2021 sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan PDB tahun 2021 sebesar 3,69% (yoy), jauh lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi 2,07% (yoy).

Kendati menghadapi situasi menantang akibat pandemi, kami bersyukur IIF tetap dapat menjalankan mandatnya sebagai katalis dan agen perubahan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Keberhasilan IIF dalam mempertahankan hasil yang positif sampai dengan saat ini bukanlah tanpa rintangan. Memasuki tahun kedua pandemi, beberapa proyek infrastruktur nasional mengalami penundaan akibat terjadinya *shifting* anggaran dan *refocusing* kebijakan yang menitikberatkan pada

It is with gratitude that I, on behalf of the Board of Directors (BoD) of IIF, hereby present to you the milestones that we have accomplished in 2021. It was proven to be a year of recovery from the global pandemic COVID-19 impact. Every nation were struggling to rebound from an undesirable situations, including Indonesia. Policy makers persevered to accelerate economic recovery by optimizing fiscal and monetary policies.

At the end of first half 2021, the number of COVID-19 infections skyrocketed in Indonesia because of Delta variant wave. The surge prompted the Government to reintroduce the Community Activity Restrictions (PPKM) policy in July-August 2021, with even stricter protocols. Nonetheless, the national economic has begun to recover in 2021. It was reflected in the GDP growth of 3.69% (yoy), a much stronger figure than the previous year, which was contracted 2.07% (yoy).

Despite facing unprecedented situation because of the pandemic, we are grateful that IIF managed to sustain its role in being a catalyst and agent of change for infrastructure development in Indonesia. However, IIF's success in achieving a positive outcome does not come without hurdles. In the second year of the pandemic, some national infrastructure projects experienced delays due to the budget shift and refocusing policy on the health sector and national economic

sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Ditambah lagi, pembatasan aktivitas sosial juga mempengaruhi hal ini. Kondisi tersebut tentu saja berdampak pada IIF sebagai institusi pembiayaan infrastruktur.

Namun demikian, IIF tetap optimis atas prospek pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia, mengingat peran infrastruktur dalam mendorong perekonomian nasional memberikan manfaat yang lebih besar. Ditambah lagi momentum pemulihan ekonomi ini dapat turut mendorong kepercayaan pelaku usaha menuju kondisi normal.

KINERJA IIF TAHUN 2021

Implementasi Inisiatif Strategis, Kebijakan, dan Proyek-Proyek Unggulan di Tahun 2021

Berbekal pengalaman tahun sebelumnya yang penuh tantangan, Direksi mencermati setiap dinamika yang terjadi di lingkungan bisnis Perseroan pada tahun 2021. Dalam menghadapi era normal baru, Perseroan telah menyusun inisiatif strategis agar dapat mempertahankan kelangsungan usahanya sekaligus untuk mencapai hasil yang optimal.

Di tahun 2021, IIF memperluas layanan dengan menawarkan rangkaian produk-produk investasi dan layanan *Advisory*. IIF juga memanfaatkan peluang baru dalam rangka diversifikasi spektrum pembiayaan sebagai salah satu strategi dalam menghadapi volatilitas pasar. Beberapa inovasi dilakukan dan terbukti mendapatkan apresiasi dari pemangku kepentingan. Inovasi-inovasi ini dapat diklasifikasikan sebagai produk, skema pembiayaan atau berupa pelaksanaan kegiatan menarik yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Tren Bekerja dari Rumah tidak serta merta menandai perlambatan pencapaian kinerja, karena cara bekerja seperti ini sudah lebih umum dalam kegiatan operasional perusahaan. Kondisi ini menyebabkan tingginya permintaan penggunaan data seluler dimana IIF masuk untuk memanfaatkan momentum tersebut dan mengambil bagian dalam pembiayaan proyek *data center* perdananya seiring meningkatnya penggunaan *mobile data* dan *fixed broadband*, layanan ICT, serta layanan digital lainnya.

Selain telekomunikasi, salah satu sektor dengan porsi pembiayaan terbesar dalam portofolio IIF, Perseroan meraih kesepakatan pembiayaan proyek rel kereta api Makassar-Parepare di Sulawesi. Bagi IIF, proyek ini adalah pionir di sektor kereta api dan transportasi massal. Tonggak pencapaian lain bagi IIF pada tahun 2021 adalah pembiayaan perdana untuk sektor kesehatan melalui proyek pembangunan rumah sakit.

Meskipun pembangunan infrastruktur di Indonesia sedikit terhambat selama dua tahun terakhir akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, IIF sebagai satu-satunya perusahaan swasta yang diberikan mandat oleh pemegang saham untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur nasional tetap mampu melanjutkan pertumbuhan bisnisnya. Hal tersebut dapat dicapai dengan diterapkannya prinsip tata kelola yang baik dan manajemen risiko sebagai bagian dari upaya pendekatan *preemptive* untuk menjadi sebuah institusi pembiayaan yang sehat.

recovery. Besides, social activity restrictions had also contributed to the delay. This policy shift to an extent, impacted IIF as an infrastructure financing institution.

Nevertheless, IIF remained optimistic about the prospect of sustainable infrastructure development in Indonesia, as it is necessary to encourage national economy and to provide benefits for the greater good. Moreover, the indication of economic recovery will boost confidence of business players to the normalcy.

IIF'S PERFORMANCE IN 2021

Implementation of Strategic Initiatives, Policies and Leading Projects in 2021

Having successfully navigated through the challenges of the previous year, in 2021 the BoD focused on the dynamics of the Company's business environment. Part of embracing the new normal, the Company initiated strategies in order to sustain the business practice while achieving an optimum outcome.

In 2021, IIF extends its services by offering arrays of investment products and advisory services. Furthermore, IIF tapped into new opportunities to broaden the spectrum as one of strategies in riding market volatility. Few innovations were prompted and received well recognitions from our stakeholders. These innovations can be classified as products, financing scheme or simply engaging activities which was never carried before.

The trend Working From Home does not signal any slowing down in performance, as remote working is becoming more common within corporate activities. This triggered a demand in mobile data usage where IIF is able to tap in the wave and participated in the increasingly high use of mobile data and fixed broadband, ICT services, and other digital services, by providing the first financing scheme for a data center.

In addition to telecommunications, one of the largest portion financing sectors in IIF's portfolio, the Company sealed the deal to finance the Makassar-Parepare railway project in Sulawesi. For IIF, the project was a pioneer in the rail and mass transportation sector. Another milestone for IIF in 2021 was the initial healthcare sector through the financing of hospital development.

Although infrastructure development in Indonesia has been slightly hampered over the past two years by the prolonged COVID-19 pandemic, IIF, as the only private entity mandated by its Shareholders to provide financing to national infrastructure projects, was able to continue its business growth. This achievement can be realized by maintaining good corporate governance and risk management principles as part of a preemptive approach for becoming a sound institution.

Seluruh inisiatif strategis yang dijalankan Direksi pada tahun 2021 sebagaimana diuraikan di atas telah melalui proses yang ketat, termasuk keterlibatan, arahan dan rekomendasi, serta persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Implementasi Strategi Perusahaan

Di penghujung tahun, Direksi duduk bersama untuk merumuskan rencana kerja Perseroan di tahun mendatang dan menetapkan target tahunan yang hendak dicapai. Antar-anggota Direksi menjalin komunikasi internal yang baik dan memastikan bahwa seluruh implementasi strategi IIF sudah mempertimbangkan berbagai tantangan bisnis yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan, serta sudah mengakomodir arahan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris.

Dengan demikian, seluruh anggota Direksi IIF berperan penting dalam proses perumusan inisiatif strategis Perseroan serta aktif mengawal jalannya eksekusi kebijakan dan inisiatif strategis yang telah disepakati bersama serta memastikan tercapainya target dan tujuan Perseroan.

Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dan Perbandingannya dengan Target

Memiliki kemampuan dalam beradaptasi dan kelincahan dalam menghadapi pandemi di tahun sebelumnya, Direksi menerapkan pendekatan holistik dalam menghadapi tantangan yang muncul di tahun ini. Hal tersebut tercermin melalui perumusan indikator kinerja dari seluruh inisiatif strategis yang pada akhirnya berhasil menopang kinerja IIF tahun 2021.

Pendapatan usaha IIF tahun 2021 adalah sebesar Rp951,10 miliar atau meningkat sebesar 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp911,52 miliar. Selaras dengan itu, Perseroan berhasil mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 24,7%.

Dari sisi operasional, IIF berhasil menandatangani 17 perjanjian baru di tahun ini dengan total komitmen investasi mencapai Rp5,41 triliun, naik 88,0% dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah Rp2,88 triliun. Per 31 Desember 2021, IIF tercatat memiliki aset investasi sebesar Rp12,21 triliun yang disalurkan kepada 57 proyek dimana sebagian besarnya berasal dari portofolio pembiayaan di sektor ketenagalistrikan, jalan, dan telekomunikasi.

Tantangan dan Penanggulangan

Sebagai entitas bisnis yang spesifik bergerak dalam pembiayaan infrastruktur, selama pandemi ini tentu saja tantangan utama yang dihadapi IIF adalah keterlambatan penyelesaian proyek-proyek yang sudah berjalan karena diterapkannya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat, serta tertundanya eksekusi sejumlah proyek seiring dengan adanya kebijakan *refocusing budget* oleh Pemerintah.

Tantangan lain yang dihadapi IIF adalah *over liquidity market* yang terjadi di industri keuangan yang mengakibatkan sebagian besar institusi perbankan di Indonesia menurunkan suku bunga kreditnya secara serempak sehingga pembiayaan yang ditawarkan menjadi lebih kompetitif.

All the above strategic initiatives taken by the BoD throughout 2021 were the results of a stringent process, including the involvement, direction and recommendations and approval of the Board of Commissioners (BoC).

The Board of Directors' Role in Strategy Formulation and Implementation

At the end of the year, the BoD collectively formulates the upcoming year Company's work plan and sets its annual targets. BoD members continued to communicate internally and ensure that the implementation of IIF's strategy is met while weighing business challenges that are relevant to its business activities, and has accommodated the directives and recommendations of the BoC.

Thus, we as members of IIF's BoD played a key role in formulating the Company's strategic initiatives and actively oversees the execution of its policies and initiatives, which had been mutually agreed and to ensure that the Company's targets and objectives are achieved.

Achievements in 2021 and Comparison Between Targets and Results

Becoming proficient in the adaptiveness and agility towards the pandemic in the previous year, this year the BoD enticed a holistic approach in facing the challenges. This is reflected through the performance indicator formulation of the strategic initiatives that cascades to IIF's performance in 2021.

IIF's operating income was recorded at Rp951.10 billion or increased 4.3% from Rp911.52 billion in previous year. Consequently, the Company successfully recorded a 24.7% increase in net profit

From operational standpoint, IIF managed to sign 17 new agreements this year with a total investment commitment of Rp5.41 trillion, up by 88.0% from Rp2.88 trillion the previous year. As of December 31, 2021, IIF was recorded to have investment assets of Rp12.21 trillion which contributed from 57 projects, most of which came from financing portfolios in the electricity, road and telecommunications sectors.

Challenges and Solutions

As a business entity that is specifically engaged in infrastructure financing, the main challenges faced by IIF during the pandemic was the delayed completion of projects that were already underway due to the implementation of community activity restriction, and the government's policy of refocusing its state budget.

Another challenge faced by IIF was the over-liquidity market that was seen in the financial industry that made most of the banking institutions in Indonesia lowered their lending rates to make their financing schemes more competitive.

Kendati demikian, Direksi berpandangan tantangan-tantangan tersebut bukanlah hambatan besar bagi IIF untuk terus melangkah maju, melainkan sebagai bahan evaluasi dan tahapan yang harus dilalui agar IIF semakin kokoh dan berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Direksi telah mempertimbangkan faktor-faktor risiko dan tantangan tersebut saat merumuskan inisiatif strategis 2021.

Di samping itu, Direksi menilai eksistensi IIF sebagai pelopor pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui penegakan Prinsip Sosial dan Lingkungan berstandar internasional adalah ciri khas IIF di industri. Dengan semangat kuat untuk menggapai visi, misi, dan target-target Perseroan, Direksi tidak putus asa dalam menghadapi segala bentuk tantangan yang muncul selama pandemi. Hal inilah yang mendorong IIF untuk memiliki sumber daya manusia yang relevan dan unggul, serta memiliki kesiapan untuk melewati masa-masa sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya.

PERAN SDM DAN TI BAGI KEBERLANGSUNGAN BISNIS IIF

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri keuangan, Direksi memandang pentingnya pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkesinambungan untuk mendukung aktivitas bisnis IIF. Direksi menilai bahwa SDM yang kompeten dan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan merupakan modal utama IIF agar tetap unggul dan mampu mengimbangi dinamika pasar, terutama di tengah situasi yang penuh tantangan.

Oleh karena itu, Direksi memberikan dukungan penuh terhadap program pengembangan kompetensi SDM untuk memastikan bahwa setiap insan IIF berkesempatan dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar. Pengembangan SDM harus terus dilakukan karena aspek kompetensi juga meningkat dari waktu ke waktu. Agar dapat tumbuh menjadi sebuah institusi yang sangat kompetitif, Manajemen terus mengembangkan SDM sebagai faktor penggerak utamanya.

Selain mengandalkan SDM, Direksi juga melihat ketersediaan Teknologi Informasi (TI) yang *modern* dan andal di era digital yang terus berkembang ini. Fungsi TI dalam proses bisnis IIF adalah sebagai tulang punggung untuk memastikan kelancaran kegiatan operasi bisnis serta menjamin efisiensi proses bisnis. TI merupakan infrastruktur vital dalam proses operasional bisnis sehingga Perseroan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkala guna mengurangi kendala yang diakibatkan oleh infrastruktur TI yang tidak sesuai perkembangan zaman.

PROSPEK USAHA

Tahun 2022 dibuka dengan konflik Ukraina - Rusia yang secara langsung berdampak pada meningkatnya harga komoditas dan tingkat inflasi. Melihat kondisi ini, Direksi menilai pemulihan ekonomi global ke depan akan sedikit terhambat dan perlu diwaspadai terkait keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia.

Nevertheless, the BoD did not see these challenges as a big obstacle for IIF, but rather used them positively as an evaluation to ensure that IIF becomes even stronger and more experienced in running the business. The BoD has taken these risk factors and challenges into account when formulating its 2021 strategic initiatives.

In addition, the BoD views IIF as a trailblazer in carving sustainable infrastructure development by enforcing a global-rated Social and Environmental Principles and is classified as a distinctive trait for IIF as a market player. Embracing the strong passion to achieve the Company's vision, mission and targets, the BoD cease to be discouraged with the hurdles face during pandemic. The concise evaluation prompts IIF to be equipped with relevant and excellent resources, essentially ready to navigate through such unprecedented times.

THE ROLE OF HR AND IT IN IIF'S BUSINESS SUSTAINABILITY

As a company operates within the financial industry, the BoD regards the importance of sustainable Human Resources (HR) management to support IIF's business. The Board sees a pool of competent and evolving human resources with the agility and adapt to change as a crucial component for IIF to excel and compensate the market dynamic, especially in challenging times.

The BoD fully supports the Company's employee competency development programs in ensuring that the human resources within the institution can enhance their capability and knowledge to steer with market demand. IIF must continue developing Human Resource competency considering that this aspect plays an increasingly bigger role from time to time. For IIF to become an ultra-competitive institution, the Management ignites the core driving factor, which is the people.

Aside from the HR, the Company sees the urgency in having a modern and reliable Information Technology (IT) in today's rapidly developing digital era. The IT function in IIF's business processes is a backbone that ensures seamless business operations and efficient business processes. IT has become a vital infrastructure in carrying out business operations hence the company ensures thorough evaluation periodically and minimize any setbacks resulted from an outdated IT ecosystem.

BUSINESS PROSPECTS

The year of 2022 opened with the Ukraine - Russia conflict which had a direct impact on rising commodity prices and inflation rates. Seeing this condition, the Board of Directors assesses that the global economic recovery in the future will be hampered and needs to be noticed for in the continuation of Indonesia's economic recovery process.

Perekonomian Indonesia dilaporkan tumbuh 3,69% (yoy) sepanjang tahun 2021 dan diproyeksikan akan terus menguat hingga menyentuh kisaran pertumbuhan 5,2% (yoy) pada tahun 2022. Proyeksi tersebut sejalan dengan prognosa ekonomi global. Pemerintah Indonesia telah memberikan sinyal optimisme terhadap prospek usaha tahun 2022, hal ini memotivasi Direksi untuk melanjutkan pembangunan melalui berbagai proyek. Berangkat dari strategi tahun 2021, maka *pipeline* tahun 2022 diisi dengan proyek-proyek di sektor baru mengingat gencarnya pembangunan nasional di bawah arahan Presiden Joko Widodo.

Dalam menyusun target bisnis tahunan, Direksi mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada. Meskipun iklim usaha ke depan masih akan dibayang-bayangi dengan situasi pandemi yang diprediksi berkepanjangan, Direksi menilai situasi tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap prospek pembangunan infrastruktur mengingat sektor ini masih menjadi prioritas bagi Pemerintah.

Realisasi anggaran infrastruktur nasional tahun 2021 yang berfokus pada penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pemukiman), peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi dan komitmen Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terbelakang) turut mendukung potensi kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Ditambah lagi, inisiatif Pemerintah terkait *sustainable finance* dan *climate change/climate adaptation initiative* yang seiring dengan G20 Presidensi, memberikan banyak peluang bagi IIF untuk memperluas portofolionya ke depan, dimana saat ini IIF telah terlibat pada beberapa proyek di atas.

Di masa mendatang, Direksi menargetkan agar IIF dapat berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui skema pembiayaan berkelanjutan.

PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN BAGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SESUAI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)

Direksi berpandangan pengelolaan bisnis yang bertanggung jawab berkaitan erat dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau yang dikenal dengan ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Direksi menyatakan bahwa sejak awal pendiriannya, IIF sudah memiliki komitmen tinggi terhadap ESG.

Seperti disebutkan sebelumnya, penegakkan ESG di IIF dikenal melalui Prinsip-Prinsip Sosial dan Lingkungan yang beroperasi di bawah Divisi Sosial dan Lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada setiap proyek di bawah portofolio IIF.

Sebagai entitas yang berorientasi komersial, IIF menawarkan produk-produk dan layanan yang inovatif untuk mendanai proyek-proyek pembangunan infrastruktur dengan berlandaskan pada 8 (delapan) prinsip sosial dan lingkungan (S&E) IIF.

The Indonesian economy grew 3,69% (yoy) in 2021 and is projected to grow 5.2% (yoy) in 2022. This projection is in line with the global economy prognosis. The Government of Indonesia has signaled optimism for business prospects in 2022 and it motivated the BoD to persist the development through numerous projects. Departing from 2021, for 2022 the pipeline is filled with projects in new sector especially noting the acceleration of infrastructure development proclaims by the President Joko Widodo administration.

When assembling annual business targets, the BoD considers both challenges and opportunities. While the pandemic continues steadily and is yet to vanish anytime soon, the BoD does not expect this to have a significant impact on infrastructure development projects given their priority status from the Government.

The realization of national infrastructure budget in 2021 that focused on providing basic needs (water, sanitation, housing), improving connectivity and ran parallel with the Government's support to economic recovery and its commitment to accelerate infrastructure development in the 3T (Lagged, Foremost, and Underdeveloped) areas, has led to potential need for infrastructure financing. In addition, the Government's initiatives in sustainable finance and climate change/adaptation along with Indonesia's G20 Presidency, presented IIF with enormous opportunities to expand its portfolio as already proven by the Company's involvement in some of the projects under the above initiatives.

In the future, the BoD aims for IIF to play a bigger role in supporting national infrastructure development through sustainable financing schemes.

SUSTAINABLE FINANCING FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ADHERE TO ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) PRINCIPLES

The BoD sees that responsible business management is associated with a good environmental, social, and governance principles. The BoD contends the implementation of these principles ever since the inception of the Company.

As previously mentioned, ESG enforcement in IIF is known through the Social and Environmental Principles and operates under dedicated division, the Social and Environmental Division. These principles lie within every single project under IIF's portfolio.

Being commercially oriented IIF offers innovative products and services to finance infrastructure development projects based on IIF's 8 (eight) social and environmental (S&E) principles.

Direksi meyakini bahwa penerapan ESG yang kuat merupakan bentuk pengendalian risiko yang pada jangka panjang dapat menghemat biaya pelaku usaha serta meminimalisasi timbulnya risiko baru. Direksi juga menjadikan prinsip-prinsip ESG sebagai salah satu perangkat untuk memastikan praktik bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hal inilah yang pada akhirnya menjadikan IIF sebagai sebuah institusi yang terus berkembang dan menjadi yang terbaik di antara para kompetitor.

Berkaitan dengan hal itu, dengan bangga kami menyampaikan pencapaian IIF terkait praktik ESG. Pada tahun 2021, Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun 2020 berhasil memperoleh Peringkat Emas dan penghargaan sebagai "A commendation for First Year ASRRAT" dalam partisipasinya di ajang bergengsi "Asian Sustainability Reporting Rating Award 2021 (ASRRAT 2021)," sebuah acara tahunan yang diselenggarakan oleh National Center for Sustainability Reporting.

IIF merasa sangat bangga dengan pencapaian yang luar biasa ini. Penghargaan tersebut menunjukkan kemampuan IIF dalam mengelola bisnis yang sehat dan berkelanjutan di tengah situasi yang menantang. Kami akan terus memegang teguh komitmen ini agar IIF terus memberikan nilai tambah yang optimal bagi para Pemangku Kepentingan.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Direksi memastikan bahwa seluruh insan IIF memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada setiap aspek kegiatan operasional bisnis. Penerapan GCG tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban akan tetapi tertanam dengan kuat untuk mewujudkan karakter yang baik, dan pada akhirnya menjadikan IIF sebagai pelaku bisnis yang beretika dan kompeten.

Untuk memastikan hadirnya kegiatan operasional yang efisien dan efektif, Direksi memastikan bahwa setiap organ IIF telah dilengkapi dengan *charter* yang secara jelas mengatur pemisahan tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawab.

The BoD believes that a strong ESG implementation is a form of risk control that over the long run saves company costs and minimize the occurrence of unprecedented risks. Furthermore, the BoD treats ESG principles as an antidote to ensure a lasting and durable healthy business practice. Eventually setting IIF as an institution to elevate to greater heights and becoming ultimate amongst competitors.

It is with great pride for us to share the accomplishment we achieved regarding our ESG practices. This year 2021 the Company's Sustainability Report 2020 received the Gold Ranking and complimented "A commendation for First Year ASRRAT" for its participation at the prestigious "Asian Sustainability Reporting Rating Awards 2021 (ASRRAT 2021)" an annual event organized by the National Center for Sustainability Reporting.

IIF is humbled by this remarkable achievement. The awards show IIF's ability to manage a sound and sustainable business amid a very challenging landscape. We will continue to uphold this unwavering commitment to continue providing optimal added value for our Stakeholders.

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

The BoD ensures that all IIF Employees are strongly committed to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in all aspects of business operations. The implementation of GCG is beyond formal obligation but is planted to embody a good character and eventually making IIF a wise and competent business player.

In ensuring a concise and effective operations, all functions within the IIF ecosystem is equipped with charters specifying clear outlines, duties, roles, and responsibilities.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2021, dengan berat hati kami sampaikan pengunduran diri Ibu Devi Pradnya Paramita dari posisi Chief Financial Officer.

APRESIASI

Menutup laporan ini, atas nama Direksi, perkenankanlah saya mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemegang saham atas dukungan dan kepercayaan yang terus menerus diberikan kepada IIF di masa-masa sulit ini.

Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Komisaris atas kontribusi dan keterlibatan aktif di sepanjang tahun 2021. Kepada seluruh karyawan IIF, kami berterima kasih atas kerja keras, inisiatif, dan dedikasi yang diberikan kepada Perseroan, yang semuanya menjadi penentu sukses dan pencapaian Perseroan, dan tanpa semuanya itu Perseroan tidak dapat melangkah sejauh ini.

Direksi berharap Perseroan dapat mempertahankan dan terus meningkatkan semua pencapaian yang sudah diraih agar IIF dapat melompat lebih tinggi lagi dan berkontribusi bagi negara sebagai katalisator pembangunan infrastruktur di Indonesia dan memberikan pertumbuhan yang lebih baik di masa mendatang.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Towards the 2021, it is with heavy heart we must witness the resignation of our Chief Financial Officer, Ibu Devi Pradnya Paramita.

APPRECIATION

To conclude this report, on behalf of the BoD, I would like to extend my deepest gratitude to the shareholders for their endless support and trust they have placed in IIF during these difficult times.

Our appreciation is further extended to the Board of Commissioners for their contribution and involvement throughout 2021. To all IIF employees, your hard work, initiatives, and dedication to the Company is the driving factor to our success and achievements, without it all this will cease to exist.

The BoD sincerely hopes that all of us can maintain and leverage these accomplishments for IIF to keep elevating into greater levels and become a contributor to this nation as a catalyst for infrastructure development in Indonesia and deliver stronger growth in the future.

Atas nama Direksi,
On behalf of the Board of Directors,



Reynaldi Hermansjah

Presiden Direktur & CEO
President Director & CEO

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Informasi Perseroan Company Information	32	Demografi Karyawan Employee Demography	68	Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Name and Address of Supporting Institutions and/or Professions	78
Sekilas Perusahaan Company at a Glance	33	Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Competency Development	70	Informasi pada Situs Web Perusahaan Information on the Company's Website	79
Jejak Langkah Milestones	34	Biaya Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021 Training and Employee Competency Development Expenses in 2021	71	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Eksekutif, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Training/Education for the Board of Commissioners, Directors, Executive Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit	80
Logo Perusahaan Company Logo	37	Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	72	Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri Membership in Association in the Industry	87
Visi dan Misi Vision and Mission	38	Informasi Pemegang Saham Utama Main Shareholders Information	73	Perubahan Komposisi Direksi Changes in the Composition of the Board of Directors	87
5 Pilar Strategi Bisnis Utama 5 Main Business Strategy Pillars	39	Daftar Entitas Anak & Struktur Grup Perusahaan List of Subsidiaries & Company Group Structure	75	Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Changes in the Composition of the Board of Commissioners	87
Bidang Usaha Line of Business	40	Kronologis Pencatatan Saham Share Listing Chronology	75		
Sektor Pembiayaan Infrastruktur Infrastructure Financing Sector	42	Kronologi Pencatatan Obligasi Bond Listing Chronology	75		
Portofolio IIF 2021 IIF's Portofolio in 2021	44	Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Listing	77		
Wilayah Operasional Areas of Operation	48				
Struktur Organisasi Organization Structure	50				
Profil Direksi The Board of Directors Profile	51				
Profil Komite Eksekutif Executive Committee Profile	56				
Profil Dewan Komisaris The Board of Commissioners Profile	57				





INFORMASI PERSEROAN

Company Information



Nama Perusahaan

Company Profile

PT Indonesia Infrastructure Finance



Penyebutan Lain

Other Name

IIF

Kode Obligasi

Bond Code

IIF



Nama Bursa

Exchange Name

PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
Singapore Exchange (SGX)



Bidang Usaha

Line of Business

Pembiayaan Infrastruktur
Infrastructure Financing



Alamat Kantor Pusat

Head Office Address

Prosperity Tower 53rd-55th Floor District
8, Sudirman Central Business District, Lot
28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
12190



Tanggal Pencatatan Obligasi Domestik

Local Bond Listing Date

- Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance 2016: 19 Juli 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I 2019: 19 Desember 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II 2020: 22 Oktober 2020
- Bond I of Indonesia Infrastructure Finance 2016: July 19, 2016
- Shelf Registration Bond I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019: December 19, 2019
- Shelf Registration Bond I of Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020: October 22, 2020



Produk dan/atau Jasa

Products and/or Services

Produk Investasi (*fund-based* dan *non fund-based*) dan *Advisory* Investment Products (*fund-based* and *non-fund based*) and *Advisory*

T. : +62 21 5082 6600

F. : +62 21 5082 6601

E. : info@iif.co.id

www.iif.co.id

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Nastantio W. Hadi

E. : corsec@iif.co.id

T. : +62 21 2991 5060



Tanggal Pendirian

Date of Establishment

15 Januari 2010
January 15, 2010



Status Perusahaan

Company Status

Perusahaan Swasta
Private Company



Tanggal Pencatatan Obligasi Global

Global Bond Listing Date

Obligasi Berkelanjutan Global USD Regulasi S
Indonesia Infrastructure Finance 2021
Senior Unsecured Sustainability Regulation S Bond of
Indonesia Infrastructure Finance Year 2021



Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) (30,00%)
- International Finance Corporation (IFC) (19,99%)
- Asian Development Bank (ADB) (19,99%)
- DEG – Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (15,12%)
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) (14,90%)



Modal Dasar

Authorized Capital

2.000.000 lembar saham
2.000.000 shares

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Subscribed and Paid Up Capital

Rp2 triliun

Rp2 trillion



Jumlah Karyawan tahun 2021

Total Headcount in 2021

116 orang
116 employees



Media Sosial

Social Media

Instagram : @pt_iif

LinkedIn : IndonesianInfrastructureFinance

Youtube : PT Indonesia Infrastructure Finance



Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No.100/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Kepada PT Indonesia Infrastructure Finance.
- Akta Pendirian No. 34 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., selaku pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123.
- Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (PMK) No. 100/2009 on Infrastructure Financing Companies.
- Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 dated 6 August 2010 on the Granting of Infrastructure Financing Company Business Permit to PT Indonesia Infrastructure Finance.
- Deed of Establishment No. 34 dated 15 January 2010, made before Aulia Taufani, S.H., substituting for Sutjipto S.H., Notary in Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. AHU21503. AH.01.01.Tahun 2010 dated 28 April 2010, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated 11 March 2011, Supplement No. 5123.

SEKILAS PERUSAHAAN

The Company at a Glance



PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) didirikan atas prakarsa Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan lembaga multilateral lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 100 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Dalam menarik minat pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, maka sejak Perseroan didirikan pada tanggal 15 Januari 2010, Perseroan lebih berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Hingga saat ini, Perseroan telah menyediakan beragam produk inovatif, baik produk *fund-based* seperti pinjaman jangka panjang, maupun produk *non-fund based* seperti penjaminan serta layanan lainnya yang berkaitan dengan proyek infrastruktur.

Di tahun 2021, IIF sudah menapaki 11 tahun perjalanan bisnisnya sebagai katalisator percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Perseroan berkomitmen penuh akan selalu menerapkan praktik bisnis terbaik sesuai standar nasional dan internasional dalam menjalankan kegiatan operasinya sehingga citra dan reputasi positif Perseroan di mata para pemangku kepentingan sebagai institusi keuangan non-bank nasional yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur senantiasa terjaga.

Didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi unggul di bidang *project financing* serta ditopang oleh struktur permodalan yang kuat dari para pemegang saham serta pinjaman subordinasi jangka panjang dari Bank Dunia dan ADB, Perseroan optimis mampu menjaga kelangsungan usahanya di tahun-tahun mendatang sehingga tetap dapat memberikan solusi pembiayaan yang berkelanjutan bagi pembangunan infrastruktur nasional.

Informasi Perubahan Nama Perusahaan

Sejak pertama kali didirikan sampai dengan Laporan Tahunan 2021 ini selesai dituliskan, Perseroan tidak pernah melakukan perubahan nama dalam bentuk apapun.

PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) was founded on the initiatives of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the World Bank, Asian Development Bank (ADB) and other multilateral institutions in accordance with the Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 100/2009 with reference to Infrastructure Financing Companies.

In enticing the private sector into participating into financing of the infrastructure development in Indonesia, since the Company's establishment on 15 January 2010, the Company has primarily laid its focus on commercially-feasible infrastructure projects. To date, the Company has provided variety of innovative fund-based products such as long-term loans, non-fund-based products inclusive of guarantees and other infrastructure related projects.

As of 2021, IIF was already in its 11th year of journey as a catalyst in the acceleration of infrastructure development in Indonesia. The Company is fully committed to always implementing the best business practices according to national and international standards in conducting its operational activities in order for it to keep its positive image and reputation in the eyes of its stakeholders as a national non-bank financial institution that runs business in infrastructure financing.

Backed by an exceling pool of competent human resources in the field of project financing, coupled with the strong shareholders' capital structure and the addition of long-term subordinated loans from the World Bank and ADB, the Company is optimistic that it can sustain its business operations in the years to come and offer sustainable financing solutions for national infrastructure development.

Information on Company Name Change

Since it was first established until the completion of this 2021 Annual Report, the Company had not changed its name in any form.

JEJAK LANGKAH

Milestones

2010

Bediri pada 15 Januari 2010 dengan komposisi pemegang saham awal terdiri dari PT SMI (Persero), IFC, ADB, dan DEG.

IIF was established on 15 January 2010, with PT SMI (Persero), IFC, ADB, and DEG as its founding shareholders.

2011

Memperoleh pendanaan (*Subordinated Loan*) senilai USD100 juta dari Bank Dunia.

Received subordinated loan of USD 100 million from the World Bank.

2012–2013

- Membangun kapabilitas organisasi;
- Membangun kesadaran pasar/potensi pasar dan pengenalan terhadap produk;
- SMBC menjadi salah satu pemegang saham IIF; dan
- Penandatanganan pinjaman komersial pertama IIF untuk proyek Jalan Tol Cipali dengan nilai pembiayaan sebesar Rp500 miliar.

- Completed institutional and organisational development.
- Improved risk management platform and framework.
- Received IFC A/B Funding of USD 250 million.
- Reached total assets of Rp4.7 trillion and investment commitment of Rp2.5 trillion.

2015

- Meraih peringkat korporasi dan obligasi rupiah “AAAidn” dari Fitch Indonesia;
- Penambahan jumlah modal disetor menjadi sebesar Rp2 triliun;
- Pembentukan tim sindikasi;
- Penguatan *brand equity* IIF dengan mengikuti konferensi Euromoney;
- Melakukan *stress test* portofolio;
- Meningkatkan aspek kepatuhan SEMS terhadap IFC PS 2012; dan
- Menetapkan risiko kredit berdasarkan parameter IIF dan menyesuaikan modal pemingkatan risiko IIF.

- Received AAAidn rating from Fitch Indonesia.
- Increased paid-up capital to Rp2 trillion in compliance with prevailing regulations.
- Established syndication team.
- Strengthened IIF’s brand equity through participation in the Euromoney conference.
- Conducted portfolio stress test.
- Augmented SEMS compliance with IFC PS-2012.
- Established credit risk based on IIF’s parameters and adjusted IIF’s risk rating model.

2014

- Menyelesaikan pengembangan organisasi dan kelembagaan;
- Memperkuat kerangka dan *platform* manajemen risiko;
- Memperoleh Pendanaan IFC A/B sebesar USD250 juta; dan
- Total aset IIF tercatat mencapai Rp4,7 triliun dan komitmen investasi dibukukan sebesar Rp2,5 triliun.

- Completed institutional and organisational development.
- Improved risk management platform and framework.
- Received IFC A/B Funding of USD 250 million.
- Reached total assets of Rp4.7 trillion and investment commitment of Rp2.5 trillion.

2016

- Mendapatkan peringkat “idAAA” dari Pefindo;
- Bertindak sebagai *Mandated Lead Arranger* pada proyek KPBU IIF yang pertama;
- Penerbitan Obligasi Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 Seri A, B, dan C dengan total nilai sebesar Rp1,5 triliun; dan
- Memperoleh pendanaan dari sindikasi bank asing senilai USD150 juta.

- Received idAAA rating from Pefindo.
- Acted as Mandated Lead Arranger for the first time for IIF’s first PPP project.
- Issued Indonesia Infrastructure Finance Bonds I Year 2016 Series A, B, and C amounting to Rp1.5 trillion.
- Received funding from a syndication of foreign banks amounting to USD 150 million.

2017

- Bertindak sebagai *financial advisor* untuk proyek *Merger & Acquisition* (M&A) terbesar dengan nilai mencapai USD92,87 juta;
- Pembelian obligasi global berdenominasi USD yang pertama di Indonesia, yaitu *Komodo Bonds* dengan total nilai mencapai Rp2 triliun. Obligasi tersebut diterbitkan oleh BUMN operator jalan tol;
- Penandatanganan perjanjian kredit dengan Japan International Corporation Agency (JICA) sebesar JPY8 miliar; dan
- Mendapat penghargaan dari IJGlobal untuk akuisisi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Chevron berkapasitas 227 MW di Jawa Barat.

- Became a financial advisor for a Merger & Acquisition (“M&A”) project worth USD 92.87 million.
- Participated in the first Global Bond issued in USD in Indonesia, the so-called Komodo Bonds, worth Rp2 trillion and issued by a toll road operator SOE.
- Signed a loan agreement with the Japan International Corporation Agency (JICA) in the amount of JPY 8 billion.
- Received an award from IJGlobal for the acquisition of the 227 MW Chevron Geothermal Power Plant (“PLTP”) project in West Java.

2018

- Berpartisipasi sebagai *anchor investor* pada *Corporate Green Bond* pertama di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *Green Bond* dan standar *Green Bond ASEAN* untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan nilai emisi sebesar USD660 juta;
 - Menyediakan fasilitas jaminan untuk proyek pembangunan PLTB pertama di Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan kapasitas produksi mencapai 70MW; dan
 - Berpartisipasi pada RDPT untuk mendukung pembangunan jalan tol sesuai dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
- Participated as an anchor investor in the first Corporate Green Bond to be issued in accordance with the Green Bond principles and the ASEAN Green Bond Standards in Indonesia for the construction of a Geothermal Power Plant (PLTP) with an issued value of USD 660 million.
 - Provided a guarantee facility for the construction of the first Wind Power Plant in Indonesia with a capacity of 70MW in South Sulawesi.
 - Participated in a Limited Participation Mutual Fund to support the construction of toll roads in line with the National Strategic Project.

2019

- Berpartisipasi pada ajang *World Bank Mission for Sustainable Financing*;
 - Penandatanganan perjanjian fasilitas *cash deficiency support* dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT);
 - Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk sektor jalan tol;
 - Penandatanganan fasilitas *bond credit enhancement* untuk sektor telekomunikasi;
 - Berpartisipasi sebagai *co-sponsor* dalam "Indonesia Financing and Investment Forum";
 - Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 dengan peringkat idAAA dari Pefindo; dan
 - Penandatanganan *Joint Financial Advisory Engagement Letter* untuk Proyek KPBU Bandara Hang Nadim Batam.
-
- Participated in the World Bank Mission for Sustainable Financing.
 - IIF signed a cash deficiency support facility agreement with Toll Road Operators.
 - Signed a memorandum of understanding (MoU) with a Indonesian Toll Authority for Toll Road sector.
 - Signed a bond credit enhancement facility for telecommunication sector.
 - Co-sponsored the Indonesia Financing and Investment Forum.
 - Listed the Shelf Registration Bond I Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019 on the IDX which was rated idAAA by Pefindo.
 - Signed a Joint Financial Advisory Engagement Letter for KPBU Project of Hang Nadim Airport, Batam.

2020

- Berpartisipasi dalam fasilitas pinjaman sindikasi untuk pembiayaan proyek pembangkit listrik tenaga baru dengan kapasitas 70 MW senilai USD50 juta;
 - Penandatanganan *Senior Term Loan Facility* untuk Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) di Gresik;
 - Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp1,5 triliun;
 - Melakukan kunjungan media ke kantor redaksi Bisnis Indonesia dan menyelenggarakan berbagai seri webinar dengan tema utama "Penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan IIF";
 - Peluncuran program *Euro Medium-Term Note* (EMTN) di Bursa Efek Singapura senilai USD500 juta dengan peringkat "BBB" dari Fitch Ratings.
- IIF participated in a syndication term loan facility to provide financing for 70 MW wind farm power plant project amounting to USD50 million.
 - Signed the Senior Term Loan Facility for Gresik Water Supply System (SPAM).
 - Listed Shelf Registration Bond I Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020 with the amount of Rp1.5 trillion
 - Conducted a media visit to Bisnis Indonesia's editorial team and conducted a series of webinar entitled "Implementation of IIF's Social and Environmental Principles".
 - IIF launched its first Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme of USD 500 million on the Singapore Stock Exchange (SGX) which was rated "BBB" by Fitch Ratings.

2021

- Penerbitan Surat Utang Senior (*global bond*) tanpa jaminan dengan tenor 5 tahun senilai USD150 juta dan tercatat di Singapore Stock Exchange (SGX) (memperoleh peringkat "BBB" dari Fitch Rating);
 - Perluasan portofolio melalui pembiayaan untuk pembangunan dan pengembangan proyek Jalur Kereta Api di Makassar – Parepare;
 - Bertindak sebagai *Mandated Lead Arranger* untuk Fasilitas sindikasi *Senior Term Loan* atas proyek Sistem Penyediaan Air Minum Pekanbaru yang dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha ("KPBU");
 - Bertindak sebagai pemodal pokok bagi calon peserta lelang untuk pembangunan Proyek *Intermediate Treatment Facility* untuk *Service Area* Jakarta Timur dan Selatan;
 - Mendapatkan penghargaan tingkat internasional: "The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 for Renewable Energy of the Year in Wind and Hydro";
 - Penandatanganan *Memorandum of Understanding* ("MoU") dengan Universitas Indonesia terkait Pendalaman Kerja Sama *Corporate Social Responsibility* ("CSR");
 - Reynaldi Hermansjah, Presiden Direktur IIF, dianugerahi sebagai "The Most Inspiring CEO for Sustainable Development" dalam ajang Bisnis Indonesia Awards 2021;
 - Untuk pertama kalinya menyalurkan pendanaan ke sektor baru di bidang Infrastruktur Sosial, yaitu bidang kesehatan;
 - Penandatanganan MoU dengan Jasa Sarana pada *event* "West Java Investment Summit 2021";
 - Pada ajang "Asia Sustainability Reporting Rating ke-17 (ASRRAT) 2021", IIF Mendapatkan Peringkat Emas atas Laporan Keberlanjutan 2020.
- The Issuance of USD150 million senior 5-year global bond on the Singapore Stock Exchange (SGX) (earning a "BBB" rating from Fitch Ratings);
 - Expanded portfolio through financing for the construction and development of the Makassar – Parepare Railway Project;
 - Acted as the Mandated Lead Arranger for the Syndicated Senior Term Loan Facility for the Tirta Siak Pekanbaru Drinking Water Supply System project implemented under the Government-Private Partnership ("PPP" scheme);
 - Acted as staple financier for the prospective bidders for the development of Intermediate Treatment Facility Projects for East and South Jakarta Service Areas;
 - Received international awards: "The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 for Renewable Energy of the Year in Wind and Hydro";
 - Signed a Memorandum of Understanding ("MoU") with the University of Indonesia for in-dept corporation n Corporate Social Responsibility ("CSR");
 - In the "Bisnis Indonesia Awards 2021" event, Mr. Reynaldi Hermansjah as the President Director of IIF was awarded as "The Most Inspiring CEO for Sustainable Development";
 - For the first time channeling funding to a new sector in the Social Infrastructure sector, namely the health sector;
 - Signed an MoU with Jasa Sarana at the "West Java Investment Summit 2021" event;
 - At the "17th Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021" event, IIF Received a Gold Rating for its 2020 Sustainability Report.

LOGO PERUSAHAAN

Company Logo



Penjelasan Logo:

Desain berbentuk blok dari logogram berbasis huruf ini menyerupai jembatan atau konstruksi jalan yang kokoh, menampilkan kesan kuat yang menggambarkan daya tahan IIF sebagai perusahaan serta keyakinannya akan potensi negara Indonesia. Warna abu-abu pada dua huruf pertama menggambarkan kenetralan, keseimbangan, dan pragmatisme, sedangkan warna oranye di huruf ketiga menggambarkan sisi inovatif, dinamis dan sisi optimis *brand*.

Description of Logo

The blocky design of the letter-based logogram expresses a sense of strength and resembles the shape of a sturdy bridge or road construction, symbolizing the resilience of IIF as a company and its strong belief in Indonesia's potential as a nation. The gray color of the first two initials represent neutrality, balance, and pragmatism, while the orange color of the third initial communicate the brand's innovative, dynamic, and optimistic side.

VISI DAN MISI

Vission and Mission



VISI Vision

Menjadi pelopor katalisator untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia.

To become the leading catalyst for financing infrastructure development in Indonesia.

MISI Mission

- Menjamin tercerminnya kepentingan pelaku investasi di dalam struktur kontrak dan konsesi;
- Memelopori ketersediaan beragam instrumen pembiayaan yang tepat bagi proyek infrastruktur; dan
- Menjadi mitra bagi lembaga keuangan dan lembaga investasi nasional lainnya dalam menyalurkan dana masyarakat ke dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang di Indonesia.
- To ensure investors' needs are reflected in contractual structures and concessions;
- To lead in offering a mix of financing instruments appropriate for infrastructure; and
- To work with Indonesia's financial institutions and other institutional investors to channel the nation's savings into long-term development of Indonesia's infrastructure



PERSETUJUAN VISI DAN MISI OLEH MANAJEMEN KUNCI

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan *review* dan menyetujui bahwa Visi, Misi & Nilai-nilai Budaya Perseroan yang berlaku saat ini masih selaras dengan dinamika bisnis dan tantangan yang dihadapi IIF ke depan.

Hingga Laporan Tahunan 2021 ini selesai dituliskan, IIF tidak melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap Visi, Misi & Nilai-nilai Budaya Perseroan.

VISION AND MISSION APPROVAL BY KEY MANAGEMENT

The Boards of Commissioners and Directors have reviewed the Company's Vision, Mission and Corporate Culture and come to terms that they are still relevant with IIF's business dynamics and future challenges.

As of the completion of this 2021 Annual Report, IIF had not made any changes or adjustments to the Company's Vision, Mission & Corporatet Culture.

5 PILAR STRATEGI BISNIS UTAMA

5 Main Business Strategy Pillars

Strategi IIF bertujuan untuk memfasilitasi investasi pihak swasta pada sektor infrastruktur di Indonesia dan membangun bisnis pembiayaan infrastruktur yang kuat dan dapat merespons dengan baik terhadap semua pemangku kepentingan. Berikut ini adalah 5 (lima) strategi utama IIF yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan:

IIF's strategy aims to facilitate private investment in the infrastructure sector in Indonesia and build a strong infrastructure financing business that can respond to the needs of all stakeholders. The following are IIF's 5 (five) main strategies that are aimed at driving growth:



Menyediakan Produk dan Solusi menyeluruh bagi seluruh klien;

Offers comprehensive Products and Solutions to all Clients;



Memberikan Jasa Konsultasi;

Offers Consulting Services;



Menyeimbangkan beragam sumber pendapatan perusahaan;

Keep a balance of the Company's Income;



Membidik proyek-proyek berkualitas tinggi; dan

Targets high quality projects; and



Melakukan mobilisasi dana dari para investor.

Mobilize funds from Investors.

BIDANG USAHA

Line of Business

Kegiatan Usaha Utama Sesuai Anggaran Dasar

Mengacu pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan perubahan terakhir melalui Akta No. 43 tanggal 24 Juli 2018, disebutkan bahwa IIF menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Kegiatan Usaha Berjalan di Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, IIF menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasarnya.

Pernyataan Bahwa Informasi Kegiatan Usaha Sudah Diungkapkan pada Laporan Keuangan

Seluruh informasi terkait Bidang/Kegiatan Usaha Perseroan beserta uraiannya telah disajikan pada Laporan Keuangan tahun buku 31 Desember 2021.

Produk dan/atau Jasa

Berikut ini adalah uraian produk dan/atau jasa yang disediakan IIF, antara lain berupa:

1. Produk Investasi
 - a) *Fund-based*
 - Bentuk pinjaman yang diberikan, antara lain: pinjaman senior, pinjaman subordinasi/*mezzanine financing*, *bridge financing*, *take-out financing* dan/atau pembiayaan kembali;
 - Pembiayaan kegiatan lain yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur selama diperkenankan oleh peraturan; dan
 - Investasi ekuitas.
 - b) *Non-fund-based*
 - Pemberian jasa dalam mencari pasar *swap* yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
 - Pemberian jaminan dalam bentuk, antara lain: pemenuhan liabilitas keuangan, *credit enhancement* dan/atau *performance bonds*.
2. Advisory

IIF menyediakan jasa *advisory* yang diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok pemangku kepentingan, yaitu:

 - A. Layanan Untuk Klien Sektor Publik
 - a) Layanan Konsultasi Transaksi

IIF memberikan layanan konsultasi transaksi kepada klien sektor publik, seperti kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD dalam proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan kontrak antara lembaga pemerintah yang berwenang dan pihak swasta, dimana pihak swasta menyediakan layanan publik dengan menanggung risiko finansial, operasional, dan teknis dalam proyek tersebut.

Main Business Activities According to the Articles of Association

Referring to Article 3 of the Company's Articles of Association as latest amended through Deed No. 43 dated July 24 2018, IIF shall run its business operations in the field of financing infrastructure projects in Indonesia.

Business Activities Carried Out in 2021

Throughout 2021, IIF was running the business in accordance with its Articles of Association.

Statement That Information on Business Activities Has Been Disclosed in the Financial Statements

All information related to the Company's Business Fields/Activities and their descriptions have been presented in the Financial Statements for the financial year December 31, 2021.

Products and/or Services

The following is a description of the products and/or services provided by IIF, among others in the form of:

1. Investment Products
 - a. *Fund-based*
 - Loans in the form of, among others, senior loans, subordinated loans/*mezzanine financing*, *bridge financing*, *take-out financing*, and/or *refinancing*;
 - Financing of other activities related to infrastructure projects under the prevailing laws and regulations; and
 - Equity investment.
 - b. *Non-fund-based*
 - Provide services involving search for *swap* market related to infrastructure financing companies;
 - Guarantees in the form of fulfillment of financial liabilities, *credit enhancement*, and/or *performance bonds*.
2. Advisory

IIF provides advisory services which are classified into 2 (two) stakeholder groups, namely:

 - A. Services For Public Sector Clients
 - a) Transaction Consulting Service

IIF provides transaction consulting services to public sector clients, such as ministry agencies, local governments, and SOE/ROE in infrastructure projects including contracts between authorized government agencies and private parties, where the private sector provides public services by assuming financial, operational risks, and technical in the project.

Jenis proyek infrastruktur yang dapat diberikan layanan konsultan transaksi mencakup:

- Proyek-proyek KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 38/2015; dan
- Proyek-proyek non-KPBU, antara lain proyek IPP di sektor pembangkit listrik atau proyek B2B PDAM di sektor air minum.

Lingkup dari layanan konsultan transaksi, antara lain pelaksanaan uji tuntas dan perencanaan proyek, pelaksanaan konsultasi pasar, studi kelayakan, analisis dukungan pemerintah, penyiapan struktur komersial, negosiasi, pelaksanaan proses tender/pengadaan, dan proses institusionalisasi dengan tujuan alokasi risiko yang optimal dan proyek yang *bankable*, di samping meningkatkan kualitas layanan yang dihasilkan proyek tersebut.

- b) Layanan Konsultasi Kebijakan
IIF memberikan layanan konsultasi kepada klien di sektor publik, seperti kementerian dan pemerintah daerah dalam memformulasikan kebijakan terkait proyek infrastruktur dan/atau peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan pengadaan infrastruktur.

B. Layanan Untuk Klien Sektor Swasta

- a) Kajian Finansial dan Ekonomi
IIF menyediakan layanan kepada klien yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak finansial dan ekonomi dari inisiatif pengembangan infrastruktur.
- b) Penasihat Keuangan
IIF menyediakan layanan *project finance* dan *corporate finance* kepada klien di sektor swasta dalam rangka memaksimalkan *value* bagi pemegang saham. Terkait keuangan proyek, IIF menyediakan jasa penasihat dalam proyek KPBU, studi kelayakan, dan penyiapan proyek. Sementara dalam hal keuangan perusahaan, IIF dapat memberikan jasa penggalangan dana ekuitas dan/atau pinjaman, valuasi, transaksi *joint venture*, dan *merger & acquisition*.

The types of infrastructure projects that transaction consulting services can provide include:

- PPP projects as stipulated in Presidential Regulation no. 38/2015; and
- Non-PPP projects, including IPP projects in the power generation sector or PDAM B2B projects in the drinking water sector.

The scope of transaction consulting services due diligence and project planning, market consultations, feasibility studies, analysis of government support, preparation of commercial structures, negotiations, tender/procurement process, and institutionalization processes with the aim of risk allocation optimal and bankable projects, in addition to improving the quality of services produced by the project.

- b) Policy Consulting Service
IIF provides consulting services to clients in the public sector, such as ministries and local governments in formulating policies related to infrastructure projects and/or capacity building in the context of accelerating infrastructure procurement.

B. Services For Private Sector Clients

- a) Financial and Economic Studies
IIF provides services to clients aimed at evaluating the financial and economic impact of infrastructure development initiatives.
- b) Financial Advisor
IIF provides project finance and corporate finance services to clients in the private sector in order to maximize shareholder value. Regarding project finance, IIF provides advisory services in PPP projects, feasibility studies, and project preparation. Meanwhile, in terms of corporate finance, IIF provides equity and/or loan fundraising services, valuation, joint venture transactions, and mergers & acquisitions.

SEKTOR PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Infrastructure Financing Sector

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, IIF telah menetapkan sektor-sektor prioritas yang diunggulkan sebagai target pembiayaan infrastruktur. Sesuai dengan Pasal 5 PMK No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, Surat OJK No. S-2/D.05/2018 dan POJK No. 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adapun lingkup objek pembiayaan infrastruktur IIF meliputi: infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat, sistem pengelolaan air limbah setempat, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, kawasan, pariwisata, kesehatan, lembaga permasyarakatan, perumahan rakyat, bangunan negara, kawasan industri, distribusi pangan dan infrastruktur lain.

In conducting infrastructure financing activities, IIF has determined the priority sectors of infrastructure project as its financing target. Pursuant to the Article 5 of the Regulation of the Minister of Finance No. 100/PMK.010/2009 regarding Financing Companies OJK Letter No. S-2/D.05/2018 and POJK No. 46/POJK.05/2020 on Infrastructure Financing Companies, objects for infrastructure financing include transportation, roads, water and irrigation, drinking water, centralized wastewater management systems, localized wastewater management systems, waste and toxic waste, telecommunications and informatics, electricity, oil and gas and renewable energy, conservation energy, urban infrastructure facilities, education, research and development infrastructure, sports, arts and cultural infrastructure facility, district, tourism, healthcare, correctional, public housing, state owned building, industrial estate, food distribution and other infrastructure.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

PORTOFOLIO IIF 2021

IIF's Portofolio in 2021

Jalan Tol Toll Road

- Pembangunan beberapa ruas jalan tol, antara lain Jakarta Outer Ring Road – seksi North W2, Jakarta; Jakarta Cikampek II (Japek II); Pemalang – Batang; Jakarta Inner City Toll seksi Semanan – Sunter – Pulo Gebang (fase 1)
- Obligasi Global Mata Uang Rupiah untuk Operator Jalan Tol
- Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Trans Jawa (RDPT MIET)
- Infrastructure Investment Fund Product - Toll Road Mandiri (Dinfra-001) di Jawa Timur
- Syndication Subordinated Term Loan untuk ruas jalan tol Cibitung – Cilincing
- Construction of a number of toll road sections, among others, Jakarta Outer Ring Road – North W2 section, Jakarta; Jakarta Cikampek II (Japek II), Pemalang – Batang; Jakarta Inner City Toll of Semanan – Sunter – Pulo Gebang section (phase 1)
- Global Bonds Order in Rupiah Denomination for Toll Road Operator
- Limited Funds of Mandiri Infrastruktur Ekuitas Trans Jawa (RDPT MIET)
- Infrastructure Investment Fund Product - Toll Road Mandiri (Dinfra-001) in East Java
- Syndication Subordinated Term Loan for Cibitung – Cilincing toll road section

Kereta Api dan Transportasi Massal Railway & Mass Transportation

- Senior Term Loan untuk membiayai pembangunan dan pengembangan Lintasan Pelapis Semen Tonasa dan Ketenagakerjaan Garongkong sebagai bagian dari Proyek Perkeretaapian Makassar – Parepare
- Senior Term Loan for the construction and development of Siding Track Semen Tonasa and Garongkong Emplacement as part of the Makassar – Parepare Railway Project

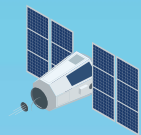
Bandara Airport

- Pembangunan infrastruktur transportasi udara di Jawa Barat
- Proyek ekspansi Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Bandara Internasional Ahmad Yani, Bandara Internasional Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Bandara Internasional Juanda, dan Konstruksi Bandara New Kulon Progo Yogyakarta
- Construction of air transportation infrastructure in West Java
- Expansion projects of Soekarno-Hatta International Airport, Syamsuddin Noor International Airport, Sultan Hasanuddin International Airport, Juanda International Airport, and Construction of New Kulon Progo Yogyakarta Airport

Telekomunikasi Telecommunication

- Proyek Palapa Ring II, Central Package of Indonesia
- Senior Term Loan untuk penyedia infrastruktur telekomunikasi, penyedia layanan internet dan televisi berbayar, dan penyedia layanan telekomunikasi
- Senior Term Loan untuk pembiayaan pembangunan proyek data center yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka – Cikarang
- Senior Term Loan untuk pembiayaan proyek telekomunikasi
- Senior Term Loan untuk Grup Perusahaan yang menyediakan solusi dan layanan telekomunikasi terintegrasi yang mencakup infrastruktur menara, sistem antena terdistribusi dalam gedung untuk jaringan seluler serta layanan internet broadband.
- Senior Term Loan untuk membiayai pembangunan 20 MW Hyperscale Data Center yang berlokasi di Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- Revolving working capital untuk pembiayaan proyek terkait dengan jasa pendukung sektor telekomunikasi
- Senior Term Loan dan General Working Capital Loan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T)





TELEKOMUNIKASI/TELECOMMUNICATION

- Palapa Ring II, Central Package of Indonesia projects
- Senior Term Loan for telecommunication infrastructure provider, internet service and pay TV provider, and telecommunication provider
- Senior Term Loan to data center project funding located in Jababeka Industrial Estate, Cikarang
- Senior Term Loan for telecommunication project financing
- Senior Term Loan for a Group Company that provides integrated telecommunication solutions and services that covers tower infrastructure, in-building distributed antenna systems for cellular networks, and fiberized broadband internet services
- Senior Term Loan to finance the development of 20 MW Hyperscale Data Center located in Bekasi, West Java Province
- Revolving working capital for project financing in telecommunication service sector
- *Senior Term Loan and General Working Capital Loan* for developing telecommunication infrastructure in the foremost, outermost and disadvantaged locations

Pelabuhan Sea Port

- **Pengembangan *International Container Terminal Expansion Phase II* di Sumatera Utara**
- Development of International Container Terminal Expansion Phase II in North Sumatera

Utilitas Air dan Limbah Water and Waste Utilities

- **Pemberian *bridging financing* untuk META untuk pengembangan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur**
- **Proyek SPAM di Bandar Lampung**
- **Proyek *Water Treatment Plant* di Tangerang dan di Serang Timur dengan total kapasitas 5.325 lps**
- **Proyek Infrastruktur Air Minum di Jakarta, Tangerang, dan Gresik**
- **Proyek SPAM di Pekanbaru**
- Provision of bridging financing for META for the development of Provision Project of Drinking Water System (SPAM) in Umbulan, East Java
- SPAM project in Bandar Lampung
- Water Treatment Plant project in Tangerang and East Serang, with a total capacity of 5,325 lps
- Drinking Water Infrastructure project in Jakarta, Tangerang, and Gresik
- SPAM project in Pekanbaru

Minyak dan Gas Oil and Gas

- **Pembiayaan pabrik LPG dengan kapasitas 40 MMSCFD di Jawa Timur**
- **Pengembangan Sistem Automasi Terminal BBM di Jawa Tengah**
- **Proyek Ekspansi LNG Tangguh di Papua Barat**
- ***Working Capital* dan *Non-cash Loan* untuk kontraktor EPC proyek migas**
- **Proyek pengembangan untuk pembangunan pipa kondensat sepanjang 55 km dan kilang kondensat mini yang berlokasi di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah**
- **Pembangunan *Floating Production Unit (FPU)* di Selat Madura**
- Financing for LPG plant with total capacity of 40 MMSCFD in East Java
- Development of Automation System at Fuel Terminal in Central Java
- Expansion project of LNG Tangguh in West Papua
- Working Capital and Non-Cash Loan for EPC contractor for oil and gas projects
- Development Project for Construction of 55 km condensate pipeline and mini condensate refinery located at North Barito Regency, Central Kalimantan
- Construction of a Floating Production Unit (FPU) in Madura Strait





Ketenagalistrikan Electricity

- Pembangunan beberapa pembangkit listrik, antara lain:
 - PLTA di Asahan, Sumatera Utara: 180 MW;
 - PLTA di Sulawesi Tengah: 3x3,7 MW
 - Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) di Sumatera Barat: 2X5 MW
 - PLTMH di Sulawesi Utara: 2x6 MW
 - PLTMH di Sulawesi Tengah: 2x5 MW
 - PLTMH di Jawa Barat: 2x3,7 MW
 - PLTMH di Sumatera Utara: 2x4 MW
 - PLTMH di Poso, Sulawesi Tengah: 2x5 MW
 - PLTMH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara: 2 X 1,75 MW
 - PLTP Wayang Windu, Jawa Barat: 227 MW
 - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Gorontalo Utara
 - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kupang, Nusa Tenggara
 - Proyek *Wind Farm* di Sidrap, Sulawesi Selatan: 70 MW
 - Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Aceh dengan kapasitas 1x12 MW, termasuk fasilitas interkoneksi sepanjang 2,2 km
- Pembangunan *Temporary Power Provider*
- Pemesanan Obligasi Global Mata Uang Rupiah untuk pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik di Riau dan Jawa Timur
- Construction of a number of power plants, including:
 - Hydro Power Plant (PLTA) in Asahan, North Sumatera: 180 MW;
 - PLTA in Central Sulawesi: 3x3,7 MW
 - Mini Hydro Power Plant (MHPP) in West Sumatera: 2x5 MW
 - MHPP in North Sulawesi: 2x6 MW
 - MHPP in Central Sulawesi: 2x5 MW
 - MHPP in West Java: 2x3,7 MW
 - MHPP in North Sumatera: 2x4 MW
 - MHPP in Poso, Central Sulawesi: 2x5 MW
 - MHPP South Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi Province: 2 X 1,75 MW
 - Geothermal Power Plant (PLTP) in Wayang Windu, West Java: 227 MW
 - Solar Power Plant (PLTS) in North Gorontalo
 - Solar Power Plant (PLTS) located in Kupang, East Nusa Tenggara
 - Wind Farm Project in Sidrap, South Sulawesi: 70 MW
 - Biomass Power Plant in Aceh with capacity of 1x12 MW, including the interconnecting facilities of 2.2 km
- Development of Temporary Power Provider
- Global Bond Order in Rupiah Denomination for the power plant construction projects in Riau and East Java



Healthcare
Kesehatan

- **Senior Term Loan** untuk pembangunan sayap gedung baru dari sebuah rumah sakit di Tangerang, renovasi dan pembangunan sayap gedung baru dari sebuah Rumah Sakit Umum Tipe C di Bekasi Bekasi
- Senior Term Loan for the construction of a hospital's new building wing in Tangerang, renovation and new wing building construction of a type C hospital in Bekasi

Industrial Estate
Kawasan Industri

- **Kawasan industri pertama yang terintegrasi dengan pelabuhan di Indonesia**
- The first integrated industrial and port estate in Indonesia

Lainnya
Others

- **Equity investment** untuk pengembangan proyek infrastruktur di Indonesia
- **Working Capital** untuk BUMN dengan kegiatan usaha utama sebagai Kontraktor EPC (**Engineering, Procurement, and Construction**) untuk proyek infrastruktur seperti transportasi (jalan/tol/jembatan) dan SPAM
- Equity investment for infrastructure project development in Indonesia
- Working Capital for SOE company with business activities focuses on Engineering, Procurement, and Construction (EPC) for infrastructure project such as transportation infrastructure (road/toll road/bridge) and drinking water

WILAYAH OPERASIONAL

Areas of Operation



IIF membiayai 50 proyek dari berbagai sektor industri di 24 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia dan melayani segmen usaha korporasi.

IIF has financed as many as 50 projects in various industrial sectors across 24 provinces of Indonesia and serves the corporate business segment.

Bandar Udara/Airport

Jawa/Java	Kalimantan
Jawa Barat/West Java	Kalimantan Selatan
Banten	Sulawesi
Jawa Tengah	Sulawesi Selatan
Jawa Timur	
Yogyakarta	

Ketenagalistrikan/Electricity

Sumatera	Jawa & Bali	Sulawesi
Aceh	Jakarta	Gorontalo
Riau	Jawa Barat	Sulawesi Utara
Sumatera Utara	Jawa Timur	Sulawesi Tengah
Sumatera Barat	Bali	Sulawesi Selatan

Minyak & Gas/Oil & Gas

Jawa Timur	Papua Barat
Jawa Tengah	Kalimantan Timur

Lainnya/Others

Sumatera Utara
Sumatera Selatan
Kalimantan Timur

Kawasan Industri Industrial Estate

Jawa Timur



Air Minum/Drinking Water

Jawa Timur	Banten
Lampung	Jakarta



Pelabuhan/Port

Jakarta	Sumatera Utara
---------	----------------



Telekomunikasi dan Informatika
Telecommunications and Informatics

Jakarta	Kalimantan
Jawa Barat	Sulawesi
Bali	Maluku



Jalan/Road

Jakarta	Jawa Timur
Jawa Barat	

STRUKTUR ORGANISASI

Organisation Structure



Head of Advisory	Irman Boyle
Head of Legal & Corporate Secretary	Nstantio W. Hadi
Head of HR & GA	Suli Indah Lestari
Head of Internal Audit	Yudi Adrial
Business Development 1 CIO-A	Kevin Tantra
Business Development 2 CIO-A	Luthfi Amara
Business Development 1 CIO-B	M. Izmir Fadilah Ifdial
Business Development 2 CIO-B	Anton Benyamin Simatupang
Project Supervision CIO-A	Febrina Kalangie
Project Supervision CIO-B	Mira Adelina Halim
Head of Transaction Legal	Sri Patriawati T.
Head of Syndication	M. Izmir Fadilah Ifdial

Equity	Vacant
Head of Credit Risk	Luciana Budiman
Operational, KYC & Project Compliance	Yulia Trinita
Head of Market Risk & Portfolio Management	Andy Johan T
Head of Social & Environmental	R. Budi Wiandjono
Head of Financial Controller	Sukarti
Head of Treasury	Faridh Hilmy Muhsinin
Head of IT & Operations	Myria Yasmina Ariandri
Head of Corporate Planning & MIS	Erwin Manurung
Economist	Vacant
Engineering	Vacant

PROFIL DIREKSI

The Board of Directors Profile



Reynaldi Hermansjah

Presiden Direktur & Chief Executive Officer

President Director & Chief Executive Officer

umur/age

54 Tahun/years

kewarganegaraan/citizenship

Warga Negara Indonesia

Domisili/Domicile

Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan pada 20 April 2019 berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Maret 2019, untuk masa kerja hingga 20 April 2022.

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti, Jakarta (1991)
- Magister dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Jakarta (2016)
- *Doctoral Degree of Management* dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Jakarta (2021)

Riwayat Pekerjaan:

Beliau adalah seorang profesional yang memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di sektor finansial, terutama di bidang investasi dan pasar modal. Beliau mengawali kariernya di Nomura Securities (1991), hingga selanjutnya dipercaya memegang sejumlah posisi senior di berbagai perusahaan nasional hingga internasional, seperti Mees Pierson Finas, BII LendLease Investments, dan Indonesian Bank Restructuring Agency. Sebelum bergabung di Perseroan, beliau juga sempat bertugas sebagai *Chief Financial Officer* PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2006–2016) dan *Chief Financial Officer* PT Pembangunan Jaya Infrastruktur (2016–2019).

Keanggotaan Organisasi/Sertifikasi:

Beliau merupakan anggota kehormatan ASEAN Federation of Engineering Organisations serta memiliki Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level-5.

Rangkap Jabatan:

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pelatihan dan Penghargaan 2021:

Daftar pelatihan dapat dilihat pada sub-bab Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Direksi, halaman 81-83.

Pada tahun 2021, Reynaldi Hermansjah mendapatkan penghargaan "The Most Inspiring CEO for Sustainable Development" pada Bisnis Indonesia Award 2021.

Hubungan Afiliasi:

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham.

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as President Director of the Company on April 20, 2019 based on Notarial Deed No. 1 dated March 1, 2019, for a term of office until April 20, 2022.

Educational Background:

- Bachelor Degree in Electrical Engineering from Trisakti University, Jakarta (1991)
- Master Degree from Pelita Harapan University (UPH), Jakarta (2016)
- Doctoral Degree in Management from Pelita Harapan University (UPH), Jakarta (2021)

Resume

He is a professional with more than 25 years of experience in the financial sector, particularly in the investment and capital market sector. He launched his career at Nomura Securities (1991), and was later trusted to assume several senior positions at various national and international companies, such as Mees Pierson Finas, BII LendLease Investments, and the Indonesian Bank Restructuring Agency. Prior to joining the Company, he served as Chief Financial Officer of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2006–2016) and Chief Financial Officer of PT Pembangunan Jaya Infrastruktur (2016–2019).

Membership in Organization/ Certification:

He is an honorary member of the ASEAN Federation of Engineering Organizations. He also hold a Certificate of Competence for Bank Risk Management Level-5.

Concurrent Position:

He has no concurrent positions in other companies and is not affiliated with any shareholders nor members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company.

2021 Training and Awards:

List of trainings is available in the sub-chapter of Training and/or Competency Development of the Board of Directors, page 81-83.

In 2021, He received "The Most Inspiring CEO for Sustainable Development" award from Bisnis Indonesia Award 2021.

Affiliate Relationship:

Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and shareholders.



I Made Wiracita Tantra

Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer
Managing Director & Chief Risk Officer

umur/age

55 Tahun/years

kewarganegaraan/citizenship
Warga Negara Indonesia

Domisili/Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer Perseroan pada 5 Maret 2018 berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 24 Januari 2018, kemudian beliau ditunjuk kembali berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 22 Maret 2021, untuk masa jabatan tiga tahun setelah penunjukkan.

Riwayat Pendidikan:

- Bachelor of Arts bidang Ekonomi dari State University of New York, Amerika Serikat (1988)
- Master of Science bidang Manajemen Keuangan dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat (1989 - 1990)

Riwayat Pekerjaan:

Beliau adalah seorang profesional perbankan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang manajemen kredit, pengendalian risiko, dan hubungan dalam lingkungan kelembagaan dan korporasi. Berikut ini adalah riwayat karier beliau sebelum diangkat sebagai Direksi di Perseroan:

- Analis kredit di American Express Bank, Jakarta (1990-1994)
- Vice President di Bank of America (1994-1999)
- Senior Relationship Manager - Group Internal Audit di Standard Chartered Bank, Jakarta (1999-2001)
- Senior Audit Manager - Group Internal Audit di Standard Chartered, New York (2001-2003)
- Senior Manager Credit - Corporate & Institutional Banking di Standard Chartered Bank, New York (2004-2006)
- Vice President Head of Mission - Inspection Generale North America, BNP Paribas, New York (2006-2010)
- Head of Mission - Inspection General di BNP Paribas, Singapura (2010-2013)
- Head of Credit, Standard Chartered Bank, Indonesia (2013-2014)
- Chief Risk Officer di PT Bank ANZ Indonesia (2014-2018)

Rangkap Jabatan:

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pelatihan/Sertifikasi tahun 2021:

Daftar pelatihan dapat dilihat pada sub-bab Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Direksi, halaman 81-83.

Hubungan Afiliasi:

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham.

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as Managing Director & Chief Risk Officer of the Company on March 5, 2018 based on Notarial Deed No. 15 dated January 24, 2018, he was then reappointed based on the Notary Deed No. 19 dated March 22, 2021, for term of office until three years after the appointment.

Educational Background:

- Bachelor of Arts Degree in Economics from State University of New York, United States (1988)
- Master of Science Degree in Financial Management from Johns Hopkins University, USA (1989 - 1990)

Resume:

He is a professional in banking with more than 25 years of experience in credit management, risk control, and relationships in institutional and corporate environments. The following is his resume prior to being appointed to the Board of Directors of the Company:

- Credit analyst at American Express Bank, Jakarta (1990-1994)
- Vice President at Bank of America (1994-1999)
- Senior Relationship Manager at Standard Chartered Bank, Jakarta (1999-2001)
- Senior Audit Manager - Group Internal Audit, at Standard Chartered, New York (2001-2003)
- Senior Manager Credit - Corporate & Institutional Banking at Standard Chartered Bank, New York (2004-2006)
- Vice President Head of Mission - Inspection Generale North America, BNP Paribas, New York (2006-2010)
- Head of Mission - Inspection General at BNP Paribas, Singapore (2010-2013)
- Head of Credit, Standard Chartered Bank, Indonesia (2013-2014)
- Chief Risk Officer at PT Bank ANZ Indonesia (2014-2018)

Concurrent Position:

He has no concurrent positions in other companies and is not affiliated with any shareholders nor members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company

2021 Training/Certification:

List of trainings is available in the sub-chapter of Training and/or Competency Development of the Board of Directors, page 81-83.

Affiliate Relationship:

Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and shareholders.



Mohammad Ramadhan Harahap

Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer

Managing Director & Chief Investment Officer

umur/age

54 Tahun/years

kewarganegaraan/citizenship

Warga Negara Indonesia

Domisili/Domicile

Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer Perseroan pada 30 Juni 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 16 Juni 2020, untuk masa kerja hingga 30 Juni 2020.

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia, Depok (1992)
- Master of Science bidang *Engineering Management* dari Northeastern University, Boston, Amerika Serikat (1994)

Riwayat Pekerjaan:

- Senior Manager Corporate Banking di PDFCI Bank (1996–2000)
- Assistant Vice President Corporate Banking di PT Bank Danamon Tbk (2000–2007)
- Director of Local Corporate di Standard Chartered Bank (2007–2013)
- Head of Large Local Corporates Global Banking di HSBC Indonesia (2014–2020).

Rangkap Jabatan:

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pelatihan/Sertifikasi tahun 2021:

Daftar pelatihan dapat dilihat pada sub-bab Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Direksi, halaman 81-83.

Hubungan Afiliasi:

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham.

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as Managing Director & Chief Investment Officer of the Company on June 30, 2020 based on Notarial Deed No. 13 dated June 16, 2020, for a term of office until June 30, 2020.

Educational Background:

- Bachelor Degree in Mechanical Engineering from the University of Indonesia, Depok (1992)
- Master of Science Degree in Engineering Management from Northeastern University, Boston, United States (1994)

Resume:

- Senior Manager Corporate Banking at PDFCI Bank (1996–2000)
- Assistant Vice President Corporate Banking at PT Bank Danamon Tbk (2000–2007)
- Director of Local Corporate at Standard Chartered Bank (2007–2013)
- Head of Large Local Corporates Global Banking at HSBC Indonesia (2014–2020).

Concurrent Position:

He has no concurrent positions in other companies and is not affiliated with any shareholders nor members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company

2021 Training/Certification:

List of trainings is available in the sub-chapter of Training and/or Competency Development of the Board of Directors, page 81-83.

Affiliate Relationship:

Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and shareholders.



Yanindya Bayu Wirawan

Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer

Managing Director & Chief Investment Officer

umur/age
48 Tahun/years

kewarganegaraan/citizenship
Warga Negara Indonesia

Domisili/Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer Perseroan pada 30 Juni 2020 berdasarkan Akta Notaris No.13 tanggal 16 Juni 2020, untuk masa kerja hingga 30 Juni 2023.

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Teknik Gas dan Petrokimia dari Universitas Indonesia, Depok (1996)
- Magister Manajemen Keuangan dan Perbankan dari Universitas Indonesia, Depok (1999)

Riwayat Pekerjaan:

- *Credit Analyst* di PT Bank Central Asia Tbk (1999–2005)
- *Assistant Vice President* di PT Bank DBS Indonesia (2005–2008)
- *Vice President* di HSBC Indonesia (2008–2012)
- *Senior Vice President* di Direktorat Investasi IIF (2012–2018)
- *Head of Product Development Division* IIF (2018–2020)

Rangkap Jabatan:

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pelatihan/Sertifikasi tahun 2021:

Daftar pelatihan dapat dilihat pada sub-bab Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Direksi, halaman 81-83.

Hubungan Afiliasi:

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham.

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as Managing Director & Chief Investment Officer of the Company on June 30, 2020 based on Notarial Deed No. 13 dated June 16, 2020, for a term of office until 30 June, 2023.

Educational Background:

- Bachelor Degree in Gas and Petrochemical Engineering from the University of Indonesia, Depok (1996)
- Master Degree in Financial and Banking Management from the University of Indonesia, Depok (1999)

Resume:

- *Credit Analyst* at PT Bank Central Asia Tbk (1999–2005)
- *Assistant Vice President* at PT Bank DBS Indonesia (2005–2008)
- *Vice President* at HSBC Indonesia (2008–2012)
- *Senior Vice President* at IIF Investment Directorate (2012–2018)
- *Head of Product Development Division* IIF (2018–2020)

Concurrent Position:

He has no concurrent positions in other companies and is not affiliated with any shareholders nor members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company

2021 Training/Certification:

List of trainings is available in the sub-chapter of Training and/or Competency Development of the Board of Directors, page 81-83.

Affiliate Relationship:

Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and shareholders.



Devi Pradnya Paramita*

Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer

Managing Director & Chief Financial Officer

umur/age

44 Tahun/years

kewarganegaraan/citizenship

Warga Negara Indonesia

Domisili/Domicile

Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer Perseroan pada 1 Desember 2019 berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 6 Desember 2019, untuk masa kerja hingga 1 Desember 2022.

Riwayat Pendidikan:

- Bachelor of Arts jurusan *International Relations and Affair* dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1999)
- Magister Keuangan jurusan khusus Manajemen Risiko dari ICMA Business School, Inggris (2000)
- Kursus Ekonomi di Foreign Service Institute (FSI), Washington D.C., Amerika Serikat (2006)

Riwayat Pekerjaan:

Beliau memiliki bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang cukup matang selama lebih dari 18 tahun di bidang keuangan perusahaan dan manajemen keuangan. Berikut ini adalah riwayat karier beliau sebelum diangkat sebagai Direksi di Perseroan:

- Senior Associates pada Divisi Financial Advisory Services, PricewaterhouseCoopers (PwC) (2001-2004)
- Ekonom di Kantor Pemerintah Amerika Serikat (2004-2007)
- Kepala *Corporate Finance* di PT Medco Energi Internasional Tbk (2008-2012)
- Kepala Departemen Keuangan di PT Bakrie & Brothers Tbk (2012-2015)
- Chief Financial Officer di PT Saka Energi Indonesia (2015-2019)
- Direktur PT VICO Indonesia (2016-2018)
- Kepala Hubungan Investor PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk (Mei 2019-Oktober 2019)

Rangkap Jabatan:

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pelatihan/Sertifikasi tahun 2021:

Daftar pelatihan dapat dilihat pada sub-bab Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Direksi, halaman 81-83.

Hubungan Afiliasi:

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham.

* Devi Pradnya Paramita mengundurkan diri dari Perseroan efektif tanggal 1 November 2021

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as Managing Director & Chief Financial Officer of the Company on December 1, 2019 based on Notarial Deed No. 1 dated December 6, 2019, for a term of office until December 1, 2022.

Educational Background:

- Bachelor of Arts Degree in *International Relations and Affairs* from Parahyangan Catholic University, Bandung (1999)
- Master Degree in Finance with a special degree in Risk Management from ICMA Business School, UK (2000)
- Economics Course at the Foreign Service Institute (FSI), Washington D.C., United States (2006)

Resume:

She has an extensive knowledge and experience of more than 18 years in the field of corporate finance and financial management. The following is her resume prior to being appointed as the Board of Directors of the Company:

- Senior Associates at the Financial Advisory Services Division, PricewaterhouseCoopers (PwC) (2001-2004)
- Economist at United States Government Office (2004-2007)
- Head of Corporate Finance at PT Medco Energi Internasional Tbk (2008-2012)
- Head of Finance Department at PT Bakrie & Brothers Tbk (2012-2015)
- Chief Financial Officer at PT Saka Energi Indonesia (2015-2019)
- Director of PT VICO Indonesia (2016-2018)
- Head of Investor Relations at PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk (May 2019-October 2019)

Concurrent Position:

She has no concurrent positions in other companies and is not affiliated with any shareholders or members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company

2021 Training/Certification:

List of trainings is available in the sub-chapter of Training and/or Competency Development of the Board of Directors, page 81-83.

Affiliate Relationship:

Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and shareholders.

* As of November 1st, 2021 Devi Pradnya Paramita's terms of service effectively ends

PROFIL KOMITE EKSEKUTIF

Executive Committee Profile



Irman Boyle

**Executive Vice President –
Head of Advisory Group**
Executive Vice President –
Head of Advisory Group

umur/age

53 Tahun/years

kewarganegaraan/citizenship
Warga Negara Indonesia

Domisili/Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai *Executive Vice President – Head of Advisory Group* pada April 2012.

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung (1993)
- *Master of Business Administration* dari Cass Business School, City University London, Inggris (1999)

Riwayat Pekerjaan:

- *Energy Specialist* di Asian Development Bank (ADB) (2004-2008)
- *Infrastructure Specialist* di PPPs Transaction Advisory Department di IFC Jakarta (2008-2012)
- *Country Representative* untuk Private Finance Advisory Network (2010-2011).

Rangkap Jabatan:

-

Hubungan Afiliasi:

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham.

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as Executive Vice President – Head of Advisory Group on April 2012.

Educational Background:

- Bachelor Degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB), Bandung (1993)
- Master Degree in Business Administration from Cass Business School, City University London, England (1999)

Resume:

- Energy Specialist at Asian Development Bank (ADB) (2004-2008)
- Infrastructure Specialist at PPPs Transaction Advisory Department at IFC Jakarta (2008-2012)
- Country Representative for the Private Finance Advisory Network (2010-2011).

Concurrent Position:

-

Affiliate Relationship:

Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and shareholders.

PROFIL DEWAN KOMISARIS

The Board of Commissioners Profile



Darmin Nasution

Presiden Komisaris & Komisaris Independen

President Commissioner & Independent Commissioner

umur/age

73 Tahun/years

kewarganegaraan/citizenship

Warga Negara Indonesia

Domisili/Domicile

Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai Presiden Komisaris & Komisaris Independen Perseroan pada 14 Juli 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 20 Juli 2020, untuk masa kerja hingga 14 Juli 2023.

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Depok (1976)
- Magister dan Doktorat di bidang Ekonomi dari University of Paris, Prancis (1986).

Riwayat Pekerjaan:

Sebelum bergabung di Perseroan, beliau sempat menerima mandat untuk mengisi sejumlah posisi penting di pemerintahan, antara lain:

- Kepala Bapepam-LK (2005–2006)
- Direktur Jenderal Pajak (2006–2009)
- Deputi Senior Gubernur (2009–2010)
- Gubernur Bank Indonesia (2010–2013)
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2015–2019).

Rangkap Jabatan:

- Komisaris Utama PT Smartfren Telecom Tbk (2020-sekarang)
- Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020-sekarang)
- Komisaris Utama PT Tripatra Multi Energi (2021 – sekarang)
- Komisaris PT Indika Energy Tbk (2021 – sekarang)
- Komisaris PT Kredivo (2021 – sekarang)
- Komisaris PT FinAccel Finance Indonesia (2021 – sekarang)

Hubungan Afiliasi:

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as President Commissioner & Independent Commissioner of the Company on July 14, 2020 based on Notarial Deed No. 14 on July 20 2020, for a term of office until July 14, 2023.

Educational Background:

- Bachelor Degree in Economics from the University of Indonesia, Depok (1976)
- Master and Doctorate Degrees in Economics from the University of Paris, France (1986).

Employment History:

Prior to joining the Company, he was mandated to assume a number of key positions in the government, including:

- Head of Bapepam-LK (2005–2006)
- Director General of Taxes (2006–2009)
- Senior Deputy Governor (2009–2010)
- Governor of Bank Indonesia (2010–2013)
- Coordinating Minister for Economic Affairs (2015–2019).

Concurrent Position:

- President Commissioner of PT Smartfren Telecom Tbk (2020-present)
- President Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020-present)
- President Commissioner of PT Tripatra Multi Energi (2021 – present)
- Commissioner of PT Indika Energy Tbk (2021 – present)
- Commissioner of PT Kredivo (2021 – present)
- Commissioner of PT FinAccel Finance Indonesia (2021 – present)

Affiliate Relationship:

Has no affiliation with the Company's shareholders, members of the Board of Directors, or fellow members of the Board of Commissioners.



V. Sonny Loho

Komisaris Independen

Independent Commissioner

umur/age

64 Tahun/years

kewarganegaraan/citizenship

Warga Negara Indonesia

Domisili/Domicile

Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada 4 Juni 2018, berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 26 Juni 2018. Selanjutnya, beliau kembali diangkat untuk masa kerja periode kedua hingga 19 Maret 2023 berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 19 Maret 2020.

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Ekonomi (Diploma IV) bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta (1987)
- *Master of Public and Management Finance* dari Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Amerika Serikat (1998)

Riwayat Pekerjaan:

- Direktur Pembinaan Keuangan BLU, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI (2006-2008)
- Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI (2008-2011)
- Inspektur Jenderal di Kementerian Keuangan RI (2011-2015)
- Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI (2015-2017)
- Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2018)
- Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2018-2020)

Keanggotaan Organisasi:

Beliau adalah seorang akuntan yang juga menjadi anggota Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintah dan Komite Pengarah Sektor Publik dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Beliau sempat menjabat posisi Ketua Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (2013-2015).

Rangkap Jabatan:

Komisaris PT Danareksa (Persero) (2020-sekarang)

Hubungan Afiliasi:

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as Independent Commissioner of the Company on June 4, 2018, based on Notarial Deed No. 16 dated June 26, 2018. He was later re-appointed for the second term of office until March 19, 2023 based on Notarial Deed No. 211 dated March 19, 2020.

Educational Background:

- Bachelor Degree in Economics (Diploma IV) in Accounting from the State College of Accountancy, Jakarta (1987)
- Master Degree in Public and Management Finance from Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA (1998)

Employment History:

- Director of BLU Financial Development, Directorate General of Treasury, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2006-2008)
- Director of Accounting and Financial Reporting, Directorate General of Treasury, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2008-2011)
- Inspector General at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2011-2015)
- Director General of State Assets, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2015-2017)
- Commissioner of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2018)
- Commissioner of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2018-2020)

Membership in Organization:

He is an accountant and also a member of the Government Accounting Standards Consultative Committee and the Public Sector Steering Committee of the Indonesian Institute of Accountants (IAI). He once served as Chairman of the Indonesian Government Internal Auditor Association (2013-2015).

Concurrent Position:

Commissioner of PT Danareksa (Persero) (2020-present)

Affiliate Relationship:

Has no affiliation with the Company's shareholders, members of the Board of Directors, or fellow members of the Board of Commissioners.



Rinaldi Firmansyah

Komisaris
Commissioner

umur/age
61 Tahun/years
kewarganegaraan/citizenship
Warga Negara Indonesia
Domisili/Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada 25 Januari 2018, berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 9 Februari 2018. Selanjutnya, beliau kembali diangkat untuk masa kerja periode kedua hingga 19 Maret 2023 berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 19 Maret 2020.

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung (1985)
- *Master of Business Administration* dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), Jakarta (1988)
- Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2014)

Riwayat Pekerjaan:

- *Product Manager Citibank*, Jakarta (1988–1991)
- *Vice President of Finance* PT Tirtamas Comexindo (1991–1997)
- *Vice President of Finance* PT Kualita Exporindo International (1991–1992)
- *Direktur* PT Bahana Securities (1997–2001)
- *Direktur Utama* PT Bahana Securities (2001–2003)
- *Komisaris dan Ketua Komite Audit* PT Semen Padang (2003–2004)
- *Chief Financial Officer* PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2004–2007)
- *Direktur Utama* PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2007–2012)
- *Komisaris* PT Elnusa Tbk (2014–2018)

Rangkap Jabatan:

- *Komisaris Independen* PT Blue Bird Tbk (2013–sekarang)
- *Komisaris* PT Pertamina Hulu Energi
- *Komisaris* PT Pinnacle Persada Investama

Sertifikasi:

Chartered Financial Analyst dari CFA Institute, Amerika Serikat (1998)

Hubungan Afiliasi:

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama.

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as Independent Commissioner of the Company on January 25, 2018, based on Notarial Deed No. 7 dated February 9, 2018. He was later re-appointed for the second term of office until March 19, 2023 based on Notarial Deed No. 21 dated March 19, 2020.

Educational Background:

- Bachelor Degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB), Bandung (1985)
- Master Degree in Business Administration from the Indonesian Management Development Institute (IPMI), Jakarta (1988)
- Doctoral Degree in Management Science from Padjadjaran University, Bandung (2014)

Employment History:

- *Product Manager* at Citibank, Jakarta (1988–1991)
- *Vice President of Finance* of PT Tirtamas Comexindo (1991–1997)
- *Vice President of Finance* of PT Kualita Exporindo International (1991–1992)
- *Director* of PT Bahana Securities (1997–2001)
- *President Director* of PT Bahana Securities (2001–2003)
- *Commissioner and Chairman of the Audit Committee* of PT Semen Padang (2003–2004)
- *Chief Financial Officer* of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2004–2007)
- *President Director* of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2007–2012)
- *Commissioner* of PT Elnusa Tbk (2014–2018)

Concurrent Position:

- *Independent Commissioner* of PT Blue Bird Tbk (2013–present)
- *Commissioner* of PT Pertamina Hulu Energi
- *Commissioner* of PT Pinnacle Persada Investama

Certification:

Chartered Financial Analyst from CFA Institute, USA (1998)

Affiliate Relationship:

Has no affiliation with the Company's shareholders, members of the Board of Directors, or fellow members of the Board of Commissioners.



Yon Aرسال

Komisaris
Commissioner

umur/age
49 Tahun/years

kewarganegaraan/citizenship
Warga Negara Indonesia

Domisili/Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada 22 Juni 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 15 Juli 2020, untuk masa kerja hingga 22 Juni 2023.

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1995)
- *Master of Arts* dari Kobe University, Jepang (2004)
- Magister Sains bidang Administrasi Fiskal dari Universitas Indonesia, Jakarta (2005)
- Doktorat bidang Ilmu Ekonomi dari Kobe University, Jepang (2007)

Riwayat Pekerjaan:

- Kepala Sub-Direktorat Dampak Kebijakan, Direktorat Jenderal Pajak (2011-2013)
- Kepala Sub-Direktorat Potensi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (2013-2016)
- Personalia Riset Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (2016)
- Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (2016-2020)

Keanggotaan Organisasi:

Anggota Badan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia *ex-officio* Direktorat Jenderal Pajak (2018-2020)

Rangkap Jabatan:

Staf Ahli bidang Kepatuhan Perpajakan di Kementerian Keuangan RI (2020-sekarang).

Hubungan Afiliasi:

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham karena merupakan perwakilan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as Commissioner of the Company on June 22, 2020 based on Notarial Deed No. 10 dated July 15, 2020, for a term of office until June 22, 2023.

Educational Background:

- Bachelor Degree in Economics from Padjadjaran University, Bandung (1995)
- Master Degree in Arts from Kobe University, Japan (2004)
- Master of Science Degree in Fiscal Administration from the University of Indonesia, Jakarta (2005)
- Doctoral Degree in Economics from Kobe University, Japan (2007)

Employment History:

- Head of Sub-Directorate of Policy Impact, Directorate General of Taxes (2011-2013)
- Head of Sub-Directorate of Tax Potential, Directorate General of Taxes (2013-2016)
- Tax Intensification and Intensification Research Personnel, Directorate General of Taxes (2016)
- Director of Potential, Compliance and Taxation, Directorate General of Taxes (2016-2020)

Membership in Organization:

Member of the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants *ex-officio* of the Directorate General of Taxes (2018-2020)

Concurrent Position:

Expert Staff in Tax Compliance at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2020-present).

Affiliate Relationship:

He has no affiliation with members of the Board of Directors and fellow members of the Board of Commissioners, but has an affiliation with shareholders because he is a representative of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).



Bhimantara Widyajala

Komisaris
Commissioner

umur/age
54 Tahun/years

kewarganegaraan/citizenship
Warga Negara Indonesia

Domisili/Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada 2 Juni 2017, berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 9 Agustus 2017. Selanjutnya, beliau kembali diangkat untuk masa kerja periode kedua hingga 21 Maret 2022 berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 21 Maret 2019.

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Depok (1992)
- Sarjana Ekonomi (Diploma IV) bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta (1995)
- *Master of Science in Finance* dari George Washington University, Amerika Serikat (1999)

Riwayat Pekerjaan:

- Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan (2018-2019)
- Direktur Surat Utang Negara, Kementerian Keuangan RI (2011)
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI (2012)
- Komisaris PT Indonesia Power (2009-2012)
- Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (2012-2013)
- Direktur Eksekutif Asian Development Bank (ADB) di Filipina (2013-2017). Selama menjabat di ADB, beliau aktif berorganisasi dengan keterlibatan sebagai berikut:
 - Ketua dan anggota Komite Dewan Etika (November 2015-Juni 2017);
 - Ketua Komite Audit (Juli 2014-November 2015);
 - Anggota Komite Dewan Tinjauan Kepatuhan (Juli 2013-November 2015);
 - Anggota Komite Audit (Juli 2013-Juni 2017).
- *Dean* untuk Direksi Asian Development Bank (ADB) (Januari-Juni 2017)

Rangkap Jabatan:

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau adalah Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer pada Kementerian Keuangan.

Pelatihan/Sertifikasi tahun 2021:

Daftar pelatihan dapat dilihat pada sub-bab Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, halaman 80.

Sertifikasi:

- *Certified Internal Auditor (CIA)*
- *Certified Fraud Examiner (CFE)*
- *Qualified Government Internal Auditor (QGIA)*
- *Chartered Accountant (CA)*
- *Certified Public Accountant (CPA) dari Australia*
- *Certification in Risk Management Assurance (CRMA)*
- *Certified Professional Management Accountant (CPMA)*
- *Certified Professional Human Resources Management (CPHRM)*

Hubungan Afiliasi:

Bapak Bhimantara Widyajala tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Beliau merupakan perwakilan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as Commissioner of the Company on June 2, 2017, based on Notarial Deed No. 7 dated August 9, 2017. He was later re-appointed for the second term of office until March 21, 2022 based on Notarial Deed No. 31 dated March 21, 2019.

Educational Background:

- Bachelor Degree in Law from the University of Indonesia, Depok (1992)
- Bachelor Degree in Economics (Diploma IV) in Accounting from the State College of Accountancy (STAN), Jakarta (1995)
- Master of Science Degree in Finance from George Washington University, USA (1999)

Employment History:

- Acting Director of Center for Financial Profession Supervisory of the Ministry of Finance (2018-2019)
- Director of Government Securities, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2011)
- Secretary of the Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2012)
- Commissioner of PT Indonesia Power (2009-2012)
- Commissioner of PT Perusahaan Pengelola Aset (2012-2013)
- Executive Director of the Asian Development Bank (ADB) in the Philippines (2013-2017). During his tenure at ADB, he was actively involved in the following organizations:
 - Chairman and a member of Ethics Committee of the Board (November 2015-June 2017);
 - Chairman of Audit Committee of the Board (July 2014-November 2015);
 - Member of Board Compliance Review Committee (July 2013-November 2015);
 - Member of Audit Committee of the Board (July 2013-June 2017).
- Dean for the Board of Directors of the Asian Development Bank (ADB) (January-June 2017)

Concurrent Position:

In addition to serving as the Company's Commissioner, he is Director Capacity and Transfer in the Ministry of Finance.

2021 Training/Certification:

List of trainings is available in the sub-chapter of Training and/or Competency Development of the Board of Commissioners, page 80.

Certification:

- Certified Internal Auditor (CIA)
- Certified Fraud Examiner (CFE)
- Qualified Government Internal Auditor (QGIA)
- Chartered Accountant (CA)
- Certified Public Accountant (CPA) dari Australia
- Certification in Risk Management Assurance (CRMA)
- Certified Professional Management Accountant (CPMA)
- Certified Professional Human Resources Management (CPHRM)

Affiliate Relationship:

Mr. Bhimantara Widyajala has no affiliation with members of the Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners. He is a representative of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).



Lodewijk Govaerts

Komisaris
Commissioner

umur/age
56 Tahun/years

kewarganegaraan/citizenship
Warga Negara Belanda

Dutch

Domisili/Domicile
Amsterdam, Belanda

Amsterdam, Netherlands

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada 26 Juli 2019 berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 14 Agustus 2019, untuk masa kerja hingga 21 Maret 2022, selanjutnya diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Maret 2025.

Riwayat Pendidikan:

Doctorandus (Drs) in Business Administration – equiv. to BBA plus MBA, Groningen University, The Netherlands.

Riwayat Pekerjaan:

Lodewijk memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang Manajemen Keuangan dan Bisnis dalam melayani perusahaan internasional, lembaga keuangan, dan individu HNW di seluruh dunia. Beliau telah dan masih terlibat secara aktif pada kegiatan M&A, Pasar Modal, Ekuitas Swasta, Keuangan Perusahaan, Keuangan Terstruktur & Proyek, dan Manajemen Aset di hampir semua sektor industri (Tek).

Selama perjalanan kariernya, beliau menjabat berbagai peran eksekutif senior dan C-level di 9 negara di Asia Pasifik & Timur Tengah, Eropa, dan Karibia, termasuk:

- Country CEO Scotiabank Malaysia
- Country CEO ABN AMRO Indonesia
- Head Credit Portfolio Management ABN AMRO Asia Pacific & Middle East
- Assistant Managing Director Scotiabank - MCB Dutch Caribbean.

Penerima penghargaan kewirausahaan dan berbagai penghargaan pasar keuangan.

Rangkap Jabatan:

- Managing Partner CNX Transaction Partners, Amsterdam, Belanda
- Direktur Non-Eksekutif Origen Fresh (Nominasi Goodwell), Nairobi, Kenya
- Anggota Dewan Pengawas Universitas Leiden, Leiden, Belanda.

Sertifikasi:

Dianugerahi gelar Chartered Banker (“batch pertama”) dari Asian Institute of Chartered Bankers (2015). Menyelesaikan kursus Tata Kelola Perusahaan pasca sarjana Wagner untuk direktur non-Eksekutif (2018). Menyelesaikan kursus FinTech Universitas Harvard (2020).

Hubungan Afiliasi:

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan sesama anggota Dewan Komisaris, namun memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Asian Development Bank (“ADB”), menjabat sebagai Nominee Non-Executive Director ADB di Dewan Komisaris IIF.

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as Commissioner of Company on July 26, 2019, based on Notarial Deed No. 10 dated August 14, 2019, until March 21, 2022, subsequently extended until March 21, 2025.

Educational Background:

Doctorandus (Drs) in Business Administration – equiv. to BBA plus MBA – Groningen University, The Netherlands.

Employment History:

Lodewijk brings more than 25 years of Financial and Business Management experience serving international companies, financial institutions, and HNW individuals across the globe. He has been and still is deeply involved in M&A, Capital Markets, Private Equity, Corporate Finance, Structured & Project Finance and Asset Management in nearly all industry (Tech) sectors.

Over the course of his career, he assumed various senior executive and C-level roles in 9 countries across Asia Pacific & Middle East, Europe, and the Caribbean, including:

- Country CEO Scotiabank Malaysia
- Country CEO ABN AMRO Indonesia
- Head Credit Portfolio Management ABN AMRO Asia Pacific & Middle East
- Assistant Managing Director Scotiabank - MCB Dutch Caribbean.

Recipient of entrepreneurship award and various financial markets awards.

Concurrent Position:

- Managing Partner CNX Transaction Partners, Amsterdam, The Netherlands
- Non-Executive director Origen Fresh (Goodwell's Nominee), Nairobi, Kenya
- Supervisory Board member Leiden University, Leiden, The Netherlands.

Certification:

Awarded the (“first batch”) Chartered Banker designation of the Asian Institute of Chartered Bankers (2015). Completed Wagner’s post graduate Corporate Governance course for non-Executive directors (2018). Completed Harvard University’s FinTech course (2020).

Affiliate Relationship:

He has no affiliation with members of the Board of Directors and fellow members of the Board of Commissioners but has an affiliation with shareholder Asian Development Bank (“ADB”), serving as ADB’s Nominee non-Executive director in IIF’s Board of Commissioners.



Dr. Andreas Zeisler

Komisaris
Commissioner

umur/age

62 Tahun/years

kewarganegaraan/citizenship

Warga Negara Jerman
German

Domisili/Domicile

Köln, Jerman

Cologne, Germany

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 21 Maret 2019, untuk masa kerja hingga 21 Maret 2022.

Riwayat Pendidikan:

- Diploma di bidang Keuangan Internasional dari Moscow Finance Institute (1983)
- Doktoral di bidang Ekonomi dari University of Berlin, Jerman (1991)

Riwayat Pekerjaan:

Didukung oleh bekal pengalaman global selama lebih dari 30 tahun menangani sektor pembiayaan proyek dan pinjaman perusahaan, investasi ekuitas swasta, serta manajemen strategis dan operasional di pasar negara berkembang, beliau dipercaya untuk mengemban tanggung jawab pada program investasi ekuitas DEG di sektor lembaga keuangan. Disamping itu, beliau juga mengawasi beberapa investasi ekuitas swasta yang paling menguntungkan untuk DEG.

Dalam perjalanan kariernya, beliau sempat memegang berbagai posisi manajemen senior di beberapa perusahaan, antara lain:

- *Director for Credit Policy of Emerging Market* di Kementerian Keuangan, Berlin Timur (1983–1990)
- *Business Consultant* di DAV Wirtschaftsberatungsgesellschaft (1990–1993)
- *Senior Investment Manager for CEE (Central and Eastern Europe)* and CIS (*Commonwealth of Independent States*)
- *Regional Manager for Baltic States*
- *CEO DEG Private Equity Fund* di Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) (1993–2002)

Selain itu, beliau juga bertugas sebagai dewan penasihat dan komite investasi dana ekuitas swasta dan menjabat posisi direktur perusahaan *investee* dari DEG, serta mewakili DEG didalam komite pengarah lembaga keuangan internasional untuk dana ekuitas swasta.

Rangkap Jabatan:

Head of Financial Institutions (Equity) Department di DEG.

Hubungan Afiliasi:

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham karena merupakan perwakilan dari DEG.

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as Commissioner of the Company based on Notarial Deed No. 31 dated March 21, 2019, for a term of office until March 21, 2022.

Educational Background:

- Diploma Degree in International Finance from Moscow Finance Institute (1983)
- Doctoral Degree in Economics from the University of Berlin, Germany (1991)

Employment History:

With more than 30 years of global experience handling project finance and corporate lending, private equity investment, as well as strategic and operational management in emerging markets, he was entrusted with the responsibility to run DEG's equity investment programs in the financial institutions sector. In addition, he has overseen some of the most profitable private equity investments in the field of DEG.

Over the course of his career, he assumed various senior management positions at several companies, including:

- Director for Credit Policy of Emerging Market at the Ministry of Finance, East Berlin (1983–1990)
- Business Consultant at DAV Wirtschaftsberatungsgesellschaft (1990–1993)
- Senior Investment Manager for CEE (Central and Eastern Europe) and CIS (Commonwealth of Independent States)
- Regional Manager for Baltic States
- CEO DEG Private Equity Fund at Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) (1993–2002)

On top of that, he is also serving in the advisory board and investment committee of private equity funds and assuming the position of director of *investee* companies of DEG, as well as representing DEG on the international financial institution steering committee for private equity funds.

Concurrent Position:

Head of Financial Institutions (Equity) Department at DEG.

Affiliate Relationship:

He has no affiliation with members of the Board of Directors and fellow members of the Board of Commissioners, but has an affiliation with shareholders because he is a representative of DEG.



Richard Lyon Ranken

Komisaris
Commissioner

umur/age
73 Tahun/years

kewarganegaraan/citizenship
Warga Negara Australia

Australian

Domisili/Domicile
Australia

Australia

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No.1 tanggal 2 Maret 2016.

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Ekonomi Pertanian dari Australian National University (ANU), Australia
- Magister Administrasi Negara dari Australian National University (ANU), Australia
- Beliau menyelesaikan program manajemen senior dari World Bank/Harvard Business School Executive Program
- Beliau adalah *Graduate Member* dari Australian Institute of Company Directors

Riwayat Pekerjaan:

Beliau memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman yang matang dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi di berbagai perusahaan yang tersebar di wilayah Asia dan Australia terutama yang bidang usahanya bergerak di sektor infrastruktur, keuangan, agribisnis, dan manufaktur. Dalam perjalanan kariernya di International Finance Corporation (IFC), beliau terakhir menjabat sebagai Direktur untuk Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia.

Rangkap Jabatan:

Anggota di Komite *Advisory* di Kula 2 Pacific Equity Fund

Hubungan Afiliasi:

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham karena merupakan perwakilan dari International Finance Corporation (IFC).

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as Commissioner of the Company based on Deed No. 1 dated March 2, 2016.

Educational Background:

- Bachelor Degree in Agricultural Economics from Australian National University (ANU), Australia
- Master Degree in Public Administration from Australian National University (ANU), Australia
- He completed the senior management program at the World Bank/Harvard Business School Executive Program
- He is a Graduate Member of the Australian Institute of Company Directors

Employment History:

He has a deep knowledge and extensive experience that helps him carry out his duties and responsibilities as a member of the Board of Directors at various companies across Asia and Australia, especially the ones engaged in the infrastructure, finance, agribusiness, and manufacturing sectors. He built a career at the International Finance Corporation (IFC), assuming his last position as Director for East Asia and the Pacific, including Indonesia.

Concurrent Position:

Member of Advisory Committee at Kula 2 Pacific Equity Fund

Affiliate Relationship:

He has no affiliation with members of the Board of Directors and fellow members of the Board of Commissioners, but has an affiliation with shareholders because he is a representative of International Finance Corporation (IFC).



Ken Tomisaki

Komisaris

Commissioner

umur/age

50 Tahun/years

kewarganegaraan/citizenship

Warga Negara Jepang

Japanese

Domisili/Domicile

Jepang

Japan

Dasar Hukum Pengangkatan:

Pertama kali ditunjuk dan diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada 12 Juni 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 16 Juni 2020, untuk masa kerja hingga 12 Juni 2023.

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Hukum dari Waseda University, Jepang (1994)
- *Master of Business Administration* dari Stanford University, Amerika Serikat (2000)

Riwayat Pekerjaan:

- Deputy Direktur di Japan Bank for International Cooperation dan *Director for Coverage and Structured Finance* di Natixis Tokyo Branch (2009–2012)
- *Associate Director in Structured Export Finance* di DEPFA Bank (2008–2009)
- *Vice President at the Emerging Markets Department* di Deutsche Bank (2006–2008)

Rangkap Jabatan:

General Manager for Structured Finance Department in Asia Pacific di Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Singapura.

Hubungan Afiliasi:

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham karena merupakan perwakilan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Legal Basis of Appointment:

First appointed and assigned as Commissioner of the Company on June 12, 2020 based on Notarial Deed No. 12 dated June 16, 2020, for a term of office until June 12, 2023.

Educational Background:

- Bachelor Degree in Law from Waseda University, Japan (1994)
- Master Degree in Business Administration from Stanford University, USA (2000)

Employment History:

- Deputy Director at Japan Bank for International Cooperation and Director for Coverage and Structured Finance at Natixis Tokyo Branch (2009–2012)
- Associate Director in Structured Export Finance at DEPFA Bank (2008–2009)
- Vice President at the Emerging Markets Department at Deutsche Bank (2006–2008)

Concurrent Position:

General Manager for Structured Finance Department in Asia Pacific at Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Singapore.

Affiliate Relationship:

He has no affiliation with members of the Board of Directors and fellow members of the Board of Commissioners, but has an affiliation with shareholders because he is a representative of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

DIREKSI

The Board of Directors



Y. Bayu Wirawan
Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer
Managing Director & Chief Investment Officer

Mohammad Ramadhan Harahap
Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer
Managing Director & Chief Investment Officer

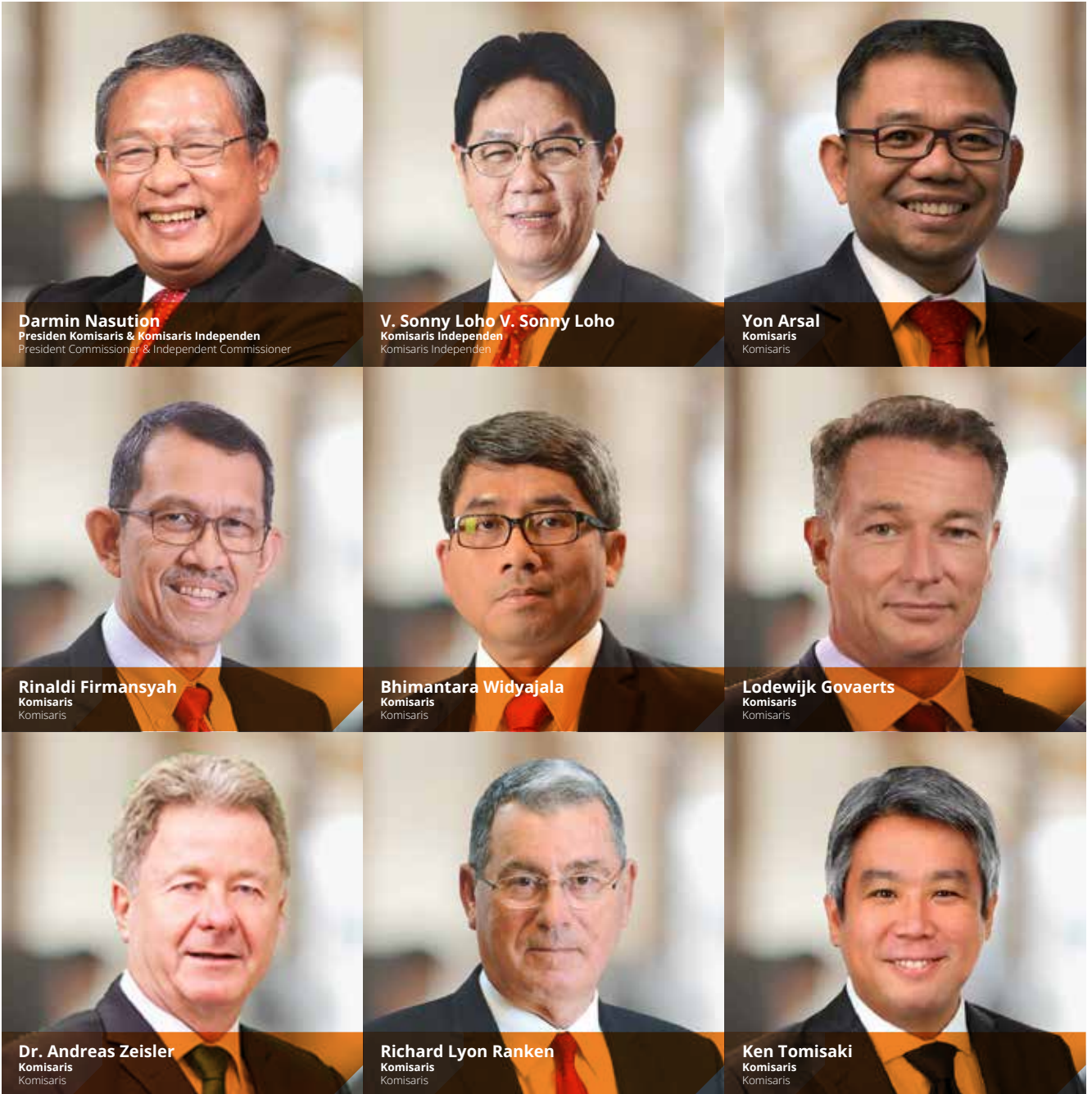
I Made Wiracita Tantra
Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer
Managing Director & Chief Risk Officer

Reynaldi Hermansjah
Presiden Direktur & Chief Executive Officer dan Plt. Direktur Keuangan*
President Director & Chief Executive Officer and Interim Chief Financial Officer*

* Mulai menjabat per 1 November 2021
Begin serving as of 1 November 2021

DEWAN KOMISARIS

The Board of Commissioners





DEMOGRAFI KARYAWAN

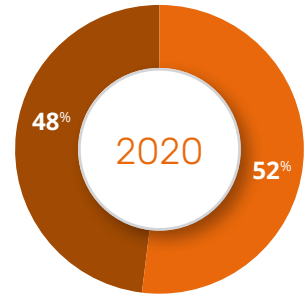
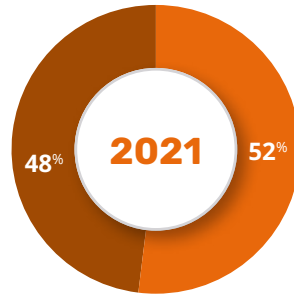
Employee Demography

Jumlah karyawan IIF mengalami peningkatan sebesar 9,4% di akhir 2021, yakni dari sebanyak 106 karyawan di tahun 2020 menjadi 116 karyawan (termasuk anggota Direksi) pada 2021. Berikut ini adalah uraian lengkap demografi karyawan Perseroan dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir:




IIF's headcount increased by 9.4% at the end of 2021, from 106 employees in 2020 to 116 employees (including Board of Director members) in 2021. The following is the detailed demographics of the Company's headcount in the last 2 (two) years:

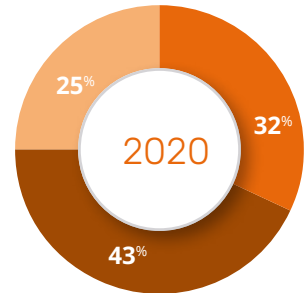
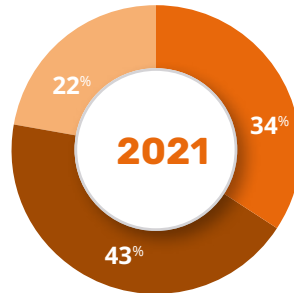
Komposisi Karyawan Tetap berdasarkan Jenis Kelamin Employee Composition based on Gender

Keterangan Description	2021		2020	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
 Laki-Laki Male	60	52	55	52
 Perempuan Female	56	48	51	48
Jumlah Total	116	100	106	100





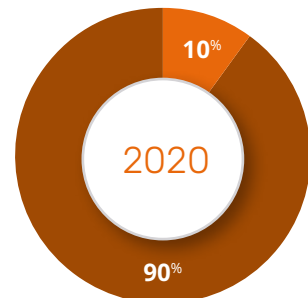
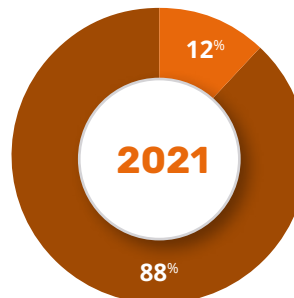
Komposisi Karyawan Tetap berdasarkan Level Jabatan Employee Composition based on Office Ranks

Keterangan Description	2021		2020	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
 Pelaksana Staff	40	34	34	32
 Manajer Madya Middle Manager	50	43	45	43
 Eksekutif Executive	26	22	27	25
Jumlah Total	116	100	106	100



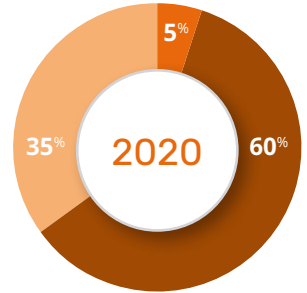
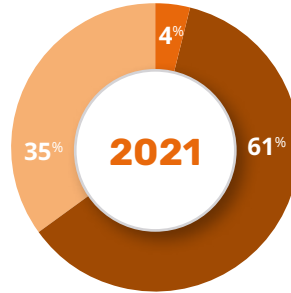
Komposisi Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian Employee Composition based on Employment Status

Keterangan Description	2021		2020	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
 Kontrak Contract	14	12	11	10
 Tetap Permanent	102	88	95	90
Jumlah Total	116	100	106	100







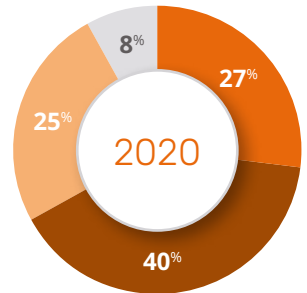
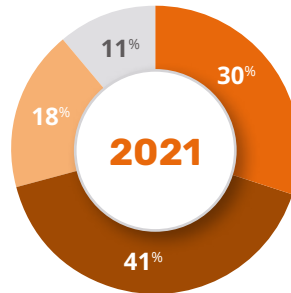
Komposisi Karyawan Tetap berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition based on Education

Keterangan Description	2021		2020	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
 Diploma Diploma	5	4	5	5
 Strata 1 Bachelor's Degree	71	61	64	60
 Strata 2 atau lebih tinggi Master's Degree or higher	40	35	37	35
Jumlah Total	116	100	106	100



Komposisi Karyawan Tetap berdasarkan Kelompok Usia
Employee Composition based on Age

Keterangan Description	2021		2020	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
 22 - 30 tahun 22 - 30 years old	35	30	29	27
 31 - 40 tahun 31 - 40 years old	47	41	42	40
 41 - 50 tahun 41 - 50 years old	21	18	27	25
 51 - atau lebih 51 - above	13	11	8	8
Jumlah Total	116	100	106	100



Total Biaya Pelatihan Karyawan di 2021

Total Employee Competence Development in 2021

RP905.000.000

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Employee Competency Development

Situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan tidak menyurutkan semangat IIF dalam mendorong keterlibatan karyawan untuk tetap mengikuti kegiatan pelatihan ataupun seminar yang diharapkan dapat mendukung pengembangan kompetensi dan kemampuan individual mereka dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing, serta berguna bagi pengembangan kariernya.

Sepanjang tahun 2021, tercatat sejumlah 116 karyawan (termasuk anggota Direksi) berpartisipasi mengikuti kegiatan pelatihan dan/atau program pengembangan kompetensi karyawan yang diselenggarakan secara virtual dengan total jam pelatihan sebanyak 6.887 jam baik yang diselenggarakan secara internal (*in-house*) oleh Perseroan maupun pihak eksternal. Jumlah aktual jam pelatihan karyawan tahun 2021 menandai pencapaian 98% dari target jam pelatihan IIF sepanjang tahun. Melihat hal ini, Perseroan sangat bersyukur bahwa di tengah situasi pandemi yang belum usai, semangat seluruh insan IIF untuk berpartisipasi aktif mengikuti berbagai jenis pelatihan yang diselenggarakan secara virtual masih cukup tinggi.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat uraian pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan berdasarkan level jabatan dan pencapaiannya dibandingkan target jam pelatihan yang sudah dilakukan di sepanjang tahun 2021:

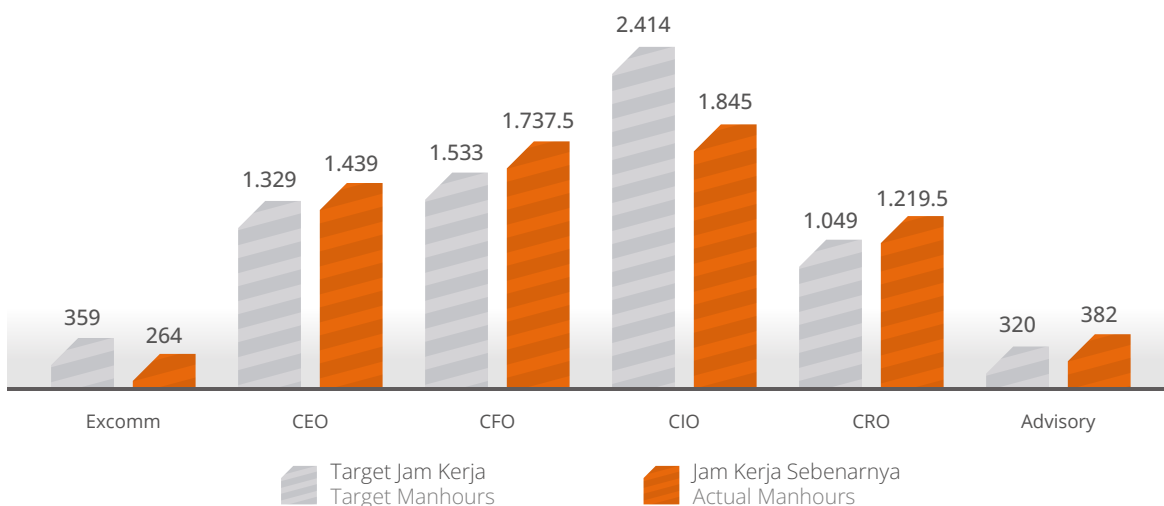
The prolonged COVID-19 pandemic did not weaken IIF's enthusiasm in encouraging employee participation in trainings or seminars, and instead, hoped that such a program would continue to help the employees develop their competencies and abilities to do their respective duties and responsibilities, while also helping them with their career development.

Throughout 2021, 116 IIF's employees (including Board of Director members) participated in virtual trainings and/or employee competency development programs with a total of 6,887 hours spent on both, whether the programs were organized internally (*in-house*) or with the help of competent external parties. The actual employee training hours in 2021 marked the achievement of 98% of IIF's targeted training hours throughout the year. The Company is very grateful that in the midst of the ongoing pandemic, IIF employees remained enthusiastic in actively participating in the various online trainings held.

The table below presents the description of IIF's employee competency development and training activities throughout 2021 based on office ranks and how they were achieved against the targets:

Pelatihan Training	Jam Pelatihan berdasarkan Jabatan Training Hours by Level					Jam Target IIF IIF Target Hours	Persentase Percentage
	Officer Level	Middle Manager	Senior Manager	Excomm	Total Jam Total Hours		
Tujuan Pelatihan Training Objective							
<i>Soft</i>	33	154	129		316		5%
<i>Technical</i>	3.272	2.108	927	264	6.571		95%
Jenis Pelatihan Type of Training							
<i>In-House</i>	1.215	704	334	45	2.298		33%
<i>Public</i>	2.090	1.558	722	219	4.589		67%
Grand Total	3.305	2.262	1.056	264	6.887	7.004	98%
Persentase dari Total Jam Percentage out of Total Hours	48%	33%	15%	4%	100%		

Pencapaian Pelatihan Aktual Perusahaan Desember 2021
Corporate Actual Training Achievement December 2021



Direktorat Directorate	Target Manhours Target Manhours	Aktual Manhours Actual Manhours	Persentase Percentage
Excomm	359	264	74%
CEO	1.329	1.439	108%
CFO	1.533	1.737.5	113%
CIO	2.414	1.845	76%
CRO	1.049	1.219.5	116%
Advisory	320	382	119%
Grand Total	7.004	6.887	98%

BIAYA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN TAHUN 2021

Training and Employee Competency Development Expenses in 2021

Selama tahun 2021, total alokasi dana yang digunakan untuk mengadakan program atau kegiatan pengembangan kompetensi karyawan dibukukan sebesar Rp905 juta, meningkat 47,0% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp616 juta. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan materi pelatihan yang ditempuh.

During 2021, the total fund allocated to employee competency development programs or activities reached Rp905 million, an increase/decrease by 47.0% compared to the previous year with Rp616 million. The increase was mainly due to the subject of the training.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholders Composition

Nama Name	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)	600.000	600.000.000.000	30,00
Asian Development Bank (ADB)	399.800	399.800.000.000	19,99
International Finance Corporation (IFC)	399.800	399.800.000.000	19,99
DEG – Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft	302.400	302.400.000.000	15,12
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	298.000	298.000.000.000	14,90
Jumlah Total	2.000.000	2.000.000.000.000	100,00

Komposisi Kepemilikan Saham Lokal dan Asing

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat uraian komposisi pemegang saham IIF berdasarkan klasifikasi institusi, antara lain:

Composition of Local and Foreign Share Ownership

Presented below is the description of IIF's shareholders' composition based on the classification of institutions, including:

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Share)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Kepemilikan Institusi Lokal Ownership by Local Institutions		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)	600.000	30,00
Kepemilikan Institusi Asing Ownership by Foreign Institutions		
Asian Development Bank (ADB)	399.800	19,99
International Finance Corporation (IFC)	399.800	19,99
DEG – Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft	302.400	15,12
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	298.000	14,90

Kepemilikan Saham Langsung dan Tidak Langsung oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2021, tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Direct and Indirect Share Ownership by the Board of Commissioners and Directors

As of December 31, 2021, none of the members of the Board of Commissioners nor the Board of Directors owns the Company's shares either directly or indirectly.

Informasi Perubahan Jumlah Lembar Saham

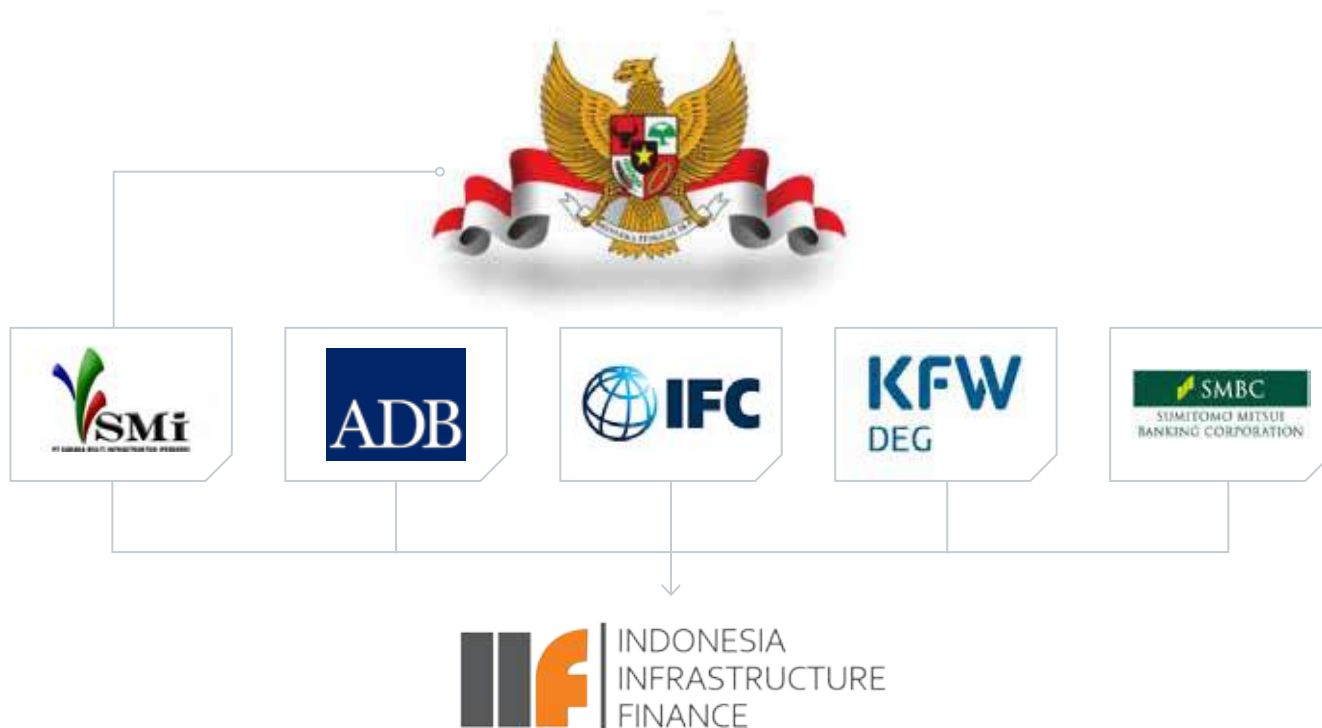
Sejak 1 Januari-31 Desember 2021, jumlah lembar saham Perseroan tidak mengalami perubahan karena aksi korporasi apapun.

Information on Changes in Share Count

Since January 1-December 31, 2021, the Company's share count has not changed due to any corporate action.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA

Main Shareholders Information



Setiap pemegang saham IIF memiliki lebih dari 5% modal disetor dimana PT SMI (Persero) bertindak sebagai pemegang saham utama dengan total kepemilikan saham mencapai 30%. Pada bagan komposisi pemegang saham di atas terlihat bahwa IIF tidak memiliki Pemegang Saham Pengendali.

Each of IIF's shareholders has more than 5% of the Company's paid-up capital where PT SMI (Persero) as the main shareholder holds 30%. The chart of shareholder composition above clearly shows that IIF does not have a Controlling Shareholder.

Profil Pemegang Saham

1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)

SMI adalah entitas BUMN yang 100% sahamnya dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pelaksanaan aktivitas bisnis SMI mengacu pada Peraturan OJK No. 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pendirian SMI tertuang dalam Akta Pendirian No. 17 tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Ildroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01 tanggal 24 Maret 2009, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011180.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009, serta sudah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 19 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13273/2009.

Anggaran Dasar SMI telah beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan terakhir dicatat dalam Akta No. 19 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut (i) telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071181.

Shareholder Profile

1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)

SMI is a state-owned entity whose 100% shares are held by the Government of the Republic of Indonesia through its Minister of Finance. The implementation of SMI's business activities refers to OJK Regulation No. 46/POJK.05/2020 concerning Infrastructure Financing Companies.

The establishment of SMI is stated in the Deed of Establishment No. 17 dated February 26, 2009 drawn up before Lolani Kurniati Irdham-Ildroes, S.H., LL.M., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-09067.AH.01.01 dated March 24, 2009, registered in the Company Register No. AHU-0011180.AH.01.09 of 2009 dated March 24, 2009, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 40 dated May 19 2009, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 13273/2009.

SMI's Articles of Association have been amended several times, the latest of which was recorded in Deed No. 19 dated October 16, 2020, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta. The latest amendment (i) has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0071181.AH.01.02 Year 2020 dated October

AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020; dan (ii) telah diakui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHUAH.01.03-0399024 Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020.

Pendirian SMI bertujuan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2020.

2. Asian Development Bank (ADB)

ADB didirikan pada tahun 1966 dan dimiliki oleh 68 anggota yang mana 49 di antaranya berasal dari kawasan Asia Pasifik. Instrumen utamanya bertujuan untuk membantu negara-negara anggotanya dalam hal dialog kebijakan, pinjaman, investasi ekuitas, garansi, hibah, dan bantuan teknis. ADB berkomitmen untuk mewujudkan Kawasan Asia Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrem.

3. International Finance Corporation (IFC)

IFC adalah organisasi yang terafiliasi dengan World Bank dan anggota World Bank Group. IFC juga merupakan institusi pembangunan global terbesar yang berfokus pada sektor swasta di negara berkembang.

Dengan memanfaatkan kekuatan permodalan, keahlian, dan pengaruhnya untuk menciptakan pasar dan kesempatan di negara-negara berkembang, kini IFC telah beroperasi di lebih dari 100 negara.

4. DEG – Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft

DEG didirikan berdasarkan *Memorandum of Association of DEG* yang telah diperbaharui terakhir kali pada 20 Februari 2017. Pendirian DEG bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta di negara-negara berkembang, Eropa Tengah dan Timur, serta *New Independent States*, dan juga negara-negara lainnya yang disetujui oleh keputusan pemegang saham.

5. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

SMBC berdiri pada tahun 2001 berdasarkan Akta Pendirian dengan perubahan terakhir pada Juni 2019 sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Jepang. SMBC adalah lembaga keuangan global terkemuka yang merupakan anggota inti dari Sumitomo Mitsui Financial Group ("SMBC Group"). SMBC merupakan salah satu bank dengan aset terbesar di Jepang yang berkantor pusat di Tokyo. Di bawah manajemen SMBC Group, SMBC menawarkan layanan perbankan personal, korporat, dan investasi ke sejumlah jaringan yang menjangkau 40 negara dan wilayah, yang mana 16 di antaranya berada di wilayah Asia.

Pada tahun 1989, SMBC mulai memantapkan eksistensinya di Indonesia melalui pendirian PT SMBC Indonesia. Selanjutnya di tahun 2019, PT SMBC Indonesia dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk melakukan *merger* sehingga terbentuk suatu entitas bisnis baru bernama PT Bank BTPN Tbk. BTPN adalah bank universal yang menyediakan serangkaian produk dan layanan lengkap kepada nasabah korporasi dan individu.

16, 2020; and (ii) has been recognized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHUAH.01.03-0399024 Year 2020 on October 16, 2020.

The establishment of SMI aims to implement Government Regulation No. 66 of 2007 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in Infrastructure Financing sector, as amended by Government Regulation No. 75 of 2008 and Government Regulation No. 53 of 2020.

2. Asian Development Bank (ADB)

ADB was established in 1966 and is owned by 68 members of which 49 are from the Asia Pacific region. Its main instrument is to assist member countries in policy dialogue, loans, equity investments, guarantees, grants and technical assistance. ADB is committed to realizing a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia Pacific Region, and to sustainable efforts to eradicate extreme poverty.

3. International Finance Corporation (IFC)

IFC is an organization affiliated with the World Bank and a member of the World Bank Group. IFC is also the largest global development institution that focuss on the private sector in developing countries.

By leveraging its capital, expertise and influence to create markets and opportunities in developing countries, IFC now operates in more than 100 countries.

4. DEG – Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft

DEG was established based on the *Memorandum of Association of DEG* which was last updated on February 20, 2017. The establishment of DEG aims to promote the private sector growth in developing countries, Central and Eastern Europe, New Independent States, as well as other countries after approval by shareholders decision.

5. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

SMBC was established in 2001 based on the Deed of Establishment with the last amendment made in June 2019 in accordance with applicable laws and regulations in Japan. SMBC is a leading global financial institution and also a core member of the Sumitomo Mitsui Financial Group ("SMBC Group"). SMBC is one of the largest banks by assets in Japan, headquartered in Tokyo. Under the management of the SMBC Group, SMBC offers personal, corporate, and investment banking services to a number of networks spanning 40 countries and regions, of which 16 are in the Asian region.

In 1989, SMBC began to establish a strong presence in Indonesia through the establishment of PT SMBC Indonesia. Furthermore, in 2019, PT SMBC Indonesia and PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk merged as a new business entity named PT Bank BTPN Tbk. BTPN is a universal bank that offers a complete array of products and services to corporate and individual customers.

DAFTAR ENTITAS ANAK & STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

List of Subsidiaries & Company Group Structure

Sampai dengan Laporan Tahunan 2021 ini diterbitkan, IIF tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, maupun *joint venture* lainnya.

As of the publication of this 2021 Annual Report, IIF did not have any subsidiaries, associates, or other joint ventures.

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Share Listing Chronology

Hingga akhir tahun 2021, IIF tidak pernah mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun. Dengan demikian, Laporan Tahunan 2021 ini tidak menyajikan informasi mengenai kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir.

As of the end of 2021, IIF had not listed any portion of its shares on any stock exchange. Therefore, this 2021 Annual Report does not disclose information about the chronology of share listing, number of shares, share nominal value, and share offering price from the beginning to recent.

KRONOLOGI PENCATATAN OBLIGASI

Bond Listing Chronology

Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016

Pada tanggal 29 Juni 2016, IIF memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-336/D.04/2016 untuk penawaran umum Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016. Obligasi tersebut sudah dicatatkan di BEI pada 19 Juli 2016.

IIF telah melunasi Pinjaman Seri A dan Seri B sesuai periode jatuh temponya, yaitu pada 19 Juli 2019 dan 19 Juli 2021.

Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019

Pada 13 Desember 2019, IIF memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-198/D.04/2019 untuk penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019. Obligasi tersebut dicatatkan di BEI pada 19 Desember 2019.

IIF telah melunasi Pinjaman Seri A sesuai periode jatuh temponya, yaitu pada 28 Desember 2020.

Indonesia Infrastructure Finance Bond I 2016

On June 29, 2016, IIF obtained OJK's Effective Statement Letter No. S-336/D.04/2016 for the public offering of the 2016 Indonesia Infrastructure Finance Bond I. The bond was listed on the IDX on 19 July 2016.

IIF has settled the full payment for the Series A and B Loan on its maturity date, which was July 19, 2019 and July, 2021, respectively.

Indonesia Infrastructure Finance Sustainable Bond I Phase I 2019

On December 13, 2019, IIF obtained OJK's Effective Statement Letter No. S-198/D.04/2019 for the Shelf-Registered Bond I Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019. The bonds was listed on the IDX on December 19 2019.

IIF has settled the full payment for the Series A Loan on its maturity date, which was December 28, 2020.

Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020

Pada tanggal 13 Desember 2019, IIF memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-198/D.04/2019 untuk penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020. Obligasi tersebut telah dicatatkan di BEI pada 22 Oktober 2020.

IIF telah melunasi Pinjaman Seri A sesuai periode jatuh temponya, yaitu pada 28 Oktober 2021.

Indonesia Infrastructure Finance Sustainable Bond I Phase II 2020

On December 13, 2019, IIF obtained OJK's Effective Statement Letter OJK No. S-198/D.04/2019 for the sustainable public offering of the Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020 Shelf-Registered Bond. The bond was listed on the IDX on October 22, 2020.

IIF has settled the full payment for the Series A Loan on its maturity date, which was October 21, 2021.

Jenis Obligasi Type of Bond	Tanggal Penerbitan Issuing Date	Rincian Series	Nilai Nominal Nominal Value (Rp)	Bunga Obligasi Bond Interest (%)	Jangka Waktu Period	Jatuh Tempo Maturity Date	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Obligasi Bond Rating		Tempat Pencatatan Listed on
								2021	2020	
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Year 2016	19 Juli/July 2016	Seri/ Series A	Rp825.000.000.000	8,25%	3 tahun 3 years	19 Juli/July 2019	Lunas Settled	AAA	AAA	BEI IDX
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 - Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Year 2016 -	19 Juli/July 2016	Seri/ Series B	Rp250.000.000.000	8,70%	5 tahun 5 years	19 Juli/July 2021	Lunas Settled	AAA	AAA	BEI IDX
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Year 2016 -	19 Juli/July 2016	Seri/ Series C	Rp425.000.000.000	9,00%	7 tahun 7 years	19 Juli/July 2023	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) Not Settled (Not yet maturity date)	AAA	AAA	BEI IDX
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019	19 Desember/ December 2019	Seri/ Series A	Rp965.000.000.000	6,75%	370 hari/ days	28 Desember/ December 2020	Lunas Settled	AAA	AAA	BEI IDX
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019	19 Desember/ December 2019	Seri/ Series B	Rp372.000.000.000	7,75%	3 tahun 3 years	18 Desember/ December 2022	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) Not Settled (Not yet maturity date)	AAA	AAA	BEI IDX
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019	19 Desember/ December 2019	Seri/ Series C	Rp163.000.000.000	7,90%	5 tahun 5 years	18 Desember/ December 2024	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) Not Settled (Not yet maturity date)	AAA	AAA	BEI IDX

Jenis Obligasi Type of Bond	Tanggal Penerbitan Issuing Date	Rincian Series	Nilai Nominal Nominal Value (Rp)	Bunga Obligasi Bond Interest (%)	Jangka Waktu Period	Jatuh Tempo Maturity Date	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Obligasi Bond Rating		Tempat Pencatatan Listed on
								2021	2020	
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020	22 Oktober/ October 2020	Seri/ Series A	Rp570.000.000.000	5,00%	367 hari/ days	28 Oktober/ October 2021	Lunas Settled	AAA	AAA	BEI IDX
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020	22 Oktober/ October 2020	Seri/ Series B	Rp810.000.000.000	6,65%	3 tahun 3 years	22 Oktober/ October 2023	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) Not Settled (Not yet maturity date)	AAA	AAA	BEI IDX
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020	22 Oktober/ October 2020	Seri/ Series C	Rp120.000.000.000	6,90%	5 tahun 5 years	22 Oktober/ October 2025	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) Not Settled (Not yet maturity date)	AAA	AAA	BEI IDX
Senior Unsecured Sustainability Bonds	27 Januari/ January 2020		USD150.000.000	1,50%	5 tahun 5 years	27 Januari/ January 2025	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) Not Settled (Not yet maturity date)	BBB	BBB	SGXSG

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA Chronology of Other Securities Listing

Surat Utang Jangka Menengah

Pada 24 Oktober 2018, IIF menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018. Perseroan telah melakukan pelunasan MTN sesuai dengan tanggal jatuh temponya, yaitu 10 November 2019.

Medium Term Notes

On October 24, 2018, IIF issued the 2018 Indonesia Infrastructure Finance Medium Term Notes (MTN). The Company has settled the full payment for its MTN on its maturity date, which was November 10, 2019.

Keterangan Description	Tanggal Efektif Effective Date	Jumlah MTN (Rp) MTN Amount (Rp)	Tenor	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Status
MTN Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018 MTN of Indonesia Infrastructure Finance Year 2018	24 Oktober/ October 2018	Rp200.000.000.000	370 hari/days	10 November/ November 2019	8,35%	Lunas Settled

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ ATAU PROFESI PENUNJANG

Name and Address of Supporting Institutions and/or Professions

Nama dan Alamat Name and Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type and Form of Services	Periode Penugasan Assignment Period	Biaya Jasa di 2021 (Rp) Service Fee in 2021 (Rp)
Kantor Akuntan Publik I Public Accountant Firm Purwanto, Sungkoro & Surja (a member firm of EY Global Limited) Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, lantai 7/7 th floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190 Telp: +62 21 5289 5000	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan audit untuk Laporan Keuangan tahun buku 2021 Conduct the audit on the 2021 Financial Statements Melakukan <i>review</i> atas laporan kinerja Perseroan Review of the Company's performance reports 	1 Januari 2021 - 31 Desember 2021 January 1, 2021- December 31, 2021	Rp1.236 miliar Rp1,236 billion
Pemeringkat Kredit I Rating Agency PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Panin Tower Senayan City, lantai 17/17 th floor Jl. Asia Afrika, Lot.19, Jakarta, 12220	Pemeringkatan kredit untuk penerbitan Obligasi IIF tahun 2021	1 Oktober 2021- 1 Oktober 2022 1 October 2021 - 1 October 2022	Rp175.000.000 Rp175,000,000
PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower lantai 24/24 th floor, Suite 2403, Jl. Prof.Dr. Satrio Kav 3-5, Jakarta 12940	Entity Rating	6 Agustus 2021-5 Agustus 2022 6 August 2021 - 5 August 2022	Rp118.181.818 Rp118,181,818
	Annual credit ratings of PT Indonesia Infrastructure Finance	13 Juli 2021-6 Juli 2022 13 July 2021 - 6 July 2022	USD52.000
Wali Amanat I Trustee PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lt. 16/16 th Fl. Jl. Kapten Tendean No. 12-14 A, Jakarta 12790	Wali amanat untuk penerbitan Obligasi IIF Trustee for the issuance of IIF Bonds	Pada saat Obligasi diterbitkan sampai dengan jatuh tempo. Form Bond issuance until maturity	Rp85 juta per tahun/ emisi (di luar PPN) Rp85 million per year/ emission (excluding VAT)
Konsultan Hukum I Legal Consultant Assegaf Hamzah & Partners Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jend. Gatot Subroto No. Kav 18, Jakarta 12710	Biaya <i>Retainer</i> Retainer fee	1 Januari 2021 - 31 Desember 2021 January 1, 2021- December 31, 2021	Rp420 juta Rp420 million

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

Information on the Company's Website

Dalam rangka mewujudkan hadirnya proses bisnis yang transparan terutama dalam hal penyajian informasi umum perusahaan, IIF menghadirkan situs *web* resmi yang dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan, yaitu: www.iif.co.id. Seluruh informasi yang ditampilkan pada situs *web* Perseroan tersaji dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Secara umum, pengelolaan situs *web* Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik. Situs *web* Perseroan diperbarui secara berkala agar senantiasa menyajikan informasi yang faktual dan akurat.

Situs *web* IIF memuat berbagai informasi umum yang relevan untuk diungkapkan kepada publik, antara lain:

1. Beranda

Berisi berbagai informasi produk & layanan Perseroan yang disajikan pada *website* utama www.iif.co.id.

2. Tentang IIF

- a) Ikhtisar
- b) Pemegang Saham
- c) Strategi Kami
- d) Visi dan Misi
- e) Organisasi
- f) Sumber Daya Manusia

3. Bisnis

- a) Produk dan Layanan
- b) Portofolio dan Proyek
- c) *Policy Brief*

4. Sosial dan Lingkungan

- a) Prinsip S&E IIF
- b) Sistem Manajemen S&E
- c) Ringkasan Proyek

5. Hubungan Investor

- a) Informasi Keuangan
- b) *Update Investor*
- c) Peringkat
- d) Ikhtisar Keuangan
- e) Profesi Penunjang Pasar Modal
- f) Obligasi
- g) Tata Kelola Perusahaan

6. Berita terbaru dan Kegiatan mengenai IIF sepanjang tahun

7. CSR

In order to practice a transparent business process, especially with regards to general corporate information, IIF manages an official website that can be easily accessed by stakeholders at the address: www.iif.co.id. All information disclosed on the Company's website is presented bilingually in Indonesian and English.

In general, the Company's website has been managed in accordance with the provisions of POJK No. 8/POJK.04/2015 regarding Websites of Issuers or Public Companies. The Company's website is updated periodically to provide factual and accurate information.

The IIF website contains various general information that is relevant to be disclosed to the public, including:

1. Home

It contains various information on the Company's products & services which is presented on the main website www.iif.co.id.

2. About IIF

- a) Overview
- b) Shareholders
- c) Our Strategy
- d) Vision and Mission
- e) Organization
- f) Human Resources

3. Business

- a) Products and Services
- b) Portfolio and Project
- c) Policy Brief

4. Social and Environmental

- a) IIF S&E Principles
- b) S&E Management System
- c) Project Summary

5. Investor Relations

- a) Financial Information
- b) Investor Updates
- c) Rating
- d) Financial Overview
- e) Capital Market Supporting Profession
- f) Bonds
- g) Corporate Governance

6. Latest News and Activities regarding IIF throughout the year

7. CSR

Pemenuhan Informasi pada Situs Web Perusahaan

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa situs web Perseroan telah menyajikan informasi sebagai berikut:

Fulfillment of Information on the Company's Website

In simple terms, it can be concluded that the Company's website has disclosed the following information:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Note
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Information on shareholder up to individual end owners	√	https://iif.co.id/id/tentang-kami/pemegang-saham/
Struktur organisasi Organizational structure	√	https://iif.co.id/id/tentang-kami/struktur-organisasi/struktur-organisasi/
Analisis kinerja keuangan Analysis on financial performance	√	https://iif.co.id/id/hubungan-investor/ikhtisar-keuangan/
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir) Annual financial reports (last 5 years)	√	https://iif.co.id/id/hubungan-investor/informasi-keuangan/laporan-keuangan/
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	https://iif.co.id/id/tentang-kami/struktur-organisasi/dewan-komisaris/ dan https://iif.co.id/id/tentang-kami/struktur-organisasi/komite-eksekutif/

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE EKSEKUTIF, SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Training/Education for the Board of Commissioners, Directors, Executive Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit

Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris**Training and/or education for the Board of Commissioners**

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi Type of Competency Developmen Program and/or Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Bhimantara Widyajala	Komisaris Commisioer	Seminar Nasional Internal Audit Internal Audit National Seminar	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation	1 Desember 2021 December 1 2021
		Qualified Government Internal Auditor	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation	21 Juni 2021 June 21 2021
		Certified Professional Management Accountant (CPMA) and Management Accountant Conference	Institut Akuntan Manajemen Indonesia The Indonesian Institute of Management Accountants	27 Agustus 2021 August 27 2021

Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi

Training and/or education for the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development Program and/or Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Reynaldi Hermansjah	Presiden Direktur & Chief Executive Officer	Implementing regulation of Omnibus Law 2020	Dewi Negara Fachri & Partners Law Firm	12 April 2021
		Konsultasi Publik dokumen Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan ("SEMS") Public Consultation for Social and Environmental Management System ("SEMS") document	S&E Team	30 Maret/March 2021
		AGMS and AGNS Socialization	IIF	5 Agustus/August 2021
		Training Bloomberg Apps	Bloomberg	11 Januari/January 2021
		Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2021 Financial Services Industry Yearly Convention 2021	Kompas	15 Januari/January 2021
		11 th Kompas100 CEO Forum	Kompas	21 Januari/January 2021
		Mandiri Investment Forum	Mandiri	3 Februari/February 2021
		MUFG- Danamon Webinar "THE INDONESIA 2021 SUMMIT - THE FUTURE IS NOW Leading In The Era of Disruptions"	MUFG & Danamon	23 Februari/February 2021
		IIF Webinar - Introducing IIF's Core Value to Achieve Sustainable Infrastructure Development	Bisnis Indonesia	25 Februari/February 2021
		Sustainability Bond & Framework Workshop by World Bank	World Bank & IIF	16 Maret/March 2021
		IIF - Public Consultation	Bisnis Indonesia & IIF	30 Maret/March 2021
		Undangan Webinar PT SMI "Sinergi Memulihkan Negeri" PT SMI Webinar Invitation to "Synergy to Restore the Nation"	SMI	5 April 2021
		World Bank Workshop Day 2 - Sustainability Bond Framework and Reporting	World Bank & IIF	7 April 2021
		Sharing Session on Implementing Regulation of Omnibus Law	DNFP Law Firm	12 April 2021
		Socialization of PIP Data Protection	IIF	16 April 2021
		Conference Climate Change - UI & SMV	Bisnis Indonesia & IIF	11 Juni/June 2021
		VIRTUAL ROOM 2 - IEECC 2021	IEECCE	16 Juni/June 2021
		Interview with Bloomberg	Bloomberg	21 Juni/June 2021
		4 th Webinar with Bisnis Indonesia	Bisnis Indonesia & IIF	29 Juni/June 2021
		AHP Webinar: Beyond Pandemic & Politics: Behold Southeast Asia & the World	ADP	24 Juli/July 2021
		Global Infrastructure Investment Forum - GIIF 2021	GIIF	29 Juli/July 2021
		Webinar Talkshow Like It #1 - Literasi Investasi Lintas Generasi (Kemenkeu, BI, OJK, LPS)	Kemenkeu, OJK, BI & LPS	3 Agustus/August 2021
		Refreshment of GSM and Introduction to new System AGNS	IIF	5 Agustus/August 2021
		LIVE EVENT: Transportation Investments: Playing the long game- IIF Asia Forum	AVJC	7 September 2021
		IIF & UI - Program Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat dan Lingkungan IIF & UI - Program of Community and Environmental Service and Development	UI & IIF	8 September 2021
		Webinar PT SMI "Prospek Ekonomi Indonesia setelah Lepas dari Resesi"	SMI &	23 September 2021
		Enlit Asia Digital Festival 2021 "Piecing Together the Finance Puzzle: Local Banks, International Banks, ECAs, DFIs & The Availability of Capital in a Transitioning ASEAN Energy Sector"	Enlit Asia	29 September 2021
IDX Invitation "ESG and Sustainability Leadership and Journey"	BEI IDX	30 September 2021		

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development Program and/or Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
I Made Wiracita Tantra	Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer	Implementing regulation of Omnibus Law 2020	Dewi Negara Fachri & Partners Law Firm	12 April 2021
		PIP Data Socialization	Operational Risk Team	16 April 2021
		Konsultasi Publik dokumen Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan ("SEMS") Public Consultation for Social and Environmental Management System ("SEMS") document	S&E Team	30 Maret/March 2021
		Proceeds Management and Impact Reporting Workshop	World Bank	16 Maret/March 2021
		AGMS and AGNS Socialization	IIF	5 Agustus/August 2021
Mohammad Ramadhan Harahap	Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer	Implementing regulation of Omnibus Law 2020	Dewi Negara Fachri & Partners Law Firm	12 April 2021
		Introduction to Onedrive System	IT Team	19 Februari/February 2021
		PIP Data Socialization	Operational Risk Team	16 April 2021
		Proceeds Management and Impact Reporting Workshop	World Bank	16 Maret/March 2021
		Government & Public Services (GPS) Road to Summit 2021: Sovereign Wealth Fund through the Lens of Indonesia's Development Confirmation	Deloitte	23 Februari/February 2021
		Introducing IIFs Core Value to Achieve Sustainable Infrastructure Development	Bisnis Indonesia	25 Februari/February 2021
		2021 S&E Division Sharing Session Series - Landslide	S & E Team	5 Mei/May 2021
		The future of technology in Asia: Insights from CEO conversations	Mc Kinsey	5 November 2021
		Climate Challenge - Preparing for Indonesia's Green and Sustainable Future	Universitas Indonesia	6 November 2021
		Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference and Exhibition ("IEECCE")	IEECCE	16 Juni/June 2021
		Innovative Financial Instrument for Infrastructure Financing	Bisnis Indonesia	29 Juni/June 2021
		AGMS and AGNS Socialization	IIF	5 Agustus/August 2021
		Risk Awareness Sharing Session	IIF	10 Desember/December 2021
Yanindya Bayu Wirawan	Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer	Implementing regulation of Omnibus Law 2020	Dewi Negara Fachri & Partners Law Firm	12 April 2021
		Introduction to Onedrive System	IT Team	19 Februari/February 2021
		PIP Data Socialization	Operational Risk Team	16 April 2021
		Konsultasi Publik dokumen Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan ("SEMS") Public Consultation for Social and Environmental Management System ("SEMS") document	S&E Team	30 Maret/March 2021
		Introducing IIFs Core Value to Achieve Sustainable Infrastructure Development	Bisnis Indonesia	25 Februari/February 2021
		Project Finance Bank Loan Default Study	Moody's Analytics	9 Maret/March 2021
		Tracking COVID-19 Impact on Credit Risk in 2021	Moody's Analytics	10 Maret/March 2021
		Omnibus Law - The Way Forward - Regulatory and Accounting Session	PWC	22 Maret/March 2021
		Omnibus Law - The Way Forward - Deep Dive of the Implementing Regulation Session	PWC	23 Maret/March 2021
		Indonesia legal reforms The Omnibus Law and its implementing regulations	Hogan Lovell	5 April 2021
		2021 S&E Division Sharing Session Series - Landslide	S & E Team	5 Mei/May 2021
		Climate Challenge - Preparing for Indonesia's Green and Sustainable Future	Universitas Indonesia	6 November 2021
		Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference and Exhibition ("IEECCE")	IEECCE	16 Juni/June 2021
		Innovative Financial Instrument for Infrastructure Financing	Bisnis Indonesia	29 Juni/June 2021
		Risk Awareness Sharing Session	IIF	

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development Program and/or Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Devi Pradnya Paramita	Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer	PIP Data Socialization	Operational Risk Team	16 April 2021
		Proceeds Management and Impact Reporting Workshop	World Bank	16 Maret/March 2021
		Sustainability Bond	World Bank	7 April 2021
		Mandiri Investment Forum	Mandiri	3 Februari/February 2021
		IIF Webinar - Introducing IIF's Core Value to Achieve Sustainable Infrastructure Development	Bisnis Indonesia	25 Februari/February 2021
		Sustainability Bond & Framework Workshop by World Bank	World Bank & IIF	16 Maret/March 2021
		World Bank Workshop Day 2 – Sustainability Bond Framework and Reporting	World Bank & IIF	7 April 2021
		Sharing Session on Implementing Regulation of Omnibus Law	DNFP Law Firm	12 April 2021
		Socialization of PIP Data Protection	IIF	16 April 2021
		Introduction to new HR System "ESS"	IIF	21 Mei/May 2021
		Conference Climate Change - UI & SMV	Bisnis Indonesia & IIF	11 Juni/June 2021
		4 th Webinar with Bisnis Indonesia	Bisnis Indonesia & IIF	29 Juni/June 2021
		Webinar Talkshow Like It #1 - Literasi Investasi Lintas Generasi (Kemenkeu, BI, OJK, LPS)	Kemenkeu, OJK, BI & LPS	3 Agustus/August 2021
		Webinar Talkshow Like It #1 – Inter Generations Investment Literacy (Ministry of Finance, BI, OJK, LPS)		
		Refreshment of GSM and Introduction to new System AGNS	IIF	5 Agustus/August 2021
IIF - Mansek Update Market (Outlook 2021 & 2022)	Mandiri & IIF	7 September 2021		
Enlit Asia Digital Festival 2021 "Piecing Together the Finance Puzzle: Local Banks, International Banks, ECAs, DFIs & The Availability of Capital in a Transitioning ASEAN Energy Sector"	Enlit Asia	29 September 2021		

Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Eksekutif

Training and/or education for the Executive Committee

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development Program and/or Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
KOMITE EKSEKUTIF EXECUTIVE COMMITTEE				
Irman Boyle	Executive Vice President – Head of Advisory Group	[Sharing Session] Introduction to Onedrive and Sharepoint	IIF	19 Februari/February 2021
		IIF Webinar - Introducing IIF's Core Value to Achieve Sustainable Infrastructure Development	Bisnis Indonesia	25 Februari/February 2021
		Sustainability Bond & Framework Workshop by World Bank	World Bank & IIF	16 Maret/March 2021
		IIF - Public Consultation	Bisnis Indonesia & IIF	30 Maret/March 2021
		World Bank Workshop Day 2 – Sustainability Bond Framework and Reporting	World Bank & IIF	7 April 2021
		Sharing Session on Implementing Regulation of Omnibus Law	DNFP Law Firm	12 April 2021
		Socialization of PIP Data Protection	IIF	16 April 2021
		Introduction to new HR System "ESS"	IIF	21 Mei/May 2021
		Socialization of PIP for Managing COI within and between Investment Deals and Advisory Mandates	IIF	28 Mei/May 2021
		Conference Climate Change - UI & SMV	Bisnis Indonesia & IIF	11 Juni/June 2021
		4 th Webinar with Bisnis Indonesia	Bisnis Indonesia & IIF	29 Juni/June 2021
		U.S. Power Working Group for Indonesia: Infrastructure Opportunities	US Gov.	27 Januari/January 2021
		IGS Webinar Series V - Pengembangan Infrastruktur Gas untuk Menunjang Daya Saing Industri di Indonesia IGS Webinar Series V - Development of Gas Infrastructure for A More Competitive Industry in Indonesia	IGS	27 Januari/January 2021
		Bincang bincang METI - Stakeholder Energi Baru Terbaruka METI Talks - New and Renewable Energy Stakeholder	EBTKE	5 Maret/March 2021

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development Program and/or Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
		Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co., Ltd.	Zhejiang Gov.	10 Maret/March 2021
		Webinar Talkshow Like It #1 - Literasi Investasi Lintas Generasi (Kemenkeu, BI, OJK, LPS) Webinar Talkshow Like It #1 - Inter Generations Investment Literacy (Ministry of Finance, BI, OJK, LPS)	Kemenkeu, OJK, BI & LPS	3 Agustus/August 2021
		Bioshare Series #3: Webinar Pendanaan Proyek Bioenergi di Indonesia Bioshare Series #3: Webinar on Bioenergy Project Financing in Indonesia	Bioshare	5 Agustus/August 2021
		Refreshment of GSM and Introduction to new System AGNS	IIF	5 Agustus/August 2021
		ITB webinar - Program non reguler	ITB	10 Agustus/August 2021
		Indonesia JCM Webinar 2021	Indonesia JCM	2 September 2021
		Climate Bonds Initiative Annual Conference 2021	CBI	6 September 2021
		Moody's Webinar -Asia Oil & Gas	Moody's	7 September 2021
		Moody's Webinar - Transportation	Moody's	7 September 2021
		Moody's Webinar - Metal, Mining & Steel	Moody's	8 September 2021
		Moody's Webinar - Power	Moody's	8 September 2021
		INSEAD's Webinar: Leading Organisations in Disruptive Times	INEAD	8 September 2021
		Moody's Webinar - Indonesian Corporates	Moody's	9 September 2021
		Moody's Webinar - Infrastructure Finance	Moody's	9 September 2021
		EnergyTalk Series 12 - "The Deal with Intermittency: Energy Storage Resilience for Solar PV and Solar Park Development Indonesia"	Pomerindo Indonesia	16 September 2021
		HHP Power Breakfast Series Webinar	HHP	23 September 2021
		Enlit Asia Digital Festival 2021 "Piecing Together the Finance Puzzle: Local Banks, International Banks, ECAs, DFIs & The Availability of Capital in a Transitioning ASEAN Energy Sector"	Enlit Asia	29 September 2021
		Implementing regulation of Omnibus Law 2020	Dewi Negara Fachri & Partners Law Firm	12 April 2021
		Undangan PT SMI & DJPUPR re: Permohonan Penanggap Bimbingan Teknis Tahap Perencanaan dan Penyiapan Proyek KPBU Sesi V PT SMI & DJPUPR Invitation re: Responders' Proposal for Technical Guidance in the Planning and Preparation Phase of the PPP Project Session V	SMI & PUPR	15 Juli/July 2021
		VIRTUAL ROOM 2 - IIECCE 2021	IIECCE	16 Juni/June 2021
		FGD on Overseas Benchmark of Affordable Housing PPP Project	PUPR	29 Juni/June 2021
		Asian Solar Summit 2021	Asia Solar Summit	1 Juli/July 2021
		Speaker: IJ ASIA 2021 Virtual Event - Panel IV: Outlining the roadmaps for the development of the Indonesian power sector	IJ Asia	19 Mei/May 2021
		FGD Identifikasi Potensi Pasar pada Proyek KPDBU Rusun Daan Mogot FGD Identification of Market Potential in the Daan Mogot KPDBU Project	PUPR	14 Juli/July 2021
		Legal and Commercial Aspect in PPP Projects	HJP and Deloitte	29 November 2021

Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan
Training and/or education for the Corporate Secretary

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development Program and/or Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Nastantio W. Hadi	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Implementing regulation of Omnibus Law 2020	Dewi Negara Fachri & Partners Law Firm	12 April 2021
		Introduction to Onedrive System	IT Team	19 Februari/February 2021
		PIP Data Socialization	Operational Risk Team	16 April 2021
		Konsultasi Publik dokumen Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan ("SEMS") Public Consultation for Social and Environmental Management System ("SEMS") document	S&E Team	30 Maret/March 2021
		Proceeds Management and Impact Reporting Workshop	World Bank	16 Maret/March 2021
		Sustainability Bond	World Bank	7 April 2021
		The 4 Essentials of Leadership	Dunamis	26 Juli/July 2021 - 30 Juli/July 2021
		AGMS and AGNS Socialization	IIF	5 Agustus/August 2021
		RSEQJK Laporan Bulanan Monthly RSOJK Report	OJK	1 September 2021
		FGD - E Signature	OJK	7 September 2021
		UMKM Bangkit Ekonomi Tumbuh – OJK When MSME Rise the Economy Grows – OJK	OJK	13 September 2021
		EBTKE	METI	22 November 2021
		PT SMI-Sustainable Development Day 2021	PT SMI	10 November 2021
		Simpul Talk PUPR - Project Finance for Infrastructure Simpul Talk PUPR - Project Finance for Infrastructure	PUPR	1 Desember/December 2021

Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal
Training and/or education for the Internal Audit Unit

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development Program and/or Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Yudi Adrial	Kepala Unit Audit Internal (UAI)	Introduction to Onedrive System	IT Team	19 Februari/February 2021
		PIP Data Socialization	Operational Risk Team	16 April 2021
	Head of Internal Audit Unit (UAI)	Konsultasi Publik dokumen Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan ("SEMS")	S&E Team	30 Maret/March 2021
		Sustainability Bond	World Bank	7 April 2021
		The 4 Essentials of Leadership	Dunamis	26 Juli/July 2021-30 July 2021
		Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference and Exhibition	Indonesia Energy Efficiency and Conservation Society	14 Juni/June 2021-17 Juni/June 2021
		AGMS and AGNS Socialization	IIF	5 Agustus/August 2021
		Legal and Commercial Aspect in PPP Projects	HJP and Deloitte	29 November 2021
Rahman Soeryo Anindito	Manajer UAI UAI Manager	Legal and Commercial Aspect in PPP Projects	HJP and Deloitte	29 November 2021
		Mitigasi Ancaman Keamanan Informasi melalui Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Audit Mitigation of Information Security Threats through the Implementation of Information Security Management System and Audit	Pefindo - PT Pemeringkat Efek Indonesia	15 Desember/December 2021
		APPU dan KYC APPU and KYC	LPPI	21 Desember/December 2021
		Risk Awareness Sharining Session	IIF	10 Desember/December 2021

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development Program and/or Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Rama Aditia	Staff UAI UAI Staff	Implementing regulation of Omnibus Law 2020	Dewi Negara Fachri & Partners Law Firm	12 April 2021
		PIP Data Socialization	Operational Risk Team	16 April 2021
		Proceeds Management and Impact Reporting Workshop	World Bank	16 Maret/March 2021
		Audit Report Writing Effectively	IIAI	26 Juli/July 2021-27 Juli/July 2021
		Communication Skills for Auditors	IIAI	28 Juli/July 2021-29 Juli/July 2021
		AGMS and AGNS Socialization	IIF	5 Agustus/August 2021
		English Course	EF	Mei/May-20 November 2021
		Legal and Commercial Aspect in PPP Projects	HJP and Deloitte	29 November 2021
		Mitigasi Ancaman Keamanan Informasi melalui Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Audit Mitigation of Information Security Threats through the Implementation of Information Security Management System and Audit	Pefindo	15 Desember/December 2021
		APPU dan KYC APPU and KYC	LPPI	25 Desember/December 2021-2 Desember/December 2021
Risk Awareness Sharing Session	IIF	10 Desember/December 2021		
Khairiyah	Staff UAI UAI Staff	Legal and Commercial Aspect in PPP Projects	HJP and Deloitte	29 November 2021
		Mitigasi Ancaman Keamanan Informasi melalui Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Audit Mitigation of Information Security Threats through the Implementation of Information Security Management System and Audit	PT PEFINDO Biro Kredit	15 Desember/December 2021
		APPU dan KYC APPU and KYC	LPPI	23 Desember/December 2021 - 2 Desember/December 2021
		Risk Awareness Sharining Session	IIF	10 Desember/December 2021

Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite-Komite di Bawah Direksi dan Dewan Komisaris **Training and/or education for the Committees Under the Board of Directors and Board of Commissioners**

Sepanjang tahun 2021, semua komite-komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris tidak mengikuti kegiatan pelatihan dalam bentuk apapun.

Throughout 2021, all committees under the Board of Directors and the Board of Commissioners did not participate in any training activities.

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI INDUSTRI

Membership in Association in the Industry

Nama Organisasi Organization	Status Keanggotaan Membership status
Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL) Indonesian Telecommunications Society (MASTEL)	Anggota Aktif Active Member

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Changes in the Composition of the Board of Directors

Sepanjang tahun 2021, terjadi perubahan pada keanggotaan Direksi Perseroan seiring dengan diterimanya surat pengunduran diri Ibu Devi Pradnya Paramita dari posisinya sebagai Direktur Pelaksana & *Chief Financial Officer* Perseroan berlaku efektif tanggal 1 November 2021.

Throughout 2021, there was a change in the membership of the Company's Board of Directors due to the resignation of Ms. Devi Pradnya Paramita from her position as Managing Director & Chief Financial Officer of the Company effective as of 1 November 2021.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Sepanjang tahun 2021, susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Throughout 2021, the composition of the Company's Board of Commissioners did not change from the previous year.

04

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

Overview on Business Support

Sumber Daya Manusia Human Resources	90
Teknologi Informasi Information Technology	97
Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa System and Procedures for the Procurement of Goods and Services	101





SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Kami menempatkan seluruh karyawan sebagai mitra strategis yang memiliki peran dan fungsi berbeda-beda untuk mendukung tujuan perusahaan.

We have placed our employees as strategic partners who offer specific roles and functions in achieving our corporate objectives.

KEBIJAKAN SDM

Keberhasilan Perseroan dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi unggul diyakini dapat membawa dampak positif bagi keberlangsungan usaha IIF di masa depan. Bagi IIF, SDM adalah *intangible asset* atau aset penting yang tidak dapat diukur dengan satuan mata uang namun paling berharga karena perannya utamanya sebagai penggerak roda bisnis sehari-hari.

Kami menempatkan seluruh karyawan sebagai mitra strategis yang harus diperhatikan dengan baik pengelolannya karena tiap-tiap individu mempunyai peran dan fungsi berbeda-beda untuk mendukung pencapaian kinerja atau tujuan perusahaan. Untuk mendukung hal tersebut, kami juga melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan SDM yang ada dan memastikan konsistensi penerapannya terhadap kebutuhan organisasi, dinamika bisnis, dan tantangan yang dihadapi.

Pada prinsipnya, kebijakan dan program pengelolaan SDM adalah bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis IIF. Perumusan kebijakan SDM Perseroan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai inti IIF, yaitu:

1. Kolaborasi

IIF memiliki komitmen terhadap kepercayaan, rasa hormat, komunikasi terbuka, pengakuan atas prestasi, pemahaman atas tujuan organisasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Keunggulan

IIF memiliki komitmen terhadap keunggulan, seperti ketelitian, tidak memberikan toleransi terhadap kesalahan, akurat, mampu memenuhi harapan, mengedepankan sikap profesionalisme dalam bekerja dan mampu memecahkan masalah.

3. Komitmen terhadap Bisnis Infrastruktur

IIF memiliki komitmen untuk menjadi pakar bisnis infrastruktur di Indonesia yang mengutamakan penerapan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial.

Ketiga nilai di atas diharapkan dapat diterapkan secara nyata oleh setiap insan IIF, baik pada saat bekerja dalam tim maupun saat berinteraksi dengan para mitra bisnis. Dengan memperkuat penerapan tiga nilai-nilai inti IIF di atas, Perseroan berupaya membangun hubungan yang harmonis dengan mitra bisnis dan Pemangku Kepentingan.

HR POLICIES

IIF believes that the Company's success in managing an excellent pool of competent Human Resources (HR) will have positive impacts on its business sustainability in the future. IIF acknowledges that employees are intangible assets whose real worth cannot be measured in monetary terms, but sees it as its most valuable asset for its irreplaceable role in running its daily operations.

We have placed our employees as strategic partners. Each individual offers specific roles and functions, hence we ensure proper management to excel in achieving our corporate objectives. To regulate effective policies, regular evaluations of the existing human resource policies have been implemented with the consistency the business dynamics inclusive of the emerging challenges.

In principle, HR management policies and programs are an integral part of IIF's business strategy. The formulation of the Company's HR policies is based on IIF's core values:

1. Collaboration

IIF is committed to trust, respect, open communication, recognition of achievements, understanding of organizational objectives and collaboration to achieve them.

2. Excellence

IIF is committed to excellence such as thoroughness, zero tolerance for errors, accuracy, meeting expectations, prioritizing professionalism at work and being able to solve problems.

3. Commitment to Infrastructure Business

IIF is committed to be an expert in infrastructure business in Indonesia which put high emphasis on Environmental and Social Governance implementation.

The three values above are expected to be implemented by all IIF employee, both internally when working with teams and externally when interacting with stakeholders. By strengthening the implementation of these three core values, IIF strives to build a harmonious relationship with stakeholders.

IIF juga menunjung tinggi prinsip kesetaraan gender bagi seluruh karyawan di tempat kerja. Komitmen kami akan hal ini tercermin dari statistik komposisi karyawan laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang jumlahnya. Pada tahun 2021, sebanyak 48% dari jumlah keseluruhan karyawan IIF adalah perempuan. Sementara itu, keterwakilan perempuan pada posisi manajemen senior (Direktur, *Senior Vice President* dan *Vice President*) adalah sebesar 23%. Hal ini menunjukkan bahwa IIF tidak pernah membatasi keterlibatan dan peran karyawan perempuan di dalam proses bisnis yang kami jalankan, melainkan kami terus berupaya mendorong inklusivitas dan menjamin pemenuhan hak-hak karyawan perempuan.

PENGELOLAN SDM DI MASA PANDEMI COVID-19

Perseroan bertanggung jawab untuk menghadirkan iklim kerja yang aman dan kondusif bagi seluruh karyawan dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan kerja, dukungan terhadap pengembangan kompetensi SDM, pemenuhan hak-hak karyawan serta pemberian paket remunerasi yang adil dan kompetitif.

Tahun 2021, Perseroan kembali beradaptasi dengan disrupsi bisnis di masa pandemi yang sedikit banyak telah membawa perubahan signifikan pada cara bekerja, proses bisnis, dan interaksi sosial sehari-hari. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong Perseroan untuk melakukan beberapa penyesuaian dan bersikap adaptif dalam merespons situasi eksternal yang terjadi khususnya terkait pengelolaan SDM.

Selama masa pandemi, Perseroan telah melakukan berbagai upaya penanganan dan langkah mitigasi yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan, serta dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 di lingkungan kerja, antara lain sebagai berikut:

- Pembentukan Tim Gugus Tugas COVID-19 Perseroan;
- Pengaturan waktu kerja yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah, situasi dan kondisi (WFH 100%, WFH 50%, atau WFH 25%);
- Pemberian tunjangan transportasi dan internet kepada karyawan yang menggunakan transportasi umum dan membutuhkan dukungan untuk mendukung kelancaran aktivitas WFH;
- Menyelenggarakan kegiatan vaksinasi dan *booster* bagi karyawan, keluarga, dan lingkungan terdekatnya;
- Memasukkan klaim vitamin dan suplemen ke dalam fasilitas rawat jalan tanpa perlu menunjukkan resep dokter;
- Pemberian vitamin dan suplemen bagi karyawan dan keluarganya yang terpapar COVID-19;
- Penyediaan paket karantina mandiri, apabila diperlukan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SDM

Sumber Daya Manusia ("SDM") adalah unit kerja di Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan dan praktik pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk memastikan bahwa prosesnya selaras

IIF is also committed to upholding the principle of equality in embracing all employees. Our commitment is reflected through the composition of our male and female employees, being nearly equal. In 2021, 48% of our headcounts were female. Furthermore, the female representation of senior management positions (Director, Senior Vice President and Vice President) was at 23%. Showing that IIF does not discriminate on the involvement and role of female employees in the business processes, and in fact, we are seeking to encourage inclusiveness to ensure the fulfillment of the rights of female employees.

HR MANAGEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC

The Company is responsible for providing a safe and conducive working environment for its employees, by paying heed to work safety aspects, supporting HR competency development, fulfilling employee rights, and maintaining employee remuneration as well as providing fair and competitive remuneration packages.

In 2021, the Company continued to adapt to business disruptions which had led to significant changes to the way people work, run business processes, and make daily interactions. The changes eventually prompted the Company to make some adjustments and take a more adaptive approach to external situations, especially in HR management.

During the pandemic, the Company undertook various handling and mitigation measures to keep the safety and health of employees, and keep the COVID-19 virus from spreading in the work environment, including through the following:

- The formation of the COVID-19 Company Task Force Team;
- Work arrangements according to the government regulation, situation and conditions (100% WFH, 50% WFH or 25% WFH);
- Provision of transportation and internet allowance to employees who use public transportation and need support to facilitate the implementation of WFH;
- Organizing vaccinations and booster for employees, their families and their immediate environment;
- Include claims of vitamins and minerals into outpatient facilities without the need to show a prescription from a doctor;
- Provision of vitamins and minerals for employees and their families exposed to COVID-19;
- Provision of all-in self-quarantine package whenever necessary.

HUMAN RESOURCES STRUCTURE AND MANAGEMENT

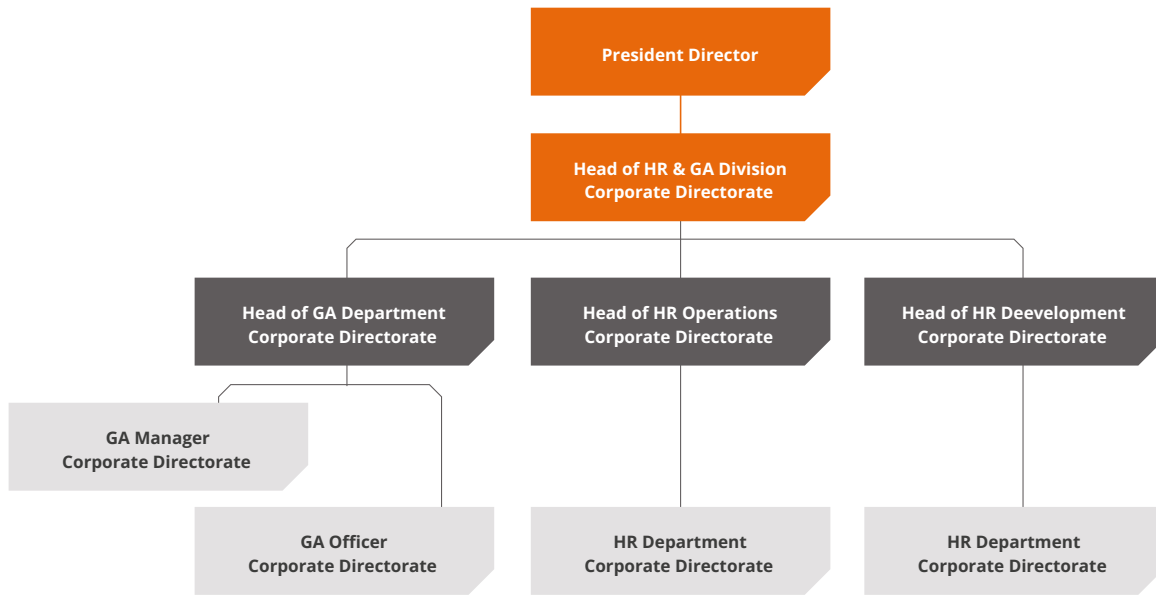
Human Resource ("HR") is the Company's work unit that is tasked and responsible for planning, directing, overseeing, and evaluating Human Resource policy and practices to ensure that the processes is aligned with company/business strategy. The HR department which

dengan strategi perusahaan/bisnis. Departemen SDM terbagi menjadi dua, yaitu HR Development dan HR Operations dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang juga membawahi General Affairs dan bertanggung jawab langsung kepada CEO.

Berikut ini adalah struktur organisasi pengelola SDM yang berlaku di IIF hingga 31 Desember 2021:

is divided into two, i.e. HR Development and HR Operations is led by a Head of Division who is also in charge of General Affairs and reports directly to the CEO.

The following is IIF's organizational structure of HR management as of December 31, 2021:



VISI & MISI DEPARTEMEN SDM

Visi Departemen SDM

Berkolaborasi dengan Departemen dan pemangku kepentingan lainnya menjadikan IIF sebagai organisasi yang menarik, di mana talenta baru tertarik untuk bergabung, dan karyawan termotivasi untuk berprestasi. Dengan tujuan untuk mengembangkan Perusahaan di bidang pembiayaan dan konsultasi yang berkelanjutan.

Misi Departemen SDM

- Sebagai organisasi Pembelajaran:
Untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas, memperkuat kredibilitas serta mempersiapkan keterampilan dan kepemimpinan di masa depan;
- Sebagai organisasi Adaptif:
Untuk menjamin kelangsungan bisnis dengan menyikapi perubahan bisnis dan dinamikanya;
- Sebagai organisasi yang Menarik:
- Untuk memberikan penghargaan yang kompetitif di mana karyawan merasa dihargai atas pekerjaannya;
- Untuk menyelaraskan nilai dan mengembangkan budaya kerja tim dalam rangka meningkatkan keterlibatan, dimana karyawan merasa bahwa mereka merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar, melakukan pekerjaan yang bermakna, dan bangga berada di dalam tim pemenang dan perusahaan yang mampu bertahan lama.

HR DEPARTMENT VISION & MISSION

The Vision of HR Department

Collaborating with other Departments and stakeholders making IIF an attractive organization, where new talents are attracted to join, and employees are motivated to perform. With the aim to grow the Company in the field of sustainable financing and advisory.

The Mission of HR Department

- As a Learning organization:
To facilitate capacity building, accelerate credibility and prepare future skills and leaderships;
- As an Adaptive organization:
To ensure business continuity by addressing business changes and its dynamics;
- As an Attractive organization:
- To provide competitive rewards where employees feel valued for the work;
- To align values and develop team culture to gain engagement, where employees feel that they are part of something big, doing meaningful work and proud to be in a winning team and a build to last company.

PROFIL KEPALA HR & GA

Suli Indah Lestari

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Pengangkatan:

Head of Human Resource and General Affairs

Riwayat Pendidikan:

Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada

Riwayat Pekerjaan:

- PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") – Kepala HRGA (2015–sekarang)
- PT Siegwark Indonesia – Country HR Manager (2011– 2015)
- PT Sinar Antjol – Corporate HR Manager (2004– 2011)
- PT Industira – Kepala Sumber Daya Manusia (2001– 2004)
- PT Bank Universal – HR Officer (1996–2001)

PROSES PERENCANAAN & REKRUTMEN KARYAWAN

Pesatnya proyek-proyek pembangunan infrastruktur nasional dari tahun ke tahun berbanding lurus dengan tingginya kebutuhan IIF dalam menjangkau para profesional yang tepat. Bagi IIF yang memiliki karakteristik bisnis unik dan mempunyai keunggulan pada setiap produk pembiayaan dan *advisory*, maka kelancaran operasional bisnis kami dan upaya pengembangan skala usaha IIF harus ditunjang dengan ketersediaan SDM yang andal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Dalam menjangkau talenta terbaik, Perseroan menitikberatkan pada rekrutmen SDM yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki kemampuan tinggi dalam beradaptasi dengan perubahan (*agile*). Perseroan menyadari proses seleksi karyawan menjadi salah satu fondasi awal untuk mendapatkan bibit-bibit unggul terbaik yang kelak akan memimpin perusahaan dan menempati posisi puncak manajemen.

Pengisian posisi-posisi *vacant* di Perseroan diutamakan melalui jalur internal terlebih dahulu melalui program pengembangan profesional *Flexible Career Path*, yang mencakup *Grade to Grade Promotion* dan *Open Career Path*. Apabila tidak ada kandidat karyawan yang sesuai dengan kualifikasi yang diminta, maka IIF membuka proses rekrutmen eksternal untuk mendapatkan calon karyawan *fresh graduate* maupun tenaga profesional yang sudah berpengalaman.

Sepanjang 2021, Perseroan telah merekrut 25 karyawan baru. Jumlah tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan bisnis IIF pada jangka panjang, serta dalam rangka mendukung terwujudnya pertumbuhan yang berkesinambungan (*continuity growth*).

Didukung oleh ketersediaan dan bantuan dari para praktisi dan profesional senior, kami berharap proses regenerasi karyawan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mengakomodasi semua kebutuhan pemasaran produk-produk pembiayaan infrastruktur.

PROFILE OF HEAD OF HR & GA

Suli Indah Lestari

Indonesian citizen, 51 years old, domiciled in Jakarta.

Legal Basis of Appointment:

Head of Human Resource and General Affairs

Educational Background:

Bachelor of Psychology from Gadjah Mada University

Employment History:

- PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") – Head of HRGA (2015–now)
- PT Siegwark Indonesia – Country HR Manager (2011– 2015)
- PT Sinar Antjol – Corporate HR Manager (2004– 2011)
- PT Industira – Head of Human Resources (2001– 2004)
- PT Bank Universal – HR Officer (1996–2001)

EMPLOYEE PLANNING & RECRUITMENT PROCESS

The rapid development of national infrastructure projects in recent years correlate directly with a requirement to attract bonafide candidates. IIF, as an institution that possesses a unique business nature leading across the wide spectrum of its financing and advisory products, with its seamless operations and business expansion requires support from reliable human resources, both in terms of quantity and quality.

In recruiting the best talents, the Company targets qualified human resources with defined quality, integrity, and agility. The Company recognizes that employee selection process as one of the preliminary foundations to attain the best talents who are projected to lead the Company for the future, as a part of its top management team.

The Company prefers internal to external hires in filling an open position where an internal hire is generally applied through Flexible Career Path professional development program, which includes Grade to Grade Promotion and Open Career Path. IIF will switch to external hire when criteria-meeting candidates are not internally available by either recruiting fresh graduates or hiring skilled professionals.

Throughout 2021, the Company had 25 recruits. This figure had been adjusted to the needs of the Company's business development in the long term, with an aim of assisting the Bank in achieving continuity growth in the business.

Assisted by senior professionals and business practitioners, we aim to run a smooth succession process so we can accommodate all that is required to market the Company's infrastructure financing products.

REMUNERASI KARYAWAN

Tidak hanya berfokus pada program pengembangan kompetensi karyawan, Perseroan juga menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan hidup para karyawan. Kami berkeyakinan sistem remunerasi yang kompetitif di pasar tenaga kerja dapat mendorong kinerja, loyalitas, dan produktivitas karyawan.

Paket remunerasi bagi karyawan, manajemen dan Komisaris disusun sedemikian rupa dengan menggunakan tolok ukur pasar, serta ditinjau dan disesuaikan secara berkala sehingga menempatkan IIF pada tingkat yang kompetitif dan diharapkan dapat menjadikan IIF sebagai perusahaan pilihan baik untuk talenta eksternal maupun eksisting karyawan.

Komposisi Remunerasi Karyawan

Sebagai bentuk apresiasi bagi karyawan, Perseroan menawarkan sejumlah *benefit* dan fasilitas menarik lainnya yang bertujuan untuk mendukung kualitas hidup karyawan serta dalam rangka menjaga tingkat *turnover* karyawan, seperti:

1. Gaji dan Bonus Kinerja

Struktur gaji dan bonus kinerja yang diterima karyawan disesuaikan dengan tingkat atau pangkat masing-masing karyawan serta mempertimbangkan prestasi dan kontribusi yang sudah diberikan kepada Perseroan.

2. Fasilitas dan Tunjangan

Selain menerima gaji pokok, tunjangan komunikasi dan transportasi, setiap karyawan juga berhak atas fasilitas dan tunjangan lainnya, berupa:

- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan setahun sekali sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Penggantian biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap, serta bersalin bagi karyawan dan anggota keluarganya; dan
- Tunjangan keanggotaan olahraga.

Fasilitas Kesehatan bagi Karyawan

Setiap karyawan diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dengan kondisi kesehatan yang prima. Oleh sebab itu, IIF terus berupaya menghadirkan iklim kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan dan mengedepankan prinsip *work-life-balance* mengingat setiap karyawan juga memiliki kehidupan lain di luar kantor.

MANAJEMEN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIER

Perseroan sudah merancang sistem manajemen kinerja yang terstruktur untuk mencapai keunggulan kompetitif dan sasaran strategis, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis di masa depan. Hal ini juga dilakukan sebagai bagian dari program retensi karyawan dalam rangka mempertahankan talenta terbaik yang dimiliki.

Melalui Divisi SDM, Perseroan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap individu telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik demi terealisasinya rencana bisnis Perseroan.

EMPLOYEE REMUNERATION

The Company knows that while continually running employee competency development programs is important, looking after the quality of lives and welfare of the employees also matters. We believe that a competitive remuneration system in the labor market will drive employee performance, loyalty and productivity.

The remuneration package for employees, management and commissioners is made in such a way using market benchmarks, reviewed and adjusted periodically so that it places IIF at a competitive level which can make IIF the employer of choice for both external talents and its existing members.

Employee Remuneration Composition

As a form of appreciation for employees, the Company offers allowances and other attractive facilities to support the quality of life of employees and in order to maintain employee turnover rates, such as:

1. Salary and Performance Bonus

Structure of salary and performance bonus for employees is based on the grading or position of each employee in addition to their achievements and contributions to the Company.

2. Facilities and Benefits

In addition to basic salary, communication allowance, and transportation allowance, the Company also provides other facilities and allowances, namely:

- Health Security Program;
- Employment Security Program;
- Religious Holiday Allowance Raya ("THR") given annually above the applicable regulations;
- Reimbursement for outpatient and inpatient and maternity insurances for employees and their family; and
- Sports membership allowance.

Health Facilities for Employees

The Company expects every one of its employees to remain in good health in order for them to always deliver their best. Therefore, IIF strives to provide a safe and healthy work climate for all employees and promotes the principle of *work-life-balance* given that they each have their personal lives.

PERFORMANCE MANAGEMENT AND CAREER DEVELOPMENT

The Company has designed a structured performance management system to build competitive advantages and accomplish its strategic goals while meeting future business needs. The systems are continuously run as part of employee retention program to keep the Company's best talent.

Through the HR Division, the Company periodically monitors and evaluates employee performance to ensure that each one of them has carried out their duties and responsibilities properly in order for the Company to realize its business plan.

Pengukuran kinerja karyawan dilakukan dengan mengacu pada penilaian berbasis *Key Performance Indicators* (KPI) yang sudah disepakati bersama di awal tahun. Indikator-indikator KPI menjadi target sasaran yang harus dicapai oleh masing-masing karyawan.

Selanjutnya hasil penilaian kinerja karyawan tersebut akan digunakan oleh manajemen sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan langkah pengembangan karier ataupun opsi perbaikan/peningkatan kompetensi yang diperlukan di masa mendatang. Penerapan sistem penilaian kinerja tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari program pengembangan karier karyawan.

TURNOVER KARYAWAN DAN PROGRAM RETENSI

Tingkat perputaran karyawan kerap menjadi salah satu tantangan besar yang harus dipersiapkan secara matang upaya mitigasinya agar tidak mengganggu rencana bisnis tahunan Perseroan. Menyadari pentingnya pengelolaan *turnover* karyawan setiap tahun, maka Perseroan menjalankan program retensi dan menawarkan paket remunerasi yang menarik untuk menjaga loyalitas karyawan.

Sepanjang tahun 2021, tingkat *turnover* karyawan IIF adalah sebesar 13% (di atas rata-rata *turnover* industri perbankan sebesar 10,29%), relatif stabil dibandingkan dengan *turnover* tahun 2020 sebesar 12%. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kerja dan sistem kerja yang diterapkan di internal perusahaan, serta kebijakan pengelolaan SDM yang berjalan sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan karyawan.

Berikut ini adalah statistik perputaran karyawan IIF sepanjang tahun 2021:

Penyebab Causes	Jumlah Orang Total Person
Mengundurkan Diri Resign	15
Jumlah Karyawan yang Keluar Total Exiting Employees	15
Jumlah Rekrutmen/Karyawan yang Masuk Total Recruitment/Employees Accepted	25
Jumlah Karyawan di Awal Tahun Total of Employees at the Beginning of the Year	106
Jumlah Karyawan di Akhir Tahun Total of Employees at the End of the Year	116
Persentase <i>Turnover</i> (%) Turnover Percentage (%)	13%

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Perseroan memiliki kesadaran penuh untuk mencetak generasi penerus yang unggul dan berkualitas demi terjaganya kelangsungan usaha pada jangka panjang. Komitmen IIF akan hal ini diwujudkan melalui penyediaan berbagai program pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi karyawan baik dari sisi teknis maupun non-teknis yang diselenggarakan secara terprogram dan berkelanjutan.

Pada tahun 2021, Perseroan kembali menyelenggarakan kegiatan pelatihan berbasis *online*, seperti webinar atau pelatihan virtual dengan rata-rata jam pelatihan per karyawan per tahun pada tahun 2021 adalah 97 jam. Melalui keterlibatan aktif seluruh karyawan

Employee performance is measured using Key Performance Indicators (KPI)-based assessments that are mutually agreed on at the beginning of each year. KPI indicators are seen as targets that must be achieved by each employee.

Furthermore, the management will use the employee performance appraisal results as the basis for consideration to determine career development measures or options for improvement/increasing competencies in the future. The implementation of the performance appraisal system is an integral part of the employee career development program.

EMPLOYEE TURNOVER AND RETENTION PROGRAM

Employee turnover rate is often one of the big challenges that must be carefully anticipated for mitigation efforts to keep them from disrupting the Company's annual business plan. Aware of how important it is to manage annual employee turnover; the Company runs a retention program and offers attractive remuneration packages to maintain employee loyalty.

Throughout 2021, IIF's employee turnover rate was recorded at 13% (above the industry banking turnover average of 10.29%) which is relatively stable compare to 12% in 2020. This shows that our work culture, current internal work system, as well as our HR management policies that are implemented at the Company have been consistent with the expectations and needs of IIF employees.

The following are IIF employee turnover statistics throughout 2021:

EMPLOYEE TRAINING AND COMPETENCE DEVELOPMENT

The Company fully recognizes the need to produce superior and quality successors to sustain the business in the long term. IIF's commitment in this area is manifested through the provision of various carefully planned and sustainable training and/or employee competency development programs in both technical and non-technical areas of the business.

In 2021, the Company organized a series of online training activities, such as webinars or virtual training with an average 97 training hours per employee per year. What we hope from such active participation in these various types of training is that all IIF employees will be

dalam mengikuti berbagai jenis pelatihan tersebut, kami berharap mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi persaingan industri yang semakin dinamis dan kompetitif.

Uraian lebih lanjut mengenai program pengembangan dan pelatihan karyawan selama tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, halaman 70-71, dalam laporan ini.

KOMUNIKASI KARYAWAN

Perseroan menyadari bahwa komunikasi internal yang baik berperan penting dalam mendukung keberhasilan program dan aktivitas bisnis IIF. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan menyelenggarakan sejumlah acara internal yang digelar secara rutin dan melibatkan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan organisasi ataupun departemen dengan harapan agar dapat terjalin hubungan yang harmonis serta tercipta komunikasi yang efektif antar-departemen.

Pada tahun 2021, Perseroan telah mengadakan 5 kali acara internal yang menjangkau seluruh karyawan dengan beragam agenda pembahasan. Acara-acara tersebut terdiri dari 2 kali *event Townhall*, 1 kali acara *Year-End Gathering* dan 2 kali acara Tausiyah/siraman rohani.

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Perseroan memberlakukan sistem *reward* sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan atas prestasi dan kinerja yang sudah diberikan selama masa bekerja. Di sisi lain, program ini juga bertujuan untuk memacu semangat para karyawan agar mereka termotivasi untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan.

Sementara itu, untuk mendukung terciptanya budaya disiplin di lingkungan kerja, Perseroan menerapkan sistem *punishment* kepada karyawan yang terbukti melanggar Peraturan Perusahaan, *Standard Operation Procedure* (SOP), dan Kode Etik. Adapun sanksi yang diberikan kepada karyawan yang terbukti bersalah akan ditentukan sesuai bobot berat pelanggaran yang dilakukan, sesuai Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REALISASI PROGRAM KERJA SDM TAHUN 2021

1) Fundamental SDM

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di mana kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan pelaporan yang efektif dianggap penting dalam proses bisnis, pada tahun 2021, dengan bantuan Konsultan SDM, Departemen SDM telah menjalankan proyek-proyek berikut ini:

- a) Deskripsi pekerjaan, analisis pekerjaan dan evaluasi pekerjaan; dan
- b) Tinjauan struktur organisasi.

Desain awal telah selesai.

2) Sistem SDM

Sistem HR online dimulai di tahun 2021 dengan Sistem Layanan Mandiri Karyawan, mencakup:

- a) Sistem Manajemen Cuti;
- b) Sistem Manajemen Klaim Medis; dan
- c) Penerimaan Karyawan.

Sistem tersebut telah banyak digunakan oleh karyawan.

more prepared in dealing with the increasingly dynamic business landscape in the competitive financing industry.

A more detailed description of employee development and training programs during 2021 can be found in the Company Profile Chapter, page 70-71, in this report.

EMPLOYEE COMMUNICATION

The Company realizes that excellent internal communication plays an important role in supporting the success of IIF's programs and business activities. To this end, the Company organizes regular internal events, involving all employees from various levels or departments to establish harmonious inter-department relationships and allow effective communication.

In 2021, the Company held 5 internal events that reached to all employees with various discussion agendas. The events comprised of 2 Townhall meetings, 1 Year-End-Gathering, and 2 religious sessions of faith-increasing sermon.

REWARD AND PUNISHMENT

The Company applies a reward system as a form of appreciation to employees for their achievements and performance during their years of service. The system aims to stimulate the enthusiasm of the employees so that they are motivated to give maximum contribution to the company.

On the other hand, to help create a disciplined work culture, the Company applies a punishment system for employees who are proven to have violated Company Regulations, Standard Operation Procedures (SOP), and Code of Ethics. The sanctions given to employees who are found guilty will be determined according to the severity of the violations committed, as per Company Regulation and prevailing laws.

REALIZATION OF HR WORK PROGRAM IN 2021

1) HR Fundamentals

In line with the principles of good corporate governance where clarity of work, responsibilities and effective reporting line is considered as important to do business, in 2021, with the help of HR Consultant, HR run the followings projects:

- a) Job description, job analysis and job evaluation; and
- b) Organizational structure review.

The initial design was completed.

2) HR Systems

HR online systems started in 2021 with Employee Self-Service Systems:

- a) Leave Management System;
- b) Medical Claim Management System; and
- c) Employee on-Boarding.

The systems have been widely used by employees.

3) Sistem Penghargaan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mendorong daya saing perusahaan, perusahaan melakukan beberapa kajian dan persiapan terkait Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK.

Studi dan penunjukan vendor sudah selesai dilakukan dan mulai diterapkan pada tahun 2022.

RENCANA FOKUS PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Departemen SDM bertujuan untuk memfokuskan kegiatan pengembangannya pada hal-hal berikut:

1) **Rebranding dan Penguatan Budaya Perusahaan IIF**

Dengan 10+ tahun pendirian, 100+ karyawan, dan tahap perkembangan yang berbeda, pencampuran dan pembentukan budaya menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas.

2) **Menyelenggarakan program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan, pekerjaan dan perusahaan**

- a) Secara umum, *technical skill* untuk level menengah ke bawah serta *soft skill* dan *leadership skill* untuk manajer senior; dan
- b) Secara khusus, pelatihan yang dapat mendorong bisnis utama dan strategi baru IIF.

3) Reward Systems

To increase employee benefits and increase the company's competitive edge, the company conducted several studies and preparations regarding Defined Contribution Pension Plan (Dana Pensiun Lembaga Keuangan or DPLK).

Study and vendor appointment were completed, to be implemented in 2022.

HR DEVELOPMENT FOCUS PLAN FOR 2022

In 2022, HR aim to focusing its development activities to the followings:

1) **Rebranding and Strengthening IIF Corporate Culture**

With 10+ years of establishment, 100+ employees and different stage of development, culture-blending and shaping has become more important than ever to elevated growth and productivity.

2) **Organizing development program that are in accordance with the needs of employees, the jobs and the company**

- a) In general, technical skills for middle level and below and soft skills and leadership skills for senior managers; and
- b) In particular, training that can leverage IIF's business and new strategies.

TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology

Perseroan menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan dan tata kelola TI dengan terus melakukan inovasi serta perbaikan secara berkesinambungan.

The Company pays great attention to its IT management and governance with constant innovations and continuous improvements.

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TI

Seiring dengan perkembangan zaman dan era digitalisasi yang berkembang pesat dari waktu ke waktu, Perseroan menyadari bahwa ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang kokoh menjadi sebuah kebutuhan mendesak yang diyakini memiliki peran besar dalam mendukung kelancaran proses bisnis sehari-hari. Oleh sebab itu, Perseroan menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan dan tata kelola TI dengan terus melakukan inovasi serta perbaikan secara berkesinambungan.

Agar pengembangan TI lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis Perseroan, IIF menjalankan Rencana Strategi Teknologi Informasi (ITSP) dan *roadmap* rencana kerja (2018–2021) yang dijadikan sebagai acuan dalam hal pengembangan dan implementasi solusi teknologi. Adapun hal-hal yang menjadi fokus

IT POLICY AND GOVERNANCE

Along with times of changes and the rapid progress of digitalization, the Company realizes that the availability of a solid Information Technology (IT) infrastructure is an urgent need that is believed to play a crucial role in helping the Company to run seamless daily business processes. Therefore, the Company pays great attention to its IT management and governance with constant innovations and continuous improvements.

In order for the Company to have a more focused and business-driven IT development, IIF has completed an Information Technology Strategy Plan (ITSP) Roadmap for (2018–2021), and start a new Roadmap starting 2022 to 2024 that offer guidelines in developing and providing technology solutions. The ITSP's focus is to have a

ITSP antara lain membangun *platform* TI yang *robust*, organisasi TI yang efektif, meningkatkan integrasi sistem dan keamanan TI, serta meningkatkan keberadaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membantu pengambilan keputusan, melalui investasi TI dengan biaya yang efisien.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA TI

Departemen TI berada di bawah Divisi Operasi & TI yang bertanggung jawab langsung kepada Chief Financial Officer. Organisasi TI terdiri dari *IT Head* yang dibantu oleh 2 (dua) sub-departemen yang membawahi bidang Infrastructure & Security dan Applications. Beberapa kegiatan non-inti dilakukan dengan menyewa jasa *outsourcing* berdasarkan kontrak individu, dan/atau layanan terkelola, seperti untuk keperluan pemeliharaan infrastruktur, *helpdesk* dan *junior developer*. Departemen TI diawasi oleh IT Steering Committee yang terdiri dari *Chief Executive Officer* (CEO), *Chief Financial Officer* (CFO) dan *Chief Risk Officer* (CRO), yang masing-masing perannya sudah ditetapkan dalam ITSC Charter.

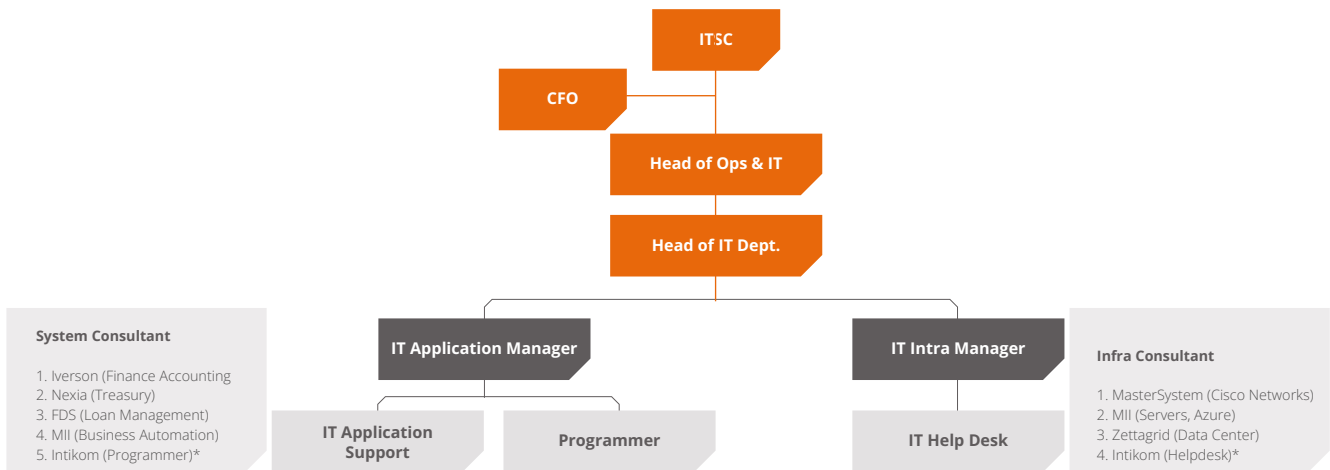
Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur pengelola IT IIF per 31 Desember 2021:

robust IT platform, effective IT organization, improved integration of the existing IT systems and security, and increase accuracy and accountability of information to facilitate decision making, through cost-efficient IT investments.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF IT MANAGEMENT

IT Department is governed under Operations & IT Division reporting to Chief Financial Officer. The Organization consisting of IT Head with 2 (two) sub-departments heading for Infrastructure & Security and Applications. Several non-core activities are performed through outsourcing under individual contract, and/or managed services, such as for infrastructure maintenance, helpdesk and junior developer. IT Department is supervised by IT Steering Committee consisting of Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO) and Chief Risk Officer (CRO), whose roles are defined in the ITSC Charter.

The following chart describes the IIF IT managing body in IIF's organizational structure until December 31, 2021:



PROFIL KEPALA UNIT TI

Adi S. Hermawan
Warga Negara Indonesia, 44 tahun, berdomisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:
Sarjana Teknologi Informasi dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Riwayat Karier:
Beliau mengawali kariernya di Perseroan sejak Maret 2015. Sebelum bergabung di IIF, beliau sempat bekerja di beberapa perusahaan, diantaranya sebagai Analis Bisnis dan Manajer Proyek di salah satu Vendor IT selama 7 tahun, di Divisi Pendukung Bisnis dan Teknologi pada sejumlah Bank selama lebih dari 7 tahun, hingga kemudian beliau memulai kariernya di IIF.

Beliau pernah bekerja di PT Adicipta Inovasi Teknologi (AdIns), ABN AMRO Bank NV, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank CIMB Niaga,

PROFILE OF HEAD OF IT DEPARTMENT

Adi S. Hermawan
Indonesian citizen, 44 years old, domiciled in Jakarta.

Educational Background:
Bachelor of Information Technology from Bina Nusantara University, Jakarta.

Career History:
He started his career with the Company since March 2015. Prior to joining IIF, he has been working in several companies, in IT Vendor as Business Analyst and Project Manager for 7 years, Business Support and Technology Division in several Banks for more than 7 years, until then he started his career at IIF.

He has worked with PT Adicipta Inovasi Teknologi (AdIns), ABN AMRO Bank NV, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank CIMB Niaga, Rabobank

Rabobank Indonesia, dan Perseroan. Pengalamannya di bidang TI sangat berharga bagi Perseroan terutama dalam membangun Departemen TI, serta pengembangan sistem dan infrastruktur TI Perseroan.

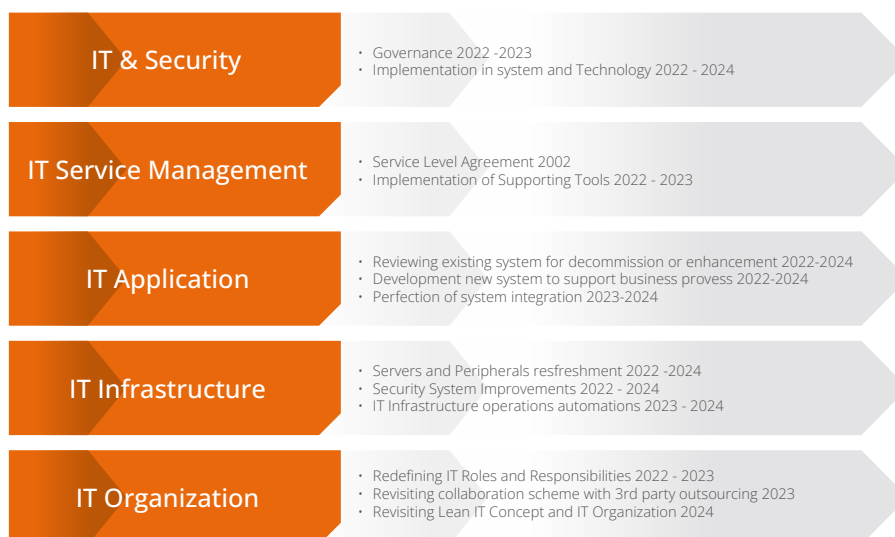
Selama bekerja di Perseroan, beliau telah meningkatkan pengetahuannya dengan mengikuti berbagai jenis pelatihan dan webinar yang mencakup beberapa topik, seperti kepemimpinan, peningkatan proses bisnis, dan pengetahuan manajemen terkait TI.

ROADMAP PENGEMBANGAN TI

Rencana pengembangan TI dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis TI (*IT Strategic Plans*/"ITSP") yang diperbaharui setiap 3 tahun. ITSP terakhir berlaku hingga Desember 2021, dan yang telah diperbarui sudah mencakup *Roadmap* hingga akhir Desember 2024. Tujuan utama dari ITSP adalah untuk memastikan keselarasan antara fungsi dan layanan TI dengan strategi bisnis, serta berusaha untuk 100% patuh dengan regulator dan lembaga pihak ketiga terkait, dalam lingkungan TI yang lebih aman dan memiliki tingkat risiko yang dapat diterima, serta dapat beradaptasi dengan teknologi yang relevan di masa sekarang ini.

Dalam Rencana Strategis TI, IIF menetapkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama 3 tahun ke depan. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam Inisiatif yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peta Jalan terperinci yang disepakati dalam Rencana Strategis TI. Semua Inisiatif dipresentasikan di hadapan Komite Pengarah TI untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Berikut ini adalah *IT Roadmap* IIF selama 3 tahun ke depan, yaitu:



INFRASTRUKTUR TI

Sepanjang tahun 2021, Perseroan telah menyelesaikan relokasi pusat data dan menyiapkan situs DR dan sistem cadangan yang lebih kuat. Perseroan juga telah melakukan penyegaran *firewall* dan periferan *proxy* untuk meningkatkan keamanan jaringan.

Indonesia and the Company. His experience in IT has been valuable to the Company in setting up the whole IT Department, and later on development on system and IT infrastructure for the Company.

During his time with the Company, he has enriched his knowledge through trainings and webinars on several aspects such as leadership, business process improvement, and IT related management knowledge.

IT DEVELOPMENT ROADMAP

Development plan of IT is laid out in the IT Strategic Plan document which is renewed every 3 years. The last ITSP was valid until December 2021, and the renewed one covers Roadmap until end of December 2024. The main goals of the ITSP are to have an excellent alignment between IT functions and delivery with the business strategy, and strive for 100% compliance with regulator and related 3rd party institution, within a more secured IT environment and having acceptable risks, and adapting to the recent relevant technology.

In the IT Strategic Plan, IIF defined the Objectives to be achieved in 3 years. The Objectives is drilled down into Initiatives which will be carried out according to the detailed Roadmap agreed in the IT Strategic Plan. Each Initiative is presented before the IT Steering Committee for final approval.

The IT Roadmap for the next 3 years is as follows:

IT INFRASTRUCTURE

Throughout 2021, the Company has completed the data center relocation and setup more robust DR site and backup systems. The Company has also refreshed firewall and proxy peripherals to improve the network security.

REALISASI BELANJA MODAL TI TAHUN 2021

Pada tahun 2021, realisasi belanja modal atau *capital expenditure (capex)* TI tercatat sebesar Rp3 miliar, atau setara 61,9% dari total anggaran. Revisi belanja modal mengakibatkan alokasi anggaran menjadi sebesar Rp4,85 miliar berkurang Rp9,1 miliar setelah ITSC memutuskan adanya beberapa perubahan strategi dan membatalkan sejumlah inisiatif karena efisiensi anggaran akibat pandemi.

REALISASI PROGRAM KERJA TI TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Departemen TI telah berhasil menyelesaikan sejumlah inisiatif strategis berikut ini dengan baik, antara lain:

- 1) Relokasi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data ke *Cloud*;
- 2) Pengembangan *Data Warehouse* dan laporan utamanya;
- 3) Pengembangan aplikasi terkait bisnis untuk meningkatkan pengendalian, efisiensi dan efektivitas proses bisnis di Direktorat Investasi, Direktorat Risiko, Direktorat Keuangan dan Divisi HR&GA yang meliputi pengembangan/implementasi berikut namun tidak terbatas pada:
 - a. Modul Investasi: Pendaftaran, Persetujuan, Pemantauan, dan Pelaporan Data Statis Klien
 - b. Modul Perjanjian: Pendaftaran, Persetujuan, Pemantauan, dan Pelaporan Perjanjian
 - c. Modul Kondisi: Pendaftaran, Persetujuan, Pemantauan, dan Pelaporan Kondisi
 - d. Modul KYC: Pendaftaran, Persetujuan, Pemantauan, dan Pelaporan KYC
 - e. Daftar Periksa Kepatuhan: Pendaftaran, Persetujuan, Pemantauan, dan Pelaporan Kepatuhan
- 4) Penyegaran *Firewall* dan *Proxy*.

RENCANA FOKUS PENGEMBANGAN TI TAHUN 2022

Fokus Pengembangan TI pada tahun 2022 mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan implementasi *IT Security* pada sistem dan teknologi;
- 2) *Review*, peningkatan, dan pengembangan sistem dan teknologi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis;
- 3) Penyempurnaan tata kelola TI dengan melakukan peninjauan kembali terhadap Kebijakan TI dan Prosedur Operasi Standar.

Selain itu, juga terdapat beberapa inisiatif lainnya yang sudah dilakukan, seperti peningkatan Manajemen Layanan TI, dan mendefinisikan kembali peran fungsional TI serta meninjau konsep *IT Lean* yang ada untuk Organisasi TI selama 3 tahun ke depan.

REALIZATION OF IT CAPEX IN 2021

In 2021, the total IT capital expenditure (*capex*) reached Rp3 billion, representing 61.9% of the budget. The revised capital expenditure was allocated to Rp4.85 billion, after Rp9.1 billion was released after ITSC decided for some strategy changes and cancelled initiatives due to pandemic related budget efficiency.

REALIZATION OF IT WORK PROGRAM IN 2021

In 2021, IT Department has completed the following strategic initiatives successfully, among others:

- 1) Relocation of Data Centre and Data Recovery Centry to *Cloud*;
- 2) Development of Data Warehouse and its main reports;
- 3) Development of business related applications to improve control, efficiency and effectivity of business process in Investment Directorate, Risk Directorate, Finance Directorate and HR&GA Division which include the following development/implementation but not limited to:
 - a. Investment Module: Registration, Approval, Monitoring, and Reporting of Client's Static Data
 - b. Covenant Module: Registration, Approval, Monitoring, and Reporting of Covenant
 - c. Condition Module: Registration, Approval, Monitoring, and Reporting of Conditions
 - d. KYC Module: Registration, Approval, Monitoring, and Reporting of KYC
 - e. Compliance Checklist: Registration, Approval, Monitoring, and Reporting of Compliance
- 4) Refreshment of Firewall and Proxy.

FOCUS PLAN OF IT DEVELOPMENT IN 2022

IT Development focus in 2022 are as follows:

- 1) Improvement in IT Security implementation in system and technology;
- 2) Review, enhancement and development of system and technology to support business process efficiency and effectivity;
- 3) Refine IT's governance by revisiting IT Policy and Standard Operating Procedure.

There are several other initiatives as well such as improvement in IT Service Management, and redefining IT functional roles as well as reviewing existing Lean IT concept for IT Organization until the next 3 years.

SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA

Goods and Services Procurement Systems and Procedures

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan berpedoman pada aturan tata kelola dan prosedur internal yang berlaku.

The Company's Goods and Services Procurement activities are conducted transparently and can be accounted for by referring to the applicable governance rules and internal procedures.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG & JASA

Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa di Perseroan diatur dalam Kebijakan Pengadaan dan Prosedur Operasi Standar yang ditinjau secara berkala, dengan *update* terakhir masing-masing tertanggal 15 Januari 2020 dan 31 Januari 2021. Kegiatan ini juga didukung oleh implementasi pengendalian yang kuat, dan keberadaan karyawan yang berpengetahuan luas serta sistem yang kokoh untuk memastikan berjalannya proses yang efektif, efisien, dan transparan.

Kebijakan Pengadaan dan Prosedur Operasi Standar mencakup aspek-aspek utama, antara lain sebagai berikut:

1. Tata kelola
2. Prinsip Panduan
3. Eksekusi
4. Sistem

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PENGADAAN BARANG & JASA

Departemen Pengadaan berada di bawah Direktorat Keuangan. Departemen ini terdiri dari Kepala Bagian Pengadaan, Pejabat Pengadaan dan Staf Tata Usaha. Secara struktural, Kepala Departemen Pengadaan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Operasi dan TI, untuk kemudian dilaporkan kepada Chief Finance Officer.

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur penanggung jawab pengadaan IIF yang berlaku per 31 Desember 2021:

PROCUREMENT OF GOODS & SERVICES POLICY

The Procurement activities for Goods and Services within the Company is governed by the Procurement Policy and the Standard Operating Procedure which are regularly reviewed, and the current ones dated 15 January 2020 and 31 January 2021 respectively. This is also supported by a strong control, and supported by knowledgeable staffs as well as a robust system to ensure effective, efficient, and transparent processes.

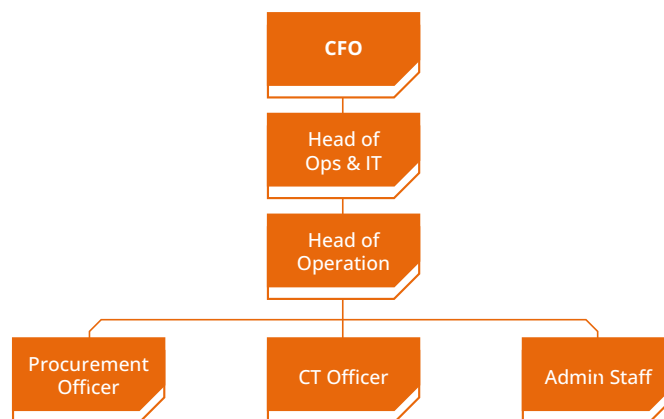
The Procurement Policy and Standard Operating Procedure cover the following main aspects:

1. Governance
2. Guiding Principles
3. Execution
4. System

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF GOODS & SERVICES PROCUREMENT MANAGEMENT

Procurement Department is placed under Finance Directorate. The Department consists of Head of Procurement, Procurement Officer and Administration Staff. The Head of Procurement Department reports to Head of Operations and IT Division, who reports eventually to Chief Finance Officer.

The following chart describes the IIF procurement managing body in IIF's organizational structure until December 31, 2021:



PROFIL KEPALA OPERASI

Ilona Widiawati

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, berdomisili di Indonesia.

Riwayat Pendidikan:

Diploma Manajemen Bisnis dari Pitman College UK

Riwayat Karier:

Beliau bergabung di Perseroan pada bulan November 2012 sebagai Kepala Departemen Operasi, yang membawahi unit Operasi Kredit & Treasuri, serta unit Pengadaan. Beliau mengawali kariernya sebagai Sekretaris Eksekutif pada tahun 1995, yang juga bertanggung jawab atas pengadaan dan majemen kantor. Pada tahun 2005, beliau bergabung dengan ABN AMRO Bank (yang kemudian diambil alih oleh RBS) sebagai staf bagian Portofolio Kredit, dan kemudian sebagai staf Administrasi Kredit/Pinjaman. Beliau memiliki pengalaman di bidang Operasi dan Administrasi Kredit yang luas, dan juga di bagian Pengadaan.

PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG & JASA

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan berpedoman pada aturan tata kelola tertentu yang sudah disepakati dan dituangkan dalam Kebijakan dan/atau Prosedur Operasi Standar. Poin-poin penting dalam tata kelola pengadaan adalah sebagai berikut:

Filosofi Pengadaan

Visi Pengadaan Perseroan adalah "Memastikan bahwa proses Pengadaan mendukung pencapaian Strategi Pengadaan dan Rencana Pengadaan Tahunan" yang dilakukan dengan cara:

- (i) Meningkatkan efisiensi dan pengendalian kegiatan pengadaan yang mensyaratkan beberapa aspek sebagai berikut:
 - Vendor yang kompeten dan bereputasi baik
 - Standardisasi (prosedur, bahan, dll)
 - *Best value for money*
 - Koordinasi internal yang baik
 - Sistem yang stabil didukung oleh otomatisasi
- (ii) Mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan (termasuk pemberdayaan masyarakat) yang membutuhkan prioritas pengadaan barang-barang Kesehatan, Keselamatan, dan Ramah Lingkungan.

Pakta Integritas

Perseroan mewajibkan penandatanganan Pakta Integritas. Yaitu berupa surat pernyataan dan/atau dalam bentuk lain yang dapat diterima, yang harus ditandatangani oleh anggota Panitia Lelang, Fungsi Pengadaan, Pengguna dan Vendor terpilih yang berisi pernyataan untuk mencegah dan tidak melakukan praktik korupsi, penipian, kolusi, atau pemaksaan dalam melakukan proses pengadaan.

Prinsip-Prinsip Panduan

a. Transparansi

Prinsip utama yang harus dipegang teguh adalah transparansi proses pengadaan. Proses pengadaan yang transparan dirinci dengan baik dan dipastikan dapat memilih operator/pemasok yang memenuhi persyaratan.

PROFILE OF THE HEAD OF OPERATIONS DEPARTMENT

Ilona Widiawati

Indonesian citizen, 50 years old, domiciled in Indonesia.

Educational Background:

Diploma Business Management from Pitman College UK

Career History:

She joined to the Company in November 2012 as Head of Operations Department who is responsible for Credit & Treasury Operation and Procurement. She started her career as Executive Secretary in 1995, and responsible also for the company purchasing activities and office management. In 2005, she became credit portfolio staff and later as credit administration/loan staff in ABN AMRO Bank (later became RBS) until she decided to join IIF in 2012. She has extensive experience in Credit Administration and Operation, as well as in Procurement.

PRINCIPLES OF PROCUREMENT OF GOODS & SERVICES

In conducting all procurement activities for Goods and Services, the Company follows certain governance as agreed in the Policy and/or Standard Operating Procedure. Important points in the governance for procurement is the following aspect:

Procurement Philosophy

Procurement's Vision of the Company is "To ensure Procurement process support the achievement of Procurement Strategy and Annual Procurement Plan" which is carried out through:

- (i) Increasing the efficiency and control of procurement activity which requires some aspects as follow:
 - Competent and reputable vendor
 - Standardization (procedures, materials, etc)
 - Best value for money
 - Good internal coordination
 - Stable system supported by automation
- (ii) Considering the sustainability of environments (incl. community development) which requires preference to Health, Safety, and Environmentally friendly procurement items.

Integrity Pact

The Company enforces the mandatory of signing an Integrity Pact. It is a declaration letter and/or in other acceptable form, which must be signed by the members of Tender Committee, Procurement function, User and selected Vendor containing declaration to prevent and not to be engaged in corrupt, fraudulent, collusive, or coercive practices in conducting procurement process.

Guiding Principles

a. Transparency

The fundamental principle that needs to be adhered to is the transparency of the process of procurement. Transparent procurement process is well detailed and ensures that it facilitates the choice of a qualified operator/supplier.

b. Efektivitas

Proses pengadaan yang efektif harus dapat memastikan bahwa barang atau jasa yang dipesan sudah benar dan memenuhi kriteria yang terbaik.

c. Efisiensi

Efisiensi biaya dan waktu harus mengacu pada total biaya yang mencakup biaya barang/jasa, pemasangan, pengiriman, biaya pemeliharaan purna jual, dll.

d. Value for Money

Produk atau jasa yang didapatkan Perseroan haruslah yang paling sesuai baik dari sisi operasional, evaluasi proyek dan kualitas serta menawarkan harga yang kompetitif dan *value for money*.

PROSES PENGADAAN BARANG & JASA

Detail pelaksanaan proses pengadaan telah diatur dalam Prosedur Operasi Standar termasuk juga karyawan yang bertanggung jawab atas proses tersebut. Secara ringkas, berikut ini adalah proses pengadaan dari level tertinggi, yaitu:

- a. Permintaan Pengadaan diterima dan di-review oleh *Procurement Officer* dan *Head of Procurement* dan/atau *Head of Operations & IT* melalui *Procurement System (BR System)*. Pengajuan tersebut harus menyertakan metode seleksi yang dipilih dan vendor yang direkomendasikan, serta sudah disetujui oleh Kepala Departemen dari *user*;
- b. Tim Pengadaan memproses pengajuan berdasarkan metode yang disepakati. Metode seleksi yang disepakati Perseroan, antara lain:
 - Penunjukan Langsung
 - Penawaran harga
 - Tender Terbatas
- c. Setelah proses seleksi selesai, Tim Pengadaan, dengan persetujuan dari *Head of Operations & IT*, merekomendasikan pemenang kepada Delegasi Kewenangan (“DoA”) untuk disetujui di dalam *Procurement System (BR System)*. Rekomendasi tersebut dalam hal penetapan harga dan lingkup pekerjaan;
- d. Atas persetujuan DoA melalui *Procurement system (BR System)*, Tim Pengadaan memproses Surat Penunjukan yang sudah di-review dan ditandatangani oleh *Head of Operations* dan *IT*, dan dilanjutkan dengan paraf Kontrak oleh *Head of Operations* dan *IT* serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Perseroan;
- e. Pengiriman Barang dan/atau Jasa serta Pembayaran dipantau oleh Tim Pengadaan melalui *Procurement system (BR System)*.

Sementara itu, negosiasi untuk hal-hal yang bersifat komersial dilakukan oleh Tim Pengadaan guna mendapatkan Barang dan/atau Jasa dengan kualitas dan harga terbaik.

Dokumentasi legal yang digunakan dalam Kegiatan Pengadaan sebagian besar merupakan standar yang telah di-review dan disetujui oleh *Corporate Legal* Perseroan. Setiap perbedaan yang ditemui pada dokumentasi standar harus diklarifikasi oleh *Corporate Legal* Perseroan.

b. Effectiveness

An effective procurement process must ensure the correct goods or services is ordered and the best terms is obtained.

c. Efficiency

Cost and time efficiency should refer to total cost starting from the product/service cost, installation, delivery, after sales maintenance cost, etc. against the time.

d. Value for Money

Product or solution adopted by the Company should be the most suitable from operational, project evaluation and quality aspect as well as provides a competitive price and value for money.

GOODS & SERVICES PROCUREMENT PROCESS

The detail execution of procurement process is laid out in the Standard Operating Procedure including the accountable/responsible staff for the process. In summary, the high-level process is as follows:

- a. Procurement Request is received and reviewed by *Procurement Officer* and *Head of Procurement* and/or *Head of Operations & IT*, in the *Procurement System (BR System)*. Request must include the preferred selection method and recommended vendors, and be approved by *Head of the User’s Department*;
- b. Procurement team process the Request based on the agreed-on method. The agreed selection method of the Company:
 - Direct Appointment
 - Price Quotation
 - Limited Tender
- c. After selection process is completed, Procurement team, with concurrence from *Head of Operations & IT*, recommends the winner to the *Delegation of Authority (“DoA”)* for their approval through *Procurement System (BR System)*. The recommendation includes the pricing and scope of work;
- d. Upon approval the *Delegation of Authority* through *Procurement system (BR System)*, Procurement team process the *Appointment Letter* which is reviewed and signed by *Head of Operations* and *IT*, and followed by *Contract* which is initialed by *Head of Operations* and *IT* and signed the authorized person of the Company;
- e. Delivery of Goods and/or Services and the Payment is monitored by Procurement team through *Procurement system (BR System)*.

Negotiation on the commercial terms are conducted by Procurement team to reach the best value for money of the Goods and/or Services procured.

Legal documentation used in the Procurement activities are mostly standard which have been reviewed and approved by *Corporate Legal* of the Company. Any discrepancy for the standard documentation must be cleared by *Corporate Legal* of the Company.

Barang dan/atau Jasa dikirimkan kepada Pengguna (Pemohon), akan tetapi faktur pengiriman hanya diberikan kepada Tim Pengadaan untuk diperiksa dan mendapatkan izin pembayaran.

Sebagian besar Kegiatan Pengadaan mulai dari tahap Pengajuan hingga Pembayaran dilakukan melalui *Procurement System (BR System)*. Hal ini bertujuan untuk sebagaimana dijelaskan pada poin-poin berikut namun tidak terbatas pada:

- Pengendalian anggaran atas anggaran yang sudah dialokasikan;
- Kontrol persetujuan sesuai dengan DoA yang disetujui;
- Pemantauan untuk semua Kegiatan Pengadaan (Anggaran, Status, Faktur, dll);
- Pelacakan Status dan SLA.

Sistem ini dikembangkan secara internal oleh Departemen TI Perseroan, serta secara berkala ditinjau dan disempurnakan agar dapat memenuhi standar efisiensi dan kontrol proses yang lebih baik. Pada tahun 2022, target perbaikan *Procurement System (BR System)* meliputi namun tidak terbatas pada pengelolaan vendor, perluasan pengelolaan anggaran, dan otomatisasi dokumen pengadaan.

REALISASI PENGADAAN BARANG & JASA TAHUN 2021

Pada tahun 2021, 95% kegiatan pengadaan yang berlangsung di IIF adalah pengadaan jasa, sedangkan 5% sisanya adalah pengadaan barang. Total transaksi pengadaan yang sudah diselesaikan hingga akhir 2021 adalah sebanyak 94 pekerjaan, dan 57 perikatan vendor dengan perkiraan total nilai kontrak lebih dari Rp27,6 miliar. Daftar transaksi di atas Rp1 miliar lebih rinci disajikan pada tabel di bawah ini:

Nama Pekerjaan Project Name	Jenis Vendor Type of Vendor	Kategori Category	Nilai Kontrak Total Contract (Rp)
Asuransi Kesehatan Karyawan 2021 – 2022 Employee Health Insurance 2021 - 2022	Asuransi Kesehatan Health Insurance	Jasa Services	1.088.863.600
Pemilihan Vendor <i>Cloud Data Center</i> Cloud Data Center Vendor Selection	IT Vendor	Jasa Services	3.162.401.880
Auditor Independen untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan dan layanan AUP (<i>Agreed Upon Procedures</i>) sehubungan dengan Laporan Evaluasi Kinerja (PER) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Independent Auditor for the Audit of the Company's Financial Statement and Agreed Upon Procedures (AUP) services with respect to the Performance Evaluation Report (PER) for the year ended 31 December 2021	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Jasa Services	1.236.900.000
Konsultan Pihak Ketiga untuk Peningkatan Modal dan Pembentukan Dana Pengelolaan Aset Infrastruktur Third Party Consultant for Capital Raise and Establishment Infrastructure Asset Management Fund	Lain-Lain Others	Jasa Services	2.140.350.750
<i>Executive Head Hunter</i>	<i>Head Hunter</i>	Jasa Services	1.210.000.000

Pengadaan jasa didominasi oleh kebutuhan konsultasi, seperti Konsultan Keuangan, Konsultan SDM, Konsultan Pajak, Konsultan S&E, Konsultan Hukum, Valuator, Asuransi Kesehatan, Pialang Asuransi, Auditor, Penyedia Jaringan, Lisensi, Proyek Relokasi Data Center, Migrasi *Database* VR, dll. Dengan mempertimbangkan lingkup proyek yang dikerjakan, kami juga dapat melibatkan konsultan lokal atau asing, baik institusional maupun individu.

Delivery of the Goods and/or Services are accepted by the User (Requester), but the invoice for the delivery is sent only to Procurement for checking and clearance for payment.

Most of the Procurement activities starting from Request until Invoicing are done in the Procurement System (BR System). It is developed for the purpose of the following points but not limited to:

- Budget control on the allocated budget;
- Approval control according to the approved Delegation of Authority;
- Monitoring for all Procurement activities (Budget, Status, Invoice, etc);
- Status and SLA Tracking.

It is internally developed by IT Department of the Company, and it is regularly reviewed and improved to cater more process efficiency and control. In 2022 target improvement of the Procurement system (BR System) includes but not limited to the vendor management, expanded budget management and automation of procurement documents.

REALIZATION OF PROCUREMENT OF GOODS & SERVICES IN 2021

In 2021, 95% of the procurement activities covers a procurement of services, while the remaining 5% covers a procurement of goods. The total Procurement transaction completed is 94, and 57 vendor engagement with contract value more than Rp27.6 billion. A more detailed list of transaction above Rp1 billion is presented in the below table:

The Procurement for services consisted mainly for consultancy purposes, such as Financial consultant, HR consultant, Tax consultant, S&E consultant, Legal consultant, Valuator, Health Insurance, Insurance Broker, Auditor, Network Provider, License, Data Centre Relocation project, VR Database Migration, etc. Depending on the project, we may engage local or foreign consultant, as well as institutional or individual consultant.

Per 31 Desember 2021, IIF telah menyelesaikan 87 transaksi pengadaan dengan perkiraan total nilai kontrak lebih dari Rp26,3 miliar.

Dari sisi belanja barang modal, jumlah pengadaan barang untuk tahun 2021 didominasi oleh belanja modal TI, *Procurement System Peripherals, Server, dan IT Peripheral*. Sebagian besar item belanja modal tersebut diambil dari vendor lokal. Perseroan mencatatkan 7 transaksi pengadaan barang sepanjang tahun 2021 dengan perkiraan total nilai kontrak sebesar Rp1,35 miliar.

Proses pengadaan dilakukan dengan metode Tender Terbatas atau Penawaran Harga atau Penunjukkan Langsung. Untuk penggunaan jasa yang sifatnya berkelanjutan biasanya dapat dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung, sedangkan untuk barang/jasa umum menggunakan metode Penawaran Harga. Selain itu, kami juga biasa menggunakan Tender Terbatas.

Untuk tujuan efisiensi proses, Perseroan sudah memiliki beberapa Daftar Pilihan vendor. Daftar ini dikelola dengan memilih beberapa vendor berdasarkan penilaian administratif serta penilaian teknis yang mencakup namun tidak terbatas pada pengalaman organisasi, penghargaan, serta keahlian individu. Daftar tersebut disetujui oleh Direksi dan ditinjau setiap 2 tahun sekali. Saat ini, Perseroan sudah memiliki Daftar Pilihan untuk Firma Hukum, Konsultan S&E, Konsultan SDM, Konsultan IT, Operasional GA & IT, Komunikasi Perseroan.

We have completed 87 procurement transactions with contract value more than Rp26.3 billion.

On the capital goods spending, the procurement for 2021 consisted mainly on IT CAPEX, Procurement System Peripherals, Server, and IT Peripheral. Most of capital expenditure items are sourced from local vendors. Total transactions for goods procurement are 7 with a total contract value of Rp1.35 billion.

Procurement processes were done either by way of Limited Tender or Price Quotation or Direct Contracting. Continuation of services were mostly procured by way of Direct Contracting, while for generic goods/services, Price Quotation is used. Other than that, Limited Tender is used.

For process efficiency purpose, the company maintains several Preferred Lists of Vendor. The List is developed by shortlisting several vendors based on an administrative assessment as well as technical assessment which includes but not limited to organization experience, awards as well as its individual expertise. The List is approved by the Board of Director, and reviewed every 2 years. Currently we have Preferred List for Law Firm, S&E Consultant, HR Consultant, IT Consultant, GA & IT Operational, Corporate Communication.

05

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion & Analysis

Tinjauan Ekonomi Review of The Economy	108	Program Kepemilikan Saham Karyawan atau Manajemen (ESOP/MSOP) Employee Or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)	134
Tinjauan Industri Pembiayaan Infrastruktur Infrastructure Financing Industry Overview	110	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Use Of Public Offering Proceeds	134
Tinjauan Bisnis Business Review	111	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Afiliasi Material Information On Transaction That Contains Conflict Of Interest And/Or Affiliated Transaction	135
Tinjauan Keuangan Financial Review	121	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, And Debt/Capital Restructuring	135
Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang Ability To Pay Debt and Receivable Collectibility	128	Pengaruh Perubahan Regulasi Pemerintah terhadap Perseroan The Impact Of Changes Of Government Regulation the Company	135
Struktur Modal Capital Structure	129	Perubahan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2021 Changes In Financial Accounting Standards 2021	136
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Expenditure	130	Ketaatan Sebagai Wajib Pajak Compliance As A Taxpayer	137
Investasi Barang Modal Tahun 2021 Capital Expenditure In 2021	130	Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Sustainability	137
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Facts and Material Information and Subsequent to Financial Statement Date	130		
Prospek Usaha Business Prospect	130		
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	133		
Kebijakan Dividen Dividend Policy	133		





TINJAUAN EKONOMI

Review of The Economy

Ekonomi Global

Tahun 2021, pemulihan ekonomi global terus berlanjut meskipun pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Katalis terbesar yang berhasil menggerakkan roda ekonomi dunia pada tahun ini adalah terlaksananya kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat luas yang berjalan cepat dan merata di berbagai negara.

Selain didorong oleh sentimen positif dari segi kesehatan, negara-negara maju dan sejumlah negara berkembang juga terlihat semakin berpengalaman dalam merespons tantangan pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan melalui perumusan kebijakan stimulus fiskal ataupun moneter yang tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mempercepat laju pemulihan ekonomi negaranya, Presiden Amerika Serikat (AS) - Joe Biden menyetujui Pembayaran Langsung Tunai sebesar USD1.400 untuk masing-masing warga negara AS atau USD2.800 untuk pasangan menikah, ditambah USD1.400 untuk setiap tanggungan. Paket bantuan ekonomi dalam jumlah fantastis ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menstimulus geliat ekonomi AS pasca-pandemi. Ditopang oleh respons kebijakan yang tepat, pada tahun 2021, perekonomian AS mampu membukukan pertumbuhan positif sebesar 5,7% (yoy), dibandingkan sebesar -3,4% (yoy) pada 2020.

Demikian halnya, Tiongkok juga melanjutkan fase pemulihan ekonomi dengan laju pertumbuhan tahun 2021 sebesar 8,1% (yoy). Sepanjang tahun ini, Tiongkok mengalami tantangan krisis energi, disrupsi pada rantai pasokan, dan krisis utang yang terjadi di sektor properti. Namun demikian, aktivitas ekspor Tiongkok tetap menunjukkan mode yang agresif didorong oleh permintaan global yang kuat seiring dengan dibukanya aktivitas ekonomi luar negeri.

Di sisi lain, tren pemulihan ekonomi Eropa terlihat lebih tinggi sehingga berperan besar dalam menahan perlambatan ekonomi global. Zona Euro menunjukkan sinyal pemulihan yang jelas dengan laju pertumbuhan diproyeksikan 5,2% (yoy) pada 2021. Selaras dengan *rebound* kinerja ekonomi tersebut, tingkat pengangguran di wilayah Euro menurun ke level 7,7%.

Mengacu pada rilis data indikator ekonomi di atas, dapat dilihat bahwa arah perekonomian negara-negara maju mulai menemui titik balik menuju fase pemulihan walaupun belum mencapai level normal sebelum pandemi. Namun demikian, tren pemulihan ekonomi global hingga penghujung 2021 tetap berada di jalur yang sesuai harapan karena terkompensasi dengan terkendalinya risiko ketidakpastian pada pasar keuangan global.

Global Economy

In 2021, the global economic recovery was moving on an upward trajectory despite the lingering COVID-19 pandemic. One biggest catalyst that had set the economic wheels back in motion this year was the rapid and even COVID-19 vaccine rollouts for the public in a majority of countries.

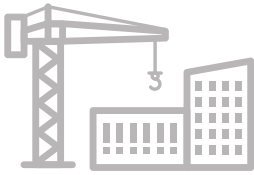
While positive sentiment towards improved public health is one driving factor, it is apparent that developed nations and a handful of developing countries had become more adaptive to the pandemic challenges. This is reflected in how effective their formulation of fiscal or monetary stimulus policies were at reigniting the economy.

To expedite economic recovery, the President of the United States (US), Joe Biden, approved the Economic Impact Payment of up to USD1,400 for individuals or USD2,800 for married couples, plus USD1,400 for each dependent. The US current administration has allocated this fantastic amount under its economic support package in order to increase the buying power of American households and stimulate growth in the US economy post-pandemic era. With such a very strong policy support in 2021, the economy of the US was able to deliver very positive growth of 5.7% (yoy), compared to -3.4% (yoy) in 2020.

Similarly, China has been able to keep its economic recovery phase with growth of 8.1% (yoy) in 2021 although the year saw the country battling through the numerous challenges of the energy crisis, supply chain disruption, and debt crisis in the property sector. Despite the headwinds, China's exports looked progressive, having benefited largely from strong global demand after countries slowly reopened borders to foreign economic activities.

The trend of economic recovery in Europe was developing at a higher rate as reflected in its bigger role in helping to impede the otherwise faster global economic slowdown. The Eurozone showed clear signs of recovery with a growth is projected of 5.2% (yoy) in 2021. In line with the economic recovery, the Europe unemployment rate decreased to 7.7%.

A deeper look into the above indicators suggests that the economic direction of developed nations had reached a turning point towards the recovery phase, although corresponding figures had not reached the pre-pandemic level. However, the global economic trend until the end of 2021 was essentially on the right track as major economies successfully managed the risk of uncertainty in global financial markets.



Di tengah beragam tantangan yang datang silih berganti, Perseroan berhasil menutup tahun 2021 dengan prestasi kinerja yang mengesankan melalui perolehan laba bersih sebesar Rp53,03 miliar tumbuh 24,7% (yoy) dari tahun sebelumnya.

Although recently faced with one global challenge after another, the Company managed to close 2021 with an impressive performance through net profit recorded at Rp53.03 billion, grew by 24.7% (yoy) from the previous year.

Ekonomi Nasional

Meski tantangan global datang silih berganti, akselerasi pemulihan ekonomi nasional tetap berlanjut sebagaimana tercermin dari realisasi pertumbuhan Indonesia tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7% (yoy), jauh membaik dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun lalu sebesar -2,0% (yoy). Membaiknya kinerja ekonomi domestik pada tahun ini didukung oleh aktivitas ekspor yang kuat serta diiringi dengan tingkat konsumsi dan investasi yang meningkat sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat.

Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia kembali melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai realisasi mencapai Rp658,6 triliun (per 3 Januari 2022) atau setara 88,4% dari pagu sebesar Rp744,77 triliun. Pada tahun ini, alokasi anggaran PEN masih berfokus pada realisasi anggaran kluster kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, dan dukungan usaha bagi UMKM.

Sementara dari sisi moneter, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day *Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 2,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,25%. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor makroekonomi, salah satunya urgensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi sepanjang 2021 adalah sebesar 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan inflasi tahun 2020 sebesar 1,68% (yoy). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh menguatnya daya beli masyarakat seiring dengan kenaikan permintaan pangan dan barang rumah tangga.

National Economy

Although recently faced with one global challenge after another, the economic recovery in Indonesia continued to accelerate as reflected in 3.7% growth (yoy) in 2021, a much better figure compared to last year's growth realization of -2.0% (yoy). The improved performance of the domestic economy was mainly supported by the high rate of exports as well as larger consumption and investment activities in line with the easing of restrictions on people's mobility.

In 2021, the Indonesian government continued its National Economic Recovery (PEN) program with a realized amount (as of January 3, 2022) reaching Rp658.6 trillion, or accounting for 88.4% of the overall 2021 PEN budget of Rp744.77 trillion. A greater portion of this figure was still earmarked to provide various incentives in the health sector social protection, business incentives, and support for the SME sector.

On the monetary side, Bank Indonesia decided to maintain its 7-Day *Reverse Repo Rate* (BI7DRR) at 3.50%, *Deposit Facility* interest rate at 2.75%, and *Lending Facility* interest rate at 4.25%. This decision was made after various economic factors e.g. the urgency to maintain a stable exchange rate and the national financial system to support economic growth, and other underlying factors were taken into account.

Based on data released by the Central Statistics Agency (BPS), the inflation rate throughout 2021 reached 1.87% (yoy), increasing from the previous year of 1.68% (yoy). This increase was affected by stronger purchasing power in line with increasing demand of food and household items.

TINJAUAN INDUSTRI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Infrastructure Financing Industry Overview

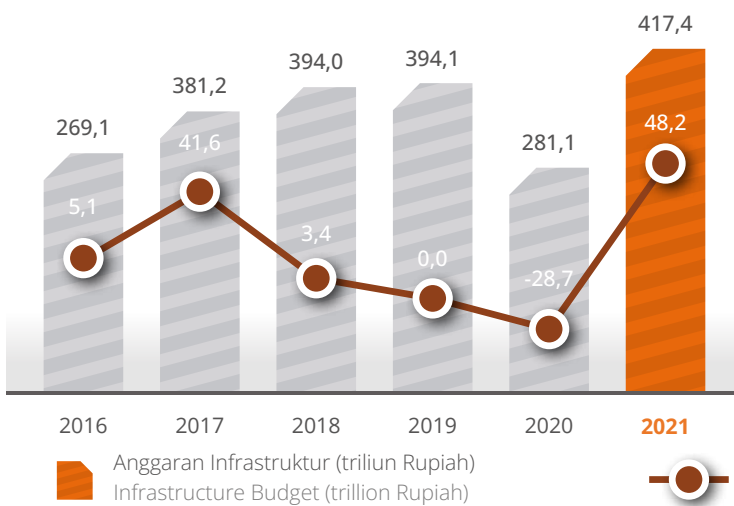
Tidak dapat dipungkiri, perkembangan pandemi COVID-19 telah mendorong berbagai risiko ketidakpastian yang berdampak cukup berat terhadap kinerja sektor infrastruktur. Pasalnya, alokasi dana APBN untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur sempat tertahan karena Pemerintah lebih berfokus pada upaya-upaya penanganan pandemi.

Namun demikian, pada tahun ini, Pemerintah bersikap lebih agresif dalam memberikan dukungan anggaran dana infrastruktur yang nilainya mencapai Rp417,8 triliun, terbesar dalam 6 (enam) tahun terakhir. Pemerintah menegaskan bahwa proyek pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan dan merata di semua wilayah akan terus dilakukan karena merupakan salah satu program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

It is undeniable that as the pandemic was playing out, it continued to pose more risks of uncertainty with quite severe impacts on the infrastructure sector. The state budget fund that was initially intended for infrastructure development projects was switched to pandemic-relief measures.

However, the government took a more aggressive approach to infrastructure this year by providing a total budget that reached Rp417.8 trillion, the largest in last six (6) years. The government also confirmed that it would continue the sustainable and equitable national infrastructure development projects across the country given the program's status as one of the nation's top priorities under President Joko Widodo's administration.

Grafik Pertumbuhan Anggaran Infrastruktur Indonesia
Indonesia Infrastructure Budget Growth Chart



Alokasi 2021 di Bidang Infrastruktur
2021 Allocations for Infrastructure Sector

Rp **417,4 T**

Pemerintah Pusat	Rp239,8 T
TKDD	Rp131,8 T
Pembiayaan	Rp 45,8 T

Sumber: Informasi APBN 2021, publikasi Kementerian Keuangan RI

Source: Information on the 2021 State Budget, publication of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia

Mengacu pada infografis di atas, terlihat bahwa pendanaan proyek infrastruktur tahun 2021 dengan nilai sekitar Rp45,8 triliun direncanakan akan diperoleh melalui jalur pembiayaan, di mana dari sejumlah porsi pembiayaan tersebut, IIF dapat menjalankan perannya sebagai katalisator percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

Referring to the infographic above, it can be seen that in 2021, a portion of infrastructure project fund in the amount of Rp45.8 trillion is planned to be obtained through financing channels, and IIF will provide a portion of the figure to play its role as a catalyst for accelerating national infrastructure development.

Rencana Realisasi Anggaran Infrastruktur Tahun 2021 Infrastructure Budget Realization Plan for 2021

Pelayanan Dasar Basic Services



Rumah Susun & Rumah Khusus
Flats and Special Houses

10.706 unit



Bendungan
Dam
53 unit
43 ongoing &
10 baru



Jaringan Irigasi
Irrigations
**Pembangunan 600 km &
Rehabilitasi 3.900 km**
Construction **600 km &
Rehabilitation 3,900 km**

Konektivitas Connectivity



Pembangunan Jalan
Road Construction

965.4 km



Jembatan
Bridge
26,9 km



Jalur KA
Railway
446,56 km'sp



Bandara
Airport
10 unit/lokasi

Energi dan Ketenagalistrikan Energy and Electricity



Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga
Natural Gas Network for Household

120,776 SR



PLTS Rooftop &
PLTS Cold Storage

11,8 MW

Agar seluruh target proyek infrastruktur nasional dapat terealisasi dengan optimal dan *gap* pembiayaan infrastruktur tidak melebar, maka Pemerintah secara aktif mengupayakan beberapa sumber alternatif pendanaan yang sudah populer digunakan, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran (PINA), dan *blended finance*.

Sepanjang tahun 2021, realisasi anggaran infrastruktur nasional berfokus pada penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pemukiman), peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen akan mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

In order to realize all of the targets of national infrastructure projects optimally and keep the infrastructure financing gap from further widening, the government was seeking popular fund alternative sources such as Government and Business Entity Cooperation (PPP), Non-Budget Infrastructure Financing (PINA), and blended finance.

Throughout 2021, the national infrastructure budget was earmarked to provide basic needs (water, sanitation, and housing), increase connectivity, and support economic recovery. The government's other commitment is to accelerate infrastructure development in 3T (Lagged, Leading, and Outermost) areas.

TINJAUAN BISNIS Business Review

Strategi Bisnis IIF Tahun 2021

Pandemi COVID-19 masih terus bergulir hingga akhir tahun 2021. Buktinya, pada awal paruh kedua tahun 2021, Pemerintah kembali menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai salah satu langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak penyebaran virus COVID-19 varian Delta. Situasi yang penuh dengan ketidakpastian tinggi seperti ini tentu sangat mengganggu iklim bisnis dan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri para investor.

IIF Business Strategy 2021

The COVID-19 catastrophe persisted until the end of 2021. In early second half of 2021, the Government reenacted the Policy for Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) as one of the anticipatory measures to minimize the impact of the spread of Delta variant of the virus. This murky cloud of uncertainty has caused disruption to business climate and affect the confidence level of investors.

Meskipun begitu, tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat di sepanjang tahun ini, setidaknya tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi triwulanan beberapa negara (termasuk Indonesia) yang berhasil membukukan pertumbuhan yang positif, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

Mempertimbangkan sejumlah faktor risiko dan momentum pemulihan ekonomi yang mulai terlihat di tahun 2021, maka IIF terpacu untuk menerapkan sejumlah inisiatif strategis utama yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan agar peran dan fungsi IIF sebagai katalisator pembangunan infrastruktur nasional tetap dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan strategi IIF pada tahun 2021 didasarkan pada keunggulan kompetitifnya, antara lain:

- Mandat IIF untuk mengembangkan sektor infrastruktur di Indonesia, yang didukung oleh hubungan yang kuat dengan Pemerintah Indonesia;
- Kemampuan untuk berfungsi sebagai *policy sounding board* dengan Pemerintah Indonesia;
- Dukungan kuat dari pemegang saham berperingkat AAA;
- Pengetahuan yang mendalam tentang aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG);
- Sumber modal yang terdiversifikasi dengan baik, termasuk dari pemegang saham, pinjaman, dan pasar modal;
- Portofolio proyek yang terdiversifikasi dengan baik dengan manajemen risiko dan nilai-nilai ESG yang kuat;
- Kebijakan keuangan yang cermat, *leverage* yang moderat, dan bisnis yang sangat *scalable*; dan
- Tim manajemen yang berpengalaman di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang beranggotakan figur terkemuka.

Didukung oleh keunggulan dan kekuatan di atas, maka strategi utama IIF untuk mempercepat dan meningkatkan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah mewujudkan bisnis yang berkelanjutan sambil terus meningkatkan kinerja keuangan. Strategi ini dapat terlaksana melalui empat faktor pendorong utama—Produk, Dukungan Bisnis, serta Fokus Sektorial serta Strategi Membangun Aset, dengan uraian sebagai berikut:

Produk

Dalam hal penguatan produk, strategi IIF sepanjang tahun 2021 berfokus pada:

- Perolehan kesepakatan yang bernilai tambah tinggi sambil terus mempromosikan peran IIF sebagai katalis dan *enabler* (melalui kesepakatan pembiayaan junior, Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan pembiayaan proyek);
- Mendorong pertumbuhan produk *non-funded*;
- Melalui bisnis *advisory*, IIF menyeimbangkan basis kliennya antara sektor publik dan sektor swasta; dan
- Secara aktif mencari peluang pendanaan yang menarik.

Dukungan Bisnis

Agar kegiatan operasional bisnis dan proses pencapaian target IIF dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka IIF berinvestasi secara bijak pada semua elemen pendukung bisnisnya. Sepanjang tahun 2021, IIF telah menerapkan sejumlah inisiatif dalam upaya mendukung keberlanjutan bisnisnya, antara lain:

Nevertheless, this year also saw signs of economic recovery, which at least were reflected in the quarterly economic growths in several countries (including Indonesia) which managed to deliver positive growth, even much better than the previous year.

Having rigorously weighed certain risk factors and given the economic recovery momentum in 2021, IIF was motivated to implement a number of need-based and key strategic initiatives that aim to the right target, which allowed IIF to exercise its role and function as a catalyst for national infrastructure development.

The implementation of IIF's strategy in 2021 was based on its competitive advantages, including:

- IIF's mandate to develop the infrastructure sector in Indonesia, supported by a strong relationship with the Government of Indonesia;
- IIF's Ability to function as a policy sounding board with the Government of Indonesia;
- The strong support it receives from AAA rated shareholders;
- IIF's In-depth knowledge of environmental, social, and governance (ESG) aspects;
- IIF's well-diversified sources of capital, including from shareholders, loans, and the capital market;
- IIF's well diversified project portfolio with strong risk management and ESG values;
- Prudent financial policies, moderate leverage, and highly scalable business; and
- Experienced management team under the supervision of the Board of Commissioners which comprise of prominent figures.

Supported by the above advantages and strengths, the strategy composed by IIF to accelerate and increase private participation in infrastructure development in Indonesia is to create a sustainable business that generates more financial performances as the business progresses. This strategy is implemented through four driving factors—Product, Business Support, and Sectorial Focus and Asset Building Strategy, with the following description:

Product

To strengthen its products, IIF's strategy throughout 2021 focused on:

- Securing high-value-added agreements while continuing to promote the role of IIF as a catalyst and enabler (eg: junior financing agreements, Public Private Partnership/"PPP" and project financing);
- Encouraging the growth of non-funded products;
- Through its advisory business, IIF balanced its client base between the public and private sectors; and
- Actively seeking for attractive funding opportunities.

Business Support

In order for IIF's business operations and target achievement processes to run smoothly, effectively and efficiently, IIF invests wisely in all its business supporting elements. Throughout 2021, IIF took a number of initiatives in an effort to support its business sustainability, including:

- a) Peningkatan implementasi manajemen risiko melalui penyempurnaan *early warning system*;
- b) Meningkatkan sinergi dan kerja sama antara *front office* dan unit-unit pendukung;
- c) Mengoptimalkan kegiatan operasional dan memberikan dukungan penuh kepada TI sebagai tulang punggung operasi bisnis; dan
- d) Menjaga efisiensi operasional melalui optimalisasi manajemen biaya secara aktif.

Fokus Sektoral

Dalam mengemban mandat khusus untuk mendanai sektor infrastruktur nasional, adapun fokus sektoral IIF di tahun 2021 antara lain:

- a) Diversifikasi eksposur pembiayaan ke sektor yang baru-baru ini diamanatkan (yaitu infrastruktur sosial, distribusi makanan, dan kawasan industri); dan
- b) Memfokuskan investasi pada sektor-sektor yang memberikan profitabilitas lebih baik.

Strategi Membangun Aset

Sementara itu, strategi membangun aset diwujudkan melalui upaya-upaya berikut ini:

- a) Menekankan pentingnya profitabilitas dalam membangun aset; dan
- b) Menjadi yang terdepan dalam hal penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan standar Sosial dan Lingkungan (S&E).

Social & Environmental (S&E)

Sebagai perusahaan swasta yang meletakkan komitmen penuh untuk selalu mengedepankan aspek sosial dan lingkungan dalam menyalurkan pembiayaan infrastruktur, IIF memastikan bahwa seluruh proyek yang dibiayainya memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Konsep pembangunan berkelanjutan diterapkan melalui mekanisme pembiayaan IIF yang terintegrasi dengan Prinsip S&E sebagai landasan dari setiap proses pengambilan keputusan investasi di IIF.

Berkaitan dengan hal tersebut, IIF telah mengembangkan sebuah Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (SEMS) yang dijadikan sebagai pedoman atau panduan kerja bagi Divisi S&E (SED). Panduan ini menjelaskan cara kerja SED untuk melakukan hal-hal ini di antaranya melakukan penilaian proyek yang terintegrasi untuk mengidentifikasi dampak, risiko, dan mitigasinya; serta melakukan upaya pengelolaan kinerja sosial & lingkungan sebuah proyek.

Didalam melakukan tanggung jawabnya tersebut SED mengacu pada standar S&E yang harus dipatuhi oleh semua klien. Standar S&E ini disebut 8 Prinsip S&E (SEP) IIF, yaitu:

- 1) Sistem Penilaian dan Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (SEMS);
- 2) Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja;
- 3) Pencegahan dan Pengurangan Polusi, dan Perubahan Iklim;
- 4) Kesehatan Masyarakat, Keselamatan, dan Keamanan;
- 5) Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela;
- 6) Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- 7) Masyarakat Adat;
- 8) Benda dan Warisan Budaya.

- a) Improving the implementation of risk management through improving the early warning system;
- b) Increasing synergy and cooperation between the front office and supporting units;
- c) Optimizing operational activities and providing full support to IT as the backbone of business operations; and
- d) Maintaining operational efficiency through optimization of active cost management.

Sectoral Focus

Having special mandate to finance the national infrastructure sector, IIF's sectoral focuses in 2021 included:

- a) Diversifying financing exposure to recently mandated sectors (ie social infrastructure, food distribution, and industrial estates); and
- b) Focusing on sectoral investments that would provide better profitability.

Asset Building Strategy

Meanwhile, the asset building strategy was realized through the following efforts:

- a) Emphasizing the importance of profitability in building assets; and
- b) Leading the charge in financing distribution in accordance with Social and Environmental (S&E) standards.

Social & Environmental (S&E) [S&E]

As a private company that places its priority on social and environmental aspects in operating infrastructure financing business, IIF ensures that all the projects it finances must have positive and sustainable impacts on the surrounding environment. The sustainable development concept is manifested in IIF's financing mechanism which is integrated with S&E Principles as the basis of every decision-making process in making investments.

To realize the idea, IIF has developed a Social and Environmental Management System (SEMS) as work guidelines and reference for the SED Division. The guidelines explain how the SED works to assess integrated projects in order to identify their possible impacts, inherent and potential risks, and run an effective social & environmental management of the projects.

In discharging its responsibilities, SED shall refer to the S&E standards that must be met by all clients. The S&E standards are referred to as 8 S&E principles:

- 1) Social and Environmental Assessment and Management System
- 2) Labor and Working Conditions;
- 3) Prevention and Reduction of Pollution, and Climate Change;
- 4) Public Health, Safety, and Security;
- 5) Land Acquisition and Involuntary Resettlement;
- 6) Biodiversity Conservation and Natural Resources Management;
- 7) Indigenous Peoples;
- 8) Cultural Objects and Heritage.

Delapan Prinsip S&E IIF IIF's Eight S&E Principles

No.	Prinsip-prinsip S&E	Sasaran	Target
1.	Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (SEMS) Social and Environmental Management System (SEMS)	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan dampak S&E pada masing-masing proyek. Mengadopsi hierarki mitigasi dalam rangka mengantisipasi dan menghindari, atau jika tidak mungkin menghindari, maka meminimalisir, dan jika dampak residual tetap ada, maka kami memberikan kompensasi/ganti rugi atas risiko dan dampak yang dirasakan pekerja, Masyarakat Terdampak Proyek (PAP), dan lingkungan. Mengedepankan peningkatan kinerja S&E klien melalui penerapan sistem pengelolaan yang efektif. Memastikan bahwa keluhan yang disampaikan oleh PAP dan komunikasi eksternal dari pemangku kepentingan lainnya ditanggapi dan dikelola dengan tepat. Mengedepankan penyediaan sarana atau media yang memadai untuk mendorong keterlibatan PAP pada seluruh tahapan proyek terutama untuk mengkomunikasikan isu-isu yang berpotensi mempengaruhi mereka. Memastikan bahwa informasi mengenai aspek S&E yang relevan sudah diungkapkan dan disebarluaskan. 	<ul style="list-style-type: none"> Identify and evaluate project S&E risks and impacts. Adopt a mitigation hierarchy in anticipating and avoiding, or if such is not possible, minimize, and if residual impacts persist, and therefore we give compensation for risks and impacts on workers, Project Affected Communities (PAP), and the environment. Prioritize improving client S&E performance through the implementation of an effective management system. Ensure that complaints from PAP and external communications from other stakeholders are responded to and managed appropriately. Prioritize providing the means for adequate engagement with PAPs throughout the project cycle particularly by informing issues that could potentially affect them. Ensure that relevant S&E information is disclosed and disseminated.
2.	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja Labor and Working Conditions	<ul style="list-style-type: none"> Mengedepankan perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi, dan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja. Membangun, menjaga, dan meningkatkan hubungan antara pekerja dengan manajemen perusahaan. Mematuhi hukum ketenagakerjaan dan perburuhan nasional. Melindungi pekerja, termasuk kategori pekerja rentan seperti anak-anak, pekerja migran, pekerja yang dipekerjakan pihak ketiga, dan pekerja dalam rantai pasokan klien. Mengedepankan kondisi kerja yang aman dan sehat, dan memperhatikan kesehatan pekerja. Menghindari kerja paksa. 	<ul style="list-style-type: none"> Put forward fair treatment, without discrimination, and equal opportunities for all workers. Build, maintain, and improve relations between workers and management of the companies. Comply with national employment and labor laws. Protect workers, including vulnerable categories of workers such as children, migrant workers, workers employed by third parties, and workers in the client's supply chain. Put forward safe and healthy working conditions, and pay attention to the health of workers. Avoid forced labor.
3.	Pencegahan dan Pengurangan Polusi, dan Perubahan Iklim Pollution Prevention and Reduction, and Climate change	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari atau meminimalisir dampak negatif yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan akibat polusi dari kegiatan proyek. Mengedepankan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, termasuk penggunaan energi dan air. Mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terkait proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> Avoid or minimize negative impacts on public health and the environment due to pollution from project activities. Put forward the sustainable use of resources, including the use of energy and water. Reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions in project areas.
4.	Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Keamanan Public health, Safety and Security	<ul style="list-style-type: none"> Berupaya untuk menghindari atau meminimalisir risiko dan dampak negatif yang membahayakan kesehatan dan keselamatan PAP selama siklus proyek berlangsung baik dari kondisi rutin maupun non-rutin. Memastikan bahwa perlindungan personil dan properti dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi yang sesuai dan dengan cara menghindari atau meminimalisir risiko terhadap PAP. 	<ul style="list-style-type: none"> Strive to avoid or minimize negative and hazardous risks and impacts on the health and safety of PAPs during the project cycle, both routine and non-routine conditions. Ensure that the protection of personnel and property is carried out in accordance with appropriate human rights principles and in a manner that avoids or minimizes risks to PAPs.
5.	Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela Land Procurement and Involuntary Resettlement	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari, dan ketika tidak mungkin menghindari, maka meminimalisir perpindahan dengan mengusulkan desain proyek alternatif. Menghindari pengusiran secara paksa. Mengantisipasi dan menghindari, dan apabila tidak mungkin menghindari, maka meminimalisir dampak-dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dari proses pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan tersebut, yaitu dengan (i) memberikan kompensasi atas kehilangan aset dengan biaya penggantian dan (ii) memastikan bahwa kegiatan permukiman kembali dilakukan, dengan pengungkapan informasi, konsultasi, dan partisipasi yang tepat kepada masyarakat yang terdampak. Meningkatkan atau memulihkan mata pencaharian dan standar hidup masyarakat terdampak. Meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat terdampak secara fisik, melalui penyediaan perumahan yang memadai dengan jaminan kepemilikan di lokasi-lokasi pemukiman Kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> Avoid, and when avoidance is not possible, minimize displacement by proposing alternative project designs. Avoid forced evictions. Anticipate and avoid, and if it is not possible to avoid, minimize the adverse social and economic impacts of the land acquisition process or land use restrictions, by (i) compensating for lost assets at replacement cost and (ii) ensuring that activities resettlement is implemented, with appropriate disclosure of information, consultation and participation to affected communities. Improve or restore livelihoods and living standards of displaced communities. Improve the living conditions of physically displaced people, through the provision of adequate housing with guaranteed ownership in resettlement locations.
6.	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam Conservation Biodiversity and Natural Resource Management	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati. Menjaga pemanfaatan ekosistem yang ada. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan dengan mengadopsi praktik yang mempertimbangkan kebutuhan keberlanjutan dan prioritas pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Protect and conserve biodiversity. Best use the existing ecosystem. Improve sustainable management of living natural resources through the adoption of practices that combine sustainability needs and development priorities.

No.	Prinsip-prinsip S&E	Sasaran	Target
7.	Masyarakat Adat Indigenous people	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa proses pengembangan dapat menumbuhkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, budaya, dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam dari Masyarakat Adat. Mengantisipasi dan menghindari dampak negatif proyek terhadap Masyarakat Adat, atau jika tidak mungkin menghindari, maka meminimalisir dan/atau memberikan kompensasi/ganti rugi atas dampak-dampak buruk yang ditimbulkan tersebut. Meningkatkan pemberian manfaat dan peluang dari pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat sesuai dengan tata cara dan adat istiadat budaya setempat. Memastikan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) pada Masyarakat Adat yang terdampak proyek seperti yang dijelaskan dalam Prinsip ini sudah dilakukan. Menghormati dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik-praktik yang dimiliki Masyarakat Adat. 	<ul style="list-style-type: none"> Ensure that the development process fosters respect for the human rights, dignity, aspirations, culture and natural resource-based livelihoods of Indigenous Peoples. Anticipate and avoid the project's negative impacts on Indigenous Peoples, or if it is not possible to avoid, then minimizing and/or compensating for these adverse impacts. Increase the benefits and opportunities of sustainable development for Indigenous Peoples in a culturally appropriate manner. Ensure that the Free, Prior and Informed Consent (FPIC) of the Project-affected Indigenous Peoples as described in this Principle is carried out. Respect and preserve the culture, knowledge and practices of Indigenous Peoples.
8.	Benda dan Warisan Budaya Cultural Objects and Heritage	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi dan melestarikan warisan budaya dari dampak negatif yang timbul dari kegiatan proyek. Meningkatkan pemberian manfaat yang adil dari penggunaan warisan budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Protect and preserve cultural heritage from the negative impacts of project activities Improve the equitable sharing of benefits from the use of cultural heritage.

TINJAUAN OPERASIONAL BERDASARKAN SEGMENT USAHA

Produk Investasi

Fokus dan Strategi di Tahun 2021

Pada tahun 2021, Perseroan memulai strategi bisnis yang berfokus pada pembiayaan proyek-proyek bernilai tambah tinggi dan peningkatan produk-produk *non-funded* serta mempromosikan peran IIF sebagai katalis dan *enabler* dalam pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan.

Mengingat sifat bisnis IIF yang unik dalam menerima mandat dari pemegang saham untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan infrastruktur, maka sepanjang tahun ini IIF tetap percaya diri memberikan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur nasional, tentunya dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian pada seluruh tahapan prosesnya.

Kemudian sebagai salah satu upaya mitigasi dalam menjaga kualitas pembiayaan yang sudah disalurkan, IIF juga melakukan kegiatan *close monitoring* berkala khususnya bagi klien atau portofolio yang kinerjanya terdampak langsung oleh pandemi COVID-19.

Di tahun 2021, Perseroan mulai mengembangkan beberapa inisiatif strategi baru dalam rangka memperkuat struktur pendapatan dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya, salah satunya dengan meningkatkan strategi *fee-based income*.

Sementara dari sisi produk investasi, Perseroan meluncurkan beberapa produk baru sebagai bentuk respons dalam menjawab tantangan pendanaan infrastruktur nasional. Berkolaborasi dengan bank-bank terkemuka, IIF sebagai institusi non-bank dapat menawarkan produk L/C ataupun Bank Garansi untuk memastikan dapat terlaksananya penyaluran pembiayaan infrastruktur yang lebih efektif. Selain itu, Perseroan juga menawarkan produk *takeout financing* kepada para klien yang membutuhkan fasilitas pembiayaan infrastruktur untuk periode jangka panjang.

REVIEW OF OPERATIONS BY BUSINESS SEGMENT

Investment Products

Focus and Strategy in 2021

In 2021, the Company initiated the business strategy which focuses on financing high value-added projects and increasing non-funded products whilst also promoting IIF's role as a catalyst and enabler in sustainable infrastructure financing.

Considering the specific mandate given by the shareholders to the Company to provide financing facilities to the infrastructure sector, IIF realized the mandate with full confidence in a year rife with unprecedented challenges as 2021, and without ever overlooking the precautionary principle throughout the entire financing process.

As one of the mitigation efforts in maintaining the quality of financing to its existing portfolio, IIF periodically conducted close monitoring activities, especially for clients or portfolios whose performance was severely affected by the pandemic.

This year, the Company began to develop several new strategic initiatives in order to strengthen revenue structure and improve its competitive edges by e.g. enhancing a fee-based income strategy.

The Company has also launched several new products this year in response to the challenge of funding the nation's infrastructure development. Collaborating with prominent banks, IIF as a non-bank institution offered L/C or Bank Guarantees product to ensure it can run a more effective infrastructure financing distribution. The Company is also offering takeout financing products to clients who need longer-term infrastructure financing facilities.

Selain meluncurkan produk-produk investasi yang inovatif, Perseroan juga terus memperkuat kerja sama dengan institusi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta aktif mempromosikan keunggulan kompetitif dan terlibat di dalam komunitas Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan MASTEL.

Di tengah situasi pandemi yang tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir, Perseroan tetap optimis dapat meraih pertumbuhan yang positif di tahun-tahun mendatang mengingat gencarnya dukungan Pemerintah terhadap program pembangunan infrastruktur nasional.

Struktur Pengelola dan Penanggung Jawab

Perseroan memiliki Direktorat Investasi yang bertanggung jawab dalam hal perolehan kesepakatan atau komitmen keuangan dari klien baru, meningkatkan volume komitmen pembiayaan dengan eksisting klien dan memantau kinerja kualitas kredit para klien.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direktorat Investasi memiliki 2 (dua) orang Direktur Pelaksana & CIO, serta berkoordinasi dengan Komite Investasi - Dewan Komisaris & Komite Investasi - Direksi.

Agar segmen produk investasi dapat bekerja secara optimal dan mampu mencapai target yang diharapkan, maka dalam kesehariannya Direktorat Investasi dibantu oleh 5 (lima) divisi yang masing-masing mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Divisi Business Development

- Meraih kesepakatan pembiayaan dan investasi;
- Mengakuisisi klien; dan
- Memantau kemajuan proyek hingga Tanggal Operasi Komersial (COD).

2. Divisi Project Supervision

- Memastikan proyek yang dibiayai IIF memenuhi persyaratan yang telah disepakati;
- Memantau tahap pelaksanaan proyek pasca-COD.

3. Divisi Transaction Legal

Memberikan dukungan hukum sehubungan dengan proyek-proyek yang dibiayai IIF di bawah pengawasan Divisi Business Development dan Divisi Project Supervision.

4. Divisi Sindikasi

Mencapai kesepakatan pembiayaan dan investasi bersama dengan bank atau institusi keuangan lainnya.

5. Divisi Internasional

Mendapatkan kesepakatan pembiayaan dan investasi proyek dari klien internasional.

Per 31 Desember 2021, jumlah karyawan yang bertugas di Direktorat Investasi tercatat sebanyak 41 orang. Seluruh karyawan tersebut dipastikan adalah talenta-talenta unggul yang berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki kualifikasi yang relevan di bidang perbankan, korporasi, penyertaan modal, hukum, dan konsultasi.

In addition to launching innovative products, the Company also continued to strengthening cooperation with banks and other financial institution, to actively promote its competitive advantage and to be involved in infrastructure community i.e. Indonesian Renewable Energy Community (METI) and MASTEL.

While the end of the pandemic is remained unpredictable, the Company is confident about its positive growth in the years to come, given the government's relentless support for the national infrastructure development program.

Structure and Responsibilities

The Company has an Investment Directorate whose responsibility ranges from securing financial deals or commitment with new clients, increasing the volume of financing commitments with existing clients, and monitoring credit quality performance of these clients.

In fulfilling its duties and responsibilities, the Investment Directorate has 2 (two) Managing Directors & CIOs, and coordinates with the Investment Committee - Board of Commissioners & Investment Committee - Board of Directors.

In order for the investment product segment to work optimally and achieve the expected target, the Investment Directorate is assisted by five (5) divisions on a daily basis with each one implementing the following duties and responsibilities:

1. Business Development Division

- Obtain financing and investment agreements;
- Acquire clients; and
- Monitor project progress up to Commercial Operation Date (COD).

2. Project Supervision Division

- Ensure IIF-financed projects meet the agreed requirements;
- Monitor the post-COD project implementation phase.

3. Transaction Legal Division

Provide legal support in relation to IIF-financed projects under the supervision of the Business Development Division and the Project Supervision Division.

4. Syndication Division

Reach mutual financing and investment agreements with banks or other financial institutions.

5. International Division

Acquire project financing and investment deals from international clients.

As of December 31, 2021, the Investment Directorate had a total of 41 employees. These employees are excellent talents who come from various backgrounds and relevant qualifications in the fields of banking, corporate, equity, law, and consulting.

Proyek-Proyek Unggulan Direktorat Investasi Tahun 2021

a) Sektor Energi Terbarukan

Meski berhadapan dengan situasi pandemi yang belum berakhir, Perseroan optimis menjalankan peran strategisnya sebagai katalisator pembangunan infrastruktur nasional terutama dalam menyalurkan pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan yang layak secara komersial dan telah memenuhi prinsip-prinsip S&E IIF.

Pada tahun 2021, Perseroan kembali menyalurkan pembiayaan baru untuk sektor energi dan energi terbarukan, antara lain:

- PLTMH di Poso, Sulawesi Tengah: 2x5 MW;
- PLTMH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara: 2 X 1,75 MW; dan
- PLTS di Kupang, Nusa Tenggara

b) Sektor *Connectivity* (Jalan Tol, Transportasi, dan Infrastruktur Dasar)

Beberapa proyek infrastruktur mengalami keterlambatan penyelesaian konstruksi seiring dengan dilakukannya *refocusing* APBN dan implementasi PPKM selama masa pandemi. Hal ini menjadi salah satu risiko eksternal yang tidak terhindarkan dan terjadi di luar kendali Perseroan. Kendati demikian, Perseroan telah menyusun inisiatif strategis yang sudah memperhitungkan situasi tersebut sehingga tetap mampu membukukan pertumbuhan positif sepanjang 2021.

Selama pandemi 2 (dua) tahun terakhir, Perseroan melihat sektor telekomunikasi menyimpan peluang yang cukup menjanjikan seiring dengan tingginya permintaan penggunaan data di kalangan masyarakat. Menilik potensi tersebut, pada tahun 2021, Perseroan mengambil bagian dalam pembiayaan proyek *data center* yang berlokasi di Kawasan Industri Cikarang – Jababeka. Proyek ini merupakan bagian dari portofolio sektor telekomunikasi IIF.

Sampai dengan saat ini, sektor telekomunikasi masih menjadi salah satu sektor pembiayaan terbesar di dalam portofolio IIF. Sebelumnya, Perseroan juga telah berpartisipasi dalam pembiayaan proyek Palapa Ring, pembiayaan untuk penyedia jasa internet, penyedia menara telekomunikasi dan operator telekomunikasi.

Masih di tahun 2021, Perseroan memperluas cakupan portofolio yang dimiliki, yaitu melalui pemberian fasilitas pinjaman sindikasi untuk pembangunan dan pengembangan Jalur Kereta Api di Makassar-Parepare, Sulawesi (bagian dari proyek Trans-Sulawesi). Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi Pemerintah dan merupakan portofolio pionir IIF di sektor kereta api dan transportasi massal.

Kinerja dan Profitabilitas Tahun 2021

Sepanjang 2021, Direktorat Investasi berhasil memperoleh 17 kesepakatan pembiayaan baru dengan total komitmen investasi sebesar Rp5,41 triliun, tumbuh 87,8% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,88 triliun. Sementara nilai komitmen kumulatif bruto hingga akhir 2021 mencapai Rp31,85 triliun.

Leading Projects of the Investment Directorate in 2021

a) Renewable Energy Sector

Although faced with lingering pandemic situation, the Company is optimistic that it can play in its strategic role as a catalyst for national infrastructure development, especially in channeling financing for renewable energy projects that are commercially viable and in compliance with IIF's S&E principles.

In 2021, the Company committed new financing for the energy and renewable energy sectors, including:

- MHPP in Poso, Central Sulawesi: 2x5 MW;
- MHPP South Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi Province: 2 X 1,75 MW; and
- Solar Power Plant (PLTS) located in Kupang, East Nusa Tenggara

b) Connectivity Sector (Toll Roads, Transportation, and Basic Infrastructure)

Several infrastructure projects experienced delayed in construction due to the government's budget refocusing and Enforcement of Community Activity Restrictions Policy (PPKM) during the pandemic. These were the unavoidable external risks that lie beyond the Company's control. Nevertheless, the Company has compiled strategic initiatives with due considerations on the unfavorable situation that enabled it to register positive growth throughout 2021.

During the pandemic that has persisted in the last two (2) years, the Company saw that the telecommunication sector as one that offered enormous opportunities due to the public's increasingly strong demand for data usage. To seize this potential, in 2021, the Company participated in financing data center project located in the Cikarang - Jababeka Industrial Estate. This project is part of IIF's telecommunication sector.

To date, the telecommunication sector is still one of the largest financing sectors under IIF's portfolio. Previously, the Company has also participated in the financing of the Palapa Ring project, financing for internet service providers, telecommunication tower providers, and telecommunication operators.

The Company was also starting to expand its portfolio by providing a syndicated loan facility for the construction and development of the Makassar-Parepare Railway, Sulawesi (part of the Trans-Sulawesi project). This project is one of the National Strategic Projects (PSN) initiated by the government and is IIF's pioneer project under its portfolio in the rail and mass transportation sectors.

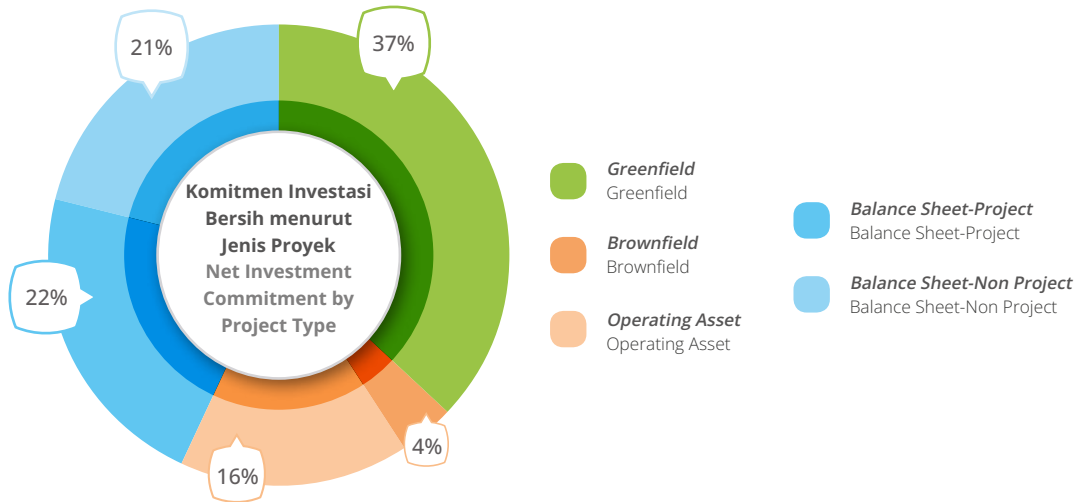
Performance and Profitability in 2021

Throughout 2021, the Investment Directorate secured 17 new financing agreements with a total investment commitment of Rp5.41 trillion, an increase of 87.8% from Rp2.88 trillion in the previous year. Gross cumulative commitment value at the end of 2021 reached Rp31.85 trillion.

Tahun 2021, proyek *greenfield* masih menjadi unggulan dengan porsi kontribusi sebesar 37% dari total portofolio IIF. Sedangkan untuk portofolio lainnya terbagi antara proyek *balance-sheet projects* (22%), *balance-sheet non-project* (21%), *operating asset* (16%) dan *brownfield* (4%).

In 2021, greenfield projects remained the most attractive area of financing with a contribution of 37% to IIF's total portfolio. Meanwhile, the other portfolios are divided into balance-sheet projects (22%), balance-sheet non-projects (21%), operating assets (16%), and brownfield (4%).

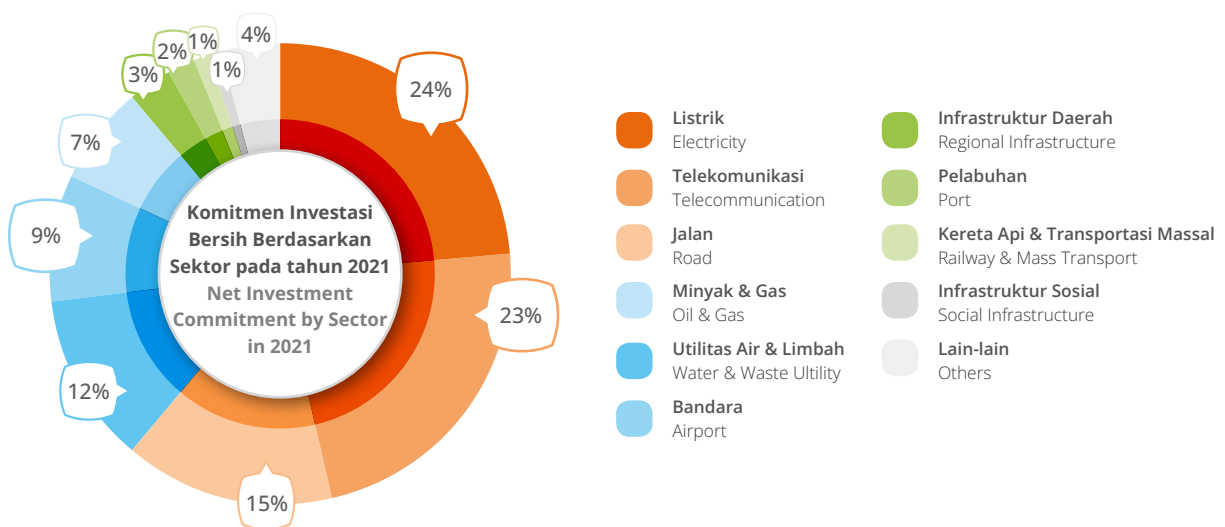
Komitmen Portofolio berdasarkan Jenis Proyek pada tahun 2021
Portfolio Commitment by Project Type in 2021



Berdasarkan sektor, ketenagalistrikan, telekomunikasi dan jalan merupakan sektor terbesar dalam portofolio pembiayaan IIF dengan kontribusi masing-masing sebesar 24%, 23% dan 15%.

Based on sector, power generating, telecommunication, and road construction are the target sectors financed under IIF portfolio with their respective contributions of 24, 23 and 15%.

Komitmen Investasi Bersih Portofolio Berdasarkan Sektor pada Tahun 2021
Portfolio Net Investment Commitment by Sector in 2021



Dari sisi profitabilitas, Direktorat Investasi berhasil membukukan kinerja keuangan yang menggembirakan di tahun ini. Jumlah aset investasi IIF tahun 2021 tercatat sebesar Rp12.209 miliar, sementara pendapatan bunga investasi dibukukan sebesar Rp811,98 miliar, meningkat 7,9% dari tahun sebelumnya sejumlah Rp752,81 miliar. Selaras dengan peningkatan pendapatan tersebut, IIF berhasil

In terms of profitability, the Investment Directorate managed to record an encouraging financial performance this year. IIF's total investment assets in 2021 were recorded at Rp12,209 billion, while investment interest income was recorded at Rp811.98 billion, an increase of

mencatatkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp272,02 miliar, mengalami pertumbuhan 34,0% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp202,96 miliar. Sementara itu, Pendapatan Provisi dan Komisi tahun 2021 dibukukan mencapai Rp57,97 miliar, meningkat 72,0% dari sebesar Rp33,70 miliar di tahun 2020. Secara keseluruhan, total pendapatan yang diraih IIF dari produk investasi adalah sebesar Rp885,30 miliar, tumbuh 11,9% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sejumlah Rp791,19 miliar.

JASA ADVISORY

Fokus dan Strategi di Tahun 2021

Direktorat Advisory menyadari bahwa sejumlah tantangan eksternal masih menekan kinerja Perseroan sepanjang tahun ini sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh IIF. Menyadari hal tersebut, Direktorat Advisory mengeksekusi sejumlah inisiatif strategi yang tentunya telah memperhitungkan faktor-faktor risiko akibat pandemi COVID-19.

Mengingat *nature* bisnis IIF merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur nasional yang mengedepankan aspek keberlanjutan, maka strategi pemasaran utama Direktorat Advisory bersandar pada hubungan baik yang telah dibina bersama para pemangku kepentingan dan peran aktif IIF dalam *Project Development Facility* (PDF) yang disediakan Pemerintah untuk penyiapan proyek KPBU.

Kami terus berupaya menjalin hubungan baik dengan Pemerintah, pihak swasta, maupun perusahaan konsultan lain dengan mengandalkan bauran jasa yang beragam dan didesain secara khusus untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda.

Secara berkala, Direktorat Advisory juga berpartisipasi pada acara diskusi yang digelar oleh Pemerintah dan pihak terkait. Keterlibatan aktif Direktorat Advisory pada berbagai acara eksternal tersebut dimaksudkan agar IIF dapat mengikuti perkembangan infrastruktur Indonesia dan berkesempatan untuk menawarkan jasa konsultasi kepada calon klien kapan pun diperlukan yang sejalan dengan kebijakan dan keputusan investasi strategis Pemerintah. Di samping itu, Direktorat Advisory juga berperan aktif sebagai pembicara dalam *knowledge sharing* pada forum industri infrastruktur.

Direktorat Advisory juga terus memperkuat kapasitas dan kapabilitas sumber daya insani yang dimiliki melalui pelatihan yang berkesinambungan. Perseroan berharap setiap karyawan dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai layanan jasa konsultasi yang ditawarkan IIF serta mendapatkan gambaran yang *up-to-date* mengenai kondisi pasar atau dinamika industri yang sedang terjadi.

Perseroan menilai prospek layanan *Advisory* IIF masih sangat menjanjikan terutama dalam mempromosikan prinsip-prinsip ESG kepada para calon investor ataupun institusi keuangan yang akan mendanai proyek-proyek infrastruktur. Ke depan, Direktorat Advisory menargetkan pengelolaan portofolio sektor infrastruktur umum, seperti transportasi, jalan, air, dan pengolahan sampah, termasuk juga menjangkau sektor infrastruktur sosial, seperti perumahan.

7.9% from the previous year of Rp752.81 billion. In line with the increase in revenue, IIF managed to record a net profit before tax of Rp272.02 billion, experiencing 34.0% growth from the realization in 2020 at Rp202.96 billion. Meanwhile, Fee and Commission Income in 2021 reached Rp57.97 billion, an increase of 72.0% from Rp33.70 billion in 2020. Overall, IIF's total income from investment products was Rp885.30 billion, increased by 11.9% compared to the previous year at Rp791.19 billion.

ADVISORY SERVICES

Focus and Strategy in 2021

The Advisory Directorate had already foreseen the external challenges and the enormous pressure they would subsequently have on IIF's performance this year, which proved to materialize into delayed completion of certain infrastructure projects under the IIF portfolio. Therefore, the Advisory Directorate made some strategic initiatives after all pandemic-induced risks were considered.

Understanding the nature of IIF's business as a non-bank financing institution that focuses in the sustainability of infrastructure development, the Advisory Directorate relies on the synergy that IIF has established with existing clients and active participation in the Government's Project Development Facility (PDF) for PPP projects.

We continued to strive to establish strong synergy with the Government, the private sector, and other consulting companies by relying on a diverse mix of services specifically designed to meet the different pain points of clients.

Periodically, the Advisory Directorate also participated in forums of discussions held by the government and related parties. The active involvement of the Advisory Directorate in these external events should enable IIF to keep abreast of developments in Indonesia's infrastructure and open an opportunity to offer consulting services to prospective clients, in line with the government's strategic investment policies and decisions. In addition, the Advisory Directorate also played an active role as keynote speaker in knowledge sharing at the infrastructure industry forum.

The Advisory Directorate also continued to strengthen the capacity and capability of its human resources through continuous training programs. The Company hopes that each one of its employees has a more comprehensive understanding of the consulting services offered by IIF and gets an up-to-date picture of a recent trend in market conditions or industry dynamics.

The Company views that the IIF still has a strong outlook in the Advisory services, especially in promoting the principles of ESG to potential investors or financial institutions that are to fund infrastructure projects. The Directorate's future plan is to have a more diversified portfolio in the public infrastructure sector, such as transportation, roads, water, and waste management, in addition to the social infrastructure sector, such as housing.

Struktur Pengelola dan Penanggung Jawab

IIF tidak hanya menawarkan produk-produk investasi yang inovatif, akan tetapi juga menyediakan bantuan dan jasa konsultasi (*advisory*) kepada para klien baik yang berasal dari sektor Pemerintah maupun swasta. Jasa konsultasi tersebut mencakup aspek transaksional dan finansial, keuangan perusahaan, hingga penilaian ekonomis dan persiapan proyek.

Direktorat Advisory adalah unit kerja di Perseroan yang memberikan layanan konsultasi tersebut kepada para klien. Direktorat ini dipimpin langsung oleh seorang *Executive Vice President* (EVP) & Kepala Grup Advisory. Per 31 Desember 2021, jumlah karyawan yang bertugas di Direktorat Advisory tercatat sebanyak 6 (enam) orang.

Proyek-Proyek Unggulan Direktorat Advisory Tahun 2021

Jasa *advisory* yang disediakan IIF pada tahun 2021, meliputi:

1. Jasa Konsultasi Transaksi Finansial Proyek KPBU TPPAS Jatibarang, Semarang;
2. Jasa Konsultasi Kajian Dampak Ekonomi Jalan Tol Trans Sumatera;
3. Jasa Konsultasi Kajian Dampak Ekonomi Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung;
4. Jasa Konsultasi Uji Tuntas Finansial untuk Proyek SPAM Pekanbaru dan Lhokseumawe;
5. Jasa Konsultasi Finansial kepada pihak swasta dalam JV Kemitraan dengan PT Jasa Sarana dalam Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Nambo;
6. Jasa Konsultasi *Due Diligence* Akuisisi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di Kalimantan;
7. Jasa Konsultasi Transaksi Finansial untuk Proyek KPBU Penyediaan Air Minum di Daerah Jabodetabek;
8. Jasa Konsultasi Penelitian Studi Kelayakan Lintas Pelayanan 5 Cibubur-Bogor;
9. Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Skala Prioritas, Kapasitas Pendanaan dan Alternatif Sumber Pendanaan Ekuitas Ruas-Ruas Jalan Tol Trans Sumatera; dan
10. Jasa Konsultasi Penasihat Keuangan untuk Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera.
11. Jasa Konsultasi Transaksi Proyek Pengelolaan Sampah ITF Sunter Jakarta;
12. Jasa Konsultasi Transaksi Proyek KPBU Perumahan Cisaranten.

Kinerja dan Profitabilitas Tahun 2021

Profitabilitas Direktorat *Advisory* sedikit terkoreksi pada tahun ini dikarenakan penyampaian hasil pekerjaan yang tertunda dari sejumlah penugasan yang telah diberikan.

Pada tahun 2021, Direktorat *Advisory* membukukan pendapatan sebesar Rp8,9 miliar, turun 5,3% dari Rp9,4 miliar pada 2020. Dari jumlah tersebut, porsi untuk klien swasta adalah sebesar 67%, sementara sisanya 33% adalah klien IIF yang berasal dari sektor pemerintah.

Structure and Responsibilities

In addition to offering innovative investment products, the Company also provides technical assistance and advisory services to clients from the government and the private sectors. The consulting services are given in the areas of transactional and financial aspects, corporate finance, economic assessment, and project preparation.

The Advisory Directorate is the Company's work unit that provides these consulting services to clients. This Directorate is led directly by an Executive Vice President (EVP) & Head of Advisory Group. As of December 31, 2021, the Advisory Directorate had a total of six (6) consulting employees serving under it.

Leading Projects of the Advisory Directorate in 2021

The advisory services provided by IIF in 2021 included:

1. Transaction Financial Advisory for the TPPAS Jatibarang PPP Project, Semarang;
2. Consulting Services for Economic Impact Assessment of the Trans Sumatra Toll Road;
3. Consulting Services for Economic Impact Assessment of the Kayu Agung-Palembang-Betung Toll Road;
4. Financial Due Diligence Consulting Services for the Pekanbaru and Lhokseumawe SPAM Projects;
5. Financial Advisory Services to private parties in the JV Partnership with PT Jasa Sarana in the Development of the Nambo Waste Processing Facility;
6. Due Diligence Consultancy Services for the Acquisition of a Biogas Power Plant (PLTBg) Project in Kalimantan;
7. Transaction Financial Advisory for Drinking Water Supply PPP Projects in the Greater Jakarta Area;
8. Consulting Services for Feasibility Study of LRT Line 5 Cibubur-Bogor;
9. Consulting Services for Preparation of Prioritization Study, Funding Capacity and Equity Funding Alternative for Trans Sumatera Toll Road; and
10. Financial Advisory for Trans Sumatera Toll Road.
11. Transaction advisory services for Jakarta ITF Sunter Waste Managemet Project;
12. Transaction advisory services for Cisaranten Housing PPP Project.

Performance and Profitability in 2021

The profitability of the Advisory Directorate was slightly corrected this year due to delayed submission of report from some of the assigned consultation projects.

The Advisory Directorate delivered Rp8.9 billion in revenue, decreased of 5.3% from Rp9.4 billion in 2020. Of this figure, the portion for private clients is 67%, while the remaining 33% are IIF clients from the public sector.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

Diskusi dan analisis keuangan berikut ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young*) dan mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Posisi aset Perseroan per 31 Desember 2021 dibukukan sebesar Rp14,55 triliun, turun 0,9% dari tahun sebelumnya senilai Rp14,68 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas sebesar Rp704,63 miliar atau setara 34,3% dan penurunan pada efek-efek sebesar Rp341,16 miliar atau setara 13,8%.

Uraian perkembangan aset Perseroan selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The following discussion and financial analysis are prepared based on the Company's Financial Statements ended December 31, 2021 and 2020. The Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) of Purwanto, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young*) and obtained fair opinion, in all material respects, the Company's financial position as of December 31, 2021 and 2020 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).

Financial Statements

Asset

The Company's asset position as of December 31, 2021 was recorded at Rp14.55 trillion, a decrease of 0.9% from Rp14.68 trillion in the previous year. The decrease was driven by the decreasing of cash and cash equivalents by Rp704.63 billion or 34.3% and the decreasing of securities by Rp341.16 billion or 13.8%.

The changes in the Company's assets during 2021 are detailed in the table below:

dalam jutaan Rupiah/in Rp millions)

Deskripsi Descriptions	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Amount	Percentage
Kas dan setara kas - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Cash and cash equivalents - net of allowance for impairment losses	1.352.431	2.057.059	(704.628)	(34,3%)
Efek-efek - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Securities - net of allowance for impairment losses	2.128.893	2.470.048	(341.155)	(13,8%)
Investasi saham Equity investments	201.902	396.720	(194.818)	49,1%
Pinjaman diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Loans - net of allowance for impairment losses	10.203.363	9.197.486	1.005.877	10,9%
Tagihan derivatif Derivative receivables	210.780	69.265	141.515	204,3%
Piutang bunga Accrued interest income	96.148	86.840	9.308	10,7%
Beban dibayar di muka Prepaid expenses	6.861	6.980	(119)	(1,7%)
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	439	344	95	27,6%
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Property and equipment - net of accumulated depreciation	257.253	276.883	(19.630)	(7,1%)
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	70.405	83.270	(12.865)	(15,5%)
Beban tangguhan Deferred charges	3.139	21.328	(18.189)	(85,3%)
Aset lain-lain - setelah dikurangi akumulasi amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai Other assets - net of accumulated amortization and allowance for impairment losses	19.513	18.149	(1.364)	(7,5%)
Jumlah Aset Total Assets	14.551.127	14.684.372	(133,245)	(0,9%)

Aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar 15,3% sehingga dibukukan sebesar Rp2,61 triliun pada tahun 2021 dari Rp3,09 triliun pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan deposito berjangka pendek dibandingkan dengan tahun lalu.

Sedangkan aset tidak lancar mengalami sedikit peningkatan sebesar 2,9% dari Rp11,60 triliun pada 2020 menjadi Rp11,94 triliun di akhir 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh bertambahnya saldo pinjaman diberikan yang akan jatuh tempo di atas satu tahun.

Sepanjang tahun 2021, penurunan jumlah aset terbesar dipicu oleh menurunnya posisi kas dan setara kas hingga 34,3% dari sebesar Rp2,06 triliun pada 2020 menjadi Rp1,35 triliun di tahun ini. Selain itu, efek-efek juga mengalami penurunan sebesar 13,8%, dari Rp2,47 triliun menjadi Rp2,13 triliun pada akhir tahun 2021. Penurunan kas dan setara kas tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penyaluran pinjaman kepada debitur dan pembayaran pinjaman diterima. Sedangkan penurunan nilai efek-efek terjadi karena Perseroan menjual sebagian efek-efek yang dimiliki dan juga terdapat efek-efek yang jatuh tempo sesuai periodenya.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan pada akhir 2021 adalah sebesar Rp12,33 triliun, turun 1,4% dari tahun sebelumnya senilai Rp12,50 triliun. Penurunan tersebut dipicu oleh menurunnya nilai pinjaman diterima Perseroan hingga Rp1,63 triliun atau setara 30,3%, yang di-net-off dengan peningkatan surat utang yang diterbitkan sebesar Rp1,29 triliun atau setara 47,3%. Hal ini sesuai dengan strategi Perseroan untuk menurunkan *cost of fund*.

Uraian perkembangan liabilitas Perseroan selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Deskripsi Descriptions	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Amount	Persentase Percentage
Liabilitas derivatif Derivative liabilities	58.107	117.200	(59.093)	(50,4%)
Utang lain-lain Other payables	4.838	5.897	(1.059)	(17,9%)
Utang pajak Taxes payable	1.612	1.653	(41)	(2,5%)
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain Accrued expenses and other liabilities	64.673	72.409	(7.736)	(10,7%)
Pendapatan diterima di muka Unearned revenue	5.348	8.106	(2.758)	(34,0%)
Liabilitas imbalan kerja Employee benefits obligation	33.140	27.499	5.641	20,5%
Pinjaman diterima Fund borrowings	3.748.292	5.378.793	(1.630.501)	(30,3%)
Surat utang yang diterbitkan Debt securities issued	4.029.707	2.735.233	1.294.474	47,3%
Pinjaman subordinasi Subordinated loans	4.383.902	4.157.322	226.580	5,5%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	12.329.619	12.504.112	(174.493)	(1,4%)

dalam jutaan Rupiah/in Rp millions)

The Company's current assets experienced a decrease of 15.3% standing at Rp2.61 trillion in 2021 from Rp3.09 trillion in 2020. This was mainly due to decrement of short-term time deposit compared to prior year

Meanwhile, non-current assets experienced a slightly increase by 2.9% from Rp11.60 trillion in 2020 to Rp11.94 trillion at the end of 2021. The increase was contributed by the increment of loan balance with maturity period of above one-year period.

Throughout 2021, the largest decrease in total assets was driven by cash and cash equivalents which stood at Rp1.35 trillion at the end of year, or a 34.3% decrease from Rp2.06 trillion recorded as at end of 2020. Then followed by decrease in securities by 13.8%, from Rp2.47 trillion to Rp2.13 trillion at end of 2021. The decreasing cash and cash equivalents were mainly due to increment in loans disbursement to debtor and repayment of fund borrowing. While the decreasing securities was primarily due to sale of securities and also matured securities according to its period.

Liabilities

The Company's total liabilities at the end of 2021 was Rp12.33 trillion, a decrease of 1.4% from Rp12.50 trillion in the previous year. The decrease in liabilities were caused by decrement of fund borrowings by Rp1.63 trillion or approximately 30.3% which net-off by increment of debt securities issued of Rp1.29 trillion or approximately 47.3%. This is inline with the Company's strategy to lowering the cost of fund.

The changes in Company's liabilities during 2021 are detailed in the table below:

Kewajiban lancar mengalami penurunan 43,9% dari sebesar Rp2,75 triliun pada 2020 menjadi Rp1,54 triliun di tahun ini. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya nilai Pinjaman diterima dan surat utang yang diterbitkan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Jumlah liabilitas tidak lancar IIF pada akhir 2021 tercatat sebesar Rp10,79 triliun, atau meningkat 10,6% dari Rp9,75 triliun di tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penerbitan Program *Euro Medium Term Note* (EMTN) sebesar USD150 juta dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pada akhir tahun 2021, porsi liabilitas IIF sebagian besar terdiri dari pinjaman subordinasi sebesar Rp4,38 triliun atau 35,6% dari total liabilitas.

Ekuitas

Nilai ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2,22 triliun, sedikit meningkat sebesar 1,9% dari posisi tahun 2020 sebesar Rp2,18 triliun.

Current liabilities posted a decrease of 43.9% from Rp2.75 trillion in 2020 to Rp1.54 trillion this year. The decrease was mainly caused by decrement of fund borrowings and debt securities issued which due within a year.

IIF's total non-current liabilities at the end of 2021 were recorded at Rp10.79 trillion, or increase of 10.6% from Rp9.75 trillion in 2020. This was caused by issuance of Euro Medium Term Note (EMTN) Programme amounted USD150 million with maturity period of 5 (five) year.

At the end of 2021, the portion of IIF's liabilities consisted mostly of subordinated loans, which stood at Rp4.38 trillion and made up 35.6% of total liabilities.

Equity

The Company's equity as of December 31, 2021 was Rp2.22 trillion, a slight increase of 1.9% from the 2020 position at Rp2.18 trillion.

dalam jutaan Rupiah/in Rp millions)

Deskripsi Descriptions	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Amount	Persentase Percentage
Modal saham – nilai nominal Rp1 per saham Capital stock – par value of Rp1 per share				
Modal dasar 2.000.000 saham Authorised capital 2,000,000 shares				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.000.000 saham Subscribed and paid-up capital 2,000,000 shares	2.000.000	2.000.000	-	0,0%
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	29.800	29.800	-	0,0%
Penghasilan komprehensif lain – neto Other comprehensive income – net of tax	24.208	45.389	(21.181)	(46,7%)
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas – neto Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges – net	(41.181)	(93.760)	52.579	(56,1%)
(Kerugian)/keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai wajar – neto Cumulative (loss)/gain on derivative instrument for fair value hedges – net	(18.135)	25.647	(43.782)	(170,7%)
Saldo laba Retained earnings				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	30.716	26.465	4.251	16,0%
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	196.100	146.719	49.381	33,7%
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.221.508	2.180.260	41.248	1,9%

Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya di tahun 2021 sebesar Rp49,38 miliar atau setara 33,7% dan penurunan yang cukup signifikan pada kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas sebesar Rp52,58 miliar atau setara 56,1%. Hal ini diimbangi dengan pengakuan kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai wajar sebesar Rp18,14 miliar di tahun 2021, dari sebelumnya membukukan keuntungan kumulatif sebesar Rp25,65 miliar.

The increase was caused by increment in unappropriated retained earnings by Rp49.38 billion or 33.7% and drop in cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges by Rp52.58 billion or 56.1%. This was partially offset by recognition of cumulative loss on derivative instrument for fair value hedges of Rp18.14 billion in 2021 which previously in cumulative gain position of Rp25.65 billion.

Laporan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**Pendapatan**

Perseroan mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 4,3% dari Rp911,52 miliar di tahun 2020 menjadi Rp951,10 miliar di tahun ini. Peningkatan tersebut sebagian besar dikontribusikan oleh pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 1,7%, dari Rp859,93 miliar pada 2020 menjadi Rp874,74 miliar di tahun ini, serta meningkatnya pendapatan provisi dan komisi sebesar 72,0%, dari Rp33,70 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp57,97 miliar pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didukung oleh fokus Perseroan pada perolehan kesepakatan yang bernilai tambah tinggi.

Deskripsi Descriptions	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Amount	Persentase Percentage
Pendapatan bunga Interest income	874.739	859.928	14.811	1,7%
Pendapatan provisi dan komisi Provision and commission income	57.971	33.700	24.271	72,0%
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek Realised gain on sale of securities	6.138	7.562	(1.424)	(18,8%)
Pendapatan jasa <i>advisory</i> Advisory income	8.861	9.388	(527)	(5,6%)
Kerugian direalisasi dari transaksi derivatif Realised loss from derivative transactions	(1.233)	-	(1.233)	(100,0%)
Kerugian selisih kurs Loss from foreign exchange	(7.425)	(3.739)	(3.686)	98,6%
Kerugian belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif Unrealised loss from changes in fair value of derivative transactions	(3.305)		(3.305)	(100,0%)
Pendapatan lainnya Other income	15.349	4.681	10.668	227,9%
Jumlah Pendapatan Total Revenues	951.095	911.520	39.575	4,3%

IIF mencatatkan total pendapatan sebesar Rp68,90 miliar dari kegiatan *treasury*, turun 39,9% dari Rp114,68 miliar di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh turunnya pendapatan bunga dari obligasi dan reksa dana sebesar 56,3% sebagai dampak adanya efek-efek yang jatuh tempo selama tahun 2021 dan juga penjualan efek-efek dan reksadana sejalan dengan strategi IIF untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan *treasury*. Selain itu, tingkat bunga instrumen *treasury* juga mengalami penurunan sebagai dampak dari penurunan ekonomi karena pandemi COVID-19.

Sepanjang tahun 2021, sumber pendapatan utama Perseroan berasal dari pendapatan bunga sebesar Rp874,74 miliar atau 92,0% dari jumlah pendapatan.

Beban

Beban Perseroan mengalami kenaikan 3,9% dari Rp840,28 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp873,32 miliar di akhir tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban

Statement of Income Statement and Other Comprehensive Income**Revenue**

The Company recorded a 4.3% increase in revenue from Rp911.52 billion in 2020 to Rp951.10 billion this year. It was mostly contributed by the increase of interest income by 1.7%, from Rp859.93 billion in 2020 to Rp874.74 billion in 2021, and the increase of provision and commission income by 72.0%, from Rp33.70 billion in 2020 to Rp57.97 billion in 2021. Such increasing was resulted from the Company's focus in achieving high value-added deals.

dalam jutaan Rupiah/in Rp millions)

Deskripsi Descriptions	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Amount	Persentase Percentage
Pendapatan bunga Interest income	874.739	859.928	14.811	1,7%
Pendapatan provisi dan komisi Provision and commission income	57.971	33.700	24.271	72,0%
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek Realised gain on sale of securities	6.138	7.562	(1.424)	(18,8%)
Pendapatan jasa <i>advisory</i> Advisory income	8.861	9.388	(527)	(5,6%)
Kerugian direalisasi dari transaksi derivatif Realised loss from derivative transactions	(1.233)	-	(1.233)	(100,0%)
Kerugian selisih kurs Loss from foreign exchange	(7.425)	(3.739)	(3.686)	98,6%
Kerugian belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif Unrealised loss from changes in fair value of derivative transactions	(3.305)		(3.305)	(100,0%)
Pendapatan lainnya Other income	15.349	4.681	10.668	227,9%
Jumlah Pendapatan Total Revenues	951.095	911.520	39.575	4,3%

IIF managed to record a total revenue of Rp68.90 billion from treasury activities, an decrease of 39.9% from Rp114.68 billion in the previous year. The decrease was caused by decline in interest income from bonds and mutual funds by 56.3% due to matured securities during 2021 and also sale of securities and mutual funds as inline with the strategy of gain profit from treasury activities. Furthermore, interest rate from treasury instruments were dropped affected by economic downturn from COVID-19 pandemic.

Throughout 2021, the Company's main source of revenue comes from interest income, which stood at Rp874.74 billion and made up 92.0% of revenue.

Expenses

The Company's expenses experienced a 3.9% increase from Rp840.28 billion in 2020 to Rp873.32 billion at the end of 2021. The increase was mainly caused by incline in interest expense by 6.6% from

bunga sebesar 6,6% dari Rp605,27 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp645,24 miliar pada tahun 2021, dan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 31,1% dari Rp50,61 miliar pada 2020 menjadi Rp34,88 miliar di tahun 2021.

Rp605.27 billion in 2020 to Rp645.24 billion in 2021, and decline in provision for impairment losses by 31.1% from Rp50.61 billion in 2020 to Rp34.88 billion in 2021.

dalam jutaan Rupiah/in Rp millions)

Deskripsi Descriptions	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Amount	Persentase Percentage
Beban bunga Interest expense	645.242	605.272	39.970	6,6%
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	193.197	184.401	8.796	4,8%
Beban cadangan kerugian penurunan nilai Provision for impairment losses	34.884	50.606	(15.722)	(31,1%)
Jumlah Beban Total Expenses	873.323	840.279	33.044	3,9%

Beban Bunga

Sementara itu, beban bunga mengalami peningkatan sebesar 6,6% dari Rp605,27 miliar di tahun 2020 menjadi Rp645,24 miliar di akhir 2021. Peningkatan beban di tahun ini terutama bertujuan untuk mendukung upaya Perseroan dalam memperluas portofolio aset investasinya.

Interest Expense

Interest expense experienced a 6.6% increase from Rp605.27 billion in 2020 to Rp645.24 billion at the end of 2021. This increase was mainly due to support the Company's effort in expanding its investment assets portfolio.

Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pada tahun 2021, jumlah penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan tercatat sebesar Rp34,88 miliar, turun 31,1% dari Rp50,61 miliar di tahun 2020. Penurunan tersebut ditopang oleh upaya-upaya Perseroan dalam mengelola portofolio risiko debitur sehingga dampak pemburukan kualitas kredit, terutama dari pandemic COVID-19 lebih termitigasi apabila di dibandingkan tahun 2020 di mana banyak terjadi penurunan rating kredit atau kualitas kredit. Di sisi lain, pada tahun 2020 terdapat transisi prinsip akuntansi dari PSAK 55 ke PSAK 71 yang menyebabkan peningkatan pencadangan yang lebih signifikan akibat dari perubahan metode perhitungan. Selain itu, terdapat penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai yang harus dibentuk untuk debitur-debitur yang semakin mendekatinya tanggal jatuh temponya.

Allowance for Impairment Losses

In 2021, the amount of the Company's allowance for impairment losses was recorded at Rp34.88 billion, a decrease of 31.1% from Rp50.61 billion in 2020. The Company managed to reduce this allowance by managing the debtor risk portfolio that led to more mitigated deterioration of credit quality, especially from the COVID-19 pandemic compared to 2020 where the number of deteriorated credit ratings or credit quality was larger. On the other hand, in 2020 there was a transition in accounting principles from PSAK 55 to PSAK 71 which led to a more significant increase in allowance due to changes in calculation methods. In addition, there is a decrease in allowance for impairment losses that must be established for debtors who are getting closer to their maturity date.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi tercatat sebesar Rp193,20 miliar, meningkat 4,8% dari tahun 2020 sebesar Rp184,40 miliar. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp3,95 miliar serta penambahan pencadangan imbalan kerja sebesar Rp4,41 miliar sebagai dampak kenaikan jumlah karyawan, dan juga kenaikan beban sewa hingga Rp1,09 miliar terutama karena adanya inisiatif baru di tahun 2021 berupa penyewaan *database virtual* untuk membangun pusat data terintegrasi.

General and Administrative Expenses

General and administrative expenses were recorded at Rp193.20 billion, an increase of 4.8% from 2020 at Rp184.40 billion. This was caused by increment in salaries and benefits of Rp3.95 billion and increase in employee benefits of Rp4.41 billion as impact of higher employee number, and also increase in rent expenses by Rp1.09 billion which primarily due to the new initiative in 2021 of virtual database to create an integrated data centre.

Laba Sebelum Beban Pajak

Laba sebelum beban pajak pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp77,77 miliar, naik 9,2% dari tahun sebelumnya sebesar Rp71,24 miliar.

Profit Before Tax

Profit before tax expense in 2021 was recorded at Rp77.77 billion, an increase of 9.2% from the previous year of Rp71.24 billion.

Beban Pajak

Beban pajak IIF mengalami penurunan sebesar 13,9% dari Rp28,73 miliar pada 2020 menjadi Rp24,74 miliar di akhir tahun 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai beban pajak tangguhan tahun 2021 hingga 20,2% terkait perubahan tarif pajak yang dipersyaratkan oleh UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku sejak 29 Oktober 2021.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Perseroan mencatatkan peningkatan laba bersih tahun berjalan sebesar 24,7% dari Rp42,51 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp53,03 miliar pada akhir tahun 2021. Dengan demikian, laba bersih per saham dasar tahun 2021 adalah sebesar Rp26 ribu (nilai penuh).

Meningkatnya laba bersih IIF pada tahun 2021 sebagian besar dikontribusikan oleh kenaikan jumlah pendapatan Perseroan dari Rp911,52 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp951,10 miliar di tahun 2021, atau secara keseluruhan mencatatkan kenaikan sebesar 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini juga diiringi dengan kenaikan beban Perseroan yang hanya meningkat sebesar 3,9% dari Rp840,28 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp873,32 miliar di akhir tahun 2021.

Penghasilan Rugi Komprehensif Lain

IIF mencatatkan rugi komprehensif lain sebesar Rp11,78 miliar pada tahun 2021, atau turun 30,3% dibandingkan rugi komprehensif lain tahun 2020 sebesar Rp16,89 miliar. Komponen utama rugi komprehensif lain tahun 2021 adalah perubahan nilai wajar dari investasi saham yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar Rp194,82 miliar yang di-*net-off* dengan perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai nilai wajar sebesar Rp139,509 miliar. Kondisi ini terjadi karena harga pasar saham dari investasi ekuitas IIF mengalami penurunan dari Rp224 (nilai penuh) di tahun 2020 menjadi Rp114 (nilai penuh) di tahun 2021.

Jumlah Laba Komprehensif

Jumlah pendapatan komprehensif tahun 2021 mencapai Rp41,25 miliar, atau naik 61,0% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp25,62 miliar.

Laporan Arus Kas

Per 31 Desember 2021, saldo kas dan setara kas Perseroan tercatat sebesar Rp1,35 triliun, mengalami 34,3% penurunan dari posisi kas dan setara kas tahun 2020 sebesar Rp2,06 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan sebesar 109,9% dan menurunnya arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar 70,0%.

Tax Expense

IIF's tax expense experienced a decrease of 13.9% from Rp28.73 billion in 2020 to Rp24.74 billion at the end of 2021. This decrement was mainly due to declining in deferred tax expenses by 20.2% related to the changes in tax rate as stipulated in UU No. 7 Year 2021 regarding *Harmonisasi Peraturan Perpajakan* that effective since October 29, 2021.

Net Profit for the Year

The Company delivered a 24.7% increase in net profit for the year from Rp42.51 billion in 2020 to Rp53.03 billion at the end of 2021. Thus, basic earnings per share in 2021 was Rp26 thousand (full amount).

The increase in IIF's net profit in 2021 mostly contributed from an increase in total revenue generated by the Company by 4.3% from Rp911.52 billion in 2020 to Rp951.10 billion in 2021. In addition, the Company's expenses experienced only a 3.9% increase from Rp840.28 billion in 2020 to Rp873.32 billion at the end of 2021.

Other Comprehensive Loss

IIF recorded other comprehensive loss of Rp11.78 billion in 2021, a 30.3% decrease as compared to 2020 other comprehensive loss balance of Rp16.89 billion. The main components of other comprehensive loss this year, among others, is the fair value changes from equity investment classified as fair value through other comprehensive income of Rp194.82 billion which net off by fair value changes from derivative instrument qualified as fair value of Rp139,509 billion, which decrease by 272.52% compare to 2020. This condition due to drop in market share price of IIF's equity investment from Rp224 (full amount) in 2020 become Rp114 (full amount) in 2021.

Total Comprehensive Profit

Total comprehensive income in 2021 reached Rp41.25 billion, or 61.0% higher than the previous year at Rp25.62 billion.

Cash Flow

As of December 31, 2021, the Company's cash and cash equivalents balance was recorded at Rp1.35 trillion, a decrease of 34.3% from the cash and cash equivalents position in 2020 of Rp2.06 trillion. The decrease was caused by declining in net cash generated from financing activities by 109.9% and declining in net cash used in operating activities by 70.0%.

dalam jutaan Rupiah/in Rp millions)

Deskripsi Descriptions	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Amount	Persentase Percentage
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi Net Cash Used in Operating Activities	(847.901)	(2.821.753)	1.973.852	(70,0%)
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi Net Cash Provided by Investing Activities	337.191	322.320	14.871	4,6%
Arus Kas Neto yang (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Net Cash (Used in)/Provided by Financing Activities	(212.619)	2.148.841	(2.361.460)	(109,9%)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	2.057.102	2.429.067	(371.965)	(15,3%)
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	1.352.435	2.057.102	(704.667)	(34,3%)

Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi

Pada akhir 2021, Perseroan mencatatkan penggunaan kas bersih untuk aktivitas operasi sebesar Rp847,90 miliar atau menurun 70,0% dari posisi tahun 2020 sebesar Rp2,82 triliun. Penyebab penurunan tersebut terutama karena Perseroan memperoleh penerimaan pembayaran pinjaman diberikan dengan jumlah yang signifikan dari Rp0,80 triliun pada 2020 menjadi Rp2,09 triliun pada tahun 2021.

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi tercatat sebesar Rp337,33 miliar, yang sedikit tumbuh sebesar 4,7% dari tahun sebelumnya sebesar Rp322,32 miliar. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh peningkatan penjualan efek-efek sebesar 48,1% dibandingkan tahun 2020.

Arus Kas Neto yang (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk mendanai aktivitas pendanaan untuk tahun 2021 tercatat sebesar Rp212,62 miliar, sedangkan di tahun sebelumnya Perseroan mencatatkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2,15 triliun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembayaran kembali atas pinjaman diterima sebesar 23,3%, yang dikompensasikan dengan penurunan penerimaan jumlah pinjaman diterima dan pinjaman subordinasi masing-masing sebesar 51,3% dan 72,2%.

RASIO KEUANGAN

Rasio Keuangan Financial Ratios	2021	2020
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset Return On Assets	0,75%	0,19%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas Return On Equity	2,46%	2,01%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan Net Income Margin	1,93%	2,40%
Rasio Lancar Current Ratio	2,00x	1,42x
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liabilities to Equity Ratio	5,55x	5,74x
Rasio Liabilitas terhadap Aset Liabilities to Assets Ratio	0,85x	0,85x

Net Cash Flow Used for Operating Activities

At the end of 2021, the Company recorded the use of net cash for operating activities of Rp847.90 billion, a decrease of 70.0% from the 2020 position of Rp2.82 trillion. This happened mainly due to receipt of repayment of loans which was significantly increased from Rp0.80 trillion in 2020 to Rp2.09 trillion 2021.

Net Cash Flows Gained from Investing Activities

Net cash flow generated from investing activities was recorded at Rp337.33 billion, a slight increase of 4.7% from the previous year at Rp322.32 billion. The increase was contributed by 48.1% increase in sale of securities as compared to 2020.

Net Cash Flows (Used in)/Provided by Financing Activities

The net cash flow used for financing activities for the period ended December 31, 2021 was recorded at Rp173.94 billion, while the previous year retrieved net cash flow provided by financing activities at Rp2.15 trillion. It was due to the increment in fund borrowings repayment by 23.3%, which were compensated by the decrement of proceeds from fund borrowings and subordinated loans by 51.3% and 72.2%, respectively.

FINANCIAL RATIO

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG**Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek dan Jangka Panjang**

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek diukur dengan menggunakan beberapa pendekatan indikator rasio, antara lain rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi seluruh kewajiban.

Keterangan Information	2019	2020	2021
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio			
Rasio Liabilitas terhadap Aset Liabilities to Assets Ratio	0,83x	0,85x	0,85x
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liabilities to Equity Ratio	4,72x	5,74x	5,55x
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio			
Rasio Lancar Quick ratio	1,41x	1,42x	2,01x

Melalui uraian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021, IIF tetap sepenuhnya mampu memenuhi kewajibannya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki sebagaimana tercermin dari hasil perhitungan rasio lancar tahun 2021 sebesar 2,01x, meningkat jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,42x.

Sedangkan rasio utang terhadap total ekuitas IIF tercatat sebesar 5,55x pada tahun 2021, turun dari 5,74x pada tahun 2020. Sementara itu, nilai rasio utang terhadap aset tetap sebesar 0,85x. Hal ini menandai bahwa IIF tetap sepenuhnya solven sepanjang tahun 2021.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, beberapa klien IIF dipastikan masih mengalami penurunan kinerja sehingga berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam melunasi pinjaman.

Sejumlah mitra IIF yang bergerak di sektor jalan raya, bandara, dan pelabuhan adalah contoh portofolio yang sangat terpuak kinerjanya karena terpengaruh langsung oleh kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat oleh Pemerintah. Kondisi ini tentunya menyebabkan ketidakpastian pada iklim bisnis sehingga berdampak pada kegiatan investasi IIF sepanjang tahun ini.

Berpedoman pada POJK No. 14/POJK.05/2020 ("POJK 14/2020") yang selanjutnya diperbarui dengan POJK No. 30/POJK.05/2021 ("POJK 30/2021") tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Wabah Virus Corona 2019 bagi Lembaga Keuangan Non-Perbankan, Perseroan membantu dan memberikan solusi kepada para klien yang bisnisnya secara langsung terdampak pandemi dengan memberikan sejumlah

ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLE COLLECTIBILITY**Solvency for the Long Term and the Short Term**

The Company's ability to meet all of its long-term and short-term obligations is measured by using certain approaches to ratio indicators, including liquidity ratios and solvency ratios.

The liquidity ratio is used to measure the Company's ability to settle short-term obligations, while the solvency ratio is used to measure the ability to meet all of the Company's obligations.

In the table above, it can be concluded that in 2021, IIF remained fully capable of serving its current liabilities using its current assets, as reflected by its current ratio of 2.01x, compared with 1.42x in 2020.

Meanwhile, IIF's liabilities to total equity ratio, stood at 5.55x in 2021, an decrease from 5.74x in 2020. However, in terms of liabilities to assets ratio, the figure was remains at 0.85x. This signified that IIF remained fully solvent throughout 2021.

Receivables Collectability

In the midst of the COVID-19 pandemic, it is reasonable that some of IIF clients were not able to deliver their best performance in 2021, which impacted their ability to meet financial obligations to IIF.

Amongst IIF partners, clients engaged in the road, airport, and port sectors were the ones hardest hit by the implementation of the government's policy to limit people's mobility. As the clients represent a large portion of IIF portfolio, the unfavorable trend did impact IIF's investment activities throughout the year.

According to POJK No. 14/POJK.05/2020 which then amended through POJK No. 30/POJK.05/2021 ("POJK 30/2021") concerning Countercyclical Policies for the Impact of the 2019 Corona Virus Outbreak for Non-Banking Financial Institutions ("POJK 14/2020") as a reference, the Company has given assistance and provided solutions to some of its debtors whose businesses were directly affected by the pandemic

kelonggaran persyaratan pembayaran pinjaman. Di saat yang bersamaan, Perseroan tetap melakukan *monitoring* ketat terhadap kualitas pembayaran para klien untuk mencegah terjadinya gagal bayar.

Komitmen Perseroan dalam menjaga kualitas pembiayaannya tercermin dari nilai *Non-Performing Loan* (NPL) bersih tahun 2021 yang tercatat sebesar 0,36%, relatif stabil dibandingkan NPL bersih tahun 2020 sebesar 0,38%. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan tetap menjaga dan mempertahankan kualitas dari potensi pemburukan atas keseluruhan portofolio.

Sesuai dengan arahan POJK 14/2020, per 31 Desember 2021, IIF telah menerima dan menyetujui permintaan relaksasi berupa penangguhan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman terhadap 7 klien, dengan total *outstanding* pembiayaan mencapai Rp2,534 miliar atau 20.8% dari total aset investasi IIF tahun 2021 sebesar Rp12,209 miliar.

STRUKTUR MODAL

Kebijakan Struktur Modal

Pengelolaan risiko modal yang dilakukan IIF bertujuan untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha dan memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi struktur utang dan ekuitas. Manajemen melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap struktur modal Perseroan dengan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Perseroan mengelola tingkat permodalan untuk memastikan kemampuannya dalam melanjutkan keberlangsungan operasi.

Komposisi Permodalan IIF

Struktur modal Perseroan terdiri dari alokasi modal sendiri (ekuitas) dan liabilitas yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional dan pengembangan usaha ke depan. Pada tabel berikut dapat dilihat komposisi permodalan IIF selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Keterangan Information	dalam jutaan Rupiah/in Rp millions)					
	2019	Komposisi Composition	2020	Komposisi Composition	2021	Kontribusi Contribution
Liabilitas Liabilities	10.158.501	82,5%	12.504.112	85,1%	12.329.619	84,7%
Ekuitas Equity	2.152.559	17,5%	2.180.260	14,9%	2.221.508	15,3%
Jumlah Modal Total Capital	12.311.060	100,0%	14.684.372	100,0%	14.551.127	100,0%
Rasio Hutang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	4,72x		5,63x		5,47x	

Pada tahun 2021, struktur permodalan Perseroan terdiri dari 84,7% liabilitas dan 15,3% ekuitas. Komposisi tersebut mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yang terdiri dari 85,1% liabilitas dan 14,9% ekuitas. Perubahan tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp46,13 miliar atau setara 31,4%, dan kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas sebesar Rp52,58 miliar atau setara 56,1%. Hal ini diimbangi dengan pengakuan kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai wajar sebesar Rp43,14 miliar di tahun 2021, dari sebelumnya membukukan keuntungan kumulatif sebesar Rp25,65 miliar.

with the offering of leniency for in the loan payment terms. At the same time, the Company continued to closely monitor the quality of client instalments to prevent payment failures.

The Company's commitment to keep the quality of its financing is reflected in the net Non-Performing Loan (NPL) in 2021 which was recorded at 0.36%, relatively stable with the net NPL in 2020 at 0.38%. This shows that the Company has continued to maintain the quality of its entire portfolio and keep it from potential deterioration.

In accordance with the directives of POJK 14/2020, as of December 31, 2021, IIF had received and approved clients' request for relaxation in the form of deferral of payment of interest and/or loan principal to 7 debtors, with a total outstanding financing of Rp2,534 billion or 20.8% of IIF's total investment assets in 2021 that reached Rp12,209 billion.

CAPITAL STRUCTURE

Capital Structure Policy

The capital risk management carried out by IIF aims to ensure the Company's ability to maintain business continuity and improve shareholders' value through the optimization of debt and equity structure. IIF management closely monitors and reviews the Company's capital structure by considering costs of capital and associated risks. The Company manages capital level to ensure that it will be able to continue as a going concern.

IIF Capital Composition

The Company's capital structure consists of the allocation of own capital (equity) and liabilities which are used to fund operational activities and future business development. The following table shows the composition of IIF's capital for the last 3 (three) years:

In 2021, the Company's capital structure consists of 84.7% liabilities and 15.3% equity. The composition has changed from the previous year which consisted of 85.1% liabilities and 14.9% equity. The change is caused by the increase in retained earnings by Rp46.13 billion or 31.4%, and drop in cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges by Rp52.58 billion or 56.1%. This was partially offset by recognition of cumulative loss on derivative instrument for fair value hedges of Rp43.14 billion in 2021 which previously in cumulative gain position of Rp25.65 billion.

Dengan adanya perubahan struktur modal di tahun 2021, maka nilai *Debt to Equity Ratio* turut mengalami perubahan dari sebesar 5,63x pada 2020 menjadi 5,47x di tahun 2021. Manajemen telah menganalisis perubahan rasio tersebut dan menyimpulkan bahwa kemampuan IIF meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan kami meyakini dapat terus melanjutkan kelangsungan usaha di masa depan.

Dasar Pemilihan Struktur Modal

Kebijakan dan struktur permodalan IIF dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2021, IIF tidak melakukan ikatan material untuk investasi barang modal.

INVESTASI BARANG MODAL TAHUN 2021

Selama tahun 2021, Perseroan melakukan belanja investasi barang modal berupa aset tetap. Berikut ini adalah uraian belanja barang modal dengan nominal diatas Rp500juta:

Jenis Investasi Barang Modal Types of Capital Goods Investment	Tujuan Objectives	Nilai Investasi Total Investment
SYSTEM IMPLEMENTATION (K2, CORPORATE & AX DWH)	Implementation of K2 System enhancement or new to support more automation and digitalization of business process, and Data Warehouse development for improved management information system	Rp886,41
PURESTORAGE	Additional Storage to support business growth in Data Management	Rp605

dalam jutaan Rupiah/in Rp millions)

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sepanjang tahun 2021, tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, selain yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

PROSPEK USAHA

Pandemi COVID-19 merupakan sebuah kejadian luar biasa bagi dunia yang telah memberikan dampak mendalam pada seluruh aspek kehidupan. Tingkat ketidakpastian akibat pandemi sangat tinggi karena setiap negara ataupun setiap sektor industri memiliki ketahanan yang berbeda-beda dalam merespons tantangan yang muncul. Hal inilah yang menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali mengalami perubahan dan cenderung terkoreksi ke bawah.

Sepanjang 2021, sinyal pemulihan ekonomi Indonesia terus menunjukkan tanda-tanda perbaikan meskipun pada mode yang terbatas. Hal ini tercermin dari perkembangan beberapa indikator ekonomi dan bisnis yang terus membaik (per Desember 2021), seperti penjualan eceran, ekspektasi konsumen, PMI Manufaktur, dan ekspor.

Pemerintah optimis akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut hingga tahun 2022 mendatang, didorong oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, kinerja ekspor yang tetap kuat, pembukaan sektor-sektor prioritas yang semakin luas, dan stimulus kebijakan Percepatan Ekonomi Nasional (PEN) yang berlanjut. Berdasarkan asumsi APBN, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 mendatang sebesar 5.2% (yoy), membaik dibandingkan pertumbuhan tahun 2021.

With the change in capital structure in 2021, the Debt-to-Equity Ratio also has changed from 5.63x in 2020 to 5.47x in 2021. The Management has analysed the change in the ratio and concluded that IIF's ability to manage its debt is improving compare to prior year and we believe that we are able to continue as going concern.

Basis for Selecting Capital Structure

IIF's policies and capital structure are carried out with utmost prudence and have been referred to applicable rules and regulations.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURE

Throughout 2021, the Company did not enter into any material commitments for capital goods investment.

CAPITAL EXPENDITURE IN 2021

The Company makes capital expenditures in the form of fixed assets. The following is a description of IIF's capital expenditures for 2021:

FACTS AND MATERIAL INFORMATION AND SUBSEQUENT TO FINANCIAL STATEMENT DATE

Throughout 2021, there were no material information and facts occurring after the date of the financial statements other than those disclosed in the audited financial statement for the year ending on December 31, 2021.

BUSINESS PROSPECT

The COVID-19 pandemic was a global event so extraordinary it had very profound impacts on all aspects of our life. The pandemic brought high level of uncertainty since not all countries or all sectors had the same level of resiliency in terms of responding to the pandemic-induced challenges. The different adapting levels of countries is behind the frequent changes in economic growth projections and why they were so prone to downward corrections.

Throughout 2021, the process of Indonesia's economic recovery continued to show signs of improvement, albeit in a limited fashion. This is reflected in the continuously improving development of several economic and business indicators (as of December 2021), such as retail sales, consumer expectations, Manufacturing PMI, and exports.

The government is optimistic about sustainable acceleration of Indonesia's economic recovery until 2022, to be driven by increased mobility in line with accelerated vaccinations, strong export performance, wider opening of priority sectors, and continued policy stimulus. According to the 2022 State Budget assumption, the government projects that national economic growth in 2022 will be 5.2% (yoy), improving compared to growth in 2021.

Namun demikian, optimisme pertumbuhan tersebut tetap berpotensi mengalami revisi ke bawah seiring dengan ditemukannya kasus COVID-19 berjenis varian virus baru - Omicron di Indonesia. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 akan berada di kisaran 4,4% (yoy) atau turun 1,5% dari proyeksi ekonomi tahun ini yang sebelumnya ditargetkan sebesar 5,9% (yoy). Dengan adanya kemunculan varian Omicron, maka semua negara masih dihadapkan pada ketidakpastian tinggi dan gerak laju pemulihan semakin berat karena kemampuan satu negara dengan yang lain untuk pulih sangat berbeda.

Tantangan lain yang juga diprediksi akan mewarnai tahun 2022 yang akan datang adalah meningkatnya laju inflasi global karena terganggunya rantai pasokan dunia. Kondisi ini diyakini akan mendorong para pemangku kebijakan moneter untuk mengambil langkah *tight monetary policy* guna mengendalikan laju inflasi. Apabila langkah kebijakan tersebut diambil maka disinyalir akan berdampak pada rendahnya likuiditas yang tersedia bagi *emerging markets* seperti Indonesia.

Untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang berpotensi terjadi di tahun 2022, Pemerintah telah menyiapkan bauran kebijakan stimulus fiskal dan moneter untuk mempersiapkan fundamental dan ketahanan ekonomi yang kuat dalam menghadapi berbagai tekanan.

Proyeksi positif yang disampaikan Pemerintah akan dijadikan sebagai landasan bagi IIF untuk menyusun prospek usaha tahun 2022. Di saat yang bersamaan, IIF juga akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap faktor-faktor eksternal yang terjadi dan memperhatikan dampaknya terhadap kegiatan usaha IIF agar selalu siap dalam memitigasi potensi risiko-risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu di kemudian hari.

Berkaitan dengan hal ini, secara khusus, IIF juga akan menyoroti dampak perang Ukraina - Rusia terhadap sektor ekonomi yang diyakini akan menghambat fase pemulihan ekonomi global ke depan.

Jasa Advisory

Direktorat Advisory terus mengintensifkan berbagai upaya untuk meningkatkan kontribusi pendapatan yang diperoleh dari jasa konsultasi IIF. Untuk itu, IIF selalu mempromosikan jasa *Advisory* yang dimiliki kepada semua klien baik sebelum proyek berlangsung ataupun saat proyek infrastruktur sudah dilakukan. Adapun lingkup jasa konsultasi yang kami tawarkan mulai dari penyiapan proyek hingga transaksi daur ulang aset (*asset recycling*).

Saat ini IIF tengah memperluas layanan jasa konsultasinya, yakni mencakup:

- *Project Development Facility* (PDF), untuk persiapan proyek KPBU;
- Proyek penguasaan langsung Pemerintah kepada BUMN/BUMD;
- Jasa konsultan sosial & lingkungan kepada Pemerintah, BUMN/BUMD, maupun klien swasta;
- Badan usaha swasta yang mengembangkan proyek infrastruktur baik dalam skema *solicited* maupun *unsolicited*; serta
- Proyek kerja sama dan bantuan teknis yang disponsori oleh badan multilateral dan bilateral internasional, termasuk implementasi *Green Climate Fund* (GCF).

However, overhanging this optimism was a potential downward correction of economic figures as cases of new Omicron variant were detected in Indonesia. The International Monetary Fund (IMF) predicts the global economic growth in 2022 to range at 4.4% (yoy) or down 1.5% from the initial prediction of 5.9% (yoy). The possible emergence of the Omicron variant will make all countries under threat of high uncertainty with the pace of recovery will be pinched as the ability of one country over another to recover from such likely threat is very different.

Another challenge that is predicted to also mark the upcoming year 2022 is the increasing rate of global inflation due to disruptions to the world supply chains. This highly possible condition would likely prompt monetary policy makers to take tight monetary policy measures in order to control rising inflation at manageable level. Should the policy makers take such policy, Indonesia, like much of the emerging markets, will experience lower liquidity.

To anticipate the many uncertainties that could potentially occur in 2022, the government has prepared a mix of fiscal and monetary stimulus policies to lay strong economic fundamentals and resilience in the face of various pressures.

The positive outlook presented by the government will serve as the basis for IIF to formulate its 2022 business prospect. At the same time, IIF will also continue to conduct periodic evaluations of external factors that may occur and anticipate their possible impact on IIF's business activities. It is in this way that IIF remains ready to mitigate potential risks that may arise at any time in the future.

In this regard, in particular, IIF will also highlight the impact of the Ukraine-Russia war on economic sectors which are believed to hamper the global economic recovery phase in the future.

Advisory Services

The Advisory Directorate will intensify efforts to increase its revenue contribution generated from IIF's consulting services. For this reason, IIF continuously promotes its Advisory services to all clients, both prior to and after project commencement. The scope of consulting services we offer ranges from project preparation to asset recycling transactions.

IIF is currently expanding its consulting services, which include:

- *Project Development Facility* (PDF), for the preparation of PPP projects;
- Government direct assignment projects to SOE/ROE;
- Social & environmental consulting services to the Government, SOE/ROE, and private clients;
- Private companies that develop infrastructure projects in both solicited and unsolicited schemes; as well as
- Cooperation projects and technical assistance sponsored by international multilateral and bilateral agencies, e.g. e *Green Climate Fund* (GCF).

Dalam rangka memperluas kapasitas bisnisnya, Direktorat Advisory terus bertumbuh secara organik sambil mejajaki struktur *co-advisory* dengan perusahaan keuangan/teknis lainnya.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2021, SERTA PROYEKSI TAHUN 2022

Setiap tahun, Perseroan menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan yang hendak dicapai oleh masing-masing unit kerja dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan dinamika yang sedang terjadi.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat perbandingan pencapaian beberapa target keuangan IIF untuk tahun buku 2021 dan realisasinya di akhir tahun, serta proyeksi tahun 2022 mendatang, antara lain sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah/in Rp millions)

Keterangan Information	2021			2022
	Target	Pencapaian	Realisasi (%)	Proyeksi
Total Aset Total Assets	16.128,24	14.551,13	90,2%	18.439,35
Total Liabilitas Total Liabilities	13.954,14	12.329,62	88,4%	14.064,97
Total Ekuitas Total Equity	2.174,10	2.221,51	102,1%	4.374,38
Pendapatan Revenues	1.188,67	951,10	80,0%	1.165,97
Laba Bersih Net Income	81,41	53,03	65,1%	62,33
Rasio Utang Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	6,26x	5,47x	87,5%	3,17x

Selain diatas, IIF juga melakukan inisiatif untuk melakukan *collaborative business synergy* antara Direktorat Investasi dan Direktorat Advisory untuk memberikan solusi kepada proyek/klien infrastruktur. Beberapa proyek tersebut memberikan mandat kepada Direktorat Advisory sekaligus menjadi klien dari Direktorat Investasi.

Dari aspek S&E, Perseroan juga melakukan upaya meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan atas pembiayaan proyek yang berkelanjutan, melalui:

- Menyelenggarakan webinar/berpartisipasi sebagai narasumber dalam berbagai acara;
- Melakukan konsultasi publik atas perubahan dokumen *Social and Environmental Management System (SEMS)* IIF versi tahun 2019;
- Terlibat dalam diskusi terkait penyusunan kerangka ESG di proyek-proyek Kementerian Keuangan;
- Berpartisipasi dalam diskusi terkait penyusunan petunjuk teknis POJK Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Keuangan Non-Bank;
- Melakukan diskusi bersama pelaksana proyek, Masyarakat terdampak, serta konsultasi kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Arkeologi di Sulawesi Selatan.

To expand its business capacity, the Advisory Directorate will continue to grow organically while exploring *co-advisory* structures with other financial/technical companies.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION IN 2021, AND THE PROJECTIONS FOR 2022

Every year, the Company prepares and determines an annual work plan for each of its work units to achieve, taking into account external factors and the recent industry dynamics.

In the following table, we can see a comparison of the achievements of several IIF financial targets for the 2021 financial year and their realization at the end of the year, as well as the projections for 2022 as follows:

IIF also initiated a collaborative business synergy between the Investment Directorate and the Advisory Directorate to provide solutions to infrastructure projects/clients. Some of the projects who are already clients of our Investment Directorate have given mandates to our Advisory Directorate to give them advisory services.

From the S&E aspect, the Company also makes efforts to enhance stakeholder awareness of sustainable project financing, by:

- Organizing webinars/participating as keynote speakers in relevant events;
- Conducting public consultation on changes to the 2019 version of the IIF Social and Environmental Management System (SEMS) document;
- Engaging in discussions on the development of the ESG framework in Ministry of Finance projects;
- Participating in discussions about the preparation of POJK Sustainable Finance technical guidelines for Non-Bank Financial Institutions;
- Having discussions with project implementers, affected communities, and consulting projects with the Cultural Conservation Preservation Center and the Archaeological Center in South Sulawesi.

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Sebagai katalis pembiayaan infrastruktur di Indonesia, IIF menggandeng pihak swasta untuk turut serta berpartisipasi dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

Untuk itu, strategi pemasaran IIF dititikberatkan pada relasi dan hubungan baik yang terjalin bersama para pemangku kepentingan, baik dengan bank lokal, bank asing, regulator, ataupun pihak lainnya. Pendanaan yang diberikan IIF kepada para pegiat infrastruktur wajib berlandaskan pada 8 (delapan) prinsip S&E (sosial & lingkungan) IIF sebagai syarat mutlak yang harus terpenuhi. Bagi Perseroan, kepatuhan terhadap aspek-aspek ESG merupakan bagian dari strategi *branding* bahwa IIF adalah pelopor dan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan nilai-nilai keberlanjutan secara konsisten dalam setiap proses bisnisnya.

Dalam membangun *brand awareness* dan *network* bersama para mitra, Perseroan berpartisipasi aktif mengikuti pameran dan konferensi infrastruktur berskala internasional, serta menjadi pembicara atau narasumber di seminar-seminar infrastruktur, dan tergabung sebagai anggota pada sejumlah asosiasi industri yang diakui secara global dan nasional. Selain itu, Perseroan juga secara rutin menginisiasi dan berpartisipasi pada program dialog bersama Pemerintah dan seluruh otoritas terkait, khususnya yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan OJK.

Melalui keterlibatan aktif IIF pada acara-acara infrastruktur serta sinergi yang terjalin erat dengan berbagai pihak, IIF dapat terus mengikuti perkembangan terkini terkait regulasi terbaru dan memiliki kesiapan untuk menawarkan keahliannya kapanpun diperlukan, sejalan dengan kebijakan dan keputusan investasi strategis dari Pemerintah.

Pangsa Pasar

Saat ini, portofolio pembiayaan IIF didominasi oleh proyek infrastruktur di bidang transportasi, telekomunikasi, air, minyak dan gas, dan energi terbarukan. Namun sesuai mandat baru yang diberikan Pemerintah, target pasar IIF diperluas ke sektor infrastruktur sosial, seperti pembangunan rumah sakit dan sekolah.

Menyikapi perluasan penugasan tersebut, maka prospek usaha IIF ke depan masih sangat potensial untuk berkembang terutama mengingat pembangunan infrastruktur di Indonesia yang belum merata dari Sabang sampai Merauke, khususnya di wilayah 3T.

IIF memiliki keunggulan kompetitif berupa produk investasi dan jasa *advisory* termasuk juga jasa *advisory* sosial dan lingkungan. Hal inilah yang menempatkan IIF berada pada posisi yang berbeda dari kompetitor lainnya, di mana produk dan jasa yang ditawarkan IIF dapat memenuhi seluruh rantai pengembangan infrastruktur.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Pembagian Dividen

Kebijakan pembagian dividen di Perseroan ditentukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

MARKETING ASPECT

Marketing Strategy

As a catalyst in financing national infrastructure development, IIF cooperates with the private sector to participate in developing sustainable infrastructure in Indonesia.

To that end, IIF has had its marketing strategy focused on building a healthy relation with all stakeholders, whether it is with the local banks, foreign banks, regulators, or other parties.

The funding provided by IIF to players in infrastructure must be based on its 8 (eight) S&E (social & environmental) principles as an unconditional requirement. For the Company, compliance with ESG aspects is part of its branding strategy that IIF is a pioneer and the only company in Indonesia that has consistently applied sustainability values in every business process.

In order to build brand awareness and network, the Company engages actively in international infrastructure exhibitions and conferences, becomes keynote speakers at infrastructure seminars, and joins globally and nationally recognized industry associations. The Company also routinely initiates and participates in dialogues with the government and all relevant authorities, particularly the Investment Coordinating Board (BKPM) and OJK.

Through its active involvement in infrastructure events with strong synergies with various parties, IIF is able to keep abreast of the latest regulatory developments and is ready to offer its expertise whenever needed, in line with government policies and strategic investment decisions.

Market Share

Currently, IIF's financing portfolio is dominated by infrastructure projects in the transportation, telecommunication, water, oil and gas, and renewable energy sectors. However, under the government's new mandate, IIF is allowed to finance social infrastructure i.e. hospital and school constructions.

In response to the expansion of the assignment, IIF sees a stronger outlook in the future, especially considering the currently uneven development of infrastructure in Indonesia from Sabang to Merauke, especially in the 3T region.

IIF has competitive advantages in the form of investment products and advisory services including social and environmental advisory services. This constitutes part of IIF traits that distinguishes it from other competitors, where the products and services offered by IIF satisfy the entire need of infrastructure development chain.

DIVIDEND POLICY

Dividend Distribution Policy

The dividend distribution policy in the Company is determined through the Annual General Meeting of Shareholders mechanism.

Pembagian Dividen dalam 2 (dua) Tahun Terakhir

Tahun 2021

Sesuai hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada Kamis, 22 April 2021, Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp4.251.015.412 atau 10,0% dari laba bersih tahun 2020. Perseroan tidak mengalokasikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Tahun 2020

Demikian halnya dengan pembagian dividen tahun 2020, hasil keputusan RUPST 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2020 menyatakan bahwa IIF tidak mengalokasikan dana cadangan, dividen, atau tujuan lainnya untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Sampai dengan akhir 2021, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP).

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Tahun 2019

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp1,5 triliun. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 19 Desember 2019. Dana yang diperoleh dari emisi obligasi ini digunakan untuk membayar sebagian utang pokok pinjaman jangka panjang dan ekspansi kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan.

Sisa dana hasil emisi obligasi per tanggal 31 Desember 2021 adalah nihil. Laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi tahun 2019 telah disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. Ref: S.410/II/IIF/2020 tanggal 1 Juli 2020.

Tahun 2020

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 sebesar Rp1,5 triliun. Obligasi ini secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Oktober 2020. Dana yang diperoleh dari emisi obligasi ini digunakan untuk membayar sebagian utang pokok obligasi dan ekspansi kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan.

Sisa dana hasil emisi obligasi per tanggal 31 Desember 2021 adalah nihil. Laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi tahun 2020 telah disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. Ref: S.001/II/IIF/202 tanggal 4 Januari 2021.

Dividend Distribution in the Last 2 (two) Years

2021

In accordance with the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) held on Thursday, April 22 2021. The Company allocated reserve funds of Rp4,251,015,412 or 10.0% of 2020's net profit. The Company did not allocate dividends for the financial year ended on December 31, 2020.

2020

The same as the distribution of dividends in 2020, the resolutions of the 2020 AGMS held on March 19, 2020 stated that IIF did not allocate reserve funds, dividends, or other purposes for the financial year ended December 31, 2019.

EMPLOYEE OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Until the end of 2021, the Company had not had share ownership program by employees and/or management (ESOP/MSOP).

USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

2019

The Company issued Indonesia Infrastructure Finance 2019 Sustainable Bond I Phase I Year of Rp1.5 trillion. The bond was listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on December 19, 2019. The proceeds from the bond issuance were used to pay part of the principal debt of the bonds and finance infrastructure projects.

The remaining proceeds from the bond issuance as of December 31, 2021 are nil. The report on the realization of the use of proceeds from the 2019 Bond Public Offering has been submitted by the Company to the Financial Services Authority through letter No. Ref: S.410/II/IIF/2020 tanggal 1 Juli 2020.

2020

The Company issued Indonesia Infrastructure Finance Sustainable Bond I Phase II Year 2020 of Rp1.5 trillion. The bond was officially listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on October 22, 2020. The proceeds from the issuance of these bonds were used to pay off part of the bond's principal debt and finance infrastructure projects.

The remaining proceeds from the bond issuance as of December 31, 2021 are nil. The report on the realization of the use of proceeds from the 2020 Bond Public Offering has been submitted by the Company to the Financial Services Authority through letter No. Ref: S.001/II/IIF/202 dated January 4, 2021.

Penawaran Umum Public Offering	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Total Proceeds			Realisasi Penggunaan Dana Use of Proceeds			Sisa Dana Remaining Proceeds		
		Jumlah Hasil Penawaran Umum Total Public Offering Proceeds	Biaya Penawaran Umum Public Offering Fees	Nilai Bersih Net Proceeds	Pembayaran Kembali atas Sebagian Utang Repayment of Certain Debts	Pembiayaan Proyek Infrastruktur Financing of Infrastructure Projects	Total	Pembayaran Kembali atas Sebagian Utang Repayment of Certain Debts	Pembiayaan Proyek Infrastruktur Financing of Infrastructure Projects	Total
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Shelf Registration Bonds I Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019	19 Desember 2019	1.500,00	6,57	1.493,43	1.000	493,43	1.493,43	-	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 Shelf Registration Bonds I Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020	22 Oktober 2020	1.500,00	3,32	1.496,67	800	696,67	1.496,67	-	-	-

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI

Pada tahun 2021, IIF tidak mendapati adanya transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangannya.

MATERIAL INFORMATION ON TRANSACTION THAT CONTAINS CONFLICT OF INTEREST AND/OR AFFILIATED TRANSACTION

In 2021, IIF did not have any material transactions containing conflict of interest that have significant impact on its financial statements.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Pada tahun 2021, IIF tidak mendapati adanya informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal.

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

In 2021, IIF did not have any material information regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, and debt/capital restructuring.

PENGARUH PERUBAHAN REGULASI PEMERINTAH TERHADAP PERSEROAN

Pada tahun 2021, Pemerintah melalui lembaga pengawasannya, OJK, menerbitkan beberapa peraturan khusus untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Untuk mematuhi, Perseroan telah menyiapkan laporan yang lebih rinci dan membentuk unit kerja khusus untuk setiap peraturan guna memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang ada dengan tepat.

THE IMPACT OF CHANGES OF GOVERNMENT REGULATION THE COMPANY

In 2021, Government through its supervision institution, OJK, issued several regulations specifically for *Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur*. To comply, Company has prepared extensive reports and developed specific working group for each of regulation to achieve regulatory compliance appropriately.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat uraian peraturan yang terbit di tahun 2021, serta pengaruhnya terhadap Perseroan, yaitu:

In the following table, we can see a detail of the regulations issued in 2021, as well as the effect to the Company as follows:

No.	Peraturan terkait Relevant regulations	Latar Belakang Peraturan Regulatory Background	Pengaruh terhadap Perseroan The Effect to the Company
1	Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan No. 3/SEOJK.03/2021 ("SEOJK 3/2021")	SEOJK 3/2021 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049).	Perusahaan wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai informasi keuangan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan ("SLIK").

No.	Peraturan terkait Relevant regulations	Latar Belakang Peraturan Regulatory Background	Pengaruh terhadap Perseroan The Effect to the Company
	Concerning Reporting and Requesting Debtor Information through the Financial Information Service System No. 3/SEOJK.03/2021 ("SEOJK 3/2021")	SEOJK 3/2021 is a mandate of Regulation No.18/POJK.03/2017 concerning Reporting and Requesting Debtor Information through the Financial Information Service System (State Gazette Republic of Indonesia Year 2017 No. 93, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6049).	The Company is required to submit monthly report regarding Debtor's financial information through Financial Information Service System ("SLIK").
2	Peraturan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank No. 4/POJK.05/2021 ("POJK 4/2021") OJK Regulation Concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology for Non-Bank Financial Services Institution No. 4/POJK.05/2021 ("POJK 4/2021")	Mengidentifikasi dan mengelola setiap risiko dari penerapan teknologi informasi di Perseroan. To identify and manage any risks from the implementation of information technology in the Company.	Perseroan wajib menerapkan pemantauan manajemen risiko Teknologi Informasi secara komprehensif. The Company is required to implement comprehensive monitoring risk management of Information Technology.
3	Surat Edaran tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank No. 22/SEOJK.05/2021 ("SEOJK 22/2021") Circular Letter Concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology for Non-Bank Financial Services Institution No. 22/SEOJK.05/2021 ("SEOJK 22/2021")	SEOJK 21/2022 merupakan amanat dari Pasal 33 Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6668). SEOJK 21/2022 is a mandate of Article 33 of the OJK Regulation Number 4/POJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management in Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 No. 78, Supplement State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6668).	Perseroan memperkuat peran Komite Pengarah Teknologi Informasi untuk memantau pelaksanaan Teknologi Informasi Perseroan. Disertai dengan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi yang memadai termasuk proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan teknologi. Selanjutnya, Perseroan akan menempatkan pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di Indonesia. The Company is to strengthening the role of Information Technology Steering Committee to monitor the implementation of Company's Information Technology. Accompanied by adequate policies and procedures for the use of information technology including process of identifying, measuring, controlling and monitoring the risks of using technology. Further, Company shall place data centers and/or disaster recovery centers in Indonesia.
4	Surat Edaran tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. No. 26/SEOJK.05/2021 ("SEOJK 26/2021") Circular Letter Concerning Monthly Reporting for Non-Bank Financial Services Institution No. 26/SEOJK.05/2021 ("SEOJK 26/2021")	SEOJK 26/2021 merupakan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 POJK 3/2013. SEOJK 26/2021 is a mandate of Article 2 paragraph (6), Article 4 paragraph (6), and Article 10 of POJK 3/2013.	Perusahaan wajib menyampaikan pelaporan bulanan kepada OJK berupa: • Laporan bulanan, khususnya terkait dengan optimalisasi data untuk keperluan <i>monitoring</i> ; • Penyelesaian pelaporan disampaikan melalui media sistem jaringan komunikasi data OJK; dan • Pengisian dan penambahan pelaporan dalam formulir OJK guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan OJK No 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Company shall deliver monthly reporting to OJK in a form of: • The monthly report, particularly related to optimize data for monitoring purposes; • Completion of reporting delivers through OJK's media system data communication network; and • Filling out and adding reporting within OJK's forms in order to ensure compliance with the provisions of OJK Regulation No 46/POJK.05/2020 concerning Infrastructure Financing Company.
5	Surat Edaran tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur No. 27/SEOJK.05/2021 ("SEOJK 27/2021") Circular Letter Concerning Assessment of Soundness Level of Infrastructure Financing Company No. 27/SEOJK.05/2021 ("SEOJK 27/2021")	SEOJK 27/2021 merupakan amanat Pasal 29 ayat (6) POJK No. 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. SEOJK 27/2021 is a mandate of Article 29 paragraph (6) of the POJK No. 46/POJK.05/2020 concerning Infrastructure Financing Company.	Perseroan wajib menyampaikan tingkat penilaian kesehatan tahunan kepada OJK sesuai dengan pedoman khusus OJK. Prinsip umum dalam menilai tingkat kesehatan berorientasi pada risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, serta <i>self-assessment</i> yang komprehensif dan terstruktur. Company shall submit to OJK annual assessment of soundness within specific OJK's guidelines. General principles in assessing the level of soundness is oriented to risk, proportionality, materiality and significance, as well as comprehensive and structured self-assessment.

PERUBAHAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TAHUN 2021

Efektif 1 Januari 2021, Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") revisi yang relevan untuk Perseroan, sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan, Amandemen PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amandemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan,

CHANGES IN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS 2021

Effective on January 1, 2021, the Company has applied revised Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") which are relevant to the Company, as follows:

- Amendments of SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements";
- Amendments of SFAS No. 71, "Financial Instruments, Amendments to SFAS No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, Amendments to SFAS No. 60: Financial Instruments:

dan Amandemen PSAK No. 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2".

Disclosures, and Amendments to SFAS No. 73: Leases on Interest Rate Benchmark Reform - Stage 2".

KETAATAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

Sebagai bentuk transparansi informasi IIF terkait kepatuhannya sebagai wajib pajak baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak, maka pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Description	dalam jutaan Rupiah/in Rp millions)		
	2019	2020	2021
Pph Badan Corporate Income Tax	104.400.006	231.386.286	84.284.432
Pajak penghasilan karyawan (PPh 21/26) Employee Income Tax (PPh 21/26)	1.227.146.508	1.224.617.352	1.246.373.460

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha di Tahun 2021

Manajemen secara berkala melakukan diskusi dan analisis mendalam mengenai hal-hal yang berpotensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha IIF di masa depan. Pada tahun 2021, aktivitas ekonomi dan lingkungan usaha masih sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19 di mana banyak perencanaan, investasi dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang menjadi terhambat, serta dengan hampir seluruh sektor infrastruktur juga menjadi terhambat dari sisi pertumbuhan bisnis dan mempertahankan kondisi keuangan yang stabil. Walaupun demikian, kondisi makro sudah berangsur pulih dengan gencarnya proses distribusi & vaksinasi kepada seluruh golongan masyarakat sejak awal 2021, pembukaan atau relaksasi PPKM mulai dari Q4-2020, dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berkelanjutan dari pemerintah termasuk beberapa program subsidi untuk bidang usaha serta masyarakat yang terdampak langsung, khususnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dari industri keuangan, OJK sebagai otoritas di bidang keuangan telah melakukan upaya maksimal untuk membendung pemburukan kondisi keuangan di pasar dengan meluncurkan skema restrukturisasi utang yang melibatkan lembaga keuangan, yang mencakup bank dan perusahaan pembiayaan, termasuk Perusahaan, pada tahun 2020, yang sudah diperpanjang dengan peraturan yang terakhir POJK no. 30/POJK.05/2021 dan berlaku sampai 17 April 2023. Melalui restrukturisasi ini, debitur-debitur yang usahanya mengalami kesulitan atau kontraksi akibat COVID-19 mendapatkan kelonggaran dalam pelunasan utang mereka sehingga likuiditas mereka dapat terjaga.

Dalam kondisi yang dinamis, perseroan tetap memastikan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan dengan menerapkan manajemen yang lebih ketat dalam meningkatkan portfolio yang berkualitas bagus dan fokus kepada sektor-sektor yang paling tidak terdampak oleh COVID-19.

COMPLIANCE AS A TAXPAYER

As a form of transparency of IIF information regarding its compliance as a taxpayer both in terms of tax payment and reporting, the table below shows that the Company has fulfilled all of its tax obligations for the last 3 (three) years with the following details:

INFORMATION ON BUSINESS SUSTAINABILITY

Potentially Significant Impact on Business Continuity in 2021

The Management regularly conducts in-depth discussions and analysis on matters that have the potential to have significant impacts on IIF's business continuity in the future. In 2021, economic activity and the business environment were still severely affected by the COVID-19 pandemic with many planning, investment and implementation of infrastructure projects hampered and with almost all infrastructure sectors also delayed in terms of business growth and maintaining stable financial condition. However, macro conditions were swinging back to recovery after the government began intensifying the distribution & vaccination process to all community groups from early 2021 which still lasted until now, opened or relaxed PPKM in Q4-2020 and provided several subsidy programs for businesses and communities who were directly affected, especially those whose employment were terminated.

In the financial industry, OJK as the financial authority has made all the necessary efforts to keep the market financial landscape from deteriorating with the by launch of debt restructuring scheme that involved financial institutions in 2021, which included banks and finance companies - the Company included -, which has been extended under the last POJK regulation No.30/POJK.05/2021 until April 17, 2023. Through this restructuring, debtors whose businesses are experiencing difficulties or contractions due to COVID-19 were given a more convenient scheme of debt repayment in order for the companies to maintain a healthy level of liquidity.

In this very dynamic time, the company continued to ensure sustainable business continuity by implementing stricter management to improve the quality of its financing portfolio and lay the focus on least affected sectors.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

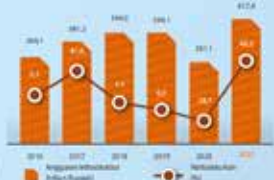
Corporate Governance

Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan	140	Dewan Komisaris	156	Organ Pendukung Direksi	190
Legal Basis of Corporate Governance Implementation		Board of Commissioners		BoD Supporting Organs	
Prinsip-Prinsip GCG dan Penerapannya	143	Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Tahun 2021	162	Sekretaris Perusahaan	207
GCG Principles and Its Implementation		BoC Competence Development Program for 2021		Corporate Secretary	
Struktur dan Mekanisme GCG	144	Sesi Induksi bagi Komisaris Baru	163	Unit Audit Internal	208
GCG Structure and Mechanism		Induction Session of New Commissioners		Internal Audit Unit	
Rapat Umum Pemegang Saham	145	Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya	163	Akuntan Publik	213
General Meeting of Shareholders		Assessment of Performance of The Committees Under BoC and The Basis of Assessment		Public Accountant	
Direksi	147	Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris	163	Sistem Pengendalian Internal	215
Board of Directors		BoD-BoC Joint Meetings		Internal Control System	
Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2021	154	Komisaris Independen	164	Manajemen Risiko	217
Report of The Implementation of The BoD Duties In 2021		Independent Commissioner		Risk Management	
Program Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2021	154	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	165	Perkara Penting Tahun 2021	227
Board of Directors' Competence Development Program In 2021		Diversity of Composition of The BoC and BoD		Important Legal Cases in 2021	
Sesi Induksi bagi Direktur Baru tahun 2021	155	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi	168	Sanksi Administratif	227
Induction Session of New Director in 2021		Performance Assessment of The BoC and BoD		Administrative Sanction	
Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya	155	Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	170	Akses Informasi dan Data Perseroan	227
Assessment of The Committees Under The BoD and The Basis of Assessment		BoC and BoD Remuneration		Access to Company Information and Data	
Penilaian Direksi terkait Penilaian atas Kinerja UAI dan Kinerja Direktorat Manajemen Risiko Tahun 2021	155	Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali	171	Kode Etik dan Budaya Perseroan	229
BoD Assessment on the Assessment of the Performance of the Internal Audit Unit (UAI) and the Risk Management Directorate in 2021		Disclosure of Affiliation Relationship of BoC, BoD and The Controlling Shareholders		Company Ethic and Corporate Culture	
		Organ Pendukung Dewan Komisaris	172	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen	233
		BoC Supporting Organs		Employee and/or Management Share Ownership Program	
				Kebijakan Pengungkapan Informasi Lainnya	233
				Policy on Disclosure of Other Information	
				Sistem Pelaporan Pelanggaran	234
				Whistle Blowing System	
				Praktik <i>Bad Governance</i>	236
				Bad Governance Practice	
				Kebijakan Anti-Korupsi	237
				Anti Corruption	





- Telekomunikasi**
- Perdagangan**
- Manufaktur**
- Minyak & Gas**
- Perumahan**
- Transportasi**
- Industri Dasar**
- Lain-lain**
- Agribisnis**
- Keuangan**



Salah satu di antara (Rp) 2016-2020. Sumber: Laporan Tahunan 2021 PT Indonesia Infrastructure Finance.



DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Legal Basis of Corporate Governance Implementation



Di tengah masa pemulihan pasca pandemi COVID-19, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG pada proses bisnis sehari-hari agar dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

In the midst of recovery period after COVID-19 pandemic, the Company is committed to improving the quality of its GCG principles implementation in day-to-day business processes to create sustainable added value for the best interests of Shareholders and Stakeholders.

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mewujudkan praktik bisnis yang sehat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yang berlandaskan pada praktik terbaik prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG"). Penerapan GCG yang efektif di Perseroan dalam proses bisnis sehari-hari menjadi landasan kokoh dalam menciptakan nilai-nilai berkelanjutan demi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

Bagi Perseroan, implementasi GCG pada setiap aspek usaha tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban terhadap regulasi yang berlaku, namun dirancang secara baik oleh Pemegang Saham dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan IIF dengan penuh

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

The Company is committed to continuously deliver sound business practices in performing its operations predicated on the best practice of Good Corporate Governance ("GCG") principles. The Company's effective implementation of GCG in day-to-day business processes serve as a solid foundation on which it can create sustainable values for the best interests of its Shareholders and Stakeholders.

In IIF, the implementation of GCG in all aspect of its business is more than fulfilling regulatory obligations, it is intentionally well-designed by the shareholders and carried out by the BoC, BoD and

kesadaran demi tercapainya kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen Perseroan dan kesungguhan seluruh insan IIF dalam hal penerapan prinsip-prinsip GCG tertuang di dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan. Selain itu, Perseroan juga telah memiliki perangkat kebijakan internal yang diharapkan dapat mendukung penerapan dan penegakan GCG di lingkungan kerja.

LANDASAN PENERAPAN GCG

Penerapan GCG pada lingkup Perseroan mengacu pada beberapa ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Undang-Undang Republik Indonesia

- a) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-439/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada PT Indonesia Infrastructure Finance.

Peraturan Lainnya

- a) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- b) Peraturan Ketua Bapepam-LK No. PER-03/BL/2010 tentang Bentuk, Susunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- c) Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-36/PM/2003, Peraturan No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;
- d) Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-40/PM/2003, Peraturan Bapepam-LK No. VII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;
- e) Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- f) Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-413/BL/2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- g) Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Bapepam No. VII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;
- h) Peraturan OJK (POJK) No. 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- i) POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- j) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;

all personnel of the Company with full awareness and willingly to meet the Company's and other stakeholders' interests.

The Company's commitment and its personnel's strong determination to implement GCG principles are stated in its Integrity Pact, which is signed by all members of its Board of Commissioners ("BoC"), Board of Directors ("BoD") and employees. The Company also has a comprehensive set of internal policies to help it implement and enforce GCG in the work environment.

BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION

The Company's organization-wide GCG implementation are based on the following regulatory provisions, including:

Laws of the Republic of Indonesia

- a) No. 40/2007 on Limited Liability Companies;
- b) No. 14/2008 on Information Disclosure;

Ministerial Regulation

Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 100/PMK.010/2009 on Infrastructure Financing Companies;

Ministerial Decree

Decree of the Minister of Finance No. KEP-439/KM.10/2010 on the Provision of Business License for Infrastructure Financing Company to PT Indonesia Infrastructure Finance;

Other Regulations

- a) Presidential Regulation No. 9/2009 on Financing Institutions;
- b) Regulation of the Chairman of Bapepam-LK No. PER-03/BL/2010 on the Form, Structure, and Submission of Quarterly Financial Statements and Semiannual Business Activity Reports of Infrastructure Financing Companies;
- c) Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-36/PM/2003, Regulation No. X.K.2 on the Obligation to Submit Periodical Financial Statements;
- d) Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-40/PM/2003 Regulation of Bapepam-LK No. VII.G.11 on Responsibilities of the Board of Directors for Financial Statements;
- e) Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009, Regulation of Bapepam-LK No. IX.E.1 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest in Certain Transactions;
- f) Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-413/BL/2009, Regulation of Bapepam-LK No. IX.E.2 on Material Transactions and Changes in Main Business Activities;
- g) Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-554/BL/2010 on the Amendment to Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2000 on the Amendment to the Regulation of Bapepam-LK No. VII.G.7 on Guidelines on the Presentation of Financial Statements;
- h) OJK Regulation (POJK) No. 3/POJK.05/2013 on Monthly Report of Non-Bank Financial Service Institutions;
- i) POJK No. 29/POJK.05/2014 on Organisation of Financing Businesses;
- j) POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers and Public Companies;

- k) POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
 - l) POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - m) POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - n) POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
 - o) POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 - p) POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 - q) POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - r) Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 6/SEOJK.04/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
 - s) SEOJK No. 11/SEOJK.04/2014 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pengumuman kepada Masyarakat oleh Pelaku Pasar Modal yang Batas Waktunya Jatuh pada Hari Libur;
 - t) SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
 - u) SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - v) POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik; dan
 - w) POJK No. 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
 - x) SEOJK No. 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
 - y) POJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
 - z) SEOJK No. 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
 - aa) SEOJK No. 26/SEOJK.05/2021 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- k) POJK No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
 - l) POJK No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers of Public Companies;
 - m) POJK No. 8/POJK.04/2015 on Websites of Issuers or Public Companies;
 - n) POJK No. 31/POJK.04/2015 on Transparency of Information on Material Facts by Issuers or Public Companies;
 - o) POJK No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Performance of the Works of Audit Committees;
 - p) POJK No. 56/POJK.04/2015 on the Formation and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charters;
 - q) POJK No. 29/POJK.04/2016 on Annual Report of Issuers or Public Companies;
 - r) OJK Circular (SEOJK) No. 6/SEOJK.04/2014 on Procedures for the Submission of Electronic Reports by Issuers or Public Companies;
 - s) SEOJK No. 11/SEOJK.04/2014 on the Obligation to Submit Reports to OJK and Public Announcements for Capital Market Participants of which Deadlines Fall on Public Holidays;
 - t) SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 on Good Corporate Governance Implementation Reporting for Financing Companies;
 - u) SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Contents of the Annual Report of Issuers or Public Companies;
 - v) POJK No. 51/POJK.03/2017 on Sustainable Finance Implementation for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies; and
 - w) POJK No. 46/POJK.05/2020 on Infrastructure Financing Companies.
 - x) SEOJK No. 3/SEOJK.03/2021 on Reporting and Requesting Debtor Information through the Information Service System Finance.
 - y) POJK No. 4/POJK.05/2021 on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology for Non-Bank Financial Services Institution.
 - z) SEOJK No. 22/SEOJK.05/2021 on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology for Non-Bank Financial Services Institution
 - aa) SEOJK No. 26/SEOJK.05/2021 on Circular Letter Concerning Monthly Reporting for Non-Bank Financial Services Institution

PRINSIP-PRINSIP GCG DAN PENERAPANNYA

GCG Principles and Its Implementation

Penerapan praktik GCG di Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yang berlaku umum, yaitu:

The implementation of GCG practice at the Company refers to 5 (five) universal basic principles:

Prinsip Principle	Penjelasan	Description	Implementasi	Implementation
Transparansi Transparency	Perseroan menjamin ketersediaan informasi secara jelas, terbuka, dan akurat bagi para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai transparansi informasi perusahaan.	The Company guarantees that it discloses clear, open, and accurate information for the shareholders and stakeholders, but with due regards to prevailing laws and regulations regarding the transparency of company information.	<ul style="list-style-type: none"> IIF menyajikan informasi secara transparan kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya terkait kinerja dan kegiatan usaha Perseroan; IIF menyampaikan laporan publikasi secara berkala dan tepat waktu kepada regulator; IIF menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan; dan IIF memiliki situs web resmi yang menyajikan beragam informasi mengenai Perseroan dan dapat diakses dengan mudah oleh publik, yaitu: https://iif.co.id/id/ 	<ul style="list-style-type: none"> IIF provides information transparently to the shareholders and other stakeholders regarding the Company's performance and business activities; IIF delivers periodic and timely publication reports to regulators; IIF applies the principle of information disclosure in the decision-making process and in disclosing information that is considered important and relevant; and IIF manages an official website that provides various information about the Company and can be easily accessed by the public at https://iif.co.id/id/
Akuntabilitas Accountability	Perseroan menetapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban yang jelas dari masing-masing organ sehingga pengelolaan bisnis IIF dapat berjalan efektif dan efisien.	The Company establishes clear functions, structures, systems, and clear lines of responsibilities of each of its organs so to ensure that IIF runs an effective and efficient business management.	<ul style="list-style-type: none"> Masing-masing organ IIF menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam Board Manual ataupun piagam yang telah disahkan; Seluruh insan IIF bekerja sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki demi kepentingan Perseroan; Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 	<ul style="list-style-type: none"> Each of IIF organ carries out different duties and responsibilities as stated in the Board Manual or in its ratified charters; All IIF employees work according to their competencies and capabilities for the best interest of the Company; The BoC and the BoD are accountable for their performance to shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).
Tanggung Jawab Responsibility	Pelaksanaan aktivitas operasional bisnis Perseroan senantiasa mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan kegiatan usaha Perseroan.	The Company's business operations always remain in compliance with laws and regulations that apply to the Company's business activities.	<ul style="list-style-type: none"> IIF selalu update mengikuti perkembangan regulasi terkini khususnya yang relevan dengan bisnis Perseroan; IIF mengikutsertakan karyawannya di dalam kegiatan sosialisasi peraturan ataupun regulasi yang diselenggarakan oleh regulator; Pelaksanaan seluruh proses operasional bisnis IIF senantiasa mengacu pada rencana bisnis yang sudah disepakati bersama dan mengindahkan Anggaran Dasar; Aktivitas bisnis IIF senantiasa memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara profitabilitas dan pemberian manfaat bagi pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, IIF menjalankan program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan secara berkesinambungan setiap tahunnya; IIF menjunjung tinggi prinsip integritas yang dibuktikan melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh jajaran Top Manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) dan seluruh karyawan. 	<ul style="list-style-type: none"> IIF stays up to date to the latest regulatory changes, especially those that are applicable to the Company's business; IIF engages its employees in the socialization of regulations or regulations organized by the regulator; The implementation of all IIF business operational processes always refers to a business plan that has been mutually agreed upon and adheres to the Articles of Association; IIF's business activities always pay attention to the alignment and balance between profitability and the provision of benefits to stakeholders. Therefore, IIF runs corporate social responsibility programs and activities on an annual basis; IIF highly upholds the principle of integrity as evidenced by the signing of the Integrity Pact by the Top Management (Board of Commissioners and Directors) and all employees.

Prinsip Principle	Penjelasan	Description	Implementasi	Implementation
Independensi Independency	Pengelolaan usaha Perseroan dilakukan secara profesional dan mandiri tanpa ada intervensi dari organ-organ Perseroan lainnya maupun pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	The Company's business management is run professionally and independently without any intervention from other Company organs or other parties that are not in accordance with the applicable laws and regulations.	<ul style="list-style-type: none"> · Pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berdasarkan keputusan bersama; · Pengurus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peran dan fungsi yang dimiliki tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional IIF; dan · Manajemen IIF memberikan pengakuan terhadap hak-hak yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Peraturan Perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> · Decision making is made objectively and based on joint decisions; · Management discharges their duties and responsibilities according to respective their roles and functions without any pressure from any party that is not in accordance with IIF's operational system; and · IIF management recognizes the rights stipulated in the law and Company Regulations.
Kewajaran Fairness	Perseroan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	The Company upholds the principles of justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that may arise based on agreements and applicable laws and regulations.	<ul style="list-style-type: none"> · IIF menjamin pemenuhan hak dan kewajiban bagi seluruh pemangku kepentingan; · Pengelolaan bisnis IIF dilakukan secara fair dengan mengindahkan seluruh peraturan yang berlaku untuk melindungi hak-hak pemangku kepentingan; dan · IIF berkomitmen untuk memperlakukan seluruh karyawan secara adil tanpa membeda-bedakan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak terkait kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> · IIF guarantees that it fulfills the rights of and obligations to all stakeholders; · IIF's business is managed fairly with due regards to all applicable regulations to protect the rights of stakeholders; and · IIF is committed to treating all employees fairly without discrimination against ethnicity, religion, origin, gender, or other matters that are not related to performance.

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

GCG Structure and Mechanism

Infrastruktur GCG

Mengacu pada Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, IIF memiliki struktur tata kelola yang terdiri dari organ-organ utama dan sejumlah organ pendukung. Adapun yang dimaksud dengan organ utama, antara lain: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sementara organ-organ pendukung lainnya mencakup komite-komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal.

Struktur GCG Perseroan sudah memperhatikan pemetaan fungsi atau kegiatan usaha berdasarkan standar etika bisnis serta memastikan mekanisme *checks and balances* dapat berjalan dengan efektif.

Soft Structure GCG

Agar praktik GCG yang dilaksanakan oleh masing-masing organ utama maupun organ pendukung senantiasa berjalan dengan baik dan efektif, Perseroan telah menyusun dan mengesahkan kebijakan internal yang wajib dipatuhi oleh seluruh insan IIF. Sampai akhir 2021, *Governance Soft Structure* yang telah dimiliki oleh Perseroan, antara lain:

1. Anggaran Dasar Perseroan
2. Kebijakan Umum tentang Tata Kelola Perusahaan
3. Kebijakan Etika dan Perilaku Perusahaan
4. Pakta Integritas
5. *Board Charter*

GCG Infrastruktur

Referring to Article 1 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, IIF has a governance structure consisting of main and supporting organs. The main organs include: General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. Other supporting organs include Committees formed to assist the implementation of duties and responsibilities of the Boards of Commissioners and Directors, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.

The Company's GCG structure has taken into account the mapping of business functions or activities based on business ethical standards as well as ensuring that the checks and balances mechanism are effectively run.

GCG Soft Structure

In order that the GCG practices implemented by each of the main and supporting organs always run well and effectively, the Company has compiled and ratified internal policies that must be obeyed by all IIF personnel. Until the end of 2021, the Company's Governance Soft Structure were:

1. Company's Articles of Association
2. Operations Manual – General Policy on Corporate Governance
3. Company Ethics and Behavioral Policy
4. Integrity Pact
5. Board Charter

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS")

General Meeting of Shareholders ("GMS")

Kebijakan RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan. RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak Pemegang Saham. Sebagai organ Perseroan, RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan, serta memiliki segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS menjalankan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

Mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, IIF menyelenggarakan 2 (dua) jenis RUPS, yaitu:

a) RUPS Tahunan:

Wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

b) RUPS Luar Biasa

Dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.

Wewenang RUPS

Kewenangan RUPS yang tidak dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- 2) Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- 3) Menyetujui Laporan Keuangan Perseroan; dan
- 4) Menentukan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Informasi Pemegang Saham

Struktur kepemilikan saham IIF adalah sebagai berikut:

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) (30,00%)
- International Finance Corporation (IFC) (19,99%)
- Asian Development Bank (ADB) (19,99%)
- Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) (15,12%)
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) (14,90%)

Kewenangan Pemegang Saham dalam RUPS

Mengacu pada Pasal 75 ayat (2) Undang-undang PT ("UU PT") disebutkan bahwa saat penyelenggaraan RUPS, Pemegang Saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Hak-hak Pemegang Saham di dalam RUPS sebagaimana tercantum dalam UU PT, antara lain:

- 1) Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS;
- 2) Hak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba;
- 3) Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Direksi mengenai kinerja Perseroan;

GMS Policy

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in governance structure. The GMS acts as the main mechanism to protect and exercise the rights of Shareholders. As a corporate organ, GMS holds the highest power in the Company, and has all the authority that is delegated to neither the Board of Commissioners nor the Board of Directors. The GMS carries out the provisions of the Articles of Association and applicable regulations.

Referring to the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations, IIF shall convene 2 (two) types of GMS, namely:

a) Annual GMS (AGMS):

Shall be convened no later than 6 (six) months after the end of the financial year.

b) Extraordinary GMS (EGMS):

May be convened at any time if deemed necessary by the Board of Directors, the Board of Commissioners or shareholders to decide on matters not decided in an AGMS.

GMS Authority

The authorities of the GMS that cannot be delegated to the Board of Commissioners and the Board of Directors include:

- 1) Appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
- 2) Evaluating the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- 3) Approving the Company's Financial Statements; and
- 4) Determining the remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Shareholder Information

The following is IIF's shareholding structure:

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) (30.00%)
- International Finance Corporation (IFC) (19.99%)
- Asian Development Bank (ADB) (19.99%)
- Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH (15.12%)
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) (14.90%)

Shareholders' Authority in the GMS

Article 75 paragraph (2) of the Limited Liability Company Law regulates that in each GMS convened, shareholders are entitled to receive all relevant corporate information from the Board of Commissioners and/or Board of Directors.

Rights and Responsibilities of Shareholders

The rights of shareholders in the GMS as stated in the Limited Liability Company Law, are:

- 1) The right to attend and vote in the GMS;
- 2) The right to receive dividends or profit sharing;
- 3) The right to have an explanation from the Board of Directors regarding the Company's performance;

4) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai Pemegang Saham.

Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Hal ini mengacu kepada pasal 3 ayat 1 UU PT.

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS

Mekanisme pelaksanaan RUPS Perseroan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPST 2021

Hari/Tanggal : Kamis, 22 April 2021

Waktu : 13:30 - selesai

Tempat : Kantor IIF dan Microsoft Teams Meeting

Kehadiran secara fisik:

Direktur Utama

Bapak Reynaldi Hermansjah

Direktur Pelaksana

Ibu Devi Pradnya Paramita

Bapak I Made Wiracita Tantra

Bapak Mohammad Ramadhan Harahap

Bapak Yanindya Bayu Wirawan

Notaris:

Ibu Utiek R. Abdurachman

Di tengah kondisi pandemi COVID-19, Dewan Komisaris dan perwakilan Pemegang Saham menghadiri RUPS melalui *video conference Microsoft Teams*. Sebelum pelaksanaan RUPST, kuorum rapat telah dikonfirmasi oleh Notaris.

Berikut ini adalah hasil keputusan RUPST Perseroan Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan tanggal Kamis, 22 April 2021, antara lain sebagai berikut:

4) The right to have equal treatment as a shareholder.

Shareholders are not personally responsible for all agreements made on behalf of the Company and for the Company's losses that are in excess of their owned shares. This policy refers to article 3 of Liability Company Law.

GMS Organizing Mechanism

The mechanism for convening the Company's GMS follows the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.

The convention of 2021 AGMS

Day/Date : Thursday, 22 April 2021

Time : 1:30 pm - finish

Place : IIF Office and Microsoft Teams Meeting

Physical Attendance:

President Director

Mr. Reynaldi Hermansjah

Managing Directors

Ms. Devi Pradnya Paramita

Mr. I Made Wiracita Tantra

Mr. Mohammad Ramadhan Harahap

Mr. Yanindya Bayu Wirawan

Notary:

Ms. Utiek R. Abdurachman

Due to COVID-19 pandemic, the Board of Commissioners and Shareholders' representative attended the GMS through Microsoft Teams video conference. Before proceeding the AGMS, the meeting quorum had been confirmed by the Notary.

The following are the resolutions of the Company's AGMS for fiscal year 2020 which was held on Thursday, 22 April 2021:

Mata Acara Meeting Agenda	Keputusan	Resolutions	Status Pelaksanaan Di Tahun 2021 Implementation Status in 2021
Agenda 1	a) Menyetujui laporan keuangan tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan b) Menyetujui Laporan Tahunan 2020 yang disiapkan oleh Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perusahaan Indonesia dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perusahaan.	a) Approved the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2020; and b) Approved the 2020 Annual Report prepared by the BoD according to the provisions of Article 66 of the UUPT and Article 17 of the Articles of Association.	√
Agenda 2	a) Menyetujui untuk tidak mengalokasikan pembayaran dividen berdasarkan Laba Bersih tahun 2020 setelah pajak; b) Menyetujui untuk mengalokasikan 10% dari Laba Bersih tahun 2020 setelah pajak untuk dana cadangan Perseroan; dan c) Menyetujui untuk mengalokasikan sisa Laba Bersih tahun 2020 setelah pajak sebagai laba ditahan.	a) Approved to not allocate any amount for dividends based on 2020 net profit after tax; b) Approved to allocate 10% of 2020 net profit after tax for the Company's reserves fund; and c) Approved to allocate the remaining of 2020 net profit after tax for retained earnings.	√

Mata Acara Meeting Agenda	Keputusan	Resolutions	Status Pelaksanaan Di Tahun 2021 Implementation Status in 2021
Agenda 3	<p>a) Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Dewan Komisaris yang sekarang dan sebelumnya dari tanggung jawab pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut tercermin dan tercatat dalam Laporan Keuangan tahun 2020 dan Laporan Tahunan tahun 2020; dan</p> <p>b) Menyetujui pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari tanggung jawab kepengurusan anggota Direksi yang sekarang dan sebelumnya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang semua tindakan Direksi tercermin sepenuhnya dalam Laporan Keuangan tahun 2020 dan Laporan Tahunan 2020.</p>	<p>a) Approved the release and discharge of the current and previous members of the BoC from its supervisory responsibilities for the fiscal year ended on 31 December 2020, to the extent that such actions of the BoC are fully reflected and recorded in the 2020 Financial Statements and 2020 Annual Report; and</p> <p>b) Approved the release and discharge of the current and previous members of the BoD from its managerial responsibilities for the Fiscal Year ended on 31 December 2020, to the extent that such actions of the BoD are fully reflected and recorded in the 2020 Financial Statements and 2020 Annual Report.</p>	√
Agenda 4	Menyetujui alokasi tantiem tahun 2020 Direksi dan Dewan Komisaris; serta penyesuaian gaji Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak Januari 2021.	Approved the year of 2020 bonus allocation and salary adjustment for BoD and BoC; and 2021 salary adjustment for BoD and BoC as of January 2021.	√
Agenda 5	Menyetujui proses pengadaan untuk menunjuk kembali KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagai Auditor Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	Approved the procurement process to re-appoint KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) as Independent Auditor of the Company for financial year ending on 31 December 2021.	√

Informasi Hasil Keputusan RUPST dan RUPSLB Tahun Buku 2019 serta Tindak Lanjutnya

Seluruh hasil keputusan RUPSLB dan RUPST 2020 untuk Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada 19 Maret 2020, telah dilaksanakan sepenuhnya, artinya tidak ada hal lain yang perlu disampaikan di tahun 2021 atau diputuskan terkait dengan RUPST 2019.

Information on the Resolutions of the AGMS and EGMS for the 2019 Financial Year and their Follow-up

All resolutions of the EGMS and 2020 AGMS for the 2019 Fiscal Year, which were held on 19 March 2020, had been fully implemented, meaning that there was no other matter left in fiscal 2021 that needed to be conveyed or resolved pertaining to the 2019 AGMS.

DIREKSI Board of Directors

Direksi adalah organ utama Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas jalannya pengelolaan bisnis Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Keberadaan organ Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

DASAR HUKUM

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- POJK No. 33/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Anggaran Dasar Perseroan
- Piagam Direksi

The Board of Directors (BoD) is the Company's main organ fully responsible for the management of its business in line with THE Company's purpose and objectives. According to its Articles of Association, BoD is Authorised to represent the Company both inside and outside court. The Company's BoD has met the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 33/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") on the BoD and BoC of Issuers or Public Companies.

LEGAL BASIS

- Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
- POJK No. 33/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies
- Company's Articles of Association
- BoD Charter

PIAGAM DIREKSI

Perseroan memiliki Piagam Direksi yang merupakan pedoman bagi seluruh anggota Direksi dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini juga diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah diselaraskan dengan POJK 33/2014.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi Perseroan memikul tanggung jawab kolektif dan individu. Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolektif sebagaimana diamanatkan dalam Piagam Direksi:

SPEKIFIK**A. Terkait Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan**

- 1) Direksi wajib bertanggung jawab dengan penuh integritas dalam melakukan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 2) Setiap anggota Direksi secara individual bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya; dan
- 3) Para anggota Direksi wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan proses kepatuhan dan memastikan bahwa semua kewajiban telah dipenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar dan RUPS Tahunan, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

B. Terkait Hubungan dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

- 1) Memastikan pelaksanaan atas keputusan yang dibuat dalam RUPS, Dewan Komisaris, dan Anggaran Dasar ;
- 2) Memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham; mengatur komunikasi dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan lainnya pihak yang berkepentingan, termasuk tugas dan tanggung jawab Direksi dan setiap anggota Direksi;
- 3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dan memberikan tanggapan atas saran dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
- 4) Mempersiapkan laporan berkala dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta laporan lainnya sesuai dengan permintaan Pemegang Saham;
- 5) Mengadakan RUPST berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih Pemegang Saham yang memiliki hak suara yang sah dan yang mewakili setidaknya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang diterbitkan;
- 6) Mempersiapkan dan mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan keluarganya, baik di IIF maupun di perusahaan lainnya;
- 7) Melakukan konsultasi dengan Dewan Komisaris atas pemberian kredit di atas jumlah yang telah ditentukan;
- 8) Menetapkan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perseroan IIF;
- 9) Menjaga kegiatan operasional IIF agar sejalan dengan bisnis dan tujuan Perseroan;
- 10) Membuat rencana kerja, anggaran tahunan, dan rencana lainnya yang terkait dengan bisnis IIF;

BoD CHARTER

The Company has a BoD Charter which comprises guidelines to all Directors in fulfilling their respective roles, duties and responsibilities. These also governs in the Company's Articles of Association which are aligned with POJK 33/2014.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BoD

The Company's BoD bears collective and individual responsibilities. The following is a description of the duties and responsibilities of the BoD collectively as mandated in the BoD Charter:

SPECIFIC**A. In terms of compliance with prevailing laws and regulations**

- 1) Members of the BoD must act faithfully and responsibly in performing their duties in accordance with prevailing regulations;
- 2) Each member of the BoD shall be held responsible for their individual faults and acts of negligence in the performance of their duties; and
- 3) Members of the BoD are responsible for enforcing compliance procedure and ensuring that all obligations have been fulfilled pursuant to the Articles of Association and the Company's Annual GMS, along with prevailing regulations.

B. In relation to the BoC and Shareholders, the BoD is responsible for:

- 1) Ensuring that the resolutions established in the GMS, by the BoC and the Articles of Association are carried out;
- 2) Presenting information to the BoC and Shareholders; managing communication with Shareholders, the BoC, and other stakeholders, including on the duties and responsibilities of each Director;
- 3) Being accountable for the implementation of its duties to the Shareholders and providing feedback on the advice from the BoC and Shareholders;
- 4) Preparing periodical reports in a timely manner and in accordance with applicable regulations, as well as other reports as required by the Shareholders;
- 5) Convening the AGMS based on a written request from one or more shareholders with valid voting rights and who collectively represent at least 1/10 (one tenths) of issued shares;
- 6) Preparing and managing a Shareholders Register and Special List containing share ownership by the members of the BoC and the BoD and their relatives, both in IIF and other companies;
- 7) Consulting with the BoC regarding approval for loans above the maximum limit;
- 8) Determining the vision, mission, values, and the Company's culture of IIF;
- 9) Maintaining IIF's operational activities within the Company's line of business and objectives;
- 10) Preparing work plans, annual budget plans, and other plans pertaining to the business of IIF;

- 11) Menentukan remunerasi untuk manajemen senior dan karyawan kunci, serta menjaga konsistensi remunerasi tersebut agar selaras dengan budaya, tujuan, strategi, tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar IIF, dan lingkungan usaha; dan
- 12) Menyeimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dari IIF

C. Tanggung Jawab terkait Pelaporan Keuangan

- 1) Menjaga pembukuan dan administrasi IIF sesuai dengan praktik-praktik dan ketentuan yang berlaku;
- 2) Mengembangkan sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia dan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama dalam hal pencatatan, pengarsipan, *monitoring*, serta pengelolaan; dan
- 3) Mempersiapkan Laporan Tahunan dan laporan terkait untuk RUPST termasuk Laporan Keuangan dan prosedur akuntansi.

D. Tanggung jawab terkait Manajemen dan Pengendalian Risiko

- 1) Memastikan Perseroan memiliki proses yang tepat dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, serta mengendalikan risiko;
- 2) Memastikan bahwa sistem dan proses yang tepat telah dilakukan untuk pemantauan dan pelaporan risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan;
- 3) Memantau dan mengevaluasi keberadaan proses Manajemen dalam menilai kecukupan sistem Manajemen Risiko dan pengendalian internal, pelaporan Keuangan, serta kepatuhan;
- 4) Memastikan keberadaan sistem pengendalian yang efektif untuk memastikan:
 - Keandalan dan integritas dari informasi;
 - Kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, rencana prosedur, dan peraturan;
 - Pemeliharaan aset Perseroan;
 - Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien; dan
 - Pencapaian atas tujuan dan sasaran operasional yang telah ditentukan.
- 5) Melaksanakan evaluasi tahunan dalam rangka menyusun pernyataan kepada publik mengenai pengendalian internal Perseroan untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari pengendalian internal yang dimiliki telah dipertimbangkan untuk dievaluasi sampai dengan tanggal persetujuan Laporan Tahunan;
- 6) Direksi bertanggung jawab menciptakan struktur organisasi, tugas, dan struktur tanggung jawab yang jelas, termasuk penunjukan Manajemen; dan
- 7) Direksi bertanggung jawab untuk memanfaatkan hasil audit internal maupun eksternal secara efektif.

FUNGSIONAL

Terkait dengan fungsinya secara umum, Direksi bertanggung jawab untuk:

- 1) Merumuskan dan melaksanakan visi, strategi, rencana tahunan, tujuan, dan anggaran IIF, serta memastikan keselarasan dan dukungan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham,

- 11) Determining the amount of remuneration paid out to senior management and executive officers, and keeping remuneration packages consistent with the Company's culture, objectives, strategies as well as duties and responsibilities stated in prevailing regulations, IIF's Articles of Association, and prevailing conditions in the business environment; and
- 12) Balancing the interests of all of IIF's stakeholders.

C. Responsibilities related to financial reporting:

- 1) Bookkeeping and keeping IIF administration in line with prevailing best practices;
- 2) Developing an accounting system in accordance to the Indonesian Accounting Standards and internal control principles, particularly regarding administration, archiving, monitoring and management activities; and
- 3) Preparing the Annual Report and related reports for AGMS including Financial Statements and accounting procedures.

D. Responsibilities related to Risk Management and Control

- 1) Ensuring that the Company has a proper and systematic process to identify, measure, and control risks;
- 2) Ensuring the Company runs the right systems and processes to measure and monitor on reporting the main risks faced by the Company;
- 3) Monitoring and evaluating management processes and assessing the adequacy of Risk Management and internal control systems, financial reporting, and compliance procedures;
- 4) Ensuring the availability of an effective control system to establish:
 - Reliability and integrity of information;
 - Compliance with prevailing policies, procedures, plans, and regulations;
 - Managing Company's assets;
 - Utilise resources thriftily and in efficient basis; and
 - Achievement of pre-determined operational objectives.
- 5) Conducting annual evaluations of the Company's internal controls in order to ensure that all essential aspects of internal control have been considered and assessed. The results of these evaluations will be presented in a public statement and will cover a period of time until the approval of the Company's Annual Report;
- 6) Establishing clear organizational structure, duties, and responsibilities, including the appointment of the Management; and
- 7) Utilizing audit results from internal and external auditors in the best interest of the Company.

FUNCTIONAL

In regards to its general function, the BoD is responsible for:

- 1) Establishing and executing IIF's vision, strategies, annual plans, objectives, and budget, while ensuring alignment with and support from the BoC and Shareholders; as well as providing direction

memberikan arahan kepada tiap unit di Perseroan untuk mencapai keberhasilan dalam tumbuh kembangnya sehingga dapat menjadi perusahaan yang menguntungkan dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang;

- 2) Membangun, menetapkan, melaksanakan dan mengoordinasikan secara efektif struktur dan kerangka kerja tata kelola perusahaan yang mencakup kebijakan, prosedur, dan prinsip-prinsip pemisahan wewenang dan tanggung jawab ("*Chinese Wall*") untuk memastikan pelaksanaan strategi dan rencana tahunan perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan pedoman peraturan yang berlaku senantiasa berjalan secara efektif dan efisien;
- 3) Mengembangkan, mengelola bisnis dan berhubungan dengan para pemilik kepentingan lainnya serta bertindak sebagai perwakilan resmi dari IIF bagi para pemilik kepentingan lainnya. dan media, membangun merek dagang IIF dalam rangka membentuk posisi yang menguntungkan baik secara politis dan yuridis, serta kondisi bisnis dan citra publik yang baik sebagai prasyarat untuk keberhasilan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- 4) Memastikan pengaruh kebijakan dan peraturan atas *landscape* infrastruktur, penasihat proyek strategis, dan pengatur pendanaan atas nama klien berdasarkan produk *fee based* dan *Advisory* dalam rangka menciptakan dan menumbuhkembangkan portofolio proyek-proyek infrastruktur demi terwujudnya IIF yang menguntungkan dan berkelanjutan;
- 5) Memastikan pengembangan penawaran produk baru yang lebih baik, yang sesuai dengan kondisi di Indonesia, menjamin akses ke pendanaan (jangka panjang), serta menawarkan dana dan produk berbasis non-dana untuk proyek-proyek infrastruktur yang potensial dengan mempertimbangkan perspektif investor dalam rangka meningkatkan investasi PPP dalam proyek-proyek Infrastruktur di Indonesia
- 6) Memastikan kerangka kerja Manajemen Risiko yang terintegrasi dan kebijakan untuk berbagai jenis risiko, serta budaya sadar risiko di seluruh perusahaan dan memperhitungkan parameter risiko dalam semua keputusan bisnis. Hal ini dilakukan untuk menjaga portofolio infrastruktur proyek dan investasi yang sehat dalam parameter risiko dan anggaran;
- 7) Memastikan perencanaan dan siklus pengendalian, integritas dalam administrasi dan pembukuan, operasi dan perencanaan pajak yang efektif dan efisien, serta laporan keuangan interim dan tahunan, dalam rangka memimpin Perseroan untuk mencapai tujuan finansialnya secara efektif dan efisien, serta memberikan wawasan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya atas posisi keuangan dan kinerja IIF;
- 8) Memastikan integritas, efektivitas, dan efisiensi dari unit-unit yang berfungsi sebagai pendukung seperti bagian Hukum, Asuransi, IT, Audit, SDM, Komunikasi dan Pengadaan, sehingga tujuan bisnis IIF baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien;
- 9) Mengembangkan dan menerapkan kegiatan *monitoring* dan infrastruktur pelaporan IIF, pelaporan dan pemberian nasihat tentang kegiatan IIF dan portofolio untuk memperoleh informasi yang benar guna melakukan tindakan yang tepat dalam memberikan informasi kepada Dewan Komisaris, namun tetap mematuhi kewajiban pelaporan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan; dan

each works units that will allow the Company to develop into a profitable and sustainable entity both in the short and long-term;

- 2) Establishing, determining, implementing, and coordinating the Company's governance structure and framework, covering policies, procedures, and the principle of segregation between authority and responsibility ("*Chinese Wall*") to ensure effective and efficient implementation of the Company's strategies and annual plans, as well as compliance with policies and prevailing regulations;
- 3) Developing the Company's business and managing relationship with other stakeholders and to act as the official representative of IIF to other stakeholders and to the media in building IIF's brand and public image in order to establish a beneficial position either politically and as well as good business and image as precondition to the success of an infrastructure financing company;
- 4) Monitoring the impact of policies and regulations on the infrastructure landscape, strategic project advisors, and fund arrangers for the client, based on fee-based products and Advisory, in the effort to establish and develop a profitable and sustainable portfolio of infrastructure projects for IIF;
- 5) Ensuring the development of better product offerings suited for Indonesia's financing market, ensuring access to long-term funds, and providing fund and non-fund-based products for potential infrastructure projects by considering investors' perspectives in order to enhance participation in Indonesia's PPP market;
- 6) Ensuring an integrated Risk Management framework and policies for various risk types, as well as a risk awareness culture throughout the organization by taking into account risk parameters in making business decisions, in order to maintain a healthy portfolio of infrastructure projects and investment within the aforementioned risk and budget parameters;
- 7) Ensuring adequate planning and a proper control cycle, maintaining the integrity of administration and accounts, preparing effective and efficient tax operations and planning, as well as preparing interim and statutory financial statements in order to lead the organization in a financially effective and efficient manner that will provide the BoD, BoC and stakeholders with insight into IIF's financial position and performance;
- 8) Ensuring the integrity, effectiveness, and efficiency of supporting units such as Legal, Insurance, IT, Audit, HR, Communications, and Procurement Units, in order to achieve the Company's short and long-term business objectives in an effective and efficient manner;
- 9) Developing and monitoring the Company's reporting infrastructure, reporting and providing advice on IIF's activities and portfolio to obtain the right information that the BoC can use in decision making with due regards to reporting requirements as established in the Company Regulations; and

10) Mengembangkan dan memimpin tim yang efektif, memastikan struktur organisasi, tata kelola dan proses IIF yang baik (termasuk di dalamnya adanya pemisahan wewenang yang tegas antara unit Penasihat dan Investasi), dan mengembangkan, menjaga budaya, serta nilai-nilai inti IIF sehingga rencana strategis dan tujuan IIF dapat tercapai.

10) Developing and leading an effective team, ensuring proper organizational structures, governance and processes within IIF (including strict separation of authority between Advisory and Investment unit), and developing and promoting the right corporate culture and core values to achieve the Company's strategic plans and objectives.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Perseroan telah menetapkan pembagian tugas terhadap seluruh anggota Direksi untuk menjamin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif berdasarkan latar belakang, pengalaman kerja professional menurut bidang ilmu dan keahlian masing-masing Direksi dengan uraian sebagai berikut:

SEGREGATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company has a division of tasks for all BoD members to ensure an effective implementation of its duties and responsibilities based on the background, work experience according to their respective knowledge and expertise as elaborated below:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggung Jawab Responsibility
Reynaldi Hermansjah	Presiden Direktur President Director	<ul style="list-style-type: none"> Berperan sebagai koordinator seluruh anggota Direksi dan bertanggung jawab memimpin bisnis IIF. Semua Direktur bertanggung jawab langsung kepadanya. He chairs the Board of Directors and is responsible for leading the business of IIF. All directors will be responsible to him. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa IIF beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang, peraturan nasional dan internasional (di manapun berlaku), dan selalu mematuhi. Presiden Direktur memberikan nasihat hukum tentang semua aspek operasi IIF dan memantau kepatuhannya terhadap semua ketentuan hukum nasional dan internasional. He is responsible in ensuring that IIF operates within the boundaries of national and international (wherever applicable) laws, regulations and is compliant at all times with the same. He provides legal advice on all aspects of IIF operations and monitoring compliance with all national and international laws.
Devi Pradnya Paramita*	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Executive Director and Chief Financial Officer (CFO)	Bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan IIF. <i>She is in charge of all matters related to financial management and treasury operations of IIF.</i>
I Made Wiracita Tantra	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Executive Director and Chief Risk Officer (CRO)	Bertanggung jawab atas kegiatan manajemen risiko IIF. He is responsible for the enterprise level risk management activities of IIF.
Mohammad Ramadhan Harahap	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)	Bertanggung jawab atas semua aktivitas pendanaan dan non-pendanaan (kecuali <i>advisory</i>) IIF, termasuk pinjaman, investasi ekuitas, penjaminan, dll. He is responsible for all the funding and non-funding (except advisory) business of IIF, including lending, equity investments, guarantees, etc.
Y. Bayu Wirawan	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)	Bertanggung jawab atas semua aktivitas pendanaan dan non-pendanaan (kecuali <i>advisory</i>) IIF, termasuk pinjaman, investasi ekuitas, penjaminan, dll. He is responsible for all the funding and non-funding (except advisory) business of IIF, including lending, equity investments, guarantees, etc.

* Ibu Devi Pradnya Paramita efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 1 November 2021
Ms. Devi Pradnya Paramita effectively served as a Director of the Company until 1 November 2021

PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi mengikuti ketentuan dan prosedur yang telah tercantum pada Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT AND DISMISSAL PROCEDURES

The BoD is appointed and dismissed by the shareholders through GMS in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. The appointment, dismissal, and resignation of the BoD follows the provisions and procedures as stated in Article 10 of the Company's Articles of Association.

KRITERIA KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Direksi IIF yang menjabat selama tahun buku telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Adapun periode jabatan Direksi IIF adalah terhitung sejak tanggal pengangkatan pada RUPS sampai penutupan RUPS Tahunan ("RUPST") ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

BoD MEMBERSHIP CRITERIA AND TERM OF OFFICE

The Company ensures that all the incumbent members of the Board of Directors of IIF had met the formal and material requirements as stipulated in the Company's Articles of Association. The term of office of the BoD of IIF is effective from the date of GMS that appointed them until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the date of their appointment without neglecting the right of the GMS to dismiss them at any time in accordance with the Articles of Association and all prevailing regulations

KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2021, komposisi Direksi IIF mengalami perubahan seiring dengan diterimanya surat pengunduran diri Ibu Devi Pradnya Paramita dari jabatannya sebagai CFO. Dengan demikian, berikut ini adalah komposisi keanggotaan Direksi Perseroan pada akhir 2021:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Base Appointment	Periode Menjabat Term of Office
1.	Reynaldi Hermansjah	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)	Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Maret 2019 Notary Deed No. 1 March 1, 2019	Tahun ketiga sejak RUPS pengangkatan Three years after the GMS appointment
2.	Devi Pradnya Paramita*	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)	Akta Notaris No. 1 tanggal 6 Desember 2019 Notary Deed No. 1 December 6, 2019	31 Oktober 2021 October 31 2021
3.	I Made Wiracita Tantra	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)	Akta Notaris No. 19 tanggal 22 Maret 2021 Notary Deed No. 19, March 22, 2021	Tahun ketiga sejak RUPS pengangkatan Three years after the GMS appointment
4.	Mohammad Ramadhan Harahap	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	Akta Notaris No. 13 tanggal 16 Juni 2020 Notary Deed No. 13 June 16, 2020	Tahun ketiga sejak RUPS pengangkatan Three years after the GMS appointment
5.	Y. Bayu Wirawan	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	Akta Notaris No. 13 tanggal 16 Juni 2020 Notary Deed No. 13 June 16, 2020	Tahun ketiga sejak RUPS pengangkatan Three years after the GMS appointment

*) Ibu Devi Pradnya Paramita efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 1 November 2021
Ms. Devi Pradnya Paramita effectively served as a Director of the Company until 1 November 2021

INFORMASI RANGKAP JABATAN

Pengungkapan informasi rangkap jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan telah dilakukan pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Direksi, dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI DIREKSI

Seluruh anggota Direksi menyatakan komitmen dan kesungguhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh secara independen atau terbebas dari benturan kepentingan dari pihak manapun. Independensi Direksi tercantum dalam Pakta Integritas Direksi yang telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi.

RAPAT DIREKSI**Kebijakan Rapat Direksi**

Sebagaimana diatur dalam Piagam Direksi, rapat Direksi wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2021, Direksi telah mengadakan 25 kali rapat internal dengan uraian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Pertemuan Total Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level
Reynaldi Hermansjah	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)	25	25	100
Devi Pradnya Paramita*	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)	21	21	100

BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

In 2021, the composition of the Company's BoD changed from the previous year after the acceptance of Ms Devi Pradnya Paramita's resignation from her position as CFO. The following is the composition of the Company's Board of Directors at the end of 2021:

CONCURRENT POSITION

Information about the concurrent positions of all members of Company's BoD is disclosed in the Company Profile Chapter, the Board of Directors Profile sub-chapter, in this Annual Report.

INDEPENDENCY OF THE BoD

All members of the BoD have declared their commitment and sincerity to carry out their duties and responsibilities seriously, independently, or free from conflicts of interest from any party. The independency of the BoD is stated in the Integrity Pact of the BoD which was signed by each member.

BOARD OF DIRECTORS MEETING**BoD Meeting Policy**

As stipulated in its Charter, the BoD shall convene at least 1 meetings in every months. A BoD meeting shall be chaired by the President Director and the meeting decision-making mechanism shall be made through deliberation to reach consensus.

Meeting Frequency and Attendance

During 2021, the BoD convened 25 internal meetings with the following descriptions:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Pertemuan Total Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level
I Made Wiracita Tantra	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)	25	25	100
Mohammad Ramadhan Harahap	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	25	25	100
Y. Bayu Wirawan	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	25	25	100

*) Ibu Devi Pradnya Paramita efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 1 November 2021
Ms. Devi Pradnya Paramita effectively served as a Director of the Company until 1 November 2021

Agenda Rapat Direksi BoD Meeting Agenda

Tanggal Rapat Meeting Date	Pembahasan Rapat Subject of Meeting
4-Jan-21	
20-Jan-21	
1-Feb-21	
15-Feb-21	
1-Mar-21	
18-Mar-21	
29-Mar-21	
12-Apr-21	
27-Apr-21	
10-May-21	
24-May-21	
7-Jun-21	
22-Jun-21	Rapat Rutin Dua Mingguan Anggota <i>ExComm</i> Bi-Weekly ExComm Meeting
5-Jul-21	
28-Jul-21	
18-Aug-21	
27-Aug-21	
13-Sep-21	
28-Sep-21	
11-Oct-21	
25-Oct-21	
8-Nov-21	
23-Nov-21	
7-Dec-21	
28-Dec-21	

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI TAHUN 2021

Report of The Implementation of The BoD Duties In 2021

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun yang menjadi fokus pelaksanaan tugas Direksi di tahun ini, meliputi:

1. Melakukan evaluasi berkala atas seluruh parameter risiko utama yang dihadapi Perusahaan, termasuk kecukupan kebijakan manajemen risiko dan langkah-langkah mitigasi yang diterapkan oleh Manajemen.
2. Menyetujui dan mengawasi kemajuan berbagai inisiatif maupun rencana kerja divisi Manajemen Risiko dalam menjaga profil risiko dan tingkat kesehatan Perusahaan.
3. Menyetujui penerapan inisiatif *Early Warning System (EWS) – Credit Risk* sebagai mekanisme pengendalian risiko kredit secara regular untuk mengidentifikasi, mengawasi lebih ketat dan menjaga debitur berkualitas buruk atau berpotensi memburuk supaya tidak masuk dalam kategori kredit bermasalah atau pun macet dan akhirnya berdampak terhadap profitabilitas Perusahaan.
4. Menyetujui kajian *stress test* atas keseluruhan portofolio investasi Perusahaan dengan asumsi pandemi COVID-19 berkelanjutan dan dampaknya terhadap potensi penambahan total provisi. Direksi juga merekomendasikan pengawasan lebih ketat atas perkembangan semua akun-akun yang terdampak dan bermasalah, dan menyetujui rencana pengembangan aset yang lebih terfokus pada sektor dengan paparan risiko rendah terhadap pandemi COVID-19.
5. Menyetujui kajian dan proposal perubahan *Portfolio Control Limit* untuk mengakomodasi dinamika lingkungan bisnis dan *Risk Appetite* perseroan.

Throughout 2021, the Board of Directors has effectively discharged all its duties and responsibilities. The focus of the implementation of the duties of the Board of Directors this year included:

1. Made periodic evaluations of all the main risk parameters faced by the Company, including the adequacy of risk management policies and mitigation measures implemented by Management.
2. Approved and oversaw the progress of various initiatives and work plans of the Risk Management division in maintaining the Company's risk profile and healthiness.
3. Approved the implementation of the Early Warning System (EWS) – Credit Risk initiative as a credit risk control mechanism on a regular basis to identify, closely monitored and safeguarded debtors showing deteriorating or potentially deteriorating credit quality so they would not fall under non-performing or troubled loans category which could have an impact on Company profitability.
4. Approved a stress test review of the Company's entire investment portfolio, presuming that the COVID-19 pandemic would be persisting and how it would create the need of additional provisions. The BoD also recommended closer monitoring on the progress of all affected and troubled accounts, and approved an asset development plan that was more focused on sectors with low risk exposure to the pandemic.
5. Approved the study and proposal for changes in Portfolio Control Limit to accommodate dynamic business environment and the Company's Risk Appetite.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

TAHUN 2021

Board of Directors' Competence Development Program In 2021

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota Direksi sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, halaman 80, dalam laporan tahunan ini.

A more detailed description of training and competency development programs that were attended by all members of the BoD in 2021 can be seen in the Company Profile Chapter, page 80, of this annual report.

SESI INDUKSI BAGI DIREKTUR BARU TAHUN 2021

Induction Session of New Director in 2021

Perseroan memiliki sesi induksi bagi anggota Direksi baru agar yang bersangkutan mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai inti dan kondisi atau situasi yang terjadi di Perseroan. Dengan adanya program tersebut diharapkan setiap anggota Direksi baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Perseroan.

Sepanjang tahun 2021, tidak ada anggota Direksi baru. Oleh karena itu, sesi induksi tidak diselenggarakan.

The Company has induction session for the new members of its BoD to give the newly appointed commissioners a comprehensive insights into the Company's core values, conditions, or current situations. With this program, it is hoped that each new member of the BoD can best discharge their duties and responsibilities for the best interest of the Company.

In 2021, there was no new member of the Company's BoD. Therefore, IIF did not organize an induction session.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Assessment of the Committees Under the BoD and the Basis of Assessment

Menurut penilaian Direksi, seluruh komite di bawah Direksi, yakni Komite Investasi, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Risiko, Komite Advisory, Komite Sumber Daya Manusia, dan Komite Pengarah TI, telah berkinerja optimal di tahun 2020, dalam rangka mendukung fungsi pengelolaan usaha Direksi melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.

Based on the Board of Directors' assessment, all Committees under it, the Investment Committee, the Assets and Liabilities Committee, the Risk Management Committee, the Advisory Committee, the Human Resources Committee, and the IT Steering Committee, performed optimally in 2020 through the implementation of their respective duties and responsibilities.

PENILAIAN DIREKSI TERKAIT PENILAIAN ATAS KINERJA UAI DAN KINERJA DIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2021

BoD Assessment on the Assessment of the Performance of the Internal Audit Unit (UAI) and the Risk Management Directorate in 2021

Menurut penilaian Direksi, UAI dan Unit Manajemen Risiko telah berkinerja optimal di tahun 2021, dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Direksi melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UAI dan Unit Manajemen Risiko.

The BoD has assessed UAI and Risk Management Unit have performed optimally in supporting the BoD's supervision function in 2021 by implementing their respective duties and responsibilities.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ utama Perseroan yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya kepengurusan perusahaan yang dikelola oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga berperan dalam memberikan masukan atau rekomendasi kepada Direksi terkait keputusan strategis Perseroan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Perseroan serta memastikan bahwa Perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG pada setiap proses bisnisnya. Keberadaan organ Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

DASAR HUKUM

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
3. Anggaran Dasar Perseroan
4. Piagam Dewan Komisaris

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Perseroan memiliki Piagam Dewan Komisaris yang merupakan pedoman bagi seluruh Komisaris dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini juga telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang diselaraskan dengan POJK 33/2014.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris:

1. Melaksanakan peran pengawasan dan pemberian nasihat dalam hal pengelolaan organisasi, bisnis, dan operasional untuk kepentingan Pemegang Saham, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perseroan;
2. Mengawasi kebijakan Direksi, termasuk pencapaian atas tujuan Perseroan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
3. Mengevaluasi dan memberikan nasihat secara berkala atas pelaksanaan Manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, serta memberikan persetujuan atas perubahan yang diperlukan atau tindakan korektif mengenai sistem tersebut;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan Perseroan dan bisnis yang terkait dengannya, dengan mempertimbangkan hak para pemangku kepentingan.

HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Berikut ini adalah hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

1. Mempunyai kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atau disyaratkan untuk mengawasi kepengurusan Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 14;

The Board of Commissioners (BoC) is the Company's main organ that functions to oversee the management of the Company run by the BoD. In addition, the BoC also plays a role in providing inputs or recommendations to the BoD pertaining to the Company's strategic decisions for the best interests of the Company and ensures that the Company has implemented GCG principles in each of its business processes. The BoC has complied with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 33/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

LEGAL BASIS

1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies
3. Company's Articles of Association
4. BoC Charter

BoC CHARTER

The Company has a BoC Charter which comprises guidelines to all Commissioners in fulfilling their respective roles, duties and responsibilities. These also governs in the Company's Articles of Association which are aligned with POJK 33/2014.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOC

The following is a description of the duties and responsibilities of the BoC as stated in the BoC Charter:

1. Carry out supervisory and advisory functions in managing the organisation, business, and operations for the interests of Shareholders, in line with the Company's vision, mission and objectives;
2. Supervise the BoD's policies, including the achievement of the Company's targets and compliance with prevailing laws and regulations;
3. Periodically evaluate and provide advice on risk management and internal control systems, and provide approval for required changes or corrective actions that must be taken regarding the aforementioned systems;
4. Carry out its duties for the interest of the Company and related businesses, by taking into account the needs and interests of all stakeholders.

RIGHTS AND AUTHORITIES OF THE BoC

The following rights and authorities of the BoC as stated in the Article 14 of the Company's Articles of Associations:

1. Authorized to take all actions necessary or required to supervise the management of the Company and provide advice to the Board of Directors, including, but not limited to, actions as set out in this Article 14;

2. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasannya kepada RUPS Tahunan;
3. Setiap anggota Dewan Komisaris atau pihak lain yang diberikan kuasa berdasarkan keputusan yang diambil secara bulat oleh Dewan Komisaris dapat memeriksa dan menelaah semua atau setiap akun, pembukuan, catatan, perjanjian dan dokumen Perseroan lainnya, dapat melakukan pemeriksaan, penelaahan dan inspeksi atas aset Perseroan di manapun letaknya dan dapat memasuki setiap bangunan atau halaman lain yang dimiliki, disewa atau di bawah penguasaan Perseroan untuk melakukan pemeriksaan, penelaahan dan inspeksi, dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris atau setiap anggotanya atau pihak yang diberi kuasa memberikan pemberitahuan tertulis kepada Presiden Direktur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum melakukan pemeriksaan, penelaahan atau inspeksi tersebut. Direksi dan setiap anggotanya harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diminta oleh Dewan Komisaris atau para anggotanya atau pihak yang diberi kuasa olehnya;
4. Pembagian tugas di antara para anggota Dewan Komisaris akan diatur dan ditentukan oleh RUPS;
5. Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dapat sewaktu waktu memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya apabila ia telah bertindak (selain dengan cara yang tidak material) bertentangan dengan Anggaran Dasar atau ia telah melalaikan kewajibannya atau karena alasan penting lainnya. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan disertai dengan alasannya;
6. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris harus menyampaikan pemberitahuan kepada setiap Pemegang Saham berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19. Pemberitahuan tersebut harus memuat alasan pemberhentian sementara dan harus pula dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sementara tersebut. Anggota Dewan Komisaris tersebut berhak hadir di RUPS Luar Biasa tersebut dan menjelaskan tindakannya atau hal yang tidak dilakukannya;
7. Apabila pemberitahuan sebagaimana disebutkan dalam ayat 6 di atas tidak diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian sementara atau jika RUPS Luar Biasa tersebut tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara seorang anggota Dewan Komisaris atau jika Rapat gagal untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka pemberhentian sementara itu berakhir dengan sendirinya;
8. Apabila semua anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau karena sebab apapun juga tidak ada anggota Dewan Komisaris sama sekali, anggota Dewan Komisaris mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan harus memanggil RUPS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya hal tersebut untuk mengangkat para anggota Dewan Komisaris baru. Dewan Komisaris berhak untuk memberi kuasa kepada 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan hingga diangkatnya para anggota Dewan Komisaris baru;
9. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris akan membentuk, antara lain, komite-komite sebagai berikut:
 2. Deliver report on the performance of its supervisory duties to Annual GMS;
 3. Every member of the Board of Commissioners or other parties granted with a power of attorney under a resolution unanimously adopted by the Board of Commissioners may inspect and examine each and every accounts, records, ledgers, agreements and other documents of the Company, may carry out inspection, examination and review of the Company's assets wherever located and may enter any building or other premises owned, leased or under the possession of the Company to carry out its inspection, examination and review, provided that the Board of Commissioners or each of its members or parties granted with a power of attorney deliver a written notice to the President Director no later than 10 (ten) days prior to the inspection, examination or review. The Board of Directors and each of its members must provide all information regarding the Company as inquired by the Board of Commissioners or its members or parties granted a power of attorney by its members;
 4. The assignments of duties between members of the BoC shall be contemplated and decided in a GMS;
 5. The BoC, according to the resolution of the BoC meeting, may at any time temporarily dismiss members of the Board of Directors from their position if they have acted (other than in a material manner) in violation to the Articles of Association or if they have neglected their obligations or due to any other important reason. The temporary dismissal must be notified to the relevant party along with the reason for the temporary dismissal;
 6. Within 10 (ten) days after the temporary dismissal, the BoC must deliver a notice to each shareholder under the provision of Article 19. The notice must specify the reason for the temporary dismissal and must also be delivered to temporarily dismissed member of the BoC. The member of the BoC shall be entitled to present him/herself at the Extraordinary GMS to defend his/her actions and his/her omissions;
 7. If the notice as set out in paragraph 6 above is not delivered within a period of 10 (ten) days after the temporary dismissal or if the Extraordinary GMS is not held within 30 (thirty) days after the temporary dismissal of a member of BoD or if the meeting has failed to dismiss such member of the BoC within 30 (thirty) day, the temporary dismissal shall cease automatically;
 8. If all members of the BoC are temporarily dismissed of, for whatever reason, the whole BoC positions are vacant, members of the BoC shall manage the Company temporarily and must hold a GMS within 30 (thirty) days after such occurrence to nominate new members for the BoC. The BoC shall be authorized to grant power of attorney to 1 (one) or more members of the BoC to manage the Company until the nomination of new members of the BoC;
 9. In carrying out its supervisory duties, the BoC shall organize, among others, the following committees:

- a. Komite audit yang akan bertanggung jawab untuk menelaah pengawasan internal dan laporan keuangan Perseroan dan membahas dengan auditor mengenai kebijakan akuntansi yang akan diterapkan dalam Perseroan;
 - b. Komite nominasi dan remunerasi yang akan bertanggung jawab untuk mengajukan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dalam Anggaran Dasar;
 - c. Komite manajemen risiko yang akan bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan program manajemen risiko Perseroan, pengenalan terhadap pengendalian risiko yang memadai atas aset dan kewajiban keuangan Perseroan, dan pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan pengurangan risiko; dan
 - d. Komite investasi Perseroan secara keseluruhan yang dibuat oleh Direksi, (2) portofolio investasi Perseroan, dan (3) proyek proyek yang akan dibiayai oleh Perseroan.
10. Anggota setiap komite tersebut di atas mencakup sekurang-kurangnya 1 (satu) Komisaris yang dicalonkan oleh Pemegang Saham pendiri yang berbentuk badan usaha milik negara dan 2 (dua) Komisaris yang dicalonkan oleh Pemegang Saham pendiri yang berbentuk lembaga pembiayaan pembangunan internasional dan jika dianggap perlu oleh Dewan Komisaris, seorang Komisaris Independen. Lingkup tanggung jawab yang rinci dari masing-masing komite akan diputuskan dengan suara bulat dari seluruh anggota Dewan Komisaris dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.

PEMBIDANGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, sesuai dengan kesepakatan Pemegang Saham dan praktik yang berlaku di bidang perbankan di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan pengelolaan kegiatan usaha secara umum yang dilakukan oleh Direksi, dan memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan atas pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran IIF, peraturan berdasarkan Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan kepentingan IIF.

Tanggung jawab utama Dewan Komisaris IIF, antara lain:

- a. Melaksanakan peran pengawasan dan pemberian nasihat dalam mengelola organisasi, bisnis, dan operasional untuk kepentingan Pemegang Saham, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan IIF;
- b. Mengawasi kebijakan Direksi, termasuk pencapaian atas tujuan IIF dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- c. Mengevaluasi dan memberikan nasihat secara berkala atas pelaksanaan Manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, serta memberikan persetujuan atas perubahan yang diperlukan atau tindakan korektif mengenai sistem tersebut;
- d. Melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan IIF dan bisnis yang terkait dengannya, dengan mempertimbangkan hak para pemangku kepentingan IIF.

- a. An audit committee which shall be responsible for the examination of the internal supervisory affairs and the financial statements of the Company and to discuss with the auditor on the accounting policies to be implemented by the Company;
 - b. A nomination and remuneration committee shall be responsible to propose nominees for the BoD and BoC, notwithstanding the provision of Article 13 paragraph (4) of the Articles of Association;
 - c. A risk management committee which shall be responsible for the development and the maintenance of the Company's risk management programs, introduction to sufficient risk control on assets and financial obligations of the Company, and advise related to risk mitigation; and
 - d. A general investment committee of the Company organized by the BoD, the Company's investment portfolio and (3) projects to be financed by the Company;
10. Members of those committees shall include at least 1 (one) commissioner nominated by a founding shareholder in the form of a state-own enterprise and 2 (two) commissioners nominated by founding shareholders in the form of an international development financing agency and, if considered necessary by the Board of Commissioner. The detailed scope of responsibilities of each committee shall be decided by unanimous vote from all members of the BoC in a meeting of BoC.

SEGREGATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOC

The duties and the responsibilities of the commissioners, in line with the shareholders' agreement and established practices in Indonesian banks, are as follows:

The Board of Commissioners is responsible for overseeing the policies and management in general, of its business that is under the management of the Board of Directors (BoD), and to provide advice to the BoD including oversight on the execution of the IIF's business plan and budget, rules under the Articles of Association, resolution of the General Meeting of the Shareholders, and prevailing laws and regulation and at the same time in line with the interest of the IIF.

The main responsibilities of Board of Commissioners in IIF, among other things, are:

- a. Provide supervisory and advisory on the policy of managing the organization and business operation for the interest of shareholders and according to the vision, mission and objectives of IIF;
- b. Supervise the policy of Board of Directors including the achievement of IIF objectives and compliance with applicable law and regulation;
- c. Evaluate and provide advice periodically on the main operation of the internal risk management and control system as well as agree on necessary changes or corrective action regarding such system;
- d. Performing duties in accordance with the interests of IIF and the business associated with it, taking into consideration the interests of all the stakeholders of IIF.

Karena Indonesia mengadopsi struktur Dewan dua tingkat, maka Perseroan dikelola oleh Direksi yang menjalankan pengelolaan bisnis perusahaan sehari-hari. Perseroan juga memiliki Dewan Komisaris yang menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas nama Pemegang Saham. Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

Dalam rangka memenuhi tugas tersebut di atas, Dewan Komisaris berwenang untuk meminta klarifikasi Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan IIF dan membentuk Komite untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris secara efektif. Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite sebagai berikut:

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pengawas Risiko
4. Komite Investasi

Dewan Komisaris, atas pertimbangannya sendiri, dapat membentuk komite lain dan mempekerjakan staf yang memadai, jika ditentukan bahwa komite tersebut diperlukan untuk tujuan khusus atau umum, sehingga Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

Dewan Komisaris diharapkan memberikan pendapat dan persetujuan atas Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan serta rencana lain yang disampaikan oleh Direksi. Kewajiban lainnya antara lain untuk mengusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan IIF.

PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Lebih lanjut, mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Dewan Komisaris telah termaktub pada Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan.

KRITERIA KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah terhitung sejak tanggal pengangkatan pada RUPS sampai penutupan RUPS ("RUPS") ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Dewan Komisaris.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tahun 2021 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

In a two tier Board structure adopted by Indonesia, the daily operations and management of a company shall be managed by a Board of Directors. A company shall also have a Board of Commissioners that oversees and gives advices to the Board of Directors on behalf of the shareholders. Company law regulates that every member of the Board of Commissioners is obliged to perform their s tasks in good faith and with a full sense of responsibility for the interest and business of the company.

In order to fulfil the above duties, the Board of Commissioners is authorised to request clarification from the Board of Directors and/or other officials on issues pertaining to the IIF, and to form Committees to support the effective discharge of the Commissioners' duties and responsibilities. The Board of Commissioners must form the following committees:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Risk Oversight Committee
4. Investment Committee

The Board of Commissioners, at its discretion can form any other committee/s and staff them adequately, if it so determines that such committee/s is/are required for specific or general purposes, in order for the Board to discharge its duties and responsibilities effectively.

The Board of Commissioners is expected to provide an opinion and approval over the Business Plan and Annual Budget as well as other plans that are submitted by the Directors. Other liabilities include among other things to propose at the General Meeting of Shareholders on the appointment the Public Accounting Firm that will audit the financial statements of IIF.

BoC APPOINTMENT AND DISMISSAL PROCEDURES

Members of the BoC are appointed and dismissed by the shareholders through GMS, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. Furthermore, the mechanism for the appointment, dismissal, and resignation of BoC members is set out in Article 13 of the Company's Articles of Association.

MEMBERSHIP CRITERIA AND TERM OF OFFICE

The term of office of the BoC is effective from the date of appointment at GMS until the closing of the 3rd (third) GMS afterward without neglecting the right of the GMS to dismiss it at any time in accordance with the Articles of Association and all applicable provisions.

The Company ensures that all members of its BoC who served during the financial year had met the formal and material requirements as stipulated in the Company's Articles of Association and the BoC Charter.

BoC COMPOSITION

The composition of the Company's BoC did not change in 2021 from the previous year, including the following:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Base Appointment	Periode Menjabat Term of Office
1.	Darmin Nasution	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner	Akta Notaris No. 14 tanggal 20 Juli 2020 Notary Deed No. 14 July 20 2020	Tahun ketiga sejak RUPS pengangkatan Three years after the AGMS appointment
2.	V. Sonny Loho	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Notaris No. 21 tanggal 19 Maret 2020 Notary Deed No. 21 March 19 2020	Tahun ketiga sejak RUPS pengangkatan Three years after the AGMS appointment
3.	Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Notaris No. 21 tanggal 19 Maret 2020 Notary Deed No. 21 March 19 2020	Tahun ketiga sejak RUPS pengangkatan Three years after the AGMS appointment
4.	Yon Arsal	Komisaris Commissioner	Akta Notaris No. 10 tanggal 15 Juli 2020 Notary Deed No. 10 July 15 2020	Tahun ketiga sejak RUPS pengangkatan Three years after the AGMS appointment
5.	Bhimantara Widyajala	Komisaris Commissioner	Akta Notaris No. 31 tanggal 21 Maret 2019 Notary Deed No. 31 March 21 2019	Tahun ketiga sejak RUPS pengangkatan Three years after the AGMS appointment
6.	Lodewijk Govaerts	Komisaris Commissioner	Akta Notaris No. 10 tanggal 14 Agustus 2019 Notary Deed No. 10 August 14 2019	Tahun ketiga sejak RUPS pengangkatan Three years after the AGMS appointment
7.	Andreas Zeisler	Komisaris Commissioner	Akta Notaris No. 31 tanggal 21 Maret 2019 Notary Deed No. 31 March 21 2019	Tahun ketiga sejak RUPS pengangkatan Three years after the AGMS appointment
8.	Richard Lyon Ranken	Komisaris Commissioner	Akta Notaris No. 31 tanggal 21 Maret 2019 Notary Deed No. 31, March 21, 2019	Tahun ketiga sejak RUPS pengangkatan Three years after the AGMS appointment
9.	Ken Tomisaki	Komisaris Commissioner	Akta Notaris No. 12 tanggal 16 Juni 2020 Notary Deed No. 12, June 16 19 2020	Tahun ketiga sejak RUPS pengangkatan Three years after the AGMS appointment

INFORMASI RANGKAP JABATAN

Pengungkapan informasi rangkap jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Dewan Komisaris, dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan objektif, serta terbebas dari benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali setiap 2 bulan. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dan mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan rapat Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada kebijakan berikut ini:

- Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Keempat terhadap Perjanjian Pemegang Saham Pasal III tentang Dewan Komisaris;
- Akta No. 34 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., selaku pengganti Sutjipto S.H., notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21503.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123 Pasal 15 tentang Rapat Dewan Komisaris;
- Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 43 tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat oleh Utiék R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU -AH.01.03-0227488;

CONCURRENT POSITION INFORMATION

Information about the concurrent positions of all members of Company's BoC is disclosed in the Company Profile Chapter, the Board of Commissioners Profile sub-chapter, in this Annual Report.

INDEPENDENCY OF BOC

All members of the BoC shall carry out their supervisory functions independently and objectively, and shall be free from conflicts of interest or pressure from any party.

BoC MEETING

BoC Meeting Policy

The BoC shall convene at least 1 meetings in every 2 months. A BoC meeting shall be chaired by the President Commissioner and the decision-making mechanism in the meeting shall be made through deliberation to reach consensus.

In general, the convention of the Company's BoC meetings shall refer to the following policies:

- The Fourth Amendment and Restatement to the Shareholders Agreement Article III on the BoC;
- Deed No. 34 dated 15 January 2010, made before Aulia Taufani, S.H., as a substitute of Sutjipto S.H., Notary in Jakarta, ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-21503.AH.01.01. of 2010 dated 28 April 2010 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated 11 March 2011, Supplement No. 5123 Article 15 on BoC Meetings;
- The Company's Articles of Association have been amended several times, with the most amendment confirmed by Deed No. 43 dated 24 July 2018 drawn up by Utiék R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, ratified by the Minister of Law of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU -AH.01.03-0227488;

d. Pasal 31 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

d. Article 31 of POJK No. 33/POJK.04/2014 on the BoD and the BoC of Issuers or Public Companies.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengadakan 10 kali rapat internal dengan uraian sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance

The BoC convened 10 internal meetings throughout 2021, with the attendance level as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Pertemuan Total Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level
Darmin Nasution	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner	10	10	100%
V. Sonny Loho	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	10	100%
Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	10	100%
Yon Arsial	Komisaris Commissioner	10	10	100%
Bhimantara Widyajala	Komisaris Commissioner	10	10	100%
Lodewijk Govaerts	Komisaris Commissioner	10	10	100%
Andreas Zeisler	Komisaris Commissioner	10	10	100%
Richard Lyon Ranken	Komisaris Commissioner	10	10	100%
Ken Tomisaki	Komisaris Commissioner	10	10	100%

Agenda Rapat Dewan Komisaris

BoC Meeting Agenda

Tanggal Rapat Meeting Date	Pembahasan Rapat Subject of Meeting
24 Februari 2021 February 24, 2021	1) KPI Perseroan 2021; dan 2) Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk didiskusikan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat. 1) Corporate KPI 2021; and 2) Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the Meeting.
12 March 2021 Maret 12, 2021	1) Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan IIF 2020; dan 2) Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk didiskusikan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat. 1) IIF Annual Report and Sustainability Report 2020; and 2) Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the Meeting.
1 April 2021 April 1, 2021	1) Pembahasan Mata Acara RUPST 2021; 2) Pembahasan strategi dalam menindaklanjuti Permintaan Penyertaan Modal Perseroan; 3) Pembahasan Tata Cara Pelaksanaan Kebijakan Benturan Kepentingan; dan 4) Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk didiskusikan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat. 1) Discussion on 2021 AGMS Agenda; 2) Discussion on the strategy in proceeding with the Company's Capital Injection Request; 3) Discussion on Policy Implementation Procedure for Conflict of Interest; and 4) Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the Meeting.
21 April 2021 April 21, 2021	1) Laporan dan <i>update</i> terkini dari seluruh Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite BoC-Investasi); 2) <i>Update</i> Perseroan; 3) Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk didiskusikan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat. 1) Report and progress update of all BoC Committees (Audit, RoC, NRC and Investment); 2) Company Update 3) Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the Meeting.
29 Juni 2021 June 29, 2021	Khusus Anggota Dewan Komisaris – Rahasia BoC Members only – Confidential

Tanggal Rapat Meeting Date	Pembahasan Rapat Subject of Meeting
22 Juli 2021 July 22, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan dan <i>update</i> terkini dari seluruh Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite BoC-Investasi); 2) <i>Update</i> Perseroan dan Kinerja Keuangan Semester I per 30 Juni 2021; 3) Usulan Revisi Rencana Bisnis 2021; 4) Studi Pengambilan Nilai; 5) Transaksi Afiliasi pada Proyek Advisory; dan 6) Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk didiskusikan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat. <ol style="list-style-type: none"> 1) Report and progress update of all BoC Committees (Audit, RoC, NRC and Investment); 2) Company Update and Mid-year based on Financial Performance as of 30 June 2021; 3) Company Update and Mid-year based on Financial Performance as of 30 June 2021; 4) Proposed 2021 Revised Business Plan; 5) Value Capture Study; 6) Affiliated Transaction on Advisory Projects; and 7) Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the Meeting.
23 September 2021 September 23, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1) Usulan pendanaan; 2) Penciptaan Nilai - Mengoptimalkan Kapasitas yang Ada (bagian dari proses peningkatan modal); dan 3) Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk didiskusikan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat. <ol style="list-style-type: none"> 1) Funding proposal; 2) Value Creation - Optimizing Existing Capacity (part of capital raising process); and 3) Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the BoC members in the Meeting.
28 Oktober 2021 October 28, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan dan <i>update</i> terkini dari seluruh Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite BoC-Investasi); 2) <i>Update</i> Perseroan dan Kinerja Keuangan per 30 September 2021; 3) Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk didiskusikan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat. <ol style="list-style-type: none"> 1) Report and progress update of all BoC Committees (Audit, RoC, NRC and Investment); 2) Company Update and Financial Performance as of 30 September 2021; 3) Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the Meeting.
11 November 2021 November 11, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana Bisnis dan Anggaran 2022; dan 2) Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibicarakan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat. <ol style="list-style-type: none"> 1) 2022 Business Plan and Budget; and 2) Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the Meeting.
13 Desember 2021 December 13, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan dan <i>update</i> terkini dari seluruh Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite BoC-Investasi); 2) <i>Update</i> Perseroan; dan 3) Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibicarakan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat. <ol style="list-style-type: none"> 1) Report and progress update of all BoC Committees (AC, ROC, NRC and Investment); 2) Company Update; and 3) Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the Meeting.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2021

BoC Competence Development Program for 2021

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, halaman 80, dalam laporan tahunan ini.

A more detailed description of training and competency development programs that were attended by all members of the BoC in 2021 can be seen in the Company Profile Chapter, page 80, of this annual report.

SESI INDUKSI BAGI KOMISARIS BARU Induction Session of New Commissioners

Perseroan menetapkan kebijakan pemberian sosialisasi bagi setiap anggota baru Dewan Komisaris yang bertujuan untuk memastikan agar yang bersangkutan dapat secepatnya beradaptasi dan memahami proses bisnis dan situasi atau iklim kerja Perseroan. Pada tahun 2021, tidak ada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Oleh karena itu, IIF tidak menyelenggarakan sesi induksi.

The Company has a policy for the induction for the new members of its BoC so the new members can adapt quickly to and comprehend the Company's business and current situation or work climate. In 2021, there was no new member of the Company's BoC. Therefore, IIF did not organize an induction session.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA Assessment of Performance of the Committees Under BoC and the Basis of Assessment

Seluruh komite di bawah Dewan Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Investasi, pada tahun 2021 telah menunjukkan kinerja yang optimal dalam menunjang fungsi pengawasan Dewan Komisaris melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.

All committees under the BoC, i.e., the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Oversight Committee, and the Investment Committee, in 2021 delivered optimum performance in supporting the BoC's supervisory function through the implementation of their respective duties and responsibilities.

RAPAT GABUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BoD-BoC Joint Meetings

Di tahun 2021, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan 9 (sembilan) kali rapat gabungan dengan kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

In 2021, the BoC and BoD held 9 (nine) joint meetings, with the following attendance level:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Pertemuan Total Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level
Dewan Komisaris/BoC				
Darmin Nasution	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner	9	9	100%
V. Sonny Loho	Komisaris Independen Independent Commissioner	9	9	100%
Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen Independent Commissioner	9	9	100%
Yon Arsial	Komisaris Commissioner	9	9	100%
Bhimantara Widyajala	Komisaris Commissioner	9	9	100%
Lodewijk Govaerts	Komisaris Commissioner	9	9	100%

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Pertemuan Total Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level
Andreas Zeisler	Komisaris Commissioner	9	9	100%
Richard Lyon Ranken	Komisaris Commissioner	9	9	100%
Ken Tomisaki	Komisaris Commissioner	9	9	100%
Direksi/BoD				
Reynaldi Hermansjah	President Director & CEO	9	9	100%
Devi Pradnya Paramita*	Managing Director & CFO	7	7	100%
I Made Wiracita Tantra	Managing Director & CRO	9	9	100%
Mohammad Ramadhan Harahap	Managing Director & CIO	9	9	100%
Y. Bayu Wirawan	Managing Director & CIO	9	9	100%

*) Ibu Devi Pradnya Paramita efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 1 November 2021
Ms. Devi Pradnya Paramita effectively served as a Director of the Company until 1 November 2021

KOMISARIS INDEPENDEN

Independent Commissioner

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Perseroan memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen. Jumlah tersebut sudah memenuhi ketentuan POJK 33/2014 yang mewajibkan keberadaan Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Komisaris Independen

Mengacu pada ketentuan POJK 33/2014, IIF menegaskan bahwa seluruh Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi persyaratan atau kualifikasi individual sebagai Komisaris Independen, antara lain sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan

Independent Commissioners are members of the BoC who are not affiliated with members of the BoD, fellow members of the BoC or controlling shareholders, and are free from business or any other type of relationships that may keep them from acting independently or solely for the interests of the Company.

The Company has 3 (three) Independent Commissioners. This figure has complied with the provisions of POJK No 33/2014 which requires that at least 30% of the total members of BoC shall be Independent Commissioners.

Independent Commissioner Criteria

Referring to the provisions of POJK 33/2014, IIF confirms that all Independent Commissioners of the Company have met the requirements or individual qualifications as Independent Commissioners, including the following:

1. Not any one who has served or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the next term of office;
2. Does not own shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company;
3. Has no affiliation with the issuer or Public Company, fellow members of the BoC, members of the BoD, or major shareholder of the Issuer or Public Company; and

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
 5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.
 5. Has a commitment to comply with the laws and regulations;
 6. Has knowledge and/or expertise in the field required by the Issuer or Company;

Profil Komisaris Independen

Profil Komisaris Independen Perseroan dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam laporan tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Mengacu pada ketentuan POJK 33/2014, setiap Komisaris Independen telah menyatakan independensinya kepada RUPS dan wajib melaporkan jika terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya.

Profile of Independent Commissioner

The profile of the Company's Independent Commissioners can be seen in the BoC Profile section of this annual report.

Statement of Independency of Independent Commissioners

Referring to the provisions of POJK 33/2014, each Independent Commissioner has declared his independency to the GMS and is obliged to report if there is a change in status that affects their independency.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Diversity of Composition of The BoC and BoD

Kebijakan nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan senantiasa menjunjung tinggi keberagaman komposisi anggota dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian, usia, pendidikan, gender, dan pengalaman berkarier profesional. Perseroan meyakini pemetaan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan Perseroan akan mendukung kelancaran jalannya pengurusan perusahaan, yang mana di sisi lain juga berdampak positif terhadap efektivitas terlaksananya fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diselaraskan dengan ketentuan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat ringkasan derajat keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, antara lain sebagai berikut:

The nomination policy for the BoC and the BoD of the Company upholds the diverse composition of the boards' members with due consideration on the background of expertise, age, education, gender, and professional career experience. The Company believes that the proper composition mapping of the two boards based on the Company's needs should support the Company's smooth management, while also have positive impacts on the effectiveness of the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners.

The Policy for Diversity in the Composition of the Company's BoC and BoD has been aligned with the provisions of POJK No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines.

The following table presents a summary of the degree of diversity of the BoC and BoD of the Company, including the following:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender		Umur (tahun) Age (Years)			Latar Belakang Pendidikan	Educational Background	Keahlian Expertise
		Pria Male	Wanita Female	<30	30-50	>50			
Darmin Nasution	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner	√				√	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Depok (1976) • Magister dan Doktorat di bidang Ekonomi dari University of Paris, Prancis (1986) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor Degree in Economics from the University of Indonesia, Depok (1976) • Master and Doctoral Degrees in Economics from the University of Paris, France (1986) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi/Economics • Pasar Modal/Capital Market • Perpajakan/Taxation

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender		Umur (tahun) Age (Years)			Latar Belakang Pendidikan	Educational Background	Keahlian Expertise
		Pria Male	Wanita Female	<30	30-50	>50			
V. Sonny Loho	Komisaris Independen Independent Commissioner	√				√	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi (Diploma IV) bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta (1987) Master of Public and Management Finance dari Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Amerika Serikat (1998) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor Degree in Economics (Diploma IV) in Accounting from the State College of Accountancy, Jakarta (1987) Master Degree in Public and Management Finance from Carnegie Mellon University, Pittsburgh, United States (1998) 	<ul style="list-style-type: none"> Akuntansi/Accounting Manajemen Keuangan/Financial Management
Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen Independent Commissioner	√				√	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung (1985) Master of Business Administration dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), Jakarta (1988) Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2014) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor Degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB), Bandung (1985) Master of Business Administration Degree from the Indonesian Management Development Institute (IPMI), Jakarta (1988) Doctoral Degree in Management Science from Padjadjaran University, Bandung (2014) 	Manajemen Keuangan Financial Management
Yon Arsal	Komisaris Commissioner	√				√	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1995) Master of Arts dari Kobe University, Jepang (2004) Magister Sains bidang Administrasi Fiskal dari Universitas Indonesia, Jakarta (2005) Doktoral bidang Ilmu Ekonomi dari Kobe University, Jepang (2007) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor Degree in Economics from Padjadjaran University, Bandung (1995) Master of Arts Degree from Kobe University, Japan (2004) Master of Science Degree in Fiscal Administration from the University of Indonesia, Jakarta (2005) Doctoral Degree in Economics from Kobe University, Japan (2007) 	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Fiskal/ Fiscal Administration Perpajakan/Taxation
Bhimantara Widyajala	Komisaris Commissioner	√				√	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Depok (1992) Sarjana Ekonomi (Diploma IV) bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta (1995) Master of Science in Finance dari George Washington University, Amerika Serikat (1999) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor degree in Law from the University of Indonesia, Depok (1992) Bachelor Degree in Economics (Diploma IV) in Accounting from the State College of Accountancy (STAN), Jakarta (1995) Master of Science Degree in Finance from George Washington University, United States (1999) 	<ul style="list-style-type: none"> Audit/Audit Manajemen Risiko/ Risk Management Pemeriksaan Kecurangan/Fraud Audit Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance
Lodewijk Govaerts	Komisaris Commissioner	√				√	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana jurusan administrasi bisnis dari Groningen School of Management, Belanda (1986) Master of Business Administration dari Groningen School of Management, Belanda (1990) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor's Degree in business administration from Groningen School of Management, Netherlands (1986) Master of Business Administration Degree from Groningen School of Management, Netherlands (1990) 	<ul style="list-style-type: none"> Perbankan/Banking Investasi/Investment Manajemen Keuangan/Financial Management

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender		Umur (tahun) Age (Years)			Latar Belakang Pendidikan	Educational Background	Keahlian Expertise
		Pria Male	Wanita Female	<30	30-50	>50			
Andreas Zeisler	Komisaris Commissioner	√				√	<ul style="list-style-type: none"> • Master di bidang Keuangan Internasional dari Moscow Finance Institute (1983) • Doktor di bidang Ekonomi dari University of Berlin, Jerman (1991) 	<ul style="list-style-type: none"> • Master Degree in International Finance from Moscow Finance Institute (1983) • Doctoral Degree in Economics from the University of Berlin, Germany (1991) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbankan/Banking • Investasi/Investment • Manajemen Keuangan/Financial Management
Richard Lyon Ranken	Komisaris Commissioner	√				√	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi Pertanian dari Australian National University (ANU), Australia • Magister Administrasi Negara dari Australian National University (ANU), Australia 	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor Degree in Agricultural Economics from Australian National University (ANU), Australia • Master Degree in Public Administration from Australian National University (ANU), Australia 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbankan/Banking • Investasi/Investment • Manajemen Keuangan/Financial Management
Ken Tomisaki	Komisaris Commissioner	√				√	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Hukum dari Waseda University, Jepang (1994) • <i>Master of Business Administration</i> dari Stanford University, Amerika Serikat (2000) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor Degree in Law from Waseda University, Japan (1994) • Master of Business Administration Degree from Stanford University, USA (2000) 	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Bisnis/Business Administration • Perbankan/Banking
Reynaldi Hermansjah	Presiden Direktur President Director	√				√	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti, Jakarta (1991) • Magister dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Jakarta (2016) • <i>Doctoral Degree of Management</i> dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Jakarta (2021) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor Degree in Electrical Engineering from Trisakti University, Jakarta (1991) • Master Degree from Pelita Harapan University (UPH), Jakarta (2016) • Doctoral Degree in Management from Pelita Harapan University (UPH), Jakarta (2021) 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri infrastruktur (sektor jalan tol)/ Infrastructure Industry (toll road sector) • Finansial, terutama Investasi dan Pasar Modal/Finance, mainly in Investment and Capital Market
Devi Pradnya Paramita	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Executive Director and Chief Financial Officer (CFO)		√			√	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bachelor of Arts</i> jurusan International Relations and Affairs dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1999) • Magister Keuangan jurusan khusus Manajemen Risiko dari ICMA Business School, Inggris (2000) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Arts Degree in International Relations and Affairs from Parahyangan Catholic University, Bandung (1999) • Master Degree in Finance with specialization in Risk Management from ICMA Business School, UK (2000) 	<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan Perusahaan/ Corporate Finance • Manajemen Keuangan/Financial Management
I Made Wiracita Tantra	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Executive Director and Chief Risk Officer (CRO)	√				√	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bachelor of Arts</i> bidang Ekonomi dari State University of New York, Amerika Serikat (1988) • <i>Master of Science</i> bidang Manajemen Keuangan dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat (1989 - 1990) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Arts Degree in Economics from State University of New York, United States (1988) • Master of Science Degree in Financial Management from Johns Hopkins University, United States (1989 - 1990) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Kredit/ Credit Management • Pengendalian Risiko/ Risk Control • Hubungan dalam lingkungan Kelembagaan dan Korporasi/Relations in Institutional and Corporate Environments

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender		Umur (tahun) Age (Years)			Latar Belakang Pendidikan	Educational Background	Keahlian Expertise
		Pria Male	Wanita Female	<30	30-50	>50			
Mohammad Ramadhan Harahap	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)	√				√	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia, Depok (1992) <i>Master of Science</i> bidang <i>Engineering Management</i> dari Northeastern University, Boston, Amerika Serikat (1994) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor Degree in Mechanical Engineering from the University of Indonesia, Depok (1992) Master of Science Degree in Engineering Management from Northeastern University, Boston, United States (1994) 	<ul style="list-style-type: none"> Keteknikan/ Engineering Perbankan/Banking
Y. Bayu Wirawan	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)	√				√	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Gas dan Petrokimia dari Universitas Indonesia, Depok (1996) Magister Perbankan dan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia, Depok (1999) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor Degree in Gas and Petrochemical Engineering from the University of Indonesia, Depok (1996) Master Degree in Banking and Financial Management from the University of Indonesia, Depok (1999) 	<ul style="list-style-type: none"> Perbankan/Banking Manajemen Keuangan/Financial Management

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Performance Assessment of the BoC and BoD

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi baik secara kolejal dan individu yang dilakukan setiap tahun dengan metode *self-assessment* oleh masing-masing anggota Direksi dan Komisaris.

Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan menilai tingkat pencapaian Perseroan dibandingkan dengan target (*Key Performance Indicators*) yang telah disepakati pada awal tahun buku. Evaluasi kinerja Direksi juga dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil penilaian kinerja Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris dan evaluasi akhir penilaian akan dilakukan oleh Presiden Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Hasil evaluasi kinerja Direksi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan arahan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Direksi ke depannya dan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan/atau untuk menyusun struktur remunerasi Direksi.

Selain itu, penilaian kinerja Direksi juga disampaikan secara umum pada saat RUPS Tahunan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada Pemegang Saham.

Procedure for the Performance Appraisal of the BoC and the BoD

The performance of the BoC and the BoD is evaluated collegially and the individual performance of members is self-evaluated annually by each member of the two boards.

Board of Directors

Performance appraisal of the BoD is conducted by assessing the level of achievement of the Company against its Key Performance Indicators that are agreed upon at the beginning of each fiscal year. The BoD performance is also evaluated with due consideration on how the Board has discharged its duties and responsibilities in compliance with all applicable regulations and/or the Company's Articles of Association.

The BoD performance appraisal results will be submitted to the BoC and the President Commissioner will evaluate the results based on the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee. The results of the performance evaluation of the BoD are used as consideration in providing directives to improve the effectiveness of the BoD performance in the future and as one of the basic considerations for the Nomination and Remuneration Committee in giving recommendations to the BoC to reappoint members of the BoD and/or to develop the remuneration structure of the BoD.

In addition, the BoD performance appraisal is also conveyed at the Annual GMS. This is done as a form of accountability for the implementation of the duties and responsibilities of the BoD to shareholders.

Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota Komisaris dengan mempertimbangkan pencapaian target KPI Dewan Komisaris yang telah disepakati di awal tahun, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris tersebut disampaikan kepada Presiden Komisaris dan evaluasi akhir penilaian akan dilakukan oleh Presiden Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Hasil evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan arahan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris dan merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan/atau untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris.

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris juga disampaikan dalam Laporan Tahunan dan pada saat RUPS Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Secara umum kriteria penilaian yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:

- Tingkat kehadiran dalam masing-masing rapat internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi beserta rapat dengan Komite-Komite Pendukung di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi;
- Kontribusi dalam proses pengawasan dan pemberian nasihat terhadap jajaran Manajemen.

Pihak Penilai

Direksi

Masing-masing anggota Direksi melakukan penilaian kinerja secara mandiri untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris dan evaluasi akhir penilaian akan dilakukan oleh Presiden Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris

Masing-masing anggota Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja secara mandiri. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Presiden Komisaris dan evaluasi akhir penilaian akan dilakukan oleh Presiden Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Board of Commissioners

The performance of the BoC is appraised independently by each member of the Board with due consideration on the achievement of the KPI targets of the BoC that are agreed at the beginning of each year, and on the effectiveness of the implementation of the BoC duties and responsibilities in compliance with all applicable regulations and/or the Company's Articles of Association.

The BoC performance evaluation results will be submitted to the President Commissioner who will then make the final evaluation of the assessment based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee. The BoC performance evaluation results will be considered in providing directives for improved effectiveness of the BoC performance and considered as one of the basic considerations for the Nomination and Remuneration Committee in providing recommendations to reappoint members of the BoC and/or to develop the remuneration structure of the BoC.

The results of BoC performance evaluation is also conveyed in Annual Report to the GMS as a form of accountability for the implementation of the Board's duties and responsibilities.

Performance Assessment Criteria for the BoC and the BoD

In general, the assessment criteria used to evaluate the performance of the BoD and the BoC include:

- The level of attendance in the internal meeting of the Board or in BoC-BoD joint meeting as well as meetings with the Supporting Committees under the BoC and the BoD;
- Contribution in the process of overseeing and providing advice to the Management.

Appraiser

Board of Directors

Each member of the BoD shall make an independent performance assessment whose results will be submitted to the BoC and the final evaluation will be assessed by the President Commissioner based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

Board of Commissioners

Each member of the BoC shall make an independent performance appraisal. The assessment results will be submitted to the President Commissioner who will then make final evaluation of the assessment based on the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BoC and BoD Remuneration

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut ini adalah prosedur nominasi Dewan Komisaris dan Direksi IIF, yaitu:

- NRC melakukan seleksi dan memberikan nominasi calon yang akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris;
- Dewan Komisaris melakukan seleksi dan memberikan nominasi calon yang akan direkomendasikan kepada Pemegang Saham;
- Ketua NRC dan Dewan Komisaris memberikan rekomendasi nominasi calon dan remunerasinya kepada Pemegang Saham;
- Pemegang Saham memberikan tanggapan, pertanyaan dan/atau persetujuannya pada nominasi yang disampaikan oleh Ketua NRC dan Dewan Komisaris;
- Khusus untuk anggota Komisaris yang mewakili Pemegang Saham, seleksi dan nominasinya dilakukan oleh Pemegang Saham terkait.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penentuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dimulai dengan pembahasan oleh Dewan Komisaris mengenai indikator-indikator utama yang harus diperhatikan dalam proses penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya, Dewan Komisaris menentukan usulan struktur dan besaran remunerasi dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan pertimbangan yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Selanjutnya, usulan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan kepada Pemegang Saham pada saat RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan.

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Berikut ini adalah sejumlah indikator utama atau faktor-faktor penentu yang dijadikan sebagai landasan pertimbangan dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu:

- 1) Kinerja Perseroan;
- 2) Faktor skala usaha;
- 3) Faktor kompleksitas usaha;
- 4) Tingkat inflasi;
- 5) Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan; dan
- 6) Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut ini adalah struktur dan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain sebagai berikut:

Procedure for Nomination of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The following is the nomination procedure for the Board of Commissioners and Board of Directors of IIF:

- The NRC selects and gives a list of nominated candidates as recommendation to the Board of Commissioners;
- The Board of Commissioners selects the candidates to be proposed to the shareholders;
- The Chairman of the NRC and the Board of Commissioners propose the recommended candidates and their remuneration to shareholders;
- Shareholders give their responses, questions and/or approval to the nominations submitted by the Chairperson of the NRC and the Board of Commissioners;
- Specifically for members of the Board of Commissioners who represent shareholders, the selection and nomination process is carried out by the relevant shareholders.

Procedure for Determining the Remuneration for the BoC and the BoD

The determination of the remuneration for the BoC and the BoD begins with a discussion by the BoC regarding the key indicators that must be considered in the entire process of remuneration determination. Furthermore, the BoC shall determine the proposed remuneration structure and amount with due consideration on the evaluation results and considerations given by the Nomination and Remuneration Committee. The proposal for determining the remuneration for the BoC and the BoD will then be submitted to shareholders at the Annual GMS for approval.

Indicators for Determining the Remuneration of the Board of Directors

The following are some key indicators or determining factors that serve as the basic consideration in determining the remuneration of the BoC and the BoD:

- 1) Company Performance;
- 2) Business scale factor;
- 3) Business complexity factor;
- 4) Inflation rate;
- 5) Company's financial condition and capability; and
- 6) Other relevant factors, and must not conflict with the laws and regulations.

Remuneration Structure for the BoC and the BoD

The following is the structure and components of the remuneration for the BoC and the BoD:

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Disclosure of Affiliation Relationship of BoC, BoD, and the Controlling Shareholders

Pengungkapan mengenai hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali sebagai salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Pada tabel pengungkapan hubungan afiliasi di bawah ini dapat dilihat bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham utama/pengendali.

The affiliation relationship between members of the BoD, members of the BoC, and Controlling Shareholders as one of the criteria used to measure the independence of the two boards is disclosed in the table below, which includes:

1. Affiliation relationship between members of the BoD and other members of the BoD;
2. Affiliation relationship between members of the BoD and members of the BoC;
3. Affiliation relationship between members of the BoD and the Major and/or controlling Shareholders;
4. Affiliation relationship between members of the BoC and other members of the BoC; and
5. Affiliation relationship between members of the BoC and the Major and/or controlling Shareholders.

In the affiliation relationship disclosure table below, it can be seen that all members of the Company's BoC and BoD do not have familial relationships with members of the BoC, the BoD and major/controlling shareholders.

Nama Name	Hubungan Keluarga Familial Relationship						Hubungan Keuangan Financial Relationship					
	Dewan Komisaris BoC		Direksi BoD		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris BoC		Direksi BoD		Pemegang Saham Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris BoC												
Darmin Nasution	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
V. Sonny Loho	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rinaldi Firmansyah	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Yon Aرسال	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Bhimantara Widyajala	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Lodewijk Govaerts	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Andreas Zeisler	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Richard Lyon Ranken	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Ken Tomisaki	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-

Nama Name	Hubungan Keluarga Familial Relationship						Hubungan Keuangan Financial Relationship					
	Dewan Komisaris BoC		Direksi BoD		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris BoC		Direksi BoD		Pemegang Saham Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Direksi BoD												
Reynaldi Hermansjah	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Devi Pradnya Paramita	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
I Made Wiracita Tantra	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Mohammad Ramadhan Harahap	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Y. Bayu Wirawan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS BoC Supporting Organs

Dalam menjalankan fungsi pengawasan setiap harinya, Dewan Komisaris dibantu oleh organ-organ pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Investasi–Dewan Komisaris.

In carrying out its daily supervisory function, the BoC is assisted by supporting organs, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Investment Committee – the Board of Commissioners.

KOMITE AUDIT Audit Committee

Komite Audit adalah salah satu organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan Perseroan. Pembentukan Komite Audit IIF mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris No. 001/IIF/BoC-RES/IV/2016 tanggal 21 April 2016. Keberadaan dan pembentukan Komite Audit IIF merupakan wujud kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2014 (“POJK 55/2014”) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dengan adanya Komite Audit, Perseroan berharap kualitas pengawasan internal dapat meningkat, serta mekanisme *checks and balances* khususnya terkait kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan, dan auditor internal maupun eksternal senantiasa dapat berjalan optimal.

DASAR HUKUM

1. POJK No. 55/POJK.04/2015 (“POJK 55/2014”) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
2. Anggaran Dasar Perseroan
3. Piagam Komite Audit

The Audit Committee is one of the BoC’s supporting organs tasked specifically with assisting the BoC in discharging its supervisory duties and providing advices pertaining to the Company’s management. The establishment of IIF Audit Committee refers to the BC Decree No. 001/IIF/BoC-RES/IV/2016 dated April 21 2016. The existence and establishment of the IIF Audit Committee is a form of the Company’s compliance with the provisions of POJK 55/POJK.04/2014 (“POJK 55/2014”) on the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee. With the existence of the Audit Committee, the Company seeks to improve the quality of internal supervision, checks and balances mechanism, especially on accounting policies, financial reporting, and internal and external auditors.

LEGAL BASIS

1. POJK No. 55/POJK.04/2015 (“POJK 55/2014”) regarding the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee
2. Company’s Articles of Association
3. Audit Committee Charter

PIAGAM KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit yang telah disahkan pada 21 April 2016. Piagam ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, struktur, dan kualifikasi tanggung jawab, pertemuan, pelaporan, serta masa jabatan anggota Komite Audit. Apabila diperlukan, Piagam Komite Audit dapat diperbarui agar senantiasa selaras dengan dinamika bisnis, tantangan yang dihadapi dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan, antara lain untuk:

1. Menelaah laporan hasil identifikasi isu-isu pengendalian yang membutuhkan perhatian atau subjek koreksi serta merangkul kegiatan tindak lanjut yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut;
2. Menelaah cara dan kerangka kerja Manajemen dalam memastikan dan memantau kecukupan sifat, tingkat, dan efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk pengendalian sistem akuntansi, dan mengelola efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk tinjauan tahunan dari kecukupan pengawasan pengendalian dan proses eskalasi atas suatu permasalahan;
3. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perseroan diwajibkan untuk mengedepankan prinsip keterbukaan dalam Laporan Tahunan terkait pengawasan internal. Oleh sebab itu Komite Audit harus menelaah pernyataan-pernyataan tersebut sebelum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;
4. Meminta keterangan dari Presiden Direktur/Direktur Pelaksana dan Direktur Keuangan mengenai keberadaan setiap kekurangan yang signifikan dalam sistem pengendalian internal dan setiap potensi penipuan yang teridentifikasi yang dapat memengaruhi Perseroan;
5. Menelaah laporan yang diberikan oleh Auditor Internal dan eksternal, serta memantau status perbaikan yang diperlukan;
6. Menelaah masalah-masalah yang dibahas dan memutuskan apakah perlu atau tidak untuk mengeskalisasi masalah tersebut kepada Dewan Komisaris atau memberitahukannya kepada regulator;
7. Secara khusus, Komite Audit bertanggung jawab atas perbaikan transparansi dan kualitas Laporan Keuangan, dengan cara:
 - a) Memastikan adanya kajian yang layak terhadap Laporan Keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan;
 - b) Mendiskusikan dengan auditor setiap aspek penilaian yang signifikan dan/atau kebijakan akuntansi terkait penyediaan informasi dalam akun-akun dalam laporan keuangan;
 - c) Memastikan bahwa Laporan Keuangan telah disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan peraturan terkait;
 - d) Memastikan semua laporan yang dikirimkan ke regulator dan lembaga terkait lainnya telah disampaikan secara akurat dan tepat waktu.
8. Dalam kaitannya dengan Auditor Internal, Komite Audit bertugas untuk:
 - a) Mengevaluasi Piagam Audit Internal sebelum diajukan ke Dewan Komisaris;
 - b) Mengevaluasi rencana audit tahunan Auditor Internal sebagai masukan bagi Dewan Komisaris;

AUDIT COMMITTEE CHARTER

All members of the Company's Audit Committee shall discharge their duties and responsibilities based on the Audit Committee Charter approved on April 21 2016. The charter governs matters pertaining to the Committees authority, structure, and qualifications of responsibilities, meetings, reporting, and term of office. If necessary, the Audit Committee Charter can be updated to ensure conformity with business dynamics, challenges faced and the Company's corporate needs.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

The following are duties and responsibilities of the Audit Committee to:

1. Review reports identifying issues on control that require attention or correction, and to summarize actions taken to solve said problems;
2. Review methods and frameworks of the Company's Management in ensuring and monitoring the adequacy and effectiveness of internal control systems, including accounting system controls, and managing an effective internal control system, including annual reviews of the adequacy of control supervision and problem escalation mechanism;
3. As stipulated under all applicable laws and regulations, the Company shall prioritize the principle of transparency in the Annual Report related to internal control. Therefore, Audit Committee must review these statements before obtaining an approval from the BoC;
4. Request feedback from the President Director/Managing Director and Chief Financial Officer on any significant weaknesses in the internal control system and for any indications of potential fraud that may affect the Company;
5. Review reports from internal and external auditors and monitor the status of remedial actions, if any;
6. Review issues being discussed and determine if such issues will be escalated to the BoC or brought to the attention of regulators;
7. The Committee is responsible for improving the transparency and quality of financial statements through the following duties:
 - a) Ensure proper reviewing of the financial statements that will be issued by the Company;
 - b) Discuss every significant assessment and/or accounting policy in the provision of information in financial accounts in the financial statements with the auditors;
 - c) Ensure the financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles and related regulations;
 - d) Ensure that all reports sent to the regulators and other related institutions have been submitted accurately and punctually.
8. With regards to the Internal Auditor, the Committee's duties to:
 - a) Evaluate the Internal Audit Charter before it is submitted for approval to the BoC;
 - b) Evaluate the annual audit plan prepared by the Internal Auditor for consideration by the BoC;

- c) Memastikan bahwa tidak ada pembatasan yang dibuat oleh Manajemen terhadap proses audit yang dilakukan oleh Auditor Internal;
 - d) Mengevaluasi efektivitas fungsi Audit Internal;
 - e) Memastikan bahwa setiap temuan yang signifikan dari proses audit internal telah dilaporkan segera dan didiskusikan bersama;
 - f) Memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Auditor Internal telah ditindaklanjuti oleh Manajemen;
 - g) Menugaskan Auditor Internal untuk melakukan audit khusus apabila ditemukan adanya indikasi penipuan atau penyimpangan Manajemen; dan
 - h) Mengevaluasi penunjukan dan penggantian Ketua Auditor Internal dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Dewan Komisaris.
9. Dalam kaitannya dengan akuntan publik, Komite Audit bertugas untuk:
- a) Merekomendasikan kandidat akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disetujui dalam RUPST;
 - b) Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
 - c) Menelaah cakupan audit untuk memastikan bahwa seluruh risiko signifikan telah dipertimbangkan;
 - d) Memastikan bahwa temuan dari akuntan publik telah dilaporkan segera dan didiskusikan bersama;
 - e) Memastikan bahwa Manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh akuntan publik;
 - f) Mengamati konsistensi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap standar audit yang berlaku;
 - g) Menelaah kinerja akuntan publik sebagai bahan rekomendasi bagi Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan pengangkatan kembali atau penggantian akuntan publik.
10. Dalam kaitannya dengan kepatuhan, Komite Audit bertugas untuk:
- a) Menelaah efektivitas kepatuhan sistem pengawasan dalam hal penyusunan Laporan Keuangan;
 - b) Menelaah informasi dari Manajemen, auditor, dan konsultan eksternal lainnya yang berkaitan dengan masalah kepatuhan;
 - c) Menelaah temuan audit dari lembaga berwenang dan efektivitas atas tanggapan dan tindak lanjut Manajemen.

KRITERIA KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Masa jabatan Komite Audit adalah sama dengan periode menjabat Dewan Komisaris dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali periode yang berurutan. Seluruh anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi kriteria atau persyaratan individual sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit, yaitu:

1. Memiliki integritas, reputasi, dan sikap independen yang baik;
2. Memiliki keahlian, latar belakang pengetahuan, dan pengalaman yang memadai, dimana salah satu anggota komite memiliki latar belakang pendidikan bidang akuntansi atau keuangan;
3. Bukan bagian dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memberikan jasa audit dan atau non-audit terhadap Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;

- c) Ensure that the Management do not restrict the audit process conducted by the Internal Auditor;
 - d) Evaluate that the effectiveness of the Internal Audit function;
 - e) Ensure that every significant findings from the internal audit process have been immediately reported and discussed;
 - f) Ensure that the recommendations given by the Internal Auditor are followed up by the Management;
 - g) Assign the Internal Auditor to conduct a special audit if any indication of fraud or deviation by the Management; and
 - h) Evaluate the appointment and replacement of the Head of Internal Auditor and submit the recommendation to the BoC.
9. With regards to public accountants, the Committee's duties to:
- a) Recommend public accountant candidates to the BoC to be approved at the AGMS;
 - b) Review the Independence and objectivity of the public accountant;
 - c) Review the scope of audit to ensure that all significant risks have been considered;
 - d) Ensure that findings from the public accountants have been immediately reported and discussed;
 - e) Ensure that the Management has followed up on the recommendations provided by the public accountants;
 - f) Observe the consistency of the audit conducted by the Public Accounting Firm based on applicable audit standards;
 - g) Review the performance of public accountants as a basis for recommendation of reappointment or replacement of the public accountant to the BoC.
10. With regards to compliance, the Committee's duties to:
- a) Review the effectiveness of supervisory systems in the preparation of Financial Statements;
 - b) Review information from the Management, auditors and other external consultants in relation to compliance issues;
 - c) Review audit findings from authorized institutions and effectiveness of the feedback and follow up from the Management.

MEMBERSHIP CRITERIA AND TERM OF OFFICE

The term of office of the Audit Committee is the same as the term of office of the BoC and can only be extended for one more consecutive period. All members of the Company's Audit Committee have met the individual criteria or requirements as stipulated in the Audit Committee Charter, namely:

1. Has good integrity, reputation, and independent attitude;
2. Has adequate expertise, background knowledge, and experience, where one of the committee members has an educational background in accounting or finance;
3. Not any one from Public Accounting Firm (KAP) that has provided audit and or non-audit services to the Company in the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners;

4. Bukan merupakan orang kunci di Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
5. Ketua Komite adalah Komisaris Independen sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pemegang Saham tanggal 15 Januari 2010 dan merujuk pada perundang-undangan yang berlaku.

KOMPOSISI DAN PROFIL ANGGOTA

Mengacu pada Piagam Komite Audit, keanggotaan Komite Audit IIF terdiri dari 4 (empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) anggota. Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit, serta 2 (dua) Komisaris lainnya bertindak sebagai anggota Komite Audit, sementara satu orang lainnya adalah pihak eksternal yang independen atau bukan karyawan Perseroan yang menjabat dalam periode satu tahun terakhir. Per 31 Desember 2021, keanggotaan Komite Audit IIF antara lain sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Position in the Company	Periode Jabatan Term of Service
V. Sonny Loho	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	7 Agustus 2018 – sekarang August 7, 2018 – Present
Darmin Nasution	Anggota Member	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner	19 Agustus 2020 – sekarang August 19 2020 – Present
Rinaldi Firmansyah	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner	6 Agustus 2018 – sekarang August 6 2018 – Present
Asep Hikmat	Anggota Member	-	2 April 2018 – sekarang April 2 2018 – Present

PROFIL KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Profil Ketua Komite Audit

Profil lengkap Bapak V. Sonny Loho selaku Ketua Komite Audit Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Profil Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Berikut profil lengkap anggota Komite Audit Perseroan:

Nama Name	Usia Age	Domisili Domicile	Basis Pengangkatan Basis of Appointment	Riwayat Pendidikan Educational Background	Riwayat Karier Resume
Darmin Nasution	Profil lengkap beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris. Their full profiles can be seen in the Company Profile Chapter, BoC Profile Sub-chapter.				
Rinaldi Firmansyah					

MEMBER COMPOSITION AND PROFILE

Referring to the Audit Committee Charter, IIF Audit Committee shall have 4 (four) members, consisting of 1 (one) chairman and 3 (three) members. The Company's Independent Commissioner shall act as the Chairman, while 2 (two) other Commissioners as members, while the other member shall be an independent external party or is not an employee of the Company who has served in the last one year period. As of December 31, 2021, the membership of the IIF Audit Committee is as follows:

PROFILE OF AUDIT COMMITTEE MEMBER

Chairman of the Audit Committee

The full profile of Mr. V. Sonny Loho as Chairman of the Company's Audit Committee is available in the Company Profile Chapter, BoC Profile Sub-chapter.

Audit Committee Member Profile

All members of the Company's Audit Committee are Indonesian citizens (WNI). The following is the full profile of the members of the Company's Audit Committee:

Nama Name	Usia Age	Domisili Domicile	Basis Pengangkatan Basis of Appointment	Riwayat Pendidikan Educational Background	Riwayat Karier Resume
Asep Hikmat	61 tahun 61 years old	Jakarta	Surat keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2018 BoC Circular Decree dated March 21, 2018	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1985); Master Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (2008); Certified Public Accountant (CPA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (2018); dan Chartered Accountant (CA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (2014). Bachelor degree from Padjadjaran University, Bandung (1985); Master Degree from Diponegoro University, Semarang (2008); Certified Public Accountant (CPA) from Indonesia Institute of Public Accountant (2018); and Chartered Accountant (CA) from Indonesia Institute of Public Accountant (2014). 	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen di PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (2019 – Sekarang); Partner Advisor di KAP Arief Jauhari (2015 – Sekarang); Anggota Komite Audit di Perseroan (Maret 2018 – sekarang); GM Finance and Accounting di PT Jaya Mandiri (2011-2015); Principal Partner di KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan (2006 – 2010); Komite Audit di PT Cahaya Kalbar Tbk (Wilma Group) (2007 – 2010); Senior Manager di KAP Presetio, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) (1996 – 2005); Manager di KAP Hanadi Sudjendro & Rekan (KPMG) (1990-1996); Senior Supervisor di KPMG Los Angles, AS (1991-1992); dan Junior Auditor di Coppers & Lybrand. Independent Commissioner at PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (2019 – Present); Advisor Partner at KAP Arief Jauhari (2015 – Present); Member of the Audit Committee of the Company (March 2018 – present); GM Finance and Accounting at PT Jaya Mandiri (2011 – 2015); Principal Partner at KAP Tasnim Ali Widjanarko & Partners (2006 – 2010); Audit Committee at PT Cahaya Kalbar Tbk (Wilma Group) (2007 – 2010); Senior Manager at KAP Presetio, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) (1996 – 2005); Manager at KAP Hanadi Sudjendro & Partners (KPMG) (1990-1996); Senior Supervisor at KPMG Los Angles, AS (1991-1992); and Junior Auditor at Coppers & Lybrand.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Independency of Audit Committee Member

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan menyatakan kesungguhan dan komitmen penuh untuk senantiasa mengedepankan prinsip independensi dan menjunjung tinggi integritas dalam membantu jalannya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Untuk itu, Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Komite Audit IIF telah memenuhi syarat independensi sebagaimana diatur dalam POJK 55/2015 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

All members of the Company's Audit Committee have declared their sincerity and full commitment to always prioritize the principle of independency and uphold integrity in assisting the supervisory function of the BoC. To that end, the Company ensures that all members of IIF Audit Committee have met the independency requirements as stipulated in POJK 55/2015 as can be seen in the following table:

Aspek Independensi Independency Aspect	V. Sonny Loho	Darmin Nasution	Rinaldi Firmansyah	Asep Hikmat
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the BoC and the BoD	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship at the Company, subsidiaries and affiliate entities	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Has no shareholding relationship at the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no familial relationship with the BoC, the BoD, and/or fellow members of the Audit Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat pemerintah Not currently serving as administrators of political parties and officials the government	√	√	√	√

RAPAT KOMITE AUDIT

Audit Committee Meetings

Kebijakan Rapat

Komite Audit Perseroan wajib menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Kebijakan tersebut telah diatur dalam Piagam Komite Audit dan selaras dengan ketentuan POJK 55/2015. Rapat Komite Audit harus diadakan sesingkat mungkin sebelum rapat Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit harus dihadiri setidaknya 51% dari jumlah anggota komite termasuk seorang Komisaris independen dan seorang pihak independen. Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara musyarah untuk mufakat, namun jika mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan dengan sistem pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Selama tahun 2021, Komite Audit telah menyelenggarakan 6 kali rapat dengan uraian sebagai berikut:

Meeting Policy

The Company's Audit Committee shall convened at least 1 (one) meeting in every 3 (three) months. This policy has been regulated in the Audit Committee Charter and complies with the provisions of POJK 55/2015. The Audit Committee meeting shall be convened in the shortest way possible prior to BoC meeting.

Audit Committee meetings must be attended by at least 51% of all committee members including an independent Commissioner and an independent party. The meeting decision-making mechanism shall be made through deliberation to reach consensus, but if no consensus is reached then decision-making shall be made via voting.

During 2021, the Audit Committee convened 6 meetings with the following description:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Pembahasan Agenda of Discussion	Kehadiran Attendance			
			V. Sonny Loho	Darmin Nasution	Rinaldi Firmansyah	Asep Hikmat
1.	29 Januari 2021 January 29, 2021	Diskusi atas hasil dari audit laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2020 Discussion on the financial statements audit result for the year ended December 31, 2020	√	-	√	√
2.	10 Maret 2021 March 10, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi atas Evaluasi atas kinerja auditor independen untuk penugasan audit laporan keuangan tahun 2020; dan Penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst & Young) sebagai auditor independen IIF untuk audit laporan keuangan 2021. The evaluation on the performance of Independent Auditor for the 2020 financial audit assignment; and The appointment of KAP Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst & Young) as IIF's independent auditor for 2021 financial statements audit. 	√	-	√	√
3.	20 April 2021 April 20, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi atas Ikhtisar laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021; dan Diskusi atas Ringkasan atas kegiatan audit internal periode Januari – Maret 2021. Discussion on the highlights of the financial statements for period ended March 31, 2021; and Discussion on summary of internal audit activities period of January – March 2021. 	√	√	√	√
4.	21 Juli 2021 July 21, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi atas Ikhtisar laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021; dan Diskusi atas ringkasan atas kegiatan audit internal periode April – Juni 2021. Discussion on the highlights of the financial statements for period ended June 30, 2021; and Discussion on summary of internal audit activities period of April – June 2021 	√	√	√	√
5.	25 Oktober 2021, October 25, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi atas Ikhtisar laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021; Diskusi atas ringkasan atas kegiatan audit internal periode Juli – September 2021; dan Kick-off audit laporan keuangan 2021 dan diskusi atas hal-hal yang akan dilakukan auditor. Discussion on the highlights of the financial statements for period ended September 30, 2021; Discussion on summary of internal audit activities period of July – September 2021; and Kick-off meeting of the financial statements audit 2021 and discussion on points that will be conducted by auditor. 	-	√	√	√

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Pembahasan Agenda of Discussion	Kehadiran Attendance			
			V. Sonny Loho	Darmin Nasution	Rinaldi Firmansyah	Asep Hikmat
6.	8 Desember 2021 December 8, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi atas Ikhtisar laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2021; Diskusi atas ringkasan atas kegiatan audit internal periode Oktober – November 2021; dan Diskusi atas <i>audit progress</i> dan hasil audit interim. Discussion on the highlights of the financial statements for period ended October 31, 2021; Discussion on summary of internal audit activities period of October – November 2021; and Discussion on the audit progress and the result of interim audit. 	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran Total Attendance			5	4	6	6
Jumlah Rapat Total Meetings			6	6	6	6
Persentase Kehadiran Percentage of Attendance			83,33%	66,67%	100,00%	100,00%

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT TAHUN 2021

Report of Audit Committee Duty Implementation for 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit dan Rencana Kerja Tahunan Komite Audit, antara lain:

- Mengadakan pertemuan rutin dengan Auditor Internal untuk membahas sistem pengendalian internal, hasil temuan dari audit yang telah dilaksanakan dan kemajuan status tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh auditor;
- Melakukan *review* dan memberikan saran pada Laporan Keuangan Triwulanan sebelum dipresentasikan ke para Pemegang Saham;
- Melakukan *review* terhadap kinerja, independensi, dan objektivitas dari akuntan publik untuk direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali atau mengganti akuntan publik tersebut;
- Meninjau dan memberikan saran atas kerangka manajemen kepatuhan; dan
- Melakukan tinjauan dan memberikan komentar atas hasil dari keterlibatan Audit Internal.

Throughout 2021, the Audit Committee carried out its main tasks as stipulated in the Audit Committee Charter and the Audit Committee Annual Work Plan, including:

- Conducted regular meetings with Internal Auditors to discuss internal control systems, audit findings that have been implemented and progress of follow-ups on recommendations provided by the auditor;
- Reviewed and advised on the Quarterly Financial Statements before being presented to the Shareholders;
- Reviewed the performance, Independence and objectivity of the public accountant to be recommended to the Board of Commissioners for reappointment or replacement;
- Reviewed and advised on compliance management frameworks; and
- Reviewed and commented on the results of Internal Audit's engagement.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT TAHUN 2021

Audit Committee Competency Development Program in 2021

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota Komite Audit sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, halaman 86.

A more detailed description of training and competency development programs that were attended by Audit Committee members during 2021 can be seen in the Company Profile Chapter, page 86.

PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS KINERJA KOMITE AUDIT TAHUN 2021

Assessment and Evaluation of Audit Committee Performance in 2021

Pada tahun 2021, Komite Audit telah berkinerja optimal dalam menunjang fungsi pengawasan Dewan Komisaris melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit komite.

In 2020, Audit Committee has performed optimally in supporting the BoC's supervisory function by implementing their respective duties and responsibilities.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*/"NRC") adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan usulan atau saran mengenai besaran remunerasi yang akan diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi, serta menetapkan kebijakan remunerasi karyawan. Dalam menjalankan tugasnya, NRC bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan berkoordinasi bersama komite-komite penunjang Dewan Komisaris lainnya. Eksistensi NRC dan perangkat kebijakan pendukung NRC di Perseroan telah memperhatikan ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

The Nomination and Remuneration Committee ("NRC") is the BoC's supporting organ tasked specifically to assist the Board in determining the criteria selection for candidates for members of both its BoC and the BoD, give proposals or suggestions regarding the amount of remuneration to be received by members of the two boards, and make employee remuneration policies. In discharging its duties, the NRC reports directly to the BoC and makes coordination with other BoC's supporting committees. The existence of the NRC and the NRC supporting policy instruments at the Company have taken into account the provisions of POJK No. 34/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") regarding the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies.

DASAR HUKUM

1. POJK No. 34/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
2. Anggaran Dasar Perseroan
3. Piagam NRC

LEGAL BASIS

1. POJK No. 34/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies
2. Company's Articles of Association
3. NRC Charter

PIAGAM NRC

Dewan Komisaris telah mengesahkan Piagam NRC yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota NRC dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam NRC mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab, kewenangan, masa jabatan, pelaporan, rapat NRC, dan lain-lain.

NRC Charter [HR]

The BoC has ratified the NRC Charter which offers binding guidelines to all NRC members in discharging their duties and responsibilities. The NRC Charter governs matters pertaining to its duties and responsibilities, authority, term of office, reporting, NRC meetings, and other matters.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NRC

1. Fungsi Nominasi

- a) Menganalisis, merumuskan, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait sistem dan prosedur penentuan, termasuk pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris serta Direksi. Komite ini memiliki tugas untuk menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;

1. Nomination Function

- a) To analyze, formulate, and provide recommendations to the BoC concerning the systems and procedures to determine—including selecting and/or replacing—members of the BoC and BoD. This Committee is also responsible for creating performance evaluation systems for the BoC and the BoD;

- b) Merekomendasikan calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris, serta menyampaikan usulan kepada Dewan Komisaris mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam hal pemilihan, penunjukan, dan pemberhentian anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan Pemegang Saham, terutama jika diperlukan perubahan pada komposisi Dewan Komisaris sehubungan dengan perubahan kepemilikan saham IIF;
- c) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan menganalisa kriteria serta prosedur pemilihan pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan menganalisa profil kandidat pejabat yang diserahkan oleh Direksi setiap tiga bulan sekali atau pada saat terjadi perubahan;
- d) Merekomendasikan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi; dan
- e) Merekomendasikan calon yang akan diangkat sebagai anggota independen dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

2. Fungsi Remunerasi

NRC bertugas mengevaluasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan IIF yang berlaku saat ini. Selain itu, NRC juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi KPI untuk Direksi yang bersifat *ex-ante* (dalam rencana bisnis tahunan IIF) dan *ex-post* (setelah tutup tahun IIF).

Apabila diperlukan, NRC dapat memberikan usulan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang mencakup area berikut ini:

1. Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kebijakan remunerasi yang berlaku bagi pejabat eksekutif dan karyawan IIF;
3. Mempersiapkan aturan yang lebih spesifik mengenai remunerasi, terutama jika terdapat hal-hal yang tidak tercantum dalam kebijakan remunerasi yang telah disepakati;
4. Merekomendasikan program pensiun bagi seluruh karyawan IIF apabila ditetapkan serta merekomendasikan sistem kompensasi dan manfaat serta mekanisme penyesuaian gaji; dan
5. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam Manajemen SDM yang berpotensi membawa dampak signifikan terhadap keuangan/risiko hukum IIF.

KEWENANGAN NRC

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, NRC berwenang untuk:

1. Memiliki akses yang memungkinkannya untuk memperoleh informasi langsung dari Direksi, pejabat, karyawan, serta pihak eksternal/profesional sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya dalam rangka menghindari keragu-raguan. Apabila pada kondisi tertentu NRC memerlukan bantuan pihak eksternal/profesional, maka NRC harus berkonsultasi dan meminta persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu sebelum menunjuk pihak eksternal/profesional yang dimaksud untuk mendukung pelaksanaan tugasnya;
2. Dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, Ketua NRC dapat mengundang anggota Direksi, pejabat eksekutif, karyawan, atau auditor independen IIF untuk menghadiri rapat Komite;

- b) To recommend candidates for members of the BoC and/or members of the BoD to the BoC, and submit proposals to the BoC pertaining to the necessary steps that must be taken for selecting, appointing, and dismissing members of the BoC and BoD in accordance with the provisions contained in the shareholder agreement, especially when changes to the composition of the Board of Commissioners are necessary due to changes in IIF's share ownership;
- c) To monitor the implementation and analyze the criteria and procedures for the selection of officers one level below the BoD and analyze personal data of said personnel that has been submitted by the BoD every three months or whenever a change occurs;
- d) To recommend the number of members of the BoC and the BoD; and
- e) To recommend candidates for independent members of the Audit Committee or the Risk Oversight Committee to the BoC.

2. Remuneration Function

The NRC is tasked with evaluating the current remuneration policies of the BoC, the BoD and employees of IIF. In addition, the NRC is also responsible for evaluating KPIs for the BoD which are *ex-ante* (in the IIF annual business plan) and *ex-post* (after the end of the IIF year).

When deemed necessary, the NRC may provide proposals or recommendations to the BoC covering the following areas:

1. Remuneration policies for the BoC and the BoD;
2. Overall remuneration policies applicable to the executive officers and employees of IIF;
3. To prepare specific remuneration policies to accommodate matters that are not specified in the agreed remuneration policies;
4. To recommend pension plans, if any, for IIF employees and the system for compensation and other benefits as well as the mechanism for salary adjustment; and
5. To evaluate and provide recommendations to the BoC on employment policies and other HR management functions that may have a significant impact on IIF's financial/legal risks.

AUTHORITY OF THE NRC

In performing its responsibilities, the NRC has the following authority:

1. To access all required information related to its responsibilities from the BoD, executive officers, employees, and from external/professional parties. For the avoidance of doubt, when the service of external/professional parties is necessary, the NRC must consult with and request approval from IIF's BoC prior to appointing the external/professional party to assist in implementing its duties.
2. With the BoC being informed, the Head of the NRC may invite the BoD, executive officers, employees, or the independent auditor of IIF to attend the Committee's meetings.

3. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, NRC berkoordinasi dengan Presiden Direktur.

KRITERIA KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Seluruh anggota NRC Perseroan telah memenuhi kriteria atau kualifikasi perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014 sehingga dapat ditunjuk dan diangkat sebagai anggota NRC, antara lain:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama;
2. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi;
3. Bukan pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
4. Bukan anggota Direksi; dan
5. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Setiap anggota NRC memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan pasar modal, operasional Perseroan, ketenagakerjaan serta hubungan industrial, serta mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Masa kerja NRC tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

KOMPOSISI DAN PROFIL ANGGOTA

Per 31 Desember 2021, keanggotaan NRC terdiri dari 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite yang juga adalah Komisaris Independen Perseroan dan 3 (tiga) anggota lainnya adalah Komisaris Perseroan. Berikut ini adalah uraian komposisi anggota NRC selama tahun buku:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position
Darmin Nasution	Ketua Chairman	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner
Bhimantara Widyajala	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Richard Lyon Ranken	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Ken Tomisaki	Anggota Member	Komisaris Commissioner

PROFIL KEANGGOTAAN NRC

Profil dari masing-masing anggota NRC sudah diulas pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Dewan Komisaris, dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI ANGGOTA NRC

Seluruh anggota NRC menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dengan mengindahkan ketentuan POJK 33/2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Masing-masing anggota NRC senantiasa mengedepankan sikap profesional dalam bekerja.

3. In exercising the foregoing authority, the Committee coordinates with the President Director.

MEMBERSHIP CRITERIA AND TERM OF SERVICE

All members of the Company's NRC have met the criteria or company qualifications as stipulated in POJK 33/2014 to ensure they can be appointed and assigned as members of the NRC, including:

1. Has no affiliation with Issuers or Public Companies, members of the BoD, members of the BoC, or Major Shareholders;
2. Has experience related to Nomination and/or Remuneration;
3. Not any one that assumes a managerial position under the BoD in charge of human resources;
4. Not a BoD member; and
5. Not assuming concurrent positions as members of other committees owned by the Issuer or Public Company.

Each member of the NRC shall have adequate knowledge of the laws and regulations of the capital market, Company operations, employment and industrial relations, has adequate knowledge and experience in accordance with his educational background and has the ability to communicate well.

The term of office of the NRC may not be longer than the term of office of the BoC as stipulated in the Articles of Association, and may be reappointed for the next term of office.

MEMBER COMPOSITION AND PROFILE

As of December 31, 2021, the NRC had 4 (four) members consisting of 1 (one) Chairman who was also an Independent Commissioner of the Company while the 3 (three) other members were Commissioners of the Company. The following is a description of the composition of the NRC members during the financial year:

NRC MEMBERSHIP PROFILE

The profiles of each member of the NRC are presented in the Company Profile Chapter, BoC Profile Sub-Chapter, in this Annual Report.

INDEPENDENCY OF NRC MEMBERS

All NRC members shall discharge their duties and responsibilities to the best of their ability with due regards to POJK regulation No 33/2014 and other regulatory stipulations. Each member of the NRC shall always put uphold professionalism in each of the task assigned to them.

Aspek Independensi Independency Aspect	Darmin Nasution	Bhimantara Widyajala	Richard Lyon Ranken	Ken Tomisaki
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with BoC and BoD	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship at the Company, subsidiaries and affiliate entities	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Has no shareholding relationship at the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no familial relationship with the BoC, the BoD, and/or fellow members of the Audit Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not currently serving as administrators of political parties, officials or the government	√	√	√	√

RAPAT NRC

Kebijakan Rapat

Rapat NRC dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Kuorum dalam Rapat NRC ditentukan oleh jumlah suara tiga anggota yang salah satunya haruslah suara Ketua Komite. Sepanjang tahun 2021, NRC telah menyelenggarakan 5 kali rapat dengan uraian sebagai berikut:

NRC MEETING

Meeting Policy

NRC shall convene at least 1 (one) meeting in 4 (four) months. The meeting quorum is determined by the number of votes of its three members, which must include the vote of the Committee's Chairman. Throughout 2021, the NRC convened 5 meetings with the following description:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Kehadiran Attendance			
			Darmin Nasution	Bhimantara Widyajala	Richard Lyon Ranken	Ken Tomisaki
1	21 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> Update dampak kondisi pandemi dan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan Perseroan Update progress tentang Desain Rencana Insentif Jangka Panjang Update on the impact of pandemic conditions and preventive measures taken by the Company; Progress update Long Term Incentive Plan Design 	√	√	√	√
2	27 Oktober/October 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berakhir pada semester 1 tahun 2022; Rencana Insentif Jangka Panjang – Update progress Notification on BoD and BoC members term ended in the 1st half of 2022; Long Term Incentive Plan – Progress Update 	√	√	√	√
3	8 Desember/December 2021	Update mengenai Rekrutmen CFO Update on CFO Recruitment	√	√	√	√
4	20 Desember/December 2021	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara CFO Diskusi Remunerasi CEO dengan Egon Zehnder International CFO Interview CEO Remuneration Discussion with Egon Zehnder International 	√	√	√	√
5	22 Desember/December 2021	Masa jabatan CEO CEO Terms of Office	√	√	√	√
		Jumlah Kehadiran Total Attendance	5	5	5	5
		Jumlah Rapat Total Meetings	5	5	5	5
		Persentase Kehadiran Percentage of Attendance	100%	100%	100%	100%

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI NRC TAHUN 2021

NRC Competency Development Program in 2021

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota NRC sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, halaman 86.

A more detailed description of training and competency development programs attended by all NRC members during 2021 can be seen in the Company Profile Chapter, page 86.

KOMITE PEMANTAU RISIKO Risk Oversight Committee

Perseroan mengesahkan pembentukan Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*/"ROC") sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu jalannya penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan.

The Company has established of its Risk Oversight Committee ("ROC") as a BoC's supporting organs whose task is to support the Board in running risk management and implementing the principles of GCG at the Company.

DASAR HUKUM

1. Anggaran Dasar Perseroan
2. Piagam Komite Pemantau Risiko

LEGAL BASIS

1. Company's Articles of Association
2. Risk Monitoring Committee Charter

PIAGAM ROC

Seluruh anggota ROC wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Piagam ROC yang disahkan pada 8 April 2014. Piagam ROC mengatur kejelasan fungsi dan keberadaan ROC di Perseroan, uraian tugas dan tanggung jawab, kewenangan, masa jabatan, pelaporan, rapat ROC, dan lain-lain.

ROC CHARTER

All ROC members shall discharge their duties and responsibilities as stipulated in the ROC Charter that was ratified on April 8, 2014. The ROC Charter governs the clarity of the functions and the presence of the ROC at the Company, description of duties and responsibilities, authority, term of office, reporting, ROC meetings, and other matters.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ROC

Tugas dan tanggung jawab ROC pada aspek manajemen risiko, antara lain:

1. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko khususnya terkait risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko sosial & lingkungan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan persetujuan Dewan Komsaris. NRC secara berkala mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan Manajemen Risiko serta memberikan pendapat dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai area perbaikan atau usulan peningkatan yang diperlukan untuk meningkatkan fungsi Manajemen Risiko;
2. Mengusulkan perubahan atau penyesuaian terhadap kebijakan Manajemen Risiko agar senantiasa selaras dengan dinamika bisnis yang terjadi;
3. Menetapkan peran dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko;
4. Memberikan masukan dan saran tentang masalah atau isu yang diangkat oleh Komite Manajemen Risiko;
5. Meninjau laporan Manajemen Risiko triwulanan yang disiapkan oleh Tim Manajemen Risiko sebelum diserahkan kepada Pemegang Saham;
6. Memberikan saran dan/atau rekomendasi (jika ada) kepada Tim Manajemen Risiko untuk dicantumkan dalam laporan Manajemen Risiko triwulanan berikutnya;

ROC'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The following are ROC's duties and responsibilities in risk management aspects:

1. Evaluate Risk Management policies, particularly related to credit risk, market risk, operational risk, social & environmental risk, and submit the results to the BoC for approval. The NRC periodically evaluates and analyzes the adequacy of Risk Management policies and provides opinions in the form of suggestions and/or recommendations to the BoC pertaining to areas of improvement or proposed improvements needed to improve the Risk Management function;
2. Propose changes or adjustments to the Risk Management policy to ensure it is remains relevant to the current business dynamics;
3. Define the roles and responsibilities of the Risk Management Committee;
4. Provide inputs and advices on issues or issues raised by the Risk Management Committee;
5. Review the quarterly Risk Management report prepared by the Risk Management Team prior to submission to the Shareholders;
6. Provide suggestions and/or recommendations (if any) to the Risk Management Team as one of the topics in the next quarterly Risk Management report;

- Meninjau kerangka kerja parameter atau *register* Manajemen Risiko, serta memberikan persetujuan untuk setiap perubahan parameter atau *register* yang diusulkan tersebut; dan
- Menyediakan informasi mengenai hal lain yang dianggap sesuai oleh Dewan Komisaris dalam kegiatan usaha seperti biasa.

KRITERIA KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Seluruh anggota ROC dipastikan sudah memenuhi kualifikasi atau persyaratan individual sebagaimana dipersyaratkan di dalam Piagam ROC. Masa jabatan ROC adalah sama dengan periode menjabat Dewan Komisaris dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali periode yang berurutan.

KOMPOSISI DAN PROFIL ANGGOTA

Per 31 Desember 2021, keanggotaan ROC terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite yang juga merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan dan 4 (empat) anggota lainnya yang juga berperan sebagai Komisaris Perseroan. Berikut ini adalah uraian komposisi anggota ROC selama tahun buku:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position
Rinaldi Firmansyah	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner
Darmin Nasution	Anggota Member	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner
Yon Aرسال	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Lodewijk Govaerts	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Andreas Zeisler	Anggota Member	Komisaris Commissioner

PROFIL KEANGGOTAAN ROC

Profil dari masing-masing anggota ROC sudah diulas pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Dewan Komisaris, dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI ANGGOTA ROC

Seluruh Anggota ROC telah memenuhi aspek independensi dan menjunjung tinggi itikad baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ini adalah tabel pemenuhan syarat independensi anggota ROC, yaitu:

Aspek Independensi Independency Aspect	Rinaldi Firmansyah	Darmin Nasution	Yon Aرسال	Lodewijk Govaerts	Andreas Zeisler
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with BoC and BoD	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship at the Company, subsidiaries and affiliate entities	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Has no shareholding relationship at the Company	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has No. familial relationship with the BoC, the BoD, and/or fellow members of the Audit Committee	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not currently serving as administrators of political parties, officials or the government	√	√	√	√	√

- Review the parameter framework or the Risk Management register, and give approval for any changes to the proposed parameter or register; and
- Provide information on other matters deemed appropriate by the BoC in business as usual.

MEMBERSHIP CRITERIA AND TERM OF OFFICE

All ROC members are ensured to have met the qualifications or individual requirements as required in the ROC Charter. The term of office of the ROC is the same as the term of office of the BoC and can only be reappointed for one more consecutive period.

MEMBER COMPOSITION AND PROFILE

As of December 31, 2021, the ROC had 5 (five) members consisting of 1 (one) Chairman who also serves as an Independent Commissioner of the Company while the remaining 4 (four) members shall be Commissioners of the Company. The following is a description of the composition of ROC members during the financial year:

ROC MEMBERSHIP PROFILE

The profiles of each member of the ROC have are reviewed in the Company Profile Chapter, BoC Sub-Chapter Profile, in this Annual Report.

INDEPENDENCY OF ROC MEMBERS

All ROC members have met the independency aspect and shall have good faith in discharging their duties and responsibilities. The following is a table of eligibility requirements for ROC members' independency:

RAPAT ROC ROC Meeting

Sebagaimana diatur dalam Piagam ROC, rapat ROC wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 tahun. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara musyarah untuk mufakat, apabila mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan dengan sistem pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. Selama tahun 2021, Perseroan telah mengadakan 4 kali (empat) rapat ROC dengan uraian sebagai berikut:

As stipulated in the ROC Charter, the ROC shall convene at least 4 (four) meetings in a year. The decision-making mechanism shall be made through deliberation to reach consensus, if no consensus is reached, then decision-making shall be made through voting with majority of votes. During 2021, the Company convened 4 (four) ROC meetings with the following description:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Kehadiran Attendance				
			Rinaldi Firmansyah	Darmin Nasution	Yon Aرسال	Lodewijk Govaerts	Andreas Zeisler
1	25 Maret/March 2021	<ul style="list-style-type: none"> Ringkasan Dari Rapat ROC Terakhir Penilaian Risiko untuk Q4-2020 Sistem Peringatan Dini (Risiko Kredit) Rencana Kerja Manajemen Risiko 2021 Summary From Last ROC Meeting Risk Assessment for Q4-2020 Early Warning System (Credit Risk) 2021 Risk Management Work Plan 	√	-	√	√	√
2	20 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> Ringkasan Dari Rapat ROC Terakhir Penilaian Risiko untuk Q1-2021 Pembaruan <i>Stress Test</i> Portofolio Kredit – Perkiraan <i>Outlook</i> 2021 Progres Rencana Kerja Manajemen Risiko 2021 Summary From Last ROC Meeting Risk Assessment for Q1-2021 Update on Credit Portfolio Stress Test – Forecasting 2021 Outlook Progress of 2021 Risk Management Work Plan 	√	√	√	√	√
3	21 Juli/July 2021	<ul style="list-style-type: none"> Ringkasan Dari Rapat ROC Terakhir Penilaian Risiko untuk Q2-2021 Usulan Perubahan Batas Investasi – Batas Portofolio Keseluruhan Berdasarkan Peringkat Risiko Progres Rencana Kerja Manajemen Risiko 2021 Summary From Last ROC Meeting Risk Assessment for Q2-2021 Proposal of Investment Limit Amendment – Overall Portfolio Limit Based on Risk Rating Progress of 2021 Risk Management Work Plan 	√	√	√	√	√
4	27 Oktober/October 2021	<ul style="list-style-type: none"> Ringkasan Dari Rapat ROC Terakhir Penilaian Risiko untuk Q3-2021 Progres Rencana Kerja Manajemen Risiko 2021 Summary From Last ROC Meeting Risk Assessment for Q3-2021 Progress of 2021 Risk Management Work Plan 	√	√	√	√	√
Jumlah Rapat Number of Meetings			4	4	4	4	4
Jumlah Kehadiran Total Attendance			4	3	4	4	4
Persentase Kehadiran Percentage of Attendance			100%	75%	100%	100%	100%

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS ROC TAHUN 2021

Report of ROC Duty Implementation for 2021

Sepanjang tahun 2021, ROC telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. ROC melakukan evaluasi berkala atas seluruh parameter risiko utama yang dihadapi Perusahaan, termasuk kecukupan kebijakan manajemen risiko dan langkah-langkah mitigasi yang diterapkan oleh Manajemen.
2. ROC menyetujui dan mengawasi kemajuan berbagai inisiatif maupun rencana kerja divisi Manajemen Risiko dalam menjaga profil risiko dan tingkat kesehatan Perusahaan.
3. ROC menyetujui penerapan inisiatif *Early Warning System (EWS) – Credit Risk* sebagai mekanisme pengendalian risiko kredit secara regular untuk mengidentifikasi, mengawasi lebih ketat dan menjaga debitur berkualitas buruk atau berpotensi memburuk supaya tidak masuk dalam kategori kredit bermasalah atau pun macet dan akhirnya berdampak terhadap profitabilitas Perusahaan.
4. ROC menyetujui kajian *stress test* atas keseluruhan portofolio investasi Perusahaan dengan asumsi pandemi COVID-19 berkelanjutan dan dampaknya terhadap potensi penambahan total provisi. ROC juga merekomendasikan pengawasan lebih ketat atas perkembangan semua akun-akun yang terdampak dan bermasalah, dan menyetujui rencana pengembangan aset yang lebih terfokus pada sektor dengan paparan risiko rendah terhadap pandemi COVID-19.
5. ROC menyetujui kajian dan proposal perubahan *Portfolio Control Limit* untuk mengakomodasi dinamika lingkungan bisnis dan *Risk Appetite* perseroan.

Throughout 2021, ROC carried out its duties and responsibilities, including:

1. ROC made periodic evaluations of all the main risk parameters faced by the Company, including the adequacy of risk management policies and mitigation measures implemented by Management.
2. ROC approved and oversaw the progress of various initiatives and work plans of the Risk Management division in maintaining the Company's risk profile and healthiness.
3. ROC approved the implementation of the Early Warning System (EWS) – Credit Risk initiative as a credit risk control mechanism on a regular basis to identify, closely monitored and safeguarded debtors showing deteriorating or potentially deteriorating credit quality so they would not fall under non-performing or troubled loans category which could have an impact on Company profitability.
4. ROC approved a stress test review of the Company's entire investment portfolio, presuming that the COVID-19 pandemic would be persisting and how it would create the need of additional provisions. The ROC also recommended closer monitoring on the progress of all affected and troubled accounts, and approved an asset development plan that was more focused on sectors with low risk exposure to the pandemic.
5. ROC approved the study and proposal for changes in Portfolio Control Limit to accommodate dynamic business environment and the Company's Risk Appetite.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI ROC

TAHUN 2021

Roc Competency Development Program in 2021

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota ROC sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan halaman 86.

A more detailed description of training and competency development programs attended by all members of the ROC in 2021 can be seen in the Company Profile Chapter on page 86.

KOMITE INVESTASI-DEWAN KOMISARIS

BoC-IC

Komite Investasi-Dewan Komisaris (BoC-IC) adalah salah satu organ pendukung Dewan Komisaris yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya terkait proposal investasi dan portofolio IIF. Pembentukan BoC-IC disahkan melalui SK Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan ref. No. 001/IIF/BoC-RES/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

The Investment Committee-Board of Commissioners (BoC-IC) is one of the BoC's supporting organs established to carry out the supervisory function, particularly related to investment proposals and IIF portfolios. The establishment of the BoC-IC was ratified through a Circular Decree of the Company's BoC ref. No. 001/IIF/BoC-RES/III/2013 dated March 27 2013.

DASAR HUKUM

1. Anggaran Dasar Perseroan

PIAGAM BOC-IC

Perseroan memiliki Piagam BoC-IC yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada 13 Juni 2012. Piagam ini digunakan sebagai acuan atau pedoman yang mengikat bagi seluruh anggota BoC-IC dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam BoC-IC mengatur hal-hal terkait kewenangan, struktur, kualifikasi, tanggung jawab, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan lain-lain.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BoC-IC

Tugas dan tanggung jawab BoC-IC, antara lain:

1. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi mengenai pemberian kredit/investasi untuk persetujuan final dari Dewan Komisaris;
2. Mengevaluasi dan memberikan laporan kajian kinerja atas portofolio investasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada investasi berupa pinjaman, ekuitas, dan *treasury*;
3. Mengkaji kebijakan kredit dan investasi Perseroan dan memberikan masukan terhadap perumusan/revisinya;
4. Melakukan kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan kegiatan investasi Perseroan atau kebijakan atau hal-hal lain, yang dari waktu ke waktu ditugaskan oleh BoC kepada Komite.

KRITERIA KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Seluruh anggota BoC-IC telah memenuhi kualifikasi atau persyaratan individual sebagai anggota BoC-IC sebagaimana ditentukan dalam Piagam BoC-IC. Masa jabatan BoC-IC adalah sama dengan periode menjabat Dewan Komisaris dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali periode yang berurutan.

KOMPOSISI DAN PROFIL ANGGOTA

Per 31 Desember 2021, keanggotaan BoC-IC terdiri dari 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite yang juga merangkap jabatan sebagai Presiden Komisaris & Komisaris Independen dan sisa anggota lainnya juga berperan sebagai Komisaris Perseroan. Berikut ini adalah uraian komposisi anggota BoC-IC selama tahun buku:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position
Darmin Nasution	Ketua Chairman	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner
V. Sonny Loho	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
Rinaldi Firmansyah	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
Yon Aرسال	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Bhimantara Widyajala	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Lodewijk Govaerts	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Andreas Zeisler	Anggota Member	Komisaris Commissioner

LEGAL BASIS

1. Company's Articles of Association

BOC-IC CHARTER [INVESTMENT]

The Company has a BoC-IC Charter which was ratified by the Board of Commissioners on June 13, 2012. The charter offers binding guidelines to all members of the BoC-IC in discharging their duties and responsibilities. The BoC-IC Charter govern matters pertaining to authority, structure, qualifications, responsibilities, meetings, reporting, confidentiality, and other matters.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BoC-IC

The following are duties and responsibilities of the BoC-IC:

1. Give opinions and/or recommendations on the granting of credit/ investment for final approval from the BoC;
2. Evaluate and provide a performance review report on the Company's investment portfolio, including but not limited to investments in the form of loans, equity, and treasury;
3. Review the Company's credit and investment policies and provide input on its formulation/revision;
4. Perform other obligations related to the Company's investment activities or policies or other matters periodically assigned to it by the BoC.

MEMBERSHIP CRITERIA AND TERM OF SERVICE

All members of the BoC-IC have met the qualifications or individual requirements as members of the BoC-IC as stipulated in the BoC-IC Charter. The term of office of the BoC-IC is the same as the term of office of the BoC and can only be reappointed for one more consecutive period.

MEMBER COMPOSITION AND PROFILE

As of December 31, 2021, the BoC-IC had 9 (nine) members consisting of 1 (one) Chairman who also serves as President Commissioner & Independent Commissioner while the remaining shall be members of the Company's BoC. The following is a description of the BoC-IC members composition during the financial year:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position
Richard Lyon Ranken	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Ken Tomisaki	Anggota Member	Komisaris Commissioner

PROFIL KEANGGOTAAN BOC-IC

Profil dari masing-masing anggota BoC-IC sudah diulas pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Dewan Komisaris, dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI ANGGOTA BOC-IC

Seluruh Anggota BoC-IC telah memenuhi aspek independensi sebagaimana dapat dilihat pada tabel pemenuhan syarat independensi anggota BoC-IC berikut ini:

BOC-IC MEMBERSHIP PROFILE

The profiles of each member of the BoC-IC are reviewed in the Company Profile Chapter, BoC Profile Sub-Chapter, in this Annual Report.

INDEPENDENCY OF BOC-IC MEMBERS

All BoC-IC members have met the independency aspect as can be seen in the following table that shows the independency of BoC-IC members:

Aspek Independensi Independency Aspect	Darmin Nasution	V. Sonny Loho	Rinaldi Firmansyah	Yon Aرسال	Bhimantara Widyajala	Lodewijk Govaerts	Andreas Zeisler	Richard Lyon Ranken	Ken Tomisaki
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with BoC and BoD	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship at the Company, subsidiaries and affiliate entities	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Has no shareholding relationship at the Company	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no familial relationship with the BoC, the BoD, and/or fellow members of the Audit Committee	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not currently serving as administrators of political parties, officials or the government	√	√	√	√	√	√	√	√	√

RAPAT BOC-IC BoC-IC Meeting

Pelaksanaan rapat BoC-IC dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali setiap 4 bulan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara musyarah untuk mufakat, namun jika mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan dengan sistem pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. Selama tahun 2021, Perseroan telah mengadakan 10 (sepuluh) kali rapat BoC-IC dengan uraian sebagai berikut:

The BoC-IC shall convene at least 1 meetings every 4 months. The decision-making mechanism shall be made through deliberation to reach consensus, but if no consensus is reached then decision-making shall be made through voting based on the majority of votes. During 2021, the Company convened a total of 10 (ten) meetings with the following description:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Attendance								
		Darmin Nasution	V. Sonny Loho	Rinaldi Firmansyah	Yon Arsal	Bhimantara Widyajala	Lodewijk Govaerts	Andreas Zeisler	Richard Lyon Ranken	Ken Tomisaki
1	1 April 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	20 April 2021	√	√	√	√	√	√		√	√
3	2 June 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	21 July 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	10 August 2021	√	√	√	√	√	√		√	√
6	31 August 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	12 October 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	27 October 2021	√	√	√	√	√	√	√		√
9	8 December 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	23 December 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	10	10	10	10	10	8	9	10		
	100%	100%	100%	100%	100%	80%	90%	100%		

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS BOC-IC TAHUN 2021

Report of BoC-IC Duty Implementation for 2021

BoC-IC telah membahas dan meninjau langkah-langkah pengambilan keputusan oleh Manajemen IIF investasi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab BoC-IC di tahun 2021.

BoC-IC discussed and reviewed the decision making steps taken by IIF's Management in relation to investments, in accordance with BoC-IC's duties and responsibilities in 2021.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI BOC-IC TAHUN 2021

BoC-IC Competency Development Program in 2021

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota BoC-IC sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan halaman 86.

A more detailed description of training and competency development programs attended by all members of the BoC-IC in 2021 can be seen in the Company Profile Chapter on page 86.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI BoD Supporting Organ

KOMITE INVESTASI-DIREKSI BoD-IC

Komite Investasi-Direksi (BoD-IC) adalah salah satu organ pendukung Direksi yang memiliki tanggung jawab untuk mengkaji, mempertimbangkan, dan membuat keputusan mengenai semua proposal investasi IIF untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Komite Investasi-Dewan Komisaris (BoC-IC).

PIAGAM BoD-IC

Perseroan memiliki Piagam BoD-IC yang berfungsi sebagai acuan atau pedoman yang mengikat bagi seluruh anggota BoD-IC dalam menjalankan amanah penugasan setiap hari. Piagam BoD-IC mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab, kewenangan, struktur serta kualifikasi, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan hal-hal lainnya yang relevan dengan Komite BoD-IC.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BoD-IC

Tugas dan tanggung jawab BoD-IC, antara lain:

1. Mengkaji, menyetujui, dan merekomendasikan proposal investasi untuk ditinjau lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan BoC-IC;
2. Menyediakan informasi, bantuan dan/atau klarifikasi kepada BoC-IC terkait tujuan pengkajian proyek oleh BoD-IC;
3. Berkoordinasi dengan Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) Direksi guna memastikan kecukupan pendanaan untuk keperluan kredit atau investasi yang diusulkan dan memastikan bahwa dana tersebut sesuai dengan kredit tertentu yang ditetapkan oleh ALCO;
4. Meninjau dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan kredit dan investasi, jika diperlukan;
5. Meninjau dan memantau implementasi atas semua investasi, ekuitas, dan semua pinjaman, setidaknya setahun sekali, serta meningkatkan frekuensi peninjauan jika dianggap perlu dan menyediakan laporan mengenai tinjauan dan pemantauan kepada BoC-IC.

KRITERIA KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Seluruh anggota BoD-IC telah memenuhi kualifikasi atau persyaratan individual sebagai anggota BoD-IC sebagaimana telah ditentukan di dalam Piagam BoD-IC. Masa jabatan BoD-IC adalah sama dengan masa jabatan Direksi Perseroan.

KOMPOSISI DAN PROFIL ANGGOTA

Per 31 Desember 2021, keanggotaan BoD-IC terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite yang juga merangkap jabatan sebagai Presiden Direktur & *Chief Executive Officer* (CEO), serta sisa anggota lainnya adalah anggota Direksi Perseroan. Berikut uraian komposisi anggota BoD-IC selama tahun buku:

The Investment Committee-Board of Directors (BoD-IC) is one of the BoD's supporting organs which has the responsibility to review, consider, and make decisions pertaining to all IIF investment proposals for further recommendation to the Investment Committee-BoC-IC.

BoD-IC CHARTER

The Company has a BoD-IC Charter that offers guidelines to all BoD-IC members in carrying out their daily assignments. The BoD-IC Charter regulates matters pertaining to the roles and responsibilities, authority, structure and qualifications, meetings, reporting, confidentiality, and other matters relevant to the BoD-IC Committee.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BoD-IC

The following are duties and responsibilities of the BoD-IC:

1. Review, approve, and recommend investment proposals for further review and obtain BoC-IC approval;
2. Give information, assistance and/or clarification to BoC-IC about the objectives of the project assessment by the BoD-IC;
3. Coordinate with the Assets and Liability Committee (ALCO) of the BoD to ensure adequate funding for the proposed credit or investment needs and ensure that the funds are in accordance with certain credits determined by ALCO;
4. Review and make adjustments to credit and investment policies, if necessary;
5. Review and monitor the implementation of all investments, equity and all loans, at least annually, and increase the frequency of review when deemed necessary and provide reports on review and monitoring to the BoC-IC.

MEMBERSHIP CRITERIA AND TERM OF OFFICE

All members of the BoD-IC have met the qualifications or individual requirements as members of the BoD-IC as specified in the BoD-IC Charter. The term of office of the BoD-IC is the same as the term of office of the BoD of the Company.

MEMBER COMPOSITION AND PROFILE

As of December 31, 2021, the BoD-IC membership had 5 (five) members consisting of 1 (one) Chairman who also serves as President Director & Chief Executive Officer (CEO), while the remaining are members of the Company's BoD. The following is a description of the composition of BoD-IC members during the financial year:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Executive Director and Chief Financial Officer (CFO)
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Executive Director and Chief Risk Officer (CRO)
Mohammad Ramadhan Harahap	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)
Y. Bayu Wirawan	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)

PROFIL KEANGGOTAAN BoD-IC

Profil dari masing-masing anggota BoD-IC sudah diulas pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Direksi, dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI ANGGOTA BoD-IC

Seluruh anggota BoD-IC telah memenuhi aspek independensi sebagaimana dipersyaratkan dalam Piagam BoD-IC dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota BoD-IC senantiasa bertindak independen dan penuh itikad baik.

RAPAT BoD-IC

Pada tahun 2021, Perseroan telah mengadakan 35 (tiga puluh lima) kali rapat BoD-IC dengan uraian sebagai berikut:

BOD-IC MEMBERSHIP PROFILE

The profiles of BoD-IC member are reviewed in the Company Profile Chapter, the BoD Profile Sub-Chapter, in this Annual Report.

INDEPENDENCY OF BOD-IC MEMBERS

All members of the BoD-IC have met the independency requirements as stated in the BoD-IC Charter and all applicable laws and regulations. In discharging their duties and responsibilities, each member of the BoD-IC shall always uphold the principle of independency and professionalism.

BOD-IC COMMITTEE MEETING

During 2021, the BoD-IC convened 35 (thirty-five) meetings with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position	Jumlah Pertemuan Total Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)	35	35	100%
Devi Pradnya Paramita*	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Executive Director and Chief Financial Officer (CFO)	25	25	100%
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Executive Director and Chief Risk Officer (CRO)	35	35	100%
Mohammad Ramadhan Harahap	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)	35	35	100%
Y. Bayu Wirawan	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)	35	35	100%

*) Ibu Devi Pradnya Paramita efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 1 November 2021
Ms. Devi Pradnya Paramita effectively served as a Director of the Company until 1 November 2021

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS BOD-IC TAHUN 2021 Report of BoD-IC Duty Implementation for 2021

Sepanjang tahun 2021, BoD-IC telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Throughout 2021, BoD-IC has carried out its duties and responsibilities.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI BOD-IC TAHUN 2021

BoD-IC Competency Development Program In 2021

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota BoD-IC sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan halaman 86.

A more detailed description of the list of training and competency development programs attended by all BoD-IC members in 2021 can be seen in the Company Profile Chapter on page 86.

KOMITE ALCO

ALCO Committee

Perseroan membentuk Komite ALCO untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi yang mencakup kegiatan pemantauan pengelolaan sumber dana termasuk pengelolaan risiko-risiko terkait, seperti risiko likuiditas, risiko solvabilitas, dan risiko pasar.

The Company established the ALCO Committee to assist the BoD in discharging its duties, which includes monitoring the management of fund sources e.g. the management of related risks, such as liquidity risk, solvency risk, and market risk.

PIAGAM KOMITE ALCO

Seluruh anggota Komite ALCO wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Piagam Komite ALCO yang telah disahkan oleh Direksi pada 19 Desember 2013. Piagam ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan komposisi Komite ALCO, serta prosedur terkait, seperti rapat, pelaporan, dan kerahasiaan.

ALCO COMMITTEE CHARTER

All members of the ALCO Committee shall discharge their duties and responsibilities based on the ALCO Charter approved by the Board of Directors on December 19 2013. The Charter regulates matters pertaining to the responsibilities and composition of the ALCO Committee, and related procedures, such as meetings, reporting, and confidentiality.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ALCO

Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO, antara lain:

1. Merumuskan strategi dan rencana tindakan yang berhubungan dengan risiko pasar dan likuiditas;
2. Menyediakan rekomendasi perubahan kebijakan, jika diperlukan, dan menyarankan hal tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
3. Memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas dijalankan sesuai dengan kebijakan Perseroan;
4. Mengelola likuiditas, menetapkan suku bunga, menetapkan, menentukan, dan memantau pelaksanaan kebijakan untuk *mismatch* dan posisi valuta neto, serta mengelola dan menentukan struktur neraca keuangan dan modal IIF;
5. Mengelola investasi untuk dana surplus;
6. Mengelola risiko pasar yang dilakukan dalam *trading book*;
7. Mendesain dan merevisi struktur limit sesuai *risk appetite* IIF melalui koordinasi bersama Komite Manajemen Risiko (atau jika limit tersebut harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, maka harus menyampaikan rekomendasi dan justifikasi untuk memperoleh persetujuan lebih lanjut dari Dewan Komisaris), dan memantau kepatuhan terhadap struktur limit;
8. Menyetujui penggunaan metodologi untuk pengelolaan risiko pasar, risiko likuiditas, dan menetapkan kerangka kerja untuk validasi berkala atas model risiko pasar dan likuiditas;
9. Menentukan (atau memperkirakan) risiko pasar dan likuiditas yang melekat dalam semua aktivitas Perseroan dan menyediakan input strategis kepada Dewan Komisaris melalui koordinasi dengan Komite Manajemen Risiko; dan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE ALCO COMMITTEE

The following are duties and responsibilities of the ALCO Committee:

1. Formulate strategies and action plans related to market risk and liquidity;
2. Provide recommendations for policy changes, if necessary, and recommend them to the BoC for approval;
3. Ensure that asset and liability management is run in accordance with Company policy;
4. Manage liquidity, set interest rates, determine, set, and monitor the implementation of policies to prevent mismatches and set net open positions, while managing and determining the structure of IIF's balance sheet and capital;
5. Manage investments for surplus funds;
6. Manage market risk identified in the trading book;
7. Design and revise the limit structure according to IIF's risk appetite through coordination with the Risk Management Committee (or if the limit must obtain approval from the Board of Commissioners, submit recommendations and justifications for further approval from the BoC), and monitor compliance with the limit structure;
8. Approve the used methodologies for managing market risk, liquidity risk, and establishing a framework for periodic validation of market and liquidity risk models;
9. Determine (or estimate) the market and liquidity risks inherent in all activities of the Company and provide strategic input to the BoC in coordination with the Risk Management Committee; and

10. Mengkaji proyeksi kas dan menentukan kelebihan yang dapat diinvestasikan, jika ada.

KRITERIA KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Seluruh anggota Komite ALCO Perseroan dipastikan sudah memenuhi kualifikasi atau persyaratan individual sebagai anggota Komite ALCO. Masa jabatan Komite ALCO adalah sama dengan periode menjabat Direksi Perseroan.

KOMPOSISI DAN PROFIL ANGGOTA

Per 31 Desember 2021, keanggotaan Komite ALCO terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite yang juga merangkap jabatan sebagai Presiden Direktur & *Chief Executive Officer* (CEO), serta sisa anggota lainnya adalah anggota Direksi Perseroan. Berikut uraian komposisi anggota Komite ALCO selama tahun buku:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Executive Director and Chief Financial Officer (CFO)
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Executive Director and Chief Risk Officer (CRO)
Mohammad Ramadhan Harahap	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)
Y. Bayu Wirawan	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)

PROFIL KEANGGOTAAN KOMITE ALCO

Profil dari masing-masing anggota Komite ALCO sudah diulas pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Direksi, dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE ALCO

Seluruh anggota Komite ALCO telah memenuhi aspek independensi sebagaimana dipersyaratkan dalam Piagam Komite ALCO dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Komite ALCO senantiasa menjunjung tinggi sikap independensi dan profesionalisme.

RAPAT KOMITE ALCO

Sepanjang tahun 2021, rapat Komite ALCO telah dilaksanakan sebanyak 12 kali dengan uraian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position	Jumlah Pertemuan Total Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO)	12	12	100%
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO)	12	12	100%
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO)	12	11	91,67%

10. Review cash projections and determine investable excess, if any.

MEMBERSHIP CRITERIA AND TERM OF OFFICE

All members of the Company's ALCO Committee are confirmed to have met the qualifications or individual requirements as members of the ALCO Committee. The term of office of the ALCO Committee is the same as that of the BoD of the Company.

MEMBER COMPOSITION AND PROFILE

As of December 31, 2021, the ALCO Committee had 5 (five) members consisting of 1 (one) Chairman who also serves as President Director & Chief Executive Officer (CEO), while the remaining members are members of the Company's BoD. The following is a description of the composition of the ALCO Committee members during the financial year:

ALCO COMMITTEE MEMBERSHIP PROFILE

The profiles of ALCO Committee members are reviewed in the Company Profile Chapter, the BoD Profile Sub-Chapter, in this Annual Report.

INDEPENDENCY OF ALCO COMMITTEE MEMBERS

All members of the ALCO Committee have met the independence requirements as stated in the ALCO Charter and all applicable laws and regulations. In discharging their duties and responsibilities, each member of ALCO Committee shall always uphold the principle of independency and professionalism.

ALCO COMMITTEE MEETING

During 2021, ALCO Committee convened 12 meetings with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position	Jumlah Pertemuan Total Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level
Mohammad Ramadhan Harahap	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer (CIO)</i>	12	11	91,67%
Y. Bayu Wirawan	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer (CIO)</i>	12	12	100%

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE ALCO TAHUN 2021

ALCO Committee Competency Development Program in 2021

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota Komite ALCO sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan halaman 86.

A more detailed description of the list of training and competency development programs attended by all ALCO Committee members in 2021 can be seen in the Company Profile Chapter on page 86.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Committee

Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*/"RMC") sebagai salah satu organ pendukung yang berperan membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam hal pengelolaan risiko-risiko Perseroan, termasuk pemberian rekomendasi terkait penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Perseroan.

PIAGAM RMC

RMC memiliki pedoman kerja yang bersifat mengikat dan wajib dijadikan sebagai acuan oleh seluruh anggota komite dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Piagam RMC dibuat dan ditandatangani oleh Direksi pada 16 April 2014 dengan perubahan terakhir dilakukan pada 13 April 2020. Secara umum, Piagam RMC mengatur hal-hal terkait kewenangan, struktur, kualifikasi, tanggung jawab, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan lain-lain.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB RMC

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab RMC, antara lain sebagai berikut:

1. Menyampaikan rumusan strategis kebijakan dan kerangka kerja Manajemen Risiko termasuk penetapan batas kerangka kerja dan formulasi rencana darurat pada situasi atau kondisi yang merugikan Perseroan;
2. Mengawasi proses evaluasi dan pengelolaan komposisi risiko secara keseluruhan dalam portofolio IIF, meminimalisir risiko potensial di proyek maupun di tingkat portofolio, mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada semua tingkatan, dan memastikan bahwa Departemen Manajemen Risiko mampu melakukannya secara mandiri;

The BoD has established a Risk Management Committee ("RMC") as one of its supporting organs that plays a role in assisting the Board in implementing the duties of managing the Company's risks, including providing recommendations pertaining to the formulation of the Company's Risk Management policies and strategies.

RMC CHARTER

RMC has a Charter that binds and must be used as a reference by all of the Committee's members in discharging their daily duties and responsibilities. The RMC Charter made and signed by the BoD on April 16, 2014 with the last amendment made on April 13, 2020. In general, the RMC Charter regulates matters pertaining to authority, structure, qualifications, responsibilities, meetings, reporting, confidentiality, and other matters.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF RMC

The following are the duties and responsibilities of RMC:

1. Deliver the strategic formulation of Risk Management policies and frameworks including setting the framework limits and the formulation of contingency plans in situations or conditions that may be detrimental to the Company;
2. Oversee the evaluation process and management of the overall risk composition in IIF portfolio, minimize potential risks at the project and at the portfolio level, develop a Risk Management culture at all levels, and ensure that the Risk Management Department is able to do it independently;

3. Menyelidiki, menganalisis, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan masalah yang berkaitan dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur pada umumnya;
4. Mengevaluasi proposal terkait aktivitas dan produk baru, mengukur keinginan dan kapasitas IIF dalam menjalankan aktivitas dan pengelolaan produk baru melalui perspektif risiko, serta mengevaluasi proposal terkait perubahan kebijakan dan prosedur;
5. Memantau kecukupan modal IIF terhadap risiko yang diidentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan toleransi risiko Perseroan;
6. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, merumuskan perubahan yang diperlukan terkait kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang ada, mengevaluasi kecukupan pengendalian internal, dan meninjau laporan *Management Information System* (MIS) secara reguler;
7. Melakukan tinjauan rutin untuk mengevaluasi kesesuaian metodologi penilaian risiko;
8. Mengkaji dan menyetujui Laporan Manajemen Risiko Triwulanan yang dihasilkan oleh Departemen Manajemen Risiko;
9. Meninjau dan mengusulkan perubahan pada parameter atau indikator risiko Perseroan kepada Komite Pemantau Risiko untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari Dewan Komisaris;
10. Terkait Pencegahan Kecurangan dan Korupsi, RMC bertanggung jawab untuk:
 - a) Mengembangkan strategi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan etika karyawan atas penipuan (kecurangan) dan korupsi;
 - b) Meninjau penilaian risiko kecurangan dan korupsi pada lingkup Perseroan yang telah disusun oleh Direktorat Manajemen Risiko setidaknya tiga tahun sekali, atau setelah terjadinya perubahan struktural atau fungsional yang signifikan di IIF;
 - c) Menentukan strategi pengendalian penipuan dan korupsi untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi oleh kesadaran atas penipuan dan korupsi;
 - d) Memastikan bahwa setiap karyawan dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing mendapatkan pelatihan yang memadai dalam rangka mendorong kesadaran mereka terhadap tindakan penipuan dan korupsi serta agar mereka dapat lebih memahami Kode Etik IIF;
 - e) Merekomendasikan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya tindakan penipuan dan korupsi; dan
 - f) Meninjau dan memperbarui kebijakan dan prosedur lainnya apabila diperlukan setidaknya setiap dua tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan perangkat kebijakan dan prosedur internal yang ada dengan prinsip, standar, dan praktik terbaik dalam rangka pencegahan penipuan dan korupsi.

KRITERIA KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota RMC sudah memenuhi kualifikasi atau persyaratan individual serta memiliki kompetensi yang dibutuhkan sebagai anggota RMC. Masa jabatan RMC adalah sama dengan periode menjabat Direksi Perseroan.

MEMBERSHIP CRITERIA AND TERM OF OFFICE

The Company ensures that all members of its RMC have met the qualifications or individual requirements and have the required competencies as members of the Committee. The Committee's term of office is the same as that of the BoD of the Company.

KOMPOSISI DAN PROFIL ANGGOTA

Per 31 Desember 2021, keanggotaan Komite RMC terdiri dari 5 (lima) orang dengan uraian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Executive Director and Chief Financial Officer (CFO)
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Executive Director and Chief Risk Officer (CRO)
Mohammad Ramadhan Harahap	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)
Y. Bayu Wirawan	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)

PROFIL KEANGGOTAAN RMC

Profil dari masing-masing anggota RMC sudah diulas pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Direksi, dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI ANGGOTA RMC

Seluruh anggota RMC telah memenuhi syarat independensi sebagaimana tercantum dalam Piagam RMC dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota RMC selalu menjunjung tinggi prinsip independensi dan profesionalisme.

RAPAT RMC

Selama tahun 2021, Perseroan telah mengadakan 4 (empat) kali rapat RMC dengan uraian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position	Jumlah Pertemuan Total Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)	4	4	100%
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Executive Director and Chief Financial Officer (CFO)	4	4	100%
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Executive Director and Chief Risk Officer (CRO)	4	4	100%
Mohammad Ramadhan Harahap	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)	4	4	100%
Y. Bayu Wirawan	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)	4	4	100%

MEMBER'S COMPOSITION AND PROFILE

As of December 31, 2021, the RMC had 5 (five) members with the following description:

RMC MEMBERSHIP PROFILE

The profiles of RMC member are reviewed in the Company Profile Chapter, the BoD Profile Sub-Chapter, in this Annual Report.

INDEPENDENCY OF RMC MEMBERS

All members of the RMC have met the independency requirements as stated in the RMC Charter and all applicable laws and regulations. In discharging their duties and responsibilities, each member of the RMC shall always uphold the principle of independency and professionalism.

RMC MEETING

During 2021, the RMC convened 4 (four) meetings with the following description:

Meeting Date Tanggal Rapat	Agenda Rapat Meeting Agenda
18 Maret/March 2021	<ul style="list-style-type: none"> Ringkasan Dari Rapat Terakhir Penilaian Risiko untuk Q4-2020 Sistem Peringatan Dini (Risiko Kredit) Rencana Kerja Manajemen Risiko 2021 Summary From Last Meeting Risk Assessment for Q4-2020 Early Warning System (Credit Risk) 2021 Risk Management Work Plan

Meeting Date Tanggal Rapat	Agenda Rapat Meeting Agenda
15 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> · Ringkasan Dari Rapat ROC Terakhir · Penilaian Risiko untuk Q1-2021 · Pembaruan <i>Stress Test</i> Portofolio Kredit – Perkiraan <i>Outlook</i> 2021 · Progres Rencana Kerja Manajemen Risiko 2021 · Summary From Last ROC Meeting · Risk Assessment for Q1-2021 · Update on Credit Portfolio <i>Stress Test</i> – Forecasting 2021 <i>Outlook</i> · Progress of 2021 Risk Management Work Plan
15 Juli/July 2021	<ul style="list-style-type: none"> · Ringkasan Dari Rapat ROC Terakhir · Penilaian Risiko untuk Q2-2021 · Usulan Perubahan Batas Investasi – Batas Portofolio Keseluruhan Berdasarkan Peringkat Risiko · Progres Rencana Kerja Manajemen Risiko 2021 · Summary From Last ROC Meeting · Risk Assessment for Q2-2021 · Proposal of Investment Limit Amendment – Overall Portfolio Limit Based on Risk Rating
19 Oktober/October 2021	<ul style="list-style-type: none"> · Ringkasan Dari Rapat ROC Terakhir · Penilaian Risiko untuk Q3-2021 · Progres Rencana Kerja Manajemen Risiko 2021 · Summary From Last ROC Meeting · Risk Assessment for Q3-2021 · Progress of 2021 Risk Management Work Plan

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS RMC TAHUN 2021

Report of RMC Duty Implementation for 2021

Sepanjang tahun 2021, RMC telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. RMC melakukan evaluasi berkala atas seluruh parameter risiko utama yang dihadapi Perusahaan, termasuk kecukupan kebijakan manajemen risiko dan langkah-langkah mitigasi yang diterapkan oleh Manajemen.
2. RMC menyetujui dan mengawasi kemajuan berbagai inisiatif maupun rencana kerja divisi Manajemen Risiko dalam menjaga profil risiko dan tingkat kesehatan Perusahaan.
3. RMC menyetujui penerapan inisiatif *Early Warning System (EWS) – Credit Risk* sebagai mekanisme pengendalian risiko kredit secara regular untuk mengidentifikasi, mengawasi lebih ketat dan menjaga debitur berkualitas buruk atau berpotensi memburuk supaya tidak masuk dalam kategori kredit bermasalah atau pun macet dan akhirnya berdampak terhadap profitabilitas Perusahaan.
4. RMC menyetujui kajian *stress test* atas keseluruhan portofolio investasi Perusahaan dengan asumsi pandemi COVID-19 berkelanjutan dan dampaknya terhadap potensi penambahan total provisi. RMC juga merekomendasikan pengawasan lebih ketat atas perkembangan semua akun-akun yang terdampak dan bermasalah, dan menyetujui rencana pengembangan aset yang lebih terfokus pada sektor dengan paparan risiko rendah terhadap pandemi COVID-19.
5. RMC menyetujui kajian dan proposal perubahan *Portfolio Control Limit* untuk mengakomodasi dinamika lingkungan bisnis dan *Risk Appetite* perseroan.

Throughout 2021, RMC carried out its duties and responsibilities, including:

1. RMC made periodic evaluations of all the main risk parameters faced by the Company, including the adequacy of risk management policies and mitigation measures implemented by Management.
2. RMC approved and oversaw the progress of various initiatives and work plans of the Risk Management division in maintaining the Company's risk profile and healthiness.
3. RMC approved the implementation of the *Early Warning System (EWS) – Credit Risk* initiative as a credit risk control mechanism on a regular basis to identify, closely monitored and safeguarded debtors showing deteriorating or potentially deteriorating credit quality so they would not fall under non-performing or troubled loans category which could have an impact on Company profitability.
4. RMC approved a *stress test* review of the Company's entire investment portfolio, presuming that the COVID-19 pandemic would be persisting and how it would create the need of additional provisions. The RMC also recommended closer monitoring on the progress of all affected and troubled accounts, and approved an asset development plan that was more focused on sectors with low risk exposure to the pandemic.
5. RMC approved the study and proposal for changes in *Portfolio Control Limit* to accommodate dynamic business environment and the Company's *Risk Appetite*.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI RMC TAHUN 2021

RMC Competency Development Program in 2021

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota RMC sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan halaman 86.

A more detailed description of training and competency development programs attended by all RMC members in 2021 can be seen in the Company Profile Chapter on page 86.

KOMITE ADVISORY Advisory Committee

Perseroan memiliki Komite Advisory yang dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Komite ini mengemban tugas khusus untuk meninjau, menimbang, dan mengambil keputusan terkait seluruh proyek *Advisory* Perseroan.

PIAGAM KOMITE ADVISORY

Perseroan memiliki Piagam Komite Advisory yang telah disahkan Direksi pada tanggal 5 Desember 2014. Piagam tersebut mengatur hal-hal yang wajib dipatuhi dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Advisory.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ADVISORY

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Komite Advisory, antara lain sebagai berikut:

1. Meninjau, merekomendasikan, dan/atau menyetujui Dokumen Proyek *Advisory* atau dokumen serupa, yang menyediakan cakupan dan struktur awal terkait proyek *Advisory* Perseroan. Dokumen Proyek *Advisory* harus disusun secara detail dengan mempertimbangkan informasi yang ada pada saat itu, serta harus mempertimbangkan, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: manfaat pelaksanaan proyek, implikasi terhadap sumber daya Perseroan (waktu pengerjaan, biaya/*budget*, potensi pendapatan, dan lainnya), potensi benturan kepentingan, dan permasalahan KYC;
2. Menerima *update* secara periodik dari *Executive Vice President Advisory Group* terkait proyek-proyek *Advisory* (baik proyek yang sedang berjalan maupun proyek *pipeline*);
3. Menyediakan informasi, bantuan dan/atau klarifikasi kepada Dewan Komisaris untuk meninjau fungsi *Advisory* Perseroan, apabila diperlukan;
4. Meninjau dan menyesuaikan kebijakan dan/atau prosedur *Advisory* Perseroan dari waktu ke waktu apabila dianggap perlu oleh Komite Advisory; dan
5. Meninjau dan memantau implementasi proyek-proyek *Advisory* Perseroan minimal setahun sekali dan meningkatkan frekuensi *review* apabila dianggap perlu, serta menyediakan laporan hasil *review* dan pemantauan kepada Dewan Komisaris, apabila diperlukan.

The Company has an Advisory Committee established by the BoD and reports directly to the Board. This committee is given a special task to review, weigh, and make decisions regarding all of the Company's *Advisory* projects.

ADVISORY COMMITTEE CHARTER

The Company has an Advisory Committee Charter which was approved by the BoD on December 5, 2014. The Charter regulates matters that must be complied with and is binding on all members of the Advisory Committee.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE ADVISORY COMMITTEE

The following are the duties and responsibilities of the Advisory Committee:

1. Review, recommend and/or approve the *Advisory Project* or similar Document, which provides the initial scope and structure of the Company's *Advisory* project. The *Project Advisory Document* must be prepared in details with due consideration on all available information and must consider, but not b to the following: the benefits of implementing the project, implications for Company resources (time of execution, cost/*budget*, potential revenue, and others), potential conflicts of interest, and KYC issues;
2. Receive periodic updates from the *Executive Vice President of the Advisory Group* regarding *Advisory* projects (both ongoing projects and *pipeline* projects);
3. Provide information, assistance and/or clarification to the BoC to review the Company's *Advisory* function, if necessary;
4. Review and periodically adjust the Company's *Advisory* policies and/or procedures as the Committee deems necessary; and
5. Review and monitor the implementation of the Company's *Advisory* projects at least once a year and increase the frequency of reviews as deemed necessary, and deliver reports on the results of the review and monitoring to the BoC, if deemed necessary.

KRITERIA KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Komite Advisory telah memenuhi kualifikasi atau persyaratan individual serta memiliki kompetensi yang dibutuhkan sebagai anggota Komite Advisory. Masa jabatan Komite Advisory adalah sama dengan periode menjabat Direksi Perseroan.

KOMPOSISI DAN PROFIL ANGGOTA

Per 31 Desember 2021, jumlah anggota Komite Advisory adalah sebanyak 4 (empat) orang dengan uraian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Executive Director and Chief Financial Officer (CFO)
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Executive Director and Chief Risk Officer (CRO)
Irman Boyle	Anggota Member	<i>EVP Head of Advisory</i>

PROFIL KEANGGOTAAN KOMITE ADVISORY

Profil dari masing-masing anggota Komite Advisory sudah diulas pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Direksi, dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE ADVISORY

Seluruh anggota Komite Advisory telah memenuhi syarat independensi sebagaimana tercantum dalam Piagam Advisory dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Komite Advisory selalu menjunjung tinggi prinsip independensi dan menjaga sikap profesionalisme.

RAPAT KOMITE ADVISORY

Selama tahun 2021, Perseroan telah mengadakan 11 kali rapat Komite Advisory dengan uraian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position	Jumlah Pertemuan Total Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)	11	11	100%
Devi Pradnya Paramita*	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Executive Director and Chief Financial Officer (CFO)	9	9	100%
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Executive Director and Chief Risk Officer (CRO)	11	11	100%
Irman Boyle	Anggota Member	EVP Head of Advisory	11	11	100%

***) Ibu Devi Pradnya Paramita efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 1 November 2021
Ms. Devi Pradnya Paramita effectively served as a Director of the Company until 1 November 2021

MEMBERSHIP CRITERIA AND TERM OF OFFICE

The Company ensures that all members of its Advisory Committee have met the qualifications or individual requirements and have the required competencies as members of the Advisory Committee. The Committee's term of office is the same as that of the BoD of the Company.

MEMBER'S COMPOSITION AND PROFILE

As of December 31, 2021, the Advisory Committee had 4 (four) members with the following description:

ADVISORY COMMITTEE MEMBERSHIP PROFILE

The profiles of Advisory Committee member are reviewed in the Company Profile Chapter, the BoD Profile Sub-Chapter, in this Annual Report.

INDEPENDENCY OF ADVISORY COMMITTEE MEMBERS

All members of the Advisory Committee have met the independence requirements as stated in the Advisory Charter and all applicable laws and regulations. In discharging their duties and responsibilities, each member of the Advisory Committee shall always uphold the principle of independency and professionalism.

ADVISORY COMMITTEE MEETING

During 2021, the Advisory Committee convened 11 meetings with the following description:

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ADVISORY TAHUN 2021

Report of Advisory Committee Duty Implementation for 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Advisory telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Meninjau, merekomendasikan, dan/atau menyetujui Dokumen Proyek *Advisory* atau dokumen serupa, yang menyediakan cakupan dan struktur awal terkait proyek *Advisory* Perseroan;
2. Menerima *update* secara periodik dari *Executive Vice President Advisory Group* terkait proyek-proyek *Advisory* (baik proyek yang sedang berjalan maupun proyek *pipeline*), termasuk meninjau, memantau, dan memberikan advis atas progres dan implementasi proyek-proyek *Advisory* Perseroan sehingga proyek-proyek dimaksud dapat berjalan dengan baik.

Throughout 2021, the Advisory Committee carried out its duties and responsibilities, including:

1. Review, recommend and/or approve the Advisory Project or similar Document, which provides the initial scope and structure of the Company's Advisory project;
2. Receive periodic updates from the Executive Vice President of the Advisory Group regarding Advisory projects (both ongoing projects and pipeline projects), including review, monitor, and give advice on the progress and implementation of the Company's Advisory projects so that the projects can be well executed and implemented.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE ADVISORY TAHUN 2021

Advisory Committee Competency Development Program in 2021

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota Komite Advisory sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan halaman 86.

A more detailed description of training and competency development programs attended by all Advisory Committee members in 2021 can be seen in the Company Profile Chapter on page 86.

PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS KINERJA KOMITE ADVISORY TAHUN 2021

Assessment and Evaluation of Advisory Committee Performance in 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Advisory telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan di atas. Komite Advisory telah mengadakan sejumlah rapat, dengan tingkat kehadiran 100%, yang bertujuan untuk memberikan tinjauan, rekomendasi, dan persetujuan pada Dokumen Proyek *Advisory* dan dokumen serupa. Sepanjang rapat tersebut, Komite Advisory juga meninjau dan memantau proyek yang sedang berjalan dan proyek *pipeline*. Disamping itu, Komite Advisory telah memberikan advis yang membantu implementasi proyek-proyek *Advisory* Perseroan dan proses perolehan proyek *pipeline*. Komite Advisory telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Throughout 2021, the Advisory Committee carried out its duties and responsibilities as described above. The Advisory Committee has held meetings, with 100% attendance, which aims to review, recommend, and approve approve the Advisory Project or similar Document. During the meeting, the Advisory Committee also review and monitor on-going project and project pipeline. In addition, the Advisory Committee has provided advice which helps the implementation of the Company's Advisory projects and acquisition process of project pipeline. The Advisory Committee has attended training and competency development program.

Berdasarkan pencapaian kinerja Komite Advisory yang telah diuraikan di atas, hasil penilaian atas kinerja tersebut adalah **"Sangat Baik"**.

Based on Advisory Committee performance explained above, the performance is considered to be **"Very Good"**.

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA HR Committee

Agar pelaksanaan tugas manajerial Direksi dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat berjalan optimal, Direksi membentuk Komite Sumber Daya Manusia (*Human Resources Committee*"HRC") yang ditugaskan secara khusus untuk meninjau, menimbang, dan mengambil keputusan mengenai kepegawaian Perseroan.

PIAGAM HRC

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota HRC wajib berpedoman pada Piagam HRC yang telah disahkan Direksi pada tanggal 14 Desember 2015.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB HRC

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab HRC, antara lain sebagai berikut:

1. Kepegawaian dan Pengembangan

Memutuskan dan menyetujui seleksi, penempatan, dan pemberhentian karyawan senior Perseroan (tingkat *Assistant Vice President* ke atas) sesuai dengan kriteria subjektif dan objektif yang dapat diterima. Kewenangan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik untuk menunjang pertumbuhan Perseroan, menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi, serta memastikan bahwa kinerja Perseroan tidak terganggu oleh sumber daya manusia yang memiliki kinerja buruk;

2. Manajemen Kinerja

Merumuskan tujuan-tujuan Perseroan dan karyawan, terutama bagi karyawan yang menempati level *Executive Vice President* dan staf, serta menyesuaikan hasilnya di Perseroan;

3. Kompensasi dan Manfaat

Menetapkan kebijakan remunerasi untuk karyawan pada level *Executive Vice President* dan staf, menyetarakan remunerasi dengan kinerja yang diukur sesuai tolok ukur industri sejenis, pencapaian indikator kinerja yang penting, nilai tambah ekonomis, dan faktor-faktor lainnya.

4. Hal Lainnya

Menetapkan kebijakan, strategi, dan keputusan yang berkaitan dengan SDM yang dinilai berpotensi membawa pengaruh atau dampak signifikan bagi Perseroan.

In order for the Board to run an optimum level of Human Resources management, the BoD has established a Human Resources Committee ("HRC") which is specifically assigned to review, weigh, and make decisions pertaining to the Company's employment affairs.

HRC Charter [HR]

In carrying out their duties and responsibilities, all HRC members shall use the HRC Charter as guidelines, which was approved by the BoD on December 14, 2015.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF HRC

The following are the duties and responsibilities of the HRC:

1. Employment and Development

Decide on and approve the selection, placement, and dismissal of senior employees of the Company (*Assistant Vice President* level and above) in accordance with acceptable subjective and objective criteria. This authority is intended to ensure the Company has well-thought human resource planning to support the Company's growth, face every emerging challenge, and ensure that the Company's performance is not disrupted due to poorly performing human resources;

2. Performance Management

Formulate the goals of the Company and employees, especially for employees who are assuming *Executive Vice President* and staff positions and adjust the results in the Company;

3. Compensation and Benefits

Establish employee remuneration policy at the *Executive Vice President* and staff levels, base remuneration on performance which is measured against similar industry benchmarks, important performance indicators, economic added values, and other factors.

4. Other Matters

Establish HR-related policies, strategies, and decisions which are considered to have the potential to have a significant impact or impact on the Company.

KEWENANGAN HRC

Untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas HRC, komite ini diberikan sejumlah kewenangan, antara lain:

1. Memiliki akses untuk mendapatkan informasi langsung dari Direksi, eksekutif, karyawan, dan pihak-pihak eksternal kapanpun diperlukan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya;
2. Memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi, mengundang, dan mengikutsertakan karyawan atau konsultan internal atau pihak independen untuk menghadiri rapat Komite.

KRITERIA KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Seluruh anggota HRC senantiasa menjunjung tinggi integritas dan independensi, serta penuh itikad baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Masa jabatan HRC adalah sama dengan periode menjabat Direksi Perseroan.

KOMPOSISI DAN PROFIL ANGGOTA

Per 31 Desember 2021, jumlah anggota HRC adalah sebanyak 6 (enam) orang dengan uraian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Executive Director and Chief Financial Officer (CFO)
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Executive Director and Chief Risk Officer (CRO)
Mohammad Ramadhan Harahap	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)
Y. Bayu Wirawan	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)
Irman Boyle	Anggota Member	<i>EVP Head of Advisory</i>

PROFIL KEANGGOTAAN HRC

Profil dari masing-masing anggota HRC sudah diulas pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Direksi, dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI ANGGOTA HRC

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota HRC telah memenuhi syarat independensi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT HRC

Selama tahun 2021, HRC telah menyelenggarakan 3 kali rapat dengan uraian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position	Jumlah Pertemuan Total Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)	3	3	100%
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Executive Director and Chief Financial Officer (CFO)	3	2	67%

HRC AUTHORITY

To support seamless and effective implementation of its duties, HRC is delegated a number of authorities, including:

1. Having access to direct information from the BoD, executives, employees, and external parties whenever needed in accordance with the scope of their responsibilities;
2. Has the authority to select, invite and include employees or internal consultants or independent parties to attend the Committee's meetings.

MEMBERSHIP CRITERIA AND TERM OF OFFICE

All HRC members shall always uphold their integrity and independency, and discharge their duties and responsibilities with good intention. The term of office of the HRC is the same as the term of office of the BoD of the Company.

MEMBER COMPOSITION AND PROFILE

As of December 31, 2021, the HRC had 6 (six) members with the following description:

HRC MEMBERSHIP PROFILE

The profiles of HRC member are reviewed in the Company Profile Chapter, the BoD Profile Sub-Chapter, in this Annual Report.

INDEPENDENCY OF HRC MEMBERS

The Company ensures that all HRC members have met the independency requirements as stipulated in the applicable laws and regulations.

HRC MEETING

During 2021, the HRC convened 3 meetings with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position	Jumlah Pertemuan Total Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Executive Director and Chief Risk Officer (CRO)	3	3	100%
Mohammad Ramadhan Harahap	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)	3	3	100%
Y. Bayu Wirawan	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Executive Director and Chief Investment Officer (CIO)	3	3	100%
Irman Boyle	Anggota Member	<i>EVP Head of Advisory</i>	3	3	100%

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS HRC TAHUN 2021

Report of HRC Duty Implementation for 2021

Sepanjang tahun 2021, HRC telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

- 1) Menetapkan *benefit* karyawan sesuai dengan *market benchmark* dan kemampuan Perseroan, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK;
- 2) Meninjau dan memberikan masukan tentang *benefit Management*;
- 3) Menetapkan *Man Power Planning* tahun 2022;
- 4) Menetapkan kebijakan cuti;
- 5) Meninjau parameter dan metode *grade to grade promotion*; dan
- 6) Menetapkan promosi tahun 2021, kenaikan gaji tahun 2021 dan bonus kinerja tahun 2021.

Throughout 2021, HRC carried out its duties and responsibilities, including:

1. Determined employee benefits in accordance with market benchmarks and company capabilities under the Financial Institution Pension Fund or DPLK;
2. Reviewed and provided input on benefits Management;
3. Set the Man Power Planning for 2022;
4. Set leave policy;
5. Reviewed the parameters and the method of grade to grade promotion; and
6. Determined promotion in 2021, salary increase in 2021 and performance bonus in 2021.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI HRC

TAHUN 2021

HRC Competency Development Program in 2021

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota HRC sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan halaman 86.

A more detailed description of training and competency development programs attended by all HRC members in 2021 can be seen in the Company Profile Chapter on page 86.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

IT Steering Committee

Direksi menyadari kebutuhan terhadap infrastruktur teknologi informasi yang kokoh sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran aktivitas operasional bisnis sehari-hari. Oleh karena itu, Direksi membentuk Komite Teknologi Informasi (TI) (*Information Technology Steering Committee*/"ITSC") untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam hal pengembangan kapasitas dan kapabilitas sistem teknologi informasi Perseroan.

The BoD recognizes the urgent need for a solid information technology infrastructure to support the Company's seamless daily business operations. Therefore, the BoD has established an Information Technology Steering Committee ("ITSC") to assist the Board in discharging its duties to develop the capacity and capability of the Company's information technology systems.

PIAGAM ITSC

Direksi telah mengesahkan Piagam ITSC yang digunakan sebagai panduan atau pedoman bagi seluruh anggota ITSC dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ITSC

Tugas dan tanggung jawab ITSC, antara lain sebagai berikut:

1. Memprioritaskan inisiatif dan menyelaraskan TI dengan strategi bisnis serta mengawasi strategi, proyek, dan keputusan arsitektur teknologi yang berkaitan dengan teknologi informasi;
2. Memprioritaskan inisiatif investasi di bidang TI dan memberikan persetujuan akhir dan rekomendasi tentang keberlanjutan usulan proyek TI;
3. Menyelaraskan bisnis strategis dengan investasi TI melalui perencanaan TI strategis;
4. Meninjau dan memantau proyek-proyek utama di bidang TI dari perspektif lintas fungsional;
5. Mencapai keseimbangan antara kendala yang dihadapi di bidang TI dengan prioritas bisnis;
6. Mempromosikan Lintas Sinergi Fungsional;
7. Memberikan informasi terkait TI kepada Direksi dan Manajemen;
8. Memastikan terjalannya komunikasi yang terbuka antara Departemen TI dan unit fungsional lainnya di Perseroan dalam rangka mempromosikan perencanaan TI secara bersama;
9. Menyelesaikan konflik terkait sumber daya dengan melakukan pengawasan terhadap manfaat yang terealisasi;
10. Memantau apakah inisiatif TI sudah cukup efektif dalam mendukung tujuan bisnis dan strategi Perseroan;
11. Melakukan pengawasan terhadap Manajemen Risiko TI;
12. Memberikan kepemimpinan Manajemen Risiko TI dengan:
 - a) Memahami dan mengidentifikasi risiko TI dan mengupayakan pengelolaan yang efektif atas risiko tersebut;
 - b) Mengelola eksposur dan ambang batas risiko TI.
13. Menyelesaikan permasalahan alokasi sumber daya berdasarkan prioritas risiko; dan
14. Memastikan terjalannya komunikasi yang transparan antara Departemen TI dan unit-unit fungsional lain sebagai salah satu upaya dalam mempromosikan Manajemen risiko secara bersama.

KRITERIA KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Seluruh anggota ITSC senantiasa menjunjung tinggi integritas dan independensi, serta penuh itikad baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Masa jabatan ITSC adalah sama dengan periode manjabat Direksi Perseroan.

KOMPOSISI DAN PROFIL ANGGOTA

Per 31 Desember 2021, jumlah anggota ITSC adalah sebanyak 3 (tiga) orang dengan uraian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Executive Director and Chief Financial Officer (CFO)
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Executive Director and Chief Risk Officer (CRO)

ITSC CHARTER

The BoD has ratified the ITSC Charter which offers guidelines to all ITSC members in carrying out their duties and responsibilities.

ITSC'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of ITSC, among others, are as follows:

1. Prioritize initiatives and align IT with business strategy and oversee IT-related technology architecture strategies, projects and decisions;
2. Prioritize IT investment initiatives and give final approval and recommendations on the sustainability of proposed IT projects;
3. Align strategic business with IT investment through strategic IT planning;
4. Review and monitor key IT projects from a cross-functional perspective;
5. Ensure a balance between the constraints faced in the IT sector and business priorities;
6. Promote Cross-Functional Synergy;
7. Provide information related to IT to the Board of Directors and Management;
8. Ensure an open communication between the IT Department and other functional units in the Company in order to promote joint IT planning;
9. Resolve conflicts related to resources by monitoring the realized benefits;
10. Monitor whether IT initiatives are effective enough in supporting the Company's business objectives and strategies;
11. Supervise IT Risk Management;
12. Provide IT Risk Management leadership by:
 - a) Comprehend and identify IT risks and seek run an effective management of these risks;
 - b) Manage IT risk exposure and thresholds.
13. Settle resource allocation issues based on risk priorities; and
14. Ensure there is transparent communication between the IT Department and other functional units as an effort to stimulate joint risk management.

MEMBERSHIP CRITERIA AND TERM OF OFFICE

All ITSC members shall always uphold their integrity and independency, and discharge their duties and responsibilities with good intention. The term of office of ITSC is the same as the term of office of the BoD of the Company.

COMPOSITION AND MEMBER PROFILE

As of December 31, 2021, the ITSC had 3 (three) members with the following description:

PROFIL KEANGGOTAAN ITSC

Profil dari masing-masing anggota ITSC sudah diulas pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Direksi, dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI ANGGOTA ITSC

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota ITSC telah memenuhi syarat independensi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT ITSC

Selama tahun 2021, ITSC telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan uraian sebagai berikut:

ITSC MEMBERSHIP PROFILE

The profiles of ITSC member are reviewed in the Company Profile Chapter, the BoD Profile Sub-Chapter, in this Annual Report.

INDEPENDENCY OF ITSC MEMBERS

The Company ensures that all ITSC members have met the independency requirements as stipulated in the applicable laws and regulations.

ITSC MEETING

During 2021, ITSC convened 4 (four) meetings with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perseroan Corporate Position	Jumlah Pertemuan Total Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)	4	4	100%
Devi Pradnya Paramita*	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Executive Director and Chief Financial Officer (CFO)	4	2	50%
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Executive Director and Chief Risk Officer (CRO)	4	3	75%

*) Ibu Devi Pradnya Paramita efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 1 November 2021
Ms. Devi Pradnya Paramita effectively served as a Director of the Company until 1 November 2021

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS ITSC TAHUN 2021

Report of ITSC Duty Implementation for 2021

Sepanjang tahun 2021, ITSC telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Memberikan keputusan terkait anggaran TI Perseroan tahun 2021
2. Memberikan keputusan terkait pengembangan infrastruktur dan aplikasi TI
3. Memberikan arahan terkait MRTI
4. Memberikan arahan terkait rencana anggaran TI Perseroan tahun 2022

Throughout 2021, ITSC carried out its duties and responsibilities, including:

1. Provide decisions regarding the Company's IT budget for 2021
2. Provide decisions regarding IT infrastructure and application development
3. Provide direction regarding MRTI (OJK's IT Risk Management)
4. Provide direction regarding the Company's 2022 IT budget plan

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI ITSC

TAHUN 2021

ITSC Competency Development Program in 2021

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota ITSC sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan halaman 86.

A more detailed description of training and competency development programs attended by all ITSC members in 2021 can be seen in the Company Profile Chapter on page 86.

PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS KINERJA ITSC TAHUN 2021

Assessment and Evaluation of ITSC Performance in 2021

ITSC telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik dengan memberikan keputusan-keputusan strategis terkait pengembangan infrastruktur dan aplikasi TI Perseroan.

ITSC has carried out its duties and responsibilities very well by providing strategic decisions related to the development of the Company's IT infrastructure and applications.

SEKRETARIS PERUSAHAAN Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan adalah organ pendukung Direksi yang berperan penting dalam membangun komunikasi internal antar organ Perseroan, serta bertugas menjalankan fungsi strategis yang berkaitan dengan hubungan atau komunikasi eksternal dengan Pemegang Saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip GCG pada lingkup Perseroan serta menjamin aspek kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.

DASAR HUKUM

1. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
2. Anggaran Dasar Perseroan

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



Nastantio W. Hadi

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Umur/Age
52 Tahun/years

Kewarganegaraan/Citizenship
Warga Negara Indonesia

Domisili/Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan:

Surat No. S.2016.153/IV/IIF tanggal 7 April 2016

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Hukum di bidang Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta (1993)
- *Lex Legibus Master* (LL.M.) di bidang *International Business Law* dari Washington College of Law – the American University, Washington DC, AS (1996)

Riwayat Jabatan:

Beliau mengawali karier profesionalnya di firma hukum Hadi Suwito & Soerjono Soekanto (1993–1994), Soewito Suhardiman Eddymurthy & Kardono (1996–2000) dan Pradjoto & Associates (2000–2005). Selanjutnya, beliau mengepalari divisi hukum dari suatu perusahaan penyedia jasa logistik.

Rangkap Jabatan: -

The Corporate Secretary is a BoD's supporting organ that plays an important role in building internal communication between the Company's organs, and is tasked with implementing strategic functions pertaining to external relations or communication with shareholders, regulators, and other stakeholders. The Corporate Secretary is also responsible for ensuring the implementation of GCG principles at the Company while ensuring its compliance with all regulatory stipulations.

The Corporate Secretary is appointed by the BoD and reports directly to the President Director.

LEGAL BASIS

1. POJK No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies
2. Company's Articles of Association

CORPORATE SECRETARY PROFILE

Legal Basis of Appointment:

Letter No. S.2016.153/IV/IIF dated April 7, 2016

Educational Background:

- Bachelor Degree in Law of Civil Affairs from the Faculty of Law, Trisakti University, Jakarta (1993)
- Lex Legibus Master (LL.M.) in International Business Law from Washington College of Law – the American University, Washington DC, USA (1996)

Resume:

He began his professional career at the law firms of Hadi Suwito & Soerjono Soekanto (1993–1994), Soewito Suhardiman Eddymurthy & Kardono (1996–2000) and Pradjoto & Associates (2000–2005). He was later appointed to lead the legal division of a logistics service provider company.

Concurrent Position: -

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan IIF mengemban tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap tata kelola perusahaan yang baik;
2. Membangun hubungan yang baik dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan;
3. Menjalankan fungsi legal dan konsultan legal terutama menyangkut hal-hal yang terkait dengan permasalahan Perseroan; dan
4. Memastikan ketersediaan laporan-laporan, antara lain Laporan Manajemen Risiko, Laporan Kinerja Sosial dan Lingkungan dan Laporan Uji Tuntas, sesuai dengan Pedoman Operasional Perseroan, Kesepakatan Pemegang Saham, dan/atau hukum dan regulasi yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2021

Di tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah memenuhi tugas dan kewajibannya secara umum, termasuk menjadi notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi, merilis informasi terkini mengenai kondisi Perseroan, merumuskan pesan yang akan disampaikan oleh Direksi kepada pihak internal maupun eksternal, serta memastikan kelancaran komunikasi dengan otoritas, Pemegang Saham, mitra kerja, dan masyarakat.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2021

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan halaman 85.

UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit

Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal secara menyeluruh yang melibatkan seluruh karyawan dari masing-masing unit kerja. Hal ini dilakukan agar implementasi prinsip-prinsip GCG dipastikan berjalan dengan baik pada setiap aspek operasional bisnis selaras dengan komitmen Perseroan.

Untuk mendukung efektivitas dan kecukupan pengendalian internal pada lingkup IIF, Perseroan membentuk Unit Audit Internal (UAI) yang bekerja secara independen dan objektif dalam menjalankan fungsi *assurance* dan konsultasi kepada unit-unit kerja. Disamping itu, UAI juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan agar kegiatan operasional bisnis dapat mencapai target yang telah ditentukan dengan tetap mengindahkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kebijakan internal yang berlaku.

UAI adalah satuan kerja di Perseroan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, melalui Komite Audit. Pembentukan UAI telah selaras dengan ketentuan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary of IIF include:

1. To ensure compliance with GCG principles;
2. To professionally manage the Company's relationship with Shareholders and Stakeholders;
3. To perform legal functions and act as a legal consultant, particularly on matters related to issues faced by the Company;
4. To ensure the availability of reports pertaining to Risk Management, Social & Environmental Performance and Due Diligence reports, pursuant to the Company's Operating Manual, Shareholders' Agreement, and/or prevailing laws and regulations.

CORPORATE SECRETARY DUTY IMPLEMENTATION REPORT 2021

In 2021, the Corporate Secretary fulfilled his duties and responsibilities in general, including acting as notary at the meetings conducted by the BoD and the BoC, releasing new information on the state of the Company, formulating messages to be delivered by the BoD to internal and external parties, and ensuring smooth communication with authorities, shareholders, partners, and the community.

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR 2021

A more detailed description of training and competency development programs that the Corporate Secretary has participated in during 2021 can be seen in the Company Profile Chapter on page 85.

The Company applies a comprehensive internal control system that involves all employees in each work unit. The system has been put in place in order that GCG principles are applied properly in every aspect of business operations in line with the Company's commitment.

To support the effectiveness and adequacy of internal control at IIF, the Company has established an Internal Audit Unit (UAI) that works independently and objectively in carrying out assurance and consulting functions to work units. In addition, UAI also evaluates the implementation of risk management and corporate governance to ensure business operations achieve the predetermined targets while maintaining compliance with applicable laws and internal policies.

UAI is a work unit in the Company that reports directly to the President Director and the Board of Commissioners, through the Audit Committee. The establishment of UAI has been in line with

POJK No. 56/POJK.04/2015 ("POJK 56/2015") tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

DASAR HUKUM

1. POJK No. 56/POJK.04/2015 ("POJK 56/2015") tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
2. Anggaran Dasar Perseroan
3. Piagam Audit Internal

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Perseroan memiliki Piagam Audit Internal yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan Presiden Direktur pada 28 November 2012 dan pembaharuan terakhir pada 5 Maret 2020. Piagam ini berfungsi sebagai pedoman bagi auditor internal IIF dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya di Perseroan. Piagam Audit Internal memuat prinsip-prinsip dan praktik profesional auditor internal, struktur dan kedudukan di dalam organisasi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, fungsi dan ruang lingkup penugasan, independensi dan objektivitas, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penugasan auditor internal.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Mengacu pada Piagam Audit Internal IIF, adapun tugas dan tanggung jawab UAI, antara lain untuk:

1. Mengembangkan rencana audit tahunan yang fleksibel menggunakan metodologi berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko atau masalah kontrol yang diidentifikasi oleh Manajemen dan menyampaikan rencana tersebut kepada Komite Audit untuk ditelaah dan disetujui serta diperbarui secara periodik;
2. Melaksanakan rencana kerja audit tahunan yang disetujui, termasuk di dalamnya tugas-tugas khusus atau proyek yang diminta langsung oleh Manajemen dan Komite Audit;
3. Menilai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya
4. Melakukan audit kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan hukum terkait;
5. Memantau, menganalisis, dan melaporkan status penyelesaian atas tindak lanjut yang direkomendasikan;
6. Mengaudit dan memberikan informasi secara berkesinambungan kepada Komite Audit mengenai tren dan praktik terbaik di bidang Audit Internal;
7. Membantu penyelidikan kasus signifikan yang diduga mengarah pada tindakan penipuan di dalam Perseroan dan memberitahukan hasil dari penyelidikan tersebut kepada Komite Audit dan Manajemen; dan
8. Mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan auditor eksternal dan regulator untuk menyediakan cakupan audit yang optimal kepada Perseroan dengan biaya wajar.

KEDUDUKAN UAI DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugasnya, UAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan secara matriks kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

the provisions of POJK No. 56/POJK.04/2015 ("POJK 56/2015") on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.

LEGAL BASIS

1. POJK No. 56/POJK.04/2015 ("POJK 56/2015") on the Establishment and Guidelines for Drafting the Internal Audit Unit Charter
2. Company's Articles of Association
3. Internal Audit Charter

INTERNAL AUDIT CHARTER [INTERNAL AUDIT]

The Company has an Internal Audit Charter which was ratified and signed by the President Commissioner and President Director on November 28, 2012 and the latest updated on March 5, 2020. This charter offers guidelines for IIF's internal auditors in playing their roles, and discharging their duties and responsibilities at the Company. The Internal Audit Charter contains the principles and professional practice of internal auditors, structure and position at the organization, authority, duties and responsibilities, function and scope of assignments, independence and objectivity, as well as other matters related to the assignment of internal auditors.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Referring to the IIF Internal Audit Charter, the UAI's duties and responsibilities to:

1. Develop adaptable annual audit plans using appropriate risk-based methodologies, which cover any risk or control issues identified by the Management, and submit the plan to the Audit Committee for further review and approval as well as periodical renewal;
2. Carry out approved annual audit plans, including specialized tasks or projects requested by the Management and the Audit Committee;
3. Evaluate the efficiency and effectiveness of activities in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and others;
4. Perform audits on the Company's compliance with prevailing rules and regulations;
5. Monitor, analyze, and report follow-up actions based on recommendations made;
6. Perform audits on trends and best practices for Internal Audit work and keep the Audit Committee abreast of such information;
7. Provide assistance in investigations when fraudulent activities are suspected to have occurred within the Company and submit the results of these investigations to the Management and the Audit Committee; and
8. Consider and determine the scope of audit work to be performed by external auditors and regulators in order to provide optimal auditing coverage at a reasonable cost.

UAI'S POSITION IN THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In discharging its duties, UAI reports directly to the President Director and on a matrix basis to the BoC through the Audit Committee.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA UAI

Kepala UAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris. Kepala UAI bertanggung jawab atas pengembangan, pengkajian, dan modifikasi kebijakan audit, prosedur, dan pelaksanaan audit.

KRITERIA KEANGGOTAAN

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, seluruh anggota UAI telah memenuhi kriteria dan kualifikasi individu sebagai auditor internal, antara lain:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni mengenai teknik audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
4. Memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Ikatan Auditor Internal (IAI);
5. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
7. Bersikap objektif dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan penilaian yang objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

PROFIL KEPALA UAI



Yudi Adrial

Kepala UAI

UAI Head

Umur/Age

43 Tahun/years

Kewarganegaraan/Citizenship

Warga Negara Indonesia

Domisili/Domicile

Jakarta

Dasar Pengangkatan:

Beliau ditunjuk sebagai Kepala Audit Internal oleh Direksi berdasarkan Surat Penujukan No. Ref. 017/IIF-HRD/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. 001/IIF/BoC-RES/IV/2016 tanggal 21 April 2016.

Riwayat Pendidikan:

Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2002).

Riwayat Karier:

Beliau telah berpengalaman selama 20 tahun di bidang konsultan manajemen dan lembaga keuangan. Pengalaman audit beliau selama 6 tahun sebagai konsultan di Ernst & Young dan sebagai Kepala Unit Kepatuhan di PT NISP Sekuritas selama 2 tahun. Beliau memiliki *Certified Internal Auditor* (CIA) dari Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia.

Rangkap Jabatan: -

THE PARTIES WHO APPOINT AND DISMISS THE HEAD OF UAI

The Head of UAI is appointed and dismissed by the President Director after approval from the Board of Commissioners. The Head of UAI is responsible for developing, reviewing, and modifying audit policies, procedures, and conducting audits.

MEMBERSHIP CRITERIA

As stated in the Internal Audit Charter, all members of UAI have met the individual criteria and qualifications as internal auditors, including:

1. Integrity along with professionalism, independence, honesty, and objectivity in carrying out their duties;
2. Knowledgeable and experienced in the technical aspects of auditing and other relevant disciplines;
3. Excellent communication skills, both verbal and written;
4. Compliance with professional standards issued by the Association of Internal Auditors;
5. Ability to maintain confidentiality of information and/or corporate data related to the implementation of the duties and responsibilities of an Internal Auditor, except when disclosure is legally required or requested through court order;
6. A solid understanding of good corporate governance principles and risk management; and
7. Objectivity in implementing their duties and the ability to provide objective evaluations based on actual conditions.

UAI HEAD PROFILE

Basis of Appointment

Appointed as the Head of Internal Audit by the BoD based on the Letter of Appointment No. Ref. 017/IIFHRD/III/2012 dated 30 March 2012 and approved by the BoC through the Circular Resolution of the BoC No. 001/IIF/BoC-RES/IV/2016 dated 21 April 2016.

Educational Background:

Bachelor Degree in Accounting from the Faculty of Economics, University of Indonesia (2002).

Work History:

He has 20 years of experience in management and financial consulting. His audit experience includes 6 years as a consultant at Ernst & Young and 2 years as the Head of Compliance Unit at PT NISP Sekuritas. He is a Certified Internal Auditor (CIA) accredited by the Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia.

Concurrent Position: -

KOMPOSISI DAN PROFIL KEANGGOTAAN UAI

Per 31 Desember 2021, jumlah auditor internal tercatat sebanyak 4 (empat) orang, termasuk 1 (satu) orang di antaranya adalah Kepala UAI. Seluruh anggota UAI adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Berikut ini adalah uraian singkat dari profil masing-masing anggota UAI:

Nama Name	Usia Age	Domisili Domicile	Basis Pengangkatan Basis of Appointment	Riwayat Pendidikan Educational Background	Riwayat Karier Resume
Rahman Soeryo Anindito *)	34 tahun years old	Jakarta	No. 2021.160/IX/IIF-HRGA	Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia Bachelor Degree in Accounting from University of Indonesia	Audit Senior Manager, RSM Indonesia
Rama Aditia	37 tahun years old	Jakarta	No. SK.2016.107/MI/IIF-HR&GA	Sarjana Akuntansi dari STIEKPI Bachelor Degree in Accounting from STIEKPI	Operation Officer, Bank Mandiri
Khairiyah *)	27 tahun years old	Jakarta	No. 2021.183/XI/IIF-HRGA	Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia Bachelor Degree in Accounting from University of Indonesia	Senior Auditor, RSM Indonesia

*) Bergabung di November 2021/Joined on November 2021

INDEPENDENSI UAI

Masing-masing anggota UAI menyatakan komitmen untuk selalu bekerja secara profesional, objektif, dan independen, serta berperan sebagai mitra manajemen yang mampu memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI UAI

Selain mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing auditor internal dalam proses rekrutmen, Perseroan juga memandang penting keikutsertaan auditor internal dalam program pelatihan atau sertifikasi yang berkesinambungan.

Hingga akhir 2021, sebanyak 4 anggota UAI telah memiliki sertifikasi profesi yang relevan dengan kegiatan audit internal, antara lain:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development Program and/or Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Yudi Adrial	Kepala Unit Audit Internal (UAI)	Introduction to Onedrive System	IT Team	19 Februari/February 2021
		PIP Data Socialization	Operational Risk Team	16 April 2021
	Head of Internal Audit Unit (UAI)	Konsultasi Publik dokumen Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan ("SEMS")	S&E Team	30 Maret/March 2021
		Sustainability Bond	World Bank	7 April 2021
		The 4 Essentials of Leadership	Dunamis	26 Juli/July 2021-30 July 2021
	Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference and Exhibition	Indonesia Energy Efficiency and Conservation Society	14 Juni/June 2021-17 Juni/June 2021	
	AGMS and AGNS Socialization	IIF	5 Agustus/August 2021	
	Legal and Commercial Aspect in PPP Projects	HJP and Deloitte	29 November 2021	
	APPU dan KYC APPU and KYC	LPII	1-2 Desember 2021/December 1-2, 2021	

UAI PERSONNEL COMPOSITION AND PROFILE

As of December 31, 2021, the UAI had 4 (four) member auditors, including 1 (one) of whom was the Head of UAI. All of the UAI member auditors were Indonesian citizens (WNI). The following is a brief description of the profile of each UAI member auditor:

UAI INDEPENDENCY

Each member auditor of UAI has declared a commitment to always work professionally, objectively, and independently, and to act as a management partner capable of who giving added values to the Company.

UAI QUALIFICATION AND CERTIFICATION

In addition to considering the educational background and competencies of each internal auditor in the recruitment process, the Company also views the importance of internal auditors' participation in ongoing training or certification programs.

By the end of 2021, 4 of UAI members had obtained professional certifications relevant to internal audit activities, including:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development Program and/or Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Rahman Soeryo Anindito	Manajer UAI UAI Manager	Legal and Commercial Aspect in PPP Projects	HJP and Deloitte	29 November 2021
		Mitigasi Ancaman Keamanan Informasi melalui Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Audit Mitigation of Information Security Threats through the Implementation of Information Security Management System and Audit	Pefindo - PT Pemeringkat Efek Indonesia	15 Desember/December 2021
		APPU dan KYC APPU and KYC	LPPI	21 Desember/December 2021
		Risk Awareness Sharining Session	IIF	10 Desember/December 2021
Rama Aditia	Staff UAI UAI Staff	Implementing regulation of Omnibus Law 2020	Dewi Negara Fachri & Partners Law Firm	12 April 2021
		PIP Data Socialization	Operational Risk Team	16 April 2021
		Proceeds Management and Impact Reporting Workshop	World Bank	16 Maret/March 2021
		Audit Report Writing Effectively	IIAI	26 Juli/July 2021-27 Juli/July 2021
		Communication Skills for Auditors	IIAI	28 Juli/July 2021-29 Juli/July 2021
		AGMS and AGNS Socialization	IIF	5 Agustus/August 2021
		English Course	EF	Mei/May-20 November 2021
		Legal and Commercial Aspect in PPP Projects	HJP and Deloitte	29 November 2021
		Mitigasi Ancaman Keamanan Informasi melalui Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Audit Mitigation of Information Security Threats through the Implementation of Information Security Management System and Audit	Pefindo	15 Desember/December 2021
		APPU dan KYC APPU and KYC	LPPI	25 Desember/December 2021-2 Desember/December 2021
Risk Awareness Sharing Session	IIF	10 Desember/December 2021		
Khairiyah	Staff UAI UAI Staff	Legal and Commercial Aspect in PPP Projects	HJP and Deloitte	29 November 2021
		Mitigasi Ancaman Keamanan Informasi melalui Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Audit Mitigation of Information Security Threats through the Implementation of Information Security Management System and Audit	PT PEFINDO Biro Kredit	15 Desember/December 2021
		APPU dan KYC APPU and KYC	LPPI	23 Desember/December 2021 - 2 Desember/December 2021
		Risk Awareness Sharining Session	IIF	10 Desember/December 2021

RAPAT UAI DENGAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU KOMITE AUDIT

Selama tahun 2021, UAI telah menyelenggarakan 6 kali rapat gabungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris beserta Komite Audit.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS UAI TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Unit Audit Internal melakukan tugas pemeriksaan dan kegiatan konsultasi berikut:

- 1) Melakukan audit atas area-area Legal, Corporate Secretary & Compliance dan Credit Investment Management;
- 2) Secara berkala dan dalam batas tertentu melakukan tinjauan atas laporan keuangan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
- 3) Melakukan *review* atas pembaharuan *Standard Operating Procedures* (SOP) Perseroan untuk memastikan kesesuaian alur proses dan aktivitas kerja dimasing-masing unit kerja, serta menilai kecukupan atas desain pengendalian internal Perseroan;
- 4) Melakukan *performance review* atas *follow up* rekomendasi audit atas area-area sebagai berikut:
 - a. Human Resources & General Affairs Management; dan
 - b. Credit Risk Management.
- 5) Melakukan pendampingan untuk pihak-pihak eksternal, yakni:
 - a. Pendampingan untuk Penugasan Audit Laporan Keuangan yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja;
 - b. Pendampingan untuk penugasan audit yang dilakukan oleh tim World Bank; dan
 - c. Pendampingan untuk penugasan audit yang dilakukan oleh ADB.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI UAI TAHUN 2021

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota UAI sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan halaman 85-86.

PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS KINERJA UAI TAHUN 2021

Menurut penilaian Direksi dan Komite Audit, UAI telah berkinerja optimal di tahun 2021, dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Direksi dan Komite Audit melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UAI.

UAI MEETINGS WITH THE BOD, BOC, AND/OR AUDIT COMMITTEE

During 2021, UAI convened 6 joint meetings with the BoD and the BoC as well as the Audit Committee.

UAI DUTY IMPLEMENTATION REPORT 2021

In 2021, the Internal Audit Unit performed audit duties and consultation activities as follows:

- 1) Performing audit in the areas of Legal, Corporate Secretary & Compliance and Credit Investment Management;
- 2) Periodically and within certain limits performing review on financial statements to ensure compliance with the prevailing regulations;
- 3) Performing review on update of the Company's Standard Operating Procedures (SOP) to ensure compliance of workflow and activities in each work unit and to assess the adequacy of the Company's internal control design;
- 4) Performance review of the follow-up audit recommendations for the following areas:
 - a. Human Resources & General Affairs Management; dan
 - b. Credit Risk Management.
- 5) Supervising external parties as follows:
 - a. Supervising Financial Statements Audit Assignment performed by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja;
 - b. Supervising audit assignment performed by World Bank team; and
 - c. Supervising audit assignment performed by ADB.

UAI COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2021

A more detailed description of the trainings and competency development programs attended by all UAI members in 2021 can be seen in the Company Profile Chapter on page 85-86.

ASSESSMENT AND EVALUATION OF UAI PERFORMANCE IN 2021

The BoD and Audit Committee has assessed UAI and they have performed optimally in supporting the BoD and Audit Committee's supervision function in 2021 by implementing their duties and responsibilities.

AKUNTAN PUBLIK Public Accountant

Selain menjalankan fungsi audit internal, Perseroan juga mengimplementasikan fungsi audit eksternal sebagai bentuk pengawasan independen terhadap aspek keuangan melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Kegiatan audit eksternal bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan secara berkualitas, serta sesuai dengan prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

In addition to internal audit function, the Company also does an external audit function as a form of independent supervision of financial aspects through Financial Statement Audits by Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP). External audits aim to ensure that the financial information presented in the Financial Statements has been prepared and presented with high quality, and in conformity with the principles and Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia.

MEKANISME PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Berdasarkan ketentuan POJK No.13/POJK.03/2017 ("POJK 13/2017") tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, adapun mekanisme penunjukan KAP dan AP dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa hingga selanjutnya ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Perseroan memastikan bahwa auditor eksternal yang ditunjuk adalah pihak independen yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat di Perseroan.

Mengacu pada hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 April 2021, Pemegang Saham menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a *Member Firm* of *Ernst & Young Global Network*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021. masing-masing sebagai AP dan KAP yang terdaftar di OJK. Selain mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2021, auditor eksternal juga memberikan jasa attestasi lainnya berupa jasa asuransi atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja.

PERIODE AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Sesuai ketentuan Pasal 16 POJK 13/2017, maka penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis dari AP yang sama paling lama adalah 3 (tiga) tahun buku pelaporan berturut-turut. Sementara penggunaan jasa dari KAP tergantung dari hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

PENGAWASAN DAN KOMUNIKASI AKTIF ANTARA AKUNTAN PUBLIK DAN PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris beserta Komite Audit dan Unit Audit Internal melakukan pengawasan terhadap jalannya proses audit eksternal. Perseroan melalui organ-organ tersebut selalu berusaha untuk menjalin komunikasi yang efektif dan apabila diperlukan dapat juga mengadakan rapat bersama dengan AP agar proses audit dapat berjalan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pihak KAP dan AP terpilih diharuskan untuk menyampaikan rencana audit berikut metodologi audit dan sampel audit yang akan digunakan kepada Unit Audit Internal. Komite Audit dan Unit Audit Internal mengawasi dan memastikan kelancaran dan kesesuaian pelaksanaan proses audit eksternal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus mengevaluasi kualitas proses audit.

Pemantauan terhadap kinerja KAP dan/atau AP dilakukan oleh Direksi dan dibahas dalam rapat Komite Audit yang diikuti juga oleh Unit Audit Internal dan Direksi terkait. Dalam rapat gabungan tersebut umumnya juga membahas implementasi tindak lanjut atas temuan-temuan audit yang ditemukan oleh KAP dan/atau AP.

PUBLIC ACCOUNTING FIRM (KAP) APPOINTMENT MECHANISM

Based on POJK No.13/POJK.03/2017 ("POJK 13/2017") regarding the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, an Accounting Firm and its Public Accountant have to be selected through goods and services procurement process and shall be appointed and determined by the shareholders through the Annual GMS based on recommendations from the BoC and the Audit Committee. The Company ensures that the appointed external auditor is an independent party who does not have a conflict of interest with the Company's officials of any level.

Referring to the resolution of the Annual GMS on April 22, 2021, the shareholders approved the delegation of authority to KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a *Member Firm* of *Ernst & Young Global Network*) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021 respectively as AP and KAP registered with OJK. In addition to auditing the Financial Statements for the 2021 financial year, the external auditor also provides other attestation services in the form of assurance service on the Performance Evaluation Report.

SERVICE PERIOD OF PUBLIC ACCOUNTING AND PUBLIC ACCOUNTING FIRM

According to Article 16 of POJK 13/2017, the use of audit services for historical financial information of the same AP shall not be more than 3 (three) financial reporting years in a row. Meanwhile, the use of services of KAP depends on the results of Audit Committee's evaluation of the potential risk that may arise from hiring the same accounting firm consecutively for quite a long period.

ACTIVE SUPERVISION AND COMMUNICATION BETWEEN THE PUBLIC ACCOUNTANT AND THE COMPANY

The BoD, the BoC, the Audit Committee and Internal Audit Unit oversee the external audit process. The Company through these organs always strives to establish effective communication and, if necessary, shall convene joint meetings with the public accountant to ensure the entire audit process runs in accordance with the Professional Standards of Accountants and the predetermined audit scope and is completed within the agreed time frame.

The selected KAP and AP are required to submit the audit plan along with the audit methodology and exemplary audits to the Internal Audit Unit. The Audit Committee and the Internal Audit Unit oversee and ensure the smooth and appropriate implementation of the external audit process to comply with applicable regulations as well as evaluate the quality of the audit process.

The performance of KAP and/or AP is monitored by the Board of Directors and discussed in Audit Committee meetings which shall also be attended by the Internal Audit Unit and relevant Directors. The joint meetings generally also discuss the implementation of follow-up on audit findings found by KAP and/or AP.

DAFTAR AKUNTAN PUBLIK PERIODE 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

List of Public Accountants for the Last 5 (Five) Years

Tahun Buku Fiscal Year	Nama Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik Public Accountant	Biaya (Rp) Fee	Jasa Audit Audit Work	Opini Audit Audit Opinion
2021	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Christophorus Alvin Kossim	1.000.000.000	Audit Umum General Audit	Wajar Tanpa Modifikasi Unmodified
2020	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Christophorus Alvin Kossim	1.594.860.000	· Audit Umum · Review Terbatas · General Audit · Limited Review	Wajar Tanpa Modifikasi Unmodified
2019	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Sinarta	820.000.000	Audit Umum General Audit	Wajar Tanpa Modifikasi Unmodified
2018	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Danil Setiadi Handaja	835.000.000	Audit Umum General Audit	Wajar Tanpa Modifikasi Unmodified
2017	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Yasir	680.000.000	Audit Umum General Audit	Wajar Tanpa Modifikasi Unmodified

JASA LAIN YANG DIBERIKAN PADA TAHUN 2021

Selain memberikan jasa audit atas laporan keuangan, KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network) juga memberikan jasa attestasi lainnya dengan uraian sebagai berikut:

OTHER SERVICES PROVIDED IN 2021

In addition to audit services on financial statements, KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network) also provided attestation services with the following description:

Ruang lingkup Audit Scope of Audit Work	Tanggal pelaksanaan Implementation Date	Biaya Fee
Jasa asuransi atas Laporan Hasil Kinerja Assurance service on the Performance Evaluation Report	26 Februari/February 26, 2021	85.000.000

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Internal Control System

GAMBARAN UMUM

Perseroan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif secara berkesinambungan dan melibatkan unsur-unsur Perseroan di dalamnya, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan. Implementasi sistem pengendalian internal yang kokoh menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan operasional Perseroan yang sehat dan aman, serta diharapkan dapat membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

GENERAL DESCRIPTION

The Company constantly runs an effective Internal Control System (SPI) and involves all of its elements in the entire process, including the BoC, the BoD, and employees. The implementation of a solid internal control system serves as the basis for the implementation of the Company's healthy and safe operational activities, and is expected to assist the BoC and BoD in safeguarding the Company's assets, ensuring the availability of reliable financial and managerial reporting, increasing the Company's compliance with all applicable laws and regulations, as well as reducing the risk of losses, irregularities, and violations of prudential aspects, while also increasing organizational effectiveness and improving cost efficiency.

IIF telah membangun proses, struktur, dan system pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian yang memadai bahwa:

- a. Operasional Perseroan telah dilakukan dengan efektif dan efisien;
- b. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi; dan
- c. Sistem pelaporan keuangan dapat diandalkan.

Agar kualitas penerapan pengendalian internal pada lingkup IIF senantiasa terjaga dengan baik, Perseroan secara rutin melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal pada semua level, baik dalam hal penerapan kebijakan, prosedur, pengawasan internal, serta pengelolaan manajemen risiko.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN COSO – INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

Kerangka pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan mengacu pada standar internasional, yaitu COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework*. Berangkat dari kerangka COSO tersebut, Perseroan telah menetapkan 5 (lima) komponen pengendalian, antara lain:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Aktivitas pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi;
5. Aktivitas pemantauan.

Perseroan mendorong keterlibatan aktif Direksi dan Dewan Komisaris serta manajemen dan personil lainnya di dalam proses pengendalian internal agar tujuan dan target Perseroan baik terkait operasi, pelaporan maupun kepatuhan dapat terealisasi dengan baik.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEUANGAN

Upaya pengendalian internal pada aspek keuangan telah dilakukan secara terintegrasi oleh Perseroan, yakni dengan:

1. Menerapkan pemisahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Menyusun kebijakan, prosedur, sistem operasional, dan standar akuntansi serta diperbarui (*update*) secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional yang aktual.
3. Melakukan pengendalian atas transaksi dan pembukuan dengan melakukan pengecekan berjenjang untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat sudah benar-benar dilakukan.
4. Melakukan pengendalian aset fisik, antara lain melalui pengamanan aset, catatan dan dokumentasi serta akses terbatas terhadap program aplikasi.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

Pengendalian internal dari sisi operasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan baik berupa Pedoman, Petunjuk Operasional, maupun Instruksi Kerja. Hal ini sejalan dengan sistem pengendalian internal yang berlaku di Perseroan untuk terus membangun sistem kontrol organisasi yang kuat dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada.

IIF has established processes, structures, and internal control systems to properly assure that:

- a. The Company's Operations have been conducted effectively and efficiently;
- b. The laws and regulations in force have been obeyed; and
- c. The Financial reporting system is reliable.

In order to maintain the quality of the implementation of internal control within the scope of IIF, the Company regularly evaluates the effectiveness of internal control at all levels in implementing policies, procedures, internal control, and risk management.

COMPATIBILITY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH COSO – INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

The Company's internal control framework is referred to international standards, namely COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework*. With COSO as the framework, the Company has determined 5 (five) control components, including:

1. Control environment;
2. Risk assessment;
3. Control activities;
4. Information and communication;
5. Monitoring activities.

The Company encourages active involvement of its BoD and BoC and its entire management team and other personnel in the internal control process to ensure they can realize the Company's objectives and targets in operations, reporting and compliance.

FINANCIAL CONTROL POLICY

The Company have made integrated Internal control efforts in the financial aspect, by e.g.:

1. Having in place separated functions, duties, and responsibilities to ensure no one have the opportunity to commit and cover up frauds or irregularities in performing their respective duties.
2. Developing policies, procedures, operational systems, and accounting standards and updating them periodically to describe actual operational activities.
3. Controlling transactions and bookkeeping with tiered checks to ensure that the recorded transactions have actually been carried out.
4. Controlling physical assets, among others through securing assets, records and documentation as well as limited access to application programs.

OPERATIONAL CONTROL POLICY

Internal control on operations is further elaborated into various policies in the form of Guidelines, Operational Instructions, and Work Instructions. This is in line with the internal control system that applies at the Company to continue to build a strong organizational control system by involving all existing resources.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Melalui organ-organ utama maupun organ pendukung yang ada, Perseroan memastikan bahwa setiap proses operasional bisnis yang berjalan di Perseroan senantiasa mematuhi dan mengindahkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2021

Direksi bertanggung jawab menyusun dan memutakhirkan kebijakan pengendalian internal di lingkungan IIF, dan bersama-sama dengan unit Audit Internal memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Dari hasil pemantauan dan pengawasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal IIF telah berjalan efektif dan memadai.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2021

Direksi dan Dewan Komisaris berpendapat bahwa Perseroan sudah memiliki kecukupan sistem pengendalian internal yang memadai. Hal ini didukung dengan adanya prosedur dan kebijakan internal yang mengatur tentang kerangka pengendalian internal IIF, keberadaan Unit Audit Internal sebagai unit kerja yang independen, dan eksistensi Dewan Komisaris sebagai fungsi pengawas.

Pada pelaksanaannya, Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan guna memastikan terselenggaranya pengendalian internal secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal tersebut. Mekanisme ini dipastikan berjalan efektif di tahun 2021.

Disamping itu, manajemen juga melakukan kaji ulang berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, proses *assurance* terhadap seluruh aktivitas fungsional dan melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal/eksternal.

MANAJEMEN RISIKO Risk Management

KERANGKA UMUM MANAJEMEN RISIKO

Perseroan meyakini penerapan manajemen risiko yang cermat, terintegrasi, dan efektif menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memastikan tercapainya pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, serta dalam rangka memaksimalkan nilai tambah bagi Pemegang Saham.

Memasuki tahun ke-2 pandemi COVID-19, Perseroan semakin siap dan lebih adaptif dalam mengelola profil-profil risiko baru yang muncul serta semakin matang dalam merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Kemampuan Perseroan dalam mengatasi tantangan di masa pandemi tentunya tidak lepas dari kesadaran penuh seluruh insan IIF yang selalu menerapkan budaya sadar risiko pada setiap aktivitas bisnis yang dijalankan. Dalam rangka memperkuat nilai-nilai budaya sadar risiko tersebut, Perseroan merancang kegiatan pelatihan

COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAW AND REGULATIONS

Through the main organs and existing supporting organs, the Company ensures that each of its business operational processes is run in compliance with and conformity to all applicable laws and regulations.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL IN 2021

The BoD is responsible for the formulation and review of internal control policies in IIF and, together with the Internal Audit Unit, to monitor and supervise the execution of those policies. Based on the results of such monitoring and supervising activities, the implementation of Internal Control System in IIF is deemed to be adequate and effective.

STATEMENT OF THE BoD AND/OR THE BoC ABOUT THE ADEQUACY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN 2021

In the opinion of the BoD and the BoC, the Company has an adequate internal control system in place. This is supported by various internal procedures and policies that govern the framework of internal control at IIF, the Internal Audit Unit as an independent work unit, and the Board of Commissioners in a supervisory function.

In its implementation, the BoC, with the assistance of the Audit Committee, is responsible for supervising and ensuring the overall implementation of internal control at the Company, including over internal control policies established by the BoD. In 2021, this mechanism is deemed to be functioning effectively.

Further, the management regularly perform a review on internal control procedures, documentation, data processing systems, and the assurance process to all functional activities, as well as the proper follow-up to findings of internal/external audit.

RISK MANAGEMENT GENERAL FRAMEWORK

The Company is convinced that a thoughtful, integrated and effectively run risk management system is one of the preconditions that must be fully met to ensure IIF achieves a healthy and sustainable business growth, while maximizing added value for the shareholders.

Entering the 2nd year of the COVID-19 pandemic, the Company is now better prepared and more adaptive in managing new risk profiles that arise and is becoming more mature in formulating appropriate mitigation measures. The Company's ability to overcome challenges during the pandemic is also the result of the full awareness of all IIF personnel who always apply a risk-aware culture in every business activity they carry out. In order to strengthen these risk-awareness culture, the Company carries out a variety of training and socialization

dan sosialisasi secara berkala mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan Perseroan. Program pelatihan tersebut wajib diikuti oleh seluruh insan IIF dari berbagai level jabatan.

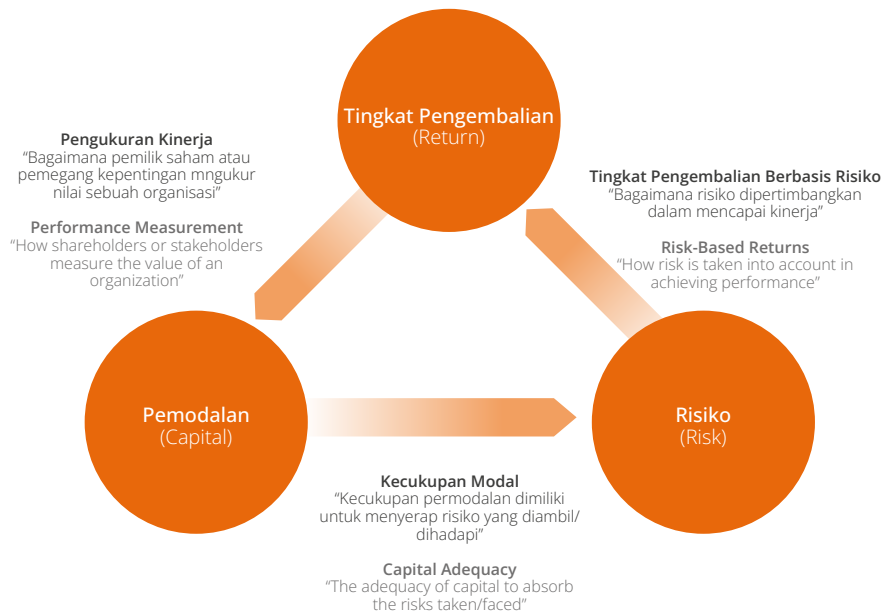
Perseroan berpandangan implementasi manajemen risiko yang efektif dapat mendukung tercapainya keseimbangan antara Tingkat Pengembalian (*Return*), Risiko (*Risk*) dan Permodalan (*Capital*). Namun demikian, *outcome* tersebut baru dapat terealisasi dengan baik apabila pelaksanaan manajemen risiko dilengkapi dengan unsur-unsur berikut ini:

1. Kebijakan manajemen risiko yang komprehensif untuk sejumlah risiko utama yang dihadapi IIF;
2. Struktur organisasi yang tepat dengan definisi peran dan tanggung jawab yang jelas di berbagai tingkatan;
3. Proses manajemen risiko yang memadai (termasuk identifikasi risiko, metodologi penilaian dan pengukurannya, serta pendekatan mitigasi risiko), proses pemantauan risiko dan pengendalian; dan
4. Infrastruktur yang mendukung terutama dalam hal sistem TI dan SDM.

activities on a regular basis regarding the risk management system implemented by the Company. The training programs are mandatory for IIF personnel from a variety of position levels.

The Company believes that effective implementation of risk management plays an important role towards achieving the proper balance between Return, Risk and Capital. However, the desired outcome of risk management can only be achieved through the implementation of a good risk management framework, which consists of:

1. A comprehensive risk management policy for certain key risks faced by IIF;
2. Proper organizational structure with clear definitions of roles and responsibilities at various levels;
3. Adequate risk management processes (including risk identification, assessment and measurement methodologies, and risk mitigation approaches), risk monitoring and control processes; and
4. Supporting infrastructure, especially in terms of IT and HR systems.



Identifikasi profil risiko menjadi salah satu proses penting di dalam tahapan manajemen risiko dimana pada fase ini Perseroan memastikan bahwa eksposur risiko yang ada telah sesuai dengan *risk appetite* Perseroan. Untuk mendukung terwujudnya manajemen risiko yang efektif dan terlaksananya upaya mitigasi risiko yang sesuai kebutuhan, Perseroan telah mempersiapkan inisiatif kebijakan manajemen risiko yang berkelanjutan dan memadai untuk menjaga tingkat risiko pada batas-batas yang ditentukan.

The identification of risk profile is one of the important processes in the risk management stage where the Company ensures that the existing risk exposure is in accordance with the Company's risk appetite. To support the realization of effective risk management and the implementation of risk mitigation efforts as needed, the Company has prepared a sustainable and adequate risk management policy initiative to maintain the level of risk at the specified limits.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan mengadopsi prinsip tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) yang terdiri dari *Business & Supporting Units* sebagai lini pertahanan pertama. Selanjutnya, Direktorat Manajemen Risiko berperan sebagai lini pertahanan kedua yang akan memeriksa, memverifikasi, dan menyediakan opini independen kepada Manajemen berkenaan

In running its business operations, the Company adopts the principle of three lines of defense consisting of a Business & Supporting Units as the first line of defense. Next, the Directorate of Risk Management acts as the second line of defense that will examine, verify, and provide an independent opinion to the Management regarding proposals from the Risk Taking Unit and monitor investment portfolios together with

dengan proposal dari Unit Pengambil Risiko serta memantau portofolio investasi bersama dengan Direktorat Keuangan dan Operasi. Selanjutnya, lini pertahanan ketiga dan terakhir adalah Tim Audit Internal, yang akan memverifikasi untuk memastikan semua standar prosedur IIF telah terpenuhi. Strategi ini secara keseluruhan adalah bagian dari konsep *four eyes principle* dimana Perseroan melakukan pembagian tugas secara jelas dan konsisten untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan secara optimal.

Pelaksanaan aktivitas ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan risiko Perseroan dijalankan oleh Direktorat Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada *Chief Risk Officer* (CRO). Sementara Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi bertanggung jawab dalam hal pengawasan dan pengelolaan keseluruhan profil risiko IIF, bersama dengan Komite Pengawas Risiko yang beranggotakan Dewan Komisaris yang bertindak dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Pada praktiknya, meskipun hal-hal yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan implementasi manajemen risiko di Perseroan dikelola oleh Direktorat Manajemen Risiko, Perseroan tetap memberikan pemahaman yang kuat kepada seluruh karyawan bahwa pelaksanaan manajemen risiko yang efektif harus menjadi tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, setiap karyawan yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan harus mampu mengidentifikasi dan memikirkan eksposur risiko yang mungkin timbul di kemudian hari apabila keputusan tersebut diambil.

STRUKTUR & PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko di lingkup Perseroan merupakan tugas dan tanggung jawab Direktorat Manajemen Risiko yang dipimpin oleh *Chief Risk Officer* (CRO).

KOMPOSISI KEANGGOTAAN DIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO

Per 31 Desember 2021, jumlah karyawan yang ditugaskan di Direktorat Manajemen Risiko adalah sebanyak 21 orang, termasuk 4 Team Leader yang membawahi Risiko Kredit, Risiko Pasar/Portofolio dan Risiko S&E yang seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

PERKEMBANGAN PROFIL RISIKO-RISIKO UTAMA PERSEROAN

Pada tahun 2021, Direktorat Manajemen Risiko telah melakukan analisa dan mengidentifikasi profil risiko Perseroan untuk posisi 1 Januari 2021 sampai dengan posisi 31 Desember 2021. Secara umum, perkembangan profil risiko-risiko utama Perseroan dalam kurun 1 (satu) tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

the Directorate of Finance and Operations. Furthermore, the third and final line of defense is the Internal Audit Team, which will make verifications to ensure that all IIF standard procedures have been met. This strategy as a whole is part of the four eyes principle concept by which the Company has implemented a clear and consistent division of tasks to support optimally sustainable growth.

The implementation of activities or other matters pertaining to the Company's risk management is carried out by the Risk Management Directorate who is directly responsible to the Company's Chief Risk Officer (CRO). Meanwhile, the Risk Management Committee consisting of the BoD is responsible for monitoring and managing the overall IIF's risk profile, together with the Risk Oversight Committee consisting of the BoC who conducts oversight function.

In practice, although matters relating to the formulation of policies and implementation of risk management in the Company are managed by the Risk Management Directorate, the Company still provides a strong understanding to all employees that the implementation of effective risk management must be a shared responsibility. Therefore, every employee involved in the decision-making process must be able to identify and think about risk exposures that may arise in the future if the decision is made.

RISK MANAGEMENT STRUCTURE & MANAGEMENT

The Risk Management Directorate under the Chief Risk Officer (CRO) is responsible for risk management within the Company.

COMPOSITION OF MEMBERSHIP OF RISK MANAGEMENT DIRECTORATE

As of 31 December 2021, there were 21 personnel assigned to the Risk Management Directorate. This include four Team Leader responsible for Credit Risk, Market/Portfolio Risk and S&E Risk, all of whom are Indonesian citizen.

DEVELOPMENT OF THE COMPANY'S MAIN RISK PROFILE

In 2021, the Risk Management Directorate reanalyzed and thus identified the Company's risk profile for the position of January 1, 2021 to December 31, 2021. In general, the development of the Company's main risk profile within the last 1 (one) year, is as elaborated below:

No.	Jenis Risiko Risk Type	Keterangan Description	Upaya Mitigasi	Mitigation Effort
1.	Risiko Kredit dan Pembiayaan Credit and Financing Risk	<p>Risiko yang timbul akibat kegagalan <i>counterparty</i> dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Sementara risiko pembiayaan terjadi akibat ketidakmampuan IIF dalam mendapatkan pengembalian investasi yang layak dari pembiayaan langsung (penyertaan ekuitas) pada perusahaan nasabah.</p> <p>Credit risk is the risk that occurs due to the failure of the counterparty to fulfill its obligations based on financing agreement, including financing risk due to IIF's inability to acquire proper investment return from direct financing (equity participation) in the customer's business.</p>	<p>a) Mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan dan investasi, mengutamakan peran aktif Komite Investasi dalam melakukan penilaian atas setiap pengajuan pembiayaan dan investasi sehingga dapat diperoleh pandangan yang berimbang, komprehensif, independen, dan menyeluruh atas potensi risiko yang dihadapi.</p> <p>b) Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko, antara lain dengan melakukan pengaturan alur kerja proses pengelolaan kredit dan investasi sehingga tercipta proses kredit yang efektif dan efisien.</p> <p>c) Penerapan sistem pemeringkatan risiko yang memungkinkan IIF untuk mengukur tingkat risiko dan menganalisa kelayakan debitur dan/atau proyek infrastruktur dengan menggunakan perangkat pengukuran yang konsisten baik untuk modal pembiayaan korporasi maupun pembiayaan proyek.</p> <p>d) Melakukan pemantauan secara periodik terhadap portofolio pembiayaan untuk memastikan kualitas kredit yang baik termasuk <i>early warning indicator</i> guna mendeteksi ada atau tidaknya perubahan kualitas kredit sejak dini sehingga dapat diterapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat sesegera mungkin. Apabila terjadi penurunan kualitas kredit secara signifikan, maka pemantauan lebih intensif akan dilakukan oleh Direktorat Investasi bekerja sama dengan Direktorat Risiko Kredit untuk merumuskan tindakan pemulihan yang dianggap perlu.</p> <p>e) Penyempurnaan proses pemantauan atas janji-janji (<i>covenants</i>) dan kondisi yang harus dipenuhi oleh debitur secara berkala melalui sistem data/informasi yang terintegrasi antara Direktorat Investasi, Unit Risiko Kredit dan Unit <i>Credit Operations</i>. Selain untuk mendukung Tata Kelola yang Baik, sistem ini akan membantu mendeteksi ada tidaknya kelainan/<i>abnormality</i> atas kondisi atau proses yang ada yang berakibat pada kenaikan risiko kredit.</p>	<p>a) Prioritizes the principle of prudence in the provision of financing and investing and an active role of the Investment Committee in evaluating each application for these activities. This is done to ensure that IIF acquires a balanced, comprehensive, independent, and thorough overview of encountered potential risks.</p> <p>b) Improvement of risk management procedures and systems, including workflow arrangements between credit risk management, financing, and investing activities, to create an effective and efficient credit initiation process.</p> <p>c) Implementation of risk rating system that allows IIF to measure the level of risk and analyse the feasibility of debtors and/or infrastructure projects using consistent measurement tools, both for corporate financing and project financing.</p> <p>d) Periodic monitoring on the financing portfolio to ensure good credit quality, including an improvement and formalization of early alert system to provide warning indicator in detecting changes in credit quality thus mitigations can be introduced at an early stage. If a major deterioration in credit quality occurs, more intensive monitoring will be carried out by Investment Directorate in cooperation with Credit Risk which may lead to performing recovery actions if deemed necessary.</p> <p>e) Improvement of the monitoring process on covenants and conditions that must be routinely fulfilled by debtors on through an integrated data/information system between the Investment Directorate, Credit Risk Unit and Credit Operations Unit. In addition to supporting Good Governance, this system will also help detect any abnormalities in existing conditions or processes that result in an increase in credit risk.</p>
2.	Risiko Pasar Market Risk	<p>Risiko yang timbul karena terjadi perubahan pada kondisi pasar yang diyakini dapat mempengaruhi kinerja IIF, termasuk di antaranya: risiko perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang asing.</p> <p>Market risk is the risk arising from changes in market factors that may harm IIF, including in this case the exchange rates or interest rates.</p>	<p>a) Penetapan strategi investasi yang terukur dan terencana dalam parameter yang dapat diterima dengan mengoptimalkan tingkat pengembalian terhadap risiko pasar. Pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan terhadap strategi pembiayaan dan investasi untuk memastikan kesesuaian penerapan dengan kebijakan, Batasan, dan target yang telah ditetapkan.</p> <p>b) Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) melakukan pemantauan secara berkala terhadap pergerakan indikator-indikator pasar, baik domestik maupun global. Melakukan kajian atas dampak yang dapat ditimbulkan dari pergerakan indikator-indikator pasar tersebut terhadap kinerja IIF, termasuk kajian akan risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar mata uang.</p>	<p>a) Determination of measured and planned investment strategies within acceptable parameters by optimising the rate of return on market risk. Periodic monitoring and evaluation is executed on financing and investment strategies to ensure compliance with policies, limits, and targets that have been set.</p> <p>b) The Asset and Liability Committee (ALCO), conducts regular monitoring on market indicators movement, both domestic and global. The study is conducted on the impact resulting from the movement of these market indicators towards IIF's performance, including the study of interest rate risk and exchange rate risk.</p>

No.	Jenis Risiko Risk Type	Keterangan Description	Upaya Mitigasi	Mitigation Effort
			<p>c) Terkait risiko nilai tukar, IIF sedapat mungkin melakukan penyesuaian antara pembiayaan dan pendanaan dalam valuta yang sama, sehingga tercipta <i>natural hedge</i>. Selain itu, IIF juga senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko valuta asing, di antaranya dengan menjaga keseimbangan antara jumlah aset dan liabilitas dalam valuta asing pada tingkat posisi devisa neto yang terjaga rendah, dimana rasionya harus dijaga di bawah 5% dari total modal. Jika terdapat peningkatan risiko nilai tukar, maka transaksi lindung nilai (<i>hedging</i>) atas eksposur terhadap nilai tukar tertentu akan dilakukan.</p> <p>d) Terhadap aset yang sensitif dengan pergerakan suku bunga seperti pinjaman, IIF secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga yang diberikan, memantau biaya dana dengan memperhatikan tingkat risiko dan imbal hasil yang optimal. IIF juga melakukan analisis sensitivitas terhadap proyek-proyek yang dibiayai terhadap kenaikan tingkat suku bunga sebagai bagian dari proses evaluasi kredit. Hasil dari pemantauan dan evaluasi pasar digunakan untuk mendukung kebijakan <i>Base Lending Rates</i> yang disusun oleh ALCO setiap triwulannya. Kebijakan ini akan dipertahankan sebagai dasar dalam <i>loan pricing</i>.</p>	<p>c) Regarding exchange rate risk, IIF adjusts as much as possible between financing and funding in the same currency, to create a natural hedge. In addition, IIF applies the principle of prudence in managing foreign exchange risk, including maintaining the balance between the amount of assets and liabilities in foreign currencies at a low level of net open foreign exchange position, which ratio must be maintained at below 5% of total capital. If there is an increased foreign exchange risk, hedging transactions will be conducted on exposures against certain exchange rates.</p> <p>d) With respect to assets that are sensitive to interest rate movements such as loans, IIF regularly monitors market developments and adjusts the provided interest rates, monitoring the cost of fund with the optimal level of risk and return. IIF also conducts a sensitivity analysis of projects financed for rising interest rates as part of the credit evaluation process. The result of market monitoring and evaluation is considered as supporting for Base Lending Rates policy which is released by ALCO in quarterly basis. This policy will be preserved as a basis in loan pricing.</p>
3.	Risiko Likuiditas Liquidity Risk	<p>Risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu akibat ketidakmampuan IIF dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.</p> <p>Risks that may arise at any time due to IIF's inability to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets without disrupting the Company's activities and financial condition.</p>	<p>a) Menjaga tingkat minimum likuiditas dan melakukan pengalokasian dana dalam instrumen keuangan yang likuid.</p> <p>b) Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan likuiditas secara berkala oleh Komite ALCO minimal satu kali dalam satu bulan, termasuk perencanaan kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan investasi.</p> <p>c) Penyusunan dan penetapan kebijakan dan prosedur pengelolaan dana yang mengatur tahapan proses perencanaan, eksekusi sampai dengan pemantauan dan pelaporan kepada Komite ALCO yang bekerja di bawah Direksi.</p> <p>d) Ekspansi fasilitas likuiditas jangka pendek untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas yang muncul tiba-tiba dalam bisnis atau operasional Perseroan.</p>	<p>a) Maintaining a minimum level of liquidity and allocating funds in liquid financial instruments.</p> <p>b) Regular monitoring of liquidity management by the ALCO at least once a month, including planning for funding needs that are tailored to the needs of financing and investment.</p> <p>c) Formulation and determination of funds management policies and procedures governing the stages from the planning, execution to monitoring and reporting to the BoD's ALCO.</p> <p>d) Expansion of short-term liquidity facility for anticipating the sudden liquidity needs for the Company's business or operation.</p>
4.	Risiko Operasional Operational Risk	<p>Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Risks that may arise due to inadequate and/or non-functioning internal processes, human errors, system failures or external problems that affect the implementation of the Company's business activities.</p>	<p>a) Penetapan tata cara kerja operasional IIF yang memadai, seperti kebijakan, prosedur, pedoman, ataupun kesepakatan-kesepakatan kerja tertulis.</p> <p>b) Peningkatan <i>risk awareness</i> seluruh karyawan melalui sosialisasi berkala, penyempurnaan kebijakan dan prosedur secara berkala atau jika diperlukan, serta pengkajian <i>Business Process Analysis</i> secara berkesinambungan, termasuk proses <i>Know Your Customer</i> (KYC) dalam pemberian kredit.</p> <p>c) Implementasi sistem K2 KYC untuk meningkatkan efisiensi proses KYC.</p> <p>d) Penyusunan dan penerapan rencana usaha yang berkesinambungan (<i>Business Continuity Plan</i>) untuk memastikan bahwa kegiatan operasional IIF dapat tetap berlanjut meskipun terjadi peristiwa gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya yang mengakibatkan kegiatan operasional tidak dapat dilakukan seperti dalam keadaan normal. IIF juga memiliki sistem komunikasi darurat (<i>Call Tree System</i>) dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional. Sistem ini diterapkan secara berkala untuk memantau efektivitasnya.</p>	<p>a) Determination of adequate operational procedures for IIF such as policies, procedures, guidelines, or written work agreements, and efforts for continuous improvement of policies and procedures on a regular basis or whenever needed.</p> <p>b) Increased risk awareness of all employees through periodic dissemination, as well as a continuous review on Business Process Analysis, including on Know Your Customer (KYC) on credit process.</p> <p>c) Implementation of K2 KYC system to improve the efficiency of KYC process.</p> <p>d) Preparation and implementation of Business Continuity Plan to ensure that IIF's operational activities prevail despite the occurrence of earthquakes, fires, and so on, which result in operational activities being unable to be carried out as in normal circumstances. IIF has an emergency communication system (Call Tree System) in the event of cessation of its operational activities. This system is implemented regularly to assess its effectiveness.</p>

No.	Jenis Risiko Risk Type	Keterangan Description	Upaya Mitigasi	Mitigation Effort
			<p>e) Relokasi Pusat Data Utama ke Pusat Data Tier IV yang dikelola oleh Penyedia Layanan Pusat Data Profesional;</p> <p>f) Untuk memitigasi risiko kehilangan data dan sistem aplikasi IT yang kritis apabila Pusat Data Utama (<i>Primary Data Center</i>) mengalami kerusakan, IIF telah memberlakukan sistem pemulihan bencana (<i>Disaster Recovery System</i>) dengan menyewa pusat data eksternal sebagai pencadangan dari pusat data utama untuk menjaga kelangsungan beroperasinya sistem aplikasi IT yang kritis dan menyusun prosedur pemulihan bencana.</p> <p>g) Mengambil langkah mitigasi dengan cara melakukan pengalihan risiko kepada pihak asuransi untuk jenis risiko operasional tertentu seperti risiko <i>fraud</i> (termasuk penggelapan dan pencurian data), risiko tuntutan dari pihak ketiga kepada Direksi ataupun karyawan, serta kebakaran maupun kejadian alam lainnya.</p> <p>h) Meninjau dan memutakhirkan <i>Risk Control Self-Assessment</i> (RCSA) agar dapat digunakan oleh unit bisnis dan fungsional yang utama. RCSA ditinjau setiap tahunnya untuk memastikan relevansinya terhadap lingkungan operasi internal dan eksternal yang berlaku.</p> <p>i) Terkait risiko TI, IIF telah melakukan implementasi pemeriksaan keamanan tambahan untuk <i>email</i> dan <i>Sharepoint</i>.</p> <p>j) Terkait pandemi COVID-19, IIF telah melakukan langkah pencegahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelanjutan Tim Gugus Tugas COVID-19 untuk memberikan respons segera dan merumuskan solusi/tata kelola untuk mendukung Rencana Keberlangsungan Bisnis IIF; - Menyiapkan strategi untuk operasi skala terbatas yang mencakup kebijakan sebagian atau seluruhnya bekerja dari rumah (WFH) tergantung keadaan, ditinjau setiap dua minggu; - Menyenggarakan vaksinasi COVID-19 bagi karyawan, keluarganya, dan pihak ketiga yang tinggal serumah atau sering berinteraksi dengan karyawan atau keluarganya; - Mewajibkan karyawan yang WFO sesuai jadwal untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap infeksi, seperti menjalani tes swab antigen dan melakukan penilaian mandiri COVID-19; - Menyediakan <i>starter kit</i> proteksi, seperti <i>hand sanitizer</i> dan masker di beberapa lokasi kantor; - Mendisinfeksi kantor setiap minggu; - Sedapat mungkin menghindari pertemuan langsung secara fisik, kecuali untuk hal-hal penting yang strategis dan/atau persiapan dan penandatanganan dokumen IIF, dan menyelenggarakan rapat di kantor secara virtual; - Tidak menerima tamu atau pihak eksternal untuk datang ke kantor IIF, kecuali vendor atau telah disetujui Komite Eksekutif (<i>Excomm</i>) terkait untuk hal-hal penting strategis dan/atau persiapan dan penandatanganan dokumen IIF; - Melakukan pemeriksaan suhu dan administrasi penilaian mandiri di pintu masuk untuk semua tamu yang telah menerima izin untuk datang ke kantor IIF; - Karyawan dapat menggunakan tunjangan rawat jalan untuk sementara waktu untuk membeli vitamin C dan E sesuai kebutuhan tanpa resep dokter; - Karyawan dapat mengganti biaya tes <i>swab</i> sesuai kebijaksanaan <i>Excomm</i> terkait; - Tunjangan transportasi diberikan kepada karyawan yang menggunakan transportasi umum dan belum memenuhi syarat untuk menerima program kepemilikan mobil; - Kunjungan lapangan hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir oleh sejumlah kecil karyawan; - Mewajibkan karyawan mengikuti protokol untuk kunjungan lapangan, termasuk persyaratan untuk melakukan tes RT-PCR atau swab antigen setelah kembali ke Jakarta. 	<p>e) Relocation of Primary Data Center to Tier IV Data Center managed by Professional Data Center Service Provider;</p> <p>f) To mitigate the risk of data loss and critical IT application systems should Primary Data Center become damaged, IIF implements a Disaster Recovery System by renting an external data center as a back-up from the main data center to maintain the continuity of the operation of the critical IT application system, and develop disaster recovery procedures.</p> <p>g) Mitigation efforts by transferring risk to the insurance party for certain types of operational risk such as property and casualty risks to cover for IIF's assets, financial risk to mitigate financial crime (including fraud, embezzlement, and data theft), risk of claims from third parties to the BoD or employees, as well as insurance against terrorism, fire, and natural events.</p> <p>h) Review and update the Risk Control Self-Assessment (RCSA) for key business and functional units. RCSA will be reviewed annually to check the relevancy to the current internal and external operating environment.</p> <p>i) Regarding IT risk, IIF has implemented additional security checks for email and Sharepoint.</p> <p>j) Regarding the COVID-19 pandemic, IIF has implemented several prevention measures, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuation of COVID-19 Task Force Team ("Tim Gugus Tugas COVID-19") to provide immediate response and to formulate solution/governance to support IIF's Business Continuity Plan; - Setting up strategy on limited operations, which includes partial or fully work from home ("WFH") policy depending on the circumstances, to be reviewed every two weeks; - Organizing COVID-19 vaccination for employees, their families, and third parties who live in the same house or frequently interact with employees or families; - Requiring employees who will take WFO as per schedule to conduct preventive measures against infection such as having antigen test and completing COVID-19 self-assessment; - Providing protection such as hand sanitizers and masks at several office locations; - Disinfecting the office every week; - Avoiding physical direct meeting as much as possible, except for strategic important matters and/or preparation and signing of IIF's documents, and conduct meetings in the office virtually; - Not accepting guests or external parties to come to IIF's office, except vendors or approved by related Executive Committee (Excomm) for strategic important matters and/or preparation and signing of IIF's documents; - Body temperature checks and self-assessment administration at the entrance for all guests who have received clearance to come to IIF's office; - Employees may temporarily use outpatient limits to purchase vitamin C and E as needed without doctor's prescription; - Employees may reimburse swab test as per discretion of related Excomm; - Transportation allowance (at cost) for employees using public transportation and not eligible to receive car ownership program; - Site visits only carried out as a last resort option by a very limited number of employees; - Requiring employees to follow protocols for site visits, which include requirement to take RT-PCR or antigen swab test after returning to Jakarta.

No.	Jenis Risiko Risk Type	Keterangan Description	Upaya Mitigasi	Mitigation Effort
5.	Risiko Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Risk	<p>Risiko yang dapat muncul sewaktu-waktu apabila proyek berjalan tidak mematuhi dan/atau tidak mengindahkan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, dan/atau mengabaikan penerapan <i>Good International Industry Practice</i> (GIIP) terkait aspek <i>Social & Environment</i>.</p> <p>Risks that may arise at any time if the project does not comply with and/or does not comply with applicable rules and regulations in Indonesia, and/or neglects the implementation of <i>Good International Industry Practice</i> (GIIP) related to <i>Social & Environment</i> aspects.</p>	<p>Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola aktivitas operasional bisnisnya dan memastikan bahwa semua proyek yang dibiayai IIF telah memenuhi persyaratan dan ketentuan lingkungan, keselamatan, kesehatan, serta persyaratan sosial yang berlaku. Peraturan dan praktik terbaik ini menjadi landasan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.</p>	<p>The Company always applies the precautionary principle in managing its business operational activities and ensures that all projects to which it provides financing facilities have complied with applicable environmental, safety, health, and social requirements. These regulations and best practices form the basis for sustainable development to create harmony between economic, social and environmental aspects.</p>
6.	Risiko Reputasi Reputation Risk	<p>Risiko yang timbul karena adanya publikasi negatif terkait kegiatan usaha IIF atau persepsi negatif terhadap IIF sehingga berpotensi memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan usaha IIF.</p> <p>Reputational risk is a risk caused by, among others, negative publications related to IIF's business activities or negative perceptions of IIF that have the potential to adversely affect its business continuity.</p>	<p>a) Melakukan pemantauan terhadap publikasi negatif terkait IIF ataupun proyek-proyek yang dibiayai IIF, termasuk namun tidak terbatas pada masalah mengenai sosial dan lingkungan proyek-proyek tersebut.</p> <p>b) Melakukan pengawasan dan tindak lanjut terhadap persepsi atau publikasi negatif yang berpotensi merugikan IIF.</p> <p>c) Menjalin komunikasi yang efektif baik secara internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan kegiatan yang diharapkan dapat membangun citra positif IIF. Dalam hal ini, segala urusan yang berkaitan dengan komunikasi perusahaan dilakukan terpusat melalui satu pintu (Sekretaris Perusahaan) untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau informasi yang menyesatkan.</p> <p>d) Melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk membantu proses komunikasi dan keterbukaan informasi, seperti pengelolaan situs web IIF.</p>	<p>a) Monitoring any negative perceptions or negative publications related to IIF or to projects financed by IIF, including but not limited to social and environmental issues of the projects.</p> <p>b) Supervising and following up on negative perceptions or negative publications that have the potential to harm IIF.</p> <p>c) Carrying out communication activities both internally and externally with stakeholders through activities that can foster a good corporate image, including with media. For communication flow, it is strategized to be directed, whenever most possible, via single access (e.g. Corporate Secretary) as to avoid any misunderstanding or misleading information.</p> <p>d) Developing information technology infrastructure that may help the process of communication and information disclosure, such as managing IIF's corporate website.</p>
7.	Risiko Strategis Strategic Risk	<p>Risiko yang timbul akibat penetapan dan penerapan strategi yang kurang tepat, ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan strategis dan kegagalan IIF dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis/eksternal, termasuk dan/atau pengembangan bisnis baru.</p> <p>Risks that may arise from the determination and implementation of inappropriate strategies, inaccuracies in making strategic decisions and IIF's failure to deal with changes that occur in the business/ external environment, including and/or new business development.</p>	<p>a) Membangun tim dan portofolio pembiayaan yang memadai sesuai dengan mandat yang diterima sesuai ketentuan regulasi.</p> <p>b) Berupaya melakukan diversifikasi usaha baik dalam produk yang ditawarkan maupun diversifikasi sektor-sektor infrastruktur yang ditunjang oleh sumber pendanaan yang tepat baik dari sisi jangka waktu, jenis mata uang, hingga tingkat suku bunga.</p> <p>c) Direksi melakukan kajian internal secara berkala untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris maupun para Pemegang Saham dalam menentukan rencana strategis IIF.</p> <p>d) Penyusunan rencana strategis IIF sebagai tahapan untuk mewujudkan fungsi IIF yang tertuang dalam RKAP, di mana indikator-indikator pentingnya telah dirangkum dalam Penilaian Kinerja IIF sebagai suatu Kontrak Manajemen.</p> <p>e) Terhadap risiko persaingan oleh adanya Lembaga keuangan lain yang menawarkan produk serupa maupun bersifat substitusi kepada tipe konsumen yang berada dalam target pasar IIF, IIF menerapkan strategi yang ditujukan untuk bersinergi dengan perbankan, lembaga keuangan ataupun investor lainnya, termasuk menyediakan produk dan jasa yang tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.</p>	<p>a) Establishment of an adequate funding team and portfolio in accordance with the mandate it receives based on regulations.</p> <p>b) Utmost efforts to diversify its business, both in the products offered and in diversification of the infrastructure sectors supported by appropriate funding sources in terms of timeframe, currency, and interest rates.</p> <p>c) Periodic internal review by the BoD in which IIF can obtain approval from the BoC and the shareholders in determining IIF's strategic plan.</p> <p>d) The preparation of IIF's strategic plan as a process of implementing its functions as stipulated in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP), whose important indicators have been summarized in the Corporate Performance Assessment as a Management Contract.</p> <p>e) Mitigation against the risk of competition from other financial institutions offering similar or substitute products to the types of consumers who are part of IIF's target market is done through adoption of strategies aimed at creating synergies with banks, financial institutions or other investors, including providing products and services that cannot be provided by other financial institutions.</p>

No.	Jenis Risiko Risk Type	Keterangan Description	Upaya Mitigasi	Mitigation Effort
8.	Risiko Kepatuhan Compliance Risk	<p>Risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan IIF dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.</p> <p>Risks that may arise due to IIF's failure to comply with the laws and regulations and other applicable provisions.</p>	<p>a) IIF menetapkan Prosedur Penerapan Kebijakan untuk Kerangka Kerja Kepatuhan dalam rangka mendefinisikan tata kelola dan metodologi untuk proses-proses kepatuhan.</p> <p>b) IIF mengkaji dan melakukan pemantauan kepatuhan (<i>compliance checklist</i>) secara berkala terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memastikan penerapannya di lingkungan IIF. Hasil pemantauan tersebut dilaporkan ke Komite Manajemen Risiko di bawah Direksi dan Komite Pemantau Risiko di bawah Dewan Komisaris secara triwulanan. IIF juga memastikan bahwa <i>compliance checklist</i> terus diperbarui dengan menyertakan persyaratan peraturan dan perjanjian yang baru dalam perjanjian pinjaman baru.</p> <p>c) IIF juga telah menyelesaikan implementasi sistem <i>K2 Compliance Library</i> untuk meningkatkan efisiensi proses penilaian mandiri dan melakukan otomasi pengingat kewajiban pelaporan yang akan datang.</p>	<p>a) IIF has established the Policy Implementation Procedure for Compliance Framework to define its governance and methodology for compliance processes.</p> <p>b) IIF conducts periodic review and compliance checklist of IIF's compliance with the applicable laws and regulations externally and internally to ensure that it is implemented adequately. The monitoring results are reported to the Risk Management Committee under the BoD and the Risk Oversight Committee under the BoC on a quarterly basis. IIF has also reviewed the compliance checklist to ensure it is up-to-date and comprehensive. The update was to include new regulatory requirements and covenants under new loan agreements.</p> <p>c) IIF has also completed the implementation of K2 Compliance Library system to improve the efficiency of self-assessment process and automate the reminder of upcoming reporting obligation.</p>
9.	Risiko Kebijakan Pemerintah Government Policy Risk	<p>Ketidakmampuan IIF dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan ketentuan yang diberlakukan kepada IIF (oleh Pemerintah atau Regulator) akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif bagi kinerja IIF.</p> <p>IIF's inability to anticipate, fulfill and/or adjust to the provisions that apply to IIF (by the Government or Regulator) will cause losses that have a negative impact on its performance.</p>	IIF mengupayakan kerja sama dan membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam menjalankan mandatnya.	collaboration and building communication with stakeholders in carrying out the mandate that IIF bears.
10.	Risiko Hukum Legal Risk	<p>Risiko yang timbul akibat kelalaian atau cidera janji yang dilakukan oleh IIF berdasarkan perjanjian yang mengikat IIF dan/ atau pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan tuntutan hukum oleh pihak ketiga.</p> <p>Legal risk is risk caused by negligence or default based on agreements that bind IIF and/or violations of the laws and regulations perpetrated by IIF that can lead to lawsuits by third parties against IIF.</p>	<p>a) Memastikan bahwa semua kegiatan dan hubungan antara IIF dengan pihak ketiga telah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b) Melakukan kajian dan pemantauan secara berkala sehubungan dengan kepatuhan IIF terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memastikan telah dilakukan penerapannya di lingkungan IIF</p>	<p>a) Ensuring that all activities and relationships between IIF and third parties are in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.</p> <p>b) Conducting review and monitoring on a regular basis in connection with IIF's compliance with applicable laws and regulations as well as ensuring its implementation has been carried out in IIF.</p>

No.	Jenis Risiko Risk Type	Keterangan Description	Upaya Mitigasi	Mitigation Effort
11.	Risiko Kondisi Perekonomian Economic Conditions Risk	Kondisi perekonomian nasional maupun global sangat mempengaruhi kegiatan usaha IIF. Oleh karena itu, IIF menerapkan pengelolaan aset dan liabilitas ketat guna mengoptimalkan pendanaan di bawah pengawasan Komite ALCO. National and global economic conditions affect IIF's business activities. Therefore, IIF implements a strict asset and liability management to optimise funding, overseen by the ALCO.	IIF melakukan simulasi pasar melalui <i>stress test</i> untuk mendapatkan gambaran risiko kredit yang dapat timbul sewaktu-waktu akibat dinamika kondisi perekonomian. Apabila terdeteksi sedini mungkin, Perseroan dapat mengambil langkah mitigasi yang tepat untuk menekan dampak yang merugikan.	IIF conducts market simulations through stress tests that can provide an overview on credit risk that may arise due to the dynamics in economic conditions, so that early supervision can be carried out to reduce the otherwise adverse impacts.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2021

Report of Risk Management Directorate Duty Implementation in 2021

Sepanjang tahun 2021, Direktorat Manajemen Risiko telah menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, antara lain:

- Memberikan perumusan strategis kebijakan dan kerangka kerja manajemen risiko, termasuk penetapan kerangka limit dan perumusan rencana kontinjensi untuk kondisi yang merugikan;
- Mengawasi evaluasi dan pengelolaan komposisi risiko secara keseluruhan dalam portofolio IIF, meminimalkan risiko pada proyek serta tingkat portofolio, mengembangkan budaya manajemen risiko di semua tingkatan, memastikan Divisi Manajemen Risiko beroperasi secara independen;
- Menyelidiki dan menganalisis yang diperlukan sehubungan dengan masalah yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal;
- Mengevaluasi proposal yang terkait dengan aktivitas dan produk baru dan menilai keinginan dan kemampuan IIF melakukan aktivitas dan produk baru ini dari perspektif risiko, dan mengevaluasi proposal untuk perubahan dalam kebijakan dan prosedur terkait;
- Memantau kecukupan permodalan IIF terhadap risiko-risiko yang dijelaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan toleransi risiko Perusahaan;
- Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, merumuskan perubahan yang diperlukan atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang ada, mengevaluasi kecukupan pengendalian internal dan meninjau laporan MIS secara berkala;
- Melakukan tinjauan berkala untuk mengevaluasi kesesuaian metodologi penilaian risiko
- Menelaah dan mengusulkan setiap perubahan dan/atau penambahan, jika diperlukan, untuk setiap parameter atau indikator risiko.

Throughout 2021, the Risk Management Directorate has effectively discharged all its duties and responsibilities, including:

- Formulated strategic risk management policies and frameworks, including setting framework limit and formulating contingency plan for possible hostile situation;
- Oversaw the valuation and management of the overall risk composition in IIF portfolio, minimized risks at the project and portfolio levels, developed a risk management culture at all levels, and ensured the Risk Management Division operated independently;
- Made necessary investigation and analysis on the issues related to business decisions that deviated from normal procedures;
- Evaluated proposals related to new activities and products and assessed whether or not IIF was willing and able to undertake these new activities and products from a risk perspective, and evaluated the proposed for changes in policies and procedures;
- Monitored IIF's capital adequacy against the risks described in accordance with applicable regulations and the Company's risk tolerance;
- Evaluated the effectiveness of risk management policies and procedures, formulated necessary changes to existing risk management policies and procedures, evaluated the adequacy of internal control and regularly reviewed MIS reports;
- Conducted periodic reviews to evaluate the suitability of the risk assessment methodology
- Reviewed and proposed any changes and/or additions, if necessary, to each risk parameter or indicator.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2021

Review of Risk Management Effectiveness in 2021

Pada tahun 2021, Perseroan menerapkan kebijakan *early alert* untuk melakukan pemantauan secara ketat terhadap portofolio proyek yang terdampak signifikan akibat pandemi. Kemampuan IIF dalam mengelola risiko-risiko secara efektif tercermin dari angka NPL yang terjaga pada posisi stabil, keberhasilan dalam meraih pertumbuhan positif yang berkelanjutan, dan kepercayaan untuk membiayai sektor-sektor baru di masa-masa sulit selama pandemi.

Perseroan menyusun dan menerapkan rencana usaha yang berkesinambungan (*Business Continuity Plan*) untuk memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan tetap berkelanjutan meskipun terjadinya peristiwa gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya yang mengakibatkan kegiatan operasional tidak dapat dilakukan seperti dalam keadaan normal. Perseroan juga memiliki sistem komunikasi darurat (*Call Tree System*) dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional Perseroan yang dilakukan secara berkala untuk memantau efektivitasnya. Pada tahun 2021, Perseroan melaksanakan *call tree* sebanyak 2 kali dengan hasil yang sangat memuaskan.

Perseroan menilai efektivitas pengelolaan risiko sudah berjalan dengan baik di tahun ini. Namun demikian, proses *improvement* tetap harus dilakukan dari waktu ke waktu agar Perseroan selalu siap dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

In 2021, the Company implemented an early alert policy to closely monitor the project portfolio that was significantly affected by the pandemic. IIF's ability to manage risks effectively is reflected in the NPL figure that is maintained in a stable position, success in achieving sustainable positive growth, and the confidence to finance new sectors during difficult times throughout the pandemic.

The Company prepares and executes a Business Continuity Plan to ensure that the Company's operational activities remain sustainable even during times of catastrophes such as earthquakes, fires, etc. The Company also runs an emergency communication system (Call Tree System) if the catastrophes in any way have forced the Company to discontinue operations, and monitors the system periodically to measure its effectiveness. Throughout 2021, the Company made 2 call trees times with very satisfactory results.

The Company assesses that the effectiveness of risk management has been running well this year. However, the improvement process must still be carried out from time to time so that the Company is always ready to face various challenges ahead.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS, ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2021

Statement from the BoD and/or BoC, or Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System in 2021

Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit menyatakan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta informasi manajemen risiko untuk menghindari kemungkinan terjadinya situasi yang dapat merugikan Perseroan di kemudian hari. Secara keseluruhan, tata kelola manajemen risiko IIF sudah berjalan dengan baik didukung oleh kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang lengkap.

Sepanjang tahun 2021, Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Audit dan unit-unit kerja terkait lainnya telah menjalin mekanisme kerja yang efektif dan berkomunikasi aktif yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan rapat berkala guna membahas hal-hal yang berkaitan dengan profil risiko Perseroan serta langkah-langkah mitigasinya.

The Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee declare the adequacy of the risk identification, measurement, monitoring and control processes, as well as risk management information to avoid possible situations that could harm the Company in the future. Overall, IIF's risk management governance has been running well, supported by the adequacy of complete risk management policies and procedures.

Throughout 2021, the Risk Monitoring Committee, Risk Management Committee, Audit Committee and other related work units have established effective work mechanisms and active communication, one of which is carried out through periodic meetings to discuss matters relating to the Company's risk profile and mitigation measures.

PERKARA PENTING TAHUN 2021 Important Legal Cases in 2021

Di tahun 2021, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh IIF ataupun anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

In 2021, neither IIF nor any member of its BoC and BoD was involved in any material litigations.

SANKSI ADMINISTRATIF Administrative Sanction

Di tahun 2021, tidak ada sanksi administratif yang diberikan oleh pihak otoritas kepada IIF ataupun anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

There were no administrative sanctions imposed by the authorities on IIF or members of its BoC and BoD in 2021.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERSEROAN Access to Company Information and Data

Sebagai salah satu emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Perseroan mengelola informasi korporasi secara transparan dan profesional dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan membuka akses informasi secara terbuka kepada publik melalui situs *web* resmi Perseroan, yaitu: <https://iif.co.id/id/>

As one of the issuers listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), the Company manages corporate information in a transparent and professional manner by taking into account the provisions of POJK No. 8/POJK.04/2015 on Websites of Issuers or Public Companies. The Company has an open for the public to corporate information through the Company's official website at <https://iif.co.id/id/>

Seluruh informasi yang ditampilkan dalam situs web Perseroan tersedia dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan secara berkala memperbarui tampilan dan penyajian informasi di dalam situs *web* tersebut agar senantiasa menampilkan informasi yang faktual dan akurat bagi para pembaca.

All information disclosed on the Company's website is available bilingually in Indonesian and English. The Company periodically makes some updates to the appearance and presentation of information on the website to ensure that it is always factual and accurate information that is disclosed to the readers.

Informasi lainnya yang berhubungan dengan pelaporan keuangan berkala ataupun publikasi Laporan Tahunan kepada pihak regulator juga dapat diakses melalui situs *web* resmi Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id dengan mengakses kode saham "IIF". Adapun informasi yang lebih rinci mengenai Perseroan dapat langsung menghubungi kantor pusat IIF di:

Other information related to periodic financial reporting or publication of the Annual Report to regulators can also be accessed through the official website of the Indonesia Stock Exchange at www.idx.co.id by accessing the stock code "IIF". For more detailed information regarding the Company, you can directly contact the IIF head office at:

PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF")

Prosperity Tower, Lantai 53 – 55
District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

T. +62 21 5082 6600
F. +62 21 5082 6601
E. info@iif.co.id
www.iif.co.id

MEDIA SOSIAL

Selain mengelola situs web, Perseroan juga memiliki 2 (dua) akun media sosial, yaitu:

1. Instagram : @pt_iif
2. Youtube : PT Indonesia Infrastructure Finance

PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF")

Prosperity Tower, Floors 53 – 55
District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28
Jl. General Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

T. +62 21 5082 6600
F. +62 21 5082 6601
E. info@iif.co.id
www.iif.co.id

SOCIAL MEDIA

In addition its website, the Company also has 2 (two) social media accounts, namely:

1. Instagram : @pt_iif
2. Youtube : PT Indonesia Infrastructure Finance

Seluruh akun tersebut dikelola dengan baik oleh pihak-pihak terkait dan difungsikan sebagai media penyampaian informasi mengenai aktivitas Perseroan dengan menggunakan tampilan atau visual yang menarik. Di era digital sekarang ini, Perseroan berharap dengan adanya akun-akun media sosial tersebut maka proses penyampaian informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan dapat berjalan lebih mudah dan efektif.

KOMUNIKASI INTERNAL

Selain membangun hubungan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal, Perseroan juga mengelola komunikasi internal dengan para karyawan yang berperan sebagai salah satu pemangku kepentingan utama. Proses komunikasi internal dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi internal.

SIARAN PERS TAHUN 2021

PRESS RELEASE IN 2021

No.	Judul Topic	Tanggal Date
1.	Pengembangan Sektor Air Minum – IIF memberikan Fasilitas <i>Senior Term Loan</i> kepada PT Potum Mundi Infranasantara Development of Water Sector – IIF provided Senior Term Loan Facility to PT Potum Mundi Infranasantara	14-Jan-21
2.	PT Indonesia Infrastructure Finance Memasuki Pasar Obligasi Global PT Indonesia Infrastructure Finance Taps Into Global Bond Market	2-Feb-21
3.	IIF Virtual Race 2021: Dynamic Ride and Run	25-Feb-21
4.	Memperkenalkan Nilai Inti IIF untuk Mencapai Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Partisipasi IIF dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Introducing IIF's Core Value to Achieve Sustainable Infrastructure Development: Participation of IIF in Sustainable Infrastructure Development.	26-Feb-21
5.	Penutupan IIF Dynamic Ride and Run 2021: Pengumuman Pemenang IIF Dynamic Ride and Run 2021 Closure: Winners Announcement	24-Mar-21
6.	Ride for Equality: Dukungan IIF untuk Pemberdayaan Perempuan Ride for Equality: IIF's Support for Women Empowerment	24-Mar-21
7.	Memperingati Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan Commemorating Drinking Water Supply System (SPAM) Umbulan	25-Mar-21
8.	<i>Update Baru</i> : Fasilitas Pinjaman Non-Tunai untuk Meningkatkan Pembiayaan Perdagangan What's New: Non-Cash Loan Facility to Boost Trade Finance	25-Mar-21
9.	Komitmen untuk Infrastruktur Berkelanjutan: IIF Gelar Konsultasi Publik Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan A Commitment for Sustainable Infrastructure: IIF Held Public Consultation on Social and Environmental Management System	6-Apr-21
10.	Penyulingan Kondensat: IIF untuk membiayai PT Mirah Ganal Energi Condensate Refining: IIF to finance PT Mirah Ganal Energi	13-Apr-21
11.	Road to 2050 Target Transisi Energi Roadmap – The 9 th Indonesia EBTKE ConEx 2020 Road to 2050 Energy Transition Target Roadmap – The 9 th Indonesia EBTKE ConEx 2020	19-Apr-21
12.	Leveraging Kontrak: Inovasi IIF untuk Memberikan Akses Pembiayaan kepada Klien Contract Leveraging: IIF's Innovation to Provide Financing Access to Client	4-May-21
13.	Program Vaksinasi Gotong Royong: Mendukung Program Pemerintah untuk Mencapai <i>Herd Immunity</i> Gotong Royong Vaccination Program: Supporting Government Program to Obtain Herd Immunity	4-Jun-21
14.	Big Data, Big Opportunity: IIF mendanai Proyek <i>Data Center</i> Pertamanya. Big Data, Big Opportunity: IIF funded Its First-Ever Data Center Project.	4-Jun-21
15.	Membangun Konektivitas Melalui Proyek Kereta Api Building up Connectivity Through Railway Project	4-Jun-21
16.	Webinar tentang Tantangan Perubahan Iklim: Mempersiapkan Masa Depan Indonesia yang Hijau dan Berkelanjutan Webinar Climate Change Challenge: Preparing For Indonesia's Green and Sustainable Future	11-Jun-21
17.	Model dan Peluang Keuangan Lokal: Kontribusi IIF dalam Energi Terbarukan The Local Financial Models and Opportunities: IIF's Contribution in Renewable Energy	17-Jun-21
18.	<i>Ground Breaking Ceremony</i> Data Center: Proyek <i>Data Center</i> Pertama IIF di Portofolio Sektor Telekomunikasi Data Center Ground Breaking Ceremony: IIF's First Data Center Project in Telecommunication Sector Portfolio	29-Jun-21

All of these accounts are managed properly by related parties and functioned as a medium to disclose all information regarding the Company's activities, which is disclosed or visualized in an attractive format. In today's digital era, the Company hopes that with these social media accounts, the process of disclosing transparent information to stakeholders can run more easily and effectively.

INTERNAL COMMUNICATION

In addition to building good communication relationships with external parties, the Company also manages internal communications with employees as one of its key stakeholders. The internal communication process is carried out through various internal communication channels.

No.	Judul Topic	Tanggal Date
19.	Seri Webinar #4 – Instrumen Keuangan Inovatif untuk Pembiayaan Infrastruktur Webinar Series #4 – Innovative Financial Instrument for Infrastructure Financing	2-Jul-21
20.	SPAM Pekanbaru: Fasilitas Sindikasi untuk Penyediaan Air Minum SPAM Pekanbaru: Syndication Facility for Water Supply	16-Jul-21
21.	1442 H Idul Adha: IIF Peduli dan Berbagi 1442 H Eid Al-Adha: IIF Care and Share	26-Jul-21
22.	Peran Sektor Swasta dan Penyedia Keuangan Internasional: IIF di Forum Investasi Infrastruktur Global 2021 The Role of Private Sectors and International Financial Provider: IIF at the Global Infrastructure Investment Forum 2021	30-Jul-21
23.	Penghargaan Infrastruktur Aset Triple A 2021 The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021	16-Aug-21
24.	Universitas Indonesia dan PT Indonesia Infrastructure Finance Memperdalam Kerja Sama di Bidang Sosial dan Lingkungan University of Indonesia and PT Indonesia Infrastructure Finance Deepen Collaboration in Social and Environmental Sector	10-Sep-21
25.	The Most Inspiring CEO For Sustainable Development: Bisnis Indonesia Awards 2021	16-Sep-21
26.	Enlite Asia Digital Festival 2021: Hari Listrik Nasional Indonesia ke-76 Enlite Asia Digital Festival 2021: The 76 th Indonesia National Electricity Day	30-Sep-21
27.	Ekspansi ke sektor Infrastruktur Sosial, IIF Berikan Pembiayaan untuk Institusi Kesehatan Expanding to Social Infrastructure, IIF Provides Financing to Healthcare Institution	25-Oct-21
28.	IIF menandatangani MoU pada ajang West Java Investment Summit 2021 IIF signed MoU in the West Java Investment Summit 2021	25-Oct-21
29.	Terdepan dalam Keberlanjutan, IIF Raih Peringkat Emas untuk Laporan Keberlanjutan 2020 Leading in Sustainability, IIF attains Gold Rank for its 2020 Sustainability Report	18-Nov-21
30.	Energi Bersih untuk Indonesia: IIF Berikan Pinjaman USD85 juta Clean Energy for Indonesia: IIF Provided Loan of USD85 million	30-Nov-21

KODE ETIK DAN BUDAYA PERSEROAN

Company Ethic and Corporate Culture

KOMITMEN PELAKSANAAN KODE ETIK

Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip GCG pada setiap proses bisnis termasuk dalam menjalin kerja sama dan berperilaku etis sesuai dengan nilai-nilai budaya Perseroan, Perseroan telah merumuskan dan menetapkan pengesahan Kode Etik Perseroan yang bersifat mengikat bagi seluruh karyawan.

Setiap tahun, seluruh insan IIF diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan komitmen kepatuhan terhadap pokok-pokok Kode Etik Perseroan. Hal ini dilakukan untuk mendukung hadirnya lingkungan kerja yang sehat, kondusif, dan teratur sehingga pada jangka panjang diharapkan dapat terbentuk suatu organisasi yang solid dan beretika yang seluruh unsur-unsurnya memiliki visi dan misi yang sama untuk saling bahu membahu berkontribusi dalam mencapai target-target Perseroan.

Kode Etik Perseroan berperan penting sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (*shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*).

COMMITMENT TO CODE OF CONDUCT

In order to enforce the principles of GCG in each of its business processes, including in building cooperation and ethical behavior in accordance with corporate culture the Company has formulated and ratified its Code of Ethics which is universally binding on employees.

Every year, the entire IIF personnel are required to sign a statement of commitment to comply with the main points of the Company's Code of Ethics. This is done to help establish a healthy, conducive, and orderly work environment to have in place in the long run a solid and ethical organization that are made up of elements that share the same vision and mission and work together to contribute to the achievement of the Company's targets.

The Company's Code of Ethics plays an important role as an organizational tool that can increase values and sustainable long-term business growth not only for shareholders but also for all stakeholders.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Isi dari pokok-pokok Kode Etik PT IIF, terdiri dari:

A. Melakukan Usaha dengan Taat Hukum dan Beretika

Kebijakan yang tercantum dalam Etika Bisnis IIF dijadikan sebagai panduan bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa semua kegiatan usaha yang dilakukan harus berlandaskan pada nilai-nilai dasar IIF, yakni integritas, kejujuran kewajaran, saling menghormati, kepedulian, dan pertanggungjawaban pribadi. Selain berfungsi sebagai pedoman di dalam proses pengambilan keputusan beretika sehari-hari, nilai-nilai ini juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap etika personal, seperti penerimaan hadiah, pengungkapan kekayaan pribadi, sikap politik dan donasi, serta kepatuhan terhadap panduan Anti-Korupsi dan Pencegahan Penipuan.

B. Kebijakan Informasi, Pengendalian Internal, dan Pelaporan Keuangan

Dalam rangka memberikan perlindungan sekaligus mengawal aset dan reputasi IIF, pengelolaan Perseroan senantiasa berlandaskan pada kebijakan konflik kepentingan, kebijakan sumber daya elektronik, perlindungan data dan kebijakan keamanan, perdagangan efek, informasi *inside trader*, pengendalian internal, pelaporan keuangan, serta retensi dokumen dan *auditing*.

C. Benturan Kepentingan

Dalam melaksanakan kegiatan usaha dan tugas sehari-hari, baik segenap karyawan maupun perwakilan IIF, diharuskan terbebas dari benturan kepentingan untuk menghindari timbulnya pengaruh buruk di dalam proses pengambilan keputusan, objektivitas, atau kesetiaan mereka pada Perseroan.

D. Kebijakan Sumber Daya Elektronik

Kebijakan ini mengatur bahwa penggunaan semua sumber daya elektronik pada lingkup Perseroan tidak melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Kebijakan Perilaku Usaha IIF. Kendati demikian, semua karyawan IIF harus melindungi sumber daya elektronik IIF dari penggunaan tanpa izin dan dari ancaman keamanan.

E. Keamanan Informasi dan Kebijakan Kerahasiaan

Segenap karyawan dan perwakilan IIF bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi IIF dari tindakan pengungkapan tanpa izin, baik pengungkapan yang bersifat internal ataupun eksternal, dengan sengaja maupun kebetulan. Dengan konteks serupa, IIF juga menghormati kerahasiaan dan sensitivitas informasi yang bukan milik IIF. Merupakan kebijakan IIF untuk hanya menggunakan sarana yang legal dan beretika dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi bisnis dan pasar dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pasar, pelanggan, dan pesaing. IIF tidak mengumpulkan atau menggunakan informasi rahasia milik pihak lain tanpa adanya pemberian izin secara eksplisit oleh pihak tersebut.

F. Pengendalian Internal, Pelaporan Keuangan, Retensi Dokumen, dan Kebijakan Audit

Manajemen IIF bertanggung jawab untuk mempersiapkan Laporan Keuangan tahunan dan triwulanan secara lengkap dan akurat

PRINCIPLES OF THE CODE OF ETHICS

The contents of the main points of the PT IIF Code of Ethics consist of:

A. Run Ethical and Law-Abiding Business

The policies contained in IIF's Business Ethics offer guidelines to the Company in running daily business operations. The policy states that all of its business operations shall be based on IIF's basic values, namely integrity, fairness, mutual respect, caring, and personal responsibility. In addition to serving as guidelines in the day-to-day ethical decision-making process, these values are also related to adherence to personal ethics, such as the acceptance of gifts, disclosure of personal wealth, political attitudes and donations, as well as adherence to Anti-Corruption and Fraud Prevention guidelines.

B. Information Policy, Internal Control, and Financial Reporting

In order to give protection and safeguard its assets and reputation, IIF's management shall always base its management on a conflict of interest policy, electronic resources policy, data protection and security policy, securities trading, insider trading information, internal control, financial reporting, as well as document retention and auditing.

C. Conflict of Interest

In carrying their business activities and daily tasks, all of IIF's employees and representatives shall act independently and free from conflicts of interest to avoid bad influence in the decision-making process, on objectivity, or on their loyalty to the Company.

D. Electronic Resources Policy

This policy stipulates that the use of all electronic resources within the scope of the Company shall be law-abiding as stipulated in IIF Business Conduct Policy. However, all IIF employees must protect IIF's electronic resources from unauthorized use and security threats.

E. Information Security and Privacy Policy

All employees and representatives of IIF are responsible for keeping the confidentiality of IIF's information from unauthorized disclosure, whether it is internal or external, intentionally or coincidentally. In the same context, IIF also respects the confidentiality and sensitivity of all information that does not belong to IIF. It is also a policy of IIF to use only legal and ethical means to collect and use business and market information in order to get more insights to the market, customers, and competitors. IIF shall never collect or use confidential information that belongs to other parties without their explicit permission.

F. Internal Control, Financial Reporting, Document Retention, and Audit Policy

The management of IIF is responsible for preparing comprehensive and accurate annual and quarterly Financial Statements in

sesuai dengan prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. IIF berkomitmen untuk mematuhi kebijakan semua pihak yang bertanggung jawab atas kelengkapan dan ketepatan waktu terkait penyampaian informasi keuangan yang aktual dan bersifat proyeksi dan/atau sehubungan dengan kepatuhan IIF terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, pengendalian, dan prosedur pengungkapan, retensi dokumen, dan kebijakan akuntansi. IIF memastikan terlaksananya kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut melalui kegiatan Auditor Internal dan auditor independen, serta melalui mekanisme pemantauan internal. Keamanan informasi juga harus mencakup perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dari berbagai divisi. Kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara divisi yang berbeda yang mungkin sedang memberikan layanan *Advisory* dan yang melakukan transaksi pendanaan.

G. Hormati Individu dan Masyarakat

Sikap hormat kepada sesama individu dan masyarakat merupakan bagian dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Delapan Prinsip, yang membedakan IIF dari lembaga keuangan lainnya di Indonesia. IIF juga terus berupaya untuk menjangkau dan mempertahankan talenta terbaik dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan memberikan *reward* yang layak kepada para karyawan dan perwakilannya. Semua upaya tersebut dituangkan ke dalam kebijakan-kebijakan berikut:

1) Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan

IIF berkomitmen untuk menghadirkan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan. Namun, masing-masing karyawan tetap bertanggung jawab untuk melakukan *update* pengetahuan mengenai hukum dan regulasi yang berlaku terkait Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan dan menaatinya. Manajemen IIF bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan bagi semua karyawan mengenai hukum dan kebijakan yang relevan.

2) Kebijakan Mengenai Pelecehan

IIF berkomitmen untuk menghadirkan lingkungan kerja yang terbebas dari segala bentuk perilaku yang tidak pantas dan tindakan pelecehan, serta menjamin tidak adanya diskriminasi berdasarkan usia, cacat tubuh, status pernikahan, ras atau warna kulit, asal usul negara, agama, seks, orientasi seksual, atau identitas gender. Setiap karyawan harus memahami bahwa tindakan pelecehan dan perilaku tidak pantas tidak akan ditoleransi di IIF.

H. Kebijakan Privasi

IIF memberikan nilai signifikan pada upaya memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, klien, mitra usaha, dan orang lain yang membagikan informasi pribadi mereka dengan IIF. Oleh karena itu, IIF sepenuhnya mematuhi kebijakan tentang kepatuhan terhadap semua hukum terkait privasi dan perlindungan data.

I. Perilaku dengan Mitra Usaha dan Pihak Ketiga

IIF mematuhi seluruh regulasi dan ketentuan yang mengatur praktik anti-suap dan secara akurat melakukan pembukuan atas semua transaksi. Aksi penyuapan didefinisikan sebagai

accordance with the principles and Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. IIF is committed to complying with the policies of all parties responsible for the completeness and timeliness of the actual and projected financial information and/or in connection with IIF's compliance with internal control over financial reporting, control and disclosure procedures, document retention, and accounting policies. IIF ensures compliance with these policies through the activities of Internal Auditors and independent auditors, as well as through internal monitoring mechanisms. Information security must also consider the protection of confidential information from various divisions. IIF is aware that there is always a potential conflict of interest between the Advisory Division that is offering consulting services and a counterpart Division that is in charge of making financing transactions.

G. Respect Individuals and Society

Respect for others and the society in general is part of the principles contained in IIF's Eight Principles, which distinguish the Company from other financial institutions in Indonesia. IIF is continuously seeking to recruit and retain the best talents by providing a safe, healthy work environment, and providing proper rewards to the employees and representatives. All of these efforts are embodied in the following policies:

1) Environment, Safety, and Health

IIF is committed to providing a safe and healthy work environment for all employees. However, each employee also has self-responsibility to update their knowledge about all applicable laws and regulations related to Environment, Safety, and Health and comply with each one of them. IIF management is responsible for providing trainings for all employees on relevant laws and policies.

2) Policy Regarding Harassment

IIF is committed to providing a work environment that is free from all forms of inappropriate behavior and acts of harassment, and ensures that it is free from prejudice against age, disability, marital status, race or color, national origin, religion, sex, sexual orientation, or gender. It should be every employee's understanding that IIF will never tolerate any form of harassment and inappropriate behavior.

H. Privacy Policy

IIF places significant value on earning and keeping the trust of its stakeholders, including employees, clients, business partners and others who share their personal information with IIF. Therefore, IIF fully complies with its policy to comply with all laws regarding privacy and data protection.

I. Behavior with Business Partners and Third Parties

IIF complies with all regulations and provisions governing anti-bribery practices and accurately keeps records of all transactions. Bribery is defined as an unlawful act of offering, permitting or

tindakan menawarkan, memberi izin atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung dengan maksud untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas, yakni persetujuan kenaikan harga, pemberian kontrak, pemberian izin operasi, persetujuan atas penggunaan/registrasi produk, vonis pengadilan yang menguntungkan, atau penyelesaian sengketa perpajakan. IIF mematuhi kebijakan untuk menjalankan kontraknya dengan pemerintah dan melakukan sub-kontrak bisnis dengan menjaga tingkat kepatuhan yang ketat sesuai hukum dan regulasi nasional, negara, provinsi, dan lokal yang berlaku, dan pada semua persyaratan kontrak.

PERNYATAAN BAHWA KODE ETIK PERSEROAN BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode Etik Perseroan adalah pedoman dasar yang berisi kumpulan standar etika yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh insan IIF, mencakup karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan organ-organ lainnya di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi. Dengan adanya Kode Etik Perseroan, maka seluruh unsur Perseroan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta berperilaku sesuai dengan Kode Etik Perseroan.

PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI KODE ETIK

Penyebarnya dan sosialisasi pokok-pokok Kode Etik Perseroan dilakukan secara berkala dengan membagikan Buku Pedoman Kode Etik kepada karyawan yang baru bergabung dan juga kepada eksisting karyawan. Perseroan mewajibkan seluruh karyawan untuk menandatangani surat pernyataan telah membaca dan memahami isi Kode Etik Perseroan. Selain membagikan buku fisik, Perseroan juga mempublikasikan dokumen Kode Etik Perseroan pada situs *web* Perseroan yang dapat diakses di: <https://iif.co.id/id/hubungan-investor/tata-kelola-perusahaan/dokumen-lain/>

Seluruh upaya sosialisasi tersebut dilakukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang mendalam kepada para insan IIF untuk senantiasa berperilaku dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai utama Perseroan.

SANKSI UNTUK SETIAP JENIS PELANGGARAN

Karyawan yang terbukti melanggar Kode Etik Perusa Perseroan haan dan dinyatakan bersalah atas pelanggaran tindak pidana serius akan dikenakan tindakan disiplin internal hingga pemberhentian hubungan kerja. Kegiatan pembinaan atau penentuan sanksi kepada karyawan berbeda-beda disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK TAHUN 2021

Pada tahun 2021, tidak ada kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh karyawan IIF.

TREN KUALITAS PENERAPAN KODE ETIK PERSEROAN TAHUN 2021-2022

Selama 2 (dua) tahun terakhir ini, tren penerapan Kode Etik IIF dapat dikatakan sangat baik.

giving anything of value to a Government Official either directly or indirectly with the intention of gaining or retaining business, or obtaining an improper advantage, i.e. approval of price increases, awarding of contracts, granting of operating licenses, approval of product use/registration, favorable court verdict, or tax dispute resolution. IIF adheres to a policy of executing its government contracts and sub-contracting business and does that in full compliance with applicable national, state, provincial and local laws and regulations, and with all contract terms.

STATEMENT THAT THE CORPORATE CODE OF CONDUCT APPLY TO ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

The Company's Code of Ethics is a basic guideline that contains a set of ethical standards that must be adhered to and implemented by all IIF personnel, including employees, the BoD, the BoC and other organs under the two Boards. With its Code of Ethics, all elements of the Company are required to discharge their duties and responsibilities, and behave in accordance with the Code.

DISSEMINATION AND SOCIALIZATION OF THE CODE OF CONDUCT

The main points of the Company's Code of Ethics are disseminated and socialized by distributing the Code of Ethics Manual to both existing and new employees. The Company requires all employees to sign a statement which says that they have read and comprehended the contents of the Company's Code of Ethics. In addition to distributing books, the Company also publishes the Company's Code of Ethics document on the Company's website which can be accessed at: <https://iif.co.id/id/jualan-investor/tata-kelola-corporate/document-lain/>

All of these socialization efforts are carried out in order to raise awareness and in-depth understanding of IIF personnel to always behave and act in accordance with the main values of the Company.

SANCTIONS FOR ANY KINDS OF VIOLATION

Employees who are found to have violated the Company's Code of Ethics and are found guilty of serious criminal offenses will be subject to internal disciplinary action up to employment termination. Coaching or sanctions for such employees vary depending on the fatality of violations committed.

TOTAL CODE OF CONDUCT VIOLATIONS IN 2021

In 2021, there were no cases of violations of the Code of Ethics committed by IIF employees.

QUALITY TRENDS FOR IMPLEMENTATION OF CORPORATE CODE OF CONDUCT 2021-2022

In the last 2 (two) years, it is safe to say that IIF Code of Ethics has been implemented exceedingly well.

BUDAYA PERSEROAN

Budaya Perseroan merupakan keyakinan, nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang memberikan kerangka acuan umum bagi karyawan mengenai standar etis dalam berperilaku dan berinteraksi di lingkungan Perseroan.

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI KODE ETIK TAHUN 2021

Tidak adanya temuan pelanggaran Kode Etik di tahun ini menandai bahwa semua karyawan IIF telah memahami dengan baik pokok-pokok Kode Etik dan nilai-nilai budaya Perseroan serta memiliki kesadaran penuh untuk menjadikannya sebagai landasan dan acuan berperilaku di lingkungan kerja. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kode Etik di IIF telah berjalan efektif sepanjang tahun ini.

CORPORATE CULTURE

Corporate culture is a shared beliefs, values, trust and norms that provide a general frame of reference for employees regarding ethical standards in behaving and interacting within the Company.

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT IN 2021

The non occurrence of findings on Code of Ethics violations this year indicates that all IIF employees have had a strong comprehension of the main points of the Code of Ethics and corporate cultural values and full awareness to use them as a basis and reference for behavior in work environment. Thus, it can be concluded that the implementation of the Code of Ethics at IIF has been effective throughout this year.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Employee and/or Management Share Ownership Program

Sampai dengan akhir 2021, Perseroan belum memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.

Until the end of 2021, the Company did not have a share ownership program for employees and/or management.

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI LAINNYA

Policy on Disclosure of Other Information

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Perseroan adalah perusahaan swasta yang sahamnya tidak diperdagangkan kepada publik di bursa efek manapun. Sampai dengan akhir 2021, tidak ada satupun Dewan Komisaris ataupun Direksi yang tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perseroan juga belum memiliki kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi karena mempertimbangkan status Perseroan yang sampai saat ini masih sebagai perusahaan tertutup.

Informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi telah diulas pada Bab Profil Perusahaan, halaman 72.

SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

The Company is a private company whose shares are not traded to the public on any stock exchange. Until the end of 2021, none of the members of its BoC and BoD was registered as a shareholder of the Company, either directly or indirectly.

The Company also does not have a policy that specifically regulates the share ownership of members of both its BoC and BoD given the current status of the Company that remain a privately owned company.

Information about share ownership of IIF BoC and BoD is reviewed in the Company Profile Chapter, page 72.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistle Blowing System

GAMBARAN UMUM

Sebagai warga korporasi yang baik, Perseroan berkomitmen untuk menjadi katalisator yang terdepan pada sektor pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, Perseroan memiliki semangat untuk membangun lingkungan bisnis yang sehat, terbuka, kondusif, jujur, dan transparan.

Oleh karena itu, Perseroan telah menerapkan Sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*/"WBS") yang berfungsi sebagai media pelaporan atas pelanggaran atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau prosedur serta kode etik dan nilai-nilai budaya Perseroan. Peraturan WBS Perseroan telah dituangkan dalam *Operation Manual* yang telah disetujui oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

Kehadiran WBS di Perseroan menjadi salah satu perwujudan nyata atas komitmen kuat Perseroan dalam menghadirkan praktik bisnis sehat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG. Dengan adanya WBS, Perseroan berharap seluruh karyawan menjadi lebih terdorong untuk melaporkan setiap tindakan pelanggaran atau dugaan terjadinya tindakan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan peraturan, tata nilai, dan kebijakan Perseroan tanpa ada rasa takut atau keragu-raguan sepanjang pelaporan tersebut didukung dengan kecukupan bukti awal yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

SOSIALISASI DAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perseroan melakukan sosialisasi WBS secara berkala kepada seluruh insan IIF agar pemahaman setiap karyawan mengenai fungsi, keberadaan, dan mekanisme kerja WBS semakin mendalam. Kegiatan sosialisasi WBS tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan *platform* internal yang ada sehingga diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan karyawan. Selain membangun kesadaran internal, IIF juga melakukan sosialisasi WBS kepada pihak eksternal, salah satunya dengan cara mempublikasikan kebijakan WBS pada situs *web* Perseroan, yaitu: <https://iif.co.id/id/hubungan-investor/tata-kelola-perusahaan/sistem-whistleblowing-iif/>

MEKANISME ATAU PROSEDUR PELAPORAN PELANGGARAN

Apabila karyawan atau pemangku kepentingan lainnya mendapati adanya aktivitas yang mencurigakan atau diduga terindikasi melakukan pelanggaran, maka pihak pelapor wajib menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tersebut secara tertulis (diktik atau tulisan tangan) agar Perseroan mendapatkan deskripsi dan pemahaman yang jelas mengenai kronologis dan subjek perkara yang dilaporkan.

Pelaporan pelanggaran harus dikirimkan bersama dengan surat pengantar yang menyebutkan identitas pelapor. Penyampaian laporan secara anonim hanya diperkenankan apabila pelapor dapat memberikan bukti pendukung yang memadai, informasi yang akurat, dan indikasi kuat bahwa telah terjadi penipuan/tindakan pelanggaran yang dapat mengarah pada penyelidikan lebih lanjut.

GENERAL DESCRIPTION

As a good corporate citizen, the Company has a commitment to become a leading catalyst in the financing sector for infrastructure development in Indonesia. To realize these noble aims, the Company is passionate about building a healthy, open, conducive, honest, and transparent business environment.

Therefore, the Company has been running a Whistleblowing System ("WBS") which serves as a medium for reporting violations or alleged violations of policies and/or procedures as well as its code of ethics and corporate culture. The Company's WBS regulations have been stated in the *Operation Manual* which has been approved by the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders.

The Company's WBS is a tangible manifestation of its unwavering commitment to deliver healthy business practices based on the principles of GCG. With the WBS in place, the Company hopes to see the employees more encouraged to report any acts of violation or allegations of violations and/or abuse of the Company's regulations, values, and policies without any fear or hesitation as long as the reporting is supported by sufficient, strong, and initial evidence that is considered to be accountable.

SOCIALIZATION AND EFFORTS TO IMPROVE THE QUALITY OF THE WHISTLE BLOWING SYSTEM

The Company conducts periodic socialization of WBS to all IIF personnel to deepen each employee's understanding of the function, existence, and working mechanism of the WBS. The WBS socialization activity was carried out by optimizing the existing internal platform to reach out to all levels of employees. In addition to building internal awareness, IIF also disseminates WBS to external parties by e.g. publishing the WBS policy on the Company's website at: <https://iif.co.id/id/Relations-investor/tata-kelola-corporate/system-whistleblowing-iif/>

WHISTLE BLOWING MECHANISM OR PROCEDURE

Employees or other stakeholders who happen to see any suspicious activity or one that is presumed to have contained an element of violation may report such activity and shall do it in writing (typed or handwritten) so the Company can see a clear description and understanding of the chronology and subject of the reported case.

Violation reports must be sent with a cover letter stating the identity of the whistle blower identity. Report with anonymous identity is only permitted if the whistle blower can provide adequate supporting evidence, accurate information, and strong indications that fraud/violation has occurred which may lead to further investigation.

Penyampaian Pelaporan Pelanggaran dapat dilakukan dengan mengunduh dan mengisi Formulir Laporan Pengungkapan yang telah disediakan di situs *web* Perseroan: <https://iif.co.id/id/hubungan-investor/tata-kelola-perusahaan/sistem-whistleblowing-iif/>

FORMULIR PELAPORAN PENGUNGKAPAN IIF

Formulir ini dapat digunakan oleh karyawan dan pihak ketiga untuk menyampaikan pengungkapan sesuai dengan Kebijakan Pelaporan IIF.

Violation Reports can be submitted by downloading and filling out the Disclosure Report Form which has been provided on the Company's website: <https://iif.co.id/id/Relations-investor/tata-kelola-usaha/sistem-whistleblowing-iif/>

IIF DISCLOSURE REPORTING FORM

This form may be used by employees and 3rd parties to make a disclosure in accordance with the IIF's Reporting Policy.

Nama Responden (Wajib)	Respondents Name (Compulsory)
Manajer/Pemimpin Tim tempat Anda bekerja (berlaku untuk karyawan) dan perusahaan tempat Anda bekerja (berlaku untuk pihak ketiga)	Manager/Team Leader you work for (applicable for employees) and company you work for (applicable for 3 rd parties)
Dimana Anda dapat dihubungi	Where you can be contacted
Apakah Anda siap untuk diwawancarai?	Are you prepared to be interviewed?
Sifat Pelanggaran (harap berikan tanggal dan deskripsi singkat tentang peristiwa)	Nature of Offence (s) (please provide dates and brief description of events)
Kesulitan yang dihadapi dan kerugian yang diderita oleh perusahaan dan/atau individu yang dapat diukur:	Hardships faced and losses suffered by the company and/or individual where ever quantifiable:
Rincian tersangka pelaku yang diketahui	Details of suspected offender(s) where known
Apakah ada pihak luar yang terlibat? (sebutkan nama orang/perusahaan yang terlibat) (berlaku untuk karyawan)	Are external parties involved? (please supply names of people/companies involved) (applicable for employees)
Apakah ada pihak internal yang terlibat? (harap berikan nama karyawan yang terlibat dengan penunjukan jika diketahui) (berlaku untuk pihak ketiga)	Are internal parties involved? (please supply names of employees involved with designations if known) (applicable for 3 rd parties)
Rincian saksi jika ada. Apakah mereka siap untuk mendukung pengungkapan tersebut?	Details of witnesses if any. Are they prepared to back the disclosure?
Rincian Bukti jika ada	Details of Proofs if any
Sudahkah Anda menyampaikan pengungkapan Anda kepada Manajer/Pemimpin Tim dan/atau manajemen senior lainnya? (berlaku untuk karyawan)	Have you raised your disclosure with your Manager/Team Leader and/or other senior management? (applicable for employees)
Sudahkah Anda menyampaikan pengungkapan Anda kepada salah satu manajemen senior IIF? (berlaku untuk pihak ketiga)	Have you raised your disclosure with any of the senior management of IIF? (applicable for 3 rd parties)
Jika ya, siapa yang diberi tahu, kapan, apa tanggapannya?	If so, who has been informed, when, what was the response?
Apakah pengungkapan terbatas pada satu lokasi atau dapatkah terjadi di tempat lain dalam organisasi?	Is the disclosure confined to one location or could it be happening elsewhere in the organization?

Selain itu, Pelaporan Pelanggaran melalui WBS juga dapat dikirimkan ke kantor pusat Perseroan yang ditunjukkan ke alamat:

PT Indonesia Infrastructure Finance

Attn: Internal Audit

Prosperity Tower Lantai 55, District 8.
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190,
E. whistleblowing@iif.co.id
P. (+62) 21 5082 6600 ext 5076 (Internal Audit)

KRITERIA LAPORAN

Lingkup pelaporan yang dapat ditindaklanjuti melalui WBS Perseroan, antara lain:

In addition, Violation Reports through WBS can also be sent to the Company's head office with the following address:

PT Indonesia Infrastructure Finance

Attn: Internal Audit

Prosperity Tower 55th Floor, District 8.
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Gen. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190,
E. whistleblowing@iif.co.id
P. (+62) 21 5082 6600 ext 5076 (Internal Audit)

REPORT CRITERIA

The scope of reporting that can be followed up through the Company's WBS includes:

Kategori Pelaporan Report Category	Penjelasan	Description
Praktik Korupsi Corruption practices	Tindakan yang berupa menawarkan, memberikan atau meminta, baik secara langsung ataupun tidak langsung atas sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi secara tidak patut atas tindakan pihak lain.	Actions in the form of offering, giving or asking, either directly or indirectly for something of value to improperly influence the actions of other parties.

Kategori Pelaporan Report Category	Penjelasan	Description
Praktik Kecurangan Fraud practices	Setiap perbuatan atau kelalaian, termasuk pemberian pernyataan yang salah baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja dan menyesatkan, atau mencoba untuk menyesatkan suatu pihak demi mendapatkan keuntungan finansial atau lainnya atau untuk menghindari suatu kewajiban.	Any act or omission, including giving a false statement whether intentional or unintentional and misleading, or trying to mislead a party in order to obtain financial or other benefits or to avoid an obligation.
Praktik Kolusi Collusion practices	Kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang tidak benar, termasuk mempengaruhi secara tidak patut atas tindakan pihak lain.	An agreement between two or more parties that is designed to achieve an improper purpose, including improperly influencing the actions of the other party.
Praktik Koersif Coercive practices	Tindakan menghalangi atau merugikan, atau mengancam untuk menghalangi atau merugikan, baik secara langsung atau tidak langsung, setiap pihak atau kepemilikan suatu pihak untuk mempengaruhi secara tidak patut tindakan suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada intimidasi dan pelecehan seksual.	The act of obstructing or harming, or threatening to hinder or harm, directly or indirectly, any party or the possession of a party to improperly influence the actions of a party, including but not limited to sexual intimidation and harassment.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perseroan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas dan memberikan perlindungan kepada pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan yang tidak menyenangkan yang berpotensi merugikan pelapor dan keluarganya. Apabila pelapor adalah karyawan IIF, maka Perseroan akan memberikan jaminan perlindungan terhadap jenjang kariernya ke depan, sepanjang pelaporan pengaduan yang disampaikan memenuhi kriteria pelaporan serta yang bersangkutan tidak terlibat dalam tindakan curang dan/atau kegiatan korupsi tersebut.

PROSES PENANGANAN PENGADUAN

Laporan pengaduan disampaikan melalui WBS untuk selanjutnya diproses dan ditindaklanjuti oleh Internal Audit. Selain itu, IIF juga memperkenankan penyampaian laporan pengaduan secara non-verbal (lewat surat, telepon, e-mail).

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Setelah menerima laporan pengaduan, Internal Audit akan melakukan registrasi/pencatatan atas semua informasi yang ada dan melakukan investigasi termasuk atas barang bukti. Apabila hasil investigasi dianggap benar, maka laporan pengaduan tersebut akan di eskalasi ke Komite Pemeriksaan Kecurangan/*Fraud* dan Anti-Korupsi agar dapat ditindaklanjuti.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWER [RISK]

The Company is committed to keeping the confidentiality of identity and providing protection to the whistleblower from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions that have the potential to harm them and their family. If the whistle blower is an employee of IIF, then the Company will guarantee protection for their future career path, as long as the report submitted meets the reporting criteria and the employee themselves is not involved in such fraudulent acts and/or corrupt activities.

WHISTLEBLOWING HANDLING PROCESS

Complaint reports shall be submitted through the WBS to be further processed and followed up by Internal Audit. In addition, IIF also allows non-verbal submission of complaint reports (via letter, telephone, e-mail).

PARTIES THAT MANAGE THE COMPLAINTS

When the Internal Audit receives a complaint report, it will register/file all available information and make initial investigations including on evidence. If it decides the claim is true based on investigation results, the complaint report will be escalated to the Fraud and Anti-Corruption Examination Committee for further follow up.

PRAKTIK BAD GOVERNANCE

Bad Governance Practice

Seluruh pelaksanaan aktivitas operasional bisnis Perseroan sepanjang tahun 2021 dipastikan telah memenuhi kaidah dan prinsip-prinsip korporasi sehat sehingga tidak ditemukan adanya penerapan praktik tata kelola perusahaan yang buruk pada lingkup Perseroan, seperti antara lain yang terkait dengan:

- 1) Pencemaran lingkungan
- 2) Pelanggaran hukum
3. Ketidapatuhan terhadap kewajiban pajak
4. Pelanggaran terhadap hak-hak karyawan
5. Ketidaksesuaian pelaporan keuangan dengan peraturan yang berlaku

The Company ensures that the implementation of its business operations throughout 2021 has entirely complied with healthy corporation standards so no practice of bad corporate governance practices is found in the scope of the Company, such as those related to:

1. Environmental pollution
2. Violation of Law
3. Non-compliance with tax obligations
4. Violation of employee rights
5. Incompatibility of financial reporting with applicable regulations

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI Anti Corruption

Perseroan menyatakan kesungguhan dan komitmen penuh untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Perseroan. Pedoman penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi di IIF mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Perseroan telah menginternalisasi aturan tersebut dalam Kode Etik Perseroan dan Sistem Pengendalian Internal Perseroan.

The Company expresses its strong will and full commitment to support the eradication of corruption within the Company. The guidelines for the implementation of corruption eradication at IIF refer to Law No 31 of 1999 concerning Corruption Crimes. The Company has internalized these regulations in its Code of Ethics and the Company's Internal Control System.

PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI SE OJK NO. 32/SEOJK.04/2015

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES IN ACCORDANCE WITH OJK CIRCULAR LETTER NO. 32/SEOJK.04/2015

No	Prinsip dan Rekomendasi Principle and Recommendation	Penjelasan	Penerapan di Perseroan Implementation in the Company	Explanation
1	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Principle 1: Improving the Value of Implementation of General Meeting of Shareholders (GMS)			
	<p>1. Emiten memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan Pemegang Saham.</p> <p>Issuers shall have technical method or voting procedure both openly and privately, that prioritizes independency and the interests of shareholders.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang Saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. - Emiten direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan Pemegang Saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan Pemegang Saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>. 	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 1 Butir 1 RUPS Tahunan Perseroan dilakukan secara sirkuler sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>The Company has implemented Principle 1 Point 1 The Company's Annual GMS have been conducted in a circular manner in accordance with the procedures stipulated in the Company's Articles of Association</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Each share with voting rights issued is entitle to have one vote (<i>one share one vote</i>). Shareholders can exercise their voting rights in the decision making process especially in voting. However, the decision-making mechanism by means of voting, both openly and privately, has not been regulated in details. - Issuers are recommended to have voting procedures in making decisions on a GMS agenda. The voting procedure must maintain the independency or freedom of shareholders. For example, in an open voting, shareholders raise hands to show they agree with the choice instructions offered by the chairman of the GMS. Meanwhile, closed voting is elected when a decision requires confidentiality or at the request of shareholders, using a voting card or by using electronic voting.
	<p>2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>All members of an Issuer's BoD and BoC shall attend the Annual GMS.</p>	<p>Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham terkait mata acara dalam RUPS.</p>	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 1 Butir 2 Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menghadiri RUPS Tahunan yang diselenggarakan tanggal 22 April 2021.</p> <p>The Company has implemented Principle 1 Point 2 All members of the Company's BoD and BoC attended the Annual GMS which was held on 22 April 2021.</p>	<p>The presence of all members of Issuer's BoD and BoC is intended so that each member of the two Boards of can pay attention, explain, and respond directly to current issues or answer questions asked by shareholders regarding the agenda of the GMS.</p>

No	Prinsip dan Rekomendasi Principle and Recommendation	Penjelasan	Penerapan di Perseroan Implementation in the Company	Explanation
	<p>3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs <i>Web</i> Emiten paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>A summary of the minutes of the GMS shall be made available on Issuer's Website for at least 1 (one) year.</p>	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten, Emiten wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Emiten. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs <i>Web</i> Emiten memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs <i>Web</i> dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi Pemegang Saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p>	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 1 Butir 3 Ringkasan risalah RUPS selama 1 tahun terakhir tersedia di situs resmi Perseroan, yaitu https://iif.co.id/id/.</p> <p>The Company has implemented Principle 1 Point 3 The summary of the minutes of the GMS for the last 1 year is already made available on the Company's official website, namely https://iif.co.id/id/.</p>	<p>Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 on the Convention of Issuer's General Meeting of Shareholders states that Issuers shall make a summary of the minutes of the GMS in Indonesian and foreign languages (at least in English), and announce it 2 (two) working days after the GMS is held for the public, including on the Issuer's Website. The availability of a summary of the minutes of the GMS on the Issuer's Website will provide an opportunity for absent shareholders to easily and quickly get important information about the GMS convention. Therefore, the provision regarding the minimum period of availability of the summary of the minutes of the GMS on the Website is intended to get sufficient time for shareholders to obtain such information.</p>
<p>2 Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Emiten dengan Pemegang Saham atau Investor Principle 2: Improving the Quality of Issuer's Communication with Shareholders or Investors</p>				
	<p>1. Emiten memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor.</p> <p>Issuers shall have a communication policy with shareholders or investors.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komunikasi antara Emiten dengan Pemegang Saham atau investor dimaksudkan agar para Pemegang Saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Emiten. Disamping itu, Pemegang Saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Emiten. - Kebijakan komunikasi dengan para Pemegang Saham atau investor menunjukkan komitmen Emiten dalam melaksanakan komunikasi dengan para Pemegang Saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung Pemegang Saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. 	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 2 Butir 1 Perseroan secara rutin menyelenggarakan rapat dengan para Pemegang Saham untuk memberikan informasi terkini tentang kondisi dan kinerja Perseroan.</p> <p>The Company has implemented Principle 2 Point 1 The Company regularly convenes meetings with shareholders to provide the latest information on its condition and performance.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Communication between Issuer and the shareholders or investors is intended for the shareholders or investors to have a clearer understanding of the information that has been published to the public, such as periodic reports, information disclosure, business conditions or prospects and performance, as well as the implementation of the Issuer's governance. In addition, shareholders or investors can also submit inputs and opinions to the management of the Issuer. - The communication policy with shareholders or investors demonstrates the Issuer's commitment to communicate with shareholders or investors. The policy may include strategies, programs, and timing of communications, as well as guidelines that support shareholders or investors in participating in the communication.

No	Prinsip dan Rekomendasi Principle and Recommendation	Penjelasan	Penerapan di Perseroan Implementation in the Company	Explanation
	<p>2. Emiten mengungkapkan kebijakan komunikasi Emiten dengan Pemegang Saham atau investor dalam Situs <i>Web</i>.</p> <p>Issuers shall disclose their communication policies with shareholders or investors on the Website.</p>	<p>Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Emiten dalam memberikan kesetaraan kepada semua Pemegang Saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran Pemegang Saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Emiten.</p>	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 2 Butir 2 Perseroan telah mengungkapkan seluruh informasi yang berkaitan dengan kebijakan komunikasi perusahaan pada situs <i>web</i> resmi Perseroan: https://iif.co.id/en/investor-investor-update/.</p> <p>The Company has implemented Principle 2 Point 2 The Company has disclosed all information about communication policy on its official website: https://iif.co.id/en/investor-investor-update/.</p>	<p>Disclosure of communication policies is a form of transparency of the Issuer's commitment to provide equality to all shareholders or investors in the implementation of communications. Disclosure of information also aims to increase the participation and role of shareholders or investors in the implementation of the Issuer's communication program.</p>
3 Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners				
	<p>1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Emiten.</p> <p>The size of Issuer's BoC shall be determined with due consideration to the condition of the Issuer.</p>	<p>Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Emiten wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Emiten yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Emiten. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 3 Butir 1 Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 9 (sembilan) orang. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris IIF telah mempertimbangkan kondisi dan dinamika bisnis Perseroan.</p> <p>The Company has implemented Principle 3 Point 1 The Company's BoC as of December 31, 2021 had 9 (nine) members. The number and composition of IIF's BoC has taken into account the conditions and dynamics of the Company's business.</p>	<p>The size of BoC can affect the effectiveness of the implementation of its duties. The determination of the number of Issuer's BoC members must refer to the provisions of the applicable laws and regulations, which consists of at least 2 (two) members based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation No 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. In addition, it is also necessary to consider the condition of the Issuer which includes the characteristics, capacity, and size, as well as the achievement of objectives and the fulfillment of different business needs among Issuers. However, a BoC with too many member has the potential to interfere with the effectiveness of the implementation of its functions.</p>

No	Prinsip dan Rekomendasi Principle and Recommendation	Penjelasan	Penerapan di Perseroan Implementation in the Company	Explanation
	<p>2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>The composition of members of the BoC shall be determined with due consideration on the diversity of expertise, knowledge, and experience required.</p>	<p>Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Emiten. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Emiten. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Emiten merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p>	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 3 Butir 2 Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan sudah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan, halaman 165-168.</p> <p>The Company has implemented Principle 3 Point 2 The composition of the members of the Company's BoC as taken into account the diversity of expertise, knowledge and experience. This disclosure can be seen in the Corporate Governance Chapter, page 165-168.</p>	<p>The composition of the BoC is a combination of characteristics, as both an organ and based on its individual members, according to the needs of the Issuer. These characteristics can be reflected in the determination of the expertise, knowledge, and experience needed to discharge the supervisory duties and provide advice by the BoC s of the Issuer. The composition that has taken into account the needs of the Issuer is a positive thing, especially regarding decision making in the context of implementing the supervisory function which is carried out by considering various broader aspects.</p>
4	<p>Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4 : Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the BoC.</p>			
	<p>1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>The BoC shall have a self-assessment policy to assess its own performance.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegiat. <i>self-assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegiat, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self-assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. - Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Emiten, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 	<p>Perseroan belum menerapkan Prinsip 4 Butir 1 Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh NRC.</p> <p>The Company has not implemented Principle 4 Point 1 The performance of BoC and BoD is appraised by the NRC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - The BoC self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for collegially assessing the Board's own performance. The self-assessment or self-assessment is intended to be made by each member to assess the performance of the BoC collegially, instead of individually. With this self-assessment, it is hoped that each member of the Board of Commissioners can contribute to improving the performance of the Board of Commissioners on an ongoing basis. - The policy may include assessment activities carried out along with their aims and objectives, periodical implementation time, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations given by the Issuer's nomination and remuneration function, where the existence of this function has been required in the Authority Regulation. Financial Services Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies.

No	Prinsip dan Rekomendasi Principle and Recommendation	Penjelasan	Penerapan di Perseroan Implementation in the Company	Explanation
2.	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Emiten.</p> <p>The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners shall be disclosed through the Issuer's Annual Report.</p>	<p>Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para Pemegang Saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut Pemegang Saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balances</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Perseroan belum menerapkan Prinsip 4 Butir 2 Kebijakan penilaian (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh NRC.</p> <p>The Company has not implemented Principle 4 Point 2 The self-assessment policy for the BoC and BoD is determined by the NRC.</p>	<p>The self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is disclosed not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide confidence, especially to shareholders or investors, on the efforts that need to be made to improve the performance of the BoC. With this disclosure, shareholders or investors will know the mechanism of checks and balances on the performance of the Board of Commissioners.</p>
3.	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Commissioners shall have a policy for the resignation of its members should they be involved in financial crimes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Emiten, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Emiten. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. - Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 4 Butir 3 Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana telah diatur di dalam <i>Board Manual</i> Perseroan.</p> <p>The Company has implemented Principle 4 Point 3 The BoC already has a policy for the resignation of its members as stipulated in the Company's Board Manual.</p>	<p>The policy for resignation of members of the BoC who are involved in financial crimes is a policy that can increase the confidence of stakeholders in the Issuer, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is needed to help smooth the legal process and so the legal process will not interfere with business operations. In addition, from a morality point of view, this policy builds an ethical culture within the Issuer's environment. These policies can be included in the Guidelines or Code of Ethics applicable to the Board of Commissioners.</p> <p>Furthermore, being involved in a financial crime refers to the convict status of a BoC member from an authorized party. The financial crimes referred to are manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as the Criminal Action of Money Laundering as referred to in Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.</p>
4.	<p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>The BoC or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function shall formulate a succession policy in the nomination process for members of the BoD.</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di Perseroan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Perseroan.</p>	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 4 Butir 4 Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang berada dibawah supervisi Dewan Komisaris sebagaimana telah diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, di halaman 179.</p> <p>The Company has implemented Principle 4 Point 4 The Company has a Nomination and Remuneration Committee which is under the supervision of its BoC as disclosed in the Corporate Governance Chapter, on page 179.</p>	<p>Based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation No 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies, the committee that carries out the nomination function has the task of formulating the policies and criteria needed in the nomination process for prospective members of the BoD. One of the policies that can support the nomination process as referred to is the succession policy for members of the BoD. The succession policy aims to maintain the continuity of the regeneration process or leadership regeneration in the company in order to maintain business sustainability and the company's long-term goals.</p>

No	Prinsip dan Rekomendasi Principle and Recommendation	Penjelasan	Penerapan di Perseroan Implementation in the Company	Explanation
5	Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.			
	<p>1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Emiten serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>The size of BoD shall be determined with due consideration on the condition of the Issuer and effectiveness in decision making.</p>	<p>Sebagai organ Perseroan yang berwenang dalam pengurusan Perseroan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Emiten. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Emiten dan disesuaikan dengan kondisi Emiten yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Emiten serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p>	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 5 Butir 1 Jumlah anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 6 (enam) orang. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris IIF telah mempertimbangkan kondisi dan dinamika bisnis Perseroan.</p> <p>The Company has implemented the 5 Point 1 Principle The Company's BoD as of December 31, 2021 had 6 (six) members. This figure has taken into account the conditions and dynamics of the Company's business.</p>	<p>As an organ authorized to manage the Company, the determination of BoD size greatly affects the performance of the Issuer. Thus, the size has to be determined with due to the provisions of the applicable laws and regulations, which are based on the Financial Services Authority Regulation No 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies at least consists of 2 (two) people. In addition, determining the size of BoD must be based on the need to achieve the goals and objectives of the Issuer and adjusted to the Issuer's condition which includes the characteristics, capacity, and size of the Issuer as well as how to achieve the effectiveness of the BoD decision-making.</p>
	<p>2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>The composition of the members of the BoD shall be determined with due consideration on the diversity of expertise, knowledge, and experience required.</p>	<p>Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Emiten. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Emiten. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.</p>	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 5 Butir 2 Komposisi anggota Direksi Perseroan sudah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan, halaman 165-168.</p> <p>The Company has implemented Principle 5 Point 2 The composition of the members of the Company's BoD has taken into account the diversity of expertise, knowledge and experience required. This disclosure can be seen in the Corporate Governance Chapter, page 165-168.</p>	<p>Like the BoC, the diversity of the composition of the members of the BoD is a combination of the expected characteristics as both an organ and based on its individual members, according to the needs of the Issuer. The combination is determined by taking into account the appropriate expertise, knowledge and experience in the division of duties and functions of the BoD in achieving the Issuer's objectives. Thus, the consideration of the combination of these characteristics will have an impact on the accuracy of the nomination process and the appointment of individual members of the BoD collegially.</p>

No	Prinsip dan Rekomendasi Principle and Recommendation	Penjelasan	Penerapan di Perseroan Implementation in the Company	Explanation
	<p>3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>BoD member in charge of accounting or finance shall have expertise and/or knowledge in accounting.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Emiten, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. - Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Emiten dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait. 	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 5 Butir 3 Perseroan memiliki anggota Direksi yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan. Penegasan ini dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Direksi, dalam Laporan Tahunan ini.</p> <p>The Company has implemented Principle 5 Point 3 The Company has a member of its BoD who has competence in accounting or finance. This affirmation can be seen in the Company Profile Chapter, BoD Profile Sub-Chapter, in this Annual Report.</p>	<p>Financial Statements are management accountability reports for the management of Issuer's resources, which must be prepared and presented in accordance with generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia as well as related OJK regulations, including the laws and regulations in the Capital Market sector which regulates the presentation and disclosure of the Issuer's Financial Statements. Based on the laws and regulations in the Capital Market sector which regulates the responsibilities of the Board of Directors for the Financial Statements, the BoD is jointly and severally responsible for the Financial Statements, which are signed by the President Director and one of its members in charge of accounting or finance.</p> <p>Thus, the disclosure and preparation of financial information presented in the financial statements will greatly depend on the expertise and/or knowledge of the BoD, particularly its member who is in charge of accounting or finance. The existence of qualifications of expertise and/or knowledge in accounting that is at least owned by the said member of the BoD can provide confidence in the preparation of the Financial Statements, so the stakeholders can rely on the statements as the basis for making economic decisions regarding the Issuer. Such expertise and/or knowledge can be proven by educational background, training certification, and/or related work experience.</p>
6	<p>Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6: Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.</p> <p>1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>The BoD shall have a self-assessment policy to assess its own performance.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolejal. <i>Self-assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolejal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self-assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. - Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Emiten, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 	<p>Perseroan belum menerapkan Prinsip 6 Butir 1 Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh NRC.</p> <p>The Company has not implemented Principle 6 Point 1 The performance of BoD and BoD is appraised by NRC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - As with the Board of Commissioners, the Board of Directors' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for collegially assessing the performance of the BoD. The self-assessment is intended to be carried out by each member of the BoD to assess its own performance collegially, instead of individually. With this self-assessment, it is hoped that each member of the Board of Directors can contribute to improving its performance on an ongoing basis. - This policy may include assessment activities carried out along with their aims and objectives, periodic implementation times, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations given by the Issuer's nomination and remuneration function, where the establishment of this function has been required in an Authority Regulation. Financial Services No 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies.

No	Prinsip dan Rekomendasi Principle and Recommendation	Penjelasan	Penerapan di Perseroan Implementation in the Company	Explanation
2.	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Emiten.</p> <p>The self-assessment policy to assess the BoD performance shall be disclosed in the Issuer's annual report.</p>	<p>Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Emiten. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut Pemegang Saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.</p>	<p>Perseroan belum menerapkan Prinsip 6 Butir 2 Kebijakan penilaian (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh NRC.</p> <p>The Company has not implemented Principle 6 Point 2 The self-assessment policy for the BoC and BoD is determined by the NRC.</p>	<p>The self-assessment policy on the performance of the BoD is not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide important information on efforts to improve the management of Issuers. This information is very useful to provide confidence to shareholders or investors that there is certainty that the management of the company will continue to be carried out in a better direction. The disclosure will allow shareholders or investors to know the mechanism of checks and balances on the performance of the BoD.</p>
3.	<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The BoD shall have a policy for the resignation of its members should they be involved in financial crimes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Emiten, sehingga integritas Perseroan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Emiten. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. - Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 6 Butir 3 Direksi telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana telah diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, di halaman 159.</p> <p>The Company has implemented Principle 6 Point 3 The BoD already has a policy for the resignation of its members as disclosed in the Corporate Governance Chapter, on page 159.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - The policy for resignation of members of the BoD who are involved in financial crimes is a policy that can increase the confidence of stakeholders in the Issuer, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is needed to help smooth the legal process and so the legal process will not interfere with business operations. In addition, from a morality point of view, this policy builds an ethical culture within the Issuer's environment. These policies can be included in the Guidelines or Code of Ethics applicable to the BoD. - Furthermore, being involved in a financial crime refers to the convict status of a BoD member from an authorized party. The financial crimes referred to are manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as the Criminal Action of Money Laundering as referred to in Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.
<p>7 Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7: Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.</p>				
1.	<p>Emiten memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>Issuers shall have a policy for the prevention of insider trading.</p>	<p>Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Emiten dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 7 Butir 1 Sebagai perusahaan tertutup, maka Perseroan tidak atau belum memiliki kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas <i>insider trading</i>.</p> <p>The Company has implemented Principle 7 Point 1 As a privately owned entity, the Company does not have a policy for insider trading activities.</p>	<p>A person who has inside information is prohibited from conducting a Securities transaction using inside information as referred to in the Capital Market Law. Issuers can minimize the occurrence of insider trading through prevention policies, for example by strictly separating confidential data and/or information from those of a public nature, as well as dividing duties and responsibilities for the management of the information in a proportional and efficient manner.</p>

No	Prinsip dan Rekomendasi Principle and Recommendation	Penjelasan	Penerapan di Perseroan Implementation in the Company	Explanation
2.	<p>Emiten memiliki kebijakan anti-korupsi dan anti-fraud.</p> <p>Issuers shall have an anti-corruption and anti-fraud policy.</p>	<p>Kebijakan anti-korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Emiten dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Emiten terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 7 Butir 2</p> <p>Perseroan telah memiliki kebijakan tentang anti-korupsi dan anti-fraud sebagaimana telah diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, di halaman 237.</p> <p>The Company has implemented Principle 7 Point 2</p> <p>The Company already has policies for anti-corruption and anti-fraud as disclosed in the Corporate Governance Chapter, on page 237.</p>	<p>The anti-corruption policy is useful for ensuring that the Issuer's business activities are carried out legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. The policy can be part of the code of ethics, or in a separate form. The policy may include, among others, the programs and procedures carried out in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in Issuers. The scope of the policy must describe the Issuer's prevention of all corrupt practices, either giving or receiving from other parties.</p>
5.	<p>Emiten memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Issuers shall have a policy for the selection and capacity building of suppliers or vendors.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Emiten memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan Perseroan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> Perseroan. - Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Emiten. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. 	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 7 Butir 3</p> <p>Perseroan telah memiliki kebijakan tentang seleksi pemasok.</p> <p>The Company has implemented Principle 7 Point 3</p> <p>The Company already has a policy for supplier selection.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - The policy on supplier or vendor selection is useful to ensure that the Issuer obtains the goods or services required at competitive prices and of good quality. Meanwhile, the policy of increasing the ability of suppliers or vendors is useful to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/ fulfill the goods or services needed by the company will affect the quality of the company's output. - Thus, the implementation of these policies can ensure continuity of supply, both in terms of quantity and quality required by Issuers. The scope of this policy includes criteria for selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanisms, efforts to increase the capacity of suppliers or vendors, and fulfillment of rights related to suppliers or vendors.
6.	<p>Emiten memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Issuers shall have a policy for the fulfillment of creditor rights.</p>	<p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Emiten. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Emiten kepada kreditur.</p>	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 7 Butir 4</p> <p>Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>The Company has implemented Principle 7 Point 4</p> <p>The Company already has a policy for the fulfillment of creditor rights.</p>	<p>The policy for the fulfillment of creditor rights is used as a guideline in making loans to creditors. The purpose of the referred policy is to maintain the fulfillment of rights and maintain creditor's trust in the Issuer. The policy includes considerations in entering into agreements, as well as follow-up actions in fulfilling the Issuer's obligations to creditors.</p>

No	Prinsip dan Rekomendasi Principle and Recommendation	Penjelasan	Penerapan di Perseroan Implementation in the Company	Explanation
7.	<p>Emiten memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Issuers shall have a whistleblowing system policy.</p>	<p>Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Emiten. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem whistleblowing mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem whistleblowing, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p>	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 7 Butir 5</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> sebagaimana telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, halaman 234.</p> <p>The Company has implemented Principle 7 Point 5</p> <p>The Company already has a whistleblowing system policy as described in the Corporate Governance Chapter, page 234.</p>	<p>A thoughtfully prepared whistleblowing system will provide certainty of protection to witnesses or reporters on an indication of a violation committed by employees or the management of the Issuer. The implementation of the system policy will have an impact on the formation of a good corporate governance culture. The whistleblowing system policy covers, among other things, the types of violations that can be reported through the whistleblowing system, the whistle blowing method, protection for and assurance of the confidentiality of whistle blower, handling of complaints, the managing body party, and the results of handling and following up on violation reports.</p>
8.	<p>Emiten memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Issuers shall have a policy for long-term incentives to the BoD and employees.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang Perseroan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang Perseroan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja Perseroan dalam jangka panjang. - Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Emiten untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Emiten. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Emiten dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Emiten yang ada. 	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 7 Butir 6</p> <p>The Company has implemented Principle 7 Point 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Long-term incentives are incentives that are based on the achievement of long-term performance. Long-term incentive plans have the premise that the company's long-term performance is reflected by the growth in the value of the stock or other long-term targets of the company. Long-term incentives are used to maintain loyalty and provide motivation to the BoD and employees to increase their performance or productivity which will have an impact on increasing the company's performance in the long term. - The existence of a long-term incentive policy is a real commitment of the Issuer to encourage the implementation of providing long-term incentives to the BoD and Employees with terms, procedures and forms that are adapted to the Issuer's long-term goals. The policy may include, among others, the intent and purpose of providing long-term incentives, terms and procedures in providing incentives, and conditions and risks that must be considered by Issuers in providing incentives. This policy may also be included in the Issuer's existing remuneration policy.
<p>8 Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8 : Improving the Implementation of Information Disclosure.</p>				
1.	<p>Emiten memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs <i>Web</i> sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Issuers shall capitalize on the broader use of information technology instead of just relying on its official Website as a medium for information disclosure.</p>	<p>Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Emiten yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui Pemegang Saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs <i>Web</i> diharapkan Perseroan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi Perseroan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya Perseroan.</p>	<p>Perseroan sudah menerapkan Prinsip 8 Butir 1</p> <p>The Company has implemented Principle 8 Point 1</p>	<p>The use of information technology can be useful as a medium for information disclosure. The information disclosure that is carried out is not only information disclosure that has been regulated in laws and regulations, but also other information related to the Issuer that is considered useful for shareholders or investors to know. With the broader use of information technology other than just official Website, it is hoped that the Company can increase the effectiveness of disseminating its corporate information. Nevertheless, the use of information technology is carried out with due regard to the benefits and costs of the company.</p>

No	Prinsip dan Rekomendasi Principle and Recommendation	Penjelasan	Penerapan di Perseroan Implementation in the Company	Explanation
	<p>2. Laporan Tahunan Emiten mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Emiten paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Emiten melalui Pemegang Saham utama dan pengendali.</p> <p>Issuer's Annual Report shall disclose the ultimate beneficial owner in the Issuer's share ownership at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the Issuer's share ownership through the major and controlling shareholders.</p>	<p>Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Emiten telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai Pemegang Saham utama dan pengendali Emiten baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Emiten paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh Pemegang Saham utama dan pengendali.</p>	<p>Perseroan Perseroan sudah menerapkan Prinsip 8 Butir 2 Perseroan sudah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% (lima persen) dalam Laporan Tahunan.</p> <p>The Company The Company has implemented Principle 8 Point 2 The Company has disclosed the ultimate beneficial owner in the Company's share ownership of at least 5% (five percent) in the Annual Report.</p>	<p>The laws and regulations in the Capital Markets sector that regulate the submission of the Issuer's annual report have regulated the obligation to disclose information regarding shareholders who own 5% (five percent) or more of the Issuer's shares, as well as the obligation to disclose information about the main and controlling shareholders of the Issuer either directly or indirectly to the ultimate beneficial owner in the ownership of the shares. In this Governance Guidelines, it is recommended to disclose the ultimate beneficial owner of the Issuer's share ownership of at least 5% (five percent), in addition to disclosing the ultimate beneficial owner of share ownership by the major and controlling shareholders.</p>

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Corporate Social Responsibility

Komitmen Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Commitment to the Implementation of Corporate Social Responsibility	250	Anggaran TJSL Tahun 2021 2021 CSR Budget	253
Dasar Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Basis for the Implementation of The Corporate Social Responsibility Program	251	Kaleidoskop Kegiatan TJSL Tahun 2021 CSR Activities In 2021	253
Praktik Standar Keberlanjutan bagi Proyek Infrastruktur Standard Sustainability Practices for Infrastructure Projects	251	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Hak Asasi Manusia Corporate Social Responsibility Related to Human Rights	254
Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan baik yang Merupakan Kewajiban Maupun yang Melebihi Kewajiban serta Program yang Melebihi Tanggung Jawab Minimal Scope of Corporate Social Responsibility as Liability or One That Exceeds Liability and Programs that Exceed Minimum Responsibilities	252	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Operasi yang Adil Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations	257
		Pembahasan Lengkap Mengenai Kebijakan dan Kegiatan TJSL Tahun 2021 A More Detailed Discussion of CSR Policies and Activities In 2021	259





Perseroan berkomitmen untuk berperan sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia dengan berpegang teguh pada 8 (delapan) Prinsip Sosial dan Lingkungan (SEP) IIF. Sinergi bersama para Pemangku Kepentingan diperlukan untuk membawa dampak positif bagi Perseroan pada jangka panjang.

The Company is committed to acting as a catalyst of sustainable infrastructure development in Indonesia by adhering to IIF's 8 (eight) Social and Environmental Principles (SEP). Synergy with the Stakeholders is necessary to gear the Company's positive trend over the long term.

KOMITMEN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Commitment to the Implementation of Corporate Social Responsibility

Keberhasilan Perseroan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan tidak lepas dari dukungan yang tiada henti diberikan oleh para pemangku kepentingan. Selaras dengan visi dan misinya, Perseroan memegang teguh komitmen untuk memenuhi standar keberlanjutan dengan menggunakan pendekatan keseimbangan antara aspek komersial, aspek lingkungan dan aspek sosial agar memberikan nilai yang optimal kepada pemangku kepentingan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur, Perseroan berkomitmen untuk berperan sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan perannya, Perseroan menerapkan 8 (delapan) Prinsip Sosial dan Lingkungan (SEP) IIF:

1. Sistem Pengelolaan dan Penilaian Sosial dan Lingkungan;
2. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja;
3. Pencegahan dan Pengurangan Polusi dan Perubahan Iklim;
4. Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Keamanan;
5. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela;
6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
7. Masyarakat Adat; dan
8. Benda dan Warisan Budaya.

Kedelapan prinsip di atas merupakan standar global yang berasal dari perlindungan praktik terbaik internasional. Sebagai wujud komitmen terhadap implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Perseroan hanya menyalurkan pembiayaan untuk proyek-proyek yang tunduk dan memenuhi kriteria penilaian delapan prinsip tersebut.

Sepanjang tahun 2021, Perseroan berhasil menjalankan program dan kegiatan TJSL meskipun dengan keterbatasan karena pandemi COVID-19. Perseroan meyakini sinergi bersama para Pemangku Kepentingan diperlukan untuk membawa dampak positif pada jangka panjang.

The Company's success in running a sustainable business is inseparable with the endless support of its various stakeholders. In line with its vision and mission, the Company is strongly committed to satisfying sustainability standards through a balanced approach among commercial aspect, environmental aspect and social aspect for an optimum value delivered to the Stakeholders.

As an institution specializing in infrastructure financing, the Company is committed to acting as a catalyst of sustainable infrastructure development. Therefore, in realizing its role, the Company applies IIF's 8 (eight) Social and Environmental Principles (SEP):

1. Social and Environmental Management and Assessment System;
2. Labor and Working Conditions;
3. Pollution and Climate Change Prevention and Reduction;
4. Public Health, Safety, and Security;
5. Land Acquisition and Involuntary Resettlement;
6. Biodiversity Conservation and Natural Resources Management;
7. Indigenous People; and
8. Cultural Objects and Heritage.

All principles are proven to be global rated standards as it is adopted from the international best practices safeguard. Executing our commitment to the implementation of corporate social responsibility (CSR), the Company provides financing strictly to projects that are compliant and eligible based on the assessments of the eight SEPs.

Throughout 2021, the Company managed to conduct its CSR programs and activities albeit limitation due to the COVID-19 pandemic. The Company believes a synergy with Stakeholders is necessary in gearing a positive trend over the long term.

DASAR PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Basis for the Implementation of the Corporate Social Responsibility Program

1. Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
 3. Prinsip-Prinsip Sosial & Lingkungan IIF
1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
 2. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies
 3. IIF Social & Environmental Principles

PRAKTIK STANDAR KEBERLANJUTAN BAGI PROYEK INFRASTRUKTUR

Standard Sustainability Practices for Infrastructure Projects

Kemajuan pembangunan infrastruktur berkorelasi secara langsung dan tidak langsung terhadap kemakmuran suatu negara karena dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian.

Perseroan menyadari bahwa selain memiliki efek pengganda, pembangunan infrastruktur juga memiliki potensi risiko yang melekat. Misalnya, dapat berdampak pada penduduk lokal di area proyek serta ekosistemnya. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan berkolaborasi dan bekerja sama dengan Pemangku Kepentingan dalam mengatasi potensi masalah yang ada. Ini menunjukkan pentingnya menilai semua aspek proyek melalui evaluasi keberlanjutan yang menyeluruh dan rasional.

IIF menempatkan SEP sebagai pedoman dalam menangani aspek sosial dan lingkungan pada setiap komitmen untuk pembiayaan infrastruktur maupun bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dibiayai. Diharapkan setiap proyek infrastruktur tersebut mampu memenuhi standar S&E. Dengan cara ini, IIF secara langsung mendukung keberlanjutan di berbagai proyek dengan melibatkan pihak eksternal dalam memastikan pemenuhan aspek S&E dengan spesifikasi S&E tertentu.

Infrastructure developments correlates directly and indirectly to a nation's prosperity because of its multiplier effect to the economy.

Alongside with its multiplier effect, the Company acknowledges the potential risk inherent to the infrastructure development. For instance, it can be impacted to the local residents in the project areas as well as its ecosystem. To mitigate such risks, the Company collaborates and cooperates with Stakeholders in addressing these potential issues. This exhibits the importance of assessing all aspects of the project through a thorough and rational sustainability evaluation.

IIF views SEP as a guidance in upholding social and environmental aspects in every infrastructure financing commitment as well as in providing technical assistance to the projects it finances. It is expected that each of these infrastructure projects are able to satisfy the S&E standards. By this practice, IIF is directly promoting sustainability in various projects with the involvement of external parties in supporting the fulfillment of S&E aspects with specific S&E specifications.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAIK YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN SERTA PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL

Scope of Corporate Social Responsibility as Liability or One that Exceeds Liability and Programs that Exceeds Minimum Responsibilities

Pelaksanaan kegiatan TJSJ merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, program dan kegiatan TJSJ Perseroan selalu mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan utama dengan tetap mempertahankan ciri khas IIF. Selain menjalankan tanggung jawab sosial sebagaimana diamanatkan oleh regulator dan SEP, Perseroan juga menjalankan kegiatan TJSJ yang sifatnya melebihi, antara lain:

The Company's CSR activities are a form of responsibility fulfillment to the stakeholders. Therefore, the Company's CSR programs and activities have always considered the aspirations of its key stakeholders while maintaining the distinctive trait of IIF. In addition to fulfilling the social responsibilities mandated by regulators and SEP, the Company also carries out other beyond compliance CSR activities including:

Kegiatan Activity	Program dan/atau Kegiatan TJSJ yang Melebihi Kewajiban dan Tanggung Jawab Minimal	Beyond Obligation and Beyond CSR Programs and/or Activities
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan Employee Occupational Health and Safety	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan mengenai rencana perjalanan yang aman bagi karyawan, kebijakan bekerja dari rumah, serta penandatanganan dokumen legal; 2. Pembentukan Satgas COVID-19; 3. Penggantian biaya uji usap PCR, <i>rapid test</i>, dan pembelian vitamin; 4. Menyediakan fasilitas ruang laktasi yang nyaman bagi karyawan perempuan yang sedang menyusui; 5. Pelatihan gabungan dengan S&E terkait Keselamatan & Kesehatan, termasuk penunjukan <i>floor warden</i> untuk menangani kejadian gawat darurat yang membutuhkan evakuasi. 6. Penggunaan <i>e-signature</i> untuk meminimalisir adanya kontak antar penandatanganan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Policy issuance regarding employee safe travel plan, work from home and signing of legal documents; 2. Establishment of The COVID-19 Task Force; 3. Reimbursement for expenses related to PCR swab tests, rapid tests, and purchase of vitamins; 4. Provision of comfortable lactation room facilities for employees who are breastfeeding; 5. Joint training with S&E in conducting Safety & Health awareness sessions, including appointment of floor warden in case of emergency evacuation. 6. The Use of e-signature to minimize contact among the signatories.
Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Environment Conservation and Natural Resources	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdepan dalam pembiayaan energi terbarukan untuk menurunkan penggunaan sumber energi yang tidak terbarukan sekaligus mendorong pembangkit energi ramah lingkungan; 2. Penyediaan botol air yang dapat digunakan kembali untuk seluruh karyawan; 3. Penggunaan bahan daur ulang untuk galon air isi ulang dan kertas bekas untuk keperluan internal dan pencetakan <i>draft</i> kerja; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leading in renewable energy projects financing to reduce non-renewable energy sources and in boosting environmentally-friendly generation of energy; 2. Provision of reusable water tumblers for all employees; 3. Recycle material usage for refillable water gallons and used paper for internal purpose and working drafts printing;

Kegiatan Activity	Program dan/atau Kegiatan TJSL yang Melebihi Kewajiban dan Tanggung Jawab Minimal	Beyond Obligation and Beyond CSR Programs and/or Activities
Kesejahteraan Masyarakat yang tinggal di Lokasi Proyek Community Welfare living on the Project Site	<ol style="list-style-type: none"> Pembelian Idul Kurban Tahunan. Tahun ini, Perseroan membeli dan mendistribusikan Kurban di sekitar lokasi proyek di Jawa dan Sulawesi; Pembentukan <i>Grievance Redress Mechanism</i> (GRM) pada tahun 2017 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2018. 	<ol style="list-style-type: none"> Annual <i>Idul Qurban</i> purchase. This year, the Company purchased and distributed Qurban in surrounding project sites in Java and Sulawesi; Establishment of Grievance Redress Mechanism (GRM) in 2017 and began its implementation in 2018.
Program-Program Anti Korupsi Anti-Corruption Programs	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Komite Pencegahan Pelanggaran dan Kecurangan (FCPC) untuk membahas dan memutuskan kasus-kasus dugaan penipuan dan korupsi serta tindakan yang akan diambil (seperti investigasi dan eskalasi ke pihak penegak hukum); Pelatihan rutin terkait anti-korupsi. 	<ol style="list-style-type: none"> Establishment of Fraud and Corruption Prevention Committee (FCPC) to discuss and decide on suspected fraud and corruption cases and actions to be taken (such as investigation and escalation to law enforcement); Regular training on Anti-Corruption.

ANGGARAN TJSL TAHUN 2021 2021 CSR Budget

Pada tahun 2021, Perseroan merealisasikan total anggaran TJSL sebesar lebih dari Rp456 juta yang penggunaannya berfokus pada penanggulangan penyebaran virus COVID-19, bencana alam, kesejahteraan masyarakat di lokasi proyek, pemberdayaan wanita, dan sosial. Penganggaran dan pemilihan program TJSL diusulkan oleh Divisi Corporate Secretary atas persetujuan Presiden Direktur.

In 2021, the Company has invested over Rp456 million Rupiah for CSR program focusing in supporting to curb the spread of COVID-19, natural disaster, community welfare living on the project site, women, and social empowerment. Budgeting and selection of programs are all proposed by the Corporate Secretary Division with the consent of the President Director.

KALEIDOSKOP KEGIATAN TJSL TAHUN 2021 CSR Activities in 2021

- Bekerja sama dengan *Special Mission Vehicles* (SMV) lainnya dalam memerangi penyebaran virus COVID-19;
- Bekerja sama dengan SMV lainnya pada saat terjadi bencana alam;
- Pembelian hewan kurban tahunan. Perseroan secara langsung melibatkan klien dan menyumbangkan hewan kurban di sekitar lokasi proyek di Pulau Jawa dan Sulawesi;
- Berkolaborasi dengan institusi pendidikan untuk menyusun program yang tepat dan spesifik berfokus pada pemberdayaan sosial.
- Collaboration with other Special Mission Vehicle (SMV) in fighting the spread of COVID-19;
- Collaboration with other SMV during natural disasters;
- Annual qurban purchase. The Company directly engages with its clients to contribute qurban in project sites in Java and Sulawesi Island;
- Collaboration with an educational institution to construct a precise and distinctive program focusing on social empowerment.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Corporate Social Responsibility Related to Human Rights

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TJSI TERHADAP HAM

Perseroan menempatkan karyawan sebagai pemangku kepentingan utama yang berperan besar dalam mendukung kinerja dan keberlangsungan usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen tersebut diwujudkan melalui praktik bisnis yang kondusif yang bebas dari tindakan diskriminasi, memberikan keleluasaan untuk berserikat, memberlakukan pengaturan waktu kerja, pemberian izin atau cuti karena kondisi darurat, dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk beribadah. Untuk mendukung hal ini, Perseroan telah merumuskan empat poin utama dalam Kode Etik yang harus dipatuhi oleh seluruh insan IIF. Dengan adanya Kode Etik, Perseroan berharap seluruh karyawan senantiasa bersikap sesuai dengan nilai-nilai budaya perusahaan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM.

PERUMUSAN LINGKUP KEGIATAN TJSI PADA ASPEK HAM

Sebagai lembaga keuangan non-bank, isu HAM yang berkaitan langsung dengan aktivitas Perseroan adalah dalam bidang ketenagakerjaan dimana hal tersebut berkaitan dengan SEP Nomor 2: Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja;

Perseroan melibatkan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait HAM melalui proses diskusi yang mengikutsertakan unit-unit kerja. Selain itu, Perseroan juga melakukan evaluasi berkala terhadap praktik IIF untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ISU DAN RISIKO TERKAIT HAM YANG RELEVAN DENGAN LINGKUP BISNIS IIF

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berkaitan dengan pengembangan proyek dan hubungan industrial dengan karyawannya IIF senantiasa mematuhi kebijakan internal dan aturan eksternal yang berlaku.

Selain mematuhi peraturan internal, Perseroan juga sangat patuh dalam menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI.

Perseroan secara berkala mengevaluasi peraturan dan kebijakan internal untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis IIF sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN PELANGGARAN ATAU KONFLIK HAM

Perseroan memiliki *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pengaduan atas dugaan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh insan IIF, termasuk pengaduan terkait isu HAM. Semua laporan pengaduan yang masuk ke dalam WBS segera ditindaklanjuti dan ditinjau sesuai dengan *Standard Operation Procedure* yang berlaku di IIF.

CSR COMMITMENTS AND POLICIES ON HUMAN RIGHTS

The Company believes that its employees are vital stakeholders in supporting the performance and sustainability of the Company's business. Therefore, the Company respects Human Rights (HAM) in the work environment as outlined in the regulatory provisions. This commitment is manifested by a conducive business environment that is free from discrimination, and provides freedom of association, work time arrangements, permits or leave in emergency situations, and opportunities for employees to practice their religious beliefs. To support this, the Company has formulated four main points in the Code of Ethics that must be followed by all IIF employees. The Company aims that with the Code of Ethics in place, all employees will behave in accordance with the Company's corporate values and always uphold the principles of human rights.

CSR ACTIVITIES IN THE AREA OF HUMAN RIGHTS

As a non-banking financial institution, the relevant human rights issues to the Company's activities are in relations to the employment which is related to SEP No. 2: Labor and Working Conditions;

The Company involves stakeholders in formulating policies related to human rights through discussions with working units. In addition, the Company also makes periodic evaluations of IIF's business practices to ensure that no applicable laws and regulations are violated.

HUMAN RIGHTS ISSUES AND RISKS RELATED TO IIF'S SCOPE OF BUSINESS

To prevent any possibility in human rights violations related to projects development and industrial relations with its employees, IIF is highly compliant to the internal policies and external regulations.

Aside from internal regulations, the Company is highly compliant in reporting the circumstance of its employees to the Ministry of Manpower.

The Company periodically evaluates its internal regulations and policies to ensure that all of IIF's business activities remain compliant with existing laws and regulations.

COMPLAINTS MECHANISM AND PROCEDURES FOR HUMAN RIGHTS VIOLATIONS

The Company has a *Whistleblowing System* (WBS) for reporting alleged violations committed by IIF employees, including cases related to human rights. All complaint reports received by the WBS are followed up immediately, and deliberated in accordance to the existing *Standard Operation Procedure* of IIF.

Penyediaan *platform* pengaduan ini menjadi bagian dari realisasi komitmen Perseroan dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perseroan secara berkala meninjau efektivitas WBS serta memastikan bahwa seluruh karyawan IIF telah memahami keberadaan dan fungsi WBS di Perseroan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai WBS dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di dalam Laporan Tahunan ini.

PERENCANAAN KEGIATAN TJSL BERKAITAN DENGAN HAM

Setiap tahun, Perseroan menargetkan nihil pelanggaran HAM di lingkungan kerja dan di lokasi proyek. Perseroan berkomitmen untuk memperlakukan semua karyawan dan para pemangku kepentingan dengan penuh rasa hormat. Seluruh kegiatan TJSL yang berfokus pada HAM dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan yang saling menghormati dan rasional antara Perseroan sebagai sebuah institusi dan karyawannya.

PELAKSANAAN INISIATIF KEGIATAN TJSL YANG MENDUKUNG TERLAKSANANYA PENEGAKKAN UNSUR-UNSUR HAM

Sepanjang tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan sejumlah kegiatan TJSL yang berfokus pada HAM, di antaranya:

1. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Mengacu pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"), Perseroan memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk berserikat dan berkumpul, dengan tetap mengindahkan pokok-pokok Kode Etik Perusahaan.

2. Kerja Paksa

Jam kerja karyawan IIF adalah 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, tidak termasuk waktu istirahat. Ketentuan tersebut selaras dengan pasal 77 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu, bagi karyawan dengan tugas dan tanggung jawab tertentu yang karena sifat pekerjaannya diharuskan hadir setiap saat untuk kepentingan Perseroan maka waktu kerjanya diatur terpisah. Setiap karyawan dipastikan bekerja dengan waktu normal dan memiliki waktu istirahat yang cukup.

3. Kesetaraan pada Proses Rekrutmen

Perseroan membuka kesempatan kerja kepada siapapun tanpa membedakan *gender*, suku, ras dan agama sepanjang para kandidat dapat memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi *vacant*. Perseroan memastikan terselenggaranya proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang objektif dan transparan.

4. Pekerja di Bawah Umur

Sebagai perusahaan yang taat aturan, Perseroan memastikan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Hal ini tercermin dari kriteria rekrutmen karyawan IIF yang hanya menjangkau kandidat pada usia produktif.

This complaint platform is a part of the Company's commitment to implement the principles of good governance. The Company periodically reviews the effectiveness of its WBS and ensures that all IIF employees are aware of the pace of the system.

More information about the WBS can be found in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

CSR ACTIVITIES RELATED TO HUMAN RIGHTS

Annually, the Company aims for zero human rights violations in its work environment and any project-related conditions. The Company is committed to treating its employees and stakeholders with the utmost respect. All CSR activities that focus on human rights are designed to exhibit a respectful and rational relationship between an institution and its people.

IMPLEMENTATION OF CSR INITIATIVES THAT SUPPORT THE ENFORCEMENT OF HUMAN RIGHTS

Throughout 2021, the Company carried out a number of CSR activities that focused on human rights, including:

1. Freedom of Association and Assembly

Referring to Article 24 paragraph (1) of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights ("HAM Law"), the Company gives each employee the freedom to associate and assemble without neglecting the main points of the Company's Code of Ethics.

2. Forced Labor

The working hours of IIF employees are 8 hours a day or 40 hours a week, excluding break intervals. This is in line with Article 77 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Meanwhile, for employees with certain duties and responsibilities who due to the nature of their work are required to be present at any time for the benefit of the Company, their working hours are arranged separately. Each of the Company's employees can be assured of standard working hours and a sufficient time to rest.

3. Equality in the Recruitment Process

The Company offers employment opportunities to everybody regardless of their gender, ethnicity, race and religion as long as they meet the requirements and qualifications needed to fill a vacant position. The Company ensures the implementation of an objective and transparent employee recruitment and selection process.

4. Underage Workers

As a law-abiding corporation, the Company does not employ underage workers. This is reflected through IIF's employee recruitment criteria, according to which all candidates must be of productive age.

5. Izin Cuti

Dalam rangka menunjang produktivitas karyawan, Perseroan memberikan izin atau cuti yang berbeda-beda kepada setiap karyawan sesuai dengan masa kerja dan level jabatan masing-masing. Selain memberikan cuti tahunan, Perseroan juga mengatur cuti khusus untuk menjalankan ibadah (ziarah), cuti kedukaan, cuti di luar tanggungan, cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti gugur kandungan bagi karyawan wanita.

6. Remunerasi yang Adil

Perseroan telah menerapkan sistem remunerasi yang adil dan kompetitif agar setiap karyawan terpacu dan memiliki semangat untuk selalu memberikan kinerja terbaiknya bagi Perseroan.

DAMPAK KEGIATAN DAN PENCAPAIAN TJSJL BIDANG HAM

Sepanjang tahun 2021, Perseroan tidak menerima laporan dari karyawan maupun pihak-pihak lain atas pelanggaran HAM di lingkungan IIF. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan TJSJL terkait HAM sudah selaras dengan penghormatan terhadap unsur-unsur HAM.

PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAM

Pada tahun 2021, Perseroan tidak menerima penghargaan yang secara spesifik berkaitan dengan isu Hak Asasi Manusia.

BIAYA TJSJL BIDANG HAM TAHUN 2021

Perseroan tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan TJSJL di bidang HAM. Tahun 2021, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan HAM mencakup pemberdayaan perempuan dan sosial. Selain itu, sosialisasi khususnya terkait ketenagakerjaan dilakukan dengan mengoptimalkan *platform* internal yang ada.

5. Leave

To support employee productivity, the Company provides employees with different permits or leave depending on their period of service and position level. In addition to providing annual leave, the Company arranges special leave for religious activities (pilgrimage), leave for mourning, unpaid leave, menstrual leave, and maternity and miscarriage leave for female employees.

6. Fair Remuneration

The Company has implemented a fair and competitive remuneration system to motivate each employee to deliver their best performance.

IMPACT OF CSR ACTIVITIES ON HUMAN RIGHTS

Throughout 2021, the Company did not receive any reports from the employees nor other parties regarding incidents of human rights violations within IIF. This shows the success of the Company's human rights-related CSR activities.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AWARDS IN THE AREA OF HUMAN RIGHTS

In 2021, the Company did not receive any awards in the area of Human Rights.

CSR EXPENSES IN THE AREA OF HUMAN RIGHTS IN 2021

The Company does not allocate specific budget for its CSR activities in the area of human rights. Activities related to human rights in 2021 are include women and social empowerment. In addition, socialization activities especially in terms of employment are carried out through existing internal platforms.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TJSL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Sebagai warga korporasi yang baik, Perseroan selalu berupaya menghadirkan iklim kerja yang sehat bagi karyawan dan juga pihak lain yang terlibat langsung dalam proses bisnis IIF. Untuk mewujudkannya, Perseroan berkomitmen untuk mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional bisnis sehari-hari, serta menerapkan praktik-praktik operasi yang adil.

Pelaksanaan praktik operasi yang adil didasari bahwa sebagai entitas bisnis yang independen di bidang pembiayaan infrastruktur, Perseroan harus menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan bisnisnya, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memiliki berbagai perangkat kebijakan internal yang mengatur pelaksanaan operasi yang adil. Termasuk di antaranya, meliputi Peraturan Perusahaan, Kebijakan Pengendalian Internal, WBS, Kode Etik Perusahaan, serta Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

PERUMUSAN LINGKUP KEGIATAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASI YANG ADIL

Seluruh operasional bisnis IIF dipastikan tidak menyalahi ketentuan atau peraturan persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Perseroan menjamin setiap pihak yang berkepentingan mendapat perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup pelaksanaan operasi yang adil di Perseroan mencakup kegiatan pencegahan *fraud*, WBS, pengadaan barang dan jasa yang transparan, kompetisi sehat, serta praktik anti-korupsi.

ISU DAN RISIKO TERKAIT OPERASI YANG ADIL SESUAI DENGAN LINGKUP BISNIS IIF

Perseroan melakukan evaluasi menyeluruh atas penerapan kebijakan dan prosedur internalnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah segala kemungkinan risiko apabila Perseroan mengabaikan unsur-unsur persaingan sehat. Termasuk risiko reputasi dan risiko hukum. Dengan mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang berlaku, Perseroan yakin dapat mengelola permasalahan terkait operasi yang adil.

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN PELANGGARAN ATAU KONFLIK PELANGGARAN OPERASI YANG ADIL

Sebagaimana diulas pada topik sebelumnya, Perseroan mengoptimalkan fungsi WBS sebagai sarana pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan IIF, termasuk pelanggaran atas praktik operasi yang adil.

CSR COMMITMENT AND POLICIES RELATED TO FAIR OPERATIONS

As a good corporate citizen, the Company strives to provide a healthy work environment for its employees and other parties who are directly involved in IIF's business processes. To achieve this, the Company is committed to prioritizing the principles of corporate governance in daily business operations, as well as implementing fair operational practices.

The implementation of fair operational practices is rooted as an independent business entity with expertise in infrastructure financing, the Company must manage its business with integrity, create a fair climate of business competition, and remain in full compliance with all regulatory provisions.

The Company has various internal policies regulating the enforcement of fair operations. These include Company Regulations, Internal Control Policy, WBS, Company Code of Ethics, and Goods and Services Procurement Policy.

THE SCOPE OF ACTIVITIES RELATED TO FAIR OPERATIONS

IIF ensures that all of its business operations do not violate the provisions or regulations in the area of fair business competition. The Company guarantees that each of its stakeholders receives fair treatment in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. The area of fair operations at the Company includes fraud prevention activities, WBS, transparent procurement of goods and services, ensuring healthy competition, and anti-corruption practices.

ISSUES AND RISKS RELATED TO FAIR OPERATIONS BASED ON IIF'S SCOPE OF BUSINESS

The Company makes thorough evaluations of the implementation of its internal policies and procedures. This aims to prevent any possible risks that may arise should the Company neglect the elements of fair competition. These include reputation risk and legal risk. By complying with all applicable regulations and policies, the Company is assured that it can manage any fair corporate operations issues.

FAIR OPERATIONS COMPLAINTS MECHANISM AND PROCEDURES FOR DEALING WITH BREACHES AND CONFLICTS

As discussed, the Company uses its WBS as a means of reporting violations allegedly committed by IIF employees, including reports related to violations of fair operations.

PERENCANAAN KEGIATAN TJSJ BERKAITAN DENGAN OPERASI YANG ADIL

Kegiatan operasional bisnis Perseroan tunduk pada pokok-pokok Kode Etik Perusahaan dan terbebas dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh sebab itu, Perseroan secara berkala mensosialisasikan Kode Etik Perusahaan kepada seluruh insan IIF untuk memastikan kegiatan yang mereka lakukan sejalan dengan nilai-nilai perusahaan.

PELAKSANAAN INISIATIF KEGIATAN TJSJ YANG MENDUKUNG TERLAKSANYA KEGIATAN OPERASI YANG ADIL

Sepanjang tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan sejumlah kegiatan TJSJ yang berfokus pada terlaksananya kegiatan operasi yang adil, di antaranya:

1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan

Perseroan menjamin terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prosedur internal yang berlaku. Sepanjang tahun 2021, tidak ada temuan audit pada proses pengadaan barang dan/atau jasa IIF, baik berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Unit Audit Internal (UAI) maupun oleh pihak independen yang berwenang.

2. Kebijakan Anti-Korupsi

Dalam rangka mewujudkan iklim kerja yang sehat dan bebas dari praktik KKN, Perseroan memiliki dan menginternalisasi Kebijakan Anti-Korupsi yang wajib dipatuhi oleh seluruh unsur Perseroan. Dengan adanya kebijakan tersebut, Perseroan berharap seluruh kegiatan usaha IIF dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

3. Whistleblowing System (WBS)

Perseroan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan implementasi WBS untuk menguji sejauh mana efektivitas media pelaporan tersebut. Perseroan berkomitmen akan selalu menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk serta memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada para pelapor.

CSR ACTIVITIES RELATED TO FAIR OPERATIONS

The Company's business operations are subject to the Company's Code of Ethics and free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN). For this reason, the Company periodically disseminates the Company's Code of Ethics to all IIF employees to ensure that their activities are in line with the company's values.

CSR ACTIVITIES THAT SUPPORT FAIR OPERATIONS

Throughout 2021, the Company carried out a number of CSR activities that focused on the implementation of fair operations, including:

1. Transparent Procurement Process of Goods and Services

The Company guarantees a transparent and accountable procurement process for goods and services, in accordance with applicable internal procedures. Throughout 2021, there were no audit findings on the procurement process of IIF goods and/or services, based on the results of the audit conducted by either the Internal Audit Unit (UAI) or an independent authorized party.

2. Anti-Corruption Policy

In order to create a healthy work environment and KKN-free practices, the Company has an Anti-Corruption Policy that must be followed by all of the Company's employees. With this policy, the Company hopes that all of IIF's business activities are run in accordance with the principles of good governance.

3. Whistleblowing System (WBS)

The Company makes periodic evaluations of its WBS policies and implementation to test the effectiveness of the reporting media. The Company is committed to following up every complaint and the provision of fair and equal treatment to all whistleblowers.



DAMPAK KEGIATAN DAN PENCAPAIAN TJSL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Sepanjang tahun 2021, Perseroan tidak ada laporan pelanggaran mengenai persaingan usaha atau pelaksanaan operasi yang adil. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh insan IIF sudah memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh untuk selalu mengindahkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Gold Rank and A Commendation for First Year Participation in the Asian Sustainability Reporting Rating Award 2021

Penghargaan tingkat internasional merupakan pencapaian yang berarti bagi kami. Ini menandakan kepercayaan yang besar dari pihak eksternal terhadap proses bisnis IIF. Penghargaan ini memacu kami untuk terus berkontribusi dengan baik bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

BIAYA TJSL TERKAIT OPERASI YANG ADIL TAHUN 2021

Perseroan tidak mengeluarkan biaya khusus untuk merealisasikan kegiatan TJSL terkait operasi yang adil. Kegiatan sosialisasi terkait operasi yang adil dilakukan dengan mengoptimalkan *platform* internal yang ada.

IMPACT AND ACHIEVEMENTS OF CSR ACTIVITIES RELATED TO FAIR OPERATIONS

Throughout 2021, the Company did not receive any reports of violations in the area of business competition or fair operations. This achievement shows that all IIF Employees are fully aware of the principles of good governance when discharging their duties and responsibilities.

AWARDS FOR THE FAIR OPERATIONS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVE

Gold Rank and A Commendation for First Year Participation in the Asian Sustainability Reporting Rating Award 2021

This international award is a significant achievement for the Company as it indicates that external parties trust IIF's business processes. This award motivates us to continuously contribute to Indonesia's national building program and sustainable development.

CSR EXPENSES RELATED TO THE AREA OF FAIR OPERATIONS IN 2021

The Company does not set aside a specific budget for the realization of CSR activities related to fair operations. Socialization activities related to fair operations are carried out through existing internal platforms.

PEMBAHASAN LENGKAP MENGENAI KEBIJAKAN DAN KEGIATAN TJSL TAHUN 2021

A More Detailed Discussion of CSR Policies and Activities in 2021

Sebagaimana diatur dalam ketentuan SE OJK 16/SEOJK.04/2021 ("SE OJK 16/2021") tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik disebutkan bahwa seluruh informasi mengenai kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan merupakan laporan yang terintegrasi dengan Laporan Tahunan ini.

As stipulated in the provisions of SE OJK 16/SEOJK.04/2021 ("SE OJK 16/2021") regarding the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies, all information regarding social and environmental responsibility activities has to be disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from this Annual Report. The Sustainability Report is an integrated report with this Annual Report.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Statement of the Board of Commissioners on the Responsibility for the 2021 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Indonesia Infrastructure Finance tahun 2021 telah dimuat secara lengkap, dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

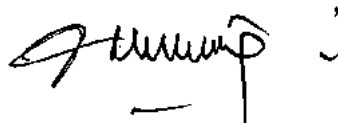
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information disclosed in the 2021 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance is presented in its entirety, and we are fully responsible for the contents of this Annual Report.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Maret/March 2022

Dewan Komisaris Board of Commissioners



Darmin Nasution

Presiden Komisaris & Komisaris Independen
President Commissioner & Independent Commissioner



V. Sonny Loho

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Rinaldi Firmansyah

Komisaris Independen
Independent Commissioner



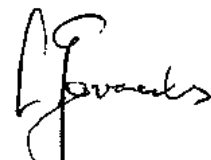
Yon Aرسال

Komisaris
Commissioner



Bhimantara Widjajala

Komisaris
Commissioner



Lodewijk Govaerts

Komisaris
Commissioner



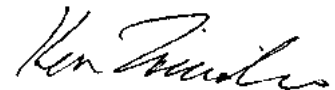
Andreas Zeisler

Komisaris
Commissioner



Richard Ranken

Komisaris
Commissioner



Ken Tomisaki

Komisaris
Commissioner

PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Statement of the Board of Directors on the Responsibility for the 2021 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Indonesia Infrastructure Finance tahun 2021 telah dimuat secara lengkap, dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information disclosed in the 2021 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance is presented in its entirety, and we are fully responsible for the contents of this Annual Report.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Maret/March 2022

Direksi Board of Directors



Reynaldi Hermansjah

Presiden Direktur & *Chief Executive Officer*
dan Plt. Direktur Keuangan*
President Director & Chief Executive Officer
and Interim Chief Financial Officer*



I Made Wiracita Tantra

Direktur Pelaksana & *Chief Risk Officer*
Managing Director & Chief Risk Officer



Y. Bayu Wirawan

Direktur Pelaksana & *Chief Investment Officer*
Managing Director & Chief Investment Officer



Mohammad Ramadhan Harahap

Direktur Pelaksana & *Chief Investment Officer*
Managing Director & Chief Investment Officer

* Mulai menjabat per 1 November 2021
Begin serving as of 1 November 2021

PT Indonesia Infrastructure Finance

Laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2021 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements
As of December 31, 2021 and for the year then ended
with independent auditors' report

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Pages	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Statement of Directors</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2-3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4-5	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	6	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	7-142	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned below:

Nama	Reynaldi Hermansjah	Name
Alamat kantor	Prosperity Tower, Lantai/Floor 53-55, District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Office address
Alamat domisili atau sesuai KTP	Jl. Mertilang I Blok JE.6/27, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan	Domicile address or address according to ID
Nomor telepon	+62 21 5082 6600	Telephone number
Jabatan	Presiden Direktur & Plt. Direktur Keuangan/ President Director & Interim Chief Financial Officer	Title

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Indonesia Infrastructure Finance;</i> |
| 2. Laporan keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The financial statements of PT Indonesia Infrastructure Finance have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance telah dimuat secara lengkap dan benar; dan | 3. a. <i>All information in the financial statements of PT Indonesia Infrastructure Finance have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and</i> |
| b. Laporan keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The financial statements of PT Indonesia Infrastructure Finance do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Indonesia Infrastructure Finance. | 4. <i>We are responsible for the internal control system of PT Indonesia Infrastructure Finance.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 15 Februari 2022/Jakarta, February 15, 2022



Reynaldi Hermansjah
Presiden Direktur & Plt. Direktur Keuangan/
President Director & Interim Chief Finance Officer

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Prosperity Tower, 53rd - 55th Floor
District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P. +62 21 5082 6600
F. +62 21 5082 6601
E. info@iif.co.id
www.iif.co.id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00068/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/II/2022

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Indonesia Infrastructure Finance**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00068/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/II/2022

**The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Indonesia Infrastructure Finance**

We have audited the accompanying financial statements of PT Indonesia Infrastructure Finance, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00068/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/II/2022 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00068/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/II/2022 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Indonesia Infrastructure Finance as of December 31, 2021 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Christophorus Alvin Kossim

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681/Public Accountant Registration No. AP.1681

15 Februari 2022/ February 15, 2022



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2021	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	1.352.431	3e,3i,5,31	2.057.059	Cash and cash equivalents - net of allowance for impairment losses
Efek-efek - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	2.128.893	3e,6,31	2.470.048	Securities - net of allowance for impairment losses
Investasi saham	201.902	3e,8	396.720	Equity investments
Pinjaman diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	10.203.363	3e,9,31	9.197.486	Loans - net of allowance for impairment losses
Tagihan derivatif	210.780	3e,3s,7	69.265	Derivative receivables
Piutang bunga	96.148	10,31	86.840	Accrued interest income
Beban dibayar dimuka	6.861	3j,11	6.980	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	439	3q,28	344	Prepaid taxes
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	257.253	3k,3n,3o,12	276.883	Property and equipment - net of accumulated depreciation
Aset pajak tangguhan	70.405	3q,28	83.270	Deferred tax assets
Beban tangguhan	3.139	3l,13,31	21.328	Deferred charges
Aset lain-lain - setelah dikurangi akumulasi amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai	19.513	3m,14,31	18.149	Other assets - net of accumulated amortization and allowance for impairment losses
TOTAL ASET	14.551.127		14.684.372	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas derivatif	58.107	3e,3s,7	117.200	Derivative liabilities
Utang lain-lain	4.838	3f,15,31	5.897	Other payables
Utang pajak	1.612	3q,28	1.653	Taxes payable
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	64.673	3f,16,31	72.409	Accrued expenses and other liabilities
Pendapatan diterima dimuka	5.348	18	8.106	Unearned revenue
Pinjaman diterima	3.748.292	3f,19,31	5.378.793	Fund borrowings
Surat utang yang diterbitkan	4.029.707	3f,17,31	2.735.233	Debt securities issued
Liabilitas imbalan kerja	33.140	3r,29	27.499	Employee benefits obligation
Pinjaman subordinasi	4.383.902	3f,20,31	4.157.322	Subordinated loans
TOTAL LIABILITAS	12.329.619		12.504.112	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Capital stock - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar 2.000.000 saham				Authorized 2,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.000.000 saham	2.000.000	21	2.000.000	Subscribed and paid up 2,000,000 shares
Tambahan modal disetor	29.800	22	29.800	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain - neto	24.208	3e,6	45.389	Other comprehensive income - net
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(41.181)	3f,3s,7	(93.760)	Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges - net
(Kerugian)/keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai wajar - neto	(18.135)	3f,3s,7	25.647	Cumulative (loss)/gain on derivative instrument for fair value hedges - net
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	30.716	22	26.465	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	196.100		146.719	Unappropriated
TOTAL EKUITAS	2.221.508		2.180.260	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14.551.127		14.684.372	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2021	Catatan/ Notes	2020	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan bunga	874.739	3e,3p,23,31	859.928	Interest income
Pendapatan provisi dan komisi	57.971	3p,24,31	33.700	Provision and commission income
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek	6.138	3e,3p,6,31	7.562	Realized gain on sale of securities
Pendapatan jasa <i>advisory</i>	8.861	3p,31	9.388	Advisory income
Kerugian yang direalisasi dari transaksi derivatif	(1.233)	3e,3s,7	-	Realized loss from derivative transactions
Kerugian selisih kurs	(7.425)	3c	(3.739)	Loss from foreign exchange
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif	(3.305)	3e,3s,7	-	Unrealized loss from changes in fair value of derivative transactions
Pendapatan lainnya	15.349	3p,25	4.681	Other income
Total Pendapatan	951.095		911.520	Total Revenues
BEBAN				EXPENSES
Beban bunga	(645.242)	3p,27,31	(605.272)	Interest expense
Beban umum dan administrasi	(193.197)	3o,3p,26	(184.401)	General and administrative expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(34.884)	3e,5,6,9,14	(50.606)	Provision for impairment losses
Total Beban	(873.323)		(840.279)	Total Expenses
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	77.772		71.241	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK	(24.745)	3q,28	(28.731)	TAX EXPENSE
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	53.027		42.510	NET INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: (Penurunan)/kenaikan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(21.354)	3e,3h,6	20.710	Items that will be reclassified to profit or loss: (Decrease)/increase in fair value of securities classified as fair value through other comprehensive income
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas	64.404	3s,7	(77.530)	Effective portion on fair value changes from derivative instrument qualified as cash flow hedge
Perubahan neto atas cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(115)	3e,3h,6	(218)	Net changes in allowance for impairment losses of securities classified as fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(11.537)	3q,28	14.235	Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2021	Catatan/ Notes	2020	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: (lanjutan)				OTHER COMPREHENSIVE INCOME: (continued)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				<i>Items that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Keuntungan aktuarial	736	3r,29	346	<i>Actuarial gain</i>
Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai nilai wajar	139.509	3s,8	24.975	<i>Fair value changes from derivative instrument qualified as fair value hedge</i>
Perubahan nilai wajar investasi saham yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(194.818)	3s,8	7.084	<i>Fair value changes from equity investment classified as fair value through other comprehensive income</i>
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	11.396	3q,28	(6.495)	<i>Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss</i>
Total rugi komprehensif lain	(11.779)	3q	(16.893)	<i>Total other comprehensive loss</i>
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	41.248		25.617	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA PER SAHAM				INCOME PER SHARE
Dasar (dalam ribuan Rupiah)	26	3u,37	21	<i>Basic (in thousands of Rupiah)</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Capital stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Saldo laba/Retained earnings*)	Penghasilan komprehensif lain - neto/Other comprehensive income - net	Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas-neto/Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges-net	Keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai nilai wajar-neto/ Cumulative gain on derivative instrument for fair value hedges-net	Total ekuitas/ Total equity	Balance as of December 31, 2019
Saldo 31 Desember 2019	2.000.000	29.800	26.465	120.710	5.336	(29.752)	-	2.152.559	Balance as of December 31, 2019
Saldo 1 Januari 2020	2.000.000	29.800	26.465	120.710	5.336	(29.752)	-	2.152.559	Balance as of January 1, 2020
Dampak penerapan PSAK No. 71	-	-	-	(16.764)	18.848	-	-	2.084	Impact of SFAS No. 71 implementation
Saldo 1 Januari 2020 setelah dampak penerapan PSAK No. 71	2.000.000	29.800	26.465	103.946	24.184	(29.752)	-	2.154.643	Balance as of January 1, 2020 after impact of SFAS No. 71 implementation
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	42.510	-	-	-	42.510	Net income for the year
Keuntungan aktuarial	-	-	-	263	-	-	-	263	Actuarial gain
Kenalkan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	21.423	-	-	21.423	Increase in fair value of securities classified as fair value through other comprehensive income
Perubahan neto atas cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	(218)	-	-	(218)	Net changes in allowance for impairment losses of securities classified as fair value through other comprehensive income
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas	-	-	-	-	-	(64.008)	-	(64.008)	Effective portion on fair value changes from derivative instrument qualified as cash flow hedges
Perubahan nilai wajar investasi derivatif yang memenuhi lindung nilai nilai wajar	-	-	-	-	-	-	19.980	19.980	Fair value changes from derivative instrument qualified as fair value hedges
Perubahan nilai wajar investasi saham yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	5.667	5.667	Fair value changes from equity investment classified as fair value through other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2020	2.000.000	29.800	26.465	146.719	45.389	(83.760)	25.647	2.180.260	Balance as of December 31, 2020

*) Saldo laba termasuk keuntungan/(kerugian) aktuarial - neto setelah pajak

*) Retained earnings include actuarial gain/(loss) - net of tax

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended
December 31, 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Capital stock	Tambahkan modat disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba/Retained earnings ^{*)}		Penghasilan komprehensif lain - neto/Other comprehensive income - net	Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas-neto/Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges-net	Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai nilai wajar-neto/ Cumulative loss on derivative instrument for fair value hedges-net	Total ekuitas/ Total equity
			Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				
Saldo 1 Januari 2021	2.000.000	29.800	26.465	146.719	45.389	25.647	2.180.260	
Cadangan umum	-	-	4.251	(4.251)	-	-	-	
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	53.027	-	-	53.027	
Keuntungan aktuarial	-	-	-	605	-	-	605	
Penurunan nilai wajar efek-elek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3e, 3h,6	-	-	-	(21.066)	-	(21.066)	
Perubahan neto atas cadangan kerugian penurunan nilai efek-elek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3e, 3h,6	-	-	-	(115)	-	(115)	
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas	3e, 3h,7	-	-	-	-	52.579	52.579	
Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai nilai wajar	3e, 3h,7	-	-	-	-	108.318	108.318	
Perubahan nilai wajar investasi saham yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3e, 3h,8	-	-	-	-	(152.100)	(152.100)	
Saldo 31 Desember 2021	2.000.000	29.800	30.716	196.100	24.208	(18.135)	2.221.508	

^{*)} Saldo laba termasuk keuntungan/(kerugian) aktuarial - neto setelah pajak

^{*)} Retained earnings include actuarial gain/(loss) - net of tax

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
		2021	Catatan/ Notes	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan bunga		729.533		734.620
Penerimaan pendapatan provisi dan komisi		89.455		42.203
Pembayaran kepada pemasok		(68.623)		(60.305)
Pembayaran kepada karyawan		(109.160)		(73.726)
Penerimaan pendapatan <i>advisory</i>		4.873		7.713
Pembayaran pajak final dan pajak penghasilan badan		(12.227)		(12.782)
Penerimaan pengembalian pajak		102		296
Penerimaan dividen		-		3.542
Pembayaran beban bunga		(566.942)		(584.642)
Kas diperoleh dari aktivitas operasi		67.011		56.919
Pinjaman diberikan kepada nasabah		(3.010.498)		(3.682.213)
Penerimaan pembayaran pinjaman diberikan		2.095.586		803.541
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi		(847.901)		(2.821.753)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian efek-efek		(455.000)		(215.124)
Penjualan efek-efek		797.211		538.400
Perolehan aset tetap		(3.093)		(13)
Perolehan perangkat lunak		(1.785)		(943)
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi		337.333		322.320
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman diterima		1.600.000		3.285.000
Penerimaan surat utang yang diterbitkan		2.089.785	17	1.500.000
Penerimaan pinjaman subordinasi		300.000		1.080.000
Pembayaran pinjaman diterima		(3.250.000)		(2.635.000)
Pembayaran surat utang yang diterbitkan		(820.000)		(965.000)
Pembayaran pinjaman subordinasi		(116.839)		(112.229)
Pembayaran biaya pinjaman diterima dan surat utang diterbitkan		(15.565)		(3.930)
Arus kas neto yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan		(212.619)		2.148.841
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(723.187)		(350.592)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas		18.520	3c	(21.373)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		2.057.102	3i, 5	2.429.067
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		1.352.435	3i,5	2.057.102

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

PT Indonesia Infrastructure Finance ("Perusahaan") didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian No. 34 tanggal 15 Januari 2010, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU 21503.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 43 tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan atas pasal 4 ayat (3), pasal 4 ayat (4), pasal 10, pasal 11 ayat (3), pasal 13, pasal 19, pasal 22 dan pasal 23. Laporan atas perubahan Anggaran Dasar telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0227487 tanggal 31 Juli 2018.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha berikut ini:

- a. memberikan pinjaman dalam bentuk, antara lain, pinjaman senior, pinjaman subordinasi/*mezzanine financing*, *bridge financing*, *take-out financing* dan/atau pembiayaan kembali;
- b. memberikan jaminan dalam bentuk, antara lain, pemenuhan liabilitas keuangan, *credit enhancement* dan/atau *performance bonds*;
- c. penyertaan modal;
- d. memberikan jasa dalam mencari pasar *swap* yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- e. memberikan jasa konsultasi yang berkaitan dengan, antara lain, penilaian risiko, analisa kelayakan, struktur proyek, model pembiayaan, dan/atau pembangunan proyek; dan
- f. melakukan kegiatan pembiayaan lain yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur sebagaimana diizinkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

1. GENERAL

PT Indonesia Infrastructure Finance (the "Company") was established under the laws of the Republic of Indonesia through Deed of Establishment No. 34 dated January 15, 2010, drawn up before Aulia Taufani, S.H., as substitute of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-21503.AH.01.01.Year 2010 dated April 28, 2010 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated March 11, 2011, Supplementary No. 5123. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently with Deed No. 43 dated July 24, 2018, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, regarding the change in article 4 par. (3), article 4 par. (4), article 10, article 11 par. (3), article 13, article 19, article 22 and article 23. Report of such changes had been accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the letter No. AHU-AH.01.03-0227487 dated July 31, 2018.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the objective of its activities is to engage in financing infrastructure projects in Indonesia.

The Company may perform the following activities to achieve its objectives:

- a. *provide loans in the form of, among others, senior debts, subordinated debts/mezzanine financing, bridge financing, take-out financing and/or refinancing;*
- b. *provide guarantees in the form of, among others, fulfilment of financial liabilities, credit enhancement, and/or performance bonds;*
- c. *equity investment;*
- d. *provide services involving search for swap market related to infrastructure financing companies;*
- e. *provide consultation services related to, among others, risk assessment, feasibility analysis, project structuring, financing scheme, and/or project development; and*
- f. *other financing activities related to infrastructure projects as permitted by the Minister of Finance Regulation No.100/PMK.010/2009 regarding Infrastructure Finance Company.*

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatannya melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010.

Melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. S-2/D.05/2018 tertanggal 2 Januari 2018, Perusahaan juga telah mendapatkan persetujuan perluasan sektor infrastruktur termasuk diantaranya infrastruktur sosial.

Kantor Perusahaan berlokasi di Prosperity Tower lantai 53-55, Sudirman Central Business District Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta, Indonesia.

Personil manajemen kunci mencakup Dewan Komisaris dan Direksi.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021
Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	Darmin Nasution
Komisaris Independen	Rinaldi Firmansyah Sonny Loho
Komisaris	Richard Lyon Ranken Lodewijk Govaerts Andreas Manfred Zeisler Bhimantara Widyajala Ken Tomisaki Yon Aرسال
Direksi	
Presiden Direktur	Reynaldi Hermansjah ^{g)}
Direktur	Mohammad Ramadhan Harahap Yanindya Bayu Wirawan I Made Wiracita Tantra

- a) Efektif sejak 14 Juli 2020, Bapak Darmin Nasution menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan.
- b) Efektif sejak 30 Juni 2020, Bapak Mohammad Ramadhan Harahap menjabat sebagai Direktur Perusahaan.
- c) Efektif sejak 30 Juni 2020, Bapak Yanindya Bayu Wirawan menjabat sebagai Direktur Perusahaan.
- d) Efektif sejak 22 Juni 2020, Bapak Yon Aرسال menjabat sebagai Komisaris Perusahaan menggantikan Bapak Muhamad Al Arif.
- e) Efektif sejak 12 Juni 2020, Bapak Ken Tomisaki menjabat sebagai Komisaris Perusahaan menggantikan Bapak Rajeev Kannan.
- f) Pada tanggal 1 November 2021, Ibu Devi Pradnya Paramita mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Perusahaan.
- g) Efektif sejak 1 November 2021, Bapak Reynaldi Hermansjah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan menggantikan Ibu Devi Pradnya Paramita.

1. GENERAL (continued)

The Company has obtained its business license from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 dated August 6, 2010.

Through Financial Service Authority Letter ("OJK") No. S-2/D.05/2018 dated January 2, 2018, the Company also obtained an approval of the expansion of infrastructure sectors including among others social infrastructure.

The Company's office is located at the Prosperity Tower 53rd-55th floor, Sudirman Central Business District Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta, Indonesia.

Key management personnel consists of the Boards of Commissioners and Directors.

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020
	Darmin Nasution ^{a)} Rinaldi Firmansyah Sonny Loho Richard Lyon Ranken Lodewijk Govaerts Andreas Manfred Zeisler Bhimantara Widyajala Ken Tomisaki ^{e)} Yon Aرسال ^{d)}
	Reynaldi Hermansjah Mohammad Ramadhan Harahap ^{b)} Yanindya Bayu Wirawan ^{c)} I Made Wiracita Tantra Devi Pradnya Paramita ^{f)}

Board of Commissioners
 President Commissioner
 Independent Commissioners

Commissioners

Board of Directors
 President Director
 Directors

- a) Effective July 14, 2020, Mr. Darmin Nasution has served as President Commissioner of the Company.
- b) Effective June 30, 2020, Mr. Mohammad Ramadhan Harahap has served as Director of the Company.
- c) Effective June 30, 2020, Mr. Yanindya Bayu Wirawan has served as Director of the Company.
- d) Effective June 22, 2020, Mr. Yon Aرسال has served as Commissioner of the Company replacing Mr. Muhamad Al Arif.
- e) Effective June 12, 2020, Mr. Ken Tomisaki has served as Commissioner of the Company replacing Mr. Rajeev Kannan.
- f) On November 1, 2021, Mrs. Devi Pradnya Paramita submitted resignation letter as Director of the Company.
- g) Effective November 1, 2021, Mr. Reynaldi Hermansjah has served as Interim Director of the Company replacing Mrs. Devi Pradnya Paramita.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengangkatan Bapak Ken Tomisaki sebagai Komisaris Perusahaan efektif sejak tanggal 12 Juni 2020. Pemberitahuan perubahan susunan Komisaris Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0255607 tanggal 23 Juni 2020.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengangkatan Bapak Yon Arsal sebagai Komisaris Perusahaan efektif sejak tanggal 22 Juni 2020. Pemberitahuan perubahan susunan Komisaris Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0293385 tanggal 15 Juli 2020.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengangkatan Bapak Mohammad Ramadhan Harahap dan Bapak Yanindya Bayu Wirawan sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak tanggal 30 Juni 2020. Pemberitahuan perubahan susunan Direktur Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0267137 tanggal 30 Juni 2020.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 20 Juli 2020, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengangkatan Bapak Darmin Nasution sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perusahaan efektif sejak tanggal 14 Juli 2020. Pemberitahuan perubahan susunan Komisaris Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat AHU-AH.01.03-0306759 tanggal 24 Juli 2020.

1. GENERAL (continued)

Based on Decree No. 12 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 16, 2020, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the appointment of Mr. Ken Tomisaki as Commissioner of the Company effective since June 12, 2020. The changes of the Company's Board of Commissioners was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0255607 dated June 23, 2020.

Based on Decree No. 10 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated July 15, 2020, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the appointment of Mr. Yon Arsal as Commissioner of the Company effective since June 22, 2020. The changes of the Company's Board of Commissioners was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0293385 dated July 15, 2020.

Based on Decree No. 13 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 16, 2020, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the appointment of Mr. Mohammad Ramadhan Harahap and Mr. Yanindya Bayu Wirawan as Director of the Company effective since June 30, 2020. The changes of the Company's Board of Directors was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0267137 dated June 30, 2020.

Based on Decree No. 14 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated July 20, 2020, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the appointment of Mr. Darmin Nasution as President Commissioner/Independent Commissioners of the Company effective since July 14, 2020. The changes of the Company's Board of Commissioner was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0306759 dated July 24, 2020.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengangkatan kembali Bapak I Made Wiracita Tantra sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak tanggal 5 Maret 2021 dengan tunduk pada Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan yang dilakukan OJK. Pemberitahuan perubahan susunan Direktur Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat AHU-AH.01.03-0200247 tanggal 29 Maret 2021.

Susunan anggota Komite Investasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berasal dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite Audit Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021
Ketua Anggota	Sonny Loho Darmin Nasution
Anggota Independen	Rinaldi Firmansyah Asep Hikmat

a) Efektif tanggal 19 Agustus 2020, Bapak Darmin Nasution menjabat sebagai anggota Komite Audit Perusahaan.

Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021
Komite Pemantau Risiko	
Ketua Anggota	Rinaldi Firmansyah Lodewijk Govaerts Andreas Manfred Zeisler Yon Aرسال Darmin Nasution
Komite Nominasi dan Remunerasi	
Ketua Anggota	Darmin Nasution Richard Lyon Ranken Bhimantara Widyajala Ken Tomisaki

1. GENERAL (continued)

Based on Decree No. 19 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated March 21, 2021, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the re-appointment of Mr. I Made Wiracita Tantra as Director of the Company effective since March 5, 2021 in accordance to Fit and Proper Test held by OJK. The changes of the Company's Board of Director was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0200247 dated March 29, 2021.

The members of the Company's Investment Committee as of December 31, 2021 and 2020 comprised of all members of the Boards of Commissioners and Directors.

The members of the Company's Audit Committee as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	
	Sonny Loho Darmin Nasution ^{a)} Rinaldi Firmansyah Asep Hikmat	Chairman Members Independent Member

a) Effective August 19, 2020, Mr. Darmin Nasution has served as member of the Company's Audit Committee.

The Company's Risk Oversight Committee and Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rinaldi Firmansyah Lodewijk Govaerts Andreas Manfred Zeisler Yon Aرسال ^{a)} Darmin Nasution ^{b)}	Risk Oversight Committee Chairman Members
	Darmin Nasution ^{c)} Richard Lyon Ranken Bhimantara Widyajala Ken Tomisaki ^{d)}	Nomination and Remuneration Committee Chairman Members

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

- a) Efektif sejak 19 Agustus 2020, Bapak Yon Aرسال menggantikan Bapak Muhamad Al Arif sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
- b) Efektif sejak 19 Agustus 2020, Bapak Darmin Nasution menggantikan Bapak M. Chatib Basri sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
- c) Efektif sejak 19 Agustus 2020, Bapak Darmin Nasution menggantikan Bapak M. Chatib Basri sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- d) Efektif sejak 19 Agustus 2020, Bapak Ken Tomisaki menggantikan Bapak Rajeev Kannan sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sekretaris perusahaan Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Bapak Nastantio W. Hadi.

Berdasarkan surat Perusahaan No. Ref. 017/IIF-HRD/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepala divisi audit internal Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Bapak Yudi Adrial.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 116 orang dan 106 orang (tidak diaudit).

Penawaran umum obligasi

Obligasi I Tahun 2016

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-336/D.04/2016 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 19 Juli 2016, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-198/D.04/2019 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 19 Desember 2019, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL (continued)

- a) Effective August 19, 2020, Mr. Yon Aرسال has replaced Mr. Muhamad Al Arif as a member of Risk Oversight Committee.
- b) Effective August 19, 2020, Mr. Darmin Nasution has replaced Mr. M. Chatib Basri as a member of Risk Oversight Committee.
- c) Effective August 19, 2020, Mr. Darmin Nasution has replaced Mr. M. Chatib Basri as a Chairman of Nomination and GEEtion Committee.
- d) Effective August 19, 2020, Mr. Ken Tomisaki has replaced Mr. Rajeev Kannan as a member of Nomination and Remuneration Committee.

The corporate secretary of the Company as of December 31, 2021 and 2020 is Mr. Nastantio W. Hadi.

Based on the Company's letter No. Ref. 017/IIF-HRD/III/2012 dated March 30, 2012, the head of internal audit division of the Company as of December 31, 2021 and 2020 is Mr. Yudi Adrial.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company had 116 and 106 employees, respectively (unaudited).

Bonds public offering

Bond I Year 2016

On June 29, 2016, the Company obtained the effectivity statement from the Financial Services Authority through its letter No. S-336/D.04/2016 to conduct a Public Offering on Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016 to public with a nominal amount of Rp1,500,000.

On July 19, 2016, the bonds were listed in Indonesia Stock Exchange.

Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019

On December 13, 2019, the Company obtained the effectivity statement from the Financial Services Authority through its letter No. S-198/D.04/2019 to conduct a Shelf Registration Public Offering on Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019 to public with a nominal amount of Rp1,500,000.

On December 19, 2019, the bonds were listed in Indonesia Stock Exchange.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020

Pada bulan Oktober 2020, Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 22 Oktober 2020, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Penawaran medium term notes

Pada tanggal 24 Oktober 2018, Perusahaan melakukan penawaran terbatas *Medium Term Notes I* Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp200.000.

Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Tahun 2021

Pada tanggal 28 Januari 2021, Perusahaan telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang Senior Tanpa Jaminan dalam jumlah nominal sebesar USD150.000.000 dan telah tercatat di Singapore Stock Exchange (SGX) sebagai bagian dari USD500.000.000 *Euro Medium Term Note Programme*.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI

a. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Efektif 1 Januari 2021, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") revisi yang relevan untuk Perusahaan, sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan, Amandemen PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amandemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, dan Amandemen PSAK No. 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2".

Penerapan dari standar revisi tersebut tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya.

1. GENERAL (continued)

Shelf Registration Bond I Phase II Year 2020

In October 2020, the Company conducted a Shelf Registration Public Offering on Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase II Year 2020 to public with a nominal amount of Rp1,500,000.

On October 22, 2020, the bonds were listed in Indonesia Stock Exchange.

Medium term notes offering

On October 24, 2018, the Company conducted a limited offering on Indonesia Infrastructure Finance Medium Term Notes I Year 2018 with a nominal amount of Rp200,000.

Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Year 2021

On January 28, 2021, the Company had issued and offered Senior Unsecured Noted with nominal amounting to USD150,000,000 and was listed on the Singapore Stock Exchange (SGX) under the USD500,000,000 Euro Medium Term Note Programme.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

a. Changes in accounting policies and disclosure

Effective on January 1, 2021, the Company has applied revised Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") which are relevant to the Company, as follows:

- Amendments of SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements"
- Amendments of SFAS No. 71, "Financial Instruments, Amendments to SFAS No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, Amendments to SFAS No. 60: Financial Instruments: Disclosures, and Amendments to SFAS No. 73: Leases on Interest Rate Benchmark Reform - Stage 2".

The implementations of such revised standards did not result in substansial changes to Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior periods

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN BARU DAN REVISI (lanjutan)**

**b. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif**

Standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2022:**

Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian "10 persen" untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan"

Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

Amandemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset kontinjensi terkait Kontrak memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"

Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak yang memberatkan.

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2023:**

Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"

Amandemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar.

Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan"

Amandemen tersebut mengklarifikasi pelarangan pengurangan hasil neto penjualan setiap item yang dihasilkan, saat membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (continued)**

**b. Accounting standards issued but not yet
effective**

The standard that is issued by the Board of Financial Accounting Standards, but not yet effective for current year financial statements are disclosed below. The Company intends to adopt this standard, if applicable, when it becomes effective.

Effective on or after January 1, 2022:

2020 Annual Adjustment - SFAS No. 71, "Financial Instruments - Fee under testing "10 percent" for the derecognition of a financial liability"

The amendments clarify the costs included in the entity when assessing whether the terms of the new or modified financial liabilities are substantially different from the terms of the original financial liabilities.

Amendment of SFAS No. 57, "Provision, Contingent Liabilities, and Contingent Assets related to Onerous Contract - Cost of fulfilling the Contracts"

The amendments clarify the costs fulfilling the contracts in relation to determining whether a contract is an onerous contract.

Effective on or after January 1, 2023:

Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements regarding the Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term"

The amendments specify the requirements for classifying a liability as current or non-current.

Amendment of SFAS No. 16, "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use"

The amendments clarify the prohibition of deducting the net proceeds from the sale of each item produced, when bringing the asset to the location and condition necessary for the asset to be ready for use in accordance with management's intentions.

The Company is presently evaluating and has not yet determined the effects of this accounting standard on its financial statements.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK", yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

b. Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia ("BI") yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Pos non-moneter diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing yang dijabarkan kembali dengan nilai tukar pada saat tanggal awal transaksi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kurs konversi 1 Dolar Amerika Serikat yang digunakan Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp14.269 dan Rp14.105 (nilai penuh).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK", which function has been transferred to Financial Services Authority ("OJK") starting January 1, 2013) rule No. VIII.G.7, Appendix of the Decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of the Issuer or Public Company".

b. Financial Statements Presentation

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The statement of cash flows is prepared using the direct method which classifies cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Foreign Currency Transactions and Translation

The books of accounts of the Company are maintained in Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the Company operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the middle exchange rates quoted by Bank Indonesia ("BI") at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to the current year profit or loss statement. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates at the dates of the initial transaction.

The conversion rate per 1 United States Dollar used by the Company as of December 31, 2021 and 2020 were Rp14,269 and Rp14,105, respectively (full amount).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - v. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vi. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, diungkapkan pada laporan keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

- a. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
 - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b. *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions apply:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a company of which the other entity is a member).*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party.*
 - iv. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*
 - v. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*
 - vi. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).*

All significant transactions with related parties, are disclosed in the financial statements.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)

Terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan: biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki, dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan hanya dapat dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi jika instrumen dimiliki dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual ("hold to collect"), dan dimana arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI). Pokok merupakan nilai wajar dari instrumen pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan marjin laba. Kategori aset ini membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat pengakuan awal untuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat mengubah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, Perusahaan mempertimbangkan tujuan model bisnis adalah untuk memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual atau untuk memperoleh arus kas kontraktual dan dijual dan juga persyaratan kontraktual atas instrumen tersebut. Hal ini termasuk dalam hal menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak dapat memenuhi kondisi SPPI. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Hak yang dimiliki Perusahaan saat terdapat kepailitan dan keaslian kontrak;
- Penentuan mata uang pada aset;

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets

Financial assets (other than investment in sukuk)

There are three measurement classifications for financial assets: amortized cost, fair value through profit or loss (FVTPL), and fair value through other comprehensive income (FVOCI).

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held, and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

Financial assets can only be held at amortized cost if the instruments are held in order to collect the contractual cash flows ("hold to collect"), and where those contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI). Principal represents the fair value of the instrument at the time of initial recognition. Interest in this context represents compensation for the time value of money and associated credit risks together with compensation for other risks and costs consistent with a basic lending arrangement and a profit margin. This requires an assessment at initial recognition of the contractual terms to determine whether it contains a term that could change the timing or amount of cash flows in a way that is inconsistent with the SPPI criteria.

In assessing whether the contractual cash flows have SPPI characteristics, the Company considers the objective of its business model is to hold assets only to collect cash flows, or to collect cash flows and to sell and the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers:

- Rights in bankruptcy and genuinity of contracts;
- Currency denomination arrangement;

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, Perusahaan mempertimbangkan tujuan model bisnis adalah untuk memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual atau untuk memperoleh arus kas kontraktual dan dijual dan juga persyaratan kontraktual atas instrumen tersebut. Hal ini termasuk dalam hal menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak dapat memenuhi kondisi SPPI. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan: (lanjutan)

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- *Non-recourse arrangement*; dan
- Persyaratan pelunasan dipercepat atau perpanjangan fasilitas dan juga perubahan *time value of money* dari jumlah bunga.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko konsentrasi kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Aset keuangan berupa instrumen utang dimana tujuan model bisnis dicapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset ("*hold to collect and sell*") dan memiliki arus kas SPPI, diklasifikasikan sebagai FVOCI, dengan laba rugi yang belum direalisasi ditangguhkan di penghasilan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

Seluruh aset keuangan lainnya akan dipersyaratkan diklasifikasikan sebagai FVTPL. Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch*.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)**

In assessing whether the contractual cash flows have SPPI characteristics, the Company considers the objective of its business model is to hold assets only to collect cash flows, or to collect cash flows and to sell and the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers:
(continued)

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Non-recourse arrangement; and*
- *Prepayment and extension terms, as well as modification on time value of money of interest.*

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit concentration risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

*Financial asset of debt instruments where the business model objectives are achieved by collecting the contractual cash flows and by selling the assets ("*hold to collect and sell*") and that have SPPI cash flows are held at FVOCI, with unrealized gains or losses deferred in other comprehensive income until the asset is derecognized.*

All other financial assets will mandatorily be classified at FVTPL. Financial assets may be designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduces an accounting mismatch.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Efek-efek

Setelah pengakuan awal, efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Sementara efek-efek yang diukur pada FVOCI, setelah pengakuan awal akan diukur pada nilai wajar dimana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan pada komponen terpisah pada ekuitas. Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar, neto setelah akumulasi cadangan kerugian kredit ekspektasian, ditransfer ke laba rugi. Untuk efek-efek yang dipersyaratkan diukur atas nilai wajar melalui laba rugi, setelah pengakuan awal akan diukur pada nilai wajar dimana keuntungan dan kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar dicatat dalam laba rugi.

Pinjaman diberikan

Setelah pengakuan awal, pinjaman diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi diukur menggunakan metode suku bunga efektif.

Investasi saham

Investasi saham diukur pada FVOCI, dimana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan pada komponen terpisah pada ekuitas.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)**

Securities

After initial recognition, securities held at amortized cost is amortized using the effective interest rate. While securities held at FVOCI are subsequently carried at fair value with all unrealized gains and losses arising from changes in fair value recognized in other comprehensive income and accumulated in separate component of equity. On derecognition, the cumulative fair value gains or losses, net of the cumulative expected credit loss reserve, are transferred to the profit or loss. For securities mandatorily held at fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value with gains or losses arising from the changes in fair value recorded in profit or loss.

Loans

Subsequent to initial recognition, loans are measured at amortized cost. Amortized cost is recognized using the effective interest method.

Equity investments

Equity investments are measured at FVOCI, where all unrealized gains and losses arising from changes in fair value recognized in other comprehensive income and accumulated in separate component of equity.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan menggunakan model perhitungan kerugian kredit ekspektasian (ECL) yang menggunakan matriks *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD), dan *exposure at default* (EAD), yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif. Pendekatan PD dan LGD yang digunakan dibedakan untuk masing-masing segmentasi portofolio yaitu pembiayaan proyek dan pembiayaan korporasi, sesuai dengan karakteristik risiko masing-masing segmen tersebut.

a. Probability of Default (PD)

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, diestimasi sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*stage 1*) atau sepanjang umur (*stage 2*) dengan memperhitungkan dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. Perusahaan menggunakan basis data PD berdasarkan studi yang dilakukan oleh Moody's dan Standard & Poor's (S&P).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (lanjutan)

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and commissions paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Revenue is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

Impairment of financial assets

The Company uses expected credit loss (ECL) models that utilize the probability of default (PD), loss given default (LGD), and exposure at default (EAD) metrics, discounted using the effective interest rate. The approach used for PD and LGD is differentiated for each portfolio segmentation, namely project finance and corporate finance, according to risk characteristic of each segment.

a. Probability of Default (PD)

The probability at a point in time that a counterparty will default, estimated over up to 12 months from the reporting date (*stage 1*) or over the lifetime of the product (*stage 2*) taking into account impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. The Company uses a PD database based on studies conducted by Moody's and Standard & Poor's (S&P).

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

b. Loss Given Default (LGD)

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar, digambarkan sebagai persentase dari total paparan pada saat gagal bayar. Perusahaan menggunakan nilai LGD berdasarkan data tingkat pemulihan kredit Basel III dan *Standard & Poor's* (S&P).

c. Exposure at Default (EAD)

Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang dilakukan, pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dimuka, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian, komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif.

Kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Losses* (ECL) diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect/hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

Pencadangan berbasis ECL diakui pada saat pengakuan awal untuk seluruh instrumen keuangan yang masuk dalam cakupan ECL sehubungan dengan adanya peristiwa gagal bayar yang dapat timbul dalam periode waktu 12 bulan ke depan (disebut sebagai *stage 1* dengan cadangan kerugian senilai kerugian kredit ekspektasian 12 bulan). ECL akan terus dihitung berdasarkan basis ini sampai terdapat bukti peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) sesuai kriteria yang ditetapkan Perusahaan atau aset mengalami penurunan nilai.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (lanjutan)**

Impairment of financial assets (continued)

b. Loss Given Default (LGD)

The loss that is expected to arise on default, depicted as a percentage of total exposure at the time of default. The Company uses LGD values based on Basel III and *Standard & Poor's* (S&P) credit recovery rate data.

c. Exposure at Default (EAD)

The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

To determine the expected credit loss, these components are multiplied together and discounted to the balance sheet date using the effective interest rate as the discount rate.

Expected Credit Losses (ECL) are recognized for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as *hold to collect/hold to collect and sell* and have cash flows that are solely payments of principal and interest. *Expected credit losses* are not recognized for equity instruments designated at FVOCI.

An ECL based allowance is recognized at the time of initial recognition for all financial instruments that are in the scope of ECL in respect of default events that may occur over the next 12 months (so-called 'stage 1 assets' with allowances equivalent to 12-months expected credit losses). ECL continues to be determined on this basis until there is either a significant increase in credit risk (SICR) on criteria set by the Company or the asset becomes credit impaired.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Jika aset keuangan (atau portofolio aset keuangan) mengalami SICR sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui untuk peristiwa *default* yang dapat terjadi sepanjang umur dari aset tersebut (disebut sebagai 'aset *stage 2*' dengan cadangan kerugian sebesar kerugian kredit ekspektasian selama umur aset tersebut). Penilaian SICR dilakukan dalam konteks peningkatan risiko gagal bayar yang dapat terjadi sepanjang sisa umur dari instrumen keuangan ketika dibandingkan dengan ekspektasi pada saat pengakuan awal untuk periode waktu yang sama. SICR tidak dinilai dalam konteks peningkatan kerugian kredit ekspektasian.

Akun kredit macet dikelola oleh unit SAM. Ketika suatu akun memerlukan penyelesaian kredit atau ada jumlah yang dianggap tidak dapat dipulihkan, dapat tetap di *stage 2* (tanpa atau dengan tunggakan pembayaran sampai dengan 90 hari) atau *stage 3* (adanya tunggakan pembayaran lebih dari 90 hari), namun cadangan kerugian penurunan nilai kredit secara individual akan dibuat. Cadangan kerugian adalah perbedaan antara jumlah pinjaman yang tercatat dan probabilitas tertimbang nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang mencerminkan berbagai skenario (dari hasil pemulihan terbaik, terburuk, dan paling mungkin). Jika arus kas mencakup jaminan yang dapat direalisasi, nilai-nilai yang digunakan akan memasukkan dampak informasi ekonomi *forward looking*. Keadaan individual dari masing-masing debitur dipertimbangkan ketika SAM memperkirakan arus kas masa depan dan waktu pemulihan masa depan yang melibatkan pertimbangan yang signifikan.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (lanjutan)**

Impairment of financial assets (continued)

If a financial asset (or portfolio of financial assets) experiences a SICR since initial recognition, an expected credit loss is recognized for default events that may occur over the lifetime of the asset (so-called 'stage 2 assets' with loss allowances equivalent to lifetime expected credit losses). SICR is assessed in the context of an increase in the risk of a default occurring over the remaining life of the financial instrument when compared to that expected at the time of initial recognition for the same period. It is not assessed in the context of an increase in the expected credit loss.

Credit impaired accounts are managed by SAM unit. Where an account needs loan work-out or any amount is considered irrecoverable, it can stay at a stage 2 (with no payment overdue or overdue up to 90 days) or stage 3 (when there is more than 90 days payment overdue) but individual credit impairment provision is raised. The provision is the difference between the loan-carrying amount and the probability weighted present value of estimated future cash flows, reflecting a range of scenarios (typically the best, worst, and most likely recovery outcomes). Where the cash flows include realizable collateral, the values used will incorporate the impact of forward looking economic information. The individual circumstances of each debtor are considered when SAM estimates future cash flows and timing of future recoveries which involve significant judgement.

The period considered when measuring expected credit loss is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan *stage* 2 dan 3, yang dinilai secara individual, penentuan kerugian kredit ekspektasian selama umur aset akan serupa dengan pendekatan PSAK No. 55. Namun, estimasi arus kas akan berdasarkan rentang kemungkinan skenario-skenario. Ketika arus kas termasuk jaminan yang dapat direalisasi, nilai yang diperhitungkan akan termasuk informasi kedepan.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada penghasilan komprehensif lain. Perubahan atas kerugian kredit ekspektasian diakui pada laba rugi dan terakumulasi di saldo laba.

Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen kredit yang diberikan dan jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain. Jika instrumen keuangan mencakup komponen aset keuangan dan komitmen yang belum ditarik, dan tidak dapat dipisahkan atas kerugian kredit ekspektasian pada komponen ini, jumlah kerugian kredit atas komitmen tersebut diakui bersamaan dengan kerugian kredit atas aset keuangan. Dalam kondisi jumlah kerugian kredit ekspektasian gabungan melebihi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan, maka kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai liabilitas lain-lain.

Instrumen keuangan yang belum mengalami penurunan nilai pada saat pengakuan awal adalah aset *stage* 1 dan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan diakui. Instrumen ini akan tetap pada *stage* tersebut sampai dilunasi, kecuali terdapat peningkatan risiko kredit signifikan (SICR) (*stage* 2) atau mengalami penurunan nilai kredit (*stage* 3). Instrumen pada *stage* 1 akan ditransfer ke *stage* 2 dan cadangan kerugian kredit ekspektasian dihitung sepanjang umurnya diakui saat terdapat peningkatan signifikan atas risiko kredit dibandingkan yang diharapkan saat pengakuan awal.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (lanjutan)

Impairment of financial assets (continued)

For *stage* 2 and 3 financial assets that are individually assessed, the determination of lifetime expected credit losses will be similar to the SFAS No. 55 approach. The estimated cash flows will, however, be based on a probability range of scenarios. Where the cash flows include realizable collateral, the values used will incorporate forward looking information.

For assets measured at amortized cost, the balance sheet amount reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the balance sheet amount reflects the instrument's fair value, with the expected credit loss allowance held as a separate reserve within other comprehensive income. Changes in expected credit losses are recognized in the profit or loss and are accumulated in retained earnings.

Expected credit loss on loan commitments and financial guarantees is recognized as other liabilities. Where a financial instrument includes both financial asset and an undrawn commitment, and it is not possible to separately identify the expected credit loss on these components, expected credit loss amounts on the loan commitment are recognized together with expected credit loss amounts on the financial asset. To the extent the combined expected credit loss exceeds the gross carrying amount of the financial asset, the expected credit loss is recognized as other liability.

Financial instruments that are not credit-impaired are originated into *stage* 1 and a 12-month expected credit loss provision is recognized. Instruments will remain in that stage until they are repaid, unless they experience significant increase in credit risk (SICR) (*stage* 2) or they become credit impaired (*stage* 3). Instruments under *stage* 1 will transfer to *stage* 2 and a lifetime expected credit loss provision recognized when there has been a significant increase in the credit risk compared to what was expected at origination.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)

Kerugian kredit ekspektasian diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan
(stage 2)

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan atau tidak, dengan menggunakan sejumlah faktor kuantitatif dan kualitatif, yang bobotnya bergantung pada tipe produk dan pihak lawan. Aset keuangan tanpa adanya tunggakan pembayaran namun membutuhkan penyesuaian kredit untuk menyesuaikan dengan kemampuan mengembalikan hutang atau dengan tunggakan lebih dari 30 hari dan tidak mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit. Penentuan pengukuran kerugian kredit ekspektasian secara individual dilakukan oleh komite investasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Impairment of financial assets (continued)

12-month expected credit losses (stage 1)

Expected credit losses are recognized at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to 12 months into the future from the reporting date. Expected credit losses continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired.

Significant increase in credit risk (stage 2)

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition, an expected credit loss provision is recognized for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Significant does not mean statistically significant nor it is assessed in the context of changes in expected credit loss.

Whether a change in the risk of default is significant or not is assessed using a number of quantitative and qualitative factors, the weight of which depends on the type of product and counterparty. Financial assets that are not overdue but need to have a loan work out to adjust its debt servicing capacity or that are 30 or more days past due and not credit-impaired will always be considered to have experienced an increase in credit risk. Decision to assess ECL on individual basis is conducted by the investment committee.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Efek-efek

Perusahaan menggunakan pendekatan PD dan LGD yang berlaku untuk segmen pembiayaan korporasi dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Ketika menentukan apakah risiko kredit suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan.

Perusahaan menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atau eksposur telah terjadi:

- Perubahan tingkat pemeringkatan risiko menjadi IIF6 atau lebih buruk; dan
- Tertunggak lebih dari 30 hari.

Dalam peningkatan risiko di atas, hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis, penilaian saat ini dan perkiraan masa depan. Pemeringkatan risiko bervariasi dengan rentang IIF1 sampai dengan IIF10, dimana IIF1 mencerminkan tingkat risiko kredit yang paling rendah, sedangkan IIF10 mencerminkan tingkat risiko kredit yang paling tinggi.

Definisi gagal bayar (default)

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan gagal bayar, Perusahaan mempertimbangkan 3 poin yaitu:

- Prospek usaha;
- Kinerja keuangan; dan
- Kemampuan membayar kembali.

Kondisi gagal bayar terjadi ketika debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kreditnya kepada Perusahaan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)**

Impairment of financial assets (continued)

Securities

The Company uses PD and LGD approaches which apply for corporate finance segment in measuring the expected credit losses.

Significant increase in credit risk

When determining whether the credit risk of financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Company considers reasonable, supported and relevant information without undue cost or effort.

The Company uses the following criteria in determining whether a significant increase in credit risk or exposure has occurred:

- Change in the risk rating level to IIF6 or worse; and
- More than 30 days arrears.

In term of increase in risk above, it includes quantitative and qualitative information and analysis, based on historical experience, current and future assessments. The risk rating varies from IIF1 to IIF10, where IIF1 represents the lowest level of credit risk, while IIF10 represent the highest level of credit risk.

Definition of failed payment (default)

In assessing whether the debtors is in default condition, the Company considers 3 points:

- Business prospect;
- Financial performance; and
- Repayment ability.

The default condition occurs when the debtors past due for more than 90 days on credit obligation to the Company.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Pengelompokan instrumen dalam rangka
perhitungan kredit ekspektasian secara kolektif

Perusahaan mengelompokkan aset keuangan
yang mencerminkan tingkat risiko kredit
sebagai berikut:

i) Stage 1

Evaluasi penurunan nilai dan risiko kredit
atas instrumen keuangan tidak meningkat
secara signifikan sejak pengakuan awal
yang dapat dibuktikan dengan terjadinya:

- Peringkat risiko antara IIF1-IIF5; dan
- Tidak terjadi tunggakan lebih dari
30 hari.

Perusahaan akan mengukur penyisihan
kerugian untuk instrumen keuangan
tersebut sejumlah kerugian ekspektasian
12 bulan.

ii) Stage 2

Evaluasi penurunan nilai dan risiko kredit
atas instrumen keuangan meningkat
secara signifikan sejak pengakuan awal
yang dapat dibuktikan dengan terjadinya:

- Peringkat risiko antara IIF6-IIF7;
dan/atau
- Terdapat tunggakan antara 31 hari
sampai dengan 90 hari.

Perusahaan akan mengukur penyisihan
kerugian untuk instrumen keuangan
tersebut sejumlah kerugian ekspektasian
sepanjang umur dari instrumen keuangan
tersebut.

iii) Stage 3

Evaluasi penurunan nilai dan risiko kredit
atas instrumen keuangan meningkat
secara signifikan sejak pengakuan awal
yang dapat dibuktikan dengan terjadinya:

- Peringkat risiko antara IIF8-IIF10;
dan/atau
- Terdapat tunggakan lebih dari 90 hari.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)**

Impairment of financial assets (continued)

Classification of instrument for calculating
collective expected credit losses

The Company classifies financial assets that
reflect the level of credit risk as follows:

i) Stage 1

Evaluation of impairment and credit risk on
financial instruments does not increase
significantly since initial recognition which
can be proven by the occurrence of:

- Risk rating between IIF1-IIF5; and
- There are no arrears for more than
30 days.

The Company will measure the allowance for
losses for these financial instruments at the
amount of the expected credit losses of
12 months.

ii) Stage 2

Evaluation of impairment and credit risk on
financial instruments increase significantly
since initial recognition which can be proven
by the occurrence of:

- Risk rating between IIF6-IIF7; and/or
- There are arrears between 31 days to
90 days.

The Company will measure the allowance for
losses for these financial instruments at the
amount of the expected credit losses over the
maturity of financial instruments.

iii) Stage 3

Evaluation of impairment and credit risk on
financial instruments increase significantly
since initial recognition which can be proven
by the occurrence of:

- Risk rating between IIF8-IIF10; and/or
- There are arrears more than 90 days.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Pengelompokan instrumen dalam rangka
perhitungan kredit ekspektasian secara kolektif
(lanjutan)

Perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian ekspektasian sepanjang umur dari instrumen keuangan tersebut.

Restrukturisasi pinjaman diberikan

Restrukturisasi pinjaman diberikan dapat meliputi penurunan suku bunga, penyesuaian waktu pembayaran, atau perpanjangan tenor.

Evaluasi penurunan nilai individual atau kolektif akan terus dilakukan untuk pinjaman diberikan direstrukturisasi, mengikuti evaluasi penurunan nilai atas pinjaman diberikan. Kerugian dari restrukturisasi pinjaman diberikan dengan cara konversi sebagian pinjaman diberikan menjadi instrumen lain, diakui hanya apabila nilai wajar instrumen keuangan yang diterima adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

Reklasifikasi aset keuangan

Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Classification of instrument for calculating
collective expected credit losses (continued)

The Company will measure the allowance for losses for these financial instruments at the amount of the expected credit losses over the maturity of financial instruments.

Loan restructuring

Loan restructuring may involve decrease in interest rate, modification of term of payment, or tenor extension.

The restructured loans continue to be subject to an individual or collective impairment assessment, following the impairment assessment of loans. Loss on loan restructuring, which involves a conversion of loan in partial into other financial instrument, is recognized only if the fair value of the financial instrument received is less than the carrying amount of the loan.

Reclassification of financial instruments

The Company reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through other comprehensive are recorded at their fair values.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang beragunan sebesar pinjaman yang diterima.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Reclassification of financial instruments
(continued)

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income (FVOCI) to the amortized cost is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value through profit or loss (FVTPL) to fair value through other comprehensive income (FVOCI) are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss (FVTPL) to amortized cost is recorded at fair value.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (investasi pada sukuk)

Perusahaan menerapkan PSAK No. 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk". PSAK No. 110 ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

Pengakuan dan pengukuran

Sebelum pengakuan awal, Perusahaan menentukan klasifikasi investasi pada sukuk berdasarkan tujuan investasi Perusahaan. Klasifikasi dalam investasi pada sukuk terdiri dari:

- Diukur pada biaya perolehan

Apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengukuran awal, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk ini diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk.

- Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan, namun harga perolehan tersebut tidak termasuk biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (investment in sukuk)

The Company has applied SFAS No. 110 (Revised 2015), "Accounting for Sukuk". SFAS No. 110 establishes the recognition, measurement, presentation, and disclosures of sukuk ijarah and sukuk mudharabah transactions.

Recognition and measurement

Before the initial recognition, the Company determines the classification of investment in sukuk based on the purpose of the Company's investment. The classification of investment in sukuk comprises of:

- Acquisition cost

If the investment is held within a business entity that aims to acquire assets in order to collect contractual cash flows and there is a contractual requirement to determine the specific date of principal payments and/or the result.

At the initial measurement, the investment is recorded at acquisition cost which includes the transaction cost. After the initial recognition, the investment in sukuk is measured at amortized cost. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight-line method during the period of the sukuk instrument.

- Fair value through profit or loss (FVTPL)

At the initial recognition, the investment in sukuk is presented at acquisition cost which does not include transaction cost.

After initial recognition, the investment is recognized at-fair-value. The difference between fair value and recorded amount is recognized in profit or loss.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Sebelum pengakuan awal, Perusahaan menentukan klasifikasi investasi pada sukuk berdasarkan tujuan investasi Perusahaan. Klasifikasi dalam investasi pada sukuk terdiri dari (lanjutan):

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk dan diakui dalam laba rugi.

Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada hirarki sebagai berikut:

- i. harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif; atau
- ii. input selain harga kuotasi yang termasuk dalam huruf (i).

Untuk investasi pada sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (investment in sukuk)
(continued)

Recognition and measurement (continued)

Before the initial recognition, the Company determines the classification of investment in sukuk based on the purpose of the Company's investment. The classification of investment in sukuk comprises of (continued):

- Fair value through other comprehensive income (FVOCI)

At the initial recognition, the investment in sukuk is presented at acquisition cost which includes transaction cost.

After initial recognition, the investment is recognized at-fair-value. The difference between fair value and recorded amount is recognized in other comprehensive income. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight-line method during the period of the sukuk instrument and recognized in profit or loss.

Fair value on investment is determined according to following hierarchy:

- i. quoted price (excluding any adjustment) in active market; or
- ii. other input other than quoted price included in (i).

For investment in sukuk classified as at acquisition cost and at fair value through other comprehensive income, if there is an indication of impairment, the Company measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than recorded amount, the Company recognizes the impairment losses. Recoverable amount represents the amount which will be recoverable from the principal repayment regardless of its present value.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Reklasifikasi

Perusahaan tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali terdapat perubahan tujuan model usaha. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Perusahaan. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk *mudharabah* atau arus kas imbalan (*ujrah*) dari sukuk *ijarah*. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka Perusahaan menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

Penyajian

Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan neto setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam FVTPL, jika liabilitas keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (investment in sukuk)
(continued)

Reclassification

The Company cannot change investment classification unless there is a change in the business model purpose. Business model that is intended to collect contractual cash flow is based on the investment purpose set by the Company. The underlying contractual cash flow is the cash flow from revenue sharing and principal of sukuk *mudharabah* or benefit cash flow (*ujrah*) from sukuk *ijarah*. After initial recognition, if the actual differs from the investment purpose initially set by the Company, then the Company reconsiders the consistency of the investment purpose.

Presentation

Investment income and amortization expense are presented in net amount in the profit or loss.

f. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities.

Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liabilities are either held-for-trading or it is designated upon initial recognition as at FVTPL.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
(lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini pada saat awal pengakuan dan selanjutnya dicatat pada nilai wajar; biaya transaksi diakui langsung pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan ini diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar".

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

g. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan neto dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan dalam situasi bisnis yang normal dan peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Perusahaan atau pihak lawan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Financial Liabilities and Equity Instruments
(continued)

Financial liabilities (continued)

Financial liabilities included in this category are recognized initially and subsequently at fair value; transaction costs are taken directly to profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value of these financial liabilities are included in the statement of profit or loss and other comprehensive income and reported as "unrealized gains/(losses) from changes in fair value".

Financial liabilities at amortized cost are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities if, and only if, the Company's obligations are discharged or cancelled or expired.

g. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

The legally enforceable right of offset must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

g. Saling Hapus (lanjutan)

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

h. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif, seperti efek-efek, ditentukan berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal laporan posisi keuangan dari sumber-sumber yang terpercaya seperti kuotasi harga pasar dari Bloomberg, Reuters atau dari broker. Investasi pada unit reksadana dicatat pada nilai pasar, sesuai dengan nilai bersih dari aset reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

Instrumen keuangan dianggap menggunakan nilai kuotasi pasar aktif jika harga kuotasi tersedia dan secara reguler tersedia di bursa, dealer, broker dan harga tersebut mencerminkan harga aktual dan terbentuk melalui transaksi pasar secara reguler berdasarkan "arm's length basis". Jika kriteria di atas tidak tercapai, pasar dianggap tidak aktif. Indikasi dari pasar tidak aktif adalah ketika terdapat selisih penawaran dan permintaan yang besar atau terjadi kenaikan signifikan dari selisih penawaran dan permintaan atau hanya terdapat sejumlah kecil transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki kuotasi harga pasar, estimasi yang rasional dari nilai wajar ditentukan dengan menggunakan referensi harga pasar sekarang dari instrumen lain yang memiliki karakteristik yang sama secara substansial atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas dari aset bersih yang mendasari instrumen keuangan tersebut. Perusahaan menggunakan jasa penilai independen dalam mengestimasi nilai wajar dari investasi efek-efek saham dimana harga pasar tidak tersedia. Penilaian berkala oleh jasa penilai independen dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Perusahaan menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Offsetting (continued)

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

h. Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments traded in active markets, such as securities, is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date from credible sources such as quoted market prices from Bloomberg, Reuters or broker's quoted price. Investments in mutual funds units are stated at market value, in accordance with the net value of assets of the mutual funds at the statement of financial position date.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market, if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially has the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the financial instruments. The Company uses an independent valuer in the estimation of fair value of its investment in equity securities when the market price is not available. A regular valuation by the independent valuer is done at least once a year.

For more complex instruments, the Company uses internally developed model, which is generally based on valuation method and technique generally recognized as industry standard. Valuation model is used primarily to value derivative contracts.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset Tetap - Pemilikan Langsung

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/Years	Tarif penyusutan per tahun/ Annual depreciation rate	
Bangunan	30	3%	Building
Kendaraan	4	25%	Vehicles
Komputer	4	25%	Computer
Peralatan kantor	4	25%	Office equipment
Perabotan dan peralatan kantor	4	25%	Office furniture and fixtures

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Cash and Cash Equivalents

For cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all investments with maturities of three months or less from the date of placement which are not pledged as collateral and unrestricted.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

k. Property and Equipment - Direct Acquisition

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or are recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized.

Depreciation of property and equipment is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives as follows:

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

k. Aset Tetap - Pemilikan Langsung (lanjutan)

Akumulasi biaya konstruksi serta pemasangan peralatan kantor dan komputer, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

Aset tetap dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Apabila aset tetap dihentikan pengakuannya (tidak dipergunakan lagi atau dijual), biaya perolehan beserta akumulasi penyusutan yang terkait dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

Pada tanggal pelaporan, metode amortisasi, taksiran masa manfaat dan nilai residual ditelaah ulang dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

l. Beban Tangguhan

Beban tangguhan merupakan biaya transaksi yang terjadi berkaitan dengan proses pemberian persetujuan kredit kepada debitur atau perolehan pinjaman yang diterima Perusahaan. Biaya transaksi akan disajikan secara neto dalam akun "Pinjaman diberikan" jika telah dicairkan kepada debitur atau akun "Pinjaman diterima" jika telah dicairkan oleh Perusahaan.

m. Aset Lain-lain

Aset lain-lain termasuk aset tidak berwujud yang dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tidak berwujud.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. Property and Equipment - Direct Acquisition
(continued)

The accumulated costs of the construction of and the installation of office equipment and computers are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to property and equipment accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from such date. Maintenance and repair cost are charged as an expense when incurred.

Property and equipment in progress is stated at cost and transferred to the respective property and equipment account when completed and ready for use.

When assets are derecognized (retired or otherwise disposed of), their costs and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gains or losses are recognized as profit or loss for the year.

At the reporting period, amortization methods, estimated useful lives and residual values are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate.

l. Deferred Charges

Deferred charges represent transaction costs incurred in relation to the process of loan approval to the debtors or borrowing obtained by the Company. The transaction costs will be presented net in "Loans" account when the loan is disbursed to the debtors or in "Fund borrowings" account when the borrowing is drawn by the Company.

m. Other Assets

Other assets include intangible assets that are stated at cost less amortization and impairment. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

m. Aset Lain-lain (lanjutan)

Amortisasi aset tidak berwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tersebut yaitu antara 4 - 5 tahun.

Pada tanggal pelaporan, metode amortisasi, taksiran masa manfaat dan nilai residual ditelaah ulang dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

o. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian adalah, atau mengandung, sewa didasarkan pada substansi pengaturan pada saat dimulainya sewa. Pengaturan tersebut adalah, atau mengandung, sewa jika pemenuhan pengaturan tergantung pada penggunaan aset atau aset-aset tertentu dan pengaturan tersebut menyatakan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, meskipun aset tersebut (aset-aset tersebut) tidak secara eksplisit ditentukan dalam suatu pengaturan.

Perusahaan menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa aset berjangka pendek dan sewa aset bernilai rendah.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

m. Other Assets (continued)

Amortization of intangible assets is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets which range between 4 - 5 years.

At the reporting period, amortization methods, estimated useful lives and residual values are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate.

n. Impairment of Non-Financial Assets

At reporting date, the Company reviews the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of net selling price or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the profit or loss.

o. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that asset is (or those assets are) not explicitly specified in an arrangement.

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Sewa (lanjutan)

Aset hak-guna

Perusahaan mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa.

Biaya aset hak-guna meliputi nilai liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dan estimasi biaya restorasi.

Aset hak-guna disusutkan berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa sewa sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Laptop	3	Laptop

Utang sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan pertambahan bunga dan dikurangi untuk merefleksikan pembayaran sewa yang dilakukan.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan beban bunga diakui berdasarkan basis akrual dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Perhitungan dengan metode suku bunga efektif memperhitungkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan dan biaya transaksi yang timbul secara langsung untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Leases (continued)

Right-of-use assets

The Company recognized right-of-use assets at the commencement date of the lease. Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, if any and adjusted for any remeasurement of lease liabilities.

The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct cost incurred, lease payments made at or before the commencement date and estimated reinstatement cost.

Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term as follows:

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognized lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

In calculating the present value of lease payments, the Company uses its incremental borrowing rate. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made.

p. Recognition of Revenues and Expenses

Interest income and interest expense are recognized on accrual basis using the effective interest rate method. The calculation using the effective interest rate method takes into account all contractual terms of the financial instruments and includes any transaction costs that are directly attributable to the instruments and are an integral part of the effective interest rate.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan pemberian pinjaman diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian seperti pendapatan jasa *mandatory lead arranger*, sindikasi, perencanaan model pembiayaan, pendapatan komitmen atas fasilitas yang belum dicairkan, dan premi atas garansi kredit yang diberikan.

Pendapatan jasa *advisory* diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian.

Keuntungan/(kerugian) dari portofolio efek-efek dan investasi saham meliputi keuntungan/(kerugian) yang timbul dari penjualan efek-efek dan keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan investasi saham.

Keuntungan/(kerugian) dari transaksi derivatif meliputi keuntungan/(kerugian) yang timbul dari penyelesaian transaksi derivatif dan keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar.

Beban diakui pada saat terjadinya.

q. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dalam hal ini pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. Recognition of Revenues and Expenses
(continued)

Provision and commission income related to the loan disbursement is recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts such as income from mandatory lead arranger services, syndication, structuring of financing scheme fees, commitment fee income from undrawn facilities, and credit guarantee premium.

Advisory service income is recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts.

Gains/(losses) on securities and equity investment consist of gains/(losses) on securities sold and unrealized gains/(losses) from changes in the fair value of securities and equity investment.

Gains/(losses) on derivative transactions consist of gains/(losses) on settlement of derivative transactions and unrealized gains/(losses) from changes in the fair value of derivative transactions.

Expenses are recognized when incurred.

q. Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year, computed using the prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statements carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited immediately in profit or loss, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, diakui pada saat hasil dari keberatan dan/atau banding diterima.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan bersih di laporan posisi keuangan.

r. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja karyawan jangka pendek

Imbalan kerja karyawan jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Liabilitas pensiun

Perusahaan menyediakan imbalan pasca-kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pada dasarnya merupakan program imbalan pasti. Untuk usia pensiun normal, Perusahaan menghitung imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode projected unit credit.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

- i. Keuntungan atau kerugian aktuarial;
- ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset); dan
- iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same tax authority on either the same taxable entity or different taxable entities.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment is received or, if objected or appealed against, when the result of the objection or appeal is determined.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statement of financial position.

r. Employment Benefits Obligation

Short-term employment benefits

Short-term employee benefits are recognized when they become due to the employees on accrual basis.

Pension obligation

The Company provides post-employment benefits as required under Labor Law which in substance represent a defined benefit plan. For normal pension scheme, the Company calculates the employee benefits under the Labor Law.

The cost of providing benefits under the defined benefits plan is determined using the projected unit credit method.

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), which is recognized as other comprehensive income, consists of:

- i. Actuarial gain and losses;
- ii. Return on program asset, not consist of amount included in liabilities (asset) net interest; and
- iii. Every change in asset ceiling, not consist of amount included in liabilities (asset) net interest.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

r. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Liabilitas pensiun (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu diakui pada laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- Tanggal amandemen atau kurtailmen program; dan
- Tanggal pada saat Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Imbalan jangka panjang lainnya

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode *projected unit credit* dengan metode yang disederhanakan dimana metode ini tidak mengakui pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain. Total nilai neto dari biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui pada laba rugi tahun berjalan.

s. Instrumen Keuangan Derivatif

Instrumen derivatif diakui pertama-tama pada nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Metode pengakuan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar tergantung pada apakah derivatif tersebut adalah instrumen lindung nilai, dan sifat dari unsur yang dilindungi nilainya.

Lindung nilai arus kas

Perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif, pertukaran (*swap*) tingkat suku bunga, sebagai bagian dari aktivitas manajemen untuk melindungi dampak risiko tingkat suku bunga atas pinjaman Perusahaan. Perusahaan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas pada saat transaksi tersebut memenuhi kriteria perlakuan akuntansi lindung nilai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

r. Employment Benefits Obligation
(continued)

Pension obligation (continued)

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), which is recognized as other comprehensive income will not be reclassified to profit or loss in the next periods.

Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of:

- *The date of the plan amendment or curtailment; and*
- *The date that the Company recognizes related restructuring costs.*

Other long-term employee benefits

The cost of providing other long-term employee benefits is determined using the projected unit credit method using simplified method of not recognizing remeasurements in other comprehensive income. The net total of service cost, net interest on the net defined benefit liability (asset) and remeasurements of the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss for the year.

s. Derivative Financial Instruments

Derivative instruments are initially recognized at fair value on the date the contracts are entered into and are subsequently remeasured at their fair values. The method of recognizing the fair value gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument and, if so, the nature of the item being hedged.

Cash flow hedge

The Company uses derivative instruments, interest rate swap as part of its management activities to manage exposures to interest rate on the Company's borrowing. The Company applies cash flow hedge accounting when transactions meet the specified criteria for hedge accounting treatment.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

s. Instrumen Keuangan Derivatif (lanjutan)

Lindung nilai arus kas (lanjutan)

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan lindung nilai diakui sebagai penyesuaian terhadap *item* yang dilindungi nilainya dalam penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan atau disajikan dalam ekuitas, tergantung pada jenis transaksi dan efektivitas dari lindung nilai tersebut.

Perusahaan menetapkan derivatif sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas apabila instrumen tersebut melindungi nilai variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang telah diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi. Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas dalam hubungan lindung nilai yang memenuhi kualifikasi ditangguhkan pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas, yang merupakan bagian dari ekuitas. Bagian yang tidak efektif diakui secara langsung pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jumlah yang ditangguhkan dalam ekuitas direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam tahun yang sama dimana arus kas yang dilindung nilai mempengaruhi laba atau rugi, dan pada item yang sama dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan, dilaksanakan, atau tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan di ekuitas tetap diakui pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas dan direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika item yang dilindung nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Derivative Financial Instruments (continued)

Cash flow hedge (continued)

Changes in fair value of derivative instruments that do not qualify for hedge accounting are recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income. If derivative instruments are designated and qualify for hedge accounting, changes in fair value of derivative instruments are recorded as adjustments to the items being hedged in the current year other comprehensive income or in the equity, depending on the type of hedge transaction represented and the effectiveness of the hedge.

The Company designates derivatives as the hedging instruments of cash flows hedges where the instrument hedges the variability in cash flows attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability, or a highly probable forecast transaction that could affect profit or loss. The effective portion of changes in the fair value of derivatives designated as hedging instruments of cash flows hedges in qualifying hedging relationships is deferred to the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for cash flows hedges, which forms part of equity. Any ineffective portion is recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Amounts deferred in equity are reclassified to the statement of profit or loss and other comprehensive income as a reclassification adjustment in the same year as the hedged cash flows affect profit or loss, and in the same line item in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

When the hedging instrument expires or sold, terminated, exercised, or no longer qualifies for hedge accounting, the cumulative amount deferred in equity remains in the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for cash flows hedges, and is subsequently transferred to the statement of profit or loss and other comprehensive income when the hedged item is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

s. Instrumen Keuangan Derivatif (lanjutan)

Lindung nilai arus kas (lanjutan)

Ketika suatu prakiraan transaksi akan dilindung nilai tidak lagi diharapkan akan terjadi, jumlah yang ditangguhkan dalam ekuitas diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Seluruh instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs *Reuters* pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga opsi atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Lindung nilai nilai wajar

Perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif, opsi, sebagai bagian dari aktivitas manajemen untuk melindungi dampak risiko perubahan nilai wajar atas investasi saham Perusahaan. Perusahaan menerapkan akuntansi lindung nilai nilai wajar pada saat transaksi tersebut memenuhi kriteria perlakuan akuntansi lindung nilai.

Perusahaan menetapkan derivatif sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar apabila instrumen tersebut melindungi nilai variabilitas nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang telah diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi. Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar dalam hubungan lindung nilai yang memenuhi kualifikasi ditangguhkan pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai nilai wajar, yang merupakan bagian dari ekuitas.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan, dilaksanakan, atau tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan di ekuitas tetap diakui pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai nilai wajar dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Derivative Financial Instruments (continued)

Cash flow hedge (continued)

When a forecast hedged transaction is no longer expected to occur, the amount deferred in equity is recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

All derivatives instruments (including foreign exchange transactions for financing and trading) are recognized in the statement of financial position at fair value. The fair value is based on the market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows, option pricing models or broker quoted price on other instruments with similar characteristics.

Fair value hedge

The Company uses derivative instrument, option, as part of its management activities to manage exposures to fair value changes on the Company's equity investment. The Company applies fair value hedge accounting when transactions meet the specified criteria for hedge accounting treatment.

The Company designates derivatives as the hedging instruments of fair value hedges where the instrument hedges the variability in fair value attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability, or a highly probable forecast transaction that could affect. The effective portion of changes in the fair value of derivatives designated as hedging instruments of fair value hedges in qualifying hedging relationships is deferred to the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for fair value hedges, which forms part of equity.

When the hedging instrument expires or sold, terminated, exercised, or no longer qualifies for hedge accounting, the cumulative amount deferred in equity remains in the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for fair value hedges, and will not be subsequently transferred to profit or loss.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

s. Instrumen Keuangan Derivatif (lanjutan)

Lindung nilai nilai wajar (lanjutan)

Seluruh instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs Reuters pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga opsi atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

t. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama, yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional termasuk *item* yang dapat diatribusikan secara langsung kepada segmen dan juga yang dapat dialokasikan dengan basis yang wajar.

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk.

Perusahaan menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

u. Laba per Saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun berjalan.

Labanya per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan mengasumsikan konversi instrumen berpotensi saham yang bersifat dilutif.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Derivative Financial Instruments (continued)

Fair value hedge (continued)

All derivatives instruments (including foreign exchange transactions for financing and trading) are recognized in the statement of financial position at fair value. The fair value is based on the market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows, option pricing models or broker quoted price on other instruments with similar characteristics.

t. Operating Segment

An operating segment is a component of the entity that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the entity's components, whose operating results are reviewed regularly by the chief operating decision maker to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the chief operating decision maker include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

The Company manages its business activities and identifies its segments reported based on product categories.

The Company determines and presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

u. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to ordinary equity holders of the entity by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income for the year attributable to ordinary equity holders of the entity by the weighted average number of shares outstanding during the year adjusted for the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Utama dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan utama, selain dari estimasi, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 3.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Company's accounting policies, which is described in Note 3, management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period where the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations that the directors have made in the process of applying the Company's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

Going concern

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and believes that the Company has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management was not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on a going concern basis.

Classification of the financial assets and liabilities

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies as disclosed in Note 3.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA (lanjutan)**

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari entitas adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban.

Manajemen telah mereviu dan mengkonfirmasi bahwa mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan dijelaskan di bawah ini:

Pajak tangguhan

Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen memperkirakan bahwa rugi fiskal tersebut akan dapat dikompensasi terhadap laba fiskal untuk lima tahun mendatang sejak terjadinya. Dalam menyusun perkiraan tersebut, manajemen membuat pertimbangan sebagai asumsi yang diperlukan untuk mengestimasi laba kena pajak masa depan yang diharapkan akan dihasilkan dari operasi Perusahaan. Perubahan signifikan terhadap asumsi dapat secara material mempengaruhi nilai aset pajak tangguhan.

Perhitungan akumulasi rugi fiskal dan aset pajak tangguhan disajikan pada Catatan 28.

Rugi penurunan nilai aset keuangan

Pengukuran kerugian penurunan nilai berdasarkan PSAK No. 71 atas aset keuangan yang relevan memerlukan pertimbangan, khususnya, estimasi atas jumlah dan waktu dari arus kas di masa depan dan penilaian atas peningkatan signifikan pada risiko kredit. Estimasi ini ditentukan oleh sejumlah faktor, dimana perubahan faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan tingkat pencadangan yang berbeda. Beberapa pertimbangan dan estimasi akuntansi terkait dengan perhitungan kerugian kredit ekspektasian adalah model *credit grading*, kriteria untuk menentukan apakah terdapat kenaikan signifikan pada risiko kredit, pengembangan dan model kerugian kredit ekspektasian, termasuk pilihan atas input yang digunakan.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Determination of functional currency

The functional currency of the entity is the currency of the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and cost.

Management has reviewed and confirmed that the Company's functional currency is Rupiah.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period are discussed below:

Deferred taxes

The Company recognizes deferred tax assets on its accumulated fiscal losses and deductible temporary differences. Management estimates the fiscal loss which can be compensated against the taxable income for the next five years. In preparing the forecast management makes judgement as to the assumptions needed to estimate the future taxable income expected to be generated from the Company's operations. Any significant changes in the assumptions may materially affect the amount of deferred tax assets.

Calculation of accumulated fiscal losses and deferred tax assets is disclosed in Note 28.

Impairment loss on financial assets

The measurement of impairment losses under SFAS No. 71 on financial assets in scope requires judgement, in particular, the estimation of the amount and timing of future cash flows and the assessment of a significant increase in credit risk. These estimates are driven by a number of factors, changes in which can result in different level of allowances. Some accounting judgement and estimates related to expected credit loss calculated are credit grading model, criteria for assessing if there has been a significant increase in credit risk, and development of expected credit losses models, including the choice of inputs.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA (lanjutan)**

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat ekonomis setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan periode dimana aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Taksiran masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah dan periode pencatatan biaya yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat ekonomis setiap aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (Catatan 29).

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

***Estimated useful lives of property and
equipment***

The useful life of each item of the Company's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying amounts of property and equipment are disclosed in Note 12.

Pension

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, future salary increase rate, mortality rate, resignation rates and others (Note 29).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Kas	1	5	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	550.082	515.440	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	162.688	263.631	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	74.677	54.205	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	513	503	PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank BTPN Tbk	232	230	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	31	50.053	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank KB Bukopin Tbk	50.018	-	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	12.107	72.780	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DBS Indonesia	1.029	1.004	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank QNB Indonesia Tbk	419	419	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	414	77	PT Bank Permata Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	341	340	PT Bank OCBC NISP Tbk
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	308	6	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	224	46	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	191	192	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	186	187	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	128	129	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	42	42	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	-	110	PT Bank HSBC Indonesia
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	372.080	24.367	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.334	935	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.285	1.861	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.124	62	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank BTPN Tbk	1.072	1.059	PT Bank BTPN Tbk
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	23.521	61.637	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	12.752	12.606	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	3.893	3.846	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank QNB Indonesia Tbk	2.456	2.426	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	1.577	1.557	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Bank (lanjutan)			<i>Cash in banks (continued)</i>
Dolar Amerika Serikat (lanjutan)			<i>United States Dollar (continued)</i>
Pihak ketiga (lanjutan)			<i>Third parties (continued)</i>
PT Bank DBS Indonesia	670	664	<i>PT Bank DBS Indonesia</i>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	444	439	<i>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>
PT Bank Permata Tbk	375	371	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank UOB Indonesia	244	242	<i>PT Bank UOB Indonesia</i>
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	108	281	<i>Standard Chartered Bank, Jakarta Branch</i>
PT Bank KB Bukopin Tbk	24	-	<i>PT Bank KB Bukopin Tbk</i>
	<u>1.279.589</u>	<u>1.071.747</u>	
Deposito berjangka Rupiah			<i>Time deposits Rupiah</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	703.250	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Bank Mega Tbk	1.500	-	<i>PT Bank Mega Tbk</i>
Dolar Amerika Serikat Pihak berelasi			<i>United States Dollar Related parties</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	282.100	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Bank KB Bukopin Tbk	71.345	-	<i>PT Bank KB Bukopin Tbk</i>
	<u>72.845</u>	<u>985.350</u>	
	1.352.435	2.057.102	
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4)	(43)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>1.352.431</u>	<u>2.057.059</u>	
Tingkat bunga giro per tahun:			<i>Interest rate per annum of current accounts:</i>
Rupiah	1,90 - 3,25%	4,00 - 5,80%	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	0,25%	0,04 - 1,00%	<i>United States Dollar</i>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun:			<i>Interest rate per annum of time deposits:</i>
Rupiah	3,00%	5,00%	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	0,40%	1,00%	<i>United States Dollar</i>

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya atau dijaminkan.

As of December 31, 2021 and 2020, there are no cash and cash equivalents that are restricted for use or pledged as collateral.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Mutasi nilai tercatat kas dan setara kas:

31 Desember/December 31, 2021					
	Stage 1 - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal nilai tercatat	2.057.102	-	-	2.057.102	Carrying amount - beginning balance
Pengukuran kembali bersih	152.935	-	-	152.935	Remeasurement
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	22.496.320	-	-	22.496.320	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(23.367.484)	-	-	(23.367.484)	Financial assets that have been derecognized
Selisih kurs dan perubahan lain	13.562	-	-	13.562	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Nilai Tercatat	1.352.435	-	-	1.352.435	Carrying Amount - Ending Balance

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Movement of carrying amount of cash and cash
equivalents:

31 Desember/December 31, 2020					
	Stage 1 - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal nilai tercatat	2.429.067	-	-	2.429.067	Carrying amount - beginning balance
Pengukuran kembali bersih	481.202	-	-	481.202	Remeasurement
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	9.649.740	-	-	9.649.740	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(10.481.110)	-	-	(10.481.110)	Financial assets that have been derecognized
Selisih kurs dan perubahan lain	(21.797)	-	-	(21.797)	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Nilai Tercatat	2.057.102	-	-	2.057.102	Carrying Amount - Ending Balance

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai kas dan
setara kas:

Movement of allowance of impairment losses for
cash and cash equivalents:

31 Desember/December 31, 2021					
	Stage 1 - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal kerugian kredit ekspektasian	43	-	-	43	Expected credit loss beginning balance
Pengukuran kembali bersih kerugian kredit ekspektasian	(1)	-	-	(1)	Remeasurement of expected credit loss
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.137	-	-	1.137	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.176)	-	-	(1.176)	Financial assets that have been derecognized
Selisih kurs dan perubahan lain	1	-	-	1	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Kerugian Kredit Ekspektasian	4	-	-	4	Expected Credit Loss - Ending Balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas: (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2020					
	Stage 1 - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal	-	-	-	-	Beginning balance
Dampak penerapan PSAK No. 71	199	-	-	199	Impact of SFAS No. 71 implementation
Saldo awal kerugian kredit ekspektasian	199	-	-	199	Expected credit loss beginning balance
Pengukuran kembali kerugian kredit ekspektasian	20	-	-	20	Remeasurement of expected credit loss
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	138	-	-	138	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(295)	-	-	(295)	Financial assets that have been derecognized
Selisih kurs dan perubahan lain	(19)	-	-	(19)	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Kerugian Kredit Ekspektasian	43	-	-	43	Expected Credit Loss - Ending Balance

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Movement of allowance of impairment losses for cash and cash equivalents: (continued)

6. EFEK-EFEK

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI*): Rupiah			Fair value through other comprehensive income (FVTOCI*): Rupiah
Obligasi - Pihak berelasi	154.457	242.160	Bonds - Related parties
Obligasi - Pihak ketiga	103.404	217.596	Bonds - Third party
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Obligasi - Pihak berelasi	575.796	645.126	Bonds - Related parties
Biaya perolehan Diamortisasi*): Rupiah			Amortized cost*): Rupiah
Obligasi - Pihak berelasi	250.000	250.000	Bonds - Related parties
Obligasi - Pihak ketiga	250.000	250.000	Bonds - Third party
Reksadana - Pihak ketiga**)	198.706	227.706	Mutual funds - Third parties**)
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Obligasi - Pihak ketiga	598.371	639.662	Bonds - Third parties
	2.130.734	2.472.250	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.841)	(2.202)	Less: Allowance for impairment losses
	2.128.893	2.470.048	

*) Termasuk obligasi sukuk yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan PSAK No. 110 (Revisi 2015).

**) Reksadana Penyertaan Terbatas dan Dana Investasi Infrastruktur yang memiliki jadwal pelunasan secara sekaligus atau bertahap pada tanggal pelunasan atau tanggal-tanggal pelunasan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Kontrak Investasi Kolektif pada nilai yang telah ditentukan dalam surat komitmen pembelian unit penyertaan kepada pemegang unit penyertaan.

*) Including sukuk bonds classified as fair value through other comprehensive income based on SFAS No. 110 (Revised 2015).

**) Limited Participation Mutual Funds and Infrastructure Investment Fund with repayment schedules in lump sum or on stages on repayment date or repayment dates in accordance with the agreed terms in Collective Investment Contract at the specified value in the purchase of participation unit commitment letter to the unit holders.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Rincian efek-efek pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

6. SECURITIES (continued)

The details of securities as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

31 Desember/December 31, 2021						
	Peringkat/ Rating	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan penerbit/ Issuer company	Nilai pokok/ Principal amount	Nilai tercatat/ Carrying amount
Rupiah						
Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related parties						
PT Marga Lingkar Jakarta Senior Unsecured notes	idAAA***)	8 Nov./ Nov. 8, 2017	8 Nov./ Nov. 8, 2029	PT Marga Lingkar Jakarta	250.000	250.000
PT Bank Rakyat Indonesia Bond Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2018 Seri A	idAAA***)	28 Nov./ Nov. 28, 2021	21 Feb./ Feb. 21, 2023	PT Bank Rakyat Indonesia	151.800	154.457
Pihak ketiga/Third parties						
PT Medco Power Indonesia MPI I Bonds	idA***)	4 Jul./ Jul. 4, 2018	4 Jul./ Jul. 4, 2025	PT Medco Power Indonesia	250.000	250.000
PT Bank Pan Indonesia Berkelanjutan II Tahun 2018	idAA***)	28 Nov./ Nov. 28, 2021	27 Feb./ Feb. 27, 2023	PT Bank Pan Indonesia	101.200	103.404
Reksadana/Mutual funds						
Pihak ketiga/Third parties						
RDPT Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa		5 Okt./ Oct. 5, 2018	5 Jul./ Jul. 5, 2023	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	166.500	166.706
KIK Dinfra Toll Road Mandiri-001		27 Jun./ Jun. 27, 2019	27 Jun./ Jun. 27, 2024	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	32.000	32.000
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar						
Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related parties						
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI22	Baa2*)	29 Mar./ Mar. 29, 2017	29 Mar./ Mar. 29, 2022	Perusahaan Penerbit SBSN	21.404	21.570
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI022	Baa2*)	20 Jul./ Jul. 20, 2016	25 Apr./ Apr. 25, 2022	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	263.977	266.341
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI022	Baa2*)	8 Des./ Dec. 8, 2016	8 Jan./ Jan. 8, 2022	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	35.673	35.692
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI22	Baa2*)	26 Jul./ Jul. 26, 2017	21 Nov./ Nov. 21, 2022	Perusahaan Penerbit SBSN	21.404	21.945
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI023	Baa2*)	26 Jul./ Jul. 26, 2017	15 Apr./ Apr. 15, 2023	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	14.269	14.718
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI028	Baa2*)	11 Des./ Dec. 11, 2017	11 Jan./ Jan. 11, 2028	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	199.766	215.530
Pihak ketiga/Third parties						
Star Energy Bonds	Ba3*)	24 Apr./ Apr. 24, 2018	24 Apr./ Apr. 24, 2033	PT Star Energy	598.371	598.371
					2.106.364	2.130.734
Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses						
					-	(1.841)
					2.106.364	2.128.893

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Rincian efek-efek pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

6. SECURITIES (continued)

The details of securities as of December 31, 2021 and 2020 are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2020						
	Peringkat/ Rating	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan penerbit/ Issuer company	Nilai pokok/ Principal amount	Nilai tercatat/ Carrying amount
Rupiah						
Sukuk						
Pihak ketiga/Third party						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri D	idAAA**)	28 Des./ Dec. 28, 2017	28 Des./ Dec. 28, 2022	PT XL Axiata Tbk	226.362	217.596
Rupiah						
Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related parties						
PT Marga Lingkar Jakarta Senior Unsecured notes	idAAA***)	8 Nov./ Nov. 8, 2017	8 Nov./ Nov. 8, 2029	PT Marga Lingkar Jakarta	250.000	250.000
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Baa2*)	2 Okt., 20 Feb.- 6 Nov. 2020/ Oct 2., Feb. 20- Nov. 6, 2020	31 Jan./ Jan. 31, 2021	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	242.280	242.160
Pihak ketiga/Third parties						
PT Medco Power Indonesia MPI I Bonds	idA***)	4 Jul./ Jul. 4, 2018	4 Jul./ Jul. 4, 2025	PT Medco Power Indonesia	250.000	250.000
Reksadana/Mutual funds						
Pihak ketiga/Third parties						
RDPT Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa		5 Okt./ Oct. 5, 2018	5 Jul./ Jul. 5, 2023	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	191.500	191.706
KIK Dintra Toll Road Mandiri-001		27 Jun./ Jun. 27, 2019	27 Jun./ Jun. 27, 2024	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	36.000	36.000
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar						
Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related parties						
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI0321	Baa2*)	29 Jun./ Jun. 29, 2016	5 Mei/ May 5, 2021	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	56.420	57.295
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI22	Baa2*)	29 Mar./ Mar. 29, 2017	29 Mar./ Mar. 29, 2022	Perusahaan Penerbit SBSN	21.158	21.877
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI022	Baa2*)	20 Jul./ Jul. 20, 2016	25 Apr./ Apr. 25, 2022	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	260.943	271.492
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI022	Baa2*)	8 Des./ Dec. 8, 2016	8 Jan./ Jan. 8, 2022	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	35.263	36.331
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI22	Baa2*)	26 Jul./ Jul. 26, 2017	21 Nov./ Nov. 21, 2022	Perusahaan Penerbit SBSN	21.158	22.198
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI023	Baa2*)	26 Jul./ Jul. 26, 2017	15 Apr./ Apr. 15, 2023	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	14.105	14.955
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI028	Baa2*)	11 Des./ Dec. 11, 2017	11 Jan./ Jan. 11, 2028	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	197.470	220.978
Pihak ketiga/Third parties						
Star Energy Bond	Ba3*)	24 Apr./ Apr. 24, 2018	24 Apr./ Apr. 24, 2033	PT Star Energy	639.662	639.662
					2.442.321	2.472.250
Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses					-	(2.202)
					2.442.321	2.470.048

*) Peringkat untuk efek-efek adalah berdasarkan peringkat internasional yang dikeluarkan Moody's untuk Pemerintah Indonesia, obligasi global Wijaya Karya, dan Star Energy.

*) Ratings for securities are based on international rating issued by Moody's for the Government of the Republic of Indonesia, global bonds of Wijaya Karya, and Star Energy.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Rincian efek-efek pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- ***) Sukuk XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri D merupakan *underlying* dari reksadana dimana Perusahaan sebagai satu-satunya pihak yang memiliki unit reksadana tersebut.
- ****) Peringkat untuk efek-efek adalah berdasarkan peringkat yang dikeluarkan Pefindo.
- *****) Obligasi berkelanjutan II Bank Panin tahap III tahun 2018 dan Obligasi berkelanjutan II Bank BRI tahap IV tahun 2018 merupakan *underlying* dari reksadana dimana Perusahaan sebagai satu-satunya pihak yang memiliki unit reksadana tersebut.

	31 Desember/ December 31, 2021
Tingkat bunga per tahun	
Rupiah	8,85 - 10,75%
Dolar Amerika Serikat	3,30 - 6,75%

Selama tahun 2021 dan 2020, Perusahaan melakukan penjualan sejumlah efek-efek dan membukukan keuntungan neto masing-masing sebesar Rp6.138 dan Rp7.562 yang dicatat pada laporan laba rugi.

Lain-lain

Mutasi keuntungan/(kerugian) belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai dari efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Saldo awal	45.389	5.336
Dampak penerapan PSAK No. 71	-	18.848
Saldo awal setelah dampak penerapan PSAK No.71	45.389	24.184
(Penurunan)/kenaikan nilai wajar	(21.354)	20.710
Penurunan cadangan kerugian penurunan nilai	(115)	(218)
Efek pajak	288	713
Saldo akhir	24.208	45.389

6. SECURITIES (continued)

The details of securities as of December 31, 2021 and 2020 are as follows: (continued)

- ***) Sukuk XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri D is the underlying security of mutual funds, whereas the Company is the only party who holds the mutual funds unit.
- ****) Ratings for securities are based on rating issued by Pefindo.
- *****) Shelf registration bond II Bank Panin phase II year 2018 and shelf registration bond II Bank BRI phase IV year 2018 are the underlying security of mutual fund, whereas the Company is the only party who holds the mutual fund unit.

	31 Desember/ December 31, 2020	
		<i>Interest rate per annum</i>
		<i>Rupiah</i>
		<i>United States Dollar</i>

During 2021 and 2020, the Company sold some of its securities and booked net gain of Rp6,138 and Rp7,562 respectively, which was recorded in the statements of profit or loss.

Others

Movements of unrealized gain/(loss) and allowance for impairment losses on securities classified as fair value through other comprehensive income are as follows:

	<i>Beginning balance</i>
	<i>Impact of SFAS No. 71 implementation</i>
	<i>Beginning balance after impact of SFAS No. 71 implementation</i>
	<i>(Decrease)/increase in fair value</i>
	<i>Decrease in allowance for impairment losses</i>
	<i>Tax effect</i>
	Ending balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

Pada bulan Oktober 2021, April 2021 dan April 2020, terdapat pembelian kembali Star Energy Bonds masing-masing sebesar USD2.400.000, USD1.015.000, dan USD650.000 oleh penerbit sesuai dengan ketentuan penerbitan obligasi.

Tidak terdapat efek-efek yang mengalami penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Mutasi nilai tercatat efek-efek:

6. SECURITIES (continued)

Others (continued)

In October 2021, April 2021, and April 2020, the issuer repurchased Star Energy Bonds of USD2,400,000, USD1,015,000, and USD650,000, respectively, in accordance with the bonds issuance terms.

There were no impaired securities as of December 31, 2021 and 2020.

Movement of carrying amount of securities:

31 Desember/December 31, 2021					
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal nilai tercatat	2.472.250	-	-	2.472.250	Carrying amount - beginning balance
Pengukuran kembali bersih	(79.264)	-	-	(79.264)	Remeasurement
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	257.751	-	-	257.751	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(545.247)	-	-	(545.247)	Financial assets that have been derecognized
Selisih kurs dan perubahan lain	25.244	-	-	25.244	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Nilai Tercatat	2.130.734	-	-	2.130.734	Carrying Amount - Ending Balance
31 Desember/December 31, 2020					
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal	2.732.936	-	-	2.732.936	Beginning balance
Dampak penerapan PSAK No. 71	19.569	-	-	19.569	Impact of SFAS No.71 implementation
Saldo awal nilai tercatat	2.752.505	-	-	2.752.505	Carrying amount - beginning balance
Pengukuran kembali bersih	25.254	-	-	25.254	Remeasurement
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	165.124	-	-	165.124	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(488.400)	-	-	(488.400)	Financial assets that have been derecognized
Selisih kurs dan perubahan lain	17.767	-	-	17.767	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Nilai Tercatat	2.472.250	-	-	2.472.250	Carrying Amount - Ending Balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang di klasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi:

6. SECURITIES (continued)

Movement of allowance of impairment losses for securities classified as amortized cost:

		31 Desember/December 31, 2021			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal kerugian kredit ekspektasian	2.202	-	-	2.202	Expected credit loss beginning balance
Pengukuran kembali bersih kerugian kredit ekspektasian	(618)	-	-	(618)	Remeasurement of expected credit loss
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	246	-	-	246	New financial assets originated or purchased
Selisih kurs dan perubahan lain	11	-	-	11	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Kerugian Kredit Ekspektasian	1.841	-	-	1.841	Expected Credit Loss - Ending Balance
		31 Desember/December 31, 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal	-	-	-	-	Beginning balance
Dampak penerapan PSAK No. 71	2.886	-	-	2.886	Impact of SFAS No.71 implementation
Saldo awal kerugian kredit ekspektasian	2.886	-	-	2.886	Expected credit loss beginning balance
Pengukuran kembali bersih kerugian kredit ekspektasian	(637)	-	-	(637)	Remeasurement of expected credit loss
Selisih kurs dan perubahan lain	(47)	-	-	(47)	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Kerugian Kredit Ekspektasian	2.202	-	-	2.202	Expected Credit Loss - Ending Balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:

6. SECURITIES (continued)

Movement of allowance of impairment losses for securities classified as fair value through other comprehensive income:

31 Desember/December 31, 2021					
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal kerugian kredit ekspektasian	115	-	-	115	<i>Expected credit loss beginning balance</i>
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(115)	-	-	(115)	<i>Financial assets that have been derecognized</i>
Saldo Akhir Kerugian Kredit Ekspektasian	-	-	-	-	Expected Credit Loss - Ending Balance
31 Desember/December 31, 2020					
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal	-	-	-	-	<i>Beginning balance</i>
Dampak penerapan PSAK No. 71	333	-	-	333	<i>Impact of SFAS No.71 implementation</i>
Saldo awal kerugian kredit ekspektasian	333	-	-	333	<i>Expected credit loss beginning balance</i>
Pengukuran kembali bersih kerugian kredit ekspektasian	(170)	-	-	(170)	<i>Remeasurement of expected credit loss</i>
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	82	-	-	82	<i>New financial assets originated or purchased</i>
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(130)	-	-	(130)	<i>Financial assets that have been derecognized</i>
Saldo Akhir Kerugian Kredit Ekspektasian	115	-	-	115	Expected Credit Loss - Ending Balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Rincian transaksi derivatif yang masih berjalan adalah sebagai berikut:

7. DERIVATIVE RECEIVABLES AND LIABILITIES

The details of outstanding derivative transactions are as follows:

31 Desember/December 31, 2021						
	Tanggal transaksi/ Transaction date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan/ Counterparty	Nilai nosional/ Notional amount	Tagihan derivatif/ Derivative receivables	Liabilitas derivatif/ Derivative liabilities
<i>Swap</i>						
<i>Pihak berelasi/Related party</i>						
USD (FX Swap)	14 Okt./Oct. 14, 2021	12 Jan./Jan. 12, 2022	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	USD5.000.000	1	-
USD (FX Swap)	14 Okt./Oct. 14, 2021	12 Jan./Jan. 12, 2022	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	USD5.000.000	1	-
USD (FX Swap)	14 Okt./Oct. 14, 2021	26 Jan./Jan. 26, 2022	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	USD5.000.000	-	116
USD (FX Swap)	15 Okt./Oct. 14, 2021	16 Feb./Feb. 16, 2022	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	USD5.000.000	276	-
USD (FX Swap)	15 Okt./Oct. 14, 2021	16 Feb./Feb. 16, 2022	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	USD5.000.000	276	-
USD (FX Swap)	16 Nov./Nov. 16, 2021	11 Feb./Feb. 11, 2022	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	USD4.500.000	-	160
USD (FX Swap)	24 Nov./Nov. 24, 2021	12 Mei/May 12, 2022	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	USD5.000.000	-	453
USD (FX Swap)	24 Nov./Nov. 24, 2021	19 Mei/May 19, 2022	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	USD7.000.000	-	625
USD (FX Swap)	24 Nov./Nov. 24, 2021	25 Mei/May 25, 2022	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	USD7.000.000	-	762
USD (FX Swap)	14 Okt./Oct. 14, 2021	19 Jan./Jan. 19, 2022	PT Bank Permata Tbk	USD5.000.000	-	134
USD (FX Swap)	14 Okt./Oct. 14, 2021	19 Jan./Jan. 19, 2022	PT Bank DBS Indonesia	USD5.000.000	-	15
USD (FX Swap)	15 Okt./Oct. 15, 2021	23 Feb./Feb. 23, 2022	PT Bank Permata Tbk	USD5.000.000	304	-
USD (FX Swap)	15 Okt./Oct. 15, 2021	23 Feb./Feb. 23, 2022	PT Bank Permata Tbk	USD5.000.000	304	-
USD (FX Swap)	2 Des./Dec. 2, 2021	7 Mar./Mar. 7, 2022	PT Bank Permata Tbk	USD8.000.000	-	1.425
USD (FX Swap)	24 Nov./Nov. 24, 2021	12 Mei/May 12, 2022	PT Bank HSBC Indonesia	USD5.000.000	-	369
USD (FX Swap)	9 Des./Dec. 9, 2021	14 Mar./Mar. 14, 2022	PT Bank HSBC Indonesia	USD8.000.000	-	989
USD (FX Swap)	14 Okt./Oct. 14, 2021	2 Feb./Feb. 2, 2022	PT Bank Anz Indonesia	USD10.000.000	257	-
USD (FX Swap)	14 Okt./Oct. 14, 2021	26 Jan./Jan. 26, 2022	PT Bank Anz Indonesia	USD5.000.000	-	127
USD (FX Swap)	15 Okt./Oct. 15, 2021	9 Feb./Feb. 9, 2022	PT Bank Anz Indonesia	USD10.000.000	587	-
USD (FX Swap)	16 Nov./Nov. 16, 2021	11 Feb./Feb. 11, 2022	PT Bank Anz Indonesia	USD4.000.000	-	136
USD (IRS)	31 Mei/May 31, 2019	8 Mei/May 8, 2024	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	USD50.000.000	-	21.897
USD (IRS)	31 Mei/May 31, 2019	8 Mei/May 8, 2026	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	USD50.000.000	-	30.899
<i>Opsi/Option (Catatan 8/Note 8)</i>						
<i>Pihak ketiga/Third party</i>						
IDR	8 Okt./Oct. 8, 2018	8 Okt./Oct. 8, 2023	Matahari Kapital Indonesia		208.774	-
					210.780	58.107

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Rincian transaksi derivatif yang masih berjalan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

7. DERIVATIVE RECEIVABLES AND LIABILITIES (continued)

The details of outstanding derivative transactions are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2020						
	Tanggal transaksi/ Transaction date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan/ Counterparty	Nilai nosional/ Notional amount	Tagihan derivatif/ Derivative receivables	Liabilitas derivatif/ Derivative liabilities
<i>Swap</i>						
<i>Pihak ketiga/Third party</i>						
	USD (IRS)	31 Mei/May 31, 2019	8 Mei/May 8, 2024	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	USD50.000.000	-
	USD (IRS)	31 Mei/May 31, 2019	8 Mei/May 8, 2026	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	USD50.000.000	-
<i>Opsi/Option (Catatan 8/Note 8)</i>						
<i>Pihak ketiga/Third party</i>						
	IDR	8 Okt./Oct.8, 2018	8 Okt./Oct. 8, 2023	Matahari Kapital Indonesia	69.265	-
					<u>69.265</u>	<u>117.200</u>

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, transaksi derivatif dimaksudkan untuk keperluan lindung nilai secara akuntansi, sebagai berikut:

As of December 31, 2021 and 2020, derivative transactions are determined as hedging for accounting purposes, as follows:

- a. Transaksi derivatif *swap* suku bunga dengan Standard Chartered Bank sebesar USD100.000.000 yang memenuhi kriteria lindung nilai secara akuntansi dengan tujuan lindung nilai atas risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh tingkat suku bunga atas pinjaman yang diterima dari International Finance Corporation dengan rincian sebagai berikut:

- a. Interest rate swap derivative transactions with Standard Chartered Bank amounting to USD100,000,000 that meets the criteria for hedge accounting to hedge the risk of fluctuations in cash flows arising from interest rates on its fund borrowing from International Finance Corporation as follows:

Nilai kontrak/ Contract value	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal berakhir/ Maturity date
USD50.000.000	8 Mei/May 8, 2019	8 Mei/May 8, 2024
USD50.000.000	21 Juni/June 21, 2019	8 Mei/May 8, 2026

Perusahaan menyetujui untuk membayar pokok pinjaman diterima masing-masing sebesar USD50.000.000 dan bunga pinjaman diterima setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga mengambang masing-masing LIBOR + 1,75% dan LIBOR + 1,20%. Dari transaksi derivatif, Perusahaan akan menerima pokok sebesar USD100.000.000 dan bunga setiap 3 (tiga) bulanan dengan tingkat suku bunga mengambang sebesar LIBOR.

The Company agrees to pay principal of fund borrowing each amounting to USD50,000,000, and quarterly interest of fund borrowing with a floating rate at LIBOR + 1.75% and LIBOR + 1.20%, respectively. From derivative transaction, the Company will receive principal amounting to USD100,000,000 and quarterly interest with a floating rate at LIBOR.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, transaksi derivatif dimaksudkan untuk keperluan lindung nilai secara akuntansi, sebagai berikut: (lanjutan)

Kerugian kumulatif yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif - setelah pajak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp41.181 dan Rp93.760, yang disajikan sebagai "Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto" sebagai bagian "Ekuitas" pada laporan posisi keuangan dan akan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat realisasinya.

- b. Transaksi derivatif opsi dengan PT Matahari Kapital Indonesia yang memenuhi kriteria lindung nilai secara akuntansi dengan tujuan lindung nilai atas risiko perubahan nilai wajar atas investasi saham Perusahaan PT Nusantara Infrastructure Tbk (Catatan 8).

(Kerugian)/keuntungan kumulatif yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif - setelah pajak dan dari perubahan nilai wajar investasi saham - setelah pajak pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp18.135) dan Rp25.647 yang disajikan sebagai "(Kerugian)/keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai wajar - neto" sebagai bagian "Ekuitas" pada laporan posisi keuangan dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada saat realisasinya.

Transaksi derivatif opsi dimaksudkan untuk keperluan lindung nilai secara akuntansi sejak tanggal 1 Januari 2020.

8. INVESTASI SAHAM

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
PT Nusantara Infrastructure Tbk	201.902	396.720
	201.902	396.720

**7. DERIVATIVE RECEIVABLES AND LIABILITIES
(continued)**

As of December 31, 2021 and 2020, derivative transactions are determined as hedging for accounting purposes, as follows: (continued)

The cumulative losses arising from the changes in fair values of the derivative instruments - net of tax as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp41,181 and Rp93,760, were presented as "Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges - net" under the "Equity" section in the statement of financial position and will be recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income upon its realization.

- b. Option derivative transactions with PT Matahari Kapital Indonesia that meets the criteria for hedge accounting to hedge the risk to fair value changes on the Company's equity investment of PT Nusantara Infrastructure Tbk (Note 8).

The cumulative (loss)/gain arising from the changes in fair values of the derivative instruments - net of tax and changes in fair values of the equity investment - net of tax as of December 31, 2021 and 2020 amounting to (Rp18,135) and Rp25,647 was presented as "Cumulative (loss)/gain on derivative instrument for fair value hedges - net" under the "Equity" section in the statement of financial position and will not be subsequently transferred to the profit or loss upon its realization.

Option derivative transactions is determined as hedging for accounting purpose starting January 1, 2020.

8. EQUITY INVESTMENTS

PT Nusantara Infrastructure Tbk

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. INVESTASI SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perusahaan melakukan perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan PT Metro Pacific Tollways Indonesia untuk pembelian sebanyak 1.523.567.500 lembar saham atau setara 10% kepemilikan saham di PT Nusantara Infrastructure Tbk ("PTNI") dengan harga sebesar Rp250 (nilai penuh) per lembar. Perusahaan membeli dengan total harga sebesar Rp380.892.

Sebelumnya pada tanggal 5 Oktober 2018, Perusahaan menandatangani Perjanjian Opsi dengan PT Matahari Kapital Indonesia ("MKI"). Dalam perjanjian opsi tersebut, Perusahaan akan memberikan opsi beli kepada MKI sedangkan MKI akan memberikan opsi jual kepada Perusahaan terkait dengan saham yang dimiliki Perusahaan di PTNI sebanyak 1.523.567.500 lembar saham.

Opsi jual

Perusahaan berhak (tetapi tidak berkewajiban) untuk mensyaratkan MKI untuk, selama periode Opsi (antara 8 April 2023 - 8 Oktober 2023), membeli saham PTNI yang dimiliki Perusahaan baik secara bertahap maupun sekaligus pada harga pembelian sebesar Rp250 (nilai penuh) per lembar saham.

Opsi beli

Perusahaan memberi opsi kepada MKI untuk mensyaratkan Perusahaan untuk, selama periode Opsi (antara 8 April 2023 - 8 Oktober 2023), menjual saham PTNI yang dimiliki oleh Perusahaan baik secara bertahap maupun sekaligus pada harga pembelian per lembar saham sebesar Rp250 (nilai penuh) ditambah premi yang memberikan tingkat pengembalian kepada Perusahaan sebesar 15% per tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian saham hingga tanggal penutupan opsi beli.

Pada tanggal 17 sampai 21 Desember 2018, PTNI melakukan penawaran umum terbatas saham sebesar Rp495.007. Untuk mempertahankan kepemilikannya di PTNI, Perusahaan kembali melakukan pembelian 10% saham dari penawaran umum saham dengan harga Rp200 (nilai penuh) per lembar. Total pembelian saham tersebut sebesar Rp49.500.

8. EQUITY INVESTMENTS (continued)

On October 8, 2018, the Company entered into a Conditional Sale and Purchase Agreement with PT Metro Pacific Tollways Indonesia for the purchase of 1,523,567,500 shares or equivalent to 10% ownership of PT Nusantara Infrastructure Tbk ("PTNI") at Rp250 (full amount) per share. Total purchase price amounting to Rp380,892.

On October 5, 2018, the Company signed an option agreement with PT Matahari Kapital Indonesia ("MKI"). In the option agreement, the Company will give MKI a buy option while MKI will give the Company a sell option related to the PTNI's shares owned by the Company totaling to 1,523,567,500 shares.

Sell option

The Company has a right (but not obligation) to require MKI, during the option period (between April 8, 2023 - October 8, 2023), to purchase PTNI's shares owned by the Company on stages or lumpsum at a purchase price of Rp250 (full amount) per share.

Buy option

The Company gives MKI an option to require the Company, during the option period (between April 8, 2023 to October 8, 2023), to sell PTNI's shares owned by the Company on stages or lumpsum at a purchase price of Rp250 (full amount) per share plus premium which reflects an internal rate of return of 15% per annum to the Company which is calculated since the purchase date of the shares until the option closing date.

On December 17 until 21, 2018, PTNI conducted limited public right issuance with total amounting to Rp495,007. To maintain its ownership in PTNI, the Company purchased additional 10% shares of the right issuance at Rp200 (full amount) per share. The Company's total purchase amounting to Rp49,500.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. INVESTASI SAHAM (lanjutan)

Opsi beli (lanjutan)

Pada tanggal 7 Agustus 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Opsi dengan PT Matahari Kapital Indonesia ("MKI"). Dalam perjanjian opsi tersebut, Perusahaan akan memberikan opsi beli kepada MKI sedangkan MKI akan memberikan opsi jual kepada Perusahaan terkait dengan tambahan saham yang dimiliki Perusahaan di PTNI sebanyak 247.503.631 lembar saham. Dengan demikian, opsi beli MKI dan opsi jual Perusahaan atas kepemilikan saham Perusahaan di PTNI menjadi sebanyak 1.771.071.131 lembar saham.

Efektif sejak 1 Januari 2020, Perusahaan mereklasifikasi investasi saham ini menjadi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan menghitung nilai wajar dari investasi saham di PTNI berdasarkan harga saham terakhir yang tercatat di Bursa Efek Indonesia masing-masing sebesar Rp114 dan Rp224 (nilai penuh) dan menetapkan nilai wajar dari investasi saham tersebut sebesar Rp201.902 dan Rp396.720 sehingga Perusahaan membukukan (kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar sebesar (Rp194.818) dan Rp7.084 di penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan menghitung nilai wajar dari opsi sebesar Rp208.774 dan Rp69.265 yang dicatat sebagai tagihan derivatif (Catatan 7) sehingga membukukan keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai nilai wajar sebesar Rp139.509 dan Rp24.975 di penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Komitmen investasi saham

Rincian komitmen investasi saham adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021 dan 2020/ December 31, 2021 and 2020		
	Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total
Rupiah - Pihak ketiga	430.393	-	430.393
Lainnya	430.393	-	430.393

8. EQUITY INVESTMENTS (continued)

Buy option (continued)

On August 7, 2019, the Company signed an option agreement with PT Matahari Kapital Indonesia ("MKI"). In the option agreement, the Company will give MKI a buy option while MKI will give the Company a sell option related to the PTNI's additional shares owned by the Company in PTNI amounting to 247,503,631 shares. Therefore, MKI's buy option and the Company's sell option to the Company's share ownership in PTNI totaling to 1,771,071,131 shares.

Effective January 1, 2020, the Company reclassified the equity instrument to be measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI).

As of December 31, 2021 and 2020, the Company calculated the fair value of the equity investment in PTNI based on the latest stock price recorded in Indonesia Stock Exchange amounting to Rp114 and Rp224 (full amount), respectively and designated the fair value of those equity investment of Rp201,902 and Rp396,720 which resulted the Company booked an unrealized (loss)/gain from changes in fair value of (Rp194,818) and Rp7,084 in the current year's other comprehensive income.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company calculates the fair value of the option of Rp208,774 and Rp69,265 which are recorded as derivative receivables (Note 7) which resulted the Company booked an unrealized gain from fair value changes from derivative instrument qualified as fair value hedge of Rp139,509 and Rp24,975 in the current year's other comprehensive income.

Equity investment commitment

Details of equity investment commitment are as follows:

Rupiah - Third party
Others

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN

Pinjaman diberikan berdasarkan mata uang dan jenis kredit:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Rupiah - Pihak berelasi Investasi	2.955.809	2.608.694
Rupiah - Pihak ketiga Investasi	4.426.844	4.379.149
Modal kerja	199.675	-
	<u>7.582.328</u>	<u>6.987.843</u>
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi Investasi	362.239	362.234
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga Investasi	2.365.431	2.019.935
Modal kerja	1.107	-
	<u>2.728.777</u>	<u>2.382.169</u>
	10.311.105	9.370.012
Ditambah/(dikurangi):		
Piutang bunga	235.973	118.145
Biaya transaksi belum diamortisasi	(63.930)	(46.782)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(279.785)	(243.889)
	<u>10.203.363</u>	<u>9.197.486</u>

9. LOANS

Loans based on currency and type of loans:

<i>Rupiah - Related parties Investment</i>
<i>Rupiah - Third parties Investment Working capital</i>
<i>United States Dollar - Related parties Investment</i>
<i>United States Dollar - Third parties Investment Working capital</i>
<i>Add/(less): Accrued interest income Unamortized transaction costs Allowance for impairment losses</i>

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Pinjaman diberikan berdasarkan jangka waktu pinjaman:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Rupiah - Pihak berelasi		
Kurang dari 1 tahun	177.029	75.520
1 - 3 tahun	453.593	306.401
3 - 5 tahun	476.059	543.735
5 - 10 tahun	573.863	1.179.084
Lebih dari 10 tahun	1.275.265	503.954
Rupiah - Pihak ketiga		
Kurang dari 1 tahun	211.384	216.247
1 - 3 tahun	1.462.978	922.023
3 - 5 tahun	830.087	966.310
5 - 10 tahun	1.591.848	1.475.476
Lebih dari 10 tahun	530.222	799.093
	7.582.328	6.987.843
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi		
Kurang dari 1 tahun	34.172	120.720
1 - 3 tahun	149.824	241.514
3 - 5 tahun	178.243	-
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga		
Kurang dari 1 tahun	150.326	105.562
1 - 3 tahun	401.611	302.325
3 - 5 tahun	518.365	353.290
5 - 10 tahun	1.096.495	981.082
Lebih dari 10 tahun	199.741	277.676
	2.728.777	2.382.169
	10.311.105	9.370.012
Ditambah/(dikurangi):		
Piutang bunga	235.973	118.145
Biaya transaksi belum diamortisasi	(63.930)	(46.782)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(279.785)	(243.889)
	10.203.363	9.197.486

9. LOANS (continued)

Loans based on credit term:

Rupiah - Related parties
Less than 1 year
1 - 3 years
3 - 5 years
5 - 10 years
More than 10 years
Rupiah - Third parties
Less than 1 year
1 - 3 years
3 - 5 years
5 - 10 years
More than 10 years
United States Dollar - Related parties
Less than 1 year
1 - 3 years
3 - 5 years
United States Dollar - Third parties
Less than 1 year
1 - 3 years
3 - 5 years
5 - 10 years
More than 10 years
Add/(less):
Accrued interest income
Unamortized transaction costs
Allowance for impairment losses

Pada tanggal 31 Desember 2021, terdapat kenaikan atas pinjaman diberikan yang berasal dari bunga dalam masa konstruksi ("IDC") sebesar Rp150.478 (2020: Rp179.931).

As of December 31, 2021, there is an increase in loans from interest during construction ("IDC") amounting to Rp150,478 (2020: Rp179,931).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Mutasi total pinjaman diberikan:

9. LOANS (continued)

Movement of total loan outstanding:

31 Desember/December 31, 2021					
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal nilai tercatat	8.921.111	203.281	316.983	9.441.375	Carrying amount - beginning balance
Pengukuran kembali bersih	(17.690)	558	-	(17.132)	Remeasurement
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	3.209.582	22.626	3.231	3.235.439	New financial asset originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(2.226.100)	(25.674)	(10.637)	(2.262.411)	Financial assets that have been derecognized
Selisih kurs dan perubahan lain	84.932	-	945	85.877	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Nilai Tercatat	9.971.835	200.791	310.522	10.483.148	Carrying Amount - Ending Balance
31 Desember/December 31, 2020					
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal nilai tercatat	5.893.256	192.274	320.681	6.406.211	Carrying amount - beginning balance
Pengukuran kembali bersih	(10.699)	(564)	-	(11.263)	Remeasurement
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	3.896.258	24.583	1.690	3.922.531	New financial asset originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(921.588)	(13.012)	(6.664)	(941.264)	Financial assets that have been derecognized
Selisih kurs dan perubahan lain	63.884	-	1.276	65.160	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Nilai Tercatat	8.921.111	203.281	316.983	9.441.375	Carrying Amount - Ending Balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

9. LOANS (continued)

Movement for allowance for impairment losses:

31 Desember/December 31, 2021					
Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total		
Saldo awal kerugian kredit ekspektasian	66.316	65.548	112.025	243.889	<i>Expected credit loss beginning balance</i>
Pengukuran kembali bersih Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	11.762	4.619	-	16.381	<i>New financial asset originated or purchased</i>
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(11.229)	(4.206)	-	(15.435)	<i>Financial assets that have been derecognized</i>
Selisih kurs dan perubahan lain	61	-	459	520	<i>Foreign exchange and other movements</i>
Saldo Akhir Kerugian Kredit Ekspektasian	126.375	61.436	91.974	279.785	Expected Credit Loss - Ending Balance
31 Desember/December 31, 2020					
Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total		
Saldo awal	17.285	60.134	96.130	173.549	<i>Beginning balance</i>
Dampak penerapan PSAK No. 71	15.118	1.750	2.277	19.145	<i>Impact of SFAS No. 71 implementation</i>
Saldo awal kerugian kredit ekspektasian	32.403	61.884	98.407	192.694	<i>Expected credit loss beginning balance</i>
Pengukuran kembali bersih Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	7.936	198	-	8.134	<i>New financial assets originated or purchased</i>
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(403)	-	-	(403)	<i>Financial assets that have been derecognized</i>
Selisih kurs dan perubahan lain	(501)	-	(34)	(535)	<i>Foreign exchange and other movements</i>
Saldo Akhir Kerugian Kredit Ekspektasian	66.316	65.548	112.025	243.889	Expected Credit Loss - Ending Balance

Perusahaan menghitung cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penilaian secara individual dan kolektif.

The Company provides allowance for impairment losses based on individual and collective assessments.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman diberikan telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on loans is adequate.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Saldo pinjaman diberikan yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Pihak ketiga		
Investasi	509.761	504.469
Ditambah/(dikurangi):		
Piutang bunga	1.558	363
Biaya transaksi belum diamortisasi	(5)	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(160.334)	(171.808)
Saldo akhir	350.980	333.024

Termasuk di dalam pinjaman diberikan merupakan pinjaman dengan perjanjian pembiayaan bersama dengan entitas lain. Keikutsertaan Perusahaan sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan berkisar antara 0,3% sampai dengan 52% (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dari total pinjaman sindikasi. Risiko atas pinjaman sindikasi ditanggung secara proporsional oleh peserta kreditur.

Komitmen pinjaman diberikan

Rincian komitmen pinjaman diberikan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2021		
	Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total
Rupiah - Pihak berelasi			
Jalan	1.318.219	126.126	1.444.345
Pelabuhan udara	831.482	-	831.482
Telekomunikasi	415.434	-	415.434
Utilitas air dan limbah	223.387	372.783	596.170
Listrik	114.685	-	114.685
Jalan kereta	52.602	185.147	237.749
Lainnya	-	250.000	250.000
	2.955.809	934.056	3.889.865
Rupiah - Pihak ketiga			
Telekomunikasi	2.265.577	617.978	2.883.555
Utilitas air dan limbah	907.378	-	907.378
Listrik	896.810	531.462	1.428.272
Minyak dan gas	258.370	98.543	356.913
Infrastruktur sosial	233.499	344.063	577.562
Jalan	64.885	533.325	598.210
	4.626.519	2.125.371	6.751.890
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi			
Pemeliharaan pesawat	353.752	-	353.752
Listrik	8.487	-	8.487
	362.239	-	362.239

9. LOANS (continued)

Restructured loans balance are as follows:

Third parties Investment
Add/(less):
Accrued interest income
Unamortized transaction costs
Allowance for impairment losses
Ending balance

Included in the loans are loans with syndication agreements with other entities. The Company's participation as a member of syndicated loans were ranging from 0.3% to 52% (unaudited) as of December 31, 2021 and 2020, respectively, of the total syndicated loans. Risks from syndicated loans are shared proportionately by the participating creditors.

Loan commitment

Details of loan commitment are as follows:

Rupiah - Related parties
Road
Airport
Telecommunication
Water and waste utility
Electricity
Railway
Others
Rupiah - Third parties
Telecommunication
Water and waste utility
Electricity
Oil and gas
Social infrastructure
Road
United States Dollar - Related parties
Aircraft maintenance
Electricity

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Komitmen pinjaman diberikan (lanjutan)

Rincian komitmen pinjaman diberikan adalah
sebagai berikut: (lanjutan)

9. LOANS (continued)

Loan commitment (continued)

Details of loan commitment are as follows:
(continued)

31 Desember/December 31, 2021 (lanjutan)			
	Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga			United States Dollar - Third parties
Listrik	1.125.463	458.155	Electricity
Minyak dan gas	791.159	778.636	Oil and gas
Penunjang pelabuhan laut	416.948	-	Seaport support
Telekomunikasi	32.968	395.102	Telecommunication
	2.366.538	1.631.893	
	10.311.105	4.691.320	15.002.425
31 Desember/December 31, 2020			
	Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total
Rupiah - Pihak berelasi			Rupiah - Related parties
Jalan	1.214.901	231.019	Road
Pelabuhan udara	858.275	-	Airport
Telekomunikasi	397.256	-	Telecommunication
Listrik	138.262	-	Electricity
Utilitas air dan limbah	-	420.000	Water and waste utility
	2.608.694	651.019	
Rupiah - Pihak ketiga			Rupiah - Third parties
Telekomunikasi	1.270.000	-	Telecommunication
Utilitas air dan limbah	1.058.920	95.000	Water and waste utility
Listrik	870.405	279.054	Electricity
Jalan	652.445	658.777	Road
Infrastruktur sosial	250.000	250.000	Social infrastructure
Minyak dan gas	141.065	-	Oil and gas
Penunjang pelabuhan laut	120.319	-	Seaport support
Lainnya	15.995	285.000	Others
	4.379.149	1.567.831	
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi			United States Dollar - Related parties
Pemeliharaan pesawat	349.687	-	Aircraft maintenance
Listrik	12.547	-	Electricity
	362.234	-	
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga			United States Dollar - Third parties
Listrik	1.150.666	232.732	Electricity
Penunjang pelabuhan laut	442.115	104.735	Seaport support
Minyak dan gas	427.154	4.056	Oil and gas
Lainnya	-	70.525	Others
	2.019.935	412.048	
	9.370.012	2.630.898	12.000.910

Pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk dalam
total komitmen di atas adalah bunga dalam masa
konstruksi ("IDC") sebesar Rp320.360 (2020:
Rp264.953).

As of December 31, 2021, the total commitment
above includes interest during construction ("IDC")
amounting to Rp320,360 (2020: Rp264,953).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Komitmen pinjaman diberikan (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Saldo awal	12.000.910	9.621.090
Penambahan selama tahun berjalan	5.326.524	3.539.329
Penerimaan pembayaran pinjaman selama tahun berjalan	(2.095.585)	(803.540)
Pembatalan fasilitas selama tahun berjalan	(261.912)	(429.516)
Efek selisih kurs	32.488	73.547
Saldo akhir	15.002.425	12.000.910

Pinjaman diberikan oleh Perusahaan memiliki tingkat bunga rata-rata di tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 8,80% dan 9,12% per tahun untuk pinjaman dalam Rupiah dan masing-masing 4,32% dan 4,62% per tahun untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat.

Pinjaman diberikan dapat dijamin dengan agunan berupa salah satu atau kombinasi dari aset tetap, saham, mesin atau peralatan, piutang, rekening bank, jaminan perusahaan atau personal dan jaminan lain yang relevan, serta pengikatan secara hak tanggungan, gadai atau fidusia. Pada beberapa debitur, pemberian pinjaman diberikan secara sindikasi atau *club deal* dengan melibatkan minimal dua kreditur. Dalam hal ini, agunan yang diterima dilakukan pengikatan secara *pari passu* sesuai proporsi nilai fasilitas yang diberikan.

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* adalah 0,64% dan 0,73% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit).

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) *Net* adalah 0,36% dan 0,38% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit).

10. PIUTANG BUNGA

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Efek-efek	95.947	85.622
Transaksi derivatif	190	196
Deposito berjangka	11	1.022
	96.148	86.840

9. LOANS (continued)

Loan commitment (continued)

	31 Desember/ December 31, 2020	
	9.621.090	<i>Beginning balance</i>
	3.539.329	<i>Addition during the year</i>
	(803.540)	<i>Loan repayment during the year</i>
	(429.516)	<i>Facility cancellation during the year</i>
	73.547	<i>Foreign exchange effect</i>
	12.000.910	Ending balance

The Company disbursed the loans at average interest rates in 2021 and 2020 of 8.80% and 9.12% per annum, respectively for Rupiah loans and of 4.32% and 4.62% per annum, respectively for United States Dollar loans.

Loans may be secured by collateral in the form of one or a combination of fixed assets, shares, machinery or equipment, accounts receivable, bank accounts, personal and corporate guarantees, or other relevant guarantees as well as a binding mortgage, lien or fiduciary. For some debtors, the loans are syndicated loans or club deal involving at least two creditors. In this case, the collateral received is binded in accordance with the portion of facility amount on *pari passu* basis.

The Gross NPF Ratio is 0.64% and 0.73% as of December 31, 2021 and 2020, respectively (unaudited).

The Net NPF Ratio is 0.36% and 0.38% as of December 31, 2021 and 2020, respectively (unaudited).

10. ACCRUED INTEREST INCOME

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Efek-efek	95.947	85.622	<i>Securities</i>
Transaksi derivatif	190	196	<i>Derivative transactions</i>
Deposito berjangka	11	1.022	<i>Time deposits</i>
	96.148	86.840	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Lisensi	1.791	3.533
Program kepemilikan mobil	1.557	1.646
Relokasi pusat data	1.399	-
Asuransi	658	638
Sign on bonus	169	517
Lain-lain	1.287	646
	6.861	6.980

11. PREPAID EXPENSES

License
Car ownership program
Data center relocation
Insurance
Sign on bonus
Others

12. ASET TETAP

	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2021	
Harga perolehan						Cost
Bangunan	281.843	-	-	-	281.843	Building
Kendaraan	2.704	-	-	-	2.704	Vehicles
Komputer	4.196	1.031	(327)	2.380	7.280	Computer
Peralatan kantor	3.406	132	-	-	3.538	Office equipment
Perabotan dan perlengkapan kantor	39.040	-	-	-	39.040	Office furniture and fixtures
Aset hak guna	1.295	-	-	-	1.295	Right-of-use assets
Aset tetap dalam penyelesaian	2.380	-	-	(2.380)	-	Property and equipment in progress
	334.864	1.163	(327)	-	335.700	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	23.487	9.395	-	-	32.882	Building
Kendaraan	2.704	-	-	-	2.704	Vehicles
Komputer	3.956	913	(327)	-	4.542	Computer
Peralatan kantor	2.837	258	-	-	3.095	Office equipment
Perabotan dan perlengkapan kantor	24.461	9.691	-	-	34.152	Office furniture and fixtures
Aset hak guna	536	536	-	-	1.072	Right-of-use assets
	57.981	20.793	(327)	-	78.447	
Nilai tercatat neto	276.883				257.253	Net carrying value

	1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2020	
Harga perolehan					Cost
Bangunan	281.843	-	-	281.843	Building
Kendaraan	2.704	-	-	2.704	Vehicles
Komputer	4.196	-	-	4.196	Computer
Peralatan kantor	3.151	255	-	3.406	Office equipment
Perabotan dan peralatan kantor	39.027	13	-	39.040	Office furniture and fixtures
Aset hak guna	1.295	-	-	1.295	Right-of-use assets
Aset tetap dalam penyelesaian	-	2.380	-	2.380	Property and equipment in progress
	332.216	2.648	-	334.864	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	14.092	9.395	-	23.487	Building
Kendaraan	2.669	35	-	2.704	Vehicles
Komputer	3.619	337	-	3.956	Computer
Peralatan kantor	2.263	574	-	2.837	Office equipment
Perabotan dan peralatan kantor	14.771	9.690	-	24.461	Office furniture and fixtures
Aset hak guna	-	536	-	536	Right-of-use assets
	37.414	20.567	-	57.981	
Nilai tercatat neto	294.802			276.883	Net carrying value

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (Catatan 26).

Tidak terdapat penjualan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp8.751 (2020: Rp8.223).

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset tetap telah diasuransikan kepada PT Asuransi Central Asia, PT Sampo Insurance Indonesia, dan PT Asuransi FPG Indonesia, yang merupakan pihak ketiga, terhadap risiko kerugian dan kehilangan dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp332.865 (2020: Rp332.973). Manajemen berpendapat bahwa perlindungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelaahan penurunan nilai atas aset tetap, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat terpulihkan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Di bawah ini adalah jumlah tercatat utang sewa (termasuk dalam "Utang lain-lain" pada Catatan 15) dan mutasi selama tahun berjalan:

Utang sewa

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Saldo awal	835	1.295
Mutasi selama periode berjalan	(586)	(536)
Beban bunga	39	76
Saldo akhir	288	835

13. BEBAN TANGGUHAN

Beban tangguhan merupakan biaya transaksi yang dibayarkan kepada pihak ketiga berkaitan dengan proses pemberian kredit kepada nasabah dan proses pinjaman diterima oleh Perusahaan. Biaya transaksi akan disajikan sebagai bagian dari pinjaman diberikan atau pinjaman diterima dan kemudian diamortisasi ketika pinjaman diberikan tersebut telah disalurkan kepada debitur atau pinjaman diterima telah ditarik oleh Perusahaan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen berpendapat bahwa beban tangguhan dapat direalisasi pada kegiatan bisnis normal.

12. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

Depreciation of property and equipment is charged to general and administrative expense (Note 26).

There is no sale of property and equipment for the years ended December 31, 2021 and 2020.

As of December 31, 2021, the gross amount of property and equipment which have been fully depreciated and still being used amounting to Rp8,751 (2020: Rp8,223).

As of December 31, 2021, property and equipment were insured with PT Asuransi Central Asia, PT Sampo Insurance Indonesia, and PT Asuransi FPG Indonesia which are third parties, against damage and loss risks with sum insured of Rp332,865 (2020: Rp332,973). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the insured assets.

Based on the assessment for impairment of the property and equipment, the Company's management believes that there are no events or changes in circumstances, which may indicate that the carrying amounts of these assets are not recoverable as of December 31, 2021 and 2020.

Set out below is the carrying amounts of lease liabilities (included under "Other payables" in Note 15) and the movement during the current year:

Lease liabilities

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
		1.295	<i>Beginning balance</i>
	(586)	(536)	<i>Movement during the period</i>
	39	76	<i>Interest expense</i>
	288	835	<i>Ending balance</i>

13. DEFERRED CHARGES

Deferred charges represent transaction costs paid to third parties in relation to the processing of the loan to the customers and the processing of the fund borrowings. The transaction cost will be presented as part of the loan or fund borrowings and amortized when the loan is disbursed to the debtors or the fund borrowings have been drawn by the Company.

As of December 31, 2021 and 2020, management believes that the deferred charges are realizable in the ordinary course of business.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp35 tahun 2021 dan RpNihil tahun 2020	13.476	9.228
Perangkat lunak komputer	5.883	8.674
Uang muka	154	247
	19.513	18.149

14. OTHER ASSETS

Other receivables - net of allowance for impairment losses of Rp35 in 2021 and RpNil in 2020
Computer softwares
Advances

Termasuk di dalam piutang lain-lain adalah piutang atas pendapatan komitmen terkait pinjaman yang diberikan yang belum ditarik dan piutang pendapatan *advisory*.

Included in other receivables are commitment income receivables related to undrawn loan facilities and advisory income receivables.

Perangkat lunak komputer

Computer softwares

31 Desember/December 31, 2021

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan	44.149	641	44.790	Cost
Akumulasi amortisasi	35.475	3.432	38.907	Accumulated amortization
Nilai buku neto	8.674		5.883	Net book value

31 Desember/December 31, 2020

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan	42.474	1.675	44.149	Cost
Akumulasi amortisasi	28.589	6.886	35.475	Accumulated amortization
Nilai buku neto	13.885		8.674	Net book value

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on other assets is adequate.

15. UTANG LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Pihak ketiga		
Utang bunga atas transaksi derivatif	1.523	1.505
Jasa profesional	1.040	1.504
Utang sewa	288	835
Lain-lain	1.987	2.053
	4.838	5.897

15. OTHER PAYABLES

Third parties
Interest payable from derivative transaction
Professional services
Lease liabilities
Others

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**16. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR DAN
LIABILITAS LAIN-LAIN**

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Pihak berelasi		
Bonus	30.966	27.250
Cadangan tunjangan	2.592	1.511
Beban komitmen	1.493	1.930
	35.051	30.691
Pihak ketiga		
Beban jasa profesional	18.813	27.967
Pengembangan sistem	1.311	5.048
Lain-lain	9.498	8.703
	29.622	41.718
	64.673	72.409

Beban komitmen kepada pihak berelasi merupakan beban komitmen atas pinjaman yang belum dicairkan oleh Perusahaan, yang diberikan oleh Asian Development Bank dan World Bank menggunakan mekanisme Pinjaman Subordinasi melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (Catatan 20 dan 31).

16. ACCRUED EXPENSES AND OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
			<i>Related parties</i>
			<i>Bonus</i>
			<i>Benefits provision</i>
			<i>Commitment fees</i>
			<i>Third parties</i>
			<i>Professional fee expense</i>
			<i>System development</i>
			<i>Others</i>

Commitment expenses to related parties represent commitment fees in relation to the undrawn borrowings by the Company, which provided by the Asian Development Bank and World Bank in form of Subordinated Loan through PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (Notes 20 and 31).

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016:		
Seri B		
Pihak ketiga	-	172.000
Pihak berelasi	-	78.000
Seri C		
Pihak ketiga	255.500	275.000
Pihak berelasi	169.500	150.000
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019:		
Seri B		
Pihak ketiga	342.000	342.000
Pihak berelasi	30.000	30.000
Seri C		
Pihak ketiga	163.000	163.000
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020:		
Seri A		
Pihak ketiga	-	570.000
Seri B		
Pihak ketiga	670.000	790.000
Pihak berelasi	140.000	20.000
Seri C		
Pihak ketiga	120.000	120.000

Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016:
B Series
Third parties
Related parties
C Series
Third parties
Related parties

Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019:
B Series
Third parties
Related parties
C Series
Third parties

Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase II Year 2020:
A Series
Third parties
B Series
Third parties
Related parties
C Series
Third parties

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

17. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
<i>Euro Medium Term Note Programme</i>	2.140.351	-	<i>Euro Medium Term Note Programme</i>
	4.030.351	2.710.000	
Ditambah/(dikurangi):			<i>Add/(less):</i>
Beban bunga masih harus dibayar	37.738	31.132	<i>Accrued interest expenses</i>
Biaya penerbitan belum diamortisasi	(17.434)	(5.899)	<i>Unamortized issuance costs</i>
Diskonto belum diamortisasi	(20.948)	-	<i>Unamortized discount</i>
	4.029.707	2.735.233	

Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016

Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-336/D.04/2016 untuk melakukan penawaran umum Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016.

On June 29, 2016, the Company obtained effectivity statement from Financial Services Authority through its letter No. S-336/D.04/2016 to conduct public offering on Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016.

Pada tanggal 19 Juli 2016, Perusahaan telah menerima dana hasil penerbitan obligasi tersebut sebesar Rp1.500.000 yang terdiri dari:

On July 19, 2016, the Company received the funds from the bond's issuance totaling to Rp1,500,000 which consists of:

- Seri A sebesar Rp825.000 dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun untuk tenor 3 tahun;
- Seri B sebesar Rp250.000 dengan tingkat bunga tetap 8,70% per tahun untuk tenor 5 tahun; dan
- Seri C sebesar Rp425.000 dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun untuk tenor 7 tahun.

- *Series A amounting to Rp825,000 with a fixed interest rate of 8.25% per annum and tenor of 3 years;*
- *Series B amounting to Rp250,000 with a fixed interest rate of 8.70% per annum and tenor of 5 years; and*
- *Series C amounting to Rp425,000 with a fixed interest rate of 9.00% per annum and tenor of 7 years.*

Perusahaan telah melakukan pelunasan atas Pinjaman Seri A sesuai jatuh temponya pada tanggal 19 Juli 2019.

The Company has fully repaid Series A Bond on its maturity date on July 19, 2019.

Perusahaan telah melakukan pelunasan atas Pinjaman Seri B sesuai jatuh temponya pada tanggal 19 Juli 2021.

The Company has fully repaid B Series Bond on its maturity date on July 19, 2021.

Obligasi Seri C akan dibayarkan penuh pada tanggal 19 Juli 2023. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan.

The Series C Bond shall be fully repaid on July 19, 2023. Interest is paid quarterly.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for the bond issuance is PT Bank Mega Tbk.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 peringkat Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 menurut Pefindo dan Fitch Rating Indonesia adalah idAAA.

As of December 31, 2021 and 2020, the Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016 is rated idAAA by Pefindo and Fitch Rating Indonesia.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Perjanjian obligasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, utang baru yang memiliki hak tagih lebih tinggi dari obligasi yang diterbitkan, dan pinjaman selain pinjaman kepada pegawai dan pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-198/D.04/2019 untuk melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019.

Pada tanggal 18 Desember 2019, Perusahaan telah menerima dana hasil penerbitan obligasi tersebut sebesar Rp1.500.000 yang terdiri dari:

- Seri A sebesar Rp965.000 dengan tingkat bunga tetap 6,75% per tahun untuk tenor 370 hari;
- Seri B sebesar Rp372.000 dengan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun untuk tenor 3 tahun; dan
- Seri C sebesar Rp163.000 dengan tingkat bunga tetap 7,90% per tahun untuk tenor 5 tahun.

Perusahaan telah melakukan pelunasan atas Obligasi Seri A sesuai jatuh temponya pada tanggal 28 Desember 2020.

Obligasi Seri B dan Seri C akan dibayarkan penuh masing-masing pada tanggal 18 Desember 2022 dan 18 Desember 2024. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

17. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

The bond agreement includes several covenants, among others, the prohibition of reduction of authorized capital, issued and paid-up capital, merger, related party transactions, new loans with higher right to claim more than bonds issued, and borrowing other than borrowing to employees and borrowing granted in order to carry out the daily business activities of the Company.

For the years ended December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Trustee Agreements.

Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019

On December 13, 2019, the Company obtained effectivity statement from the Financial Services Authority through its letter No. S-198/D.04/2019 to conduct public offering on Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019.

On December 18, 2019, the Company received the funds from the bond's issuance totaling to Rp1,500,000 which consists of:

- Series A amounting to Rp965,000 with a fixed interest rate of 6.75% per annum and tenor of 370 days;
- Series B amounting to Rp372,000 with a fixed interest rate of 7.75% per annum and tenor of 3 years; and
- Series C amounting to Rp163,000 with a fixed interest rate of 7.90% per annum and tenor of 5 years.

The Company has fully repaid Series A Bond on its maturity date on December 28, 2020.

The Series B and Series C Bonds shall be fully repaid on December 18, 2022 and December 18, 2024, respectively. Interest is paid quarterly.

The trustee for the bond issuance is PT Bank Mega Tbk.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 menurut Pefindo adalah idAAA.

Perjanjian obligasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, utang baru yang memiliki hak tagih lebih tinggi dari obligasi yang diterbitkan, dan pinjaman selain pinjaman kepada pegawai dan pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwaliananatan.

Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020

Pada bulan Oktober 2020, Perusahaan telah melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, Perusahaan telah menerima dana hasil penerbitan obligasi tersebut sebesar Rp1.500.000 yang terdiri dari:

- Seri A sebesar Rp570.000 dengan tingkat bunga tetap 5,00% per tahun untuk tenor 367 hari;
- Seri B sebesar Rp810.000 dengan tingkat bunga tetap 6,65% per tahun untuk tenor 3 tahun; dan
- Seri C sebesar Rp120.000 dengan tingkat bunga tetap 6,90% per tahun untuk tenor 5 tahun.

Perusahaan telah melakukan pelunasan atas Obligasi Seri A sesuai jatuh temponya pada tanggal 28 Oktober 2021.

Obligasi Seri B dan Seri C akan dibayarkan penuh masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2023 dan 21 Oktober 2025. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

17. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

As of December 31, 2021 and 2020, the Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019 is rated idAAA by Pefindo.

The bond agreement includes several covenants, among others, the prohibition of reduction of authorized capital, issued and paid-up capital, merger, related party transactions, new loans with higher right to claim more than bonds issued, and borrowing other than borrowing to employees and borrowing granted in order to carry out the daily business activities of the Company.

For the years ended December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Trustee Agreements.

Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase II Year 2020

In October 2020, the Company conducted public offering on Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase II Year 2020.

On October 21, 2020, the Company received the funds from the bond's issuance totaling to Rp1,500,000 which consists of:

- Series A amounting to Rp570,000 with a fixed interest rate of 5.00% per annum and tenor of 367 days;
- Series B amounting to Rp810,000 with a fixed interest rate of 6.65% per annum and tenor of 3 years; and
- Series C amounting to Rp120,000 with a fixed interest rate of 6.90% per annum and tenor of 5 years.

The Company has fully repaid Series A Bond on its maturity date on October 28, 2021.

The Series B and Series C Bonds shall be fully repaid on October 21, 2023 and October 21, 2025, respectively. Interest is paid quarterly.

The trustee for the bond issuance is PT Bank Mega Tbk.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 menurut Pefindo adalah idAAA.

Perjanjian obligasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, utang baru yang memiliki hak tagih lebih tinggi dari obligasi yang diterbitkan, dan pinjaman selain pinjaman kepada pegawai dan pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Euro Medium Term Notes (EMTN) Programme Tahun 2021

Perusahaan telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang Senior Tanpa Jaminan dalam jumlah nominal sebesar USD150.000.000 dengan tenor selama 5 tahun dan tingkat suku bunga tetap 1,50% per tahun.

Surat Utang Senior tanpa Jaminan tersebut telah tercatat di Singapore Stock Exchange (SGX) pada tanggal 28 Januari 2021 sebagai bagian dari USD500.000.000 *Euro Medium Term Note Programme* yang mendapatkan peringkat "BBB" oleh Fitch Rating.

Penggunaan dana dari penerbitan Surat Utang tersebut akan digunakan untuk *green projects* yang memenuhi syarat dan/atau proyek sosial yang memenuhi syarat untuk surat utang berkelanjutan.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi ini adalah Citicorp International Limited.

17. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

As of December 31, 2021 and 2020, the Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase II Year 2020 is rated idAAA by Pefindo.

The bond agreement includes several covenants, among others, the prohibition of reduction of authorized capital, issued and paid-up capital, merger, related party transactions, new loans with higher right to claim more than bonds issued, and borrowing other than borrowing to employees and borrowing granted in order to carry out the daily business activities of the Company.

For the years ended December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Trustee Agreements.

Euro Medium Term Notes (EMTN) Programme Year 2021

The Company had issued and offered Senior Unsecured Notes with nominal amounting to USD150,000,000 with a tenor of 5 years and a fixed interest rate of 1.50% per annum.

The Senior Unsecured Notes was listed on the Singapore Stock Exchange (SGX) on January 28, 2021 under the USD500,000,000 Euro Medium Term Note Programme which were rated "BBB" by Fitch Rating.

The use of the proceeds from the issuance of the Notes will be used towards the eligible green projects and/or eligible social projects for sustainability bonds.

The trustee for the bond issuance is Citicorp International Limited.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Perjanjian surat utang mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan memiliki anak perusahaan material dimana pendapatan atau total aset anak perusahaan tidak kurang 10% dari pendapatan konsolidasian atau total aset konsolidasian, mengikat hak tanggungan, fidusia, biaya, gadai, janji atau instrument keamanan lainnya, kecuali penerbit memastikan bahwa:

- Semua jumlah terhutang telah dijamin dengan instrumen keamanan secara sama dan terukur dengan persetujuan dari Wali Amanat, atau;
- Instrumen keamanan atau ketentuan lain di sediakan oleh Wali Amanat dengan pertimbangan mutlak, jika instrumen keamanan atau ketentuan lain tersebut dianggap tidak material atau tidak memberikan manfaat kepada Pemegang surat utang atau sebagaimana di setujui melalui Pernyataan Luar Biasa Pemegang surat utang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka merupakan provisi yang diterima terkait pinjaman diberikan yang dananya belum ditarik oleh debitur. Pada tanggal 31 Desember 2021, total pendapatan diterima dimuka adalah sebesar Rp5.348 (2020: Rp8.106).

19. PINJAMAN DITERIMA

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.100.000	1.500.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	750.000	1.500.000
PT Bank Permata Tbk	500.000	1.000.000
Dolar Amerika Serikat		
International Finance Corporation (USD100.000.000 pada tahun 2021 dan 2020)	1.426.901	1.410.501
	<u>3.776.901</u>	<u>5.410.501</u>
Ditambah/(dikurangi):		
Beban bunga masih harus dibayar	3.890	5.768
Biaya transaksi belum diamortisasi	(32.499)	(37.476)
	<u>3.748.292</u>	<u>5.378.793</u>

17. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

The note agreement includes several covenants, among others, the prohibition of acquiring a material subsidiary whose revenue or total assets not less than 10% of the consolidated revenue or consolidated total assets, binding a mortgage, fiducia, charge, lien, pledge or other security interest to secure a relevant indebtedness, unless the issuer ensure that:

- All amount payable are secured by the security interest equally and rateably with the consent of the Trustee, or;
- Such security interest or other arrangement is provided which the Trustee shall, in its absolute discretion, if security interest or other arrangement deem not material or less beneficial to the Noteholders or as is approved by an Extraordinary Resolution of the Noteholders.

For the years ended December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Trustee Agreements.

18. UNEARNED REVENUE

Deferred income represents provision received related to loan receivables which have not been drawdown yet by the debtors. As of December 31, 2021, total unearned revenue amounting to Rp5,348 (2020: Rp8,106).

19. FUND BORROWINGS

	Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.500.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.500.000
PT Bank Permata Tbk	1.000.000
United States Dollar	
International Finance Corporation (USD100,000,000 in 2021 and 2020)	1.410.501
	<u>5.410.501</u>
Add/(less):	
Accrued interest expenses	5.768
Unamortized transaction costs	(37.476)
	<u>5.378.793</u>

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah sebesar Rp1.500.000 (Catatan 31 dan 33).

Pinjaman ini memiliki suku bunga sebesar JIBOR 1 bulan + 1,44% per tahun dengan tenor 3 tahun dan akan dibayarkan penuh pada tanggal 30 Mei 2020. Bunga dibayarkan setiap bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 23 Februari 2020, Perusahaan melakukan percepatan pelunasan atas pokok pinjaman sebesar Rp1.000.000.

Pada tanggal 23 Mei 2020, Perusahaan melakukan pelunasan atas sisa pokok pinjaman sebesar Rp500.000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah sebesar Rp3.000.000 dan USD100.000.000 yang terdiri dari pinjaman transaksi khusus sebesar Rp2.500.000, kredit jangka pendek Rp500.000 dan *treasury line* sebesar USD100.000.000 (Catatan 31 dan 33).

Pinjaman transaksi khusus memiliki suku bunga sebesar JIBOR 1 bulan + 1,59% per tahun dengan tenor 3 tahun dan akan dibayarkan penuh pada tanggal 26 Oktober 2021. Bunga dibayarkan setiap bulan.

Pada tanggal 17 April 2020, Perusahaan telah mencairkan fasilitas pinjaman transaksi khusus sebesar Rp2.500.000.

Perusahaan telah melakukan pelunasan atas fasilitas pinjaman transaksi khusus tersebut dengan melakukan beberapa kali pembayaran, yaitu:

- pada tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp1.000.000;
- pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp500.000; dan
- pada tanggal 30 November 2020 sebesar Rp1.000.000.

19. FUND BORROWINGS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

The Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp1,500,000 (Notes 31 and 33).

This loan has an interest rate of 1-month JIBOR + 1.44% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment on May 30, 2020. Interest is paid monthly.

As of December 31, 2019, the Company had drawdown the loan facility amounting to Rp1,500,000.

On February 23, 2020, the Company early repaid the principal of the loan amounting to Rp1,000,000.

On May 23, 2020, the Company repaid the remaining principal of the loan amounting to Rp500,000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III

The Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp3,000,000 and USD100,000,000 which consists of special transaction loans amounting to Rp2,500,000, short term credit amounting to Rp500,000 and treasury lines amounting to USD100,000,000 (Notes 31 and 33).

Special transaction loan has an interest rate of 1-month JIBOR + 1.59% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment on October 26, 2021. Interest is paid monthly.

As of April 17, 2020, the Company had drawdown the special transaction loan facility amounting to Rp2,500,000.

The Company had repaid the special transaction loan facility through several repayment, as follows:

- On October 26, 2021, amounting to Rp1,000,000;
- On February 26, 2021, amounting to Rp500,000; and
- On November 30, 2020, amounting to Rp1,000,000.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III (lanjutan)

Pada tanggal 26 Oktober 2021 dan 16 November 2021, Perusahaan telah mencairkan fasilitas kredit jangka pendek masing-masing sebesar Rp350.000 dan Rp150.000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk IV

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah sebesar Rp2.000.000 (Catatan 31 dan 33).

Pinjaman transaksi khusus memiliki suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan + 1,55% per tahun dengan tenor 4 tahun dan akan dibayarkan penuh pada tanggal 17 November 2025. Bunga dibayarkan setiap bulan.

Pada tanggal 30 Desember 2021, Perusahaan telah mencairkan fasilitas pinjaman sebesar Rp600.000.

Tidak ada jaminan untuk fasilitas-fasilitas pinjaman diberikan ini.

Dalam perjanjian pinjaman Bank Mandiri II, III dan IV tersebut, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan keuangan dan persyaratan negatif (*negative covenants*).

Persyaratan keuangan yang harus dipatuhi Perusahaan diantaranya adalah pemenuhan *Gearing ratio* sebesar maksimum 6 kali.

Persyaratan negatif mencakup keharusan untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan transaksi tertentu diluar kegiatan usaha normal Perusahaan dan pembatasan tertentu untuk melakukan transaksi tertentu jika Perusahaan melanggar persyaratan keuangan.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

19. FUND BORROWINGS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III (continued)

As of October 26, 2021 and November 16, 2021, the Company had drawdown the short term credit facility amounting to Rp350,000, and Rp150,000 respectively.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk IV

The Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp2,000,000 (Notes 31 and 33).

Special transaction loan has an interest rate of 3-month JIBOR + 1.55% per annum with tenor of 4 years and a bullet repayment on November 17, 2025. Interest is paid monthly.

As of December 30, 2021, the Company had drawdown the credit facility amounting to Rp600,000.

The fund borrowings are unsecured.

Under Bank Mandiri II, III and IV loan agreements, the Company is obliged to fulfill certain financial covenants and negative covenants.

The financial covenants that must be fulfilled by the Company, among others is to fulfill the maximum *Gearing ratio* of 6 times.

The negative covenants include requirement to obtain consent from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to conduct certain transaction outside of the ordinary business activity of the Company and certain restriction to conduct certain transaction when the Company is in breach of financial covenant.

During the years ended December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari PT Bank Permata Tbk dengan jumlah sebesar Rp2.100.000 dan USD1.000.000 yang terdiri dari Perjanjian Term Loan I sebesar Rp1.000.000, Perjanjian Term Loan II sebesar Rp1.000.000, Perjanjian Money Market sebesar Rp100.000 dan Perjanjian Transaksi Valuta Asing sebesar USD1.000.000 (Catatan 33). Tidak ada jaminan untuk fasilitas-fasilitas pinjaman diberikan ini.

Dalam perjanjian pinjaman PT Bank Permata Tbk, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan negatif (*negative covenants*) mencakup keharusan untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Permata Tbk untuk:

- membayar sebagian atau seluruh utang kepada pemegang saham; dan
- mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari.

Pinjaman ini memiliki suku bunga sebesar 6,90% per tahun dengan tenor 3 tahun dan akan dibayarkan penuh pada tanggal 30 November 2023. Bunga dibayarkan setiap bulan.

Pada tanggal 30 September 2020, Perusahaan telah mencairkan fasilitas *Money Market* tersebut sebesar Rp75.000 dan telah dilunasi seluruhnya pada 3 November 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas *Term Loan I* tersebut sebesar Rp1.000.000.

Pada tanggal 1 Maret 2021, Perusahaan melakukan percepatan pelunasan atas pokok fasilitas *Term Loan I* sebesar Rp500.000.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan jumlah sebesar Rp2.100.000 dan USD1.000.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka I sebesar Rp500.000, Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka II sebesar Rp1.000.000, Fasilitas Kredit Berjangka sebesar Rp100.000, Fasilitas *Omnibus Trade Finance* sebesar Rp500.000, dan Fasilitas *Pre-Settlement Exposure* sebesar USD1.000.000 (Catatan 33).

19. FUND BORROWINGS (continued)

PT Bank Permata Tbk

The Company obtained loan facility from PT Bank Permata Tbk amounting to Rp2,100,000 and USD1,000,000 which consists of Term Loan I Agreement amounting to Rp1,000,000, Term Loan II Agreement amounting to Rp1,000,000, Money Market Agreement amounting to Rp100,000 and Foreign Exchange Transaction Agreement amounting to USD1,000,000 (Note 33). The fund borrowings are unsecured.

Under PT Bank Permata Tbk loan agreements, the Company is obliged to fulfill certain negative covenants include requirement to obtain consent from PT Bank Permata Tbk to:

- pay in part or full payable to shareholders; and
- changing the nature and current business activities or conduct certain transaction outside of the ordinary business activity.

This loan has an interest rate of 6.90% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment on November 30, 2023. Interest is paid monthly.

As of September 30, 2020, the Company had drawdown the Money Market Facility amounting to Rp75,000 and fully repaid on November 3, 2020.

As of December 31, 2020, the Company had drawdown the Term Loan I Facility amounting to Rp1,000,000.

On March 1, 2021, the Company early repaid the principal of the Term loan I Facility amounting to Rp500,000.

During the years ended December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

The Company obtained loan facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk amounting to Rp2,100,000 and USD1,000,000 which consists of Term Installment Credit I amounting to Rp500,000, Term Installment Credit II amounting to Rp1,000,000, Term Credit Facility amounting to Rp100,000, Omnibus Trade Finance Facility amounting to Rp500,000 and Pre-Settlement Exposure Facility amounting to USD1,000,000 (Note 33).

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (lanjutan)

Pinjaman ini memiliki suku bunga sebesar 7,00% per tahun dengan tenor 3 tahun dan akan dibayarkan penuh pada tanggal 22 Desember 2023. Bunga dibayarkan setiap bulan.

Tidak ada jaminan untuk fasilitas-fasilitas pinjaman diberikan ini.

Pada tanggal 22 April 2021, Perusahaan melakukan percepatan pelunasan atas pokok Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka II sebesar Rp250.000

Pada tanggal 28 Februari 2021 dan 30 Maret 2021 Perusahaan melakukan percepatan pelunasan atas pokok Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka I masing-masing sebesar Rp250.000, dan Rp250.000.

Pada tanggal 24 September 2020, Perusahaan telah mencairkan fasilitas kredit berjangka tersebut sebesar Rp60.000 dan telah dilunasi seluruhnya pada 24 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas Kredit Angsuran Berjangka dan Kredit Angsuran Berjangka II tersebut sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 28 Februari, 30 Maret dan 22 April 2021, Perusahaan melakukan percepatan pelunasan atas pokok Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka I dan II masing-masing sebesar Rp250.000, Rp250.000 dan Rp250.000.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

International Finance Corporation

International Finance Corporation III

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari International Finance Corporation dengan jumlah sebesar USD150.000.000 yang terdiri dari Pinjaman A sebesar USD50.000.000, Pinjaman B1 sebesar USD50.000.000 dan Pinjaman B2 sebesar USD50.000.000 (Catatan 31 dan 33).

19. FUND BORROWINGS (continued)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (continued)

This loan has an interest rate of 7.00% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment on December 22, 2023. Interest is payable monthly.

The fund borrowings are unsecured.

On April 22, 2021, the Company early repaid the principal of the Term Installment Credit II amounting to Rp250,000.

On February 28, 2021 and March 30, 2021, the Company early fully repaid the principal of the Term Installment Credit I amounting to Rp250,000, and Rp250,000, respectively.

As of September 24, 2020, the Company had drawdown the Term Credit Facility amounting to Rp60,000 and fully repaid on December 24, 2020.

As of December 31, 2020, the Company had drawdown the Term Installment Credit and Term Installment Credit II Facility amounting to Rp1,500,000.

On February 28, March 30, and April 22, 2021, the Company early fully repaid the principal of the Term Installment Credit I and II amounting to Rp250,000, Rp250,000 and Rp250,000, respectively.

During the years ended December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

International Finance Corporation

International Finance Corporation III

The Company obtained loan facilities from International Finance Corporation amounting to USD150,000,000 which consists of A Loans amounting to USD50,000,000, B1 Loans amounting to USD50,000,000 and B2 Loans amounting to USD50,000,000 (Notes 31 and 33).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

International Finance Corporation (lanjutan)

International Finance Corporation III (lanjutan)

Pinjaman A memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,75% per tahun dengan tenor 7 tahun dan dibayarkan penuh 7 tahun setelah tanggal penarikan pertama. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Pinjaman B1 memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,00% per tahun dengan tenor 3 tahun dan dibayarkan penuh 3 tahun setelah tanggal penarikan pertama. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Pinjaman B2 memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,20% per tahun dengan tenor 5 tahun dan dibayarkan penuh 5 tahun setelah tanggal penarikan pertama. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Pada tanggal 14 Maret 2019, Perusahaan telah melakukan pembatalan pinjaman B1 dari International Finance Corporation III sebesar USD50.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah menarik seluruh pokok pinjaman dari Fasilitas A dan B2 masing-masing sebesar USD50.000.000.

Tidak ada jaminan untuk fasilitas-fasilitas pinjaman diberikan ini.

Dalam perjanjian pinjaman IFC III tersebut, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan afirmatif, persyaratan keuangan serta persyaratan negatif (*negative covenants*).

Persyaratan keuangan yang harus dipatuhi Perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi/Description	Limit
a.	Rasio kecukupan modal tertimbang/ <i>Risk weighted capital adequacy ratio</i>	12%
b.	Rasio hutang terhadap total kapitalisasi/ <i>Debt to total capitalization ratio</i>	<=3:1
c.	Rasio lancar/ <i>Current ratio</i>	>1.2:1

19. FUND BORROWINGS (continued)

International Finance Corporation (continued)

International Finance Corporation III (continued)

A loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.75% per annum with tenor of 7 years and a bullet repayment 7 years after the date of the first drawdown. Interest is paid quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

B1 loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.00% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment 3 years after the date of the first drawdown. Interest is paid quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

B2 loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.20% per annum with tenor of 5 years and a bullet repayment 5 years after the date of the first drawdown. Interest is paid quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

On March 14, 2019, the Company canceled the B1 loan from International Finance Corporation III amounting to USD50,000,000.

On December 31, 2019, the Company has fully drawdown all principal from the loan facilities A and B2 amounting to USD50,000,000, respectively.

The fund borrowings are unsecured.

Under IFC III loan agreements, the Company is obliged to fulfill certain affirmative, financial and negative covenants.

The financial covenants that must be fulfilled by the Company, among others, as follows:

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

International Finance Corporation (lanjutan)

International Finance Corporation III (lanjutan)

- a) Rasio Kecukupan Modal Tertimbang adalah hasil yang diperoleh dengan membagi; (i) Jumlah Modal; oleh (ii) Aset Tertimbang Menurut Risiko.
- b) Rasio Hutang terhadap Total Kapitalisasi adalah hasil yang diperoleh dengan membagi; (i) Total Hutang ditambah jumlah total pinjaman subordinasi yang dijadwalkan untuk dilunasi atau jatuh tempo atau dapat diminta sebelum Tanggal Pembayaran Kembali terakhir; dengan (ii) Ekuitas Pemegang Saham ditambah setiap Pinjaman Subordinasi yang dijadwalkan untuk dilunasi atau jatuh tempo atau dapat diminta setelah Tanggal Pembayaran Kembali terakhir.
- c) Rasio Lancar adalah hasil yang diperoleh dengan membagi; (i) Aset Lancar (dikurangi biaya dibayar dimuka); oleh (ii) Kewajiban Lancar.

Persyaratan negatif mencakup keharusan untuk memperoleh persetujuan dari International Finance Corporation untuk melakukan transaksi tertentu seperti pembagian dividen, menyediakan program insentif jangka panjang untuk karyawan, memperoleh utang keuangan berdasarkan kondisi tertentu, dan lain-lain.

Pada tahun 2021, Perusahaan dan International Finance Corporation setuju untuk mengubah dan menyatakan kembali bagian tertentu dari perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Single Exposure Ratio* untuk debitur tertentu sehubungan dengan komitmen yang dilakukan Perusahaan sebelum 31 Maret 2020 tidak lebih dari 26% selama periode dari 1 Juli 2021 hingga dan termasuk 30 Juni 2022, dan tidak lebih dari 25% dari 1 Juli 2022 dan setelahnya.
- *Economic Group Exposure Ratio* untuk grup tertentu sehubungan dengan komitmen yang dilakukan Perusahaan sebelum 31 Maret 2020: (i) Grup pertama tidak lebih dari 46% selama periode dari 1 Juli 2021 hingga dan termasuk 30 September 2021, dan tidak lebih dari 31% selama periode dari 1 Oktober 2021 hingga dan termasuk 30 Juni 2022, dan tidak lebih dari 30% dari 1 Juli 2022 dan setelahnya; (ii) Grup kedua tidak lebih dari 33% selama periode dari 1 Juli 2021 hingga dan termasuk 30 Juni 2022, dan tidak lebih dari 30% dari 1 Juli 2022 dan setelahnya.
- *Open Credit Exposure* sehubungan dengan komitmen yang dilakukan Perusahaan sebelum 31 Maret 2020 tidak lebih dari: (i) 48% selama periode dari 1 Juli 2021 hingga dan termasuk 30 September 2021, (ii) 98% selama periode dari 1 Oktober 2021 hingga dan termasuk 31 Desember 2021, (iii) 97% selama periode dari 1 Januari 2022 hingga dan termasuk 30 Juni 2022 dan (iv) 25% dari 1 Juli 2022 dan setelahnya.

19. FUND BORROWINGS (continued)

International Finance Corporation (continued)

International Finance Corporation III (continued)

- a) *Risk Weighted Capital Adequacy Ratio* means the result obtained by dividing; (i) Total Capital; by (ii) Risk Weighted Assets.
- b) *Debt to Total Capitalization Ratio* means the result obtained by dividing; (i) Total Debt raised plus the total amount of any subordinated loans scheduled to be repaid or maturing or capable of being put on demand prior to the last Repayment Date; by (ii) Shareholders' Equity plus any Subordinated Loans scheduled to be repaid or maturing or capable of being put on demand after the last Repayment Date.
- c) *Current Ratio* means the result obtained by dividing; (i) Current Assets (less prepaid expenses); by (ii) Current Liabilities.

The negative covenants include requirement to obtain consent from International Finance Corporation for certain transactions such as distribution of dividend, providing long term incentive plan to employees, incur financial debts under certain conditions, etc.

In 2021, the Company and International Finance Corporation agreed to amend and restate certain section of the loan agreement as follows:

- *Single Exposure Ratio* for certain debtors with respect to commitments entered into by the Company before March 31, 2020 shall not exceed 26% during the period from July 1, 2021 up to and including June 30, 2022, and shall not exceed 25% from July 1, 2022 and thereafter.
- *Economic Group Exposure Ratio* for certain groups with respect to commitments entered into by the Company before March 31, 2020: (i) First group: shall not exceed 46% during the period from July 1, 2021 up to and including September 30, 2021, and shall not exceed 31% during the period from October 1, 2021 up to and including June 30, 2022, and shall not exceed 30% from July 1, 2022 and thereafter; (ii) Second group shall not exceed 33% during the period from July 1, 2021 up to and including June 30, 2022, and shall not exceed 30% from July 1, 2022 and thereafter.
- *Open Credit Exposure Ratio* with respect to commitments entered into by the Company before March 31, 2020 shall not exceed (i) 48% during the period from July 1, 2021 up to and including September 30, 2021, (ii) 98% during the period from October 1, 2021 up to and including December 31, 2021, (iii) 97% during the period from January 1, 2022 up to and including June 30, 2022, and (iv) 25% from July 1, 2022 and thereafter.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

International Finance Corporation (lanjutan)

International Finance Corporation III (lanjutan)

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

19. FUND BORROWINGS (continued)

International Finance Corporation (continued)

International Finance Corporation III (continued)

During the years ended December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

20. PINJAMAN SUBORDINASI

20. SUBORDINATED LOANS

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Asian Development Bank (USD81.744.773 pada 2021 dan USD84.929.485 pada 2020)	1.166.417	1.197.931	Asian Development Bank (USD81,744,773 in 2021 and USD84,929,485 in 2020)
World Bank (USD83.509.668 dan Rp1.980.000 pada 2021 dan USD88.483.692 dan Rp1.680.000 pada 2020)	3.171.600	2.928.063	World Bank (USD83,509,668 and Rp1,980,000 in 2021 and USD88,483,692 and Rp1,680,000 in 2020)
	<u>4.338.017</u>	<u>4.125.994</u>	
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban bunga masih harus dibayar	58.561	44.756	Accrued interest expenses
Biaya transaksi belum diamortisasi	(12.676)	(13.428)	Unamortized transaction costs
	<u>4.383.902</u>	<u>4.157.322</u>	

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman subordinasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") yang merupakan fasilitas pinjaman penerusan dengan jumlah masing-masing sebesar USD100.000.000 dari Asian Development Bank ("ADB") dan USD300.000.000 dari World Bank ("WB") (Catatan 31 dan 33).

The Company obtained subordinated loan facilities from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") which represents channeling facilities amounting to USD100,000,000 from Asian Development Bank ("ADB") and USD300,000,000 from World Bank ("WB"), respectively (Notes 31 and 33).

Perusahaan menggunakan fasilitas ini untuk memperkuat struktur modal Perusahaan, serta untuk memberikan pendanaan jangka panjang bagi Perusahaan agar dapat memberikan pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang tanpa mengakibatkan ketidaksesuaian tenor antara aset dan liabilitas.

The Company used this facility to strengthen its capital structure and to provide long-term funding to enable long-term financing without creating mismatch between asset and liability tenors.

Rincian penarikan atas fasilitas pinjaman subordinasi dari ADB adalah sebagai berikut:

Details of drawdown of subordinated loan facilities from ADB are as follows:

	Tanggal/Date	Total/Amount	
		USD	
Penarikan 1	13 Desember/December 13, 2012	71.134.021	1 st drawdown
Penarikan 2	13 November/November 13, 2013	16.732.954	2 nd drawdown
Penarikan 3	19 November/November 19, 2013	337.886	3 rd drawdown
Penarikan 4	6 Desember/December 6, 2013	6.400.000	4 th drawdown
Penarikan 5	25 November/November 25, 2014	4.877.000	5 th drawdown
		<u>99.481.861</u>	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

Rincian penarikan atas fasilitas pinjaman subordinasi dari WB adalah sebagai berikut:

	Tanggal/Date	Total/Amount	
		USD	
Penarikan 1 - WB I	21 Desember/December 21, 2012	10.000.000	WB I - 1 st drawdown
Penarikan 2 - WB I	12 Juli/July 12, 2013	40.000.000	WB I - 2 nd drawdown
Penarikan 3 - WB I	3 Desember/December 3, 2013	22.000.000	WB I - 3 rd drawdown
Penarikan 4 - WB I	23 April/April 23, 2014	20.000.000	WB I - 4 th drawdown
Penarikan 5 - WB I	25 September/September 25, 2014	5.180.000	WB I - 5 th drawdown
Penarikan 6 - WB I	23 Juli/July 23, 2015	2.700.000	WB I - 6 th drawdown
		99.880.000	

	Tanggal/Date	Total/Amount	
		IDR	
Penarikan 1 - WB II	26 Desember/December 26, 2018	300.000	WB II - 1 st drawdown
Penarikan 2 - WB II	17 Mei/May 17, 2019	300.000	WB II - 2 nd drawdown
Penarikan 3 - WB II	5 Mei/May 5, 2020	500.000	WB II - 3 rd drawdown
Penarikan 4 - WB II	8 Desember/December 8, 2020	580.000	WB II - 4 th drawdown
Penarikan 5 - WB II	6 Desember/December 6, 2021	300.000	WB II - 5 th drawdown
		1.980.000	

Periode penarikan fasilitas pinjaman subordinasi dari WB I dan ADB telah diperpanjang dari sebelumnya tanggal 31 Desember 2013 menjadi masing-masing 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2014. Oleh karena fasilitas pinjaman subordinasi dari WB I dan ADB telah berakhir, Perusahaan tidak akan melakukan penarikan sisa fasilitas pinjaman yang belum ditarik masing-masing sebesar USD120.000 dan USD518.139.

SMI - Asian Development Bank

Fasilitas pinjaman subordinasi dari SMI yang merupakan pinjaman penerusan dari ADB memiliki tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 1,45% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 September 2014 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2034.

SMI - World Bank I

Fasilitas pinjaman subordinasi dari SMI sebesar USD100.000.000 merupakan pinjaman penerusan dari WB yang memiliki tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 1,52% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Mei dan 1 November. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 November 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2033.

20. SUBORDINATED LOANS (continued)

Details of drawdown of subordinated loan facilities from WB are as follows:

	Tanggal/Date	Total/Amount	
		USD	
		10.000.000	WB I - 1 st drawdown
		40.000.000	WB I - 2 nd drawdown
		22.000.000	WB I - 3 rd drawdown
		20.000.000	WB I - 4 th drawdown
		5.180.000	WB I - 5 th drawdown
		2.700.000	WB I - 6 th drawdown
		99.880.000	
		IDR	
		300.000	WB II - 1 st drawdown
		300.000	WB II - 2 nd drawdown
		500.000	WB II - 3 rd drawdown
		580.000	WB II - 4 th drawdown
		300.000	WB II - 5 th drawdown
		1.980.000	

The availability period of the subordinated loans from WB I and ADB has been extended to March 31, 2017 and December 31, 2014, respectively, from the original expiry date of December 31, 2013. As the availability period of the subordinated loan from WB I and ADB has expired, the Company did not utilize the undrawn facilities amounting to USD120,000 and USD518,139, respectively.

SMI - Asian Development Bank

The subordinated loan facility from SMI, which represents the channeling from ADB, bears an interest rate of LIBOR 6-month + 1.45% per annum payable semiannually on March 1 and September 1. The first repayment installment of the loan's principal commenced on September 1, 2014 and will mature on March 1, 2034.

SMI - World Bank I

The subordinated loan facility from SMI of USD100,000,000 represents the channeling loan from WB which bears an interest rate of LIBOR 6-month + 1.52% per annum payable semiannually on May 1 and November 1. The first repayment installment of the loan's principal commenced on November 1, 2018 and will mature on November 1, 2033.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

SMI - World Bank II

Pada tanggal 26 September 2017, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi yang merupakan pinjaman penerusan II dari WB dengan nilai sebesar USD200.000.000. Pinjaman ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dengan total fasilitas ekuivalen sampai dengan USD200.000.000. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2036 dan memiliki batas waktu penarikan (*closing date*) sampai tanggal 28 Februari 2022.

Pinjaman subordinasi ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari SMI, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut, diantaranya:

- i. Menjamin atau bertanggung jawab atas kewajiban utang, baik kontinjen atau dengan cara lain kecuali merupakan bagian dari kegiatan usaha normal Perusahaan dan tetap memenuhi persyaratan rasio *leverage* yang ditetapkan;
- ii. Mengubah tahun fiskal;
- iii. Melakukan penggabungan, pemisahan (*spin off*), konsolidasi atau reorganisasi;
- iv. Membayar kembali atau membayar dimuka, membeli, menebus, mengganti atau melepaskan diri dari kewajiban utang apapun selain sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit;
- v. Melakukan tindakan yang akan menyebabkan *money laundering* (pencucian uang) dan *financing of terrorism* (pembiayaan terorisme), penipuan, atau tindakan korupsi dan praktek ilegal lainnya; dan
- vi. Menimbulkan utang subordinasi apapun, jika setelah timbulnya utang subordinasi tersebut rasio utang subordinasi terhadap ekuitas akan lebih besar dari 5 berbanding 1.

Tidak ada jaminan untuk fasilitas-fasilitas pinjaman subordinasi ini.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

20. SUBORDINATED LOANS (continued)

SMI - World Bank II

On September 26, 2017, the Company and SMI had signed a Subordinated Loan Agreement which represents the channeling loan II from WB of USD200,000,000. The loan will be drawn in Rupiah currency with a total facility amount in the equivalent of up to USD200,000,000. The loan will mature on October 1, 2036 and has a closing date until February 28, 2022.

The purpose of the subordinated loan is to finance infrastructure projects in Indonesia.

Unless prior written consent of SMI is obtained, the Company is not allowed to carry-out the following, among others:

- i. Guarantee or become liable with respect to any indebtedness, whether contingent or otherwise, unless it is in the ordinary course of the Company's business and in compliance with the leverage ratio requirements;
- ii. Change its financial year;
- iii. Undertake any merger, spin off, consolidation or reorganization;
- iv. Repay or prepay, purchase, redeem, reimburse or discharge any of its indebtedness other than in accordance with the provisions of the Loan Agreement;
- v. Commit to any act that will cause money laundering, financing of terrorism, fraud, or other corrupt or illegal practices; and
- vi. Incur any subordinated debt, if after the incurrence of such subordinated debt the ratio of subordinated debt to equity shall be greater than 5 to 1.

The subordinated loans are unsecured.

During the years ended December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM

21. CAPITAL STOCK

31 Desember 2021 dan 2020/
December 31, 2021 and 2020

Nama pemegang saham	Total saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total/Amount	Name of shareholders
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	600.000	30.00%	600.000	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Asian Development Bank	399.800	19.99%	399.800	Asian Development Bank
International Finance Corporation	399.800	19.99%	399.800	International Finance Corporation
DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH	302.400	15.12%	302.400	DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	298.000	14.90%	298.000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
	2.000.000	100.00%	2.000.000	

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN CADANGAN UMUM

Tambahan modal disetor pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp29.800 merupakan agio saham yang dibayarkan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perusahaan tertanggal 22 April 2021, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk tidak mengalokasikan pembayaran dividen untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Pemegang saham Perusahaan juga menyetujui untuk mengalokasikan 10% dari laba bersih tahun 2020 yaitu sebesar Rp4.251 sebagai dana cadangan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah membentuk cadangan umum sebesar Rp30.716 dan Rp26.465.

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND GENERAL RESERVES

Additional paid-in capital as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp29,800 represents premium of shares paid by Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Based on Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated April 22, 2021, the Company's shareholder approved to not allocate any amount for dividend for the financial year as at and for the year ended December 31, 2020. The Company's shareholder also approved to allocate 10% of net income in 2020 amounting to Rp4,251 as reserve funds

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has provided a general reserve of Rp30,716 and Rp26,465.

23. PENDAPATAN BUNGA

23. INTEREST INCOME

Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember/
Year Ended December 31,

	2021	2020	
Pendapatan bunga pinjaman diberikan	693.005	611.701	Interest income from loans
Pendapatan bunga efek-efek	146.350	203.694	Interest income from securities
Pendapatan bunga deposito berjangka	25.428	25.739	Interest income from time deposits
Pendapatan bunga giro	6.687	7.727	Interest income from current accounts
Pendapatan bunga transaksi derivatif	2.290	10.576	Interest income from derivative transaction
Pendapatan bunga atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	979	491	Interest income from securities purchase under resale agreement
	874.739	859.928	

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat pendapatan bunga dari konsumen eksternal yang mencapai 10% atau lebih dari total pendapatan bunga Perusahaan.

For the years ended December 31, 2021 and 2020, there are no interest income from external customers amounting to 10% or more of the Company's total interest income.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI

Pendapatan provisi dan komisi merupakan pendapatan yang berkaitan dengan pinjaman diberikan, diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian seperti jasa *mandatory lead arranger*, sindikasi, jasa perancangan model pembiayaan, pendapatan komitmen atas fasilitas yang belum dicairkan, dan premi atas garansi kredit yang diberikan.

24. PROVISION AND COMMISSION INCOME

Provision and commission income represent income related to the loans, recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts such as mandatory lead arranger services, syndication, structuring of financing scheme services, commitment fee income from undrawn facilities, and credit guarantee premium.

25. PENDAPATAN LAINNYA

25. OTHER INCOME

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
2021	2020	
Pinalti pelunasan pinjaman diberikan	15.349	921 <i>Loan repayment penalty</i>
Pendapatan dividen	-	3.542 <i>Dividend income</i>
Kerugian penjualan aset tetap	-	(187) <i>Loss on sale of property and equipment</i>
Lain-lain	-	405 <i>Others</i>
	15.349	4.681

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
2021	2020	
Gaji dan tunjangan	113.741	109.793 <i>Salaries and benefits</i>
Jasa profesional	25.742	27.030 <i>Professional fee</i>
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 12 dan 14)	24.225	27.453 <i>Depreciation and amortization (Notes 12 and 14)</i>
Imbalan kerja (Catatan 29)	6.927	2.516 <i>Employee benefits (Note 29)</i>
Listrik, telepon, air dan internet	4.182	2.425 <i>Electricity, telephone, water and internet</i>
Biaya pemeliharaan gedung	3.101	3.128 <i>Service charge</i>
Asuransi	2.773	2.770 <i>Insurance</i>
Akomodasi dan transportasi	1.528	1.503 <i>Accommodation and transportation</i>
Promosi dan komunikasi	1.316	1.347 <i>Promotion and communication</i>
Biaya bank dan kustodian	1.289	3.027 <i>Bank and custodian charges</i>
Sewa	1.098	9 <i>Rent</i>
Pelatihan dan seminar	905	616 <i>Training and seminars</i>
Representasi	454	274 <i>Representation</i>
Perlengkapan kantor	265	407 <i>Office supplies</i>
Beban pajak lain	206	241 <i>Other tax expense</i>
Lain-lain	5.445	1.862 <i>Others</i>
	193.197	184.401

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. BEBAN BUNGA

27. INTEREST EXPENSE

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Pinjaman diterima dan pinjaman subordinasi			<i>Fund borrowings and subordinated loans</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
SMI-World Bank	167.497	121.686	<i>SMI-World Bank</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	57.339	173.685	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
International Finance Corporation	28.092	36.595	<i>International Finance Corporation</i>
SMI-Asian Development Bank	22.473	36.308	<i>SMI-Asian Development Bank</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	70.006	6.129	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
PT Bank Permata Tbk	42.751	7.567	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
Derivatif			<i>Derivative</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	32.794	33.541	<i>Standard Chartered Bank, Jakarta Branch</i>
Surat utang yang diterbitkan			<i>Debt securities issued</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13.611	4.375	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Taspen (Persero)	13.601	6.697	<i>PT Taspen (Persero)</i>
PT Bank Raya Indonesia Tbk	1.579	893	<i>PT Bank Raya Indonesia Tbk</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia	790	446	<i>PT Asuransi Jasa Indonesia</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	14.112	5.089	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
DJS Ketenagakerjaan program IP	9.067	4.464	<i>DJS Ketenagakerjaan IP program</i>
PT Bank DBS Indonesia	8.003	5.804	<i>PT Bank DBS Indonesia</i>
BPJS Kesehatan	6.943	-	<i>BPJS Kesehatan</i>
Lain-lain	156.545	161.917	<i>Others</i>
Beban bunga dari utang sewa aset hak guna	39	76	<i>Interest expense from lease liabilities of right-of-use asset</i>
	645.242	605.272	

28. PERPAJAKAN

28. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Lebih bayar pajak penghasilan badan			<i>Overpayments of corporate income tax</i>
Tahun 2020	231	-	<i>for 2020</i>
Tahun 2019	-	104	<i>for 2019</i>
Pajak Penghasilan Pasal 23	208	240	<i>Income Tax Article 23</i>
	439	344	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

28. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	1.217	1.209	Article 21
Pasal 23	79	106	Article 23
Pasal 26	216	98	Article 26
Pasal 4(2)	1	-	Article 4(2)
	1.513	1.413	
Pajak lainnya	99	240	Other taxes
	1.612	1.653	

c. Pajak penghasilan

c. Income tax

Pajak kini

Current tax

Estimasi pajak penghasilan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari beban pajak kini, manfaat pajak tangguhan dan beban pajak final sebagai berikut:

The Company's estimated income tax for the years ended December 31, 2021 and 2020 represents current income tax expense, deferred tax benefit and final tax expense as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	77.772	71.241	Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Penghasilan tidak kena pajak - reksadana	(7.765)	(4.052)	Non-taxable income - mutual funds
	70.007	67.189	
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Perbedaan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan menurut fiskal dan komersial	35.830	(11.591)	Difference of provision for impairment losses on loans between fiscal and commercial
Akrua bonus dan tunjangan	4.815	13.661	Accrued bonus and allowances
Penyisihan imbalan kerja karyawan	6.301	1.517	Provision for employee benefits
Perbedaan cadangan kerugian penurunan nilai non pinjaman	(479)	(1.059)	Difference of provision for impairment losses for non-loan
Kerugian yang belum direalisasi dari nilai wajar transaksi derivatif	3.305	-	Unrealized loss from fair value of derivative transactions
Perbedaan penyusutan aset tetap dan amortisasi aset lain-lain menurut fiskal dan komersial	(4.914)	(1.643)	Difference of depreciation of property and equipment and amortization of other assets between fiscal and commercial
	44.858	885	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Estimasi pajak penghasilan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari beban pajak kini, manfaat pajak tangguhan dan beban pajak final sebagai berikut: (lanjutan)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Perbedaan permanen:			<i>Permanent differences:</i>
Pendapatan bunga dikenakan pajak final	(132.160)	(139.708)	<i>Interest income subject to final tax</i>
Bagian dari beban yang terkait dengan pendapatan yang dikenakan pajak final	99.493	98.575	<i>Expense related to income subject to final tax</i>
Keuntungan dari penjualan efek-efek	-	(1.669)	<i>Gain on sale of securities</i>
Pendapatan dividen yang bukan merupakan objek pajak penghasilan	-	(3.542)	<i>Non-taxable dividend income</i>
Lain-lain	12.455	5.231	<i>Others</i>
	<u>(20.212)</u>	<u>(41.113)</u>	
Estimasi laba fiskal tahun berjalan	94.653	26.961	<i>Current years' estimated fiscal gain</i>
Penyesuaian atas rugi fiskal	-	87	<i>Adjustment for fiscal loss</i>
Rugi fiskal tahun sebelumnya	(286.574)	(321.530)	<i>Prior year accumulated fiscal loss</i>
Akumulasi rugi fiskal	<u>(191.921)</u>	<u>(294.482)</u>	<i>Accumulated fiscal loss</i>

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Beban pajak final	(12.019)	(12.781)	<i>Final tax expense</i>
Pajak penghasilan:			<i>Income tax:</i>
Beban pajak tangguhan	(12.726)	(15.950)	<i>Deferred tax expense</i>
	<u>(24.745)</u>	<u>(28.731)</u>	

Estimasi rugi fiskal Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 akan menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan 2021.

The Company's estimated fiscal losses for the year ended December 31, 2021 will be the basis for preparing annual tax returns for 2021.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

28. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax (continued)

Pajak kini (lanjutan)

Current tax (continued)

Pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:

Income tax recognized in other comprehensive income:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Manfaat/(beban) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:			<i>Benefit/(expenses) recognized in other comprehensive income:</i>
Kenaikan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	288	713	<i>Increase in fair value of securities classified as fair value through other comprehensive income</i>
Kerugian aktuarial	(131)	(83)	<i>Actuarial loss</i>
Perubahan nilai wajar investasi saham dan opsi saham	11.527	(6.412)	<i>Changes in fair value of equity investments and shares option</i>
Bagian efektif atas perubahan instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas	(11.825)	13.522	<i>Effective portion on fair value changes from derivative instruments qualified as cash flow hedge</i>
Total pajak yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(141)	7.740	Total tax recognized in other comprehensive income

Aset/(liabilitas) pajak tangguhan

Deferred tax assets/(liabilities)

Aset pajak tangguhan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Deferred tax assets as of December 31, 2021 and 2020 consists of the following:

	31 Desember/December 31, 2021					
	31 Desember/ December 31, 2020	Dampak perubahan tarif pajak yang ditangguhkan/ Effect of changes in tax rate - deferred	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 31, 2021	
Akrua bonus dan tunjangan	7.168	-	1.059	-	8.227	<i>Accrued bonus and allowance</i>
Penurunan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(288)	-	-	288	-	<i>Decrease in fair value of securities classified as fair value through other comprehensive income</i>
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas	23.440	2.343	-	(14.168)	11.615	<i>Cumulative loss on derivative instruments for cash flow hedges</i>
Selisih penyusutan aset tetap dan amortisasi aset lain-lain antara fiskal dan komersial	(2.917)	286	(1.081)	-	(3.712)	<i>Difference of property and equipment depreciation and other assets amortization between fiscal and commercial</i>
Selisih cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan antara fiskal dan komersial	(7.820)	(783)	7.883	-	(720)	<i>Difference of allowance for impairment losses for loan between between fiscal and commercial</i>
Selisih cadangan kerugian penurunan nilai non-pinjaman antara fiskal dan komersial	519	-	(105)	-	414	<i>Difference of allowance for impairment losses for non-loan between between fiscal and commercial</i>
Perubahan nilai wajar investasi saham dan opsi saham	(7.118)	(712)	-	12.168	4.338	<i>Changes in fair value of equity investment and shares option</i>
Perubahan nilai wajar tagihan derivatif	-	-	727	-	727	<i>Changes in fair value of derivative receivables</i>
Liabilitas imbalan kerja	5.500	550	1.386	(144)	7.291	<i>Employee benefits obligation</i>
Rugi fiskal	64.786	-	(22.563)	-	42.223	<i>Fiscal losses</i>
Aset pajak tangguhan - neto	83.270	1.685	(12.694)	(1.856)	70.405	Deferred tax assets - net

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan pada tanggal-tanggal
31 Desember 2021 dan 2020: (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2020						
	31 Desember/ December 31, 2019	Dampak penerapan awal PSAK No. 71/ Effect of initial implementation of SFAS No. 71	Dampak perubahan tarif pajak yang ditangguhkan/ Effect of changes in tax rate - deferred	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 31, 2020	
Akrua bonus dan tunjangan Kenaikan/(penurunan) nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.731	-	(568)	3.005	-	7.168	Accrued bonus and allowance Increase/(decrease) in fair value of securities classified as fair value through other comprehensive income
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas	(105)	(896)	201	-	512	(288)	Cumulative loss on derivative instruments for cash flow hedges
Selisih penyusutan aset tetap dan amortisasi aset lain-lain antara fiskal dan komersial	(2.227)	-	(329)	(361)	-	(2.917)	Difference of property and equipment depreciation and other assets amortization between fiscal and commercial
Selisih cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan antara fiskal dan komersial	(11.662)	4.786	1.606	(2.550)	-	(7.820)	Difference of allowance for impairment losses for loans between fiscal and commercial
Selisih cadangan kerugian penurunan nilai non pinjaman antara fiskal dan komersial	-	855	(103)	(233)	-	519	Difference of allowance for impairment losses for non-loan between fiscal and commercial
Perubahan nilai wajar investasi saham dan opsi saham	(883)	-	177	-	(6.412)	(7.118)	Changes in fair value of equity investments and shares option
Liabilitas imbalan kerja	6.581	-	(1.346)	334	(69)	5.500	Employee benefits obligation
Rugi fiskal	80.382	-	(9.646)	(5.950)	-	64.786	Fiscal losses
Aset pajak tangguhan - neto	86.735	4.745	(11.992)	(5.755)	9.537	83.270	Deferred tax assets - net

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil
perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan
tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense
and the amounts computed by applying the
effective tax rates to income before tax are as
follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan komprehensif lain	77.772	71.241	Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Penghasilan tidak kena pajak - reksadana	(1.627)	(4.052)	Non-taxable income - mutual funds
	76.145	67.189	
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	(16.752)	(14.782)	Income tax at effective tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap: Pendapatan bunga dikenakan pajak final	29.075	30.736	Tax effect of permanent differences: Interest income subject to final tax
Bagian dari beban yang terkait dengan pendapatan yang dikenakan pajak final	(21.888)	(21.687)	Expense related to income subject to final tax
Lain-lain	(1.390)	(4)	Others
	5.797	9.045	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2021	2020
Koreksi rugi fiskal menurut pemeriksaan pajak 2018	-	(22)
Dampak penerapan PSAK No. 71	-	(4.745)
Dampak perubahan tarif pajak penghasilan	(1.771)	(5.446)
Jumlah beban pajak penghasilan	(12.726)	(15.950)

d. Surat Ketetapan Pajak

Tahun pajak 2019

Pada tanggal 19 Maret 2021, Perusahaan telah menerima hasil pemeriksaan pajak dari Kantor Pajak sehubungan dengan Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan ("PPH") lainnya, dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") untuk tahun pajak 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tersebut, Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") dan Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN") dengan total lebih bayar Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp104.

Perusahaan menerima seluruh hasil pemeriksaan pajak, melakukan penyesuaian atas kompensasi kerugian yang diakui di tahun 2019 dan menerima lebih bayar sebesar Rp102 pada tanggal 19 April 2021 serta membebaskan selisihnya pada laba rugi.

28. TAXATION (continued)

c. Income tax (continued)

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax are as follows: (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
2021	2020	
-	(22)	Correction of fiscal loss due to tax assessment 2018
-	(4.745)	Impact of SFAS No. 71 implementation
(1.771)	(5.446)	Effect on changes in corporate income tax rates
(12.726)	(15.950)	Total income tax expense

d. Tax Assessment Letter

Fiscal year 2019

On March 19, 2021, the Company received tax assessment results from the Tax Office regarding the Corporate Income Taxes, Other Income Taxes and Value Added Tax ("VAT") for fiscal year 2019. Based on those tax assessment results, the Tax Office issued several Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") and Nil Tax Assessment Letter ("SKPN") with total Corporate Income Taxes overpayment of Rp104.

The Company agreed all the tax assessment results, made an adjustment for its recognized tax losses in 2019 and receipt the tax overpayment amounting to Rp102 on April 19, 2021 and charge the difference to profit or loss.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Tahun pajak 2018

Pada tanggal 20 Maret 2020, Perusahaan telah menerima hasil pemeriksaan pajak dari Kantor Pajak sehubungan dengan Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan ("PPH") lainnya, dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") untuk tahun pajak 2018. Hasil pemeriksaan pajak tersebut, Kantor Pajak telah menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB"), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB"), Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") dengan total lebih bayar Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp296 dan kurang bayar Pajak Penghasilan 23 sebesar Rp1. Selain itu, berdasarkan SKPLB terdapat juga koreksi rugi fiskal badan sebesar Rp87 dari sebelumnya Rp185.181 menjadi sebesar Rp185.094.

Perusahaan menerima seluruh hasil pemeriksaan pajak, melakukan penyesuaian atas kompensasi kerugian yang diakui di tahun 2018 dan menerima lebih bayar jumlah tersebut pada tanggal 26 Mei 2020.

e. Surat Pemeriksaan Pajak

Pada tanggal 4 November 2021, Direktorat Jenderal Pajak mengirim surat No. PEMB-00047/WPJ.30/KP.1004/RIK.SIS/2021 kepada Perusahaan, menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan memeriksa pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Pemeriksaan ini masih dilakukan dan belum selesai sampai dengan tanggal laporan keuangan ini.

f. Administrasi

1. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang "Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" yang berlaku mulai tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Pajak dibayar dimuka dapat diterima kembali setelah hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak.

28. TAXATION (continued)

d. Tax Assessment Letter (continued)

Fiscal year 2018

On March 20, 2020, the Company received tax assessment results from the Tax Office regarding the Corporate Income Taxes, Other Income Taxes and Value Added Tax ("VAT") for fiscal year 2018. Based on those tax assessment results, the Tax Office issued several Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB"), Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB"), Nil Tax Assessment Letter ("SKPN") and Tax Collection Letters ("STP") with total Corporate Income Taxes overpayment of Rp296 and total Income Tax Article 23 underpayment of Rp1. In addition, based on the SKPLB there was also a correction of corporate fiscal loss amounting to Rp87 from Rp185,181 to Rp185,094.

The Company agreed all the tax assessment results, made an adjustment for its recognized tax losses in 2018 and receipt the tax overpayment amount on May 26, 2020.

e. Tax Examination Letter

On November 4, 2021, Directorate General of Tax sent letter No. PEMB-00047/WPJ.30/KP.1004/RIK.SIS/2021 to the Company, stated that the Directorate General of Tax will examine the Company's tax for the year ended December 31, 2020. The examination is still being conducted and has not been completed until the date of these financial statements.

f. Administrative

1. Based on Law of the Republic of Indonesia No. 28 Year 2007 regarding "Third Amendment of Law No. 6 Year 1983 regarding General Rules and Procedures of Taxation" which is applicable starting 2008, the Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

The prepaid taxes are refundable subject to tax audit result by the Tax Office.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Administrasi (lanjutan)

2. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak yang baru tersebut digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya menjadi 22% mulai tahun pajak 2021 dan seterusnya.

Tarif pajak yang baru tersebut digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 29 Oktober 2021.

28. TAXATION (continued)

f. Administrative (continued)

2. On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria.

The new tax rates are used as reference to measure the current and deferred tax assets and liabilities starting from the enactment date of the new regulation on March 31, 2020.

On October 29, 2021, the Government issued a President of the Republic of Indonesia Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 Year 2021 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 20% starting fiscal year 2022 and onwards become 22% starting fiscal year 2022 and onwards.

The new tax rates are used as reference to measure the current and deferred tax assets and liabilities starting from the enactment date of the new regulation on October 29, 2021.

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Imbalan pasca-kerja	31.355	25.945	Post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	1.785	1.554	Other long-term benefits
	33.140	27.499	

29. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Perusahaan memiliki dua imbalan kerja karyawan yaitu imbalan pasca-kerja dan imbalan jangka panjang lainnya.

Pengungkapan di bawah ini merupakan komponen dari liabilitas bersih yang diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dalam hubungannya dengan perhitungan liabilitas yang diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 oleh aktuaria independen KKA Riana & Rekan (2020: PT Padma Radya Aktuarial) dalam laporannya masing-masing tertanggal 24 Januari 2022 dan 25 Januari 2021.

Imbalan pasca-kerja

Beban liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Beban jasa kini	5.585	5.722	Current service cost
Beban jasa lalu	(1.161)	(5.524)	Past service cost
Beban bunga	1.842	1.796	Interest cost
	6.266	1.994	

Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	31.355	25.945	Present value of unfunded obligation

29. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

The Company has two employee benefits plans which include post-employment benefits and other long-term benefits.

The disclosure below summarizes the components of the estimated net liabilities for employee benefits and other long-term benefit recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the amounts recognized in the statement of financial position in relation to the calculation of the estimated liability for employee benefits as of December 31, 2021 and 2020 by independent actuary KKA Riana & Rekan (2020: PT Padma Radya Aktuarial) in its reports dated January 24, 2022 and January 25, 2021, respectively.

Post-employment benefits

Amounts recognized in the profit or loss in respect of the post-employment benefits are as follows:

The amounts included in the statement of financial position arising from post-employment benefits obligation are as follows:

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Saldo awal	25.945	24.767	<i>Beginning balance</i>
Beban jasa kini	5.585	5.722	<i>Current service cost</i>
Beban jasa lalu	(1.161)	(5.524)	<i>Past service cost</i>
Beban bunga	1.842	1.796	<i>Interest cost</i>
Pembayaran manfaat	(120)	(470)	<i>Benefits payment</i>
Keuntungan aktuarial	(736)	(346)	<i>Actuarial gain</i>
Saldo akhir	31.355	25.945	<i>Ending balance</i>

Imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan cuti besar sebanyak 30 hari kerja kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan setiap kelipatan 5 (lima) tahun. Cuti besar ini dapat diambil pada tahun ke-enam.

Perusahaan juga memberikan imbalan jangka panjang berupa emas 5 gram kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan setiap kelipatan 5 (lima) tahun. Imbalan ini dapat diambil pada tahun ke-enam.

Jumlah liabilitas imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Beban jasa kini	723	714	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	97	98	<i>Interest cost</i>
Beban jasa lalu	(1)	(262)	<i>Past service cost</i>
Keuntungan aktuarial	(158)	(28)	<i>Actuarial gain</i>
	661	522	

29. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Post-employment benefits (continued)

Movements in the present value of post-employment benefits obligation are as follows:

Other long-term benefits

The Company provides long service leave for 30 working days to employees who have reached 5 (five) consecutive years of service and further for every 5 (five) years of service period. This long service leave can be taken on the sixth year.

The Company also provides long-term benefit in the form of 5 gram of gold for employees who have reached 5 (five) consecutive years of service and further for every 5 (five) years of service period. This benefit can be taken on the sixth year.

Amounts recognized in profit or loss in respect of the other long-term benefits are as follows:

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Saldo awal	1.554	1.560	<i>Beginning balance</i>
Beban jasa kini	723	714	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	97	98	<i>Interest cost</i>
Beban jasa lalu	(1)	(262)	<i>Past service cost</i>
Keuntungan aktuarial	(158)	(28)	<i>Actuarial gain</i>
Pembayaran manfaat	(430)	(528)	<i>Benefits payment</i>
Saldo akhir	1.785	1.554	<i>Ending balance</i>

Jumlah liabilitas imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	1.785	1.554	<i>Present value of unfunded obligation</i>

Beban liabilitas imbalan pasca-kerja dan imbalan jangka panjang lainnya di atas dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

	2021	2020	
Tingkat diskonto per 31 Desember	7,25%	7,00%	<i>Discount rate as of December 31</i>
Tingkat kenaikan gaji	8,00%	8,00%	<i>Salary increase rate</i>
Tingkat kematian	100% TMI4	100% TMI4	<i>Mortality rate</i>
Tingkat cacat	5% TMI4	5% TMI4	<i>Disability rate</i>
Tingkat pengunduran diri	5% per tahun hingga usia 35 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 56/ <i>5% per annum until 35 years old and decreased linearly to 0% at a 56 years old</i>	5% per tahun hingga usia 35 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 56/ <i>5% per annum until 35 years old and decreased linearly to 0% at 56 years old</i>	<i>Resignation rate</i>
Tingkat pensiun normal	100% pada usia pensiun normal/ <i>100% at normal retirement age</i>	100% pada usia pensiun normal/ <i>100% at normal retirement age</i>	<i>Normal retirement rate</i>
Umur pensiun normal	56 tahun/years old	56 tahun/years old	<i>Normal retirement age</i>

Other long-term benefits (continued)

Movements in the present value of other long-term benefits obligation are as follows:

The amounts included in the statement of financial position in respect of other long-term benefits obligation are as follows:

The cost of providing post-employment benefit and other long-term benefits obligation is calculated using the following key assumptions:

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat gaji sebesar 1% dengan variabel lain dianggap tetap terhadap nilai kini liabilitas dan imbalan jangka panjang lainnya (tidak diaudit):

	Kenaikan tingkat diskonto/ Increase in discount rate	Penurunan tingkat diskonto/ Decrease in discount rate	Kenaikan tingkat kenaikan gaji/ Increase in salary increase rate	Penurunan tingkat kenaikan gaji/ Decrease in salary increase rate	
2021	(1.760)	1.811	1.820	(1.751)	2021
2020	(1.529)	1.581	1.582	(1.527)	2020

Berikut adalah ekspektasi pembayaran manfaat liabilitas imbalan kerja di tahun-tahun mendatang (tidak diaudit):

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Kurang dari satu tahun	3.418	814	Less than one year
2 - 5 tahun	31.019	15.227	2 - 5 years
6 - 10 tahun	16.151	36.368	6 - 10 years
> 10 tahun	233.293	214.783	> 10 years

Rata-rata tertimbang durasi dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 13,57 tahun (2020: 14,61 tahun).

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change at 1% in discount rate and salary rate with all other variables held constant of the present value of benefits obligation and other long-term benefits (unaudited):

The following are expected payment periods of the benefits obligation in the future years (unaudited):

The weighted average duration of the employment benefits obligation as of December 31, 2021 is 13.57 years (2020: 14.61 years).

30. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Akun-akun di bawah ini merupakan akun yang dicatat di laporan posisi keuangan ekstrakomtabel (*off-balance sheet*):

a. KOMITMEN

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Piutang komitmen			Commitment receivable
Fasilitas pinjaman yang diterima belum digunakan	5.441.820	4.893.273	Unused borrowing facilities granted
Liabilitas komitmen			Commitments payable
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan (Catatan 9)	(4.691.320)	(2.630.898)	Unused loan facilities granted (Note 9)
Komitmen - neto	750.500	2.262.375	Commitment - net

30. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The following accounts represent accounts which are recorded as off-balance sheet:

a. COMMITMENTS

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

30. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. KONTINJENSI

b. CONTINGENCIES

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Liabilitas kontinjensi			<i>Contingent payables</i>
Fasilitas kredit non tunai (Catatan 33)	(170.365)	-	<i>Non-cash loan facility (Note 33)</i>
Garansi kredit diberikan (Catatan 33)	-	(277.000)	<i>Credit guarantees issued (Note 33)</i>
Kontinjensi	(170.356)	(277.000)	Contingencies

31. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

31. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The related parties and nature of relationship are as follows:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company	Penempatan modal/Equity, Beban Tanggahan/Deferred Charges, Pinjaman subordinasi/Subordinated loans, Pendapatan jasa advisory/Advisory income, Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/Accrued expenses and other liabilities, Beban bunga/Interest expense.
Asian Development Bank ("ADB")	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company	Penempatan modal/Equity, Pinjaman subordinasi/Subordinated loans, Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/Accrued expenses and other liabilities, Beban bunga/Interest expense.
International Finance Corporation ("IFC")	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company	Penempatan modal/Equity, Pinjaman diterima/Fund borrowing, Beban bunga/Interest expense.
DEG - Deutsche Investition - Und Entwicklungsgesellschaft mbH ("DEG").	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company	Penempatan modal/Equity.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC")	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company	Penempatan modal/Equity.
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang saham akhir/Ultimate shareholder	Efek-efek/Securities, Piutang bunga/Accrued interest income, Pendapatan bunga/Interest income, Keuntungan/(kerugian) yang direalisasi dari penjualan efek-efek/Realized gain/(loss) from sale of securities.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

31. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The related parties and nature of relationship are as follows: (continued)

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diterima/ <i>Fund borrowing</i> , Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Beban bunga/ <i>Interest expense</i> , Keuntungan/(kerugian) yang direalisasi dari penjualan efek-efek/ <i>Realized gain/(loss) from sale of securities</i> .
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Surat utang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i> , Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Beban bunga/ <i>Interest expense</i> .
PT Bank BTPN Tbk	Dikendalikan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/ <i>Controlled by Sumitomo Mitsui Banking Corporation</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> .
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> .
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Shareholder of the Company</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> .
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> .
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> .
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .
PT Brantas Adya Surya Energi	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> .

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

31. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The related parties and nature of relationship are as follows: (continued)

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> .
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Aset lain-lain/ <i>Other assets</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> , Pendapatan jasa advisory/ <i>Advisory income</i> .
PT Marga Lingkar Jakarta	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> .
PT PP Krakatau Tirta	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Beban tanggungan/ <i>Deferred charges</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .
PT Utama Karya (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pendapatan jasa advisory/ <i>Advisory income</i> .
PT Taspen (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat utang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i> , Beban bunga/ <i>Interest expense</i> .
PT Pertamina (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Keuntungan/(Kerugian) yang direalisasi dari penjualan efek-efek/ <i>Realized gain/(loss) from sale of securities</i> .
PT Bank Raya Indonesia Tbk	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat utang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i> , Beban bunga/ <i>Interest expense</i> .
PT Waskita Sangir Energi	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

31. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The related parties and nature of relationship are as follows: (continued)

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT LEN Telekomunikasi Indonesia	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> .
PT Pemalang Batang Toll Road	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Aset lain-lain/ <i>Other assets</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat utang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i> , Beban bunga/ <i>Interest expense</i> .
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>interest income</i> .
PT PP Tirta Madani	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Beban tangguhan/ <i>Deferred charges</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Beban tangguhan/ <i>Deferred charges</i> .
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .
Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Boards of Commissioners and Directors</i>	Personil manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Gaji dan tunjangan/ <i>Salaries and benefits</i>

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
ASET		
Kas dan setara kas		
Kas di bank (Catatan 5)	1.168.118	912.346
Deposito berjangka (Catatan 5)	1.500	985.350
Efek-efek - neto (Catatan 6)	979.820	1.136.790
Pinjaman diberikan - neto (Catatan 9)	3.431.086	3.009.631
Piutang bunga (Catatan 10)	9.230	18.386
Beban tangguhan (Catatan 13)	522	435
Tagihan derivatif (Catatan 7)	554	-
Aset lain-lain - neto (Catatan 14)	2.676	1.436
Persentase terhadap total aset		
Kas dan setara kas	8,04%	12,92%
Efek-efek - neto	6,73%	7,74%
Pinjaman diberikan - neto	23,58%	20,50%
Piutang bunga	0,06%	0,13%
Beban tangguhan	0,00%	0,00%
Tagihan derivatif	0,00%	-
Aset lain-lain - neto	0,02%	0,01%
LIABILITAS		
Liabilitas derivatif (Catatan 7)	1.354	-
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (Catatan 16)	35.051	30.691
Surat utang yang diterbitkan (Catatan 17)	343.988	280.789
Pinjaman diterima (Catatan 19)	2.503.583	2.889.612
Pinjaman subordinasi (Catatan 20)	4.383.902	4.157.322
Persentase terhadap total liabilitas		
Liabilitas derivatif	0,01%	-
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	0,28%	0,25%
Surat utang yang diterbitkan	2,79%	2,25%
Pinjaman diterima	20,31%	23,11%
Pinjaman subordinasi	35,56%	33,25%
PENDAPATAN		
Pendapatan bunga (Catatan 23)	284.088	305.323
Pendapatan provisi dan komisi (Catatan 24)	12.454	5.887
Pendapatan jasa <i>advisory</i>	6.823	6.834
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif	800	-
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek (Catatan 6)	-	7.562
Persentase terhadap total pendapatan		
Pendapatan bunga	29,87%	33,50%
Pendapatan provisi dan komisi	1,31%	0,65%
Pendapatan jasa <i>advisory</i>	0,72%	0,75%
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif	0,08%	-
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek	-	0,83%

31. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions with Related Parties

The Company entered into certain transactions with related parties as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
ASSETS		
Cash and cash equivalents		
Cash in banks (Note 5)	1.168.118	912.346
Time deposits (Note 5)	1.500	985.350
Securities - net (Note 6)	979.820	1.136.790
Loans - net (Note 9)	3.431.086	3.009.631
Accrued interest income (Note 10)	9.230	18.386
Deferred charges (Note 13)	522	435
Derivative receivables (Note 7)	554	-
Other assets - net (Note 14)	2.676	1.436
Percentage to total assets		
Cash and cash equivalents	8,04%	12,92%
Securities - net	6,73%	7,74%
Loans - net	23,58%	20,50%
Accrued interest income	0,06%	0,13%
Deferred charges	0,00%	0,00%
Derivative receivables	0,00%	-
Other assets - net	0,02%	0,01%
LIABILITIES		
Derivative liabilities (Note 7)	1.354	-
Accrued expenses and other liabilities (Note 16)	35.051	30.691
Debt securities issued (Note 17)	343.988	280.789
Fund borrowings (Note 19)	2.503.583	2.889.612
Subordinated loans (Note 20)	4.383.902	4.157.322
Percentage to total liabilities		
Derivative liabilities	0,01%	-
Accrued expenses and other liabilities	0,28%	0,25%
Debt securities issued	2,79%	2,25%
Fund borrowings	20,31%	23,11%
Subordinated loans	35,56%	33,25%
REVENUES		
Interest income (Note 23)	284.088	305.323
Provision and commission income (Note 24)	12.454	5.887
Advisory income	6.823	6.834
Unrealized loss from changes in fair value of derivative transactions	800	-
Realized gain from sale of securities (Note 6)	-	7.562
Percentage to total revenues		
Interest income	29,87%	33,50%
Provision and commission income	1,31%	0,65%
Advisory income	0,72%	0,75%
Unrealized loss from changes in fair value of derivative transactions	0,08%	-
Realized gain from sale of securities	-	0,83%

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
BEBAN		
Beban bunga (Catatan 27)	304.982	380.685
Persentase terhadap total beban		
Beban bunga	34,92%	45,30%

31. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions with Related Parties (continued)

The Company entered into certain transactions with related parties as follows: (continued)

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
EXPENSES		
Interest expense (Note 27)	304.982	380.685
Percentage to total expenses		
Interest expense	34,92%	45,30%

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Year Ended December 31,

	2021		2020		
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Direksi/ Board of Directors	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Direksi/ Board of Directors	
Gaji dan tunjangan (imbalan jangka pendek)	10.022	23.458	8.032	18.433	Salaries and benefits (short-term benefits)

32. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

32. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of December 31, 2021 and 2020, monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows:

	31 Desember/December 31, 2021		
	Mata uang asal (jumlah penuh)/ Original currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent	
Aset moneter			Monetary assets
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Kas dan setara kas	34.851.980	497.304	Cash and cash equivalents
Efek-efek	82.287.932	1.174.167	Securities
Pinjaman diberikan	191.409.464	2.731.223	Loans
Piutang bunga	967.759	13.809	Accrued interest income
Aset lain-lain	594.587	8.484	Other assets
Total aset moneter	310.111.722	4.424.987	Total monetary assets
Liabilitas moneter			Monetary liabilities
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Utang lain-lain	155.724	2.222	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	177.349	2.531	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas derivatif	3.795.297	54.155	Derivative liabilities
Pinjaman diterima	98.991.779	1.412.514	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	165.592.857	2.362.845	Subordinated loans
Surat utang yang diterbitkan	148.676.063	2.121.459	Debt securities issued
Total liabilitas moneter	417.389.069	5.955.726	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter neto		(1.530.739)	Net monetary liabilities

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2020	
	Mata uang asal (jumlah penuh)/ Original currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent
Aset moneter		
Dolar Amerika Serikat		
Kas dan setara kas	27.965.529	394.453
Efek-efek	91.087.362	1.284.788
Pinjaman diberikan	169.245.557	2.387.209
Piutang bunga	1.039.508	14.662
Aset lain-lain	49.567	699
Total aset moneter	289.387.523	4.081.811
Liabilitas moneter		
Dolar Amerika Serikat		
Utang lain-lain	209.531	2.955
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	484.202	6.830
Liabilitas derivatif	8.309.087	117.200
Pinjaman diterima	98.685.278	1.391.956
Pinjaman subordinasi	173.796.719	2.451.403
Total liabilitas moneter	281.484.817	3.970.344
Aset moneter neto		111.467

32. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

As of December 31, 2021 and 2020, monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows: (continued)

Monetary assets
United States Dollar
Cash and cash equivalents
Securities
Loans
Accrued interest income
Other assets
Total monetary assets
Monetary liabilities
United States Dollar
Other payables
Accrued expenses and other liabilities
Derivative liabilities
Fund borrowings
Subordinated loans
Total monetary liabilities
Net monetary assets

33. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Perjanjian Pinjaman Komersial - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

Pada tanggal 30 Mei 2017, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Bank Mandiri. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp1.500.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III

Pada tanggal 26 Oktober 2018, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Bank Mandiri. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp3.000.000 dan USD100.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman transaksi khusus sebesar Rp2.500.000
- Kredit jangka pendek sebesar Rp500.000.
- *Treasury line* sebesar USD100.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

33. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS

Commercial Loan Agreement - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

On May 30, 2017, the Company had signed a Loan Agreement with Bank Mandiri. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities amounting to Rp1,500,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III

On October 26, 2018, the Company had signed a Loan Agreement with Bank Mandiri. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities amounting to Rp3,000,000 and USD100,000,000 which consist of:

- Special transaction loan amounting to Rp2,500,000.
- Short term credit amounting to Rp500,000.
- *Treasury line* amounting to USD100,000,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Komersial - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III (lanjutan)

Pada tanggal 23 Oktober 2019, Perusahaan telah menandatangani *addendum* I Perjanjian Pinjaman dengan Bank Mandiri terkait dengan perpanjangan *availability period* sampai 25 April 2020 atas pinjaman transaksi khusus sebesar Rp2.500.000 dan kredit jangka pendek sebesar Rp500.000.

Pada tanggal 23 Oktober 2020, Perusahaan telah menandatangani *addendum* II Perjanjian Pinjaman dengan Bank Mandiri terkait dengan perpanjangan *availability period* sampai 25 Oktober 2021 atas pinjaman transaksi khusus sebesar Rp2.500.000 dan kredit jangka pendek sebesar Rp500.000.

Pada tanggal 26 Oktober 2021, Perusahaan telah menandatangani *addendum* III Perjanjian Pinjaman dengan Bank Mandiri terkait dengan perpanjangan *availability period* sampai 25 Oktober 2022 atas kredit jangka pendek sebesar Rp500.000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk IV

Pada tanggal 17 November 2021, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Bank Mandiri. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Perjanjian Pinjaman Komersial - International Finance Corporation

International Finance Corporation I

Pada tanggal 19 Juni 2014, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan International Finance Corporation ("IFC"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD250.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman A sebesar USD30.000.000.
- Pinjaman MCPP (*Managed Co-Lending Portfolio Program*) sebesar USD22.500.000.
- Pinjaman B sebesar USD197.500.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

**33. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Commercial Loan Agreement - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III (continued)

On October 23, 2019, the Company had signed *addendum* I Loan Agreement with Bank Mandiri. Based on the Loan Agreement related to extension of *availability period* until April 25, 2020 for special transaction loan amounting to Rp2,500,000 and short-term credit amounting to Rp500,000.

On October 23, 2020, the Company had signed *addendum* II Loan Agreement with Bank Mandiri. Based on the Loan Agreement related to extension of *availability period* until October 25, 2021 for special transaction loan amounting to Rp2,500,000 and short-term credit amounting to Rp500,000.

On October 26, 2021, the Company had signed *addendum* III Loan Agreement with Bank Mandiri. Based on the Loan Agreement related to extension of *availability period* until October 25, 2022 for short term credit amounting to Rp500,000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk IV

On November 17, 2021, the Company had signed a Loan Agreement with Bank Mandiri. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities amounting to Rp2,000,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

Commercial Loan Agreement - The International Finance Corporation

International Finance Corporation I

On June 19, 2014, the Company had signed a Loan Agreement with International Finance Corporation ("IFC"). Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities amounting to USD250,000,000 which consist of:

- A loan amounting to USD30,000,000.
- MCPP (*Managed Co-Lending Portfolio Program*) amounting to USD22,500,000.
- B loan amounting to USD197,500,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Perjanjian Pinjaman Komersial - International
Finance Corporation (lanjutan)**

International Finance Corporation II

Pada tanggal 22 Februari 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan IFC. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD150.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman A sebesar USD15.000.000.
- Pinjaman B sebesar USD135.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

International Finance Corporation III

Pada tanggal 22 Juni 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan IFC. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD150.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman A sebesar USD50.000.000.
- Pinjaman B1 sebesar USD50.000.000.
- Pinjaman B2 sebesar USD50.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Pada tanggal 14 Maret 2019, Perusahaan telah melakukan pembatalan pinjaman B1 dari Internasional Finance Corporation III sebesar USD50.000.000.

**Perjanjian Pinjaman Subordinasi - Japan
International Cooperation Agency**

Pada tanggal 11 Desember 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Japan International Cooperation Agency ("JICA"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar JPY8.000.000.000. Pinjaman ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dengan total fasilitas ekuivalen sampai dengan JPY8.000.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

**33. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**Commercial Loan Agreement - The International
Finance Corporation (continued)**

International Finance Corporation II

On February 22, 2016, the Company had signed a Loan Agreement with IFC. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities amounting to USD150,000,000 which consists of:

- *A Loans amounting to USD15,000,000.*
- *B Loans amounting to USD135,000,000.*

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

International Finance Corporation III

On June 22, 2017, the Company had signed a Loan Agreement with IFC. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities amounting to USD150,000,000 which consists of:

- *A Loans amounting to USD50,000,000.*
- *B1 Loans amounting to USD50,000,000.*
- *B2 Loans amounting to USD50,000,000.*

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

On March 14, 2019, the Company canceled the B1 loan from Internasional Finance Corporation III amounting to USD50,000,000.

**Subordinated Loan Agreement - Japan
International Cooperation Agency**

On December 11, 2017, the Company had signed a Loan Agreement with Japan International Cooperation Agency ("JICA"). Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities amounting to JPY8,000,000,000. The loan can be drawn in Rupiah currency with a total facility amount in the equivalent amounting up to JPY8,000,000,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Komersial - PT Bank Permata Tbk

Perjanjian Transaksi Valuta Asing

Pada tanggal 10 Oktober 2019, Perusahaan dan PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") telah menandatangani Perjanjian Transaksi Valuta Asing sebesar USD1.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Pada tanggal 24 November 2021, Perusahaan dan Bank Permata telah menandatangani *addendum I* Perjanjian Transaksi Valuta Asing dengan *availability period* sampai 10 Oktober 2022.

Perjanjian Money Market

Pada tanggal 10 Oktober 2019, Perusahaan dan Bank Permata telah menandatangani Perjanjian *Money Market* sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Pada tanggal 24 November 2021, Perusahaan dan Bank Permata telah menandatangani *addendum I* Perjanjian *Money Market* sebesar Rp100.000 dengan perpanjangan *availability period* sampai 10 Oktober 2022.

Pada tanggal 24 November 2021, Perusahaan dan Bank Permata telah menandatangani *addendum* Perjanjian *Money Market II* sebesar Rp100.000 dengan *availability period* sampai 10 Oktober 2022.

Perjanjian Term Loan

Pada tanggal 25 November 2020, Perusahaan dan Bank Permata telah menandatangani Perjanjian *Term Loan* sebesar Rp1.000.000 dengan jangka waktu 4 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Pada tanggal 24 November 2021, Perusahaan dan Bank Permata telah menandatangani Perjanjian *Term Loan II* sebesar Rp1.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Perjanjian Pinjaman Komersial - PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka

Pada tanggal 8 September 2020, Perusahaan dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") telah menandatangani Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu 3 tahun sejak perjanjian ditandatangani, yang kemudian di perbaharui lewat perjanjian tanggal 14 Desember 2020.

**33. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Commercial Loan Agreement - PT Bank Permata Tbk

Foreign Exchange Transaction Agreement

On October 10, 2019, the Company and PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") had signed Foreign Exchange Transaction Agreement amounting to USD1,000,000 with availability period 1 year since agreement signed.

On November 24, 2021, the Company and Bank Permata had signed *addendum I* Foreign Exchange Transaction Agreement with availability period until October 10, 2022.

Money Market Agreement

On October 10, 2019, the Company and Bank Permata had signed Money Market Agreement amounting to Rp500,000 with availability period 1 year since agreement signed.

On November 24, 2021, the Company and Bank Permata had signed *addendum I* Money Market Agreement amounting to Rp100,000 with extension of availability period until October 10, 2022.

On November 24, 2021, the Company and Bank Permata had signed *addendum* Money Market Agreement II amounting to Rp100,000 with availability period until October 10, 2022.

Term Loan Agreement

On November 25, 2020, the Company and Bank Permata had signed Term Loan Agreement amounting to Rp1,000,000 with availability period 4 year since agreement signed.

On November 24, 2021, the Company and Bank Permata had signed Term Loan II Agreement amounting to Rp1,000,000 with availability period 1 year since agreement signed.

Commercial Loan Agreement - PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Term Installment Credit Facility

On September 8, 2020, the Company and PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") had signed Term Installment Credit Agreement amounting to Rp500,000 with availability period 3 year since agreement signed, as amended by the agreement dated December 14, 2020.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Perjanjian Pinjaman Komersial - PT Bank
Danamon Indonesia Tbk (lanjutan)**

Fasilitas Kredit Berjangka I

Pada tanggal 8 September 2020, Perusahaan dan Bank Danamon telah menandatangani Perjanjian Kredit Berjangka sebesar Rp250.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani, yang kemudian diperbaharui lewat perjanjian tanggal 14 Desember 2020.

Pada tanggal 27 September 2021, Perusahaan dan Bank Danamon telah menandatangani *addendum II* Perjanjian Fasilitas Kredit Berjangka sebesar Rp100.000 dengan perpanjangan *availability period* sampai 29 Juni 2022.

Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka II

Pada tanggal 14 Desember 2020, Perusahaan dan Bank Danamon telah menandatangani Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp1.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Fasilitas Omnibus Trade Finance

Pada tanggal 27 September 2021, Perusahaan dan Bank Danamon telah menandatangani Perjanjian fasilitas *Omnibus Trade Finance* sebesar Rp500.000 yang digunakan untuk aktivitas *non-cash facility*.

Fasilitas Pre-Settlement Exposure

Pada tanggal 14 Desember 2020, Perusahaan dan Bank Danamon telah menandatangani Perjanjian *Pre-Settlement Exposure* sebesar USD1.000.000.

**Perjanjian Pinjaman Komersial - Asian
Development Bank**

Pada tanggal 15 Mei 2020, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman - ADB dan kemudian pada tanggal 3 Juni 2020, ADB telah mengeluarkan surat yang menyatakan pemenuhan persyaratan berlakunya perjanjian pinjaman tanggal 1 Juni 2020 antara Pemerintah Republik Indonesia dan ADB sebesar USD100.000.000. Selain itu, ADB menyatakan bahwa semua kondisi untuk efektivitas pinjaman telah dipenuhi dan menyatakan pinjaman efektif pada tanggal 1 Juni 2020.

Berkaitan dengan perjanjian ini, Perusahaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Proyek dengan ADB dan SMI.

**33. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**Commercial Loan Agreement - PT Bank
Danamon Indonesia Tbk (continued)**

Term Credit Facility I

On September 8, 2020, the Company and Bank Danamon had signed Term Credit Agreement amounting to Rp250,000 with availability period 1 year since agreement signed, as amended by the agreement dated December 14, 2020.

On September 27, 2021, the Company and Bank Permata had signed *addendum II* Term Credit Facility Agreement amounting to Rp100,000 with extension of availability period until June 29, 2022

Term Installment Credit Facility II

On December 14, 2020, the Company and Bank Danamon had signed Term Installment Credit Agreement amounting to Rp1,000,000 with availability period 3 year since agreement signed.

Omnibus Trade Finance Facility

On September 27, 2021, the Company and Bank Danamon had signed Omnibus Trade Finance Facility Agreement amounting to Rp500,000 used for non-cash facility activities

Pre-Settlement Exposure Facility

On December 14, 2020, the Company and Bank Danamon had signed Pre-Settlement Exposure Agreement amounting to USD1,000,000.

**Commercial Loan Agreement - Asian
Development Bank**

On May 15, 2020, the Company and SMI had signed ADB - Loan Agreement and subsequently on June 3, 2020, ADB had issued a letter confirming the fulfillment of the condition's precedent to effectiveness of the Loan Agreement dated June 1, 2020 between the Government of the Republic of Indonesia and ADB in the amount of USD100,000,000. Furthermore, ADB declared that all conditions to the effectiveness of the loan had been met and declare that the loan was effective on June 1, 2020.

In relation to this agreement, the Company had entered into Project Agreement with ADB and SMI.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Perjanjian Pinjaman Komersial - Asian
Development Bank (lanjutan)**

Dalam Perjanjian Proyek, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan berikut, di antaranya:

- i. Untuk menjalankan aktivitas pembiayaannya dengan *due diligence* dan efisien serta melakukan praktek administrasi, keuangan, teknik dan lingkungan yang baik.
- ii. Praktek pengadaan yang sesuai dengan Pedoman Pengadaan ADB.
- iii. Rencana, spesifikasi, jadwal, dan metode konstruksi yang sesuai dengan praktek terbaik internasional.
- iv. Meyakinkan bahwa tujuan dari pinjaman akan tercapai.

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - World Bank

World Bank I

Pada tanggal 20 April 2011, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi World Bank dan selanjutnya, pada 25 April 2011 World Bank telah mengeluarkan surat No. CD-185/IIIF/IV/2011 yang menyatakan pemenuhan kondisi preseden berlakunya Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Januari 2010 antara Pemerintah Republik Indonesia dan World Bank ("WB") sebesar USD100.000.000. Selain itu, World Bank menyatakan perjanjian pinjaman menjadi efektif sejak 25 April 2011.

Pada tanggal 29 Maret 2012, Perusahaan menyampaikan surat kepada SMI perihal penyesuaian mata uang dan struktur bunga dalam penerusan pinjaman dari WB.

Pada tanggal 3 Oktober 2012, Menteri Keuangan melalui surat No. S-729/MK.05/2012 yang ditujukan kepada SMI telah menyampaikan persetujuan perihal perubahan mata uang dan struktur suku bunga.

Pada tanggal 14 Desember 2012, Perusahaan dan SMI menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 20 April 2011, yang mengubah beberapa pasal dalam perjanjian sebelumnya diantaranya perubahan suku bunga pinjaman, perubahan tanggal pembayaran pokok dan bunga dan ketentuan *current ratio* sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) sebesar 12% sebagai kondisi subordinasi.

**33. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**Commercial Loan Agreement - Asian
Development Bank (continued)**

In the Project Agreement, the Company must fulfill the following requirements, amongst others:

- i. Carry out its financing activities with due diligence and efficiency, in accordance with sound administrative, financial, engineering and environmental practices.*
- ii. The procurement is in accordance with ADB's Procurement Guidelines.*
- iii. Plans, specifications, work schedules and construction methods that meet international best practice.*
- iv. Ensure that the purposes of the loan will be accomplished.*

Subordinated Loan Agreement - The World Bank

The World Bank I

On April 20, 2011, the Company and SMI had signed The World Bank - Subordinated Loan Agreement and subsequently, on April 25, 2011 World Bank has issued letter No. CD-185/IIIF/IV/2011 confirming the fulfillment of the conditions precedent to the effectiveness of the Loan Agreement dated January 15, 2010 between the Government of Republic of Indonesia and the World Bank ("WB") in the amount of USD100,000,000. Furthermore, World Bank declared the Loan Agreement to become effective as of April 25, 2011.

On March 29, 2012, the Company has submitted a letter to SMI regarding adjustment on currency and interest structure for on-lending from WB.

On October 3, 2012, the Minister of Finance through letter No. S-729/MK.05/2012 to SMI had approved the adjustment on currency and interest structure.

On December 14, 2012, the Company and SMI had signed the Amendment Agreement to Subordinated Loan Agreement dated April 20, 2011, which revised several articles in the previous agreement, amongst others, the change in the interest rate of the loan, changes in the date of principal and interest payments, and requirements of current ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12% as subordination condition.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Perjanjian Pinjaman Subordinasi - World Bank
(lanjutan)**

World Bank I (lanjutan)

Berkaitan dengan perjanjian ini, Perusahaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Proyek dengan International Bank For Reconstruction And Development (Grup WB) dan SMI. Menurut perjanjian proyek, Perusahaan diwajibkan untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaannya serta perusahaan yang dibiayai mematuhi Manual Operasi.

Berdasarkan surat No. S-760/PU/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Perusahaan memperoleh persetujuan dari WB berkaitan dengan perpanjangan batas waktu penarikan (*closing date*) pinjaman WB dari semula tanggal 31 Desember 2013 menjadi tanggal 30 November 2015.

Berdasarkan surat No. S-848/PR.2/2015 tertanggal 27 November 2015 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, batas waktu penarikan (*closing date*) pinjaman WB diperpanjang kembali dari semula tanggal 30 November 2015 menjadi 30 November 2016.

World Bank II

Pada tanggal 26 September 2017, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi kedua dengan nilai sebesar USD200.000.000. Pinjaman ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dengan total fasilitas ekuivalen sampai dengan USD200.000.000. Risiko nilai tukar pinjaman ini ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada 1 Oktober 2036 dan memiliki batas waktu penarikan (*closing date*) sampai tanggal 28 Februari 2022.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

**33. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**Subordinated Loan Agreement - The World Bank
(continued)**

The World Bank I (continued)

In relation to this agreement, the Company had entered into a Project Agreement with the International Bank For Reconstruction And Development (WB Group) and SMI. According to the project agreement, the Company is obliged to ensure that its own financing activities as well as the operations of the companies to which it provides funding are in compliance with the Operation Manual.

Based on letter No. S-760/PU/2013 dated October 30, 2013 from Directorate General Loan Management of Ministry of Finance, the Company has obtained approval from WB regarding the extension of closing date of WB subordinated loan from December 31, 2013 to November 30, 2015.

Based on letter No. S-848/PR.2/2015 dated November 27, 2015 from Directorate General Financing Management and Risk of Ministry of Finance, the closing date of WB subordinated loan was extended again from November 30, 2015 to November 30, 2016.

The World Bank II

On September 26, 2017, the Company and SMI had signed a second Subordinated Loan Agreement for the amount of USD200,000,000. The loan can be drawn in Rupiah currency with a total facility amount in the equivalent amounting up to USD200,000,000. The exchange rate risk for this loan is borne by the Government of the Republic of Indonesia. The loan will mature on October 1, 2036 and has a closing date until February 28, 2022.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - ADB

Pada tanggal 20 April 2011, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi - ADB dan kemudian pada tanggal 25 April 2011, ADB telah mengeluarkan surat yang menyatakan pemenuhan persyaratan berlakunya perjanjian pinjaman tanggal 20 Januari 2010 antara Pemerintah Republik Indonesia dan ADB sebesar USD100.000.000. Selain itu, ADB menyatakan bahwa semua kondisi untuk efektivitas pinjaman telah dipenuhi dan menyatakan pinjaman efektif pada tanggal 25 April 2011.

Pada tanggal 29 Maret 2012, Perusahaan menyampaikan surat kepada SMI perihal penyesuaian mata uang dan struktur bunga dalam penerusan pinjaman dari ADB.

Pada tanggal 3 Oktober 2012, Menteri Keuangan melalui surat No. S-729/MK.05/2012 yang ditujukan kepada SMI telah menyampaikan persetujuan perihal perubahan mata uang dan struktur suku bunga.

Pada tanggal 28 November 2012, Perusahaan dan SMI menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 20 April 2011, yang mengubah beberapa pasal dalam perjanjian sebelumnya diantaranya perubahan suku bunga pinjaman dan ketentuan *current ratio* sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) sebesar 12% sebagai kondisi subordinasi.

Berkaitan dengan perjanjian ini, Perusahaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Proyek dengan ADB dan SMI.

Dalam Perjanjian Proyek, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan berikut, di antaranya:

- i. Untuk menjalankan aktivitas pembiayaannya dengan *due diligence* dan efisien serta melakukan praktek administrasi, keuangan, teknik dan lingkungan yang baik.
- ii. Praktek pengadaan yang sesuai dengan Penuntun Pengadaan ADB.
- iii. Rencana, spesifikasi, jadwal, dan metode konstruksi yang sesuai dengan praktek terbaik internasional.
- iv. Meyakinkan bahwa tujuan dari pinjaman akan tercapai.

**33. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Subordinated Loan Agreement - ADB

On April 20, 2011, the Company and SMI had signed ADB - Subordinated Loan Agreement and subsequently on April 25, 2011, ADB had issued a letter confirming the fulfillment of the conditions precedent to effectiveness of the Loan Agreement dated January 20, 2010 between the Government of the Republic of Indonesia and ADB in the amount of USD100,000,000. Furthermore, ADB declared that all conditions to the effectiveness of the loan had been met and declared that the loan was effective on April 25, 2011.

On March 29, 2012, the Company has submitted a letter to SMI regarding adjustment on currency and interest structure for on-lending from ADB.

On October 3, 2012, the Minister of Finance through letter No. S-729/MK.05/2012 to SMI had approved the adjustment on currency and interest structure.

On November 28, 2012, the Company and SMI had signed the Amendment Agreement to Subordinated Loan Agreement dated April 20, 2011, which revised several articles in the previous agreement, amongst others, the change in the interest rate of the loan and requirements of current ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12% as subordination condition.

In relation to this agreement, the Company has entered into Project Agreement with ADB and SMI.

In the Project Agreement, the Company must fulfill the following requirements, amongst others:

- i. Carry out its financing activities with due diligence and efficiency, in accordance with sound administrative, financial, engineering and environmental practices.
- ii. The procurement is in accordance with ADB's Procurement Guidelines.
- iii. Plans, specifications, work schedules and construction methods that meet international best practice.
- iv. Ensure that the purposes of the loan will be accomplished.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Perjanjian Pinjaman Subordinasi - ADB
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham secara bulat menyetujui Perusahaan untuk menandatangani bersama SMI, Perjanjian Perubahan terhadap masing-masing Perjanjian Pinjaman Subordinasi dengan ADB dan WB yang berlaku efektif tanggal 30 November 2012.

Berdasarkan surat No. S-13/PU/2014 tertanggal 7 Januari 2014 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Perusahaan memperoleh persetujuan dari ADB berkaitan dengan perpanjangan batas waktu penarikan (*closing date*) pinjaman ADB dari semula tanggal 31 Desember 2013 menjadi tanggal 31 Desember 2014.

Perjanjian Para Pendiri

Pada tanggal 30 Juni 2009, seluruh pemegang saham pendiri Perusahaan melakukan perjanjian mengenai pendirian Perusahaan.

- a. Para pemegang saham pendiri bermaksud untuk menjadikan Perusahaan sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur berbadan hukum perseroan terbatas yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia.
- b. Para pemegang saham pendiri bermaksud supaya Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp400.000 dengan modal awal yang ditempatkan sebesar Rp100.000 dengan para pemegang saham yang disebut penyertaan awal.

Perjanjian Para Pemegang Saham Awal

Perusahaan bersama-sama dengan para pemegang saham pendiri melakukan perjanjian ini pada 15 Januari 2010.

Para Pemegang Saham Pendiri bermaksud bahwa:

- a. SMI melakukan investasi dalam Perusahaan untuk sejumlah Rp600.000 (jumlah mana termasuk penyeteroran bagian awal SMI). Sebagai bagian dari komitmen SMI di atas, pada tanggal pengambilan bagian, SMI akan memberikan suatu pinjaman subordinasi yang dapat dikonversi ("CSL") kepada Perusahaan dalam jumlah Rp559.700.

**33. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**Subordinated Loan Agreement - ADB
(continued)**

Based on Deed No. 7 dated December 13, 2012, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, the shareholders unanimously approved the Company together with SMI to execute the Amendment of each ADB and WB Subordinated Loan Agreements, respectively, effective on November 30, 2012.

Based on letter No. S-13/PU/2014 dated January 7, 2014 from Directorate General Loan Management of Ministry of Finance, the Company had obtained approval from ADB regarding the extension of closing date of ADB subordinated loan from December 31, 2013 to December 31, 2014.

The Founders Agreement

On June 30, 2009, all of the Company's founding shareholders entered into an agreement related to the Company's establishment.

- a. The founding shareholders wished to establish the Company as an infrastructure finance company in the form of a limited liability company under the laws of the Republic of Indonesia.
- b. It is the founding shareholders' intention that the Company shall have an authorized share capital amounting to Rp400,000, and an initial issued share capital amounting to Rp100,000 with the shareholders, known as initial subscription.

The Original Shareholders Agreement

The Company, together with the founding shareholders, entered into this agreement on January 15, 2010.

The Founding Shareholders' intention is that:

- a. SMI made an investment in the Company of Rp600,000 (such amount includes SMI's initial subscription). As part of the above SMI commitment, SMI will, on the Subscription Date, extend a convertible subordinate loan to the Company in an amount of Rp559,700 pursuant to the SMI Convertible Subordinated Loan ("CSL") Agreement.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Perjanjian Para Pemegang Saham Awal
(lanjutan)**

Para Pemegang Saham Pendiri bermaksud bahwa:
(lanjutan)

- b. Setelah pengambilan bagian awal, (i) ADB dan IFC berkomitmen untuk melakukan pengambilan bagian tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam *Founders Agreement* dan perjanjian ini, yang jumlahnya bersama dengan pengambilan bagian awal mereka masing-masing akan berjumlah, dalam hal IFC sampai dengan USD40.000.000 dan dalam hal ADB, sampai dengan USD40.000.000 dan (ii) DEG bermaksud untuk melakukan pengambilan bagian tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari *Founders Agreement* dan perjanjian ini, yang jumlahnya bersama dengan pengambilan bagian awalnya, akan berjumlah sampai dengan USD20.000.000.

Para pemegang saham pendiri bermaksud agar para investor swasta dapat mengambil bagian dan/atau membeli saham antara tanggal perjanjian ini dan ulang tahun kelima perjanjian ini sampai dengan batas empat puluh lima persen (45%) dari jumlah seluruh modal saham yang dikeluarkan Perusahaan, dengan ketentuan bahwa batas tersebut tidak berlaku setelah Penawaran Saham Perdana. Para Pemegang Saham mengetahui bahwa pasal 11 dari Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ("Peraturan Menkeu") mensyaratkan Perusahaan yang akan didirikan berdasarkan Peraturan Menkeu tersebut ("Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur"), (i) modal disetor untuk pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sedikitnya Rp100.000 dan (ii) perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib meningkatkan modal disetornya sedikitnya Rp2.000.000 dalam waktu 5 tahun sejak dikeluarkannya surat ijin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tersebut.

**33. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**The Original Shareholders Agreement
(continued)**

*The Founding Shareholders' intention is that:
(continued)*

- b. *Subsequent to the initial subscription, (i) ADB and IFC committed to make additional subscription in accordance with the terms and conditions of the Founders' Agreement and this agreement, which together with their respective initial subscriptions would amount, in the case of IFC, to up to USD40,000,000 and in the case of ADB, to up to USD40,000,000 and (ii) DEG intends to make additional subscriptions in accordance with the term and conditions of the Founders Agreement and this agreement, which together with this initial subscription, would amount to up to USD20,000,000.*

It is the founding shareholders' intention that private sector investors may subscribe for and/or acquire shares between the date of this agreement and the fifth anniversary of this agreement up to a limit of forty-five percent (45%) of the total issued share capital of the Company, provided that such limits shall not apply following an Initial Public Offering. The Shareholders acknowledge that article 11 of Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.010/2009 Regarding Infrastructure Finance Company (the "MOF regulation") requires, with respect to a company to be established thereunder (an "Infrastructure Finance Company"), (i) the paid-up capital for the establishment of such Infrastructure Finance Company to be at least Rp100,000 and (ii) the Infrastructure Finance Company to increase its paid-up capital to become at least Rp2,000,000 within 5 years as of the issuance of its business license.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Perjanjian Para Pemegang Saham Awal
(lanjutan)**

Untuk memperjelas pada Perjanjian Para Pendiri atau Perjanjian ini:

- i. DEG tidak memiliki janji atau komitmen untuk mengambil bagian atau membayar lebih dari harga pengambilan bagian awalnya (sebagaimana didefinisikan dalam *Founders Agreement*) (mengacu pada Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua); dan
- ii. Setiap investor supranasional memiliki hak dengan pertimbangannya sendiri untuk memberikan suara setuju atau tidak setuju atas setiap pengeluaran efek baru pada setiap rapat umum sehubungan dengan pengeluaran efek baru tersebut.

Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham

Pada tanggal 20 April 2011, Pemegang Saham Perusahaan menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ("CROS") tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham tanggal 15 Januari 2010. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Perusahaan telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham.

Perubahan dan pernyataan kembali mengakibatkan dihilangkannya sebuah artikel tentang CSL. Perusahaan telah mengembalikan seluruh dana yang terkait dengan CSL yang sejumlah Rp559.700 dalam periode 25 April 2011 sampai 26 April 2011.

Perubahan dan pernyataan kembali juga mengakibatkan pengesampingan permanen terhadap *Put Option*. Perubahan dan pernyataan kembali menyatakan bahwa dengan efek dari awal dalam waktu satu tahun setelah tanggal efektif amandemen pertama dan tanggal dimana Investor Supranasional menjadi pemegang saham Perusahaan, Investor Supranasional akan melepaskan hak-hak mereka secara permanen untuk selama Perjanjian ini berlaku untuk melaksanakan *Put Option* berdasarkan Perjanjian ini. Sehingga tidak akan ada hak lebih untuk *Put* dipertahankan oleh Investor Supranasional satu tahun setelah tanggal 20 April 2011.

**33. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**The Original Shareholders Agreement
(continued)**

For the avoidance of doubt, notwithstanding any other provisions of the Founders' Agreement or this agreement:

- i. DEG does not have any undertaking or commitment to subscribe and pay more than its initial subscription price (as defined in the Founders Agreement) (refer to Second Amendment of The Shareholders Agreement); and
- ii. Each supranational investor has the right in its sole discretion to vote in favour of, or against, any issuance of new securities at any general meeting in connection with such issuance of new securities.

Amendment and Restatement of The Shareholders Agreement

On April 20, 2011, the Shareholders of the Company signed the Circular Resolutions of Shareholders ("CROS") regarding the Amendment and Restatement of the Shareholders Agreement dated January 15, 2010. Subsequently, on the same date, the Company has signed the Amended and Restated Shareholders Agreement.

The amendment and restatement resulted in the omission of an article regarding CSL. The Company has returned to SMI the entire amount related to CSL totaling Rp559,700 during the period of April 25, 2011 to April 26, 2011.

The amendment and restatement also resulted in Permanent Waiver of the Put Option. The amendment and restatement stated that with effect from the earlier of the date falling one year after the first amendment effective date and the date on which a Private Sector Investor becomes a shareholder of the Company, the Supranational Investors shall waive their rights, on a permanent basis for so long as this Agreement is in effect, to exercise the Put Option under this Agreement. So that there will be no more right for Put retained by the Supranational Investor one year after April 20, 2011.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua

Pada tanggal 16 November 2011, para Pemegang Saham Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Perusahaan telah menandatangani Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua. Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua mengakibatkan DEG untuk berkomitmen untuk melakukan pengambilan bagian dalam saham Perusahaan yang bersama-sama dengan modal awal yang disetor menjadi sebesar Rp200.000.

Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham Ketiga

Pada tanggal 19 Maret 2012, Pemegang Saham Pendiri Perusahaan menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Ketiga ("Perjanjian Perubahan Ketiga") terhadap Perjanjian Pemegang Saham Awal tanggal 15 Januari 2010, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 25 April 2011 dan sebagaimana diubah pada tanggal 16 November 2011. Perjanjian Perubahan Ketiga ini memutuskan hal-hal berikut:

- mengubah dan menyatakan kembali Perjanjian Pemegang Saham Awal.
- menyatakan bahwa Perjanjian Para Pendiri diakhiri.

Perjanjian Pemesanan Saham

Pada tanggal 19 Maret 2012, Perusahaan dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham dimana SMBC sebagai pemesan saham telah setuju untuk mengambil bagian sebanyak 175.000 lembar atau mewakili 14,89% dari saham Perusahaan, mewakili dengan harga sebesar Rp192.500 termasuk agio saham sebesar Rp17.500. SMBC telah menyetorkan pemesanan saham tersebut pada tanggal 26 Maret 2012.

Akta Penundukkan

Pada tanggal 26 Maret 2012, Perusahaan dan SMBC menandatangani Akta Penundukkan dimana SMBC sebagai pemegang saham yang baru berjanji kepada Perusahaan sebagai *trustee* untuk pihak-pihak lain yang pada saat ini atau yang setelah ini menjadi terikat pada Perjanjian Pemegang Saham dan kepada Perusahaan sendiri untuk menundukkan diri dan terikat terhadap semua tugas, beban dan kewajiban para Pemegang Saham berdasarkan ketentuan Perjanjian Pemegang Saham.

**33. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Second Amendment of The Shareholders Agreement

On November 16, 2011, the Shareholders of the Company signed the Second Amendment of The Shareholders Agreement. Subsequently, on the same date, the Company had signed the Second Amended Shareholders Agreement. The Second Amendment of The Shareholders Agreement resulted to the commitment of DEG to make additional subscription of the Company's share, which together with its initial subscription, become amounting to Rp200,000.

Third Amendment and Restatement of The Shareholders Agreement

On March 19, 2012, the Founding Shareholders of the Company signed the Third Amendment and Restatement of the Shareholders Agreement (the "Third Amendment Agreement") to the Original Shareholders Agreement dated January 15, 2010, as amended and restated on April 25, 2011 and November 16, 2011. The Third Amendment Agreement resulted the following decisions:

- amended and restated the Original Shareholders Agreement.
- stated that the Founders Agreement shall be terminated.

Share Subscription Agreement

On March 19, 2012, the Company and Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") signed a Share Subscription Agreement wherein SMBC as the share subscriber has agreed to subscribe 175,000 shares, representing 14.89% of the total issued shares of the Company at the price of Rp192,500 which included an additional paid-up capital premium of Rp17,500. SMBC has fully paid the shares subscription on March 26, 2012.

Deed of Adherence

On March 26, 2012, the Company and SMBC signed Deed of Adherence where SMBC as the new shareholder covenants to the Company as trustee for all other persons who are at present or who may hereafter become bound by the Shareholders Agreement, and to the Company itself to adhere to and be bound by all the duties, burdens and obligations of a Shareholder imposed pursuant to the provisions of the Shareholders Agreement.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Polis Asuransi

Perusahaan telah memperoleh polis asuransi jenis *Bankers Blanket Bond, Comprehensive General Liability, Property All Risk* termasuk *Gempa Bumi dan Directors and Officers Liability* yang mencakup periode sampai 31 Mei 2022 dan dapat diperpanjang kembali.

Perjanjian Garansi Kredit - UPC Sidrap

Pada tanggal 15 Maret 2018, Perusahaan bersama dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan PT UPC Sidrap Bayu Energi ("Sidrap") menandatangani perjanjian garansi kredit dimana Perusahaan akan menjamin kredit yang diberikan oleh Overseas Private Investment Corporation ("OPIC") kepada Sidrap dengan nilai sampai dengan USD20.000.000. Perjanjian ini memiliki periode garansi hingga 15 Juli 2033. Per 31 Desember 2019, Perusahaan telah memberikan garansi kredit sebesar USD19.368.063. Pada 15 Januari 2020, perjanjian garansi kredit Sidrap berubah menjadi pinjaman diberikan.

Perjanjian Garansi Obligasi yang Diterbitkan - Bali Towerindo Sentra

Pada tanggal 25 Oktober 2019, Perusahaan bersama PT Bali Towerindo Sentra Tbk ("BTS") menandatangani perjanjian garansi obligasi yang diterbitkan dimana Perusahaan akan menjamin 50% dari jumlah pokok obligasi yang diterbitkan atau maksimum Rp800.000 dari pokok obligasi yang diterbitkan senilai Rp1.600.000. Pada saat penerbitan garansi, Perusahaan setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada BTS untuk pembayaran kewajiban obligasi sampai dengan jumlah maksimum garansi. Perjanjian ini memiliki periode garansi hingga 25 Januari 2025. Pada tanggal 25 Juni 2020, obligasi telah efektif terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 2021, PT Bali Towerindo Sentra Tbk telah melunasi seluruh garansi kredit sebesar Rp277.000.

Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 23 Februari 2021, Perusahaan bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menandatangani perjanjian fasilitas kredit tidak langsung dengan nilai maksimum sebesar Rp400.000. Perjanjian ini memiliki periode hingga 23 Februari 2022. Pada tanggal 31 Desember 2021, fasilitas kredit tidak langsung yang telah diberikan sebesar Rp170.356.

**33. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Insurance Policy

The Company has acquired insurance policy for *Bankers Blanket Bond, Comprehensive General Liability, Property All Risk including Earthquake and Directors and Officers Liability* covering the period until May 31, 2022 which can be extended.

Credit Guarantee Agreement - UPC Sidrap

On March 15, 2018, the Company together with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia and PT UPC Sidrap Bayu Energi ("Sidrap") signed credit guarantee agreement where the Company will guarantee the credit provided by Overseas Private Investment Corporation ("OPIC") to Sidrap with total amount of up to USD20,000,000. This agreement has guarantee period until July 15, 2033. As of December 31, 2019, the Company provides credit guarantee amounting to USD19,368,063. On January 15, 2020, the Sidrap credit guarantee agreement was changed to loan agreement.

Bonds Issuance Guarantee Agreement - Bali Towerindo Sentra

On October 25, 2019, the Company together with PT Bali Towerindo Sentra Tbk ("BTS") signed bond issuance guarantee of 50% from total outstanding of bonds issued or maximum Rp800,000 from outstanding bonds issued amounting to Rp1,600,000. On the issuance of guarantee, the Company agrees to provide loan facility to BTS for payment of bond obligations up to the maximum amount of the guarantee. This agreement has guarantee period until January 25, 2025. As of June 25, 2020, the bonds have effectively been registered in Indonesia Stock Exchange. As of August 12, 2021, PT Bali Towerindo Sentra Tbk has paid all credit guarantee amounting to Rp277,000.

Non-Cash Loan Facility Agreement - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

On February 23, 2021, the Company together with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk signed Non-cash loan facility agreement with a maximum amount of Rp400,000. This agreement has a period until February 23, 2022. As of December 31, 2021, the disbursement of this non-cash loan facility amounting to Rp170,356.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

34. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori dan kelas instrumen keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

34. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below show the categories and classes of financial instruments as of December 31, 2021 and 2020:

		31 Desember/December 31, 2021						
	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi/Asset at fair value through profit or loss	Aset pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Asset at fair value through other comprehensive income	Aset pada biaya perolehan diamortisasi/ Assets at amortized costs	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized costs	Liabilitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Liabilities at fair value through other comprehensive income	Liabilitas pada nilai wajar melalui laba rugi/ Liabilities at fair value through profit or loss	Total	
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas - neto	-	-	1.352.431	-	-	-	1.352.431	Cash and cash equivalents - net
Efek-efek - neto	-	833.478	1.295.415	-	-	-	2.128.893	Securities - net
Investasi saham	-	201.902	-	-	-	-	201.902	Equity investments
Pinjaman diberikan - neto	-	-	10.203.363	-	-	-	10.203.363	Loans - net
Piutang bunga	-	-	98.148	-	-	-	98.148	Accrued interest income
Tagihan derivatif	2.006	208.774	-	-	-	-	210.780	Derivative receivables
Aset lain-lain - neto*)	-	-	13.630	-	-	-	13.630	Other assets - net *)
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	-	(4.838)	-	-	(4.838)	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	(64.673)	-	-	(64.673)	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas derivatif	-	-	-	(4.029.707)	(52.796)	(5.311)	(58.107)	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	(4.029.707)	Debt securities issued
Pinjaman diterima	-	-	-	(3.748.292)	-	-	(3.748.292)	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	-	-	-	(4.383.902)	-	-	(4.383.902)	Subordinated loans
	2.006	1.244.154	12.960.987	(12.231.412)	(52.796)	(5.311)	1.917.628	
		31 Desember/December 31, 2020						
	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi/Asset at fair value through profit or loss	Aset pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Asset at fair value through other comprehensive income	Aset pada biaya perolehan diamortisasi/ Assets at amortized costs	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized costs	Liabilitas pada nilai wajar/ Liabilities at fair value		Total	
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas - neto	-	-	2.057.059	-	-	-	2.057.059	Cash and cash equivalents - net
Efek-efek - neto	-	1.104.882	1.365.166	-	-	-	2.470.048	Securities - net
Investasi saham	-	396.720	-	-	-	-	396.720	Equity investments
Pinjaman diberikan - neto	-	-	9.197.486	-	-	-	9.197.486	Loans - net
Piutang bunga	-	-	86.840	-	-	-	86.840	Accrued interest income
Tagihan derivatif	-	69.265	-	-	-	-	69.265	Derivative receivables
Aset lain-lain - neto*)	-	-	9.475	-	-	-	9.475	Other assets - net *)
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	-	(5.897)	-	-	(5.897)	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	(72.409)	-	-	(72.409)	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	(117.200)	-	(117.200)	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	(2.735.233)	-	-	(2.735.233)	Debt securities issued
Pinjaman diterima	-	-	-	(5.378.793)	-	-	(5.378.793)	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	-	-	-	(4.157.322)	-	-	(4.157.322)	Subordinated loans
	-	1.570.867	12.716.026	(12.349.654)	(117.200)		1.820.039	

*) Aset lain-lain selain perangkat lunak komputer/Other assets exclude of computer softwares

35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

Perusahaan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelola berbagai risiko yang timbul dari aktivitas usahanya. Perusahaan juga mengadopsi suatu konsep manajemen risiko perusahaan secara menyeluruh dengan parameter risiko yang terintegrasi yang meliputi antara lain manajemen risiko keuangan dan modal.

35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

The Company takes proactive measures to manage various risks that arise from its business activities. The Company also adopts an enterprise risk management concept with integrated risk parameters involving among others financial risk and capital risk management.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

Pengawasan aktif atas aktivitas manajemen risiko Perusahaan dilaksanakan melalui beberapa Komite, dimana Komite Eksekutif di bawah pengawasan Direksi terdiri atas Komite Manajemen Risiko ("RMC"), Komite Aset dan Liabilitas ("ALCO") dan Dewan Direksi - Komite Investasi ("BoD-IC").

RMC adalah komite yang secara langsung berkaitan dengan manajemen atas risiko-risiko, yang membahas dan merekomendasikan kebijakan dan prosedur termasuk pemantauan profil risiko dan mengawasi risiko Perusahaan secara keseluruhan. ALCO merupakan komite yang terkait dengan manajemen risiko dalam penentuan keputusan strategi manajemen atas aset dan liabilitas, penentuan suku bunga dan likuiditas, serta aspek lainnya dalam rangka manajemen atas aset dan liabilitas Perusahaan. BoD-IC merupakan komite yang memantau, menganalisis dan menghitung risiko kredit terkait dengan kegiatan investasi Perusahaan.

a. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola tingkat permodalan untuk memastikan kemampuannya untuk melanjutkan keberlangsungan operasi. Struktur modal Perusahaan yang dicatat dalam ekuitas pemegang saham terdiri dari modal ditempatkan dan disetor (Catatan 21), tambahan modal disetor (Catatan 22), penghasilan komprehensif lain dan saldo laba. Sebagian besar modal Perusahaan saat ini ditempatkan dalam bentuk kas dan setara kas (Catatan 5), efek-efek (Catatan 6), investasi saham (Catatan 8) dan pinjaman diberikan (Catatan 9).

Modal disetor dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan paling sedikit sebesar Rp100.000. Perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp2.000.000 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi persyaratan modal minimum.

35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

Active supervision on the Company's risk management activities are implemented through Committees of which the Executive Committee under the supervision of the Board of Directors consists of Risk Management Committee ("RMC"), Asset & Liabilities Committee ("ALCO") and Board of Directors - Investment Committee ("BoD-IC").

RMC is the committee directly related to the management of risks, which discusses and recommends policies and procedures as well as monitoring risk profile and managing the entire risks of the Company. ALCO is the risk management committee that is related with the decision making of asset and liabilities management strategy, designation of interest rate and liquidity, along with other aspects related to the management of the Company's assets and liabilities. BoD-IC is the committee that oversees, analyze and quantify credit risk exposure arising from the Company's investment activities.

a. Capital risk management

The Company manages capital level to ensure that it will be able to continue as going concern. The Company's capital structure recorded as shareholders' equity consists of capital stock (Note 21), additional paid-in capital (Note 22), other comprehensive income and retained earnings. The capital of the Company is mainly placed in form of cash and cash equivalents (Note 5), securities (Note 6), equity investments (Note 8) and loans (Note 9).

Paid-up capital for the establishment of infrastructure financing company is set at least in the amount of Rp100,000. Infrastructure financing company shall increase its paid-up capital to at least Rp2,000,000 within 5 (five) years since the issuance of the business license. As of December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled the minimum capital requirement.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

a. Manajemen risiko modal (lanjutan)

Berdasarkan POJK No. 46/POJK.05/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi *gearing* ratio paling rendah nol kali dan paling tinggi sepuluh kali. Nilai *gearing* ratio Perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 3,76 kali dan 3,84 kali (tidak diaudit).

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang nilai *gearing* ratio tersebut.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat suku bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman tertentu yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Komite Pengawasan Risiko ("ROC") untuk pedoman yang khusus terkait dengan risiko.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama dikarenakan sumber dana Perusahaan yang berdenominasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berupa pinjaman subordinasi dan pinjaman komersil, dan juga dalam lingkup lebih kecil terkait dengan beberapa transaksi atas pendapatan dan beban usahanya yang didenominasi dalam mata uang asing.

Perusahaan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan menjaga, sebisa mungkin, keseimbangan komposisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing. Posisi mata uang asing bersih dikelola pada tingkat yang rendah bila dibandingkan dengan struktur permodalan Perusahaan. Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 32.

35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

a. *Capital risk management (continued)*

Based on POJK No. 46/POJK.05/2020 dated October 27, 2020, Infrastructure Financing Company should fulfil gearing ratio of minimum of zero times and maximum of 10 times. As of December 31, 2021 and 2020, the Company's gearing ratio are 3.76 times and 3.84 times, respectively (unaudited).

During the years ended December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled covenant regarding above gearing ratio value.

b. *Financial risk management objectives and policies*

The Company's overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of its business, as well as for managing its exposure to foreign exchange risk, interest rate risk, credit and liquidity risks. The Company operates within defined guidelines that are approved by the Board of Commissioners and Risk Oversight Committee ("ROC") for risk specific guidance.

i. Foreign currency risk management

The Company is exposed to foreign currency exchange rate fluctuation mainly due to the Company's funds which are denominated in United States Dollar from subordinated loan and commercial loan, and to a smaller extent from some of its foreign currency denominated transactions on its revenues and operating expenses.

The Company manages the foreign currency exposure by maintaining, as far as possible, balanced composition between financial assets and liabilities in foreign currency. The net open foreign currency position is managed at a low level compared to the Company's capital. The Company's net open foreign currency exposure as of reporting date is disclosed in Note 32.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

**i. Manajemen risiko mata uang asing
(lanjutan)**

Analisis sensitivitas mata uang asing

Perusahaan terutama terekspos terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat.

Perusahaan melakukan analisis sensitivitas Perusahaan terhadap peningkatan dan penurunan 10% dalam Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan, dimana 10% adalah tingkat sensitivitas yang digunakan dalam pelaporan internal mengenai risiko mata uang asing dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar mata uang asing.

Analisis sensitivitas hanya mencakup item mata uang asing moneter yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan 10% dalam nilai tukar mata uang asing. Analisis sensitivitas terutama meliputi pinjaman diberikan yang diberikan Perusahaan kepada nasabah dan pinjaman eksternal yang didapatkan oleh Perusahaan dimana denominasi investasi adalah dalam mata uang selain mata uang fungsional dari pemberi pinjaman atau peminjam.

Jumlah positif di bawah ini menunjukkan peningkatan laba atau ekuitas dimana Rupiah menguat 10% terhadap mata uang yang relevan. Untuk pelemahan 10% dari Rupiah terhadap mata uang yang relevan, akan ada dampak berbanding terbalik pada laba atau ekuitas, sehingga saldo di bawah ini akan menjadi negatif (tidak diaudit).

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Laba rugi	+/(153.074)	+/(11.146)	Profit or loss
Ekuitas	+/(153.074)	+/(11.146)	Equity

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

**i. Foreign currency risk management
(continued)**

Foreign currency sensitivity analysis

The Company is mainly exposed to the United States Dollar currency.

The Company conducted an analysis of the Company's sensitivity to a 10% increase and decrease in the Rupiah against the relevant foreign currencies, of which the 10% is the sensitivity rate used for internal reporting on foreign currency risk and represents management's assessment of the plausible change in foreign exchange rates.

The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 10% change in foreign currency rates. The sensitivity analysis mainly includes loans disbursed by the Company to customers and external borrowings obtained by the Company where the denomination of the Company's investment is in a currency other than the functional currency of the lender or the borrower.

A positive number below indicates an increase in profit or equity where the Rupiah strengthens 10% against the relevant currency. For a 10% weakening of the Rupiah against the relevant currency, there would be an inverse impact on the profit or equity, thus the balances below would be negative (unaudited).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

**i. Manajemen risiko mata uang asing
(lanjutan)**

Analisis sensitivitas mata uang asing
(lanjutan)

Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur terhadap saldo aset dan liabilitas Perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada akhir periode pelaporan.

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas bukan sepenuhnya representasi dari risiko valuta asing yang melekat, karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama tahun berjalan.

ii. Risiko harga lain

Perusahaan terekspos terhadap risiko fluktuasi harga pasar efek-efek dan investasi saham yang diklasifikasi pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL") dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

Analisis sensitivitas harga efek-efek dan
investasi saham

Analisis sensitivitas berikut ditentukan berdasarkan eksposur terhadap risiko nilai wajar efek-efek dan investasi saham pada akhir periode pelaporan.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan jika nilai wajar efek-efek dan investasi saham naik/turun 2%, maka (tidak diaudit):

	31 Desember/ December 31, 2021
Investasi saham	+/-4.038
Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	+/-16.673

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

**i. Foreign currency risk management
(continued)**

Foreign currency sensitivity analysis
(continued)

This is mainly attributable to the exposure outstanding on United States Dollar denominated assets and liabilities in the Company at the end of the reporting period.

In management's opinion, the sensitivity analysis is not a full representation of the inherent foreign exchange risk, because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.

ii. Other price risks

The Company is exposed to risk of fluctuation in quoted price of securities and equity investment classified at fair value through profit or loss ("FVTPL") and fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Sensitivity analysis of securities and equity
investments prices

The sensitivity analysis below has been determined based on the exposure to securities and equity investments fair value risks at the end of the reporting period.

The table below summarizes if securities and equity investments fair value had been 2% higher/lower, hence (unaudited):

	31 Desember/ December 31, 2020	
Investasi saham	+/-7.934	Equity investments
Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	+/-22.098	Gains/losses from changes in fair value securities classified as fair value through other comprehensive income

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Perusahaan terekspos terhadap dampak perubahan tingkat bunga terutama karena adanya dampak perubahan terhadap pinjaman yang mempunyai tingkat bunga mengambang, serta pinjaman yang diberikan maupun aktivitas investasi atas kelebihan dana yang tersedia (*idle funds*) akibat perubahan bunga di pasar.

Sedapat mungkin Perusahaan menyesuaikan bunga yang diberikan untuk pinjaman (baik tetap ataupun mengambang) dengan bunga sumber pembiayaannya. Sedangkan untuk investasi atas kelebihan dana yang tersedia (*idle funds*), risiko tingkat bunga dikelola melalui pemantauan terhadap limit durasi secara portofolio yang dilakukan berkala.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat bunga:

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

b. *Financial risk management objectives and policies (continued)*

iii. Interest rate risk management

The Company is exposed to changes in interest rates mainly due to the impact such changes may have on borrowings that carry floating interest rate, and loans as well as investment activity of idle funds, as a result of changes in market interest rate.

As much as practicable, the Company matches the interest rate for loans it extended (whether floating or fixed) with that of the funding source. Whereas for investment in idle funds, the interest rate risk is managed through periodical monitoring against the duration limit on portfolio basis.

The table below summarizes the Company's exposures to interest rate risk:

31 Desember/December 31, 2021

	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>			Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>	Tidak dikenakan bunga/ <i>Non-interest bearing</i>	Total	
	Tidak lebih dari 3 bulan/ <i>Not more than 3 months</i>	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ <i>More than 3 months up to 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 year</i>				
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas - neto	1.352.430	-	-	-	1	1.352.431	Cash and cash equivalents - net
Efek-efek - neto	-	-	-	2.128.893	-	2.128.893	Securities - net
Investasi saham	-	-	-	-	201.902	201.902	Equity investments
Pinjaman diberikan - neto	346.868	253.448	5.918.065	3.684.982	-	10.203.363	Loans - net
Piutang bunga	-	-	-	-	96.148	96.148	Accrued interest income
Tagihan derivatif	-	-	-	-	210.780	210.780	Derivative receivables
Aset lain-lain - neto	-	-	-	-	13.630	13.630	Other assets - net
Total aset keuangan	1.699.298	253.448	5.918.065	5.813.875	522.461	14.207.147	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	-	-	4.838	4.838	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	-	64.673	64.673	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	58.107	58.107	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	4.029.707	-	4.029.707	Debt securities issued
Pinjaman diterima	503.890	372.908	2.871.494	-	-	3.748.292	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	79.489	103.305	4.201.108	-	-	4.383.902	Subordinated loans
Total liabilitas keuangan	583.379	476.213	7.072.602	4.029.707	127.618	12.289.519	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga	1.115.919	(222.765)	(1.154.537)	1.784.168	394.843	1.917.628	Net interest repricing gap

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

**iii. Manajemen risiko tingkat suku bunga
(lanjutan)**

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat bunga: (lanjutan)

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

**iii. Interest rate risk management
(continued)**

The table below summarizes the Company's exposures to interest rate risk: (continued)

31 Desember/December 31, 2020

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate			Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total	
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year				
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas - neto	2.057.054	-	-	-	5	2.057.059	Cash and cash equivalents - net
Efek-efek - neto	-	-	-	2.470.048	-	2.470.048	Securities - net
Investasi saham	-	-	-	-	396.720	396.720	Equity investments
Pinjaman diberikan - neto	196.937	288.821	6.141.191	2.570.537	-	9.197.486	Loans - net
Piutang bunga	-	-	-	-	86.840	86.840	Accrued interest income
Tagihan derivatif	-	-	-	-	69.265	69.265	Derivative receivables
Aset lain-lain - neto	-	-	-	-	9.475	9.475	Other assets - net
Total aset keuangan	2.253.991	288.821	6.141.191	5.040.585	562.305	14.286.893	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	-	-	5.897	5.897	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	-	72.409	72.409	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	117.200	117.200	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	2.735.233	-	2.735.233	Debt securities issued
Pinjaman diterima	5.788	1.661.263	3.711.762	-	-	5.378.793	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	62.953	96.628	3.997.741	-	-	4.157.322	Subordinated loans
Total liabilitas keuangan	68.721	1.757.891	7.709.503	2.735.233	195.506	12.466.854	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga	2.185.270	(1.469.070)	(1.568.312)	2.305.352	366.799	1.820.039	Net interest repricing gap

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada manajemen dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to interest rates for non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared using assumption that the balance of the liability at the end of the reporting period as the amount that was outstanding for the whole year. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to management and represents management's assessment of the plausible change in interest rates.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

**iii. Manajemen risiko tingkat suku bunga
(lanjutan)**

Analisis sensitivitas suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, maka (tidak diaudit):

	31 Desember/ December 31, 2021
Pendapatan dan beban bunga	+/-7.614
Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	+/-356.460

iv. Manajemen risiko kredit

Eksposur risiko kredit utama Perusahaan melekat pada dana tunai di rekening bank, penempatan pada efek-efek, serta pinjaman yang diberikan kepada debitur.

Risiko kredit mengacu pada risiko kegagalan pihak rekanan dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Dalam mengelola dan mengurangi risiko kredit atas pinjaman yang diberikan, keputusan untuk memberikan kredit kepada debitur/perusahaan proyek dilakukan melalui proses kredit yang ekstensif yang membutuhkan penilaian, evaluasi dan persetujuan dari Komite Investasi dari Direksi maupun Dewan Komisaris.

Untuk aktivitas investasi atas kelebihan dana yang tersedia (*idle funds*), Perusahaan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan konservatif dimana Perusahaan hanya melakukan penempatan pada efek-efek dengan *underlying investment* yang mendapatkan peringkat kredit eksternal yang layak.

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

b. *Financial risk management objectives and policies (continued)*

**iii. Interest rate risk management
(continued)**

Interest rate sensitivity analysis
(continued)

The table below summarizes if interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, hence (unaudited):

	31 Desember/ December 31, 2020	
	+/-7.266	<i>Interest income and expense</i>
	+/-244.463	<i>Gains/losses from changes in fair value securities classified as fair value through other comprehensive income</i>

iv. Credit risk management

The Company's main credit risk exposure is attributed to its cash in banks, placement in securities, and loans to debtors.

Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Company. In order to manage and minimize credit risk of loans, a decision to provide loans to debtors/project companies is made after going through extensive credit process requiring rigorous assessment, evaluation and approval process from Investment Committees of Boards of Directors and Commissioners.

For its investment activity on excess idle funds, the Company always implements prudent and conservative principles where the Company only invests its funds on securities with underlying investment that has acceptable external credit rating.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Berkaitan dengan penempatan dana tunai di rekening bank, Perusahaan hanya menempatkan dananya pada institusi keuangan yang memiliki peringkat kredit eksternal yang layak. Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Kas dan setara kas	1.352.431	2.057.059	Cash and cash equivalents
Efek-efek	2.128.893	2.470.048	Securities
Investasi saham	201.902	396.720	Equity investments
Pinjaman diberikan - neto	10.203.363	9.197.486	Loans - net
Tagihan derivatif	210.780	69.265	Derivative receivables
Piutang bunga	96.148	86.840	Accrued interest income
Aset lain-lain - neto	13.630	9.475	Other assets - net
	14.207.147	14.286.893	

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, eksposur maksimal risiko kredit sebelum agunan yang diterima atau perangkat kredit lain adalah ekuivalen dengan jumlah tercatat aset keuangan Perusahaan. Agunan yang diterima dan peningkatan kredit lain dijelaskan di Catatan 9.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat aset keuangan yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kecuali untuk pinjaman diberikan.

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

iv. Credit risk management (continued)

In relation to funds placement at bank accounts, the Company only places its funds with credit worthy financial institutions that have acceptable external credit rating. The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for impairment losses best represents the Company's exposure to credit risk.

As of December 31, 2021 and 2020, the maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements is equivalent to the carrying amounts of the Company's financial assets. The collateral and other credit enhancements are described in Note 9.

As of December 31, 2021 dan 2020, there are no past due but not impaired financial assets.

As of December 31, 2021 and 2020, there were no impaired financial assets except for loans.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan pinjaman diberikan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai:

31 Desember/December 31, 2021			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Unimpaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total
Rupiah	7.147.143	435.185	7.582.328
Dolar Amerika Serikat	2.654.201	74.576	2.728.777
	<u>9.801.344</u>	<u>509.761</u>	<u>10.311.105</u>
Ditambah/(dikurangi):			
Piutang bunga	234.415	1.558	235.973
Biaya transaksi belum diamortisasi	(63.925)	(5)	(63.930)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(119.451)	(160.334)	(279.785)
	<u>9.852.383</u>	<u>350.980</u>	<u>10.203.363</u>
			<i>Rupiah</i>
			<i>United States Dollar</i>
			<i>Add/(less):</i>
			<i>Accrued interest income</i>
			<i>Unamortized transaction costs</i>
			<i>Allowance for impairment losses</i>
31 Desember/December 31, 2020			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Unimpaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total
Rupiah	6.545.963	441.880	6.987.843
Dolar Amerika Serikat	2.303.585	78.584	2.382.169
	<u>8.849.548</u>	<u>520.464</u>	<u>9.370.012</u>
Ditambah/(dikurangi):			
Piutang bunga	117.782	363	118.145
Biaya transaksi belum diamortisasi	(46.220)	(562)	(46.782)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(65.394)	(178.495)	(243.889)
	<u>8.855.716</u>	<u>341.770</u>	<u>9.197.486</u>

Tidak terdapat aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dapat saling hapus pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

There are no financial asset and financial liability subject to offsetting as of December 31, 2021 and 2020.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, umur pinjaman diberikan yang mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021 and 2020, the aging of impaired loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
0 - 3 bulan	<u>509.761</u>	<u>520.464</u>	0 - 3 months
	<u>509.761</u>	<u>520.464</u>	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Manajemen risiko kredit dalam kondisi pandemi Covid-19

Pemerintah sudah melakukan upaya dalam rangka mempertahankan stabilitas ekonomi ditengah pandemi Covid-19, dengan memperkenalkan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 yang dirumuskan dalam POJK 30/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebagai addendum II atas POJK 14/2020 yang diberlakukan sejak tanggal 20 April 2020 untuk jangka waktu hingga 17 April 2023. Merujuk kepada regulasi tersebut dan mengikuti tata kelola Perusahaan yang baik (GCG), Perusahaan telah menyiapkan parameter dan kriteria dalam suatu kebijakan yang diterapkan kepada debitur yang terdampak Covid-19 dan memerlukan relaksasi kredit melalui restrukturisasi hutang. Pemberian restrukturisasi kredit dilakukan dengan prinsip *four eyes* yang melibatkan unit *investment* dan unit risiko kredit untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan disetujui oleh komite kredit Perusahaan.

Perusahaan terus melakukan penilaian kredit yang ketat bagi debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi untuk menghindari risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran atau struktur yang tidak sesuai dengan kinerja debitur. Perusahaan telah menyusun berbagai skema restrukturisasi dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pemberian masa tenggang atau penundaan (sebagian) pembayaran bunga dan/atau pokok yang akan dibayarkan saat likuiditas debitur diperkirakan sudah membaik;
- Pemberian perubahan angsuran pembayaran pokok.

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

b. *Financial risk management objectives and policies (continued)*

iv. Credit risk management (continued)

Credit risk management in the Covid-19 pandemic

The Government has made efforts to maintain economic stability amid the Covid-19 pandemic, by introducing a *countercyclical* policy on the impact of the spread of Covid-19 as formulated in POJK 30/2021 dated December 30, 2021 as addendum II for POJK 14/2020 which was enacted from April 20, 2020 for a maximum period until April 17, 2023. Referring to these regulations and following Good Corporate Governance (GCG), the Company has prepared parameters and criteria in a policy that is applied to debtors who are affected by Covid-19 and require credit relaxation through debt restructuring. The loan restructuring is carried out on the basis of the four eyes principle involving investment units and credit risk units to maintain prudential principles and approved by the Company's Credit Committee.

The Company continues to carry out a rigorous credit assessment for debtors who apply for restructuring to avoid the risk of giving restructuring that is not on target or the structure is not in accordance with the debtor's performance. The Company has prepared various restructuring schemes with the following mechanisms:

- Granting a grace period or postponement of (partial) interest and/or principal payments to be paid when debtor liquidity is estimated to have improved;
- Issuance of changes in principal payment installments.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

- b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Manajemen risiko kredit dalam kondisi pandemi Covid-19 (lanjutan)

Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19, Perusahaan melakukan sejumlah penyesuaian dan penyempurnaan proses dan mekanisme pemantauan kredit baik terhadap debitur maupun portofolio, penyesuaian ini dilakukan agar hasil pemantauan dapat memberikan peringatan dini dan penetapan mitigasi risiko yang tepat waktu dan menjaga kualitas kredit.

Penyesuaian dan penyempurnaan pemantauan kredit dilakukan dengan cara:

- Menerapkan mekanisme peringatan dini (termasuk daftar pemantauan) atas kenaikan risiko kredit debitur, khususnya yang terdampak oleh Covid-19 dan menyiapkan rencana aksi serta melakukan diskusi dengan manajemen Perusahaan;
- Pemberian kredit terhadap debitur yang terdampak Covid-19 dan melakukan restrukturisasi kredit dengan mengikuti kondisi tertentu;
- Melakukan *stress testing* atas kinerja debitur secara berkala dengan melibatkan aspek pandemi Covid-19;
- Melakukan pembaharuan secara berkala atas informasi dari kewajiban debitur dengan menerapkan mekanisme *four-eye principle*.

v. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas terutama berasal dari potensi ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset keuangan Perusahaan dengan liabilitas keuangannya. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan dana simpanan, memperoleh tambahan fasilitas pinjaman dan dengan terus menerus memonitor arus kas perkiraan dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Perusahaan juga melakukan monitor secara berkala posisi likuiditas terhadap limit.

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

- b. *Financial risk management objectives and policies (continued)*

iv. Credit risk management (continued)

Credit risk management in the Covid-19 pandemic (continued)

In connection with the conditions of the Covid-19 pandemic, the Company made a number of adjustments and improvements to the credit monitoring process and mechanism for both debtors and portfolios. These adjustments were made with the hope that monitoring results can provide early warning and determine risk mitigation in a timely manner and maintain credit quality.

Credit adjustment and refinement is carried out by:

- *Implementing early warning (including watchlist) on the increase in credit risk of debtors, especially those affected by Covid-19, preparing action plans and holding discussions with company management;*
- *Providing credit to debtors affected by Covid-19 and restructuring credit by following certain conditions;*
- *Conduct regular stress test on debtor's performance with involving aspect of Covid-19 pandemic;*
- *Regular updates on information of debtor's covenant with four-eye principle.*

v. Liquidity risk management

Liquidity risk mainly arises from the potential maturity mismatch between the Company's financial assets and liabilities. The Company manages liquidity risk by maintaining adequate reserve funds, obtaining additional borrowing facilities and by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. The Company also monitors the liquidity position against limit.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Untuk mengelola risiko likuiditas jangka pendek, Perusahaan memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelanjutan.

Profil jatuh tempo dari aset keuangan (tanpa memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai) dan liabilitas keuangan per tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. *Financial risk management objectives and policies (continued)*

v. Liquidity risk management (continued)

In managing short-term liquidity risk, the Company maintains sufficient funds to finance its ongoing working capital requirements.

The maturities profile of financial assets (without considering the allowance for impairment losses) and financial liabilities as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

31 Desember/December 31, 2021

	0-3 bulan/ 0-3 months	>3-6 bulan/ >3-6 months	>6-12 bulan/ >6-12 months	>1-3 tahun/ >1-3 years	>3-5 tahun/ >3-5 years	>5-10 tahun/ >5-10 years	>10 tahun/ >10 years	Total
Aset keuangan/ Financial assets								
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	1.352.435	-	-	-	-	-	-	1.352.435
Efek-efek/Securities	57.262	266.340	21.945	471.285	250.000	465.531	598.371	2.130.734
Investasi saham/Equity investments	-	-	-	201.902	-	-	-	201.902
Pinjaman diberikan/Loans	389.277	131.782	284.319	2.452.562	1.990.571	3.242.306	1.992.331	10.483.148
Piutang bunga/Accrued interest income	96.148	-	-	-	-	-	-	96.148
Tagihan derivatif/ Derivative receivables	2.006	-	-	208.774	-	-	-	210.780
Aset lain-lain/ Other assets	13.665	-	-	-	-	-	-	13.665
	1.910.793	398.122	306.264	3.334.523	2.240.571	3.707.837	2.590.702	14.488.812
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities								
Utang lain-lain/Other payables	4.838	-	-	-	-	-	-	4.838
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/ Accrued expenses and other liabilities	64.673	-	-	-	-	-	-	64.673
Liabilitas derivatif/ Derivative liabilities	3.102	2.209	-	21.897	30.899	-	-	58.107
Surat utang yang diterbitkan/ Debt securities issued	37.738	-	371.433	1.395.806	2.224.730	-	-	4.029.707
Pinjaman diterima/ Fund borrowings	503.890	-	372.908	1.575.844	1.295.650	-	-	3.748.292
Pinjaman subordinasi/ Subordinated loans	79.489	40.152	63.153	276.026	317.498	1.538.662	2.068.922	4.383.902
	693.730	42.361	807.494	3.269.573	3.868.777	1.538.662	2.068.922	12.289.519
Selisih jatuh tempo/ Maturity gap	1.217.063	355.761	(501.230)	64.950	(1.628.206)	2.169.175	521.780	2.199.293

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Profil jatuh tempo dari aset keuangan (tanpa memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai) dan liabilitas keuangan per tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

v. Liquidity risk management (continued)

The maturities profile of financial assets (without considering the allowance for impairment losses) and financial liabilities as of December 31, 2021 and 2020 are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2020

	0-3 bulan/ 0-3 months	>3-6 bulan/ >3-6 months	>6-12 bulan/ >6-12 months	>1-3 tahun/ >1-3 years	>3-5 tahun/ >3-5 years	>5-10 tahun/ >5-10 years	>10 tahun/ >10 years	Total
Aset keuangan/ Financial assets								
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	2.057.102	-	-	-	-	-	-	2.057.102
Efek-efek/Securities	242.160	57.295	-	776.155	286.000	470.978	639.662	2.472.250
Investasi saham/Equity investments	-	-	-	396.720	-	-	-	396.720
Pinjaman diberikan/Loans	232.123	96.345	305.140	1.763.414	1.854.033	3.617.490	1.572.830	9.441.375
Piutang bunga/Accrued interest income	86.840	-	-	-	-	-	-	86.840
Tagihan derivatif/ Derivative receivables	-	-	-	69.265	-	-	-	69.265
Aset lain-lain/ Other assets	9.475	-	-	-	-	-	-	9.475
	<u>2.627.700</u>	<u>153.640</u>	<u>305.140</u>	<u>3.005.554</u>	<u>2.140.033</u>	<u>4.088.468</u>	<u>2.212.492</u>	<u>14.533.027</u>
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities								
Utang lain-lain/Other payables	5.897	-	-	-	-	-	-	5.897
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/ Accrued expenses and other liabilities	72.409	-	-	-	-	-	-	72.409
Liabilitas derivatif/ Derivative liabilities	-	-	-	-	48.373	68.827	-	117.200
Surat utang yang diterbitkan/ Debt securities issued	31.132	-	818.729	1.603.245	282.127	-	-	2.735.233
Pinjaman diterima/ Fund borrowings	5.768	-	1.661.263	2.320.932	695.415	695.415	-	5.378.793
Pinjaman subordinasi/ Subordinated loans	62.953	38.247	58.381	254.446	292.580	1.377.750	2.072.965	4.157.322
	<u>178.159</u>	<u>38.247</u>	<u>2.538.373</u>	<u>4.178.623</u>	<u>1.318.495</u>	<u>2.141.992</u>	<u>2.072.965</u>	<u>12.466.854</u>
Selisih jatuh tempo/ Maturity gap	2.449.541	115.393	(2.233.233)	(1.173.069)	821.538	1.946.476	139.527	2.066.173

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2021
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
 RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
 (lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada *undiscounted cash flow* per tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2021

	0 - 3 bulan/ months	>3 - 6 bulan/ months	>6 - 12 bulan/ months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang lain-lain	4.838	-	-	-	4.838	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	64.673	-	-	-	64.673	Accrued expense and other liabilities
Liabilitas derivatif	3.102	2.209	-	52.796	58.107	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	51.578	35.526	459.104	3.903.866	4.450.074	Debt securities issued
Pinjaman diterima	543.401	44.632	463.780	3.193.975	4.245.788	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	114.037	48.404	171.765	6.106.196	6.440.402	Subordinated loans
Total liabilitas keuangan	781.629	130.771	1.094.649	13.256.833	15.263.882	Total financial liabilities

31 Desember/December 31, 2020

	0 - 3 bulan/ months	>3 - 6 bulan/ months	>6 - 12 bulan/ months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang lain-lain	5.897	-	-	-	5.897	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	72.409	-	-	-	72.409	Accrued expense and other liabilities
Liabilitas derivatif	-	-	-	117.200	117.200	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	79.220	48.088	895.413	2.144.512	3.167.233	Debt securities issued
Pinjaman diterima	87.066	92.493	1.821.473	4.380.702	6.381.734	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	97.068	46.072	130.995	5.869.063	6.143.198	Subordinated loans
Total liabilitas keuangan	341.660	186.653	2.847.881	12.511.477	15.887.671	Total financial liabilities

c. Nilai wajar instrumen keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan, mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang dicatat berdasarkan tingkat bunga pasar.

Asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan ditetapkan di bawah ini.

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
 RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
 (continued)**

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

v. Liquidity risk management (continued)

The remaining contractual maturities of the liabilities based on undiscounted cashflows as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

c. Fair value of financial instruments

Management believes that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the financial statements is a close estimation of their fair values, both for those that have short term maturities as well as those that carry at market rates of interest.

The significant assumptions used in determining the fair value of financial assets and liabilities are set out below.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

c. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan
posisi keuangan

Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya berasal dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

c. Fair value of financial instruments (continued)

Fair value measurements recognized in the
statement of financial position

The following table provides an analysis of financial instruments as of December 31, 2021 and 2020 that grouped into Level 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (e.g. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

31 Desember/December 31, 2021					
Nilai wajar/Fair value					
Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total/ Total	
Aset yang diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Fair value through other comprehensive income
Efek-efek	833.478	833.478	-	-	833.478 Securities
Investasi saham	201.902	201.902	-	-	201.902 Equity investments
Tagihan derivatif	208.774	-	208.774	-	208.774 Derivative receivables
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Tagihan derivatif	2.006	-	2.006	-	2.006 Derivative liabilities
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair values are disclosed
Biaya perolehan diamortisasi Efek-efek	1.295.415	1.393.086	-	-	1.393.086 Amortized cost Securities
	2.541.575	2.428.466	210.780	-	2.639.246

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

c. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

c. Fair value of financial instruments (continued)

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan
posisi keuangan (lanjutan)

Fair value measurements recognized in the
statement of financial position (continued)

31 Desember/December 31, 2021						
Nilai wajar/Fair value						
Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total/ Total		
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar					Liabilities measured at fair value	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					<i>Fair value through other comprehensive income</i>	
Liabilitas derivatif	52.796	-	52.796	-	52.796	<i>Derivative liabilities</i>
Nilai wajar melalui laba rugi					<i>Fair value through profit or loss</i>	
Liabilitas derivatif	5.311	-	5.311	-	5.311	<i>Derivative liabilities</i>
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					Liability for which fair values are disclosed	
Biaya perolehan diamortisasi Surat utang yang diterbitkan	4.029.707	4.055.363	-	-	4.055.363	<i>Amortized cost Debt securities issued</i>
	4.087.814	4.055.363	58.107	-	4.113.470	
31 Desember/December 31, 2020						
Nilai wajar/Fair value						
Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total/ Total		
Aset yang diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					<i>Fair value through other comprehensive income</i>	
Efek-efek	1.104.882	1.104.882	-	-	1.104.882	<i>Securities</i>
Investasi saham	396.720	396.720	-	-	396.720	<i>Equity investments</i>
Tagihan derivatif	69.265	-	69.265	-	69.265	<i>Derivative receivables</i>
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair values are disclosed	
Biaya perolehan diamortisasi Efek-efek	1.367.368	1.473.194	-	-	1.473.194	<i>Amortized cost Securities</i>
	2.938.235	2.974.796	69.265	-	3.044.061	
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar					Liabilities measured at fair value	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					<i>Fair value through other comprehensive income</i>	
Liabilitas derivatif	117.200	-	117.200	-	117.200	<i>Derivative liabilities</i>
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					Liability for which fair values are disclosed	
Biaya perolehan diamortisasi Surat utang yang diterbitkan	2.735.233	2.788.414	-	-	2.788.414	<i>Amortized cost Debt securities issued</i>
	2.852.433	2.788.414	117.200	-	2.905.614	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

c. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tertentu selain efek-efek yang diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi (termasuk sukuk yang diukur pada biaya perolehan) dan surat utang yang diterbitkan mendekati nilai tercatat, karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo yang singkat dan memiliki tingkat bunga sesuai pasar. Aset dan liabilitas keuangan tertentu yang tidak diukur pada nilai wajar dimana nilai wajarnya mendekati nilai tercatat, tidak diungkapkan pada tabel di atas.

Nilai wajar dari efek-efek yang diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi (termasuk sukuk yang diukur biaya perolehan) dan surat utang yang diterbitkan ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat aset keuangan atau liabilitas keuangan yang ditransfer dari/ke tingkat 2 dan/atau tingkat 3.

36. SEGMENT OPERASI

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk. Laba rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2021

	Produk investasi/ <i>Investment products</i>	Produk treasury/ <i>Treasury products</i>	Jasa advisory/ <i>Advisory services</i>	Total	
Pendapatan bunga	811.978	62.761	-	874.739	Interest income
Pendapatan provisi dan komisi	57.971	-	-	57.971	Provision and commission income
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek	-	6.138	-	6.138	Realized gain on sale of securities
Pendapatan jasa advisory	-	-	8.861	8.861	Advisory income
Kerugian yang direalisasi dari transaksi derivatif	-	(1.233)	-	(1.233)	Realized loss from derivative transaction
Kerugian yang belum direalisasi dari nilai wajar transaksi derivatif	-	(3.305)	-	(3.305)	Unrealized loss from the fair value derivative transaction
Pendapatan lainnya	15.349	-	-	15.349	Other income
Beban bunga	(545.749)	(99.493)	-	(645.242)	Interest expense

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

c. Fair value of financial instruments (continued)

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

Fair values of certain financial assets and liabilities other than securities classified as amortized cost (including sukuk at acquisition cost) and debt securities issued approximate their carrying amounts due to short-term maturities of these financial instruments and due to the interest rate is at market rate. Certain financial assets and liabilities not measured at fair value which fair values approximate their carrying amounts, are not disclosed in the aforementioned table.

The fair value of securities classified as amortized cost (including sukuk at acquisition cost) and debt securities issued is determined on the basis of quoted market price as of December 31, 2021 and 2020.

As of December 31, 2021 and 2020, there is no financial assets and financial liabilities transfer out of or into level 2 and/or level 3.

36. OPERATING SEGMENT

The Company manages its business activities and identifies its reported segments based on product categories. Profit or loss from each segment is used to measure performance of each segment information concerning the main segments as set out as follows:

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk. Laba rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut: (lanjutan)

36. OPERATING SEGMENT continued)

The Company manages its business activities and identifies its reported segments based on product categories. Profit or loss from each segment is used to measure performance of each segment information concerning the main segments as set out as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2021					
	Produk investasi/ Investment products	Produk treasuri/ Treasury products	Jasa advisory/ Advisory services	Total	
Beban umum dan administrasi	(32.515)	(33.208)	(9.653)	(75.376)	General and administrative expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(35.010)	90	36	(34.884)	Reversal for impairment losses
Beban yang tidak dapat dialokasi - neto	-	-	-	(125.246)	Unallocated expenses - net
Laba/(rugi) sebelum beban pajak	272.024	(68.250)	(756)	77.772	Profit/(loss) before tax expense

31 Desember/December 31, 2020					
	Produk investasi/ Investment products	Produk treasuri/ Treasury products	Jasa advisory/ Advisory services	Total	
Pendapatan bunga	752.808	107.120	-	859.928	Interest income
Pendapatan provisi dan komisi	33.700	-	-	33.700	Provision and commission income
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek	-	7.562	-	7.562	Realized gain on sale of securities
Pendapatan jasa advisory	-	-	9.388	9.388	Advisory income
Pendapatan lainnya	4.681	-	-	4.681	Other income
Beban bunga	(506.770)	(98.575)	-	(605.345)	Interest expense
Beban umum dan administrasi	(29.725)	(39.583)	(10.258)	(79.566)	General and administrative expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(51.730)	992	132	(50.606)	Provision for impairment losses
Beban yang tidak dapat dialokasi - neto	-	-	-	(108.501)	Unallocated expenses - net
Laba/(rugi) sebelum beban pajak	202.964	(22.484)	(738)	71.241	Profit/(loss) before tax expense

37. LABA PER SAHAM

Berikut adalah perhitungan laba bersih per saham dasar:

37. INCOME PER SHARE

The following presents the computations of basic income per share:

31 Desember/December 31,				
	Laba bersih tahun berjalan/ Net income for the year	Rata-rata Tertimbang jumlah saham dasar/ Weighted average number of ordinary shares outstanding	Laba per saham/ Income per share (Dalam ribuan Rupiah/ In thousands of Rupiah)	
Tahun				Years
2021	53.027	2.000.000	26	2021
2020	42.510	2.000.000	21	2020

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK NO. 71 DAN NO. 73

PSAK No. 71

Klasifikasi dan pengukuran Aset Keuangan

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2.a, Perusahaan menerapkan PSAK No. 71 sejak tanggal 1 Januari 2020. Pengaruh atas perubahan pada kebijakan akuntansi pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Efek-efek dengan nilai tercatat sebesar Rp825.574 tidak memenuhi kriteria model bisnis *hold-to-collect* sehingga direklasifikasikan dari aset keuangan yang diukur pada nilai perolehan diamortisasi menjadi *hold-to-collect and sell*.

Perbedaan yang dihasilkan sebesar Rp18.515 (neto setelah pajak) dikreditkan ke saldo awal penghasilan komprehensif lain pada tanggal 1 Januari 2020.

- b. Manajemen memutuskan bahwa investasi saham dengan nilai tercatat sebesar Rp389.636 yang semula diukur pada nilai wajar melalui laba rugi direklasifikasikan menjadi diukur nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain

Efek atas perubahan pada klasifikasi dan pengukuran pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

	PSAK/SFAS No. 55		PSAK/SFAS No. 71		
	Klasifikasi/ <i>Classification</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	Klasifikasi/ <i>Classification</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Aset keuangan					Financial assets
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	2.429.067	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	2.428.868	Cash and cash equivalents - net
Kas dan setara kas - neto					
	Dimiliki hingga jatuh tempo/ <i>Held-to-maturity</i>	1.392.077	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	1.386.429	Securities - net
Efek-efek - neto					
	Dimiliki hingga jatuh tempo/ <i>Held-to-maturity</i>	803.243	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Financial assets at fair value through other comprehensive income</i>	825.574	Securities - net
Efek-efek - neto					

38. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS NO. 71 AND NO. 73

SFAS No. 71

Classification and measurement of Financial Assets

As described in Note 2.a, the Company adopted SFAS No. 71 as of January 1, 2020. The effect of this change in accounting policy on the financial statements are as follows:

- a. *Securities with carrying amount of Rp825,574 has failed the criteria of hold-to-collect business model and, therefore, has been reclassified from financial asset measured at amortized cost to hold-to-collect and sell.*

The resulting difference of Rp18,515 (net of tax) was credited to the opening balance of other comprehensive income as of January 1, 2020.

- b. *Management decided that equity investments amounted to Rp389,636 which was initially measured at fair value through profit or loss would be reclassified as measured at fair value through other comprehensive income.*

The effect of changes in classification and measurement as of January 1, 2020 are as follows:

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**38. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK NO. 71 DAN
NO. 73 (lanjutan)**

PSAK No. 71 (lanjutan)

**Klasifikasi dan pengukuran Aset Keuangan
(lanjutan)**

**38. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS
NO. 71 AND NO. 73 (continued)**

SFAS No. 71 (continued)

**Classification and measurement of Financial
Assets (continued)**

	PSAK/SFAS No. 55		PSAK/SFAS No. 71		
	Klasifikasi/ Classification	Jumlah/ Amount	Klasifikasi/ Classification	Jumlah/ Amount	
Aset keuangan (lanjutan)					Financial assets (continued)
Efek-efek - neto	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	259.706	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	259.706	Securities - net
Efek-efek - neto	Aset tersedia untuk dijual/ Assets available- for-sale	277.910	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Financial assets at fair value through other comprehensive income	277.910	Securities - net
Investasi saham	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi/ Assets at fair value through profit or loss	389.636	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Financial assets at fair value through other comprehensive income	389.636	Equity Investments
Pinjaman diberikan - neto	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	6.232.662	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	6.213.517	Loans - net
Piutang bunga	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	62.905	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	62.905	Accrued interest income
Tagihan derivatif	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi/ Assets at fair value through profit or loss	44.290	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Financial assets at fair value through other comprehensive income	44.290	Derivative receivables

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2021
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

38. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK NO. 71 DAN NO. 73 (lanjutan)

38. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS NO. 71 AND NO. 73 (continued)

PSAK No. 71 (lanjutan)

SFAS No. 71 (continued)

Klasifikasi dan pengukuran Aset Keuangan (lanjutan)

Classification and measurement of Financial Assets (continued)

	PSAK/SFAS No. 55		PSAK/SFAS No. 71		
	Klasifikasi/ Classification	Jumlah/ Amount	Klasifikasi/ Classification	Jumlah/ Amount	
Aset keuangan (lanjutan)					Financial assets (continued)
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables		Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost		
Aset lain-lain - neto		12.737		12.737	Other assets - net
		<u>11.904.233</u>		<u>11.901.572</u>	

Penurunan Nilai Instrumen Keuangan

Impairment of Financial Instruments

Cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dihitung kembali sesuai dengan ketentuan transisi PSAK No. 71 pada tanggal 1 Januari 2020 dan perbedaan yang dihasilkan sejumlah Rp22.563 didebitkan ke saldo awal laba pada tanggal 1 Januari 2020.

The allowance for impairment losses for financial instruments was recalculated in accordance with transitional provisions of SFAS No. 71 as of January 1, 2020 and the resulting difference of Rp22,563 was debited to the retained earnings balance as of January 1, 2020.

Berikut ini menggambarkan dampak atas transisi PSAK No. 71 pada laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020:

The following reflects the effect that the transition to SFAS No. 71 has had on the statement of financial position as of January 1, 2020:

	Saldo sebelum penerapan PSAK No.71/ Balance before adoption of SFAS No.71	Klasifikasi dan pengukuran/ Classification and measurement	Kerugian kredit ekspektasian/ Expected credit losses	Saldo setelah penerapan PSAK No.71/ Balance after adoption of SFAS No.71	
ASET					ASSETS
Kas dan setara kas	2.429.067	-	(199)	2.428.868	Cash and cash equivalents
Efek-efek - neto	2.732.936	19.569	(2.886)	2.749.619	Securities - net
Investasi saham	389.636	-	-	389.636	Equity investments
Pinjaman diberikan - neto	6.232.662	-	(19.145)	6.213.517	Loans - net
Tagihan derivatif	44.290	-	-	44.290	Derivative receivables
Piutang bunga	62.905	-	-	62.905	Accrued interest income
Beban dibayar dimuka	8.593	-	-	8.593	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	449	-	-	449	Prepaid taxes
Aset tetap - neto	293.507	-	-	293.507	Property and equipment - net
Aset pajak tangguhan	86.735	(896)	5.641	91.480	Deferred tax assets
Beban tangguhan	3.658	-	-	3.658	Deferred charges
Aset lain-lain - neto	26.622	-	-	26.622	Other assets - net
TOTAL ASET	12.311.060	18.673	(16.589)	12.313.144	TOTAL ASSETS

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**38. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK NO. 71 DAN
NO. 73 (lanjutan)**

PSAK No. 71 (lanjutan)

**Klasifikasi dan pengukuran Aset Keuangan
(lanjutan)**

Penurunan Nilai Instrumen Keuangan (lanjutan)

	Saldo sebelum penerapan PSAK No.71/ Balance before adoption of SFAS No.71	Klasifikasi dan pengukuran/ Classification and measurement	Kerugian kredit ekspek- tasian/ Expected credit losses	Saldo setelah penerapan PSAK No.71/ Balance after adoption of SFAS No.71
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas derivatif	39.670	-	-	39.670
Utang lain-lain	8.728	-	-	8.728
Utang pajak	1.676	-	-	1.676
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	37.985	-	-	37.985
Pendapatan diterima dimuka	4.388	-	-	4.388
Liabilitas imbalan kerja	26.327	-	-	26.327
Pinjaman diterima	4.713.745	-	-	4.713.745
Surat utang yang diterbitkan	2.183.064	-	-	2.183.064
Pinjaman subordinasi	3.142.918	-	-	3.142.918
TOTAL LIABILITAS	10.158.501	-	-	10.158.501
EKUITAS				
Modal saham	2.000.000	-	-	2.000.000
Tambahan modal disetor	29.800	-	-	29.800
Penghasilan komprehensif lain - neto	5.336	18.515	333	24.184
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(29.752)	-	-	(29.752)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	26.465	-	-	26.465
Belum ditentukan penggunaannya	120.710	158	(16.922)	103.946
TOTAL EKUITAS	2.152.559	18.673	(16.589)	2.154.643
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12.311.060	18.673	(16.589)	12.313.144

PSAK No. 73

Berikut adalah dampak transisi PSAK No. 73 pada laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020:

	Saldo sebelum penerapan PSAK No. 73/ Balance before adoption of SFAS No. 73	Dampak PSAK No. 73/ Impact of SFAS No. 73	Saldo setelah penerapan PSAK No. 73/ Balance after adoption of SFAS No. 73
Aset hak-guna	-	1.295	1.295
Utang lain-lain	-	1.295	1.295
Utang sewa	-	1.295	1.295

**38. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS
NO. 71 AND NO. 73 (continued)**

SFAS No. 71 (continued)

**Classification and measurement of Financial
Assets (continued)**

Impairment of Financial Instruments (continued)

	Saldo sebelum penerapan PSAK No.71/ Balance after adoption of SFAS No.71
LIABILITIES AND EQUITY	
Derivative liabilities	39.670
Other payables	8.728
Taxes payable	1.676
Accrued expenses and other liabilities	37.985
Unearned revenue	4.388
Employee benefits obligation	26.327
Fund borrowings	4.713.745
Debt securities issued	2.183.064
Subordinated loans	3.142.918
TOTAL LIABILITIES	10.158.501
EQUITY	
Capital stock	2.000.000
Additional paid-in-capital	29.800
Other comprehensive income - net	24.184
Cumulative loss on derivative instruments for cash flow hedges - net	(29.752)
Retained earnings	
Appropriated	26.465
Unappropriated	103.946
TOTAL EQUITY	2.154.643
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	12.313.144

SFAS No. 73

The following reflects the transition impact of SFAS No. 73 on the statement of financial position as of January 1, 2020:

Right-of-use assets
Other payables
Lease liabilities

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Aktivitas investasi dan pendanaan non-kas adalah sebagai berikut:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember/
Year Ended December 31,

	2021	2020
Kenaikan aset lain-lain dari beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	205	1.349
Kenaikan aset tetap dari beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	705	2.635

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2021	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange	Lainnya/ Others	31 Desember/ December 31, 2021	
Surat utang yang diterbitkan	2.735.233	1.269.785	50.031	(25.342)	4.029.707	Debt securities issued
Pinjaman diterima	5.378.793	(1.650.000)	16.400	3.099	3.748.292	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	4.157.322	183.161	28.862	14.557	4.383.902	Subordinated loans
	12.271.348	(197.054)	95.293	(7.686)	12.161.901	
	1 Januari/ January 1, 2020	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange	Lainnya/ Others	31 Desember/ December 31, 2020	
Surat utang yang diterbitkan	2.183.064	535.000	-	17.169	2.735.233	Debt securities issued
Pinjaman diterima	4.713.745	650.000	20.400	(5.352)	5.378.793	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	3.142.918	967.771	41.639	4.994	4.157.322	Subordinated loans
	10.039.727	2.152.771	62.039	16.811	12.271.348	

39. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Non-cash investing and financing activities are as follows:

Increase in other assets through accrued expense and other liabilities
Increase in property and equipment through accrued expense and other liabilities

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

40. PENYELESAIAN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 15 Februari 2022.

40. COMPLETION AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS


The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Board of Directors of the Company on February 15, 2022.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank


ENHANCING CONNECTIVITY THROUGH SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT




PT Indonesia Infrastructure Finance


 Prosperity Tower Floor 53rd-55th
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

CONTACTS

 (62-21) 5082 6600
(62-21) 5082 6601

 info@iif.co.id

 Indonesia Infrastructure Finance

 @pt_IIF